



Meningkatkan Pertumbuhan Melalui Inovasi dan Digitalisasi

Enhancing Growth Through Innovation and Digitalization

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Disclaimer and Scope of Responsibility

Laporan Tahunan 2024 PT Bank Artha Graha Internasional Tbk ini disusun untuk memenuhi ketentuan pelaporan hasil kinerja Bank periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 kepada Regulator sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Sedangkan muatan konten pada laporan ini disesuaikan dengan kriteria yang terdapat pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan terkait tujuan, kebijakan, rencana, strategi, serta hasil operasi dan keuangan yang disusun berdasarkan data faktual yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, Laporan Tahunan ini juga menyajikan informasi terkait proyeksi Bank di tahun selanjutnya yang disusun berdasarkan pernyataan-pernyataan prospektif dan berbagai asumsi mengenai kondisi mendatang Bank, serta lingkungan bisnis yang terkait, sehingga dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Oleh karena itu, Bank mengimbau agar Pemangku Kepentingan dapat menggunakan informasi tersebut secara bijak dalam pengambilan keputusan.

Laporan Tahunan ini memuat kata “Bank Artha Graha Internasional” dan “Bank” yang didefinisikan sebagai PT Bank Artha Graha Internasional Tbk yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa perbankan. Adakalanya kata “BAGI”, “Kami” dan “Perusahaan/Perseoran” juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Bank Artha Graha Internasional Tbk secara umum. Penyebutan satuan mata uang “Rupiah”, “Rp” atau “IDR” merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan “Dolar AS” atau “USD” merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Laporan dibuat dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat dua pengertian/makna, maka bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia. Selain dalam edisi cetak, laporan serupa dapat diakses melalui situs resmi Bank <https://www.arthagraha.com/>.

PEMBERITAHUAN TABEL DAN GRAFIK

Tabel dan grafik pada Laporan Tahunan ini memaparkan data numerik dengan standar penulisan mengikuti kaidah Bahasa Indonesia. Pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar kaidah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai konteks.

The 2024 Annual Report of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk is prepared to comply with the provisions of reporting the Bank's performance results for the period January 1 to December 31, 2024 to the Regulator in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies. Meanwhile, the content of this report is adjusted to the criteria contained in the Circular Letter of the Financial Services Authority No. 9/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies.

This Annual Report contains statements related to objectives, policies, plans, strategies, as well as operating and financial results prepared based on factual data that can be accounted for. In addition, this Annual Report also presents information related to the Bank's projections for the following year, which are prepared based on prospective statements and various assumptions regarding the Bank's future conditions, as well as the related business environment, which may result in actual developments being materially different from those reported. Therefore, the Bank urges Stakeholders to use this information wisely in making decisions.

This Annual Report contains the terms “Bank Artha Graha Internasional” and “Bank,” which are defined as PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, a company engaged in banking services. The terms “BAGI”, “We” and “Company” or “Corporation” are also used interchangeably for ease of reference to PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. The terms “Rupiah,” “Rp,” or “IDR” refer to the official currency of the Republic of Indonesia, while “US Dollar” or “USD” refers to the official currency of the United States. All financial information is presented in Rupiah.

This report is prepared in two languages: Indonesian and English. In the event of any differences in interpretation or meaning, the Indonesian version shall prevail. In addition to the printed edition, the report is also available on the Bank's official website at <https://www.arthagraha.com/>.

NOTIFICATION OF TABLES AND GRAPHS

Tables and graphs in this Annual Report present numerical data with writing standards following Indonesian language rules. Numerical presentation in the text uses standard Indonesian and English rules according to context.

PENJELASAN TEMA

Theme Explanation

2024



Meningkatkan Pertumbuhan Melalui Inovasi dan Digitalisasi

Enhancing Growth Through
Innovation and Digitalization

Kondisi usaha kini dan ke depan akan terus diwarnai dengan beragam tantangan dan kendala yang harus diatasi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pelaku bisnis, perbankan maupun pemerintah. Salah satu tantangan, sekaligus peluang yang harus diantisipasi dengan sigap adalah meningkatnya volume maupun nilai transaksi digital di berbagai segmen usaha berkat berkembangnya kebutuhan akan transaksi yang dapat dilakukan kapan saja, dimana saja dan dapat diandalkan.

Bank Artha Graha Internasional (BAGI) hadir menyediakan seluruh sarana maupun layanan perbankan digital, yang senantiasa tanggap dalam mengantisipasi perkembangan kebutuhan Nasabah dan memberi solusi tepat guna sesuai kebutuhan dan perkembangan terkini.

Kini dan kedepan, BAGI senantiasa siap untuk menjalin kolaborasi dan sinergi bersama para Nasabah, mengatasi tantangan serta meraih peluang pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan dengan dukungan layanan digital banking yang inovatif dan terpercaya.

The current and future business environment will continue to be marked by a variety of challenges and obstacles that must be addressed collectively by all stakeholders—including business actors, the banking sector, and the government. One of the key challenges, which also presents a significant opportunity, is the rising volume and value of digital transactions across various business segments. This growth is driven by the increasing demand for transaction services that are reliable, accessible anytime and anywhere.

Bank Artha Graha Internasional (BAGI) is committed to providing a full range of digital banking facilities and services, consistently responsive to the evolving needs of Customers and offering effective, up-to-date solutions.

Now and in the future, BAGI remains fully prepared to build collaboration and synergy with its Customers, overcome challenges, and seize opportunities for high-quality and sustainable growth-supported by innovative and trusted digital banking services.



2023

Memperkuat Kolaborasi Menghadirkan Solusi

Strengthening Collaboration to Deliver Solutions

Untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis, Bank Artha Graha Internasional (BAGI) memperkuat sinergi dan kolaborasi, baik internal maupun eksternal. Hal tersebut dimaksudkan agar BAGI dapat memberikan solusi yang tepat sesuai kebutuhan Nasabah yang semakin beragam. BAGI fokus dalam pengembangan layanan perbankan yang inklusif dan pengembangan *digital banking* sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing Bank di tengah tingkat kompetisi yang semakin meningkat.

To accelerate business growth, Bank Artha Graha Internasional (BAGI) is strengthening synergy and collaboration, both internal and external. This is intended so that BAGI can provide the right solutions according to the increasingly diverse needs of Customers. BAGI focuses on developing inclusive banking services and digital banking development as an effort to increase the Bank's competitiveness amidst the increasing level of competition.

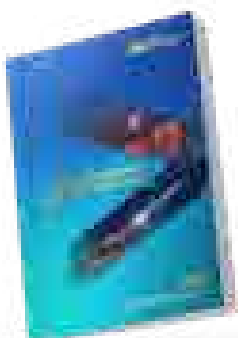


2022

Accelerating Business Through Synergy and Collaboration

Bank Artha Graha Internasional (BAGI) terus berupaya untuk meningkatkan kinerja bisnisnya di tengah tingkat persaingan industri perbankan yang semakin ketat. Untuk itu, BAGI berupaya untuk memperluas segmen pasar dengan memasuki segmen-segmen baru. Untuk mempermudah penetrasi di segmen baru, BAGI membangun sinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak mitra.

Bank Artha Graha Internasional (BAGI) strives to improve its business performance amidst the increasingly fierce competition in the banking industry. For this reason, BAGI strives to expand the market by entering new segments. To facilitate penetration in new segments, BAGI builds synergies and collaborates with various partners.



2021

Moving Forward Thru Digitalization

Layanan *mobile banking* terus dikembangkan dan disempurnakan melalui penggunaan *platform digital* beserta layanan *Application Programming Interface (API)* yang terintegrasi dengan pelaku teknologi finansial guna meningkatkan layanan perbankan digital sekaligus meningkatkan *fee-based income*. Selanjutnya, Bank melakukan akuisisi Nasabah baru melalui pengembangan *channel* Bank maupun penguatan layanan API. Akselerasi transformasi digital tersebut ditempuh untuk mewujudkan layanan *mobile banking* Bank sebagai *one-stop financial solutions* yang memutamakan kebutuhan Nasabah untuk mendapatkan layanan finansial dan non-finansial.

Mobile banking services continue to be developed and enhanced through digital platforms and Application Programming Interface (API) services that are integrated with financial technology players to enhance digital banking services while increasing fee-based income. Furthermore, the Bank acquired new Customers through the development of Bank channels and strengthening API services. The acceleration of digital transformation was performed to realize the Bank's mobile banking services as a one-stop financial solution that prioritizes customer needs for financial and non-financial services.



2020

Memperkuat Sinergi, Meningkatkan Layanan

Bank Artha Graha Internasional terus berupaya untuk memberikan layanan perbankan yang terbaik kepada seluruh Nasabahnya. Untuk itu, selain terus meningkatkan kapasitas internal, Bank juga menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang dapat membantu Bank mewujudkan tujuan tersebut.

Bank Artha Graha Internasional strives to provide the best banking services to all its Customers. For this reason, in addition to continuing to increase internal capacity, The Bank also collaborated with third parties that could help the Bank achieve this goal.



2019

Pertumbuhan Berkualitas di Era Digital

Bank Artha Graha Internasional senantiasa mengutamakan pertumbuhan yang berkualitas. Pencapaian rencana kerja dan strategi usaha yang berorientasi kepada pemenuhan harapan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan menjadi prioritas. Hal ini khususnya difokuskan kepada optimalisasi pengembangan usaha yang sesuai dengan tantangan digitalisasi dan keberlanjutan sehingga Bank dapat memenangkan persaingan di industri perbankan Indonesia.

Bank Artha Graha Internasional always prioritizes quality growth. Achievement of work plans and business strategies oriented towards meeting the expectations of Shareholders and Stakeholders is a priority. This is particularly focused on optimizing business development in accordance with the challenges of digitalization and sustainability so that the Bank can win the competition in the Indonesian banking industry.

PENCAPAIAN PENTING 2024

Significant Achievements in 2024

Penerapan berbagai inisiatif strategis yang efektif bersamaan dengan upaya intensifikasi kolaborasi bersama para mitra strategis yang berfokus pada pengembangan layanan inovatif berbasis teknologi digital terkini, membuat Bank Artha Graha Internasional mencatatkan sejumlah kinerja yang membuat fondasi keuangan terus menguat.

The implementation of various effective strategic initiatives, alongside intensified collaboration with strategic partners focused on the development of innovative services based on the latest digital technologies, has enabled Bank Artha Graha Internasional to achieve strong performance outcomes that continue to strengthen its financial foundation.

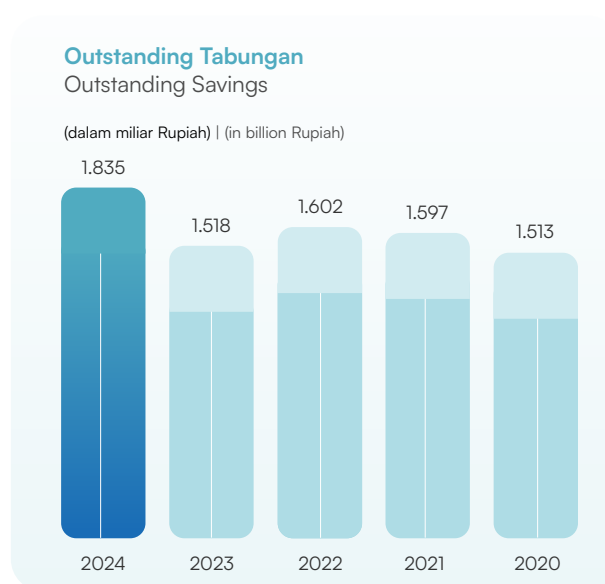
Melalui dukungan layanan perbankan inovatif yang telah dikembangkan mengikuti pesatnya transaksi digital, Bank Artha Graha Internasional berhasil mendorong meningkatnya transaksi digital melalui kerjasama dari mitra strategis pengelola marketplace maupun merchant retail secara signifikan. Hasilnya, Bank Artha Graha Internasional membukukan kenaikan fee based digital banking secara signifikan hingga lebih dari 500%.

Through the support of innovative banking services developed in response to the rapid growth of digital transactions, Bank Artha Graha Internasional has successfully driven a significant increase in digital transactions by partnering with strategic marketplace operators and retail merchants. As a result, the Bank recorded a substantial increase in digital banking fee-based income-exceeding 500%.

Deskripsi Description	Satuan Unit	2024	2023	Growth (%) Growth (%)
Frekuensi Transaksi MB MB Transaction Frequency	Kali Times	4.136.789	2.850.217	45,1
Nilai Transaksi MB MB Transaction Value	Rp Juta Million Rp	6.681.710	4.863.363	37,4
Fee Based Digital Banking BAGI Fee Based Digital Banking BAGI	Rp Juta Million Rp	93.996	14.678	540,4

Akuisisi Nasabah pelaku bisnis mikro, UMKM maupun perseorangan yang semakin intensif, membuat *outstanding* tabungan, salah satu komponen CASA dengan mobilitas yang paling rendah terus meningkat berkelanjutan. Inisiatif dalam mendorong peningkatan CASA, antara lain melalui program CASA (Hold Dana 5,1%), kerjasama TNI POLRI, serta kerjasama digital melalui *floating fund* milik mitra strategis, memberi dukungan bagi berkembangnya penyaluran kredit mikro dengan kualitas yang terjaga secara berkelanjutan.

The intensified acquisition of Customers from the micro, SME, and individual business segments has driven a continuous increase in savings account balances-one of the CASA components with the lowest mobility. This growth has supported the expansion of micro lending while maintaining sustainable credit quality. Initiatives to boost CASA include the CASA Program (5.1% Fund Holding), partnerships with the Indonesian National Armed Forces (TNI) and National Police (POLRI), as well as digital collaborations through floating funds from strategic partners.



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Award and Certifications



31 Juli 2024 | July 31, 2024

Indonesia Best Bank Awards 2024

Indonesia Best Bank Awards 2024 diselenggarakan oleh Warta Ekonomi. Tema penyelenggaraan kesembilan ini adalah "Accelerating Financial Stability with Digitalization Priorities". Tujuan penghargaan ini adalah untuk mendorong stabilitas kinerja, inovasi, dan pembangunan ekonomi Indonesia.

BAGI mendapatkan penghargaan pada kategori Indonesia Best Bank 2024 for Optimizing Digital Platforms Development and Managing Big Data.

The Indonesia Best Bank Awards 2024 was organized by Warta Ekonomi. The theme of this ninth edition is "Accelerating Financial Stability with Digitalization Priorities." The award aims to encourage performance stability, innovation, and the economic development of Indonesia.

BAGI received an award in the category of Indonesia Best Bank 2024 for Optimizing Digital Platforms Development and Managing Big Data.



23 Agustus 2024 | August 23, 2024

Indonesia Best Digital Finance Awards 2024

Indonesia Best Digital Finance Award 2024, dengan tema "Prioritizing Access to Digital Services and Cybersecurity Assurance" merupakan ajang penghargaan dengan harapan bahwa perusahaan yang terlibat mampu meningkatkan kinerja keuangan dan memberikan kontribusinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui inovasi digital.

BAGI mendapatkan penghargaan pada kategori Enhancing Service Quality through Comprehensive Digital Innovation.

The Indonesia Best Digital Finance Award 2024, themed "Prioritizing Access to Digital Services and Cybersecurity Assurance," is an award event aimed at encouraging participants to enhance their financial performance and contribute to economic growth through digital innovation.

BAGI received an award in the category of Enhancing Service Quality through Comprehensive Digital Innovation.



24 Oktober 2024 | October 24, 2024

Prima Awards 2024

Prima Awards 2024 in Collaboration with Infobank adalah Penghargaan yang diselenggarakan oleh Prima Awards dan InfoBank. Penghargaan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi berdasarkan volume transaksi. Terdapat 66 kriteria penilaian yang ditentukan berdasarkan Volume Transaksi di Jaringan Prima dengan data perhitungan transaksi periode waktu Juli 2023 sampai Juni 2024.

BAGI mendapatkan penghargaan pada kategori Best Acquirer Bank (All Features).

Prima Awards 2024 in Collaboration with Infobank is an award organized by Prima Awards and Infobank. The award aims to give recognition based on transaction volume. A total of 66 assessment criteria are determined based on transaction volumes within the Prima Network, using transaction data from the period of July 2023 to June 2024.

BAGI was awarded in the Best Acquirer Bank (All Features) category.



29 November 2024 | November 29, 2024

BI Award 2024

BI Awards 2024 disampaikan dalam rangkaian acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024. Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi perusahaan yang berkontribusi dalam memajukan ekonomi nasional melalui berbagai layanan.

BAGI mendapatkan penghargaan pada kategori Peserta SKNBI dan KPDHN Terbaik Bank KBMI 1 dan 2.

The BI Awards 2024 were presented as part of the 2024 Bank Indonesia Annual Meeting (PTBI). This award recognizes companies that have contributed to advancing the national economy through various services.

BAGI received an award in the category of Best SKNBI and KPDHN Participant among KBMI 1 and 2 Banks.



29 Mei 2023 - 28 Mei 2026 | May 29, 2023 - May 28, 2026

Sertifikasi ISO/IEC 27001:2013

Sesuai dengan ketentuan dari ISO 27001, semua lembaga pemilik Sertifikasi ISO 27001 wajib melakukan audit *surveillance* setiap tahun, maka di tahun 2024 telah dilakukan audit *surveillance* oleh Bureau Veritas sebagai otoritas yang mengeluarkan sertifikat ISO 27001 pada tanggal 7-8 Mei 2024 dengan hasil tidak adanya temuan audit, dan mendapatkan rekomendasi untuk melakukan upgrade di tahun 2025 dari ISO 27001:2013 menjadi ISO 27001:2022.

Audit *surveillance* ini untuk melakukan verifikasi dan validasi bahwa semua proses kerja yang di lakukan masih sesuai dengan Kebijakan Prosedur yang sesuai dengan ketentuan ISO 27001.

In accordance with the provisions of ISO 27001, all institutions holding ISO 27001 Certification are required to undergo an annual surveillance audit. In 2024, a surveillance audit was conducted by Bureau Veritas, the certifying authority, on May 7-8, 2024. The audit resulted in no findings and a recommendation to upgrade the certification in 2025 from ISO 27001:2013 to ISO 27001:2022

This surveillance audit serves to verify and validate that all operational processes remain in compliance with procedural policies as stipulated by ISO 27001 requirements.

DAFTAR ISI

Table of Contents

2	Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Scope of Responsibility
3	Penjelasan Tema Theme Explanation
4	Kesinambungan Tema Theme Continuity
6	Pencapaian Penting 2024 Significant Achievements in 2024
8	Penghargaan dan Sertifikasi Award and Certifications
10	Daftar isi Table of Contents

BAB 1 - Kilas Kinerja | Performance Highlights

16	Ikhtisar Data Keuangan Key Financial Highlights
23	Ikhtisar Operasional Operational Highlights
24	Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance Overview
26	Ikhtisar Saham Share Highlights
29	Ikhtisar Efek Lainnya Other Highlights on Securities
30	Peristiwa Penting Significant Events

BAB 2 - Laporan Manajemen | Management Report

40	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report
54	Laporan Direksi Board of Directors Report

BAB 3 - Profil Perusahaan | Company Profile

72	Identitas Perusahaan Corporate Identity
74	Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Values
76	Logo Perusahaan Company Logo
77	Riwayat Singkat Perusahaan Brief Company History
80	Jejak Langkah Milestone
83	Kegiatan Usaha Business Activities
85	Produk dan Jasa Product and Services
92	Peta Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi Maps of Business Network and Operational Area
95	Jumlah Kantor Berdasarkan Jenis Kantor Number of Offices by Office Type
96	Keanggotaan dalam Asosiasi Association Membership
98	Struktur Organisasi Organizational Structure
100	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile
104	Profil Direksi Board of Directors Profile
109	Pejabat Eksekutif Executive Officials
117	Demografi Karyawan Employee Demographics
120	Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Shareholder Structure and Composition
123	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham Chronology of Share Issuances and/or Listings
125	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Issuance and/or Listing of Other Securities
126	Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions and/or Professions
127	Website Bank Bank's Website
128	Alamat Kantor Cabang & Kantor Cabang Pembantu Addresses of Branch Offices & Sub-Branch Offices

BAB 4 - Analisis dan Pembahasan Manajemen | Management Discussion and Analysis

136	Tinjauan Ekonomi dan Industri <i>Economic and Industry Review</i> • Analisis Ekonomi Global <i>Global Economic Analysis</i> • Analisis Ekonomi Indonesia <i>Indonesia Economic Analysis</i> • Analisis Industri Perbankan <i>Banking Industry Analysis</i>
141	Strategi Bank Artha Graha Internasional 2024 <i>Bank Artha Graha Internasional Strategy In 2024</i>
146	Tinjauan Operasional <i>Operational Review</i> • Aspek Pemasaran <i>Marketing Aspects</i> • Pangsa Pasar <i>Market Share</i>
148	Prospek Usaha dan Strategi Pengembangan Bisnis <i>Business Prospects and Development Strategy</i>
151	Tinjauan Per Segmen Operasi <i>Operating Segment Review</i>
156	Tinjauan Keuangan <i>Financial Review</i>
190	Tinjauan Pendukung Bisnis <i>Business Support Review</i>
190	Human Capital <i>Human Capital</i>
197	Teknologi Informasi dan Perbankan Digital <i>Information Technology and Digital Banking</i>

BAB 5 - Tata Kelola Perusahaan | Corporate Governance

208	Komitmen, Dasar Penerapan, dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan <i>Commitment, Foundation Implementation, and Principles of Corporate Governance</i>
208	Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan <i>Basis for Corporate Governance Implementation</i>
214	Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup Perusahaan <i>Developments in the Implementation of Good Corporate Governance within the Company</i>
217	Struktur dan Proses Tata Kelola <i>Governance Structure and Process</i>
220	Rapat Umum Pemegang Saham <i>General Meeting of Shareholders</i>

233	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>
246	Direksi <i>Board of Directors</i>
261	Dewan Pengawas Syariah <i>Sharia Supervisory Board</i>
261	Kebijakan Pengungkapan Informasi dan Benturan Kepentingan <i>Information Disclosure and Conflict of Interest Policy</i>
263	Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Concurrent Positions of Board of Commissioners and Board of Directors</i>
265	Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Affiliate Relationship between of Board of Commissioners and Board of Directors</i>
267	Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi <i>Diversity Policy of Board of Commissioners and Board of Directors</i>
268	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi <i>Performance Assessment of Board of Commissioners and Directors</i>
269	Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris <i>Remuneration and Nomination of Board of Directors and Board of Commissioners</i>
279	Organ Pendukung Dewan Komisaris <i>Supporting Organs of the Board of Commissioners</i>
279	Komite Audit <i>Audit Committee</i>
292	Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Remuneration and Nomination Committee</i>
299	Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee</i>
306	Organ Pendukung Direksi <i>Supporting Organs of Board of Directors</i>
306	Komite Kredit <i>Credit Committee</i>
311	Komite Asset dan Liabilitas <i>Assets and Liabilities Committee</i>
315	Komite Manajemen Risiko <i>Risk Management Committee</i>
320	Komite Pengarah Teknologi Informasi <i>Information Technology Steering Committee</i>
325	Komite Human Capital <i>Human Capital Committee</i>
330	Komite Kebijakan Perkreditan <i>Credit Policy Committee</i>

333	Komite Produk <i>Product Committee</i>
337	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>
342	Internal Audit <i>Internal Audit</i>
349	Akuntan Publik <i>Public Accountant</i>
351	Fungsi Kepatuhan <i>Compliance Function</i>
354	Program APU, PPT & PPPSPM <i>AML, CTF & PF-WMD Program</i>
357	Sistem Pengendalian Internal <i>Internal Control System</i>
360	Perkara Hukum <i>Legal Cases</i>
360	Sanksi Administratif <i>Administrative Sanction</i>
361	Akses Informasi dan Data Perusahaan <i>Access to Company Information and Data</i>
364	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan <i>Transparency of Company's Financial and Non-Financial Conditions</i>
365	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Politik <i>Provision of Funds for Social and/or Political Activities</i>
365	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait <i>Provision of Funds to Related Parties</i>
366	Pelanggaran (Fraud) Internal <i>Internal Fraud</i>
367	Kode Etik <i>Code of Conduct</i>
370	Sistem Pelaporan Pelanggaran <i>Whistleblowing System</i>
374	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi <i>Integrated Governance Implementation Report</i>
374	Pemenuhan Penyampaian Laporan Keberlanjutan 2024 <i>Fulfillment of 2024 Sustainability Report Submission</i>
376	Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris <i>Disclosure of Share Ownership of Members of Board of Directors and Commissioners</i>
376	Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja kepada Manajemen dan/atau Karyawan <i>Provision of Long-term Performance Based Compensation to Management and/or Employees</i>
376	Kebijakan Anti Fraud <i>Anti-Fraud Policy</i>
376	Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa <i>Goods and Services Procurement Policy</i>

377	Pembelian Kembali Saham dan/atau Obligasi Bank <i>Repurchase of Bank Shares and/or Bonds</i>
377	Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan <i>Related Party Transactions and Conflicts of Interest</i>
378	Rencana Korporasi Bank <i>Bank Corporate Plan</i>
379	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi <i>Integrity of Reporting and Information Technology Systems</i>
380	Strategi Anti Fraud, Anti Penyuapan dan Gratifikasi <i>Anti-Fraud, Anti-Bribery, and Gratification Strategy</i>
380	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka <i>Implementation of Public Company Governance Guidelines</i>
392	Transparansi Praktik Bad Governance <i>Transparency of Bad Governance Practices</i>
393	Permodalan dan Manajemen Risiko <i>Capital and Risk Management</i>
405	Pengungkapan Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko <i>Disclosure of Risk Exposure and Implementation of Risk Management</i>
418	Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Perusahaan <i>Overview of the Bank's Management System Effectiveness</i>

BAB 6 - Tanggung Jawab Sosial Pengamanan Perusahaan | Corporate Social Safety Responsibility

486	Tanggung Jawab Sosial Pengamanan Perusahaan <i>Corporate Social Safety Responsibility</i>
486	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan <i>Social and Environmental Responsibility</i>
488	Indeks Pemenuhan SE-OJK 16-21 - AR BAGI 2024 <i>Compliance Index of OJK Circular Letter 16-21 - Annual Report for 2024</i>

BAB 7 - Laporan Keuangan | Financial Statements

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.

01

Kilas Kinerja

Performance Highlights

Melalui penerapan strategi yang efektif, Bank Artha Graha Internasional melanjutkan tren pertumbuhan positif di tahun 2024.

By implementing effective strategies, Bank Artha Graha Internasional will continue its positive growth trend in 2024.



IKHTISAR DATA KEUANGAN

Key Financial Highlights

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

dalam juta Rupiah

in million Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020
Aset Assets					
Kas Cash	769.354	369.134	290.754	276.539	286.779
Giro pada Bank Indonesia Current Accounts in Bank Indonesia	3.024.920	2.658.276	2.937.933	1.532.310	926.163
Giro pada Bank Lain - Bersih Current Accounts in Other Banks	349.430	338.297	375.060	720.418	558.976
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Placements in Bank Indonesia and Other Banks	2.177.464	711.075	1.378.005	1.973.527	1.097.187
Efek-Efek Securities	8.501.562	5.787.414	4.045.146	2.839.888	1.653.004
Wesel Ekspor Export bills	166.681	131.863	-	-	-
Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali Securities Purchased Under Agreement to Sell	976.063	125.469	1.678.795	2.700.350	8.079.169
Tagihan Derivatif Derivatives Receivables	48	35	143	2.049	-
Kredit yang Diberikan - Bersih Loans-Net	10.073.572	11.636.733	9.705.183	10.816.904	11.982.582
Pendapatan Bunga yang Masih Akan Diterima Accrued Interest Receivable	253.265	326.422	365.947	344.590	291.889
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	-	-	-	-	12.380
Biaya Dibayar Dimuka Prepaid Expense	122.810	144.641	156.451	173.355	213.844
Tagihan Akseptasi Acceptance Receivables	166.025	131.362	276.735	259.213	143.978
Penyertaan Saham Investment in Shares	6	6	6	6	137
Aset Tetap - Bersih Fixed Assets-Net	2.123.376	2.127.797	2.078.315	2.106.653	2.065.208
Aset Tak Berwujud - Bersih Intangible Assets-Net	25.487	31.873	31.164	32.731	36.606
Agunan yang Diambil Alih -Bersih Foreclosed Assets-Net	808.883	936.110	1.223.296	1.829.689	2.650.061
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	229.681	270.760	304.870	317.941	288.547
Aset Lain-Lain - Bersih Other Assets-Net	357.766	376.344	589.830	201.657	240.455
Jumlah Aset Total Assets	30.126.393	26.103.611	25.437.633	26.127.820	30.526.965

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

dalam juta Rupiah

in million Rupiah

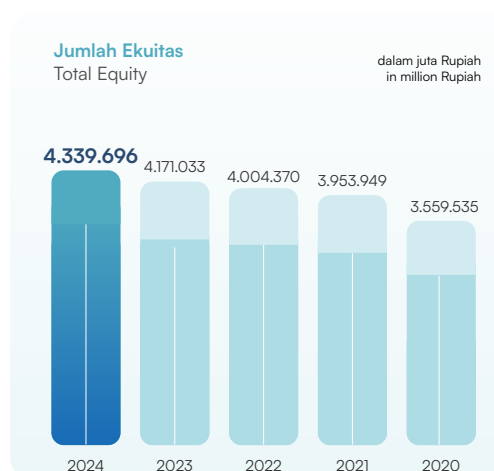
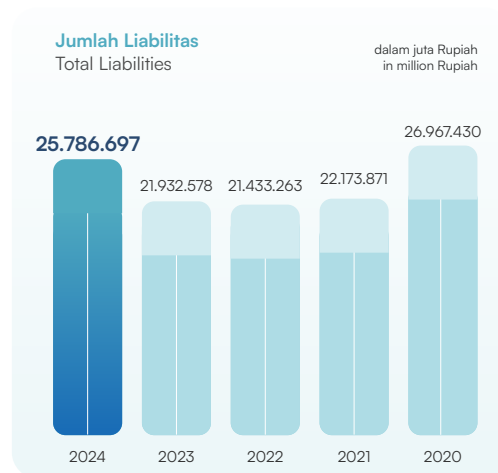
Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020
LIABILITAS <i>Liabilities</i>					
Liabilitas Segera <i>Liabilities Due Immediately</i>	115.621	95.711	87.094	59.694	64.494
Simpanan dari Nasabah <i>Deposits from Customers</i>	23.890.773	20.631.701	20.325.078	21.005.956	25.500.329
Simpanan dari Bank Lain <i>Deposits from Other Banks</i>	452.454	336.958	18.641	18.117	121.613
Liabilitas Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali <i>Securities Sold under Agreement</i>	499.281	-	-	-	-
Liabilitas Derivatif <i>Derivative Liabilities</i>	-	1.057	33	77	-
Liabilitas Akseptasi <i>Acceptance Liabilities</i>	166.682	131.863	277.445	259.917	144.390
Utang Pajak <i>Taxes Payable</i>	15.189	11.713	10.870	11.862	9.364
Bunga Masih Harus Dibayar <i>Accrued Interest Payable</i>	35.100	26.693	18.438	24.096	74.503
Liabilitas Imbalan Pascakerja <i>Post-Employment Benefit Liabilities</i>	99.151	118.875	124.006	153.778	242.279
Pinjaman Subordinasi <i>Subordinated Loans</i>	-	-	-	-	-
LTN Subordinasi <i>Subordinated LTN</i>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Liabilitas Lain-Lain <i>Other Liabilities</i>	312.446	378.007	371.658	440.374	610.458
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	25.786.697	21.932.578	21.433.263	22.173.871	26.967.430
Ekuitas <i>Equity</i>					
Modal Saham <i>Share Capital</i>	2.242.372	2.242.372	2.242.372	2.242.372	1.751.482
Tambahan Modal Disetor <i>Additional Paid-in Capital</i>	415.285	415.285	415.285	415.285	414.753
Revaluasi Aset Tetap <i>Revaluation Surplus of Fixed Assets</i>	1.379.822	1.379.822	1.349.281	1.349.281	1.303.818

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

dalam juta Rupiah
in million Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti setelah Dikurangi Pajak <i>Remeasurement of Defined Benefits Program after Tax</i>	78.699	61.575	60.364	46.792	12.741
Keuntungan yang Belum di Realisasi atas Perubahan Nilai Wajar Efek-Efek yang Tersedia untuk Dijual, setelah Pajak <i>Unrealized Gain on Changes in Fair Value of Available-for-Sale Securities, after Tax</i>	1.407	2.342	14.184	32.332 [†]	40.791
Saldo Laba <i>Retained Earnings</i>	222.111	69.637	(77.116)	(132.113)	35.950
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.339.696	4.171.033	4.004.370	3.953.949	3.559.535
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	30.126.393	26.103.611	25.437.633	26.127.820	30.526.965



Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain
*Statements of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income***dalam juta Rupiah**
in million Rupiah

Keterangan <i>Description</i>	2024	2023	2022	2021	2020
Pendapatan dan Beban Operasional <i>Operational Income and Liabilities</i>					
Pendapatan Bunga <i>Interest Income</i>	1.646.064	1.484.753	1.441.977	1.534.022	1.688.028
Beban Bunga <i>Interest Expenses</i>	(735.995)	(502.774)	(491.344)	(766.265)	(1.056.241)
Pendapatan Bunga - Bersih <i>Interest Income-Net</i>	910.069	981.979	950.633	767.757	631.787
Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya <i>Other Operational Income and Expenses</i>					
Pendapatan Operasional Lainnya <i>Other Operational Income</i>	357.585	312.618	167.121	306.729	115.873
Beban Operasional Lainnya <i>Other Operational Expenses</i>	(1.070.387)	(1.107.521)	(1.054.743)	(1.278.397)	(704.784)
Laba (Rugi) Operasional <i>Operational Profit (Loss)</i>	197.267	187.076	63.011	(203.911)	42.876
Pendapatan (Beban) Non-Operasional - Bersih <i>Non-Operational Income and Expenses - Net</i>	(7.512)	(3.719)	6.130	451	(12.454)
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak <i>Profit (Loss) Before Tax Expenses</i>	189.755	183.357	69.141	(203.460)	30.422
Beban Pajak <i>Tax Expenses</i>	(37.281)	(36.604)	(14.144)	35.397	(9.051)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan <i>Liabilities Due Immediately</i>	152.474	146.753	54.997	(168.063)	21.371
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain <i>Other Comprehensive Income and (Loss)</i>	16.189	19.910	(4.576)	71.055	50.434
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif <i>Total Comprehensive Profit (Loss)</i>	168.663	166.663	50.421	(97.008)	71.805
Laba (Rugi) per Saham Dasar (Rupiah Penuh) <i>Profit (Loss) per Share (Full Rupiah)</i>	7,54	7,26	2,72	(8,31)	1,35

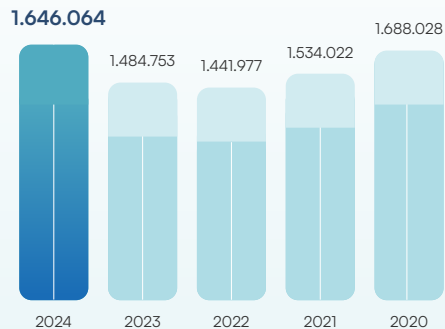
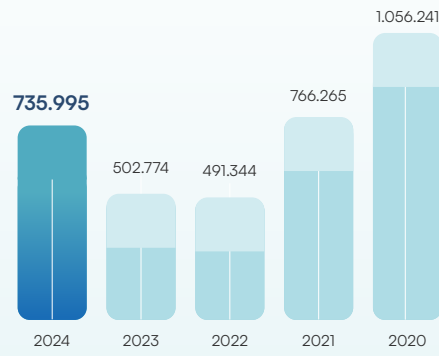
Laporan Arus Kas

Statement of Cash Flow

dalam juta Rupiah

in million Rupiah

Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020
Arus Kas Diperoleh dan/(digunakan untuk) Kegiatan Operasi Cash Flow Provided from/(Used by) Operating Activities	5.831.023	(464.102)	604.832	(3.034.360)	5.121.893
Arus Kas Diperoleh dan/(digunakan untuk) Kegiatan Investasi Cash Flow Provided from/(Used by) Investing Activities	(3.613.942)	(438.430)	(150.970)	4.170.396	(6.276.573)
Arus Kas Diperoleh dan/(digunakan untuk) Kegiatan Pendanaan Cash Flow Provided from/(Used by) Financing Activities	-	-	-	491.422	200.000
Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas - Neto Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents - Net	2.217.081	(902.532)	453.862	1.627.458	(954.680)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	4.076.785	4.982.095	4.503.130	2.869.279	3.816.420
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	6.321.257	4.076.785	4.982.095	4.503.130	2.869.279

Pendapatan Bunga
Interest Incomedalam juta Rupiah
in million RupiahBeban Bunga
Interest Expensedalam juta Rupiah
in million Rupiah

Rasio Keuangan dan Kepatuhan

Financial and Compliance Ratios

dalam persentase (%)

in percentage (%)

Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020
Rasio Permodalan Capital Ratio					
KPMM dengan Memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko Operasional CAR by Calculating Credit Risk and Operational Risk	26,55	25,48	23,82	22,36	16,66
KPMM dengan Memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Pasar CAR by Calculating Credit Risk, Operational Risk, and Market Risk	26,35	24,96	23,31	21,77	16,37
Aset Tetap terhadap Modal Fixed Assets to Capital	53,54	54,70	56,89	57,00	69,26

Rasio Keuangan dan Kepatuhan
*Financial and Compliance Ratios***dalam persentase (%)**
in percentage (%)

Keterangan <i>Description</i>	2024	2023	2022	2021	2020
Aset Produktif <i>Earning Assets</i>					
Aset Produktif dan Non-Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif <i>Non-Performing Earning and Non-Earning Assets to Total Earning and Non-Earning Assets</i>	5,25	7,12	6,51	8,57	6,43
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif <i>Non-Performing Earning Assets to Total Productive Assets</i>	0,98	1,09	1,55	1,95	2,38
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan terhadap Aset Produktif <i>Allowance for Impairment Losses for Financial Assets to Earning Assets</i>	2,05	2,64	2,93	3,33	1,92
Pemenuhan CKPN Kredit yang Diberikan <i>Fixed Fulfillment of CKPN on Disbursed Loans</i>	88,46	103,99	96,31	103,87	58,46
Rasio Kredit Bermasalah (NPL) - Bruto <i>Non-Performing Loans (NPL) to Total Loans - Gross</i>	2,40	1,74	2,73	3,39	4,58
Rasio Kredit Bermasalah (NPL) - Bersih <i>Non-Performing Loans (NPL) to Total Loans - Net</i>	0,77	0,31	0,41	0,32	3,14
Rasio Rentabilitas <i>Rentability Ratio</i>					
Rasio Laba Setelah Pajak terhadap Rata-Rata Aset (ROA) <i>Return on Assets (ROA)</i>	0,55	0,60	0,25	(0,73)	0,11
Rasio Laba Setelah Pajak terhadap Rata-Rata Ekuitas (ROE) <i>Return on Equity (ROE)</i>	4,23	4,24	1,63	(6,02)	0,81
Margin Bunga Bersih (NIM) <i>Net Interest Margin (NIM)</i>	4,07	5,58	4,79	3,62	2,99
Beban Operasional Lain terhadap Penghasilan Operasional (BOPO) <i>Operating Expense to Operating Income (BOPO)</i>	90,32	90,11	96,26	111,09	97,75
Liabilitas terhadap Aset <i>Liabilities to Assets</i>	85,59	84,02	84,26	84,87	88,34
Liabilitas terhadap Ekuitas <i>Liabilities to Equity</i>	594,20	525,83	535,25	560,80	757,61
Labas (Rugi) terhadap Pendapatan Bunga <i>Profit (Loss) to Interest Income</i>	9,26	9,88	3,81	(10,96)	1,27
Cost to Income (CIR) <i>Cost to Income (CIR)</i>	78,64	78,05	69,05	67,58	103,89

Rasio Keuangan dan Kepatuhan
Financial and Compliance Ratiosdalam persentase (%)
in percentage (%)

Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio					
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Macroprudential Intermediation Ratios (RIM)	55,26	58,03	54,92	58,47	49,60
Current Account Savings Account (CASA) Current Account Savings Account (CASA)	34,96	39,50	41,13	35,23	24,72
Rasio Kepatuhan Compliance Ratio					
Persentase Pelanggaran BMPK Percentage of Violation of Legal Lending Limit	-	-	-	-	-
Pihak Terkait Related Parties	-	-	-	-	-
Pihak Tidak Terkait Third Parties	-	-	-	-	-
Persentase Pelampauan BMPK Percentage of Excess of Legal Lending Limit	-	-	-	-	-
Pihak Terkait Related Parties	-	-	-	-	-
Pihak Tidak Terkait Third Parties	-	-	-	-	-
GWM Rupiah GWM Rupiah	13,03	12,73	13,77	6,46	3,52
GWM Valuta Asing GWM Foreign Currency	4,36	4,96	4,44	5,56	5,13
Posisi Devisa Net Net Open Position	0,63	0,81	0,82	2,14	0,63

IKHTISAR OPERASIONAL

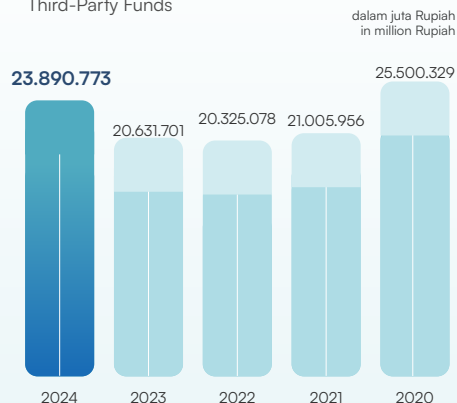
Operational Highlights

Kinerja Operasional Operational Highlights

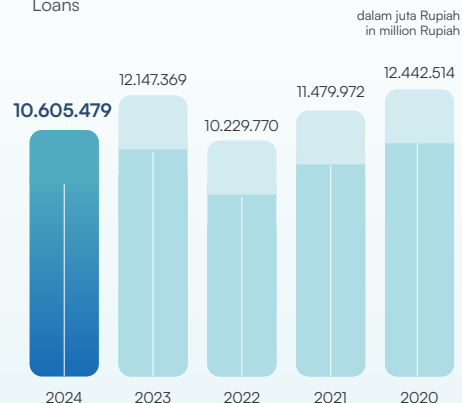
dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Keterangan	2024	2023	2022	2021	2020
Dana Pihak Ketiga Third Party Funds					
Tabungan Savings	1.834.505	1.517.590	1.601.653	1.597.032	1.513.106
Giro Demand Deposits	6.517.641	6.631.415	6.757.738	5.804.329	4.791.305
Deposito Time Deposits	15.538.627	12.482.696	11.965.687	13.604.595	19.195.918
Total Dana Pihak Ketiga Total Third Party Funds	23.890.773	20.631.701	20.325.078	21.005.956	25.500.329
Kredit Loans					
Kredit Produktif Productive Loans	8.264.969	9.598.721	7.476.792	8.476.965	9.451.985
Kredit Konsumtif Consumptive Loans	2.340.510	2.548.648	2.752.978	3.003.007	2.990.529
Total Kredit Total Loans	10.605.479	12.147.369	10.229.770	11.479.972	12.442.514

Dana Pihak Ketiga Third-Party Funds



Kredit yang Diberikan Loans



Informasi Lainnya
Other Informationdalam satuan
in unit

Keterangan Description	2024	2023	2022	2021	2020
Total Kantor Cabang Total Branch Offices	32	32	32	32	32
Total Kantor Cabang Pembantu Total Sub-Branch Offices	33	34	35	36	40
Total Kantor Kas Total Cash Offices	-	-	-	-	2
Total ATM Total ATM	156	153	131	118	124
Total Payment Point Total Payment Point	-	-	-	-	6
Total Karyawan (orang) Total Employees (people)	1.279	1.463	1.487	1.581	1.787

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

Sustainability Performance Overview

Aspek Ekonomi
Economic Aspect

Keterangan Description	Satuan Unit	2024	2023	2022	2021	2020
Kinerja Ekonomi Economic Performance						
Pembayaran Pajak dan Retribusi Tax and Levy Payment	Rp Juta Million Rp	190.911	135.611	129.477	185.925	243.008
Pembiayaan Non-Kegiatan Usaha Berkelanjutan Financing of Non-Sustainable Business Activities	Rp Juta Million Rp	10.228.445	11.818.488	9.764.884	10.729.091	11.405.775
Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan Financing Sustainable Business Activities	Rp Juta Million Rp	377.034	328.880	464.886	749.225	1.036.740
% Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan dari Total Pembiayaan % of Financing Sustainable Business Activities from Total Funding	%	3,56	2,71	4,54	6,53	8,33
Nilai Pinjaman menurut Segmen Loan Amount by Segment						
Perorangan Personal	Rp Juta Million Rp	3.454.793	3.828.338	2.753.214	3.003.214	2.990.716
Badan Usaha Mikro, Kecil & Menengah Micro, Small & Medium Enterprises	Rp Juta Million Rp	229.351	186.247	399.980	682.188	929.752

Aspek Ekonomi*Economic Aspect*

Keterangan <i>Description</i>	Satuan <i>Unit</i>	2024	2023	2022	2021	2020
Badan Usaha Korporasi & Komersil <i>Corporate & Commercial Enterprises</i>	Rp Juta <i>Million Rp</i>	6.921.335	8.132.783	7.076.576	7.794.571	8.482.046
Kerja Sama dengan Pemasok Lokal <i>Cooperation with Local Supplier</i>						
Jumlah Pemasok Lokal <i>Total Local Suppliers</i>	Jumlah Mitra <i>Number of Partners</i>	445	516	308	171	210
Nilai Kerja Sama <i>Cooperation Value</i>	Rp Juta <i>Million Rp</i>	166.211	158.792	111.600	82.224	44.316
Kinerja Aspek Ekonomi terkait Keberlanjutan sebagai Produk Ramah Lingkungan <i>Performance of Economic Aspects related to Sustainability as Environmentally Friendly Products</i>						
Jenis produk yang Memenuhi Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) <i>Types of Products that meet the Criteria for Sustainable Business Activities (KKUB)</i>	Unit Produk <i>Product Units</i>	2	2	3	3	3
Nominal Produk dan/atau Jasa yang Memenuhi Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) <i>Nominal Products and/or Services that meet the Criteria for Sustainable Business Activities (KKUB)</i>	Rp Juta <i>Million Rp</i>	377.034	328.880	464.886	749.225	1.036.740
Persentase Total Portofolio Kegiatan Usaha Berkelanjutan terhadap Total Portofolio (%) <i>Percentage of Total Portfolio of Sustainable Business Activities to Total Portfolio (%)</i>						
Penghimpunan Dana <i>Fundraising</i>	%	-	-	-	-	-
Penyaluran Dana <i>Fund Distribution</i>	%	3,56	2,71	4,54	6,53	8,33
Kinerja Keuangan Inklusif <i>Inclusive Finance Performance</i>						
Perkembangan Laku Pandai: <i>Progress of Laku Pandai:</i>						
Jumlah Agen <i>Number of Agents</i>	Agen <i>Agent</i>	27	27	27	29	98
Nominal Produk dan/atau Jasa yang Disediakan oleh Agen <i>Nominal of Products and/or Services Provided by Agents</i>	Rp Juta <i>Million Rp</i>	213,1	213,9	228,8	248,5	249,4
Jumlah Peserta Literasi Keuangan <i>Number of Financial Literacy Participants</i>	Orang <i>People</i>	1.422	1.356	522	518	533

IKHTISAR SAHAM

Share Highlights

PENAWARAN SAHAM PERDANA

Pada tanggal 10 Juli 1990, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) berdasarkan Surat No. SI-124/SHM/MK.10/1990 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat sejumlah 5.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (Rupiah penuh) per saham yang merupakan 20% dari modal yang ditempatkan. Pada tanggal 23 Agustus 1990, saham tersebut masing-masing dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya atau saat ini dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia.

INITIAL PUBLIC OFFERING

On July 10, 1990, the Bank obtained an effective statement from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) through Letter No. SI-124/SHM/MK.10/1990 to conduct an Initial Public Offering of 5,000,000 shares with a nominal value of IDR1,000 (one thousand Rupiah) per share, representing 20% of the issued capital. On August 23, 1990, the shares were listed on the Jakarta Stock Exchange and the Surabaya Stock Exchange, which are now collectively known as the Indonesia Stock Exchange.

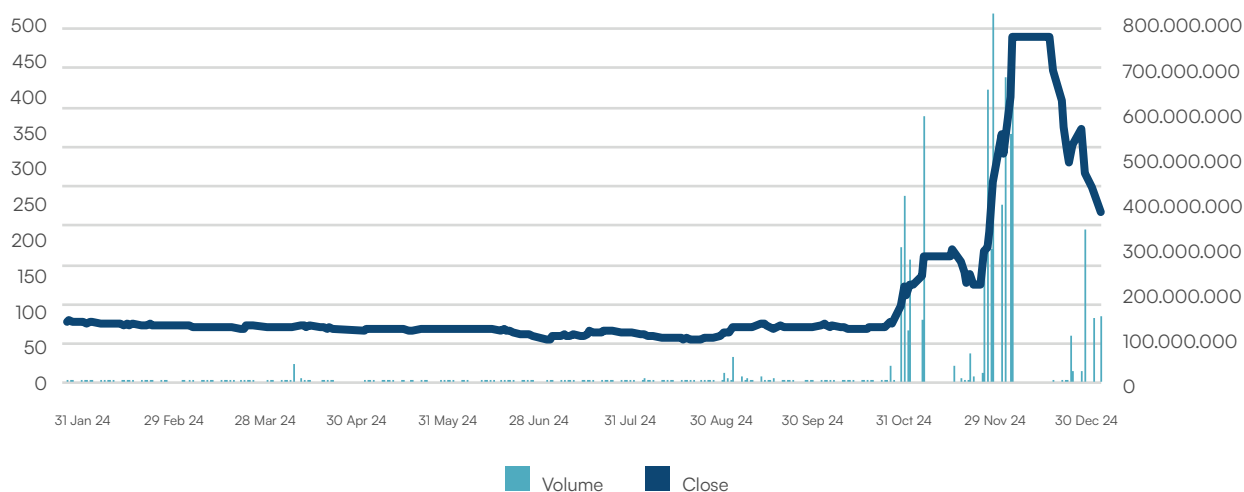
Kinerja Perdagangan Saham Share Trading Performance

2024						
Periode Period	Harga Saham Share Price			Volume Transaksi Transaction Volume	Jumlah Saham Beredar (lembar saham) Number of Outstanding Shares (in shares)	Kapitalisasi Pasar (Rp) Market Capitalization (IDR)
	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
Triwulan I Quarter I	78	65	69	130.369.600	20.223.412.907	1.395.415.490.583
Triwulan II Quarter II	69	50	58	97.483.200	20.223.412.907	1.172.957.948.606
Triwulan III Quarter III	76	50	68	251.213.100	20.223.412.907	1.375.192.077.676
Triwulan IV Quarter IV	448	63	214	6.608.840.800	20.223.412.907	4.327.810.362.098

2023						
Periode Period	Harga Saham Share Price			Volume Transaksi Transaction Volume	Jumlah Saham Beredar (lembar saham) Number of Outstanding Shares (in shares)	Kapitalisasi Pasar (Rp) Market Capitalization (IDR)
	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing			
Triwulan I Quarter I	77	64	66	93.706.300	20.223.412.907	1.334.745.251.862
Triwulan II Quarter II	71	61	67	98.374.500	20.223.412.907	1.354.968.664.769
Triwulan III Quarter III	83	66	74	274.764.300	20.223.412.907	1.496.532.555.118
Triwulan IV Quarter IV	87	64	73	251.234.300	20.223.412.907	1.476.309.142.211

Grafik Pergerakan Harga Saham

Graphic of Share Trading Movement



SUSPENSI PERDAGANGAN SAHAM DAN/ATAU DELISTING

Untuk tahun buku periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Bank Artha Graha Internasional mengalami 3 (tiga) kali penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*). Suspensi sebanyak 3 (tiga) kali disebabkan adanya peningkatan harga kumulatif saham pada quartal-4 tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat pengumuman Bursa No. Peng-SPT-00118/BEI.WAS/10-2024 tanggal 24 Oktober 2024 disebabkan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada Saham Bank Artha Graha Internasional (INPC), dalam rangka *cooling down*, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Saham pada perdagangan tanggal 25 Oktober 2024.

Penghentian sementara perdagangan Saham INPC tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham INPC.

SHARE TRADING SUSPENSION AND/OR DELISTING

For the financial year ending December 31, 2024, Bank Artha Graha Internasional experienced 3 (three) temporary trading suspensions. The 3 (three) suspensions were due to a cumulative increase in the Bank's share price in the fourth quarter of 2024, with details as follows:

1. Based on the Indonesia Stock Exchange announcement letter No. Peng-SPT-00118/BEI.WAS/10-2024 dated October 24, 2024, the suspension was imposed due to a significant cumulative increase in the share price of Bank Artha Graha Internasional (INPC). As a cooling-down measure, the Indonesia Stock Exchange deemed it necessary to temporarily suspend trading of the shares on October 25, 2024.

The temporary suspension of INPC shares was carried out in both the Regular Market and Cash Market, with the aim of providing sufficient time for market participants to carefully consider available information before making any investment decisions regarding INPC shares.

Suspensi atas perdagangan Saham INPC di Pasar Reguler dan Pasar Tunai di Seluruh Pasar dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 28 Oktober 2024 berdasarkan surat Bursa No. Peng-UPT-00114/BEI.WAS/10-2024 tanggal 25 Oktober 2024.

2. Berdasarkan surat pengumuman Bursa No. Peng-SPT-00121/BEI.WAS/10-2024 tanggal 29 Oktober 2024 disebabkan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada Saham INPC, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Saham di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai sesi I perdagangan tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan 7 November 2024.

Suspensi atas perdagangan Saham INPC di Pasar Reguler dan Pasar Tunai di Seluruh Pasar dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 08 November 2024 berdasarkan surat Bursa No. Peng-UPT-00127/BEI.WAS/11-2024 tanggal 7 November 2024.

3. Berdasarkan surat pengumuman Bursa No. Peng-SPT-00149/BEI.WAS/11-2024 tanggal 29 November 2024 disebabkan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham INPC, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Saham INPC di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai sesi I perdagangan tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan 12 Desember 2024.

Suspensi atas perdagangan Saham INPC di Pasar Reguler dan Pasar Tunai di Seluruh Pasar dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 13 Desember 2024 berdasarkan surat Bursa No. Peng-UPT-00148/BEI.WAS/12-2024 tanggal 12 Desember 2024.

AKSI KORPORASI

Selama tahun 2024, Bank Artha Graha Internasional tidak melakukan aksi korporasi seperti:

1. Pemecahan saham (*stock split*);
2. Penggabungan saham (*reverse stock*);
3. Dividen saham;
4. Saham Bonus; dan
5. Perubahan nilai nominal saham.

The suspension of INPC shares on all markets (Regular and Cash Markets) was lifted, and trading resumed in the first session on October 28, 2024, based on Exchange letter No. Peng-UPT-00114/BEI.WAS/10-2024 dated October 25, 2024.

2. *Based on the Indonesia Stock Exchange announcement letter No. Peng-SPT-00121/BEI.WAS/10-2024 dated October 29, 2024, the suspension was imposed due to a significant cumulative increase in the share price of INPC. The Indonesia Stock Exchange deemed it necessary to temporarily suspend trading of INPC shares in the Regular Market and Cash Market starting from the first trading session on October 30, 2024, until November 7, 2024.*

The suspension of INPC share trading in all markets (Regular and Cash Markets) was lifted and trading resumed in the first session on November 8, 2024, based on Exchange letter No. Peng-UPT-00127/BEI.WAS/11-2024 dated November 7, 2024.

3. *Based on the Indonesia Stock Exchange announcement letter No. Peng-SPT-00149/BEI.WAS/11-2024 dated November 29, 2024, the suspension was imposed due to a significant cumulative increase in the share price of INPC. The Indonesia Stock Exchange deemed it necessary to temporarily suspend trading of INPC shares in the Regular Market and Cash Market starting from the first trading session on December 2, 2024, until December 12, 2024.*

The suspension of INPC share trading in all markets (Regular and Cash Markets) was lifted and trading resumed in the first session on December 13, 2024, based on Exchange letter No. Peng-UPT-00148/BEI.WAS/12-2024 dated December 12, 2024.

CORPORATE ACTIONS

In 2024, Bank Artha Graha Internasional did not do corporate actions, such as:

1. *Stock Split;*
2. *Reverse Stock;*
3. *Stock dividend;*
4. *Bonus shares; and*
5. *Change in par value of shares.*

IKHTISAR EFEK LAINNYA

Other Highlights on Securities

IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK, ATAU OBLIGASI KONVERSI

Bank Artha Graha Internasional tidak menyajikan informasi terkait kronologi penerbitan obligasi, sukuk atau obligasi konversi karena untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Bank tidak menerbitkan dan mencatatkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi.

IKHTISAR SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Dalam rangka memperkuat permodalan dan mendukung ekspansi usaha Bank telah menerbitkan *Long Term Notes* (LTN) Subordinasi I di tahun 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 39/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum. Efek utang tersebut tidak berperingkat karena diterbitkan melalui mekanisme Tanpa Penawaran Umum dengan mengacu kepada dokumen Info Memo penerbitan LTN tersebut.

LTN Subordinasi I Tahap II tidak diterbitkan karena manajemen berkeyakinan permodalan saat ini sudah dapat mendukung ekspansi usaha untuk masa mendatang.

Adapun struktur LTN Subordinasi I tahap I Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Efek Securities Name	Tanggal Penerbitan Date of Issuance	Nominal (Rp Miliar) Nominal (Billion IDR)	Suku Bunga per Tahun Coupon per Year	Jatuh Tempo Maturity Date	Wali Amanat Trustee
Long Term Notes (LTN) Subordinasi I Tahap I Tahun 2020 Long Term Notes (LTN) Subordination I Phase I of 2020	30 Desember 2020 December 30, 2020	200	9,50%	30 Desember 2027 December 30, 2027	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

BOND, SUKUK, OR CONVERTIBLE HIGHLIGHTS

Bank Artha Graha Internasional does not present information related to the chronology of issuance of bonds, sukuk, or convertible bonds because for the period ended on December 31, 2024, the Bank did not issue and list bonds, sukuk, or convertible bonds.

OTHER FUNDING SOURCES HIGHLIGHTS

To strengthen the capital and support the expansion, the Bank has issued Long Term Notes (LTN) of Subordination I in 2020 as regulated in the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 39/POJK.04/2019 concerning the Issuance of Debt Securities and/or Sukuk without a Public Offering. The debt securities were not rated because they were issued through a Non-Public Offering mechanism regarding the Info Memo document of the LTN issuance.

Subordinated LTN I Phase II was not issued because management believes that the current capital can support business expansion in the future.

The structure of Subordinated LTN I phase I 2020 is as follows:

PERISTIWA PENTING

Significant Events



24 Januari 2024
January 24, 2024

Fashion Show by Ivan Gunawan

Fashion Show by Ivan Gunawan

Ivan Gunawan mengadakan pagelaran Fashion Show koleksi terbarunya dari Hijab Mandjha Raya Collection 2024 ke-7. Acara ini diadakan di Hotel Borobudur Jakarta yang disebut memiliki peran penting dalam awal karir Ivan Gunawan.

Bank Artha Graha Internasional menjadi salah satu sponsor dalam acara ini dengan melakukan beberapa activation di venue acara.

Ivan Gunawan held a fashion show showcasing his latest collection, the Hijab Mandjha Raya Collection 2024 - Volume 7. The event took place at Hotel Borobudur Jakarta, which is known to have played a significant role in the early stages of Ivan Gunawan's career.

Bank Artha Graha Internasional was one of the sponsors of the event and participated by conducting several activations at the event venue.



8 - 11 Februari 2024
February 8 - 11, 2024

Chinese New Year & Wholesale Market

Chinese New Year & Wholesale Market

SCBD Park dan SCBD Weekland yang menjadi pusat kegiatan Imlek tahun ini sudah dipadati pengunjung semenjak hari Kamis (8/2). Terdapat berbagai macam kegiatan seperti Parade Barongsai, Barongsai Pole, Barongsai Performance, Lion Dance, live music, dan kegiatan khas Imlek lainnya.

Dalam mendukung kegiatan tersebut, Bank Artha Graha Internasional memberikan promo menarik seperti promo hingga 50% di merchant SCBD Park dengan pembayaran menggunakan QRIS agi serta merchandise menarik yang bisa didapatkan jika berkunjung ke booth agi.

SCBD Park and SCBD Weekland, the main venues for this year's Chinese New Year (Imlek) celebrations, have been bustling with visitors since Thursday, February 8. Various activities were held, including the Lion Dance Parade, Barongsai Pole, Barongsai Performances, Lion Dance, live music, and other traditional Chinese New Year festivities.

In support of these activities, Bank Artha Graha Internasional offered attractive promotions, such as discounts of up to 50% at merchants in SCBD Park for payments made using the QRIS agi system, as well as exciting merchandise available for visitors who stopped by the agi booth.



22 Februari - 3 Maret 2024
February 22 - March 3, 2024

Agung Sedayu Group (ASG) Expo 2024

Agung Sedayu Group (ASG) Expo 2024

ASG Expo 2024 menghadirkan berbagai macam pameran properti dengan berbagai promo menarik disertai acara *talkshow* dan *workshop* inspiratif seputar properti.

Sebagai salah satu mitra bank dari Agung Sedayu Group, Bank Artha Graha Internasional ikut memberikan promo menarik bagi pengunjung yang datang dengan menghadirkan program **KPR One Day Approval**. Ini merupakan program khusus yang diberikan untuk nasabah yang ingin membeli properti milik Agung Sedayu Group.

ASG Expo 2024 showcased a wide range of property exhibitions, featuring various attractive promotions along with inspiring talk shows and workshops related to the property sector.

As one of the banking partners of Agung Sedayu Group, Bank Artha Graha Internasional offered special promotions for visitors through its One Day Approval Mortgage Program (KPR One Day Approval). This exclusive program is designed for customers interested in purchasing properties developed by Agung Sedayu Group.



23 Maret 2024
March 23, 2024

Earth Hour

Earth Hour

Artha Graha Peduli bersama seluruh unit usaha Artha Graha Group dan Artha Graha Network menggelar gerakan massal untuk memadamkan penggunaan listrik dan peralatan elektronik. Kegiatan ini dipusatkan di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Bank Artha Graha Internasional turut berpartisipasi dalam gerakan ini dengan melakukan pemadaman listrik di cabang yang tersebar di seluruh Indonesia selama 90 menit.

Selain pemadaman lampu, kegiatan *Earth Hour* di SCBD juga melakukan kegiatan membuat icon-icon menarik dari daur ulang plastik (*recycle*) yang dapat kembali digunakan dengan nilai seni dan bermanfaat (*reuse*). Termasuk menyediakan pameran ecoprint dan *coloring number* yang melibatkan partisipasi karyawan dan pengunjung di SCBD. Bertepatan dengan bulan suci Ramadan, acara dipadukan dengan kegiatan Islami, seperti Tausiah, Buka puasa bersama, Santunan Anak Yatim, sesi *Talkshow*, hingga hiburan menarik lainnya.

Artha Graha Peduli, together with all business units under the Artha Graha Group and Artha Graha Network, launched a mass movement to switch off electricity and electronic devices. The event was centered in the SCBD area of South Jakarta.

Bank Artha Graha Internasional participated in this movement by turning off the electricity at its branches across Indonesia for 90 minutes.

In addition to the lights-off campaign, the Earth Hour event at SCBD featured creative activities such as crafting artistic and functional icons from recycled plastic (reuse), along with an eco-print exhibition and paint-by-numbers sessions, which involved participation from both employees and visitors in SCBD. Coinciding with the holy month of Ramadan, the event also included a series of Islamic activities such as Tausiyah (religious talks), breaking the fast together, donations for orphans, talk show sessions, and other engaging entertainment.



5 April 2024
April 5, 2024

Buka Bersama Baznas

Buka Bersama Baznas

Bank Artha Graha Internasional dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi DKI menjalin kerja sama dalam hal pengumpulan Dana Zakat dan infak/Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Kerjasama ini ditandai dengan ditandatanganinya MoU kerjasama resmi pada hari Jumat (5/4) di SCBD Park, Jakarta Selatan.

Direktur Bank Artha Graha Internasional, Indra S. Budianto mengatakan bahwa kegiatan yang dibarengi dengan cara buka puasa bersama ini selain menjadi momen untuk merayakan kebersamaan di bulan yang penuh berkah, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat sinergi antara sektor perbankan dan lembaga zakat.

Bank Artha Graha Internasional and the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of DKI Jakarta Province have established a partnership for the collection of Zakat, Infaq/Sadaqah (ZIS), and other Religious Social Funds (DSKL). This collaboration was formalized through the signing of an official Memorandum of Understanding (MoU) on Friday, April 5, at SCBD Park, South Jakarta.

Indra S. Budianto, Director of Bank Artha Graha Internasional, stated that this event, which was held in conjunction with a communal iftar (breaking of the fast), not only served as a moment to celebrate togetherness during the holy month but also as a platform to strengthen synergy between the banking sector and zakat institutions.



9 Juni 2024
June 9, 2024

Kemala Run 2024

Kemala Run 2024

Kemala Run 2024 merupakan kegiatan lomba lari yang diselenggarakan oleh Bhayangkari dan Yayasan Bhayangkari dalam satu wadah penyelenggaraan *Tour of Kemala*. Di tahun 2022 dan 2023, *Tour of Kemala* telah sukses melaksanakan event balap sepeda yang bertujuan menunjang pariwisata di tempat acara dilaksanakan.

Sebanyak lebih dari 60 *tenant* UMKM akan berjualan di area event Kemala Run. Untuk mempermudah pengunjung dalam bertransaksi, Bank Artha Graha Internasional menyediakan QRIS sebagai salah sistem pembayaran. Selain mudah, dengan bertransaksi melalui QRIS dari aplikasi milik Bank Artha Graha Internasional, pengunjung akan mendapatkan promo *cashback* sebesar 50%.

Kemala Run 2024 is a running competition organized by Bhayangkari and the Kemala Bhayangkari Foundation under the umbrella of the Tour of Kemala. In 2022 and 2023, the Tour of Kemala successfully held cycling events aimed at promoting tourism in the host locations.

More than 60 MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) vendors will be selling their products at the Kemala Run event area. In addition to its convenience transactions, Bank Artha Graha Internasional provides QRIS as one of payment methods. Aside from its convenience, through the QRIS system via Bank Artha Graha Internasional's, visitors will be eligible for a 50% cashback promotion.



26 - 30 Juni 2024
June 26 - 30, 2024

Discovery League 2024

Discovery League 2024

Tahun ini Discovery League kembali diadakan. Acara ini berlangsung selama 5 hari dari tanggal 26-30 Juni 2024 di Discovery Beachfront Court, Discovery Mall Kuta Bali.

Dalam acara ini, Bank Artha Graha Internasional juga ingin mengedukasi masyarakat, khususnya anak muda yang datang mengenai digitalisasi perbankan.

This year, the Discovery League was held once again. The event occurred for 5 days, from June 26-30, 2024, at the Discovery Beachfront Court, Discovery Mall Kuta Bali.

Through this event, Bank Artha Graha Internasional also aimed to educate the public about banking digitalization, particularly the younger generation.



28 Juli 2024
July 28, 2024

Global Tiger Day

Global Tiger Day

Dalam rangka memperingati Global Tiger Day yang jatuh di tanggal 29 Juli, Artha Graha Peduli (AGP) bersama Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) mengadakan kegiatan dengan tema "Harmoni Alam Lestari Harimau" di Hotel Borobudur Jakarta pada hari Minggu (28/7).

Kegiatan yang didukung oleh unit usaha lain dalam Artha Graha Group berlangsung meriah dengan beragam aktivitas seperti *face painting*, pameran foto, pertunjukan boneka (Puppets Binekon), dan *talkshow*. Terdapat pula berbagai lomba yang diadakan seperti lomba mewarnai gambar harimau yang diikuti oleh 50 anak-anak binaan Hotel Borobudur Jakarta dan lomba video tiktok/instagram.

Bank Artha Graha Internasional juga turut berpartisipasi dalam kegiatan dengan mengajak nasabah dan masyarakat untuk berdonasi. Donasi dilakukan untuk melestarikan Harimau Sumatera, khususnya yang berada di TWNC melalui agi digital apps.

In commemoration of Global Tiger Day, which falls on July 29, Artha Graha Peduli (AGP) in collaboration with Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) held an event themed "Harmony with Nature: Preserving the Tigers" at Hotel Borobudur Jakarta on Sunday, July 28.

The event, supported by other business units within the Artha Graha Group, was held in a lively and festive atmosphere featuring a variety of activities such as face painting, a photo exhibition, puppet performances (Puppets Binekon), and a talk show. Several competitions were also held, including a tiger-themed coloring contest participated in by 50 children under the care of Hotel Borobudur Jakarta, as well as a TikTok/Instagram video competition.

Bank Artha Graha Internasional also took part in the event by encouraging customers and the public to donate. Donations were collected to support the conservation of Sumatran Tigers, particularly those in TWNC, through the agi digital app.



5 & 7 September 2024
September 5 & 7, 2024

HUT BAGI ke-51 BAGI 51st Anniversary

Bank Artha Graha Internasional merayakan ulang tahun ke-51 dengan semangat baru dan komitmen yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan masa depan. Acara yang diadakan pada Sabtu (7/9) di Kawasan SCBD yang tersebar di SCBD Park dan SCBD Weekland ini menyoroti tema besar “Inovasi dan Sinergi Menuju Prestasi Terbaik.”

Untuk menegaskan komitmen terhadap sinergi, Bank Artha Graha Internasional menyelenggarakan pertandingan olahraga yang melibatkan seluruh karyawan. Pertandingan ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang mempererat hubungan antar tim dan mendorong semangat kerja sama.

HUT Bank Artha Graha Internasional juga selalu dibarengi dengan kegiatan sosial. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini kembali diadakan kegiatan Donor Darah yang sudah lebih dulu berjalan di hari Kamis (5/9). Selain itu, dilakukan pemberdayaan UMKM untuk mendukung pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan bisnis mereka. Perayaan ini adalah bentuk dukungan konkret untuk UMKM dimana karyawan dan tamu undangan berkesempatan untuk membeli berbagai produk kuliner yang ada di SCBD Weekland.

Bank Artha Graha Internasional celebrated its 51st anniversary with renewed spirit and a stronger commitment to facing future challenges. The event, held on Saturday, September 7, across SCBD Park and SCBD Weekland, highlighted the overarching theme: “Innovation and Synergy Toward Outstanding Achievement.”

To reinforce its commitment to synergy, Bank Artha Graha Internasional organized a series of sports competitions involving all employees. These competitions were not only about winning but also aimed at strengthening team relationships and fostering a spirit of collaboration.

As in previous years, the anniversary celebration was accompanied by various social initiatives. One of the key activities was a Blood Donation Drive, held earlier on Thursday, September 5. In addition, the Bank supported MSME empowerment as part of its commitment to helping small and medium enterprises grow their businesses. This celebration served as a tangible form of support for MSMEs, where employees and invited guests had the opportunity to purchase a wide range of culinary products showcased at SCBD Weekland.



28-29 September 2024
September 28-29, 2024

Oktoberfest 2024 Oktoberfest 2024

Acara ini dirancang sebagai bentuk apresiasi terhadap keberagaman budaya, baik lokal maupun internasional. Di SCBD Oktoberfest, kamu akan menemukan berbagai hidangan otentik khas Jerman, mulai dari bir berkualitas hingga makanan tradisional yang menggugah selera. Selain itu, penampilan musik yang enerjik akan menambah keseruan selama Oktoberfest di SCBD.

Dengan membawa tradisi ini ke Jakarta, SCBD Weekland Oktoberfest ingin memberikan pengalaman serupa tanpa harus pergi jauh.

This event is designed as a celebration of cultural diversity, both local and international. At SCBD Oktoberfest, you will find a variety of authentic German dishes-from premium beers to delicious traditional cuisine. In addition, energetic live music performances will enhance the festive atmosphere throughout the event.

By bringing this tradition to Jakarta, SCBD Weekland Oktoberfest aims to offer a similar experience without the need to travel far.



4 Oktober 2024
October 4, 2024

People Fest 2024

People Fest 2024

Penyelenggaraan Pesta Rakyat ini sejalan dengan visi dan komitmen Bank Artha Graha dalam mendukung keberlanjutan tongkat estafet pemerintahan agar berjalan dengan lancar. Dukungan tersebut tercermin partisipasi aktif Bank Artha Graha Internasional dalam menyalurkan KPR Bersubsidi (KPR-FLPP) untuk masyarakat luas, program KUR untuk pemberdayaan UMKM, Gerakan Non-Tunai Bank Indonesia dan juga mendukung inklusi keuangan pada institusi TNI dan Polri dengan telah memiliki Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dengan TNI dan Polri untuk pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan seperti pembukaan dan pengelolaan rekening untuk institusi, maupun personel TNI dan Polri.

Program-program tersebut dilakukan karena Bank Artha Graha Internasional merupakan bank yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebagai salah satu bank swasta untuk penempatan dan pengelolaan rekening pemerintah.

The organization of this Pesta Rakyat (People's Festival) aligns with Bank Artha Graha's vision and commitment to supporting the smooth continuation of government leadership. This support is reflected in Bank Artha Graha Internasional's active participation in providing subsidized housing loans (KPR-FLPP) for the broader community, KUR programs for MSME empowerment, the Bank Indonesia Cashless Movement, as well as efforts to promote financial inclusion within the Indonesian National Armed Forces (TNI) and National Police (Polri). This commitment is further demonstrated through Memorandums of Understanding (MoUs) and Cooperation Agreements established with both TNI and Polri, enabling the utilization of banking products and services such as the opening and management of institutional and personal accounts for TNI and Polri personnel.

These initiatives are carried out as Bank Artha Graha Internasional is one of the private banks appointed by the government through the Ministry of Finance to facilitate the placement and management of government accounts.



6 Januari 2024, 26 April dan 3
Mei 2024, 14 September 2024, 11
Desember 2024

January 6, 2024, April 26 and May 3,
2024, September 14, 2024, December
11, 2024

Literasi & Edukasi

Literacy & Education

6 Januari 2024: SMK Pariwisata Harapan Denpasar dengan Kegiatan "TALK SHOW "GEN Z DI TENGAH GEMPURAN TEKNOLOGI PERBANKAN"

26 April dan 3 Mei 2024: SMK Yapari Aktripa & SMA Kartika XIX-2 Bandung dengan Kegiatan "Edukasi Mengatur Keuangan Gaya Anak Muda"

14 September 2024: Kawasan PT Samudera Indo Sejahtera dengan Kegiatan "Literasi Keuangan & Perbankan UMKM, Nelayan"

11 Desember 2024: Madrasah Tsanawiah 2 Pontianak dengan Kegiatan "Edukasi Perbankan dan Seminar Anti-Bullying pada Siswa/Siswi Madrasah"

January 6, 2024: SMK Pariwisata Harapan Denpasar held a talk show titled "Gen Z in the Era of Rapid Banking Technology Advancement."

April 26 and May 3, 2024: SMK Yapari Aktripa & SMA Kartika XIX-2 Bandung hosted an event titled "Financial Management Education with a Youthful Approach."

September 14, 2024: PT Samudera Indo Sejahtera area will host an event on "Financial and Banking Literacy for MSMEs and Fishermen."

December 11, 2024: Madrasah Tsanawiah 2 Pontianak will conduct an event on "Banking Education and Anti-Bullying Seminar for Madrasah Students."

02

Laporan Manajemen

Management Report

Manajemen Bank Artha Graha Internasional telah mengambil sejumlah kebijakan strategis pada pengembangan solusi layanan perbankan bagi nasabah.

Bank Artha Graha Internasional management has taken a number of strategic policies to develop banking service solutions for customers.





LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Report

Kiki Syahnakri

→ **Komisaris Utama/
Komisaris Independen**
President Commissioner/
Independent Commissioner



Dewan Komisaris mengapresiasi implementasi berbagai kebijakan dan rencana strategis yang dijalankan Direksi selama tahun 2024, sehingga Bank mampu mengatasi kondisi usaha yang penuh tantangan dengan raihan kinerja yang lebih baik selain berhasil menuntaskan berbagai program keberlanjutan yang semakin memperkuat fondasi keuangan Perusahaan untuk kembali tumbuh berkualitas di masa mendatang.

The Board of Commissioners appreciates the implementation of various policies and strategic plans carried out by the Board of Directors throughout 2024, enabling the Bank to overcome challenging business conditions with improved performance. Moreover, the Bank successfully completed various sustainability programs, further strengthening the Company's financial foundation for quality growth in the future.

PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga Bank Artha Graha Internasional dapat melalui tahun 2024 yang penuh tantangan.

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugas pengawasan kepada Direksi, termasuk pengawasan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB). Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan strategi Bank, terutama pada aspek manajemen risiko, evaluasi dan persetujuan kredit, pencapaian laba, penerapan teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta implementasi keuangan berkelanjutan.

DEAR SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS

Praise and gratitude are expressed to Almighty God for His abundant blessings and grace, allowing Bank Artha Graha Internasional to navigate the challenging year of 2024.

Throughout 2024, the Board of Commissioners has carried out its oversight function and duties towards the Board of Directors, including overseeing the implementation of the Bank's Business Plan (RBB). The Board of Commissioners has supervised the implementation of the Bank's strategies, particularly in areas such as risk management, credit evaluation and approval, profit achievement, information technology application, human resources development, corporate governance practices, and the implementation of sustainable finance.

Dewan Komisaris selalu berupaya agar Bank Artha Graha Internasional terkelola dengan baik dan *prudent*. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris melakukan komunikasi yang intensif dengan Direksi untuk membahas kendala dan mendapatkan solusi penerapan strategi bisnis yang telah ditetapkan, termasuk jika terdapat perubahan signifikan yang membuat target bisnis tahun berjalan yang perlu direvisi. Arahan kepada Direksi diberikan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas pengawasan kegiatan Bank Artha Graha Internasional untuk tahun buku 2024, yang dapat memberikan gambaran tentang upaya Bank dalam meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

KONDISI MAKRO EKONOMI

Konflik geopolitik yang berkepanjangan serta perbedaan kebijakan fiskal di berbagai negara besar, akibat disparitas kondisi perekonomian yang tinggi, membuat perekonomian global pada 2024 berkembang dinamis penuh tantangan dan diliputi ketidakpastian. Tetap kuatnya pertumbuhan perekonomian AS, membuat nilai tukar dolar AS semakin menguat terhadap berbagai mata uang dunia, dan mengakibatkan masing-masing negara menempuh kebijakan yang berbeda untuk merespons penguatan nilai tukar dolar AS tersebut.

Disparitas kebijakan tersebut membuat pertumbuhan perekonomian antar kawasan maupun antar sesama negara maju berbeda. Secara umum, IMF dalam rilisnya - World Economic Outlook (WEO) - Januari 2025, menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian global sedikit melambat menjadi 3,2% di tahun 2024 dari sebesar 3,3% di tahun 2023, serta tetap diwarnai tingkat inflasi yang tinggi sekalipun mulai menurun, dari 6,7% menjadi 5,7%.

Berbagai negara utama dunia menerapkan kebijakan yang berbeda dalam merespons masih tingginya inflasi global yang diikuti dengan kuatnya nilai tukar dolar AS tersebut. The Fed, misalnya hanya menurunkan suku bunga secara terbatas, dari 5,50% pada awal tahun 2024 menjadi 4,50% pada akhir tahun 2024, demi mempertahankan kuatnya perekonomian domestik dan pasar tenaga kerja yang solid. Sementara itu, European Central Bank (ECB) menurunkan suku bunga acuannya ke kisaran 3,15% pada akhir 2024.

The Board of Commissioners consistently strives to ensure that Bank Artha Graha Internasional is managed well and prudently. Throughout 2024, the Board maintained intensive communication with the Board of Directors to discuss challenges and find solutions for implementing the established business strategies, including when significant changes arose that required adjustments to the business targets for the current year. Guidance to the Board of Directors is provided through mechanisms outlined in the Articles of Association and applicable laws and regulations.

On this occasion, we present the report of the Board of Commissioners' accountability for overseeing the activities of Bank Artha Graha Internasional for the 2024 financial year, which provides an overview of the Bank's efforts to enhance value for shareholders and all stakeholders.

MACROECONOMIC CONDITIONS

The prolonged geopolitical conflict and financial policy differences across major countries, resulting from high disparities in economic conditions, led to a dynamic and challenging global economy in 2024, shrouded in uncertainty. The continued strength of the U.S. economy has caused the U.S. dollar to strengthen against various global currencies, prompting different countries to adopt varied policies in response to this currency appreciation.

These policy disparities have led to differing economic growth rates between regions and among developed countries. In general, the IMF's January 2025 release of the World Economic Outlook (WEO) stated that global economic growth slightly slowed to 3.2% in 2024, from 3.3% in 2023, while inflation rates remained high, although they had started to decline, from 6.7% to 5.7%.

Major world economies implemented different policies in response to the still-high global inflation and the strong U.S. dollar. For example, the Fed only made limited cuts to interest rates, from 5.50% at the start of 2024 to 4.50% by the end of the year, in order to maintain strong domestic economic performance and a solid labor market. Meanwhile, the European Central Bank (ECB) reduced its benchmark interest rate to around 3.15% by the end of 2024.

Namun demikian, perlambatan pertumbuhan ekonomi, bahkan kontraksi terjadi di beberapa negara maju maupun negara *emerging market*, seperti Tiongkok dan India, yang mencatatkan perlambatan, kemudian Jerman dan Jepang yang mencatatkan kontraksi ekonomi. Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global, volume perdagangan dunia justru menunjukkan peningkatan. IMF menyatakan volume perdagangan global tumbuh sebesar 3,4% YoY pada 2024, dari 0,7% YoY pada tahun sebelumnya. Peningkatan volume perdagangan global ini memberi dampak positif bagi perekonomian kawasan Asia maupun ASEAN yang mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dari pertumbuhan perekonomian global, sekalipun dihadapkan pada tantangan penguatan nilai dolar AS.

Di tengah ketidakpastian perekonomian global yang penuh tantangan tersebut, mengacu pada data BPS, perekonomian Indonesia di tahun 2024 tetap tumbuh cukup tinggi, mencapai 5,03% dari 5,05% di tahun sebelumnya. Konsumsi domestik kembali menjadi penopang utama pertumbuhan perekonomian domestik. Kinerja positif juga dicatatkan oleh seluruh lapangan usaha di Indonesia. Selain itu, pengendalian laju inflasi domestik juga berhasil meredam dampak penguatan nilai tukar dolar AS maupun gejolak rantai pasok global sehingga inflasi Indonesia berada di level 1,57%, menurun dari 2,61% di tahun sebelumnya. Perbaikan iklim investasi yang terus dilakukan Pemerintah memicu meningkatnya realisasi investasi, baik dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja maupun kredit konsumsi di berbagai daerah. Realisasi investasi infrastruktur konektivitas, baik dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN), non PSN, maupun realisasi investasi penambangan kapasitas dan penambahan investasi modal kerja terus meningkat.

Tingginya konsumsi dan naiknya kegiatan investasi tersebut membuat kinerja industri keuangan Indonesia kembali mencatatkan pertumbuhan positif. Kredit perbankan kembali tumbuh 10,39%, didorong oleh naiknya kredit investasi, sebesar 13,62% (yoy), diikuti oleh kredit konsumsi yang meningkat 10,61% (yoy), serta kredit modal kerja yang tumbuh 8,35% (yoy). Peningkatan kredit tersebut diiringi dengan perbaikan kualitas kredit, sebagaimana tercermin dari rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* yang menurun dari 2,38% pada 2023 menjadi 2,08%, selain diiringi oleh kuatnya rasio permodalan. Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional juga mencatat pertumbuhan pada 2024, namun dengan tingkat kenaikan yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit, kondisi likuiditas yang ketat dan meningkatnya biaya dana.

However, economic growth has slowed, and even contracted in some developed countries and emerging markets, such as China and India, which recorded slowdowns, and Germany and Japan, which experienced economic contractions. Despite the global economic slowdown, global trade volume increased. The IMF reported that global trade volume grew by 3.4% YoY in 2024, compared to 0.7% YoY the previous year. This increase in global trade volume had a positive impact on the economies of Asia and ASEAN, which recorded growth higher than global economic growth, despite facing challenges from the strengthening of the U.S. dollar.

Amidst this uncertain global economic climate, Indonesia's economy in 2024 continued to grow at a solid rate of 5.03%, slightly down from 5.05% the previous year, according to data from BPS. Domestic consumption remained the key driver of domestic economic growth. Positive performance was also recorded across all business sectors in Indonesia. Additionally, the successful control of domestic inflation helped mitigate the effects of the stronger U.S. dollar and global supply chain disruptions, bringing inflation down to 1.57%, from 2.61% in the previous year. The government's continuous efforts to improve the investment climate have spurred an increase in investment realization, including in investment credit, working capital loans, and consumer loans across various regions. The realization of connectivity infrastructure investments, both within the framework of the National Strategic Projects (PSN), non-PSN projects, and investments in mining capacity and working capital, continued to rise.

High consumption and increased investment activities have contributed to positive performance in Indonesia's financial industry. Bank lending grew by 10.39%, driven by a 13.62% YoY increase in investment loans, followed by a 10.61% YoY rise in consumer loans, and an 8.35% YoY increase in working capital loans. This growth in loans was accompanied by an improvement in loan quality, as reflected by a decrease in the gross Non-Performing Loan (NPL) ratio from 2.38% in 2023 to 2.08%, alongside strong capital adequacy ratios. National banking Third-Party Funds (DPK) also grew in 2024, though at a slower rate compared to loan growth, reflecting tight liquidity conditions and higher funding costs.

Penyaluran piutang pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) tetap tumbuh, mencatatkan peningkatan sebesar 6,92% (yoy) pada Desember 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan pembiayaan investasi sebesar 10,47% (yoy). Sementara itu, industri perasuransian mencatatkan pertumbuhan yang lebih moderat, dengan total penghimpunan premi tumbuh sebesar 4,91% (yoy) menjadi Rp15,70 triliun per Desember 2024, sementara perusahaan *fintech* juga tumbuh sebagai alternatif pinjaman bank.

Seiring dengan tren global, transaksi dan layanan *digital banking* terus tumbuh pesat mendukung kemudahan transaksi ekonomi. Pesatnya perkembangan teknologi digital dan internet serta perubahan pola belanja masyarakat turut mendorong perkembangan *digital banking*. Data BI menunjukkan pada tahun 2024 volume transaksi *digital banking* ini telah mencapai 34,5 miliar transaksi, tumbuh 36,6% (YoY), dengan nilai transaksi digital mencapai Rp87 kuadriliun. Data BI juga menunjukkan volume transaksi *mobile banking* tumbuh 39,1%, *Internet Banking* tumbuh 4,4%, *BI Fast* tumbuh 62,4% dan QRIS tumbuh 175,2%, didukung peningkatan jumlah pengguna dan *merchant*.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2024, Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta merespons kondisi usaha yang penuh tantangan dengan baik. Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan langkah-langkah antisipatif dengan tepat melalui pelaksanaan beragam kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak positif bagi Bank. Pertumbuhan bisnis dilakukan secara terukur, diikuti dengan efisiensi biaya dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dalam meraih target yang hendak dicapai. Pengembangan layanan *digital banking* baik melalui penambahan ragam produk digital, peningkatan infrastruktur teknologi informasi terkini dan peningkatan aspek keamanan membuat Bank semakin mendekati capaian target Akuisisi 1 juta nasabah. Bank mencapai hasil tersebut melalui intensifikasi program-program yang diinisiasi sendiri maupun melalui peningkatan skema maupun skala kolaborasi kerjasama B2B dengan *partner* pihak ketiga dan didukung dengan *upgrade core banking system*.

Selain pada aspek operasional, Bank juga mencatatkan kinerja keuangan yang semakin membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2024, Bank Artha Graha Internasional membukukan Laba Bersih sebesar Rp152,47 miliar, meningkat 4% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp146,75

Financing receivables from financing companies (multifinance) continued to grow, with a 6.92% YoY increase recorded in December 2024. This growth was driven by a 10.47% YoY rise in investment financing. Meanwhile, the insurance industry showed more moderate growth, with total premium collections increasing by 4.91% YoY to IDR15.70 trillion in December 2024, while fintech companies also grew as an alternative to bank lending.

In line with global trends, digital banking transactions and services continued to grow rapidly, supporting economic transaction convenience. The rapid development of digital technology and the internet, along with changing consumer spending patterns, has driven the growth of digital banking. Bank Indonesia (BI) data indicates that in 2024, the volume of digital banking transactions reached 34.5 billion, growing by 36.6% YoY, with the value of transactions totaling IDR87 quadrillion. BI data also showed that mobile banking transactions grew by 39.1%, internet banking by 4.4%, BI Fast by 62.4%, and QRIS by 175.2%, supported by an increase in the number of users and merchants.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

The Board of Commissioners assesses that throughout 2024, the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities and responded well to the challenging business conditions. The Board of Commissioners believes the Board of Directors has taken appropriate anticipatory measures through the implementation of various strategic policies that have had a positive impact on the Bank. Business growth has been carried out in a measured way, followed by cost efficiency and the optimization of available resources to achieve the set targets. The development of digital banking services, including the addition of various digital products, enhancement of the latest information technology infrastructure, and improvements in security aspects, has brought the Bank closer to its target of acquiring 1 million customers. The Bank achieved this through the intensification of self-initiated programs as well as by enhancing schemes or the scale of B2B collaboration partnerships with third-party partners, supported by an upgrade to the core banking system.

In addition to operational aspects, the Bank also recorded improved financial performance compared to the previous year. In 2024, Bank Artha Graha Internasional posted a Net Profit of IDR152.47 billion, an increase of 4% compared to IDR146.75 billion the previous year. In addition to contributions from net

miliar. Selain dikontribusikan oleh pendapatan bunga bersih, peningkatan laba bersih tersebut juga dikontribusikan oleh meningkatnya secara signifikan *fee based income* dari transaksi digital banking hasil pengembangan layanan digital. Transaksi digital di tahun 2024 naik hampir 1.736% bila dibandingkan dengan 2023 yang berasal dari kerjasama mitra bisnis yang berimbas pada peningkatan nilai *fee based income* digital yang naik hingga 540.4%. Kualitas aset Bank juga terjaga dengan baik, tercermin dari rasio NPL Gross sebesar 2.40%, dan NPL Net sebesar 0.77%. Secara keseluruhan total aset Bank mencatatkan peningkatan 15% dari senilai Rp26,10 triliun menjadi sebesar Rp30,12 triliun pada akhir tahun 2024.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas jalannya pengelolaan Bank oleh Direksi, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perusahaan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan terhadap perumusan dan implementasi strategi Perseroan. Pengawasan terhadap perumusan strategi Perseroan dilaksanakan pada tahap penyusunan Rencana Strategis Bank dan Rencana Bisnis Bank (RBB). Sedangkan pengawasan terhadap implementasi strategi dilakukan melalui pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan bisnis Perseroan.

Saat menyusun, menetapkan target dan merumuskan strategi tahun 2024, Dewan Komisaris memberikan arahan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan geopolitik dalam dan luar negeri. Dewan Komisaris juga memperhatikan faktor-faktor internal yang perlu ditingkatkan dan dilengkapi dalam menjalankan strategi untuk mencapai target 2024.

Pada pengawasan implementasi strategi digitalisasi, dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, dengan menerapkan mekanisme *project management* dan sistem pelaporan *progress project* yang terstruktur. Pengawasan dilakukan melalui beberapa mekanisme utama. Pertama, rapat koordinasi bulanan/*ad hoc* untuk memantau progress dan kendala. Kedua, *dashboard monitoring project* yang memberikan *visibility real-time* terhadap progress digitalisasi. Ketiga, laporan implementasi bulanan yang mencakup pencapaian target, analisis gap, dan rencana tindak lanjut.

interest income, the increase in net profit was also driven by a significant rise in fee-based income from digital banking transactions resulting from the development of digital services. Digital transactions in 2024 increased by nearly 1,736% compared to 2023, driven by collaborations with business partners, which led to a 540.4% increase in the value of digital fee-based income. The Bank's asset quality was also well-maintained, as reflected in the Gross NPL ratio of 2.40% and Net NPL ratio of 0.77%. Overall, the Bank's total assets grew by 15%, from IDR26.10 trillion to IDR30.12 trillion by the end of 2024.

SUPERVISION OF STRATEGY IMPLEMENTATION

The Board of Commissioners is responsible for overseeing the management of the Bank by the Board of Directors, providing advice to the Board of Directors, and ensuring that the Company implements Good Corporate Governance.

The Board of Commissioners continuously supervises the formulation and implementation of the Company's strategy. Supervision of the formulation of the Company's strategy is carried out during the preparation of the Bank's Strategic Plan and the Bank's Business Plan (RBB). Meanwhile, supervision of strategy implementation is done through monitoring and providing advice to the Board of Directors in carrying out the Company's business activities.

When setting targets and formulating strategies for 2024, the Board of Commissioners provided direction by considering both domestic and international economic and geopolitical conditions. The Board of Commissioners also took into account internal factors that needed improvement and enhancement in executing the strategy to achieve the 2024 targets.

In supervising the implementation of the digitalization strategy, a systematic approach was applied, utilizing project management mechanisms and structured project progress reporting systems. Supervision was carried out through several main mechanisms. First, monthly/ad-hoc coordination meetings to monitor progress and obstacles. Second, a project monitoring dashboard providing real-time visibility of digitalization progress. Third, monthly implementation reports covering target achievements, gap analysis, and follow-up plans.

Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi atas kinerja keuangan dan operasional bisnis Bank, termasuk pelaksanaan program pengembangan kapasitas dan kapabilitas seluruh jajaran insan Bank Artha Graha Internasional. Beberapa program yang dilaksanakan, antara lain: pengembangan bisnis digital dan keamanan siber, pengembangan sumber daya manusia, penerapan teknologi digital perbankan strategi perkreditan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta pengawasan terhadap implementasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal.

MEKANISME DAN FREKUENSI PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan antara lain melalui: rapat berkala Dewan Komisaris dan Direksi setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau melalui saluran komunikasi dan interaksi lainnya. Dalam forum tersebut, Dewan Komisaris meminta penjelasan dari Direksi mengenai pencapaian kinerja Bank Artha Graha Internasional dan berbagai kendala yang dihadapi beserta solusinya. Dewan Komisaris menyampaikan pandangan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai hal tersebut.

Selain melalui rapat, pengawasan Dewan Komisaris juga dilakukan secara langsung melalui komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap laporan audit internal maupun eksternal, memberikan pengarahannya, serta memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta otoritas lainnya.

Beberapa bidang yang menjadi fokus pengawasan Dewan Komisaris di tahun 2024, antara lain mencakup: pengelolaan likuiditas, pendanaan dan penyaluran dana, kualitas kredit dan penyelesaian kredit bermasalah serta AYDA, permodalan, pengembangan *digital banking* dan *upgrade core banking*, dan pengembangan SDM dan kaderisasi.

Dewan Komisaris mendukung dan melakukan pengawasan dalam mempersiapkan pembangunan infrastruktur yang memadai, khususnya yang terkait dengan SDM, TI dan kebijakan internal, agar Bank dapat meningkatkan daya saing dan mengatasi kondisi usaha di tahun 2024. Khusus untuk pengembangan *digital banking* dan *upgrade core banking*, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk lebih selektif dalam

The Board of Commissioners also evaluates the financial and operational performance of the Bank, including the implementation of programs to develop the capacity and capability of all personnel at Bank Artha Graha Internasional. Some of the programs implemented include: the development of digital business and cybersecurity, human resource development, the application of digital banking technology, crediting strategies that emphasize prudence, and supervision of risk management implementation and internal control systems.

MECHANISMS AND FREQUENCY OF SUPERVISION

Supervision is carried out through various means, including periodic meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors at least 1 (once) every 4 (four) months or through other communication and interaction channels. In these forums, the Board of Commissioners requests explanations from the Board of Directors regarding the performance achievements of Bank Artha Graha Internasional and any challenges faced, along with their solutions. The Board of Commissioners provides feedback and advice to the Board of Directors on these matters.

In addition to meetings, the supervision by the Board of Commissioners is also carried out directly through the committees under the Board of Commissioners. The Board of Commissioners also supervises both internal and external audit reports, provides direction, and ensures that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from Internal Audit, External Auditors, as well as findings from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and other relevant authorities.

Several areas of focus for the Board of Commissioners' supervision in 2024 included: liquidity management, funding and fund distribution, credit quality and resolution of non-performing loans and AYDA (Assets Yielding Deterioration), capital, the development of digital banking and core banking system upgrades, and Human Capital (HC) development and succession planning.

The Board of Commissioners supports and supervises the preparation of adequate infrastructure, particularly related to HC, Information Technology (IT), and internal policies, to enhance the Bank's competitiveness and address business conditions in 2024. Specifically, regarding the development of digital banking and core banking upgrades, the Board of Commissioners advised the Board of Directors to be more selective in choosing

memilih *partner* agar diperoleh *partner* yang berkinerja baik, kerjasama berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk menjaga penyaluran kredit secara *prudent* dengan menerapkan manajemen risiko yang semakin ditingkatkan.

Terkait peningkatan kualitas SDM, Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menerapkan sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dan menjalankan program pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan yang sesuai dengan kebutuhan unit kerja dan target bisnis, agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif.

Dewan Komisaris melihat target dan strategi yang disampaikan dalam RBB, tergolong *challenging* namun diyakini akan dapat dicapai. Mengacu pada keunggulan dan sumber daya yang saat ini dimiliki, Bank diyakini akan dapat mewujudkan target yang ditetapkan tersebut. Namun demikian Dewan Komisaris memberikan saran agar pencapaian target tersebut tetap dilakukan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Dewan Komisaris memastikan Bank Artha Graha Internasional telah dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mengacu pada kaidah serta prinsip GCG. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa pengelolaan Bank Artha Graha Internasional telah sesuai dengan visi, misi dan nilai-nilai serta aspirasi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan seluruh pemangku kepentingan.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA BANK YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Perekonomian global pada 2025 diperkirakan masih diwarnai oleh ketidakpastian, terutama akibat dinamika kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan yang diterapkan berbagai negara maju. Selain itu, tekanan terhadap nilai tukar di berbagai negara berkembang maupun *emerging market* tetap tinggi, dengan dolar AS yang berpotensi melanjutkan penguatan. Pemerintahan baru Amerika Serikat yang cenderung menerapkan kebijakan proteksionisme melalui penerapan fiskal yang tinggi membawa risiko tambahan, yakni meningkatnya perselisihan perdagangan dengan skala yang lebih luas antara negara-negara maju dengan AS. Sementara itu, harga komoditas energi diperkirakan cenderung melemah, membuat inflasi global melanjutkan tren penurunannya. Secara keseluruhan, dinamika perekonomian global ini diperkirakan berdampak pada volume perdagangan dunia, yang diproyeksikan tumbuh sebesar 3,2% pada 2025,

partners to ensure high-performing collaborations that comply with applicable regulations. The Board of Commissioners also encouraged the Board of Directors to maintain prudent credit distribution by implementing enhanced risk management practices.

Concerning the improvement of HC quality, the Board of Commissioners requested the Board of Directors to implement a comprehensive performance evaluation system and conduct training and competency development programs that align with the needs of each work unit and business targets, ensuring the effectiveness of program implementation.

The Board of Commissioners views the targets and strategies outlined in the Business Plan (RBB) as challenging but believes they are achievable. Based on the current strengths and resources available, the Bank is expected to meet the set targets. However, the Board of Commissioners recommends that the achievement of these targets be carried out with a focus on maintaining prudence.

The Board of Commissioners ensures that Bank Artha Graha Internasional is managed in accordance with applicable laws and regulations while adhering to the principles of Good Corporate Governance (GCG). The Board of Commissioners also ensures that the management of Bank Artha Graha Internasional is in line with the vision, mission, values, and aspirations of the Shareholders, while considering the interests of all stakeholders.

OUTLOOK ON BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The global economy in 2025 is expected to remain characterized by uncertainty, particularly due to the dynamics of monetary, fiscal, and trade policies implemented by various developed countries. Additionally, pressures on exchange rates in emerging and developing markets are expected to remain high, with the US dollar potentially continuing to strengthen. The new administration in the United States, which is likely to adopt protectionist policies through high fiscal measures, presents an additional risk-namely, the intensification of trade disputes between developed countries and the US. Meanwhile, energy commodity prices are expected to weaken, causing global inflation to continue its downward trend. Overall, these global economic dynamics are likely to impact global trade volume, which is projected to grow by 3.2% in 2025.

IMF WEO Januari 2025, memprakirakan bahwa perekonomian global pada 2025 akan mencatatkan sedikit perbaikan, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 3,3% (yoy), dibandingkan 3,2% (yoy) pada 2024. Pertumbuhan ekonomi AS pada 2025 diperkirakan sedikit melambat menjadi 2,7% dari 2,8% di tahun sebelumnya. Sementara perekonomian berbagai negara yang sebelumnya menurun, seperti kawasan Eropa, Jepang, Inggris maupun Jerman tumbuh membaik.

Mengacu pada berbagai indikator serta capaian yang telah diraih sepanjang 2024, perekonomian Indonesia pada 2025 diperkirakan tumbuh dalam rentang 5,0%-5,2%, disertai inflasi yang tetap terkendali di kisaran 2,5% $\pm$ 1%. Beberapa faktor yang diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia pada 2025 dan tahun-tahun berikutnya adalah konsumsi domestik yang tetap kuat, realisasi investasi swasta maupun pemerintah yang terakselerasi, serta berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai sektor.

Kinerja industri keuangan umumnya, dan kinerja intermediasi industri perbankan pada khususnya diprakirakan melanjutkan tren pertumbuhan. Segmen UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan relatif lebih tahan terhadap guncangan perekonomian global diprakirakan juga melanjutkan tren pertumbuhan. Transaksi digital, diprakirakan juga terus tumbuh, dengan volume transaksi maupun nilai transaksi yang semakin meningkat, didukung oleh pesatnya perkembangan aplikasi teknologi informasi yang semakin memudahkan masyarakat. Untuk tahun 2025, BI memprakirakan transaksi pembayaran digital, yakni transaksi melalui aplikasi *mobile* dan internet, tumbuh dengan tingkat yang lebih tinggi, yakni 52%. Adapun volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST juga diperkirakan tumbuh 34,1% (yoy), dengan nilai transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS diperkirakan tumbuh 11,4% (yoy).

Di tengah tantangan pertumbuhan ekonomi yang terbatas dan geopolitik yang tidak stabil, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi perlu menyeimbangkan berbagai target yang ditetapkan dengan langkah-langkah yang *prudent*, serta siap menghadapi guncangan yang mungkin terjadi serta didukung oleh manajemen risiko yang baik. Direksi harus tetap *agile* untuk memanfaatkan berbagai peluang-peluang bisnis yang ada untuk mencapai target yang ditetapkan.

Dewan Komisaris senantiasa mendukung Direksi mengoptimalkan segala daya dan upaya untuk memanfaatkan peluang bisnis di tengah kondisi ekonomi yang masih cukup menantang namun menghadirkan peluang yang menjanjikan, melanjutkan implementasi strategi jangka panjang, serta

The IMF World Economic Outlook (WEO) for January 2025 forecasts a slight improvement in the global economy in 2025, with economic growth reaching 3.3% (YoY), compared to 3.2% (YoY) in 2024. The US economy in 2025 is expected to slow slightly to 2.7% from 2.8% the previous year. Meanwhile, the economies of various countries that had previously declined, such as the European region, Japan, the United Kingdom, and Germany, have shown improvement.

Referring to various indicators and achievements throughout 2024, Indonesia's economy in 2025 is expected to grow within the range of 5.0%-5.2%, with inflation remaining under control at around 2.5% $\pm$ 1%. Several factors are expected to positively impact Indonesia's economy in 2025 and beyond, including strong domestic consumption, accelerated private and government investment realization, and the continuation of the National Strategic Projects (PSN) in various sectors.

The performance of the financial industry in general, and particularly the banking sector's intermediation performance, is expected to continue its growth trend. The MSME segment, which absorbs a large workforce and is relatively resilient to global economic shocks, is also expected to maintain its growth trajectory. Digital transactions are anticipated to continue growing, with both transaction volumes and values increasing, supported by rapid development in information technology applications that make it easier for the public. In 2025, Bank Indonesia (BI) forecasts a higher growth rate for digital payment transactions-through mobile and internet applications-at 52%. Meanwhile, retail transaction volumes processed through BI-FAST are expected to grow by 34.1% (YoY), and large-value transactions processed through BI-RTGS are projected to grow by 11.4% (YoY).

Amid the challenges of limited economic growth and unstable geopolitical conditions, the Board of Commissioners believes that the Board of Directors needs to balance the targets set with prudent measures, while being prepared for potential shocks, supported by sound risk management. The Board of Directors must remain agile to capitalize on business opportunities to achieve the set targets.

The Board of Commissioners continues to support the Board of Directors in optimizing all efforts to seize business opportunities amid challenging economic conditions, which still present promising prospects. This includes continuing the implementation of long-term strategies and enhancing the

meningkatkan kapabilitas Bank Artha Graha Internasional dalam mempertahankan, bahkan meningkatkan profitabilitas maupun pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

PANDANGAN ATAS TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi telah melakukan tugasnya dalam melakukan perbaikan kualitas penerapan *best practice* GCG dengan cukup baik, dengan tujuan memperbaiki kinerja Bank dan meningkatkan daya saing Bank dengan senantiasa menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang terus ditingkatkan kualitasnya.

Pelaksanaan GCG menjadi salah satu fokus utama Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan. Untuk itu Dewan Komisaris memberikan berbagai saran dan nasihat dalam meningkatkan kualitas penerapan tata kelola Bank, termasuk mengadopsi penerapan prinsip-prinsip tata kelola terkini yang disampaikan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi.

PENGEMBANGAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Dewan Komisaris mengapresiasi langkah-langkah yang telah dijalankan Direksi dalam mengintegrasikan seluruh kegiatan operasional pada seluruh lini usaha, sehingga kinerja Bank pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial kini dapat dijalankan serta dinilai sebagai satu kesatuan. Kami memandang kemajuan tersebut sebagai wujud komitmen Bank dalam mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan, menunjukkan bahwa Bank Artha Graha Internasional telah mengikuti tren pengelolaan kegiatan perbankan modern yang semakin lebih menjamin tercapainya peningkatan skala usaha yang berkualitas dalam jangka panjang.

Kami juga mengapresiasi langkah Direksi dalam menjalankan program-program dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan yang disampaikan dalam dokumen Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), dimana progres dan realisasinya disampaikan secara berkala kepada Regulator dalam Laporan Keberlanjutan. Dewan Komisaris memandang pelaksanaan program dan pelaporan hasilnya secara berkala tersebut menunjukkan Bank tidak hanya menjalankan ketentuan regulasi, namun juga mendukung penuh upaya yang

capabilities of Bank Artha Graha Internasional to sustain and even improve profitability and healthy, sustainable growth.

OUTLOOK ON CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors has carried out its duties in improving the quality of implementing best practice Corporate Governance (GCG) quite well to enhance the Bank's performance and competitiveness while upholding the principles of prudence and continuously improving the quality of the risk management framework.

The implementation of GCG has been one of the main focuses of the Board of Commissioners in conducting oversight. To this end, the Board of Commissioners has provided various suggestions and advice on improving the quality of the Bank's governance practices, including adopting the latest governance principles outlined by the National Committee on Governance Policy.

SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

The Board of Commissioners appreciates the steps taken by the Board of Directors in integrating all operational activities across all business lines, so that the Bank's performance in the economic, environmental, and social aspects can now be carried out and assessed as a unified whole. We view this progress as a manifestation of the Bank's commitment to supporting the achievement of sustainability goals, demonstrating that Bank Artha Graha Internasional has kept pace with modern banking practices, ensuring the long-term achievement of quality business growth.

We also appreciate the Board of Directors' efforts in implementing programs that support the achievement of sustainability goals as outlined in the Sustainable Finance Action Plan (RAKB), where progress and realization are periodically reported to Regulators in the Sustainability Report. The Board of Commissioners views the implementation of these programs and the periodic reporting of their results as demonstrating that the Bank is not only complying with regulatory requirements but

dijalankan Pemerintah Indonesia maupun masyarakat global dalam mencapai berbagai tujuan keberlanjutan, sekaligus meningkatkan nilai perusahaan bagi pemangku kepentingan maupun masyarakat dalam jangka panjang.

Mempertimbangkan besarnya manfaat pelaksanaan program-program keberlanjutan tersebut, Dewan Komisaris mengamanatkan agar Direksi semakin meningkatkan skala program, dengan menambah portofolio penyaluran kredit keberlanjutan sesuai kriteria regulator sekaligus meningkatkan intensitas pengelolaan kegiatan perbankan hijau. Kami memandang dengan semakin meningkatnya portofolio kredit keberlanjutan tersebut, dimasa mendatang akan semakin terbuka peluang bagi Bank untuk mendapatkan sumber dana hijau melalui penerbitan obligasi berkelanjutan yang dapat digunakan untuk meningkatkan lebih lanjut portofolio keberlanjutan, selain dapat digunakan untuk mendukung meningkatnya intensitas penerapan perbankan hijau. Dengan demikian akan semakin tampak kiprah Bank Artha Graha Internasional dalam mendukung tercapainya ekosistem ekonomi dan perbankan hijau yang rendah karbon, membaiknya kinerja Bank sekaligus menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dimasa mendatang.

PANDANGAN ATAS WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/ WBS*) merupakan wujud komitmen Bank Artha Graha Internasional untuk meningkatkan kualitas penerapan *best practice* GCG sebagai landasan dari setiap aspek operasi dan bisnis Bank sehari-hari. Melalui WBS, pihak eksternal maupun internal Perusahaan dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan, nilai-nilai etika, dan kebijakan atau prosedur yang berlaku, berdasarkan bukti/data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Bank. Dengan demikian WBS menjadi sarana deteksi dini dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dalam setiap aspek operasional. Dengan penerapan WBS diharapkan tercipta iklim kerja yang tulus, jujur, bertanggung jawab, berintegritas dan transparan dilingkungan Bank.

Dewan Komisaris menilai penerapan WBS dinilai telah berjalan dengan baik namun senantiasa dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya sebagai *early warning system* bagi Bank dan memastikan bahwa setiap laporan telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

also fully supporting the efforts of the Indonesian government and the global community in achieving various sustainability goals, while simultaneously enhancing the company's value for stakeholders and society in the long term.

Considering the significant benefits of implementing these sustainability programs, the Board of Commissioners mandates that the Board of Directors further scale up these programs by increasing the portfolio of sustainable credit distribution under regulatory criteria, while also enhancing the intensity of green banking activities. We believe that as the sustainable credit portfolio grows, future opportunities will arise for the Bank to access green funding sources through the issuance of sustainable bonds, which can be used to further enhance the sustainability portfolio, as well as support the increased intensity of green banking practices. In this way, the role of Bank Artha Graha Internasional in supporting the achievement of a low-carbon green economy and banking ecosystem will become more apparent, improving the Bank's performance while ensuring the increased well-being of society in the future.

OUTLOOK ON THE WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Whistleblowing System (WBS) is a reflection of Bank Artha Graha Internasional's commitment to improving the quality of best practice implementation of Corporate Governance (GCG) as the foundation of every aspect of the Bank's daily operations and business. Through the WBS, both external and internal parties of the Company can report alleged violations of corporate governance principles, ethical values, and applicable policies or procedures, based on accountable evidence/data/information and with good intentions for the Bank's interests. Thus, the WBS serves as an early detection tool for preventing violations in all operational aspects. With the implementation of the WBS, it is expected to create a work environment that is sincere, honest, responsible, transparent, and full of integrity within the Bank.

The Board of Commissioners believes that the WBS has been effectively implemented but is continuously evaluated to improve its quality as an early warning system for the Bank, ensuring that every report is followed up in accordance with applicable regulations.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam menjalankan fungsinya masing-masing, Dewan Komisaris mengarahkan komite-komite tersebut dengan aktif melaksanakan monitoring bersama dengan Direksi terkait.

Dewan Komisaris menilai Komite di bawah Dewan Komisaris selama tahun 2024 telah bekerja dengan baik menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris. Seluruh rekomendasi masing-masing Komite juga telah diterima oleh Dewan Komisaris dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan terhadap usulan yang disampaikan Direksi.

Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal. Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan Komite Remunerasi dan Nominasi telah membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam hal penerapan kebijakan remunerasi dan nominasi antara lain terkait dengan kebijakan remunerasi pegawai secara keseluruhan serta memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Untuk menjaga kesinambungan kinerja, Dewan Komisaris mengharapkan seluruh anggota komite agar terus meningkatkan kompetensi mereka di bidang masing-masing dan tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya dengan dedikasi dan integritas tinggi

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2024 tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 26 Juni 2024 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.05 tanggal 17 Juli 2024.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee. In performing their respective functions, the Board of Commissioners actively directs these committees to carry out monitoring together with the relevant Board of Directors.

The Board of Commissioners evaluates that the committees under the Board of Commissioners have performed well in 2024, fulfilling their duties and responsibilities in supporting the supervisory function carried out by the Board of Commissioners. All recommendations from each committee have also been received by the Board of Commissioners and have been taken into consideration in the decision-making process for the proposals submitted by the Board of Directors.

The Audit Committee has monitored and evaluated internal controls and the implementation of internal and external audit functions. The Risk Monitoring Committee has evaluated the alignment between risk management policies and their implementation. Meanwhile, the Remuneration and Nomination Committee has assisted in the supervisory and mentoring functions of the Board of Commissioners toward the Board of Directors and its members, particularly concerning the implementation of remuneration and nomination policies, including those related to overall employee remuneration policies, and has provided proposals for candidates who meet the qualifications to serve as members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners for approval at the General Meeting of Shareholders.

To ensure continued performance, the Board of Commissioners expects all committee members to continue enhancing their competencies in their respective fields and to remain consistent in performing their duties with dedication and high integrity.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2024, there were no changes in the composition of the Board of Commissioners, as per the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on June 26, 2024, and documented in the Deed of Meeting Resolution No. 05 dated July 17, 2024.

PENUTUP

Kepada seluruh pemegang saham dan investor, Dewan Komisaris menghaturkan rasa terima kasih atas kepercayaan dan dukungan penuh yang telah diberikan kepada kami untuk mengemban amanat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Bank. Demikian pula kepada regulator dan para pemangku kepentingan, Dewan Komisaris menyampaikan rasa terima kasih sebesar- besarnya atas dukungan yang telah diberikan.

Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada Direksi atas kerja keras dan dedikasinya, kepada seluruh karyawan dan seluruh pihak yang turut berkontribusi bagi kinerja Bank, sehingga Bank Artha Graha Internasional dapat merespons tantangan bisnis sepanjang tahun 2024. Dewan Komisaris meyakini tahun 2024 telah memberikan banyak pembelajaran yang sangat berharga dan membuat fondasi Bank semakin kokoh. Oleh karena itu, Dewan Komisaris berharap Direksi dan seluruh Insan Bank untuk terus melanjutkan akselerasi transformasi digital, meningkatkan efisiensi, serta menerapkan strategi yang adaptif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian demi mencatatkan performa yang lebih baik dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga hubungan yang harmoni ini mampu menjadi dasar bagi Bank Artha Graha Internasional untuk terus tumbuh secara berkelanjutan, dan mampu memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan.

CLOSING REMARKS

To all shareholders and investors, the Board of Commissioners expresses its sincere gratitude for the trust and full support that has been given to us in carrying out the mandate to oversee the management of the Bank. Similarly, to the regulators and all stakeholders, the Board of Commissioners extends its deepest appreciation for the support provided.

The Board of Commissioners also thanks and expresses appreciation to the Board of Directors for their hard work and dedication, to all employees, and to all parties who have contributed to the Bank's performance, enabling Bank Artha Graha Internasional to respond to the business challenges throughout 2024. The Board of Commissioners believes that 2024 has provided valuable lessons and strengthened the foundation of the Bank. Therefore, the Board of Commissioners hopes that the Board of Directors and all employees of the Bank will continue to accelerate digital transformation, enhance efficiency, and implement adaptive strategies while maintaining a focus on prudence to achieve better and sustainable performance in the coming years.

May this harmonious relationship continue to serve as the foundation for Bank Artha Graha Internasional's sustained growth and its ability to provide added value to shareholders and all stakeholders.

Jakarta, 26 Maret 2025

Jakarta, March 26, 2025

Atas Nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioners

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk



Kiki Syahnakri
Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.

LAPORAN DIREKSI

Board of Directors Report



Andy Kasih



Direktur Utama
President Director

Bank Artha Graha Internasional berfokus untuk mengatasi kendala dan tantangan yang menyertai dinamisnya kondisi perekonomian dan kondisi usaha di tahun 2024 yang penuh ketidakpastian. Dan, Bank berupaya meraih peluang pertumbuhan dengan berfokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar dengan tingkat risiko yang sesuai dengan *risk appetite* Bank. Hasilnya, Bank mencatatkan perbaikan kinerja, meraih laba lebih baik dari tahun sebelumnya dan memperkuat fondasi untuk berkembang lebih baik di masa mendatang.

Bank Artha Graha Internasional focused on addressing the obstacles and challenges arising from the dynamic economic conditions and business environment in 2024, a year marked by uncertainty. At the same time, the Bank sought to seize growth opportunities by concentrating on sectors with significant potential and risk levels aligned with the Bank's risk appetite. As a result, the Bank recorded improved performance, achieved higher profits compared to the previous year, and strengthened its foundation for better growth in the future.

PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya, Bank Artha Graha Internasional dapat melalui tahun 2024 yang penuh tantangan dan ketidakpastian dengan pencapaian yang baik. Selanjutnya, perkenankan kami atas nama Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja dan pencapaian Bank Artha Graha Internasional untuk tahun 2024.

KONDISI EKONOMI DAN INDUSTRI PERBANKAN TAHUN 2024

Berkepanjangannya konflik geopolitik di Ukraina, merebaknya konflik di Timur Tengah, dan pertumbuhan perekonomian AS yang mengakibatkan mata uang dolar AS menguat terhadap semua mata uang kuat dunia, membuat perekonomian global di tahun 2024 berkembang menjadi penuh tantangan dan ketidakpastian. Hal ini tercermin dari terbatasnya penurunan suku bunga rujukan Bank Sentral AS, *The Fed*, di tengah kuatnya data ekonomi AS dan solidnya kondisi pasar tenaga kerja.

DEAR SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS

Praise and gratitude are offered to God Almighty, for by His blessings and grace, Bank Artha Graha Internasional was able to navigate the challenging and uncertain year of 2024 with commendable achievements. On behalf of the Board of Directors, allow us to present this accountability report on the performance and accomplishments of Bank Artha Graha Internasional in 2024.

ECONOMIC CONDITIONS AND BANKING INDUSTRY IN 2024

The prolonged geopolitical conflict in Ukraine, the escalation of tensions in the Middle East, and strong economic growth in the United States, leading to the appreciation of the U.S. dollar against all major global currencies, turned the global economy in 2024 into one marked by significant challenges and uncertainties. This was reflected in the limited reduction of the U.S. Federal Reserve's benchmark interest rates, amid strong U.S. economic data and a resilient labor market.

Sebagai akibatnya, tingkat pertumbuhan negara-negara di berbagai kawasan utama dunia cenderung menurun dengan perbedaan yang kontras, berbeda dengan perekonomian AS yang tetap tinggi. Pada akhir tahun 2024, terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS, membuat perekonomian dunia ditahun-tahun mendatang dihadapkan pada risiko perang dagang baru dan terus menguatnya dolar AS, yang akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian dunia dimasa mendatang.

Kondisi tersebut membuat IMF dalam rilisnya - *World Economic Outlook* (WEO), Januari 2025, memprakirakan pertumbuhan ekonomi global di 2024 hanya sebesar 3,2% (yoy) menurun dari 3,3% di tahun 2023, untuk kemudian sedikit meningkat menjadi 3,3% di tahun 2025 maupun 2026. Namun tingginya nilai tukar dolar AS dan beratnya kondisi domestik, membuat pertumbuhan negara-negara maju maupun *new emerging market* lainnya bervariasi. Perekonomian kawasan Euro di tahun 2024, tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun negara-negara lainnya, seperti Jepang, China, India dan Kanada mencatatkan penurunan pertumbuhan.

Dari sisi volume perdagangan dunia, IMF memproyeksikan pertumbuhan sebesar 3,4% pada 2024, atau meningkat pesat dibandingkan capaian di 2023 yang hanya sebesar 0,7%. Dalam rilisnya, IMF juga memprediksi inflasi global, sekalipun mulai menurun tetap berada di level yang tinggi, yakni di kisaran 5,7% dari 6,7% pada 2023. Kondisi tersebut membuat *Global Manufacturing PMI* 2024, per November, menurut J.P. Morgan dan S&P Global berada di level 49,4 atau berada di zona kontraksi (di bawah 50,0). Namun posisi tersebut menunjukkan peningkatan dari bulan sebelumnya di level 48,7.

Di tengah ketidakpastian dan gejolak perekonomian global tersebut, perekonomian nasional tetap menunjukkan ketangguhannya dengan mencatatkan pertumbuhan positif. Data BPS menunjukkan, perekonomian Indonesia di tahun 2024 tumbuh 5,03% (yoy), sedikit melemah dari 5,05% di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar ditopang oleh industri pengolahan dengan porsi kontribusi terbesar, mencapai 18,98%, diikuti sektor perdagangan 13,07%, konstruksi 10,09%, dan pertambangan 9,15% semuanya tumbuh positif. Adapun lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah jasa lainnya yang tumbuh 9,80%, transportasi & pergudangan tumbuh 8,69%, serta akomodasi meningkat 8,56%.¹

As a result, growth rates in many major global regions tended to decline, showing stark contrasts, particularly when compared to the still-strong U.S. economy. At the end of 2024, the re-election of Donald Trump as President of the United States raised concerns over the potential for new trade wars and continued U.S. dollar strengthening, both of which could pose risks to global economic growth in the coming years.

In light of these developments, the IMF's World Economic Outlook (WEO) released in January 2025 projected global economic growth in 2024 at just 3.2% year-on-year, down from 3.3% in 2023. Growth is expected to rise slightly to 3.3% in both 2025 and 2026. However, the strength of the U.S. dollar and challenging domestic conditions have caused growth patterns to vary across both advanced economies and emerging markets. While the Eurozone economy posted stronger growth in 2024 compared to the previous year, other countries such as Japan, China, India, and Canada experienced slower growth.

In terms of global trade volume, the IMF projected growth of 3.4% in 2024, a significant increase from just 0.7% in 2023. The IMF also forecasted that global inflation, while beginning to decline, would remain elevated at around 5.7%, down from 6.7% in 2023. These conditions led to the Global Manufacturing PMI for November 2024, reported by J.P. Morgan and S&P Global, being recorded at 49.4, indicating contraction (a reading below 50.0), although this represented an improvement from the previous month's 48.7.

Amid this global uncertainty and volatility, Indonesia's economy continued to demonstrate resilience by maintaining positive growth. According to data from Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's economy grew by 5.03% year-on-year in 2024, a slight decline from 5.05% in the previous year. This growth was primarily driven by the manufacturing sector, which contributed the largest share at 18.98%, followed by trade at 13.07%, construction at 10.09%, and mining at 9.15%—all recording positive growth. The highest growth rates by sector were seen in other services (9.80%), transportation and warehousing (8.69%), and accommodation (8.56%).¹

¹ BPS.

Sedangkan dari aspek pengeluaran, konsumsi rumah tangga dengan porsi mencapai 54,04%, kembali menjadi penopang perekonomian nasional dengan tumbuh 4,94%. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga didukung oleh keberhasilan pemerintah dalam mengelola laju inflasi sehingga mencatatkan tingkat yang rendah, yaitu 1,57%.

Kondisi Industri Perbankan Nasional

Perbaikan iklim investasi yang terus dilakukan Pemerintah memicu meningkatnya realisasi investasi, baik dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja maupun kredit konsumsi di berbagai daerah. Realisasi investasi infrastruktur konektivitas, baik dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non PSN terus meningkat, yang kemudian memicu tumbuhnya investasi di sektor-sektor lain di berbagai daerah. Hal ini memicu pertumbuhan permintaan pendanaan dari sektor perbankan maupun sektor keuangan lainnya.

Data OJK menunjukkan kinerja perbankan nasional dalam menopang perekonomian selama tahun 2024 tetap menunjukkan tren positif, baik dari sisi pembiayaan (perkreditan), penghimpunan dana, maupun perolehan laba. Kredit perbankan tumbuh 10,4% (yoy) pada Desember 2024, didorong oleh peningkatan pada beberapa segmen utama. Kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,62% (yoy) pada Desember, diikuti oleh kredit konsumsi yang tumbuh 10,61% (yoy), serta kredit modal kerja yang meningkat 8,35% (yoy). Peningkatan kredit tersebut diimbangi dengan perbaikan kualitas kredit, yang tercermin dari penurunan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) gross menjadi 2,08% pada Desember 2024, dibandingkan 2,38% pada tahun 2023. Sementara itu, dari sisi permodalan, rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tetap kuat, mencapai 26,69% pada Desember 2024.

Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh 4,48% (yoy, Desember 2024), didorong oleh peningkatan giro, tabungan, dan deposito, yang masing-masing tumbuh 3,34% (yoy), 6,78% (yoy), dan 3,50% (yoy). Sementara itu, likuiditas industri perbankan tetap terjaga dengan baik pada tingkat yang memadai.

Untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia (BI) terus memperkuat respons bauran kebijakan. Kebijakan moneter tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*), sementara kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (*pro-growth*). Sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, BI mempertahankan BI-Rate pada level 6,00%, konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang *pro-stability* dan *pro growth*.

From the expenditure perspective, household consumption, making up 54.04% of GDP, remained the main driver of Indonesia's economy, growing by 4.94%. Economic growth was also supported by the government's success in managing inflation, which was kept at a low level of 1.57%.

National Banking Industry Conditions

The government's continuous efforts to improve the investment climate have driven increased investment realization across various regions, both in the form of investment loans, working capital loans, and consumer loans. Infrastructure development, especially in connectivity, whether under the National Strategic Projects (PSN) or non-PSN initiatives, has continued to grow, spurring further investment in other sectors throughout the country. This has led to growing demand for financing from both the banking and broader financial sectors.

According to data from the Financial Services Authority (OJK), the performance of the national banking industry throughout 2024 continued to show a positive trend in terms of lending, fund gathering, and profit generation. Bank lending grew by 10.4% (yoy) as of December 2024, driven by growth in several key segments. Investment loans recorded the highest growth at 13.62% (yoy), followed by consumer loans at 10.61% (yoy), and working capital loans at 8.35% (yoy). This credit growth was accompanied by an improvement in credit quality, as reflected in a decline in the gross Non-Performing Loan (NPL) ratio to 2.08% in December 2024, down from 2.38% in 2023. Meanwhile, the banking industry's capital position remained strong, with the Capital Adequacy Ratio (CAR) reaching 26.69% in December 2024.

Third-Party Funds (DPK) in the banking sector grew by 4.48% (yoy, December 2024), supported by increases in demand deposits, savings, and time deposits, which grew by 3.34%, 6.78%, and 3.50% (yoy), respectively. Banking industry liquidity remained well-maintained at an adequate level.

*To preserve stability and promote economic growth, Bank Indonesia (BI) continued to strengthen its policy mix response. Monetary policy remained focused on maintaining stability (*pro-stability*), while macroprudential policies, payment system digitalization, money market deepening, and inclusive and green economic-financial programs were geared toward supporting growth (*pro-growth*). In line with this policy direction, BI maintained the BI Rate at 6.00%, consistent with a policy stance that balances stability and growth.*

Pada perkembangan lainnya, transaksi dan layanan *digital banking* terus tumbuh pesat mendukung kemudahan transaksi ekonomi. Pesatnya perkembangan teknologi digital dan internet serta perubahan pola belanja masyarakat turut mendorong perkembangan *digital banking*. Dalam satu dekade terakhir, perkembangan transaksi *Automatic Teller Machine* (Anjungan Tunai Mandiri), kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik menunjukkan tren peningkatan. Volume dan nilai transaksi *digital banking* terus menunjukkan peningkatan. Data BI menunjukkan pada tahun 2024 volume transaksi digital banking ini telah mencapai 34,5 miliar transaksi, tumbuh 36,6% (YoY), dengan nilai transaksi digital mencapai Rp87 kuadriliun. Data BI juga menunjukkan volume transaksi *mobile banking* tumbuh 39,1%, Internet Banking tumbuh 4,4%, BI Fast tumbuh 62,4% dan QRIS tumbuh 175,2%, didukung peningkatan jumlah pengguna dan *merchant*. Kemudian perusahaan *fintech* juga tumbuh sebagai alternatif pinjaman bank.

PROSPEK USAHA

Perekonomian global pada tahun 2025 diperkirakan masih menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian akibat dinamika kebijakan moneter, fiskal dan perdagangan yang diterapkan di berbagai negara besar. IMF, dalam laporan World Economic Outlook Januari 2025, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 sebesar 3,3%, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada 2024 yang tercatat sebesar 3,2%.

Sementara itu peningkatan aktivitas perekonomian Indonesia diperkirakan akan terus berlanjut dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,0-5,2% (yoy) di 2025 didukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga, khususnya untuk kelas menengah ke atas. Hal ini dicapai dengan berlanjutnya penguatan permintaan domestik dan reformasi struktural guna mendukung peningkatan produktivitas dan penguatan struktur pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang tinggi. Pemerintah Indonesia juga tetap menunjukkan atensinya untuk mendorong pertumbuhan segmen usaha UMKM, mengingat sifatnya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan relatif lebih tahan terhadap guncangan perekonomian global. Kinerja ekspor nonmigas diperkirakan meningkat, didorong produk manufaktur dan pertambangan.

In other developments, digital banking transactions and services continued to expand rapidly, enhancing the ease of economic transactions. The rapid advancement of digital technology and internet penetration, along with shifting consumer spending behavior, have significantly driven digital banking development. Over the past decade, transactions involving ATMs, debit cards, credit cards, and electronic money have shown a growing trend. Both the volume and value of digital banking transactions continued to rise. According to BI data, in 2024, digital banking transaction volume reached 34.5 billion, growing by 36.6% year-on-year, with total transaction value hitting IDR87 quadrillion. BI also reported that mobile banking transaction volume grew by 39.1%, Internet banking by 4.4%, BI-FAST by 62.4%, and QRIS by 175.2%, supported by a rising number of users and merchants. Additionally, fintech companies have grown as an alternative to conventional bank lending.

BUSINESS PROSPECTS

The global economy in 2025 is expected to continue facing various challenges and uncertainties, stemming from dynamic monetary, fiscal, and trade policies implemented by major economies. In its World Economic Outlook report published in January 2025, the IMF projected global economic growth for 2025 at 3.3%, slightly higher than the 3.2% recorded in 2024.

Meanwhile, Indonesia's economic activity is forecasted to maintain its positive momentum, with projected growth in the range of 5.0% to 5.2% (yoy) in 2025. This is supported by household consumption growth, particularly among the middle-to-upper income segments. The sustained strengthening of domestic demand and ongoing structural reforms aimed at boosting productivity and reinforcing the structure of economic growth, including in sectors with high employment absorption and value-added potential, are expected to play key roles. The Indonesian government continues to show strong commitment to supporting the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), given their large employment capacity and relative resilience to global economic shocks. Non-oil and gas export performance is also expected to improve, driven by manufacturing and mining products.

Transaksi digital, diperkirakan juga terus tumbuh, dengan volume transaksi maupun nilai transaksi yang semakin meningkat, didukung oleh pesatnya perkembangan aplikasi teknologi informasi yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi kapan dan dimana pun dengan aman. Untuk tahun 2025, BI memprakirakan transaksi pembayaran digital, yakni transaksi melalui aplikasi mobile dan internet, tumbuh dengan tingkat yang lebih tinggi, yakni 52%. Adapun volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST juga diperkirakan tumbuh 34,1% (yoy), dengan nilai transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS diperkirakan tumbuh 11,4% (yoy).

KEBIJAKAN DAN INISIATIF STRATEGIS TAHUN 2024

Merespons kondisi usaha yang berkembang dinamis, penuh tantangan dan ketidakpastian Bank menetapkan berbagai inisiatif strategis dengan beberapa tujuan, mencakup: meraih peluang terbaik dari berkembangnya transaksi digital, menjaga kualitas kredit, meningkatkan saldo CASA dan meningkatkan laba bersih. Untuk mewujudkannya, Bank menjalankan beragam kebijakan dan inisiatif strategis yang diterapkan secara simultan, sebagai berikut:

1. Diversifikasi produk pembiayaan melalui implementasi *digital lending* untuk keperluan konsumtif maupun modal kerja dengan pemanfaatan *Big Data analytic* serta *scoring engine*.
2. Melakukan penyaluran/pembiayaan kredit melalui *chanelling* koperasi untuk meningkatkan sektor mikro dan UMKM.
3. Pengembangan bisnis ke *supply chain financing* & *distributor financing* dari debitur eksisting maupun debitur baru dengan meningkatkan transaksi pembayaran baik *offline* maupun *online*.
4. Fokus pada penghimpunan dana murah berbasis *mobile* yang terhubung dengan *e-Commerce*, *fintech*, dan *merchant*. Produk pendanaan seperti tabungan milenial, tabungan masa depan, produk investasi, tabungan emas dan lain-lain.
5. Akselerasi kolaborasi dengan mitra bisnis, baik dari penghimpunan dan penyaluran dana, untuk mendorong akuisisi nasabah dan transaksi melalui integrasi sistem berbasis teknologi dalam kaitan membangun ekosistem digital.

Digital transactions are anticipated to continue growing in both volume and value, supported by the rapid advancement of information technology applications that enable people to transact safely, anytime and anywhere. For 2025, Bank Indonesia forecasts that digital payment transactions—including those made via mobile and internet applications—will grow by 52%. Retail transaction volumes processed through BI-FAST are projected to increase by 34.1% (yoy), while the value of large-value transactions processed through BI-RTGS is expected to grow by 11.4% (yoy).

STRATEGIC POLICIES AND INITIATIVES IN 2024

In response to the dynamic, challenging, and uncertain business environment, the Bank set forth a range of strategic initiatives with several key objectives: to seize opportunities arising from the growth of digital transactions, maintain credit quality, increase CASA balances, and improve net profit. To achieve these goals, the Bank implemented a series of simultaneous policies and strategic initiatives as follows:

1. *Diversification of financing products through the implementation of digital lending for both consumption and working capital purposes, utilizing Big Data analytics and a credit scoring engine.*
2. *Channeling credit financing through cooperatives to enhance the micro and MSME sectors.*
3. *Expansion into supply chain financing and distributor financing, targeting both existing and new debtors, while increasing transaction volumes across both offline and online payment channels.*
4. *Focus on collecting low-cost funds via mobile platforms, integrated with e-commerce, fintech, and merchants. Fundraising products include millennial savings, future savings, investment products, gold savings, and others.*
5. *Accelerating collaboration with business partners in both funding and lending to boost customer acquisition and transactions through system integration based on technology, aimed at building a digital ecosystem.*

6. Melakukan *cross selling* dan *value chain financing* dengan jaringan usaha yang dimiliki AG Network dan nasabah/debitur eksisting guna menambah *customer base* Bank. Intensifikasi bisnis menggunakan sistem *closed loop* yang berisiko rendah, melihat besarnya peluang pasar ritel di tahun 2030.
7. Peningkatan *fee based income* melalui komisi dan biaya administrasi, *transactional banking*, transaksi valuta asing, *trade finance*, kolaborasi dengan perusahaan *Fintech Payment & e-Commerce*, penjualan produk *bancassurance* dan transaksi yang dibangun dari kerjasama pihak ketiga maupun pengembangan *channel* milik Bank.
8. Pengembangan kompetensi SDM dengan meningkatkan *product knowledge* dan *selling skill* dari seluruh tim marketing konsumen.
9. Optimalisasi tenaga sales di Cabang untuk berkontribusi dalam meningkatkan portofolio kredit melalui percepatan proses persetujuan, pemberian program insentif dan *pricing* yang kompetitif.
10. Perbaikan Bisnis proses penyaluran & administrasi kredit.

PERAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN SERTA LANGKAH MONITORING YANG DIJALANKAN

Sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seluruh bank di Indonesia wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai salah satu syarat pelaksanaan kegiatan operasional suatu lembaga perbankan. RBB berisikan strategi dan kebijakan strategis Bank serta target dan proyeksi yang akan dicapai Bank. Direksi menjalankan peran yang sangat sentral dalam proses penyusunan RBB.

Penyusunan RBB diawali dengan mengevaluasi kinerja Bank selama 5 (lima) tahun terakhir. Selanjutnya Direksi di dalam rapat Direksi mengevaluasi pencapaian masing-masing unit kerja atas RBB tahun berjalan setiap direktorat, dimana setiap direktorat memaparkan kinerja atas RBB tahun berjalan berikut penjelasan atas pencapaian tersebut.

Direksi memberikan arahan dalam bentuk Kebijakan Umum Direksi (KUD), dimana KUD tersebut berisi asumsi-asumsi antara lain, asumsi makro ekonomi (GDP, tingkat inflasi, kurs, dan suku bunga). Disamping itu juga ditetapkan asumsi pertumbuhan kredit (termasuk ditetapkan sektor ekonomi yang menjadi prioritas dan sektor ekonomi yang dihindari) dan rasio NIM yang harus dijaga. Selain itu ditetapkan asumsi pertumbuhan DPK terutama pertumbuhan CASA, asumsi *Fee Based Income*,

6. *Cross-selling and value chain financing through AG Network's business network and existing customers/debtors to expand the Bank's customer base. The Bank intensified its use of a low-risk closed-loop system, considering the vast retail market potential projected for 2030.*
7. *Enhancing fee-based income through commissions and administrative fees, transactional banking, foreign exchange transactions, trade finance, partnerships with fintech payment companies and e-commerce platforms, bancassurance product sales, as well as transactions originating from third-party collaborations and the development of the Bank's channels.*
8. *Developing human capital competencies by improving product knowledge and selling skills across the consumer marketing team.*
9. *Optimizing branch sales personnel to contribute to credit portfolio growth through expedited approval processes, competitive pricing, and incentive programs.*
10. *Business process improvements in credit distribution and administration.*

THE BOARD OF DIRECTORS' ROLE IN STRATEGY FORMULATION, POLICY-MAKING, AND MONITORING MEASURES

As mandated by the Financial Services Authority (OJK), all banks in Indonesia are required to prepare and submit a Bank Business Plan (RBB) as one of the prerequisites for conducting banking operations. The RBB outlines the Bank's strategies, strategic policies, as well as the targets and projections to be achieved. The Board of Directors plays a central role in the preparation of the RBB.

The RBB preparation process begins with an evaluation of the Bank's performance over the past 5 (five) years. Following this, the Board of Directors, through Board meetings, evaluates the performance of each directorate against the current year's RBB. Each directorate presents its performance outcomes, including explanations of achievements relative to targets.

The Board of Directors provides direction in the form of the General Policy of the Board of Directors (KUD), which includes several assumptions, such as macroeconomic indicators (GDP, inflation rate, exchange rate, and interest rate). Additionally, assumptions regarding credit growth (including prioritized and restricted economic sectors) and the targeted Net Interest Margin (NIM) are also determined. Further assumptions include Third-Party Funds (DPK) growth-especially CASA growth, fee-

efisiensi biaya yang dapat dilakukan termasuk target rasio BOPO dan target laba yang hendak dicapai. Program kerja di bidang *Human Capital* dan IT juga menjadi perhatian utama dalam penyusunan RBB.

Selanjutnya, seluruh direktorat memaparkan strategi dan program kerja yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan berikut *enabler* untuk mencapai target tersebut. Kemudian dilakukan konsolidasi dan *fine tuning* terhadap RBB yang telah disusun. Lalu Direksi meminta persetujuan Dewan Komisaris dalam rapat Komisaris. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka RBB dapat disampaikan kepada regulator. RBB yang telah dibuat didistribusikan ke seluruh unit kerja sebagai pedoman dalam pencapaian target.

Penyusunan RBB sejak awal melibatkan seluruh pemimpin unit kerja yang ada, baik unit kerja bisnis maupun non bisnis. Strategi yang telah ditetapkan dalam RBB dibuat merupakan pedoman di setiap tingkatan yang diturunkan dalam bentuk program kerja yang mendukung dan sejalan dengan strategi tersebut. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kinerja setiap unit kerja dilakukan secara periodik baik mingguan, dua minggu maupun bulanan dimana setiap unit kerja menyampaikan kinerjanya dalam forum antara lain dalam rapat Direksi dan rapat *management committee*. Dalam hal dianggap perlu dapat dilakukan juga rapat atau pertemuan yang sifatnya insidental dimana manajemen memberikan pengarahan atas kinerja yang dicapai sehingga bila diperlukan tindakan koreksi segera dapat dilakukan.

PENCAPAIAN KINERJA BANK TAHUN 2024

Penguatan dan penajaman strategi bisnis yang terus dilakukan membuat Bank lebih adaptif dalam merespons kondisi perekonomian dan iklim usaha terkini, sekaligus membuat Bank semakin lincah dalam meraih peluang pertumbuhan, sehingga berhasil mencatatkan kinerja bisnis yang positif dan solid di tahun 2024.

Pada tahun 2024, total kredit yang diberikan Bank Artha Graha Internasional mencapai nilai sebesar Rp10,60 triliun, menurun 12,69% dari tahun sebelumnya, sebesar Rp12,14 triliun. Pencapaian tersebut setara dengan 75,31% dari target RBB 2024 yang sebesar Rp14,08 triliun. Kredit yang diberikan Bank utamanya berupa kredit produktif, yaitu sebesar Rp8,30 triliun yang setara dengan 78,33% total kredit, kemudian diikuti oleh kredit konsumtif dengan nilai sebesar Rp2,29 triliun atau 21,67% total kredit.

based income, cost efficiency initiatives including targeted BOPO ratio, and profit targets. Human Capital and IT work programs are also key focus areas in the formulation of the RBB.

Subsequently, each directorate presents its strategies and work programs aimed at achieving the established targets, including the enablers required to support achievement. The RBB draft is then consolidated and refined. The Board of Directors then seeks approval from the Board of Commissioners in a Commissioners' Meeting. Upon obtaining approval, the RBB is submitted to the regulator. The finalized RBB is then distributed to all work units as a reference for target realization.

The RBB preparation process involves all unit leaders, both from business and non-business units. The strategies outlined in the RBB are cascaded into actionable work programs at all levels of the organization to ensure alignment. Performance monitoring and evaluation of each unit is conducted regularly, on a weekly, bi-weekly, or monthly basis, where work units report their performance in forums such as Board meetings and management committee meetings. When necessary, additional or ad hoc meetings may be held where management provides further guidance on performance, enabling prompt corrective actions if needed.

BANK PERFORMANCE ACHIEVEMENTS IN 2024

The continued strengthening and sharpening of the Bank's business strategies enabled Bank Artha Graha Internasional to become more adaptive in responding to current economic conditions and business climate. This also enhanced the Bank's agility in seizing growth opportunities, leading to positive and solid business performance in 2024.

In 2024, total loans disbursed by Bank Artha Graha Internasional amounted to IDR10.60 trillion, a decrease of 12.69% compared to the previous year's IDR12.14 trillion. This achievement represents 75.31% of the Bank Business Plan (RBB) 2024 target of IDR14.08 trillion. The Bank's loan portfolio primarily consisted of productive loans, amounting to IDR8.30 trillion or 78.33% of total loans, followed by consumer loans totaling IDR2.29 trillion or 21.67% of total loans.

Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun Bank di tahun 2024 adalah sebesar Rp23,89 triliun, naik 15,80% dari posisinya di tahun 2023 yang senilai Rp20,63 triliun. Saldo DPK sebesar Rp23,89 triliun tersebut setara dengan pencapaian sebesar 97,36% target RBB 2024 yang sebesar Rp24,53 triliun. DPK Bank di tahun 2024 utamanya berupa produk Deposito, sebesar Rp15,53 triliun, sedangkan produk Giro dan Tabungan masing-masing senilai Rp6,51 triliun dan Rp1,83 triliun.

Bank mencatatkan pendapatan bunga di tahun 2024 total sebesar Rp1,64 triliun, naik 10,86% dari senilai Rp1,48 triliun di tahun sebelumnya. Pendapatan bunga tersebut utamanya berasal dari pendapatan bunga kredit yaitu sebesar Rp1,03 triliun dan pendapatan bunga efek-efek yang dikelola Divisi Treasury, sebesar Rp476,77 miliar.

Dengan naiknya kinerja pendapatan bunga tersebut ditambah adanya peningkatan pendapatan operasional lainnya yang naik 14,38%, di tahun 2024, Bank mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp152,47 miliar, meningkat 3,90% dibandingkan tahun sebelumnya, yang senilai Rp146,75 miliar.

Kinerja keuangan tersebut membuat rasio keuangan Bank menunjukkan kinerja fluktuatif dengan kecenderungan menurun selaras dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya tingkat persaingan. Hal tersebut tergambar dalam rasio ROA turun menjadi 0,55% dari 0,60%, ROE turun menjadi 4,23% dari 4,24%, serta NIM juga menurun menjadi 4,07% dari 5,58%. Sedangkan dari sisi kualitas aset tercatat terdapat penurunan kualitas dengan NPL gross meningkat dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar 2,40% dari 1,74% dan NPL net juga meningkat menjadi 0,77% dari 0,31%.

Adapun outstanding total aset yang dibukukan Bank tahun 2024 adalah sebesar Rp30,12 triliun, naik 15,41% dari tahun 2023 yang senilai Rp26,10 triliun.

TANTANGAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI

Kompetisi yang semakin masif, khususnya di segmen *digital banking*, baik dengan bank konvensional maupun bank digital menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Bank Artha Graha Internasional di tahun 2024, terlebih Bank memiliki target akuisisi 1 juta nasabah. Untuk mewujudkannya, Bank terus meningkatkan kualitas layanan *digital banking* dengan menawarkan berbagai fitur-fitur baru, untuk meningkatkan kenyamanan nasabah sekaligus menjawab kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.

Third-Party Funds (DPK) collected by the Bank in 2024 amounted to IDR23.89 trillion, an increase of 15.80% from IDR20.63 trillion in 2023. This DPK figure represents 97.36% of the 2024 RBB target of IDR24.53 trillion. The Bank's DPK in 2024 was mainly in the form of time deposits, totaling IDR15.53 trillion, while current accounts and savings reached IDR6.51 trillion and IDR1.83 trillion, respectively.

Interest income in 2024 totaled IDR1.64 trillion, an increase of 10.86% from IDR1.48 trillion in the previous year. This interest income was mainly derived from loan interest, which amounted to IDR1.03 trillion, and interest income from securities managed by the Treasury Division, totaling IDR476.77 billion.

The increase in interest income, along with a 14.38% rise in other operating income, enabled the Bank to record a net profit for the year of IDR152.47 billion in 2024, up 3.90% from IDR146.75 billion in 2023.

Despite these achievements, the Bank's financial ratios showed fluctuating trends with a general downward tendency, in line with slowing economic growth and increasing competition. This is reflected in a decrease in Return on Assets (ROA) to 0.55% from 0.60%, a slight drop in Return on Equity (ROE) to 4.23% from 4.24%, and a reduction in Net Interest Margin (NIM) to 4.07% from 5.58%. In terms of asset quality, there was a decline, as evidenced by the gross Non-Performing Loan (NPL) ratio rising to 2.40% from 1.74%, and the net NPL ratio increasing to 0.77% from 0.31%.

As of the end of 2024, the Bank recorded total assets of IDR30.12 trillion, marking a 15.41% increase from IDR26.10 trillion in 2023.

CHALLENGES AND CONSTRAINTS

In 2024, Bank Artha Graha Internasional encountered several challenges, notably the intensifying competition in the digital banking sector-both from conventional and fully digital banks. This was particularly relevant in light of the Bank's target to acquire one million customers. To achieve this, the Bank consistently improved the quality of its digital banking services by introducing new features aimed at enhancing customer convenience and meeting their evolving banking needs.

Bank juga berupaya memastikan calon nasabah telah memenuhi persyaratan sebagai pengguna jasa layanan Bank dengan proses verifikasi yang cepat, teliti dan efisien, guna menghindari risiko tidak validnya data nasabah yang berpotensi memicu terjadinya penyalahgunaan rekening oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasinya, Bank meningkatkan tim operasional yang memadai untuk proses verifikasi dan KYC nasabah baru. Bank juga telah berencana untuk menerapkan e-KYC pada aplikasi *agi digital apps* sebagai *tools* untuk mempercepat proses akuisisi rekening *online*.

Tantangan lain yang harus diatasi sehubungan dengan fokus Bank yang sejalan dengan *trend* global yaitu Digitalisasi, *Cyber Security* dan transformasi adalah potensi risiko keamanan data dan *cyber attack*. Untuk mengatasinya, Bank menjalankan beberapa program, mencakup: Pemeliharaan dan Pengkinian Teknologi; Pemantauan Keamanan Sistem menggunakan platform *Security Information & Event Management (SIEM)* dan *Security Operation Center (SOC)* yang beroperasi 24/7; dan Pengelolaan *Workstation* Pengguna.

Bank melanjutkan upaya pengembangan organisasi efektif untuk mendukung model bisnis dengan melakukan perputaran karyawan antar direktorat, mutasi cabang antar kota merupakan suatu tantangan tersendiri. Bank menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dasar secara komprehensif, selain menjalankan peningkatan kompetensi mengacu pada kualifikasi dan sertifikasi wajib sesuai ketentuan regulator, seperti: Sertifikasi Manajemen Risiko, Sertifikasi *Treasury Dealer*, Sertifikasi Audit Intern Bank dan Sertifikasi Kompetensi Sistem Pembayaran. Bank menjalankan proses rekrutmen dan seleksi dengan ketat agar diperoleh kandidat dengan kompetensi dan potensi yang sesuai dengan kebutuhan. Bank kemudian menyelenggarakan program *coaching* dan *mentoring* yang tepat kepada karyawan sehingga dapat meningkatkan motivasi dan menghasilkan kinerja yang diinginkan. Bank juga memperkuat aspek *leadership*, khususnya pada level senior yang sekaligus juga menjadi bagian dari program regenerasi di Bank.

Selain pembenahan *Human Capital*, Bank juga melakukan pembenahan pada aspek bisnis dan operasional dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja di beberapa unit kerja operasional. Langkah yang dilakukan diantaranya adalah melanjutkan proses sentralisasi pekerjaan unit kerja operasional yang berada di luar kota ke Kantor Pusat. Sedangkan untuk menyikapi perubahan regulasi, Bank melakukan integrasi laporan regulator dan konsisten meningkatkan otomatisasi dan integrasi pelaporan ke regulator.

*The Bank also placed strong emphasis on ensuring that prospective customers met the necessary criteria for utilizing its services through a verification process that was swift, accurate, and efficient. This was crucial in mitigating risks related to invalid customer data, which could otherwise lead to misuse of accounts by irresponsible parties. To support this, the Bank reinforced its operations team responsible for customer verification and Know Your Customer (KYC) procedures. Moreover, the Bank planned to implement electronic Know Your Customer (e-KYC) within its *agi digital application* to accelerate online account onboarding.*

Aligned with global trends in digitization, cybersecurity, and transformation, the Bank also had to address growing risks associated with data security and cyber threats. To manage this, several initiatives were carried out, including ongoing technology updates, round-the-clock system security monitoring using Security Information & Event Management (SIEM) and a 24/7 Security Operation Center (SOC), as well as improved management of user workstations.

The Bank further committed to building an effective organizational structure to support its business model, which included employee rotations across directorates and inter-city branch transfers, both posing their challenges. In response, the Bank implemented a comprehensive basic competency development program while also ensuring employee qualifications and certifications met regulatory requirements. These included Risk Management Certification, Treasury Dealer Certification, Bank Internal Audit Certification, and Payment System Competency Certification. A selective recruitment and hiring process was maintained to secure candidates with the required skills and potential. This was complemented by coaching and mentoring programs aimed at boosting employee motivation and achieving optimal performance. The Bank also strengthened its leadership capacity, particularly at the senior management level, as part of succession planning and regeneration efforts.

In addition to strengthening Human Capital, the Bank undertook several business and operational improvements to enhance productivity and efficiency in various operational units. These included centralizing out-of-town operational functions to the Head Office. In adapting to evolving regulations, the Bank also integrated its regulatory reporting processes and continued to improve automation and integration of regulatory reporting systems.

DIGITALISASI PERBANKAN

Bank Artha Graha Internasional terus menunjukkan tekadnya untuk mendorong terjadinya peningkatan kualitas, kuantitas maupun nilai layanan dan transaksi digital melalui *channel mobile banking, internet banking, API, ATM, dan layanan QRIS*. Seluruh channel secara *average* mencatatkan peningkatan volume transaksi maupun nilai di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Bank berupaya mengakuisisi dan menambah *head account* nasabah, meningkatkan saldo CASA, meningkatkan volume transaksi, mengoptimalkan penyaluran kredit, serta meraih potensi *fee based income*, baik dari transaksi digital maupun transaksi lainnya.

Di tahun 2024 Bank mulai berinisiatif untuk mengembangkan *platform dan infrastruktur digital lending* agar mempercepat proses *onboarding, analisa scoring, serta disbursement* pembiayaan agar semakin *seamless* dan tetap *prudent*. Dengan berkerjasama melalui *marketplace dan platform retail* yang fokus ke pembiayaan, Bank berharap melalui kerjasama *platform digital lending* ini dapat mendorong pertumbuhan bisnis konsumen.

Bank juga terus memperkuat dan mengembangkan berbagai *channel* pembayaran yang telah dimiliki. Untuk mendukung berkembangnya segmen *retail*, Bank menyediakan *platform Digital Apps* dengan berbagai macam fitur, mulai dari *onboarding online*, fitur QRIS tanpa *login*, tarik tunai tanpa kartu, serta berbagai macam *biller* yang didasarkan pada kebutuhan dari nasabah, menyediakan *channel QRIS* untuk segmentasi bisnis *UMKM* dalam penerimaan pembayaran di seluruh *merchant* yang bekerja sama dengan Bank, selain menyediakan layanan kartu ATM dengan fitur *GPN (Gerbang Pembayaran Nasional)* serta *internet banking retail*.

Pada *segment B2B (business to business)*, Bank mengembangkan layanan *internet banking bisnis*, dengan kemudahan transaksi seperti *transfer dana pemindah bukuan antar rekening, BI-FAST, RTOL (Realtime Online transfer), SKN & RTGS* dan dukungan *media approval hard & soft token*. Disamping itu, Bank juga melakukan pengembangan pada layanan *API Management*, antara lain *virtual account, transfer dana, QRIS, cek saldo dan mutasi*.

Peningkatan secara signifikan pada *channel* layanan QRIS dan *mobile banking* diupayakan melalui penyelenggaraan berbagai *event* serta program transaksi yang dilakukan untuk mendorong penetrasi *user* dan transaksi. Beberapa inisiasi program seperti program *cashback QRIS, ajak teman, serta*

BANKING DIGITALIZATION

Bank Artha Graha Internasional continues to demonstrate its commitment to enhancing the quality, quantity, and value of digital services and transactions through its mobile banking, internet banking, API, ATM, and QRIS channels. On average, all channels recorded increases in both transaction volume and value in 2024 compared to 2023. The Bank's strategic focus included acquiring and expanding its customer base, increasing CASA balances, boosting transaction volume, optimizing credit distribution, and capturing fee-based income potential from both digital and other transactions.

In 2024, the Bank also took the initiative to develop its digital lending platform and infrastructure to streamline onboarding, scoring analysis, and financing disbursement, ensuring a seamless yet prudent process. Through partnerships with marketplaces and retail platforms focused on financing, the Bank aims to drive growth in its consumer banking segment via this digital lending collaboration.

The Bank also continued to strengthen and enhance its existing payment channels. To support the growing retail segment, it provided a Digital App platform offering various features, including online onboarding, QRIS payments without login, cardless cash withdrawals, and a range of biller services tailored to customer needs. It also provided QRIS channels for MSME business segments to facilitate payment acceptance across partner merchants, along with ATM card services using the National Payment Gateway (GPN) and retail internet banking.

In the B2B (Business-to-Business) segment, the Bank expanded its business internet banking services, offering transaction conveniences such as account transfers, BI-FAST, RTOL (Real-Time Online Transfer), SKN, and RTGS, supported by both hard and soft token approval mechanisms. Additionally, the Bank developed its API Management services, including virtual accounts, fund transfers, QRIS, and balance and transaction history checks.

To significantly boost usage of QRIS and mobile banking channels, the Bank launched various events and transaction programs aimed at driving user adoption and transaction frequency. Initiatives such as QRIS cashback, referral programs, fee waivers, and the "Merchant Juara" program have proven

free biaya admin serta Merchant Juara terus dijalankan, karena terbukti mampu menarik nasabah untuk terus meningkatkan frekuensi penggunaan layanan *e-channel* Bank.

Untuk mendukung peningkatan transaksi digital dan mengoptimalkan kehandalan layanan, Bank memperkuat jaringan komunikasi, melakukan pembaruan pada infrastruktur jaringan untuk meningkatkan kapasitas, kecepatan, dan stabilitas koneksi. Langkah ini juga mencakup adopsi teknologi jaringan terbaru guna mendukung pertumbuhan produk digital dan memastikan kelancaran integrasi sistem. Langkah tersebut diikuti dengan pelaksanaan Audit IT secara berkala, menjalankan *penetration testing* pada layanan serta channel Bank dengan fokus pada penanganan *cyber security* melalui *self-assessment* dari Bank, yang wajib dilakukan untuk menjaga keamanan dari serangan luar. Hal ini juga dimaksudkan untuk memperkuat tingkat maturitas keamanan siber dan maturitas digital Bank.

Untuk perlindungan keamanan, Bank mengembangkan *multi layer security internal* maupun pengamanan SSL (*secure socket layer*) / *credential access* bagi koneksi aplikasi atau *platform* yang berasal dari luar Bank. Selain itu, *hardening* untuk *hardware*, *software*, *operating system (OS)*, dan *network* tetap dilakukan *update security* berkala sesuai dengan dinamika ancaman keamanan terkini. Sebagai bagian dari upaya peningkatan keamanan, Bank juga melakukan langkah-langkah: *Refreshment Firewall*, *Refreshment Web Application Firewall (WAF)*, *Privilege Access Management (PAM)* dan *Endpoint Security*.

Dalam melakukan ekspansi bisnis, Bank juga terus berupaya untuk memaksimalkan kolaborasi dengan mitra bisnis melalui kerjasama B2B2C (*Business to Business to Customer*), serta terus berinovasi dalam melakukan pengembangan fitur pada aplikasi digital milik Bank berbasis *mobile* yang sesuai dengan segmentasi nasabah baik itu *new customer* maupun transaksional. Pola kerjasama dengan mitra bisnis sebagai channel akuisisi untuk pembukaan rekening bank, kerjasama merchant dalam penggunaan layanan QRIS dan *Acquirer*.

Beberapa fitur baru yang telah diperkenalkan pada channel Bank di tahun lalu, terus dikembangkan melalui implementasi layanan BI Fast dan penambahan biller baru yaitu PBB dan PDAM (114 kota) di *channel Mobile Banking* maupun *Internet Banking* Bisnis. Selain fokus pada *channel* milik Bank,

Bank Artha Graha Internasional juga melanjutkan fokus dalam menggarap segmen UMKM dengan menggali potensi pembiayaan SME dari Nasabah *Merchant* eksisting maupun

effective in encouraging customers to increase their usage of the Bank's e-channels.

To support the growth in digital transactions and improve service reliability, the Bank reinforced its communication networks and upgraded its network infrastructure to enhance capacity, speed, and connection stability. This included adopting the latest networking technologies to support the expansion of digital products and ensure seamless system integration. These efforts were accompanied by regular IT audits, penetration testing of Bank services and channels, and a strong focus on cybersecurity through internal self-assessments—essential to safeguarding against external threats. These measures also contributed to the Bank's efforts to improve its cybersecurity maturity level and overall digital maturity.

For enhanced protection, the Bank implemented multi-layer internal security measures and SSL (secure socket layer)/ credential access for application or platform connections from external sources. Regular security updates were also applied to hardware, software, operating systems, and networks in line with evolving threat landscapes. As part of its security enhancement efforts, the Bank carried out several upgrades, including: Firewall Refreshment, Web Application Firewall (WAF) upgrades, Privileged Access Management (PAM), and Endpoint Security improvements.

As part of its business expansion strategy, the Bank continued to maximize collaborations with business partners through B2B2C (Business-to-Business-to-Customer) cooperation models. It also maintained innovation in the development of features within its mobile digital application, tailored to both new and existing transactional customer segments. Business partnerships also served as acquisition channels for account openings, QRIS service adoption, and acquirer cooperation with merchants.

Several new features introduced on the Bank's channels last year continued to be expanded, including the implementation of BI-Fast and the addition of new billers, such as Land and Building Tax (PBB) and Regional Water Companies (PDAM) in 114 cities, available through both Mobile Banking and Business Internet Banking.

Beyond strengthening its own channels, Bank Artha Graha Internasional also continued focusing on the MSME segment by tapping into SME financing potential from both existing

yang baru. Bank melihat adanya potensi yang besar pada segmen UMKM, karena itu Bank membuat skema program khusus untuk penyaluran kredit SME, mencakup: promo bunga khusus dan pengembangan konsep pembiayaan *Supply Chain Financing* (SCF).

Keseluruhan inisiatif strategis yang dijalankan Bank tahun 2024 tersebut juga diikuti dengan penguatan kapasitas SDM yang dilakukan dengan mengimplementasikan *Human Capital Roadmap* sejalan dengan rencana jangka panjang Bank.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Bank meyakini bahwa penerapan GCG akan meningkatkan nilai tambah bagi *shareholders* dan *stakeholders*. Bank juga meyakini bahwa penerapan praktik terbaik GCG akan berdampak positif terhadap kinerja, sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan. Oleh karenanya Bank berkomitmen penuh untuk senantiasa menjaga kualitas penerapan Tata Kelola dengan predikat Baik (PK-2) secara berkelanjutan dengan meningkatkan koordinasi kerja antar unit kerja terkait. Bank juga berkomitmen penuh untuk menerapkan praktik terbaik GCG, sesuai dengan ketentuan OJK terakhir, yakni POJK 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi bank Umum.

Untuk memastikan terjaganya kualitas penerapan *best practice* tata kelola, Bank melakukan evaluasi dan penilaian GCG melalui mekanisme *self-assessment* yang dilaksanakan setiap semester. Hasil *self-assessment* dilaporkan kepada OJK bersama dengan penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank.

Kemudian sehubungan dengan semakin mengemukanya isu keberlanjutan, dan sebagai wujud komitmen dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan dan wujud perbaikan kualitas pengelolaan Perusahaan, Bank telah mengintegrasikan pengelolaan risiko aspek sosial, lingkungan dan governansi sebagai bagian dari pengelolaan risiko operasional Bank. Bank telah menyusun beberapa pedoman kerja yang ditujukan untuk mengelola risiko terkait keberlanjutan, seperti:

1. Pedoman Keuangan Berkelanjutan;
2. Pedoman Taksonomi Hijau;
3. Prosedur Pembiayaan Proyek Bangunan Gedung Hijau; dan
4. Prosedur Pembiayaan Transportasi Ramah Lingkungan.

and new merchant customers. The Bank recognized strong potential in the MSME segment and developed special SME loan programs, including promotional interest rates and the development of Supply Chain Financing (SCF) schemes.

All of these strategic initiatives carried out in 2024 were supported by strengthening the Bank's human capital capacity, guided by the implementation of its Human Capital Roadmap aligned with the Bank's long-term plans.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

The Bank firmly believes that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) enhances added value for both shareholders and stakeholders. The Bank also recognizes that the adoption of GCG best practices positively impacts overall performance and supports the achievement of the Company's vision and mission. Therefore, the Bank is fully committed to consistently maintaining the quality of its GCG implementation with a "Good" (PK-2) rating on an ongoing basis, by enhancing coordination among relevant working units. Furthermore, the Bank is fully committed to applying the best practices of GCG in accordance with the latest regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), namely OJK Regulation No. 17/2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.

To ensure the consistent application of governance best practices, the Bank conducts GCG evaluations and assessments through a self-assessment mechanism carried out every semester. The results of these self-assessments are reported to OJK together with the submission of the Bank's Soundness Level Report.

In light of the growing emphasis on sustainability issues and as part of its commitment to supporting the achievement of sustainability goals and improving the quality of corporate management, the Bank has integrated the management of social, environmental, and governance risks into its operational risk management framework. The Bank has developed several internal guidelines aimed at managing sustainability-related risks, including:

- 1. Sustainable Finance Guidelines;*
- 2. Green Taxonomy Guidelines;*
- 3. Procedures for Financing Green Building Projects; and*
- 4. Procedures for Financing Environmentally Friendly Transportation.*

Bank juga menyertakan karyawan untuk mengikuti program-program pelatihan khusus perihal mitigasi risiko serta tata kelola keberlanjutan, berupa sosialisasi maupun *workshop* terkait ESG dan *climate risk awareness* yang diselenggarakan baik oleh regulator dan/atau organisasi lainnya dan juga dilakukan secara internal dengan topik *Sustainable Finance Awareness*.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Merespons kondisi perekonomian maupun kondisi usaha yang diwarnai ketidakpastian dan tingkat persaingan yang tinggi, Bank memperkuat penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal. Untuk itu, Bank Artha Graha Internasional terus melakukan berbagai upaya peningkatan ketaatan pelaksanaan ketentuan operasional Bank di bidang operasional, persetujuan pemberian kredit, maupun pencairan kredit, guna meminimalisir terjadinya risiko pelanggaran maupun kredit macet.

Bank senantiasa memastikan kecukupan dan efektivitas penerapan manajemen risiko secara berkala dengan melakukan penilaian dan kajian terhadap profil risiko secara menyeluruh, sehingga eksposur risiko Bank dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan *risk appetite* Bank.

Bank memastikan penerapan manajemen risiko telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan melakukan penilaian Profil Risiko dan evaluasi secara berkala, pengukuran Risiko IT, pemantauan pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) termasuk perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Aset Likuid Bank dan berbagai aktivitas lainnya. Selain itu, Bank juga telah menindaklanjuti berbagai temuan sebagaimana yang disampaikan oleh OJK.

Sedangkan dalam penerapan sistem pengendalian internal Bank, telah melakukan *dual control* secara menyeluruh dengan meningkatkan peran supervisor dan melakukan *sharing knowledge* serta pembinaan rutin ke kantor cabang.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dibantu oleh organ pendukung di bawah Direksi, baik yang bersifat struktural maupun *ad-hoc*. Direksi dibantu oleh organ yang bersifat struktural seperti Sekretaris Perusahaan, Internal Audit dan Satuan Kerja Kepatuhan, Direksi juga memiliki 7

The Bank also engages its employees in specialized training programs focused on risk mitigation and sustainability governance, including socialization sessions and workshops on ESG and climate risk awareness, organized both by regulators and other institutions, as well as internally through sessions on Sustainable Finance Awareness.

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL SYSTEM

In response to economic conditions and business environments marked by uncertainty and intense competition, the Bank has strengthened its implementation of risk management and internal control systems. To that end, Bank Artha Graha Internasional continues to enhance compliance with operational regulations in areas such as operational activities, credit approval, and credit disbursement processes, to minimize the risk of regulatory breaches or non-performing loans.

The Bank consistently ensures the adequacy and effectiveness of risk management implementation through periodic evaluations and comprehensive assessments of its risk profile, enabling the Bank to manage its risk exposure effectively and in line with its established risk appetite.

The Bank ensures that its risk management practices comply with applicable regulations by conducting regular Risk Profile assessments and evaluations, IT Risk measurements, monitoring the fulfillment of regulatory requirements such as the Minimum Reserve Requirement (GWM), Macroprudential Liquidity Buffer (PLM), and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM), including the development of Third Party Funds (DPK) and Liquid Assets, among other activities. Additionally, the Bank has followed up on various findings issued by the Financial Services Authority (OJK).

In terms of internal control implementation, the Bank applies a comprehensive dual control system by strengthening the role of supervisors and conducting regular knowledge sharing and coaching sessions with branch offices.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors is supported by both structural and ad-hoc supporting bodies. Structurally, the Board is assisted by the Corporate Secretary, the Internal Audit Unit, and the Compliance Unit. Additionally, the Board of Directors is supported by seven ad-

(tujuh) Komite yang bersifat *ad-hoc*, yaitu Komite Kredit, Komite ALCO, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Human Capital, Komite Kebijakan Perkreditan dan Komite Produk.

Sepanjang tahun 2024, Direksi menilai ketujuh komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan telah memberikan masukan dan rekomendasi yang sangat berharga serta membantu bagi Direksi dalam proses pengambilan keputusan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2024 tidak terdapat perubahan komposisi Direksi Bank sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 26 Juni 2024 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 17 Juli 2024.

DUKUNGAN PENCAPAIAN TUJUAN KEBERLANJUTAN

Bank sangat menyadari dan memahami bahwa keberlanjutan adalah elemen kunci dalam operasional perbankan modern, sekaligus jalan menuju diraihnya kinerja serta pertumbuhan skala usaha yang berkualitas dan berkesinambungan. Oleh karenanya, Bank menekankan pentingnya integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam setiap lini bisnis.

Pendekatan ini tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Bank kemudian merancang dan menjalankan program-program dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan, yang disampaikan dalam dokumen Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang dievaluasi dan disampaikan secara berkala kepada Regulator, dimana progres dan hasilnya disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan.

Direksi Bank berperan penting dalam memastikan bahwa Laporan Keberlanjutan disusun dengan akurat dan komprehensif. Direksi terlibat dalam penetapan strategi keberlanjutan, melakukan pemantauan implementasi program, dan menjalankan evaluasi terhadap kinerja program keberlanjutan. Selain itu, Direksi juga memastikan bahwa

ad-hoc committees: the Credit Committee, ALCO Committee, Risk Management Committee, Information Technology Steering Committee, Human Capital Committee, Credit Policy Committee, and Product Committee.

Throughout 2024, the Board of Directors assessed that these seven committees had performed their duties and responsibilities effectively, providing valuable input and recommendations that significantly supported the Board in the decision-making process.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2024, there were no changes in the composition of the Bank's Board of Directors, in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on June 26, 2024, as stated in Deed of Meeting Resolution No. 05 dated July 17, 2024.

SUPPORT FOR ACHIEVING SUSTAINABILITY GOALS

The Bank fully acknowledges and understands that sustainability is a key element in modern banking operations, as well as a pathway toward achieving quality and sustainable business performance and growth. Therefore, the Bank emphasizes the importance of integrating environmental, social, and governance (ESG) aspects into every line of its business.

This approach not only ensures regulatory compliance but also aims to create long-term value for stakeholders and the broader community. Accordingly, the Bank has designed and implemented programs to support the achievement of sustainability goals, as outlined in the Sustainable Finance Action Plan (RAKB), which is regularly evaluated and submitted to the Regulator, with progress and outcomes disclosed in the Sustainability Report.

The Bank's Board of Directors plays a crucial role in ensuring the Sustainability Report is prepared accurately and comprehensively. The Board is involved in setting the sustainability strategy, monitoring the implementation of programs, and evaluating the performance of sustainability initiatives. Additionally, the Board ensures that the report

laporan tersebut memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan standar internasional lainnya. Seluruh inisiatif tersebut menunjukkan komitmen Bank untuk mendukung tercapainya beragam tujuan keberlanjutan, dan berkontribusi positif bagi perbaikan lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Direksi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak dan karyawan yang turut berkontribusi bagi meningkatnya kinerja Bank sepanjang tahun 2024. Termasuk kepada Regulator yang telah melakukan pengawasan dan memberikan arahan.

Apresiasi dan terima kasih juga disampaikan kepada Dewan Komisaris atas pengawasan, nasihat, serta arahan yang diberikan, sehingga kepengurusan Bank dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan kinerja yang baik.

Tidak lupa, kepada seluruh nasabah, mitra kerja, dan para pemangku kepentingan lainnya, kami sampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik. Ke depan, Bank berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menyediakan kualitas pelayanan perbankan yang profesional dan berkualitas sebagai bentuk kontribusi aktif terhadap pembangunan nasional.

complies with the requirements set forth by the Financial Services Authority (OJK) and other international standards. All of these initiatives reflect the Bank's commitment to supporting the achievement of various sustainability goals and contributing positively to environmental preservation and the well-being of society.

CLOSING REMARKS

The Board of Directors would like to express sincere appreciation and gratitude to all parties and employees who contributed to the Bank's improved performance throughout 2024, including the Regulators for their supervision and guidance.

Our heartfelt appreciation also goes to the Board of Commissioners for their oversight, advice, and direction, which enabled the Bank's management to operate effectively and deliver solid performance.

We also extend our gratitude to all customers, business partners, and other stakeholders for the excellent cooperation and support. Moving forward, the Bank remains committed to continuous innovation in providing high-quality and professional banking services as part of our active contribution to national development.

Jakarta, 26 Maret 2025

Jakarta, March 26, 2025

Atas Nama Dewan Direksi

On behalf of the Board of Directors

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk



Andy Kasih
Direktur Utama
President Director

03

Profil Perusahaan

Company Profile

Penguatan organisasi dan penyempurnaan produk dan layanan terus dilakukan Bank Artha Graha Internasional untuk mendukung akselerasi kinerja.

Bank Artha Graha Internasional continues to strengthen its organization and improve its products and services to support accelerated performance.



IDENTITAS PERUSAHAAN

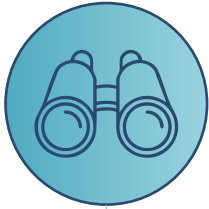
Corporate Identity

	Nama <i>Name</i>	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	
	Status Perusahaan <i>Company Status</i>	Perusahaan Terbuka <i>Public Company</i>	
	Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	Jasa Perbankan <i>Banking Services</i>	
	Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i>	7 September 1973 <i>September 7, 1973</i>	
	Dasar Hukum Pendirian dan Perubahan Terakhir <i>Legal Basis of Establishment</i>	Akta Pendirian Bank No. 12 tanggal 7 September 1973 oleh Bagijo, S.H., notaris pengganti dari Eliza Pondaag, S.H., notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman (sekarang menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/2/12 tanggal 3 Januari 1975. <i>Deed of Establishment of the Bank No. 12 dated September 7, 1973 by Bagijo, S.H., substitute notary of Eliza Pondaag, S.H., notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Justice (now the Minister of Law and Human Rights) through Decree No. Y.A.5/2/12 dated January 3, 1975.</i> Akta Perubahan terakhir yakni Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 06 tanggal 17 Juli 2024 oleh notaris Christina Susanto, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. <i>The latest Deed of Amendment is the Deed of Statement of Meeting Resolution on the Amendment of the Articles of Association No. 06 dated July 17, 2024, made before Notary Christina Susanto, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta.</i>	
	Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	PT Cakra Inti Utama PT Pirus Platinum Murni PT Cerana Arthaputra PT Puspita Bisnispuri PT Arthamulia Sentosajaya PT Karya Nusantara Permai Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) Jumlah <i>Total</i>	14,38% 6,73% 6,54% 5,38% 4,15% 3,52% 59,30% 100,00%
	Modal Dasar <i>Authorized Capital</i>	Rp5.800.132.800.000 <i>IDR5,800,132,800,000</i>	
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Issued and Fully Paid-in Capital</i>	Rp2.242.372.023.128,16 <i>IDR2,242,372,023,128.16</i>	
	Jumlah Karyawan <i>Number of Employees</i>	1.279 orang <i>1,279 people</i>	
	Bursa Efek <i>Stock Exchange</i>	Bursa Efek Indonesia <i>Indonesia Stock Exchange</i>	
	Tanggal Go Public <i>Listing Date</i>	23 Agustus 1990 <i>August 23, 1990</i>	
	Kode Saham <i>Stock Code</i>	INPC	
	Kode ISIN <i>ISIN Code</i>	ID1000105505	

	Kode SWIFT SWIFT Code	ARTGIDJA	
	Izin Usaha Business License	Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 176/KMK.017/1993 Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 176/KMK.017/1993	
	Izin Bank Devisa Foreign Exchange Bank License	Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 25/62/KEP/DIR tanggal 4 September 1992 Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia No. 25/62/KEP/DIR dated September 4, 1992	
	Data Jaringan Kantor Office Network	Kantor Pusat Head Office	1
		Kantor Cabang Branch Offices	31
		Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Offices	33
		Payment Point	-
		ATM on Premises	73
		ATM off Premises	83
		ATM ALTO	52.350
		ATM Prima	68.970
		EDC ALTO	570.000
EDC Prima	1.187.083		
	Alamat Address	Kantor Pusat Head Office Gedung Artha Graha Artha Graha Building Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 Telp Phone: (021) 515-2168 (Hunting) Fax Fac: (021) 515-3892	
	Surel Email	co_secretary@ag.co.id	
	Laman Web Website	www.arthagraha.com	
	Media Sosial Social Media	 @teman.agi	
		 @temanagi	
		 Teman agi	
		 @temanagi	
		 temanagi by Bank Artha Graha Internasional	

VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Vision, Mission, and Corporate Value



Visi

● *Vision*

Menjadi Institusi Keuangan Terkemuka dengan Kinerja Prima yang Berkelanjutan dan Berkontribusi dalam Pembangunan Indonesia.

To become a leading financial institution with sustainable excellent performance that contributes to the development of Indonesia.



Misi

● *Mission*

- ➔ Memberikan solusi keuangan berkelanjutan yang komprehensif dan inovatif.

Providing comprehensive and innovative sustainable financial solutions.

- ➔ Meningkatkan jangkauan serta kualitas pelayanan melalui digitalisasi dan inklusi keuangan.

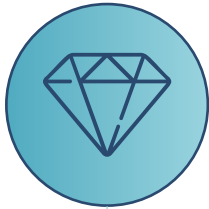
Improving the reach and quality of services through digitization and financial inclusion.

- ➔ Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdedikasi.

Developing reliable and dedicated human resources.

- ➔ Menjalankan tata kelola perusahaan yang baik serta peduli terhadap masyarakat dan lingkungan.

Implementing good corporate governance and caring for the community and the environment.



Nilai-Nilai Perusahaan

● Corporate Values

Nilai-nilai perusahaan yang menjadi pedoman bagi para Karyawan Bank Artha Graha Internasional dalam mewujudkan Visi dan Misi adalah:

The corporate values that guide the Employees of Bank Artha Graha Internasional in realizing the Vision and Mission are:

Agility

Mampu untuk berpikir dan bertindak cepat dalam mengevaluasi dan merespons dinamika perubahan industri yang berdampak kepada keberlangsungan perusahaan.

Able to think and act quickly in evaluating and responding to the dynamics of industry changes that impact the sustainability of the company.

Collaboration

Senantiasa membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan mitra strategis yang kompeten dalam menciptakan peluang baru demi kemajuan perusahaan.

Always open opportunities to collaborate with competent strategic partners in creating new opportunities for the company's progress.

Innovation

Konsisten dalam mencapai upaya terbaik berupa usulan atau tindakan perbaikan bertahap atau signifikan guna menciptakan efisiensi, efektivitas dan nilai tambah di bidang produk, proses, pelayanan, dan/atau teknologi untuk memajukan perusahaan.

Consistent in achieving the best efforts in the form of proposals or actions for gradual or significant improvements to create efficiency, effectiveness and added value in the areas of products, processes, services, and/or technology to advance the company.

TINJAUAN VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pada tahun 2024, Bank telah melakukan *review* atas visi, misi dan nilai-nilai perusahaan dan menganggap bahwa visi, misi dan nilai-nilai yang dimiliki Bank saat ini sesuai dengan kondisi dan tantangan industri perbankan.

REVIEW OF VISION, MISSION, AND CORPORATE VALUES BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

In 2024, the Bank reviewed its vision, mission and values and considered that its existing vision, mission and values remained in line with the conditions and challenges of the banking industry.

LOGO PERUSAHAAN

Company Logo

Logo Bank Artha Graha Internasional menggambarkan karakter bisnis perusahaan yang menggambarkan semangat dan optimisme Bank yang selalu dinamis.

The logo of Bank Artha Graha Internasional depicts the character of the company's business which illustrates the spirit and optimism of the Bank which is always dynamic.

Huruf A, G, dan I berarti sebagai simbol kesatuan yang utuh dalam wujud yang dinamis, melambangkan gerak laju usaha menuju perubahan yang dilandasi: komitmen teguh, bersatu hati dan bersama membangun, serta meraih keberhasilan untuk semua, dengan didasarkan pada nilai-nilai profesionalisme, orientasi kepada Nasabah dan hasil, loyalitas, integritas, tanggung jawab, inovasi, kerja sama - jiwa korsa dan kepedulian.

The letters A, G, and I mean as a symbol of complete unity in a dynamic form, symbolizing the movement of business towards change based on: firm commitment, united hearts and collective efforts, and achieving success for all, based on the values of professionalism, orientation to Customers and results, loyalty, integrity, responsibility, innovation, cooperation - corsa spirit and care.



Logo tersebut terdiri dua warna dan tiga jenis huruf yang menggambarkan huruf A, G, dan I berwarna keemasan dengan teks BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL berwarna hitam, kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan sehingga memudahkan masyarakat dalam mengenali PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

The logo consists of two colors and three types of letters depicting the letters A, G, and I in golden color with the text BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL in black, both of which are a unity that makes it easier for the public to recognize PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Brief Company History

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk., selanjutnya disebut “Bank Artha Graha Internasional” atau “Bank”, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 7 September 1973 dan Akta Perubahan No. 26 tanggal 13 Desember 1974, keduanya dibuat di hadapan Bagijo, S.H., pengganti dari Eliza Pondaag, S.H. Pada awal pendiriannya, Bank bernama PT Inter-Pacific Financial Corporation dengan kegiatan usaha sebagai lembaga keuangan non-bank.

Pada tanggal 23 Agustus 1990, PT Inter-Pacific Financial Corporation melakukan penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta dan Surabaya). Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 67 tanggal 19 Mei 1992 PT Inter-Pacific Financial Corporation mengubah namanya menjadi PT Inter-Pacific Bank Tbk yang sekaligus mengawali langkah Bank untuk memasuki industri perbankan setelah mendapat izin usaha melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 176/KMK.017/1993 pada tanggal 24 Februari 1993. Pada tahun 1997, Bank mengubah namanya menjadi PT Bank Inter-Pacific Tbk, berdasarkan Akta No. 44 tanggal 13 Juni 1997.

Pada tanggal 11 Juli 2005, PT Bank Inter-Pacific melakukan penggabungan (*merger*) dengan PT Bank Artha Graha, dimana PT Bank Artha Graha menggabungkan diri ke dalam PT Bank Inter-Pacific Tbk. Setelah itu, tanggal 16 Agustus 2005 PT Bank Inter-Pacific Tbk berganti nama menjadi PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Bank Artha Graha Internasional menyediakan beragam produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah, baik itu untuk produk penyaluran maupun produk pendanaan. Produk penyaluran dana meliputi kredit produktif dengan produk fasilitas Fixed Loan, Revolving Loan, PRK (Pinjaman Rekening Koran), supply chain financing. Disamping itu terdapat produk pinjaman konsumtif, antara lain produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KTA (Kredit Tanpa Anggungan). Produk pendanaan juga terdapat berbagai macam produk antara lain tabungan reguler (Tabungan Icon, Tabungan Artha, Tabungan Wira, Tabungan Artha Merchant), tabungan berjangka (Tabungan Pintar, Tabungan Hold Dana), Tabungan anak (Tabungan Simpel, Tabungan Prega).

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. hereinafter referred to as “Bank Artha Graha Internasional” or the “Bank”, was established pursuant to Deed of Establishment No. 12 dated September 7, 1973 and Deed of Amendment No. 26 dated December 13, 1974, both made before Bagijo, S.H., successor of Eliza Pondaag, S.H. At the beginning of its establishment, the Bank was named PT Inter-Pacific Financial Corporation with business activities as a non-bank financial institution.

On August 23, 1990, PT Inter-Pacific Financial Corporation made an initial public offering of shares on the Indonesia Stock Exchange (formerly the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges). Furthermore, based on Deed No. 67 dated May 19, 1992 PT Inter-Pacific Financial Corporation changed its name to PT Inter-Pacific Bank Tbk which also initiated the Bank’s steps to enter the banking industry after obtaining a business license through the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 176/KMK.017/1993 on February 24, 1993. In 1997, the Bank changed its name to PT Bank Inter-Pacific Tbk, based on Deed No. 44 dated June 13, 1997.

On July 11, 2005, PT Bank Inter-Pacific merged with PT Bank Artha Graha, whereby PT Bank Artha Graha was merged into PT Bank Inter-Pacific Tbk. Thereafter, on August 16, 2005 PT Bank Inter-Pacific Tbk changed its name to PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Bank Artha Graha Internasional offers a wide range of products and services tailored to customer needs, including both lending and funding products. Lending products include productive loans such as Fixed Loan, Revolving Loan, PRK (Current Account Loan), and supply chain financing. In addition, the Bank also offers consumer loans, including Mortgage Loans (KPR) and Unsecured Personal Loans (KTA). On the funding side, the Bank provides various savings products such as regular savings accounts (Icon Savings, Artha Savings, Wira Savings, Artha Merchant Savings), term savings (Pintar Savings, Hold Dana Savings), and children’s savings accounts (Simpel Savings, Prega Savings).

Inovasi produk tidak hanya dilakukan dalam produk penyaluran serta pendanaan, namun juga dilakukan melalui pengembangan layanan digital milik Bank Artha Graha Internasional. Berbagai macam produk layanan digital telah dapat dinikmati oleh Nasabah, meliputi digital apps agi, Internet banking Bisnis & Retail, QRIS, ATM Grahacash 3 in 1, Virtual Account, API (Application Programming Interface) serta layanan Laku Pandai.

Setelah Launching di Juni 2022, agi sebagai layanan digital apps terus melakukan penambahan fitur baru guna mendorong perluasan akseptansi user dan transaksi. Berbagai macam fitur telah ada pada layanan digital apps agi, mulai dari fitur Pay Now (Pembayaran QRIS tanpa Login), Cardless Withdrawal, push notifikasi transaksi, pembayaran tagihan biller (pulsa paket data, listrik, PDAM, PBB, Top up e-Wallet), fitur Life (e-Commerce Electronic City, Pembelian Tiket KAI, Donasi), serta pembukaan rekening online. Selain itu, penambahan fitur loyalty point dan program cashback QRIS diharapkan dapat menjadi tools untuk meningkatkan active user di aplikasi agi ini.

Disamping itu, Bank juga telah melakukan penyempurnaan pada layanan internet banking bisnis untuk mengakomodir kebutuhan Nasabah perusahaan yang menginginkan layanan keuangan yang lengkap dan aman dengan dukungan fitur hard dan soft token yang memberikan kenyamanan serta keamanan bagi Nasabah. Pada fitur layanan internet banking bisnis ini telah didukung berbagai macam fitur antara lain fleksibilitas management user, layanan transfer dana (overbooking, SKN, RTGS, online transfer, BIFAST, serta Bulk Transfer), Biller (Telepon, listrik, PBB, PDAM, MPN), serta layanan payroll dan virtual account. Disamping itu terdapat fitur layanan untuk management user dengan berbagai macam fleksibilitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Nasabah.

Bank juga memiliki ekosistem QRIS yang terus berkembang setiap tahunnya, dengan perluasan jaringan retail merchant dan penambahan segmentasi untuk usaha besar (UBE) melalui kolaborasi dengan mitra strategis menjadikan QRIS sebagai salah satu channel milik Bank yang mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun 2024.

Product innovation is not only carried out in lending and funding products but also through the development of Bank Artha Graha Internasional's digital services. A variety of digital service products are now available to Customers, including the AGI digital app, Internet Banking for both Business and Retail, QRIS, Grahacash 3-in-1 ATMs, Virtual Accounts, API (Application Programming Interface), and the Laku Pandai service.

Since its launch in June 2022, agi-the bank's digital service app-has continuously introduced new features to enhance user acceptance and transaction volume. A wide range of features is now available on the agi digital app, including Pay Now (QRIS payment without login), cardless withdrawals, transaction push notifications, bill payments (such as mobile data, electricity, water, land and building tax, and eWallet top-ups), as well as the Life feature (covering e-commerce at Electronic City, KAI train ticket purchases, and donations). Additionally, online account opening is supported within the app. The inclusion of loyalty points and QRIS cashback programs is also expected to serve as effective tools to increase the number of active users on the agi platform.

In addition, the Bank has enhanced its business internet banking services to accommodate the needs of corporate Clients seeking comprehensive and secure financial solutions. The platform is equipped with both hard and soft token features to ensure a secure and convenient banking experience for users. The business internet banking service includes a wide range of features such as flexible user management, fund transfer services (overbooking, SKN, RTGS, online transfer, BIFAST, and bulk transfer), bill payments (telephone, electricity, land and building tax, water utility, and state revenue via MPN), as well as payroll and virtual account services. Moreover, the user management feature offers various flexible configurations that can be tailored to meet the specific requirements of each Client.

The Bank has also developed a growing QRIS ecosystem, which continues to expand each year. Through the expansion of its retail merchant network and the addition of large business enterprise (UBE) segments via collaboration with strategic partners, QRIS has become one of the Bank's channels that experienced significant growth in 2024.

Selama tahun 2024 ini, transaksi QRIS meningkat cukup pesat bila dibandingkan dengan 2023, dengan kontribusi total transaksi mencapai 81 juta dengan volume Rp13 Triliun. Khusus untuk segmentasi *retail merchant*, Bank juga memiliki program aktivasi antara lain dengan dukungan Program Merchant Juara serta program *cashback* QRIS untuk mendorong peningkatan transaksi dan aktif *merchant*.

Selain itu, Bank juga membuka peluang bisnis baru melalui kerja sama dengan mitra bisnis berbasis digital melalui implementasi layanan API (*Application Programming Interface*) yang terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kerja sama B2B (*Business to Business*) dalam rangka membentuk ekosistem digital, melalui kerjasama dengan mitra bisnis *strategic* yang fokus pada layanan sistem pembayaran serta ekosistem komoditas, baik itu ekosistem QRIS, komoditas emas, layanan transaksi Pialang Pemegang Amanat Luar Negeri (PALN) yang termasuk layanan kepada pialang pada Bank Penyimpan Dana Margin.

Inovasi layanan digital yang dilakukan Bank tidak hanya berfokus pada peningkatan pelayanan, namun juga memperhatikan aspek inklusi keuangan. Layanan digital yang ditawarkan Bank dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik oleh mereka yang berada di kota maupun di desa. Ini membantu Bank dalam mewujudkan visinya untuk menjangkau seluruh masyarakat dan memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan setiap Nasabah.

Pada akhir tahun 2021, Bank juga telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang mensyaratkan Modal Inti Minimum sebesar Rp3 triliun paling lambat pada 31 Desember 2022.

Throughout 2024, QRIS transactions saw a substantial increase compared to 2023, with total transactions reaching 81 million and a transaction volume of IDR13 trillion. Specifically for the retail merchant segment, the Bank has implemented various activation programs, including the Merchant Juara program and QRIS cashback initiatives, aimed at boosting transaction volume and merchant activity.

In addition, the Bank is expanding new business opportunities through collaborations with digital-based business partners by implementing an Application Programming Interface (API) service, which is continuously being developed to support B2B (Business-to-Business) partnerships. This initiative aims to establish a robust digital ecosystem through strategic partnerships with businesses that focus on payment systems and commodity ecosystems, including the QRIS ecosystem, gold commodity trading, and transaction services for Foreign Custodian Brokers (PALN), which also encompasses services to brokers at Margin Fund Custodian Banks.

The Bank's digital service innovations are not only focused on enhancing service quality, but also on promoting financial inclusion. The digital services offered by the Bank are accessible to all segments of society, including individuals in both urban and rural areas. This supports the Bank in realizing its vision of reaching all members of the community and providing financial solutions tailored to the needs of each Customer.

At the end of 2021, the Bank also complied with the provisions of OJK Regulation No. 12/POJK.03/2020 concerning the Consolidation of Commercial Banks, which requires a minimum core capital of IDR3 trillion by no later than December 31, 2022.

JEJAK LANGKAH

Milestones

1973		2005	
7 September September 7	Mendirikan dan mengawali kiprah dalam industri keuangan sebagai lembaga keuangan bukan bank dengan nama PT Inter-Pacific Financial Corporation. <i>Established and initiated its involvement in the financial industry as a non-bank financial institution under the name of PT Inter-Pacific Financial Corporation.</i>	16 Agustus August 16	Melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Artha Graha Internasional Tbk setelah merger dengan PT Bank Artha Graha berdasarkan izin dari Bank Indonesia dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/49/KEP.GBI/2005. <i>The Bank changed its name to PT Bank Artha Graha Internasional Tbk after the merger with PT Bank Artha Graha based on a license from Bank Indonesia with the Decree of the Governor of Bank Indonesia No. 7/49/KEP.GBI/2005. PUT V.</i>
1990		2007	
23 Agustus August 23	Mencatatkan Saham pada Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. <i>Listed its Shares on the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges.</i>	17 April April 17	Memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) berdasarkan Surat No. S-1746/BL/2007 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) II. <i>Obtained an effective statement from the Chairman of the Badan Pengawas Pasar Modal and Lembaga Keuangan (Bapepam and LK) based on Letter No. S-1746/BL/2007 to conduct a Limited Public Offering (PUT) II.</i>
1992		2008	
19 Mei May 19	Mengubah nama dari PT Inter-Pacific Financial Corporation menjadi PT Inter-Pacific Bank Tbk. <i>Changed its name from PT Inter-Pacific Financial Corporation to PT Inter-Pacific Bank Tbk.</i>	1 Desember December 1	Memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dan LK berdasarkan Surat No. S-8684/BL/2008 untuk melakukan PUT III. <i>Obtained an effective statement from the Chairman of Bapepam and LK based on Letter No. S-8684/BL/2008 to conduct LPO III.</i>
1993		2012	
24 Februari February 24	Mendapatkan izin usaha sebagai bank umum dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 176/KMK.017/1993. <i>Obtained a business license as a commercial bank with the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 176/KMK.017/1993.</i>	5 Desember December 5	Memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dan LK berdasarkan Surat No. S-13878/BL/2012 untuk melakukan PUT IV. <i>Obtained an effective statement from the Chairman of Bapepam and LK based on Letter No. S-13878/BL/2012 to conduct PUT IV.</i>
1997		2016	
13 Juni June 13	Mengubah nama menjadi PT Bank Inter-Pacific Tbk. <i>Changed its name to PT Bank Inter-Pacific Tbk.</i>	23 November November 23	Memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No. S-682/D.04/2016 untuk melakukan PUT V. <i>Obtained an effective statement from the Chief Executive of the Capital Market Supervision of the Financial Services Authority based on Letter No. S-682/D.04/2016 to conduct PUT V.</i>
1999		2017	
9 April April 9	Mengajukan permohonan pembatalan pencatatan (<i>delisting</i>) saham di Bursa Efek Surabaya yang direalisasikan 10 hari kemudian melalui pemberian persetujuan atas permohonan tersebut. <i>Applied for the cancellation of shares delisting on the Surabaya Stock Exchange, which was realized 10 days later by approving the said application.</i>	26 Oktober October 26	Melakukan perubahan logo sebagai wujud perubahan Bank yang dinamis dengan dilandasi filosofi dan semangat baru. <i>Made a logo change as a form of dynamic Bank changes based on a new philosophy and spirit.</i>
27 September September 27	Memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam berdasarkan Surat No. S-1761/PM/1999 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I. <i>Obtained an effective statement from the Chairman of Bapepam based on Letter No. S-1761/PM/1999 to conduct a Limited Public Offering (PUT) I.</i>		

2018	
3 Mei May 3	Meluncurkan kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai salah satu wujud interoperabilitas dalam mendukung kemudahan bertransaksi oleh Bank Artha Graha Internasional dan Perbankan Indonesia. Bank Artha Graha Internasional merupakan salah satu dari bank peserta <i>pilot project</i> GPN bersama Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga dan Bank Permata. <i>Launched a card with the National Payment Gateway (GPN) logo as a form of interoperability in supporting transactions by Bank Artha Graha Internasional and Indonesian Banking. Bank Artha Graha Internasional is one of the participating banks in the GPN pilot project with Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, and Bank Permata.</i>
28 Mei May 28	<i>Mobile Banking</i> Bank Artha Graha Internasional resmi diluncurkan ada tanggal 28 Mei 2018 guna memberikan layanan terbaik dan kemudahan transaksi kepada Nasabah. <i>agi digital apps</i>, dilengkapi dengan berbagai fitur transaksi transfer, pembelian dan pembayaran sebagai fitur utamanya. <i>Bank Artha Graha Internasional Mobile Banking was officially launched on May 28, 2018, to provide Customers with the best services and ease of transactions. agi digital apps has many features such as funds transfer, bill purchase, and bill payment transactions as a main feature.</i>
2019	
10 Oktober October 10	Pada Tahun 2019, Bank Artha Graha Internasional memiliki visi untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan kepada Nasabah. Untuk itu, Bank meluncurkan pembukaan rekening <i>online</i> di mana Nasabah dapat melakukan pembukaan rekening tanpa harus datang ke cabang. <i>In 2019, Bank Artha Graha Internasional had the vision to improve services and extend the Customers' convenience. For this reason, the Bank launched a new online opening feature to allow Customers to open a bank account through its mobile application without having to come to a branch physically.</i>
2020	
19 Mei May 19	Bank Artha Graha Internasional telah mendapat izin Otoritas Jasa Keuangan atas layanan <i>API Management</i>. Melalui <i>API</i>, bank menyediakan sistem integrasi yang dapat diakses oleh mitra secara <i>real-time</i> sesuai dengan layanan yang dikerjasamakan. <i>API</i> yang dimiliki BAGI sampai saat ini adalah <i>API Cek Saldo</i>, <i>API Cek Mutasi</i>, <i>API Info Kurs</i>, <i>API Pemindah bukuan</i>, <i>API Transfer Dana</i> dan <i>API SKN</i>. <i>Bank Artha Graha Internasional has received permission from the Financial Services Authority for API Management services. Through API, the bank provides an integrated system that its partners can access in real-time in accordance with the cooperated services. The APIs owned by BAGI are Balance Check API, Mutation Check API, Currency Info API, Transfer API, Fund Transfer API, and SKN API.</i>

12 Desember December 12	Bank Artha Graha Internasional telah mengimplementasikan layanan uang elektronik berbasis server, yaitu BAGI Money dimana menjadi satu kesatuan sebagai <i>source of funds</i> transaksi di layanan <i>agi digital apps</i>. Dengan adanya BAGI Money dapat mempermudah akuisisi <i>User agi digital apps</i> untuk bertransaksi dengan cara registrasi yang jauh lebih mudah dan cepat. <i>Bank Artha Graha Internasional has implemented a server-based electronic money service, BAGI Money, which becomes a single unit as a source of funds for transactions in agi digital apps services. With BAGI Money, the acquisition of agi digital apps users to do transactions by registration is easier and faster.</i>
2021	
31 Maret March 31	Bank Artha Graha telah mengimplementasikan layanan QRIS (Quick Response Indonesia Standard) untuk melayani pembayaran berbasis QR Code di <i>merchant</i> kerja sama Bank Artha Graha melalui aplikasi <i>merchant AGI Pay</i>. Di samping itu, pembayaran QR Code juga dapat dilakukan untuk Nasabah Bank Artha Graha melalui aplikasi <i>agi digital apps</i> di seluruh <i>merchant</i> yang tergabung di jaringan QRIS. <i>Bank Artha Graha has implemented QRIS (Quick Response Indonesia Standard) service to serve QR Code-based payments at Bank Artha Graha partnered merchants through its AGI Pay merchant application. In addition, QR Code payments can also be made for Bank Artha Graha Customers through the agi digital apps application at all merchants who were members of the QRIS network.</i>
9 September September 9	Bank Artha Graha Internasional mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai Bank Penyimpan Dana Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan untuk Perdagangan Berjangka Komoditi. <i>Bank Artha Graha Internasional received approval from the Commodity Futures Trading Regulatory Agency as a Margin Fund Depositing Bank, Compensation Funds, and Guarantee Funds for Commodity Futures Trading.</i>
31 Desember December 31	Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Kliring Berjangka Indonesia (KBI) bekerja sama dengan Bank Artha Graha Internasional sebagai <i>Official Bank Partner</i> yang menyediakan layanan teknologi keuangan dan sistem pembayaran dalam transaksi Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital. BBJ, KBI dan BAGI sepakat melakukan kerjasama penyediaan fasilitas dan akses bagi Peserta Pasar Fisik Emas Digital berupa pembukaan Rekening Dana Komoditi (RDK) oleh Bank Artha Graha Internasional yang di administrasikan oleh BBJ dan KBI melalui Platform JFXGold. <i>Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) and Kliring Berjangka Indonesia (KBI) collaborated with Bank Artha Graha Internasional as an Official Bank Partner providing financial technology services and payment systems in Digital Gold Physical Market Trading transactions BBJ, KBI, and BAGI agreed to cooperate in providing facilities and access for Digital Gold Physical Market Participants by opening a Commodity Fund Account (RDK) by Bank Artha Graha Internasional, which BBJ and KBI administer through the JFX Gold Platform.</i>

2022	
18 Mei May 18	Bank Artha Graha Internasional (BAGI) menjalin kerja sama <i>Customer Due Diligence</i> (CDD) dengan Perantara Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital, PT ABI Komoditi Berjangka (ABI KB). Dalam kerja sama ini, BAGI menggunakan hasil CDD yang dilakukan ABI KB untuk pembukaan Rekening Dana Komoditi (RDK) dari peserta perdagangan. <i>Bank Artha Graha Internasional (BAGI) established Customer Due Diligence (CDD) cooperation with Digital Gold Physical Market Trading Intermediary, PT ABI Komoditi Berjangka (ABI KB). In this cooperation, BAGI used the results of CDD by ABI KB to open Commodity Fund Accounts (RDK) from trading participants.</i>
23 Mei May 23	Implementasi BI Fast pada <i>channel teller</i>, memberikan akses kepada Nasabah atas layanan transfer antar bank secara <i>real-time</i> dan harga layanan yang terjangkau menggunakan sistem yang terintegrasi dengan Bank Indonesia. <i>The implementation of BI Fast in the teller channel. It provides Customers access to real-time interbank transfer services and affordable service prices using a system integrated with Bank Indonesia.</i>
4 Juni June 4	Launching Digital Aplikasi "agi" by Bank Artha Graha Internasional, merupakan aplikasi yang telah diperbaharui dari layanan <i>Mobile Banking</i> "agi digital apps". Perubahan atas <i>brand identity</i>, UI/UX, <i>customer journey</i> serta berbagai fitur baru yang digarap pada aplikasi ini. <i>Launching the Digital Application "agi" by Bank Artha Graha Internasional, an updated application of the Mobile Banking service "agi digital apps". There were changes to the brand identity, UI/UX, customer journey, and various new features, both financial and non-financial, in this application.</i>
30 Desember December 30	Bank Artha Graha telah mendapatkan surat rekomendasi untuk implementasi BI SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran) dalam mendukung terciptanya sinergi sistem pembayaran melalui kerja sama B2B (<i>Business to Business</i>). Implementasi bertahap dilakukan untuk menyelaraskan spesifikasi teknis sesuai SNAP untuk seluruh <i>merchant</i>. <i>Bank Artha Graha has received a recommendation letter for the implementation of BI SNAP (National Standard for Open API Payment) to support the realization of payment system synergy through B2B (Business to Business) cooperation. Gradual implementation is carried out to synchronize technical specifications according to SNAP for all merchants.</i>
2023	
8 Mei May 8	Implementasi layanan BI FAST pada <i>channel</i> digital aplikasi "agi" dan <i>internet banking</i> bisnis guna menunjang layanan transfer antar bank secara <i>real-time</i> dengan biaya yang lebih terjangkau. <i>Implementation of BI FAST services on digital channels "agi" application and business internet banking to support real-time interbank transfer services at a more affordable cost.</i>

29 Mei
May 29

Bank Artha Graha Internasional (BAGI) telah berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 27001, di mana ISO 27001 adalah standar internasional yang mengatur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (*Information Security Management System/ISMS*). Salah satu manfaat dari penerapan ISO 27001 adalah perlindungan data dan informasi sensitif.

Standar ini membantu perusahaan mengidentifikasi aset informasi yang penting dan mengimplementasikan kontrol yang sesuai untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tersebut. Sehingga tidak hanya tentang melindungi data perusahaan, namun juga tentang bagaimana menciptakan kerangka kerja yang kokoh untuk manajemen keamanan informasi yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis dan meminimalkan risiko.

Bank Artha Graha Internasional (BAGI), has successfully obtained ISO 27001 certification, where ISO 27001 is an international standard that regulates the Information Security Management System (ISMS). One of the benefits of implementing ISO 27001 is the protection of sensitive data and information.

This standard helps companies identify critical information assets and implement appropriate controls to protect the confidentiality, integrity and availability of that information. Therefore, it is not only about protecting company data, but also creating a solid framework for information security management that can support business growth and minimize risks.

2024

21 September
September 21

Command Center atau pusat kendali Bank Artha Graha Internasional, di mana ruangan atau sistem yang digunakan untuk memantau, menganalisis mengelola, dan merespon data dan informasi. Terdapat 4 (empat) *dashboard* grafana yang dimonitor di *command center* diantaranya:

1. Inquiry saving T24
2. Transaksi BI Fast
3. Top-up DANA/Go-Pay/OVO
4. SMS Promedia

The Command Center of Bank Artha Graha Internasional serves as the central control hub, where rooms or systems are utilized to monitor, analyze, manage, and respond to data and information. There are 4 (four) Grafana dashboards monitored at the Command Center, which include:

1. T24 Savings Inquiry
2. BI FAST Transactions
3. Top-ups for DANA/GoPay/OVO
4. Promedia SMS

30 September
September 30

Kerjasama Pengelolaan Dana atas Sistem Pembayaran Tagihan Listrik dan Non-Tagihan Listrik secara Terpusat dan Kerjasama tentang Perlindungan, Pemrosesan, dan Penyediaan Akses Data atas Sistem Pembayaran Tagihan Listrik dan Non-Tagihan Listrik secara Terpusat dengan PLN dan PT Indonesia Comnets Plus (ICON+).

Cooperation Agreement on Fund Management for the Centralized Electricity and Non-Electricity Bill Payment System, as well as an Agreement on the Protection, Processing, and Provision of Data Access for the Centralized Electricity and Non-Electricity Bill Payment System with PLN and PT Indonesia Comnets Plus (ICON+).

KEGIATAN USAHA

Business Activities

KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam Akta No. 06 tanggal 17 Juli 2024, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan usaha sebagai bank umum konvensional (64121) dan unit usaha syariah bank umum (64123). Dengan demikian, Bank dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
3. Menerbitkan surat pengakuan utang;
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah Nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - c. Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 - g. Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
8. Melakukan penempatan dana dari Nasabah kepada Nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
9. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

BUSINESS ACTIVITIES ACCORDING TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Based on Article 3 of the Company's Articles of Association as stipulated in Deed No. 06 dated July 17, 2024, the scope of the Bank's activities is to operate as a conventional commercial bank (64121) and sharia business unit of a commercial bank (64123). Thus, the Bank can carry out the following business activities:

Main Business Activities

1. Collecting funds from the public in the form of current account deposits, time deposits, certificates of deposit, savings and/or other similar forms;
2. Providing loans, either medium-, long- or short-term loans or other types that are common in the banking industry;
3. Issuing debt certificates;
4. Buying, selling, or guaranteeing own its own risk or for the benefit of and at the behest of its Customers:
 - a. Money orders, including accredited money orders by banks whose validity period does not exceed the period customary for the trading of such instruments;
 - b. Debt certificates and other commercial papers with a validity period not exceeding the period customary in the trading of such papers;
 - c. State Treasury Notes and Government Guarantee Notes;
 - d. Bank Indonesia Certificate (SBI);
 - e. Bonds;
 - f. Tradeable promissory notes with a maturity of up to 1 (one) year; and
 - g. Other securities with a maturity of up to 1 (one) year.
5. Transferring money, either for own benefit or for the benefit of the Customer;
6. Placing funds with, borrowing funds from or lending funds to other banks, either by using letters, telecommunications facilities or by bills of exchange, checks or other means;
7. Receiving payments from claims on securities and performing calculations with or between third parties;
8. Placing funds from Customers to other Customers in the form of securities listed on the stock exchange;
9. Conducting activities in foreign exchange by complying with the provisions stipulated by Bank Indonesia;

10. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
11. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, baik melalui pendirian anak perusahaan maupun melalui pembentukan Unit Usaha Syariah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi pemerintah lainnya; dan
12. Berperan serta sebagai pendukung perusahaan atau penyelenggara Finansial Teknologi dalam hal pembayaran, penyelesaian (*settlement*), dan berkolaborasi dengan perusahaan atau penyelenggara Finansial Teknologi dalam mengembangkan ekosistem digital *finance services* antara lain *Bancaassurance*, *Insurtech*, *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, *Dompot Elektronik*, *Uang Elektronik*, *Payment Gateway*, *Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
2. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
3. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
4. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
5. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
6. Melakukan kegiatan penyertaan pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
7. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
8. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

10. *Providing financing and/or conducting other activities in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia;*
11. *Providing financing and/or conducting business activities based on sharia principles, either through the establishment of a subsidiary or through the establishment of a Sharia Business Unit in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia or the Financial Services Authority or other government agencies; and*
12. *Supporting companies or providers of Financial Technology in terms of payment, settlement, and collaborate with companies or providers of Financial Technology in developing digital finance services ecosystems including Bancaassurance, Insurtech, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Electronic Wallet, Electronic Money, Payment Gateway, Information Technology Based Joint Funding Services.*

Supporting Business Activities

1. *Providing a place to store valuables and securities;*
2. *Performing custodial activities for the benefit of other parties based on a contract;*
3. *Purchasing collateral either all or partially through auction in the event that a debtor does not fulfill its obligations to the Company provided that the purchased collateral must be disbursed immediately;*
4. *Conducting factoring activities, credit business and trustee activities;*
5. *Conducting activities as a pension fund organizer in accordance with the applicable laws and regulations, both as the founder of the employer pension fund and as the founder and/or participant of the financial institution pension fund;*
6. *Conducting participation activities in banks or other companies in the field of leasing finance, venture capital companies, securities companies, insurance companies, clearing and guarantee institutions and depository and settlement institutions, by fulfilling the provisions stipulated by the authorized agency;*
7. *Conducting temporary capital participation activities to overcome loan defaults, provided that the participation must be withdrawn in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia; and*
8. *Undertaking other businesses directly or indirectly related to the above purposes, the implementation of which is not contrary to the prevailing laws in Indonesia.*

PRODUK DAN JASA

Product and Services

Per 31 Desember 2024, Bank memiliki produk dan jasa sebagai berikut:

As of December 31, 2024, the Bank offers the following products and services:

Produk Pendanaan Funding Products	
Tabungan Icon Buka rekening <i>online</i> dari genggaman kapan saja di mana saja. Nikmati berbagai kemudahan transaksi dengan Tabungan Icon.	Icon Savings Open an <i>online</i> account from the palm of your hand anytime, anywhere. Enjoy a variety of easy transactions with Icon Savings.
Tabungan Artha Kelola dana untuk transaksi sehari-hari dengan Tabungan Artha dan nikmati berbagai fasilitas perbankan yang Anda butuhkan. Tabungan Artha juga dilengkapi dengan kartu ATM untuk menambah pilihan metode transaksi.	Artha Savings Manage your funds for daily transactions with Artha Savings and enjoy various banking facilities that you need. Artha Savings also comes with an ATM card to offer more choices of transaction methods.
Tabungan Artha Payroll Merupakan tabungan khusus untuk penempatan gaji dengan biaya ringan dan mudah, dengan kemudahan akses dan fasilitas.	Artha Payroll Savings A special savings account for salary placement with low cost and easy access and facilities.
Tabungan Artha KUR (AKUR) Merupakan tabungan perorangan dalam mata uang Rupiah dengan setoran terjangkau sesuai kebutuhan.	Artha KUR Savings (AKUR) An individual savings account in Rupiah currency with affordable deposit as needed.
Tabungan Artha Merchant Mendukung para pelaku usaha untuk mengelola transaksi menjadi lebih mudah. Tabungan Artha Merchant yang dilengkapi dengan QRIS menjadi pilihan yang tepat.	Artha Merchant Savings Supporting businesses to manage transactions more easily. Artha Merchant Savings with QRIS is the right choice.
Tabungan Wira Memberikan lebih dari fleksibilitas bertransaksi, Tabungan Wira juga memberikan suku bunga setara deposito agar dana Anda dapat bertumbuh optimal.	Wira Savings Providing more than transaction flexibility, Wira Savings also offers deposit-like interest rates to optimize the growth of your funds.
Tabungan Pintar Kelola uang dengan pintar untuk wujudkan rencana mendatang. Mulai menabung rutin setiap bulan dari sekarang, Tabungan pintar menjadi solusi pintar perencanaan masa depan Anda.	Pintar Savings Manage your money smartly to realize your future plans. Start saving regularly every month from now on, Pintar Savings is a smart solution for planning your future.
Tabungan Prega Tanamkan kebiasaan menabung sejak usia dini untuk hidup yang lebih baik. Anda dapat membentuk kebiasaan menabung bagi anak Anda dengan Tabungan Prega.	Prega Savings Instill the habit of saving from an early age for a better life. You can shape your child's saving habit with Prega Savings.
Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) Generasi muda yang siap meraih cita-cita. Buka Tabungan SimPel untuk wujudkan yang kamu mau di masa depan.	Simpanan Pelajar (SimPel) Savings The young generation who are ready to achieve their dreams. Open Simpanan Pelajar (SimPel) Savings to realize your future dreams.
TabunganKu Menyimpan dana di Bank dapat dilakukan dengan persyaratan yang mudah dan bebas biaya administrasi. Anda dapat membuka TabunganKu untuk menyimpan dana dengan aman dan nyaman.	TabunganKu Saving funds at the Bank can be done with easy requirements and no administration fees. You can open TabunganKu to save your funds safely and comfortably.
Giro Kemudahan transaksi bisnis selain menggunakan cek/bilyet giro dan <i>Internet Banking</i>, juga dapat diintegrasikan dengan sistem pembayaran yang andal menggunakan <i>virtual account</i> dan berbagai fasilitas lainnya. Giro menjadi solusi pengelolaan keuangan untuk bisnis Anda.	Demand Deposit The convenience of business transactions in addition to using checks/ bilyet demand deposit and Internet Banking, can also be integrated with a reliable payment system using virtual accounts and various other facilities. Demand deposit is a financial management solution for your business.

Produk Pendanaan
Funding Products

- Rekening Terpisah**

Menampung dana Nasabah secara terpisah dalam kegiatan bursa berjangka komoditi lengkap dengan fasilitas *Internet Banking*. Rekening terpisah yang dapat digunakan oleh Pialang/Perantara Berjangka untuk menjamin keamanan dana Nasabah.

- Segregated Account**

Accommodating Customers' funds separately in commodity futures exchange activities complete with Internet Banking facilities. Segregated accounts can be used by Brokers/Futures Intermediaries to ensure the security of Customers' funds.

- Deposito**

Investasi dana dengan jangka waktu tertentu dan suku bunga kompetitif serta pilihan mata uang rupiah dan valas. Deposito memberikan keuntungan optimal atas penempatan Nasabah perorangan maupun perusahaan.

- Time Deposit**

Investment of funds with a certain period of time and competitive interest rates and a choice of rupiah and foreign currencies. Time deposits provide optimal returns on the placement of individual and corporate Customers.

Produk Pelepasan Dana
Fund Release ProductsKredit Produktif
Productive Loans

- Pinjaman Rekening Koran**

Fasilitas kredit di mana plafon kredit dicantumkan pada rekening koran debitur sesuai dengan kesepakatan antara Bank dengan debitur berdasarkan Perjanjian Kredit/Pengakuan Utang. Jenis pinjaman ini umumnya digunakan untuk membiayai modal kerja debitur sehari-hari.

- Overdraft Loan**

A credit facility where the credit ceiling is listed on the debtor's current account in accordance with the agreement between the Bank and the debtor based on the Credit Agreement/Debt Acknowledgement. This type of loan is generally used to finance the debtor's daily working capital.

- Revolving Loan**

Fasilitas kredit untuk pembiayaan modal kerja yang bersifat permanen, jumlahnya tercermin dalam *cash flow* perusahaan. Penarikan dana sesuai kebutuhan debitur, dengan menggunakan surat permohonan pencairan (beserta dengan lampiran lainnya). Maksimum jangka waktu pinjaman selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- Revolving Loan**

Credit facility for permanent working capital financing, in which the amount is reflected in the company's cash flow. Withdrawal of funds according to the needs of the debtor, using a disbursement request letter (along with other attachments). Maximum loan period for 1 (one) year and can be extended.

- Fixed Loan**

Fasilitas kredit untuk membiayai investasi. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan secara berkala berdasarkan *cash flow* yang disepakati di awal dan dapat juga diberikan *grace period* terhadap pokok pinjaman. Penarikan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap atau jadwal pembayaran atau per *batch* dengan jangka waktu pinjaman yang relatif panjang maksimal 15 (lima belas) tahun.

- Fixed Loan**

Credit facility to finance investment. Payment of the loan principal is made periodically based on the cash flow agreed upon at the beginning and a grace period can also be given to the loan principal. Withdrawals can be made all at once or in stages or payment schedules or per batch with a relatively long loan period of a maximum of 15 (fifteen) years.

- Supply Chain Financing**

Fasilitas kredit yang diberikan untuk pembiayaan terhadap *Supplier* dari Prinsipal dalam hal ini merupakan Nasabah/Debitur dengan jenis *Invoice (AR) Financing*, merupakan pembiayaan yang didasarkan pada *invoice* atas barang/jasa yang telah di *deliver* kepada Prinsipal dan *Purchase Order (Contract) Financing* merupakan pembiayaan yang didasarkan pada *Purchase Order* terhadap barang/jasa yang belum di *deliver* kepada Prinsipal.

- Supply Chain Financing**

Credit facilities provided for financing against suppliers of the Principal in this case is the Customer/Debtor with the type of Invoice (AR) Financing, which is financing based on invoices for goods/services that have been delivered to the Principal and Purchase Order (Contract) Financing is financing based on Purchase Orders for goods/services that have not been delivered to the Principal.

- Money Market Line**

Fasilitas kredit jangka pendek yang biasanya diberikan kepada perusahaan berbentuk badan hukum dengan reputasi tinggi dan diketahui memiliki kemampuan manajemen yang solid. Jangka waktu umumnya singkat +/- selama 7 (tujuh) hari.

- Money Market Line**

A short-term credit facility that is usually granted to companies in the form of legal entities with a high reputation and known to have solid management capabilities. Terms are generally short +/- for 7 (seven) days.

Produk Pelepasan Dana
Fund Release Products

Kredit Produktif
Productive Loans

• **Negosiasi Wesel Ekspor**

Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur di mana Bank melakukan pengambilalihan wesel ekspor dari debitur dan melakukan pembayaran atas wesel tersebut sebelum Bank mendapatkan pembayaran dari bank pembayar lainnya di luar negeri. Fasilitas ini akan timbul dan dibutuhkan sejalan dengan pemberian kredit ekspor.

• **Export Bill Negotiation**

A credit facility provided to the debtor where the Bank takes over the export bills of exchange from the debtor and makes payment on the bills of exchange before the Bank gets payment from other paying banks abroad. This facility will arise and be required in line with the granting of export credit.

• **Kredit Ekspor**

Fasilitas kredit modal kerja yang diberikan kepada eksportir (pemasok) untuk membiayai kegiatan-kegiatan produksi, pengumpulan dana atau penyediaan barang dalam rangka ekspor.

• **Export Credit**

Working capital credit facilities provided to exporters (suppliers) to finance production activities, raising funds or supplying goods in the context of exports.

• **Trust Receipt**

Fasilitas kredit jangka pendek yang diberikan oleh opening Bank untuk membiayai modal kerja dalam rangka pelunasan dokumen Sight L/C yang telah jatuh tempo. Debitur dapat menarik Trust Receipt secara berulang selama perjanjian kredit masih berlaku dan sesuai dengan jatuh tempo Sight L/C yang telah dibuka oleh applicant.

• **Trust Receipt**

Short-term credit facility provided by the opening Bank to finance working capital in order to repay the matured Sight L/C document. Debtors can withdraw the Trust Receipt repeatedly as long as the credit agreement is still valid and in accordance with the maturity of the Sight L/C that has been opened by the applicant.

• **Advances Under L/C**

Fasilitas kredit dengan jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari. Fasilitas timbul dalam transaksi penyelesaian L/C Impor yang disebabkan "nostro account" Bank telah didebit oleh negotiating Bank di luar negeri sedangkan pendebitan rekening debitur belum dapat dilaksanakan karena dokumen/barang belum tiba atau dokumen/barang sudah tiba namun debitur tidak mempunyai fasilitas Trust Receipt sedangkan saldo di rekening tidak mencukupi.

• **Advances Under L/C**

Credit facility with a maximum period of 14 (fourteen) days. The facility arises in Import L/C settlement transactions because the Bank's "nostro account" has been debited by the negotiating Bank abroad while the debiting of the debtor's account cannot be carried out because the documents/goods have not arrived or the documents/goods have arrived but the debtor does not have a Trust Receipt facility while the balance in the account is insufficient.

• **Clean Bills**

Purchased Pembelian diskonto wesel dan surat berharga lain yang didiskontokan, dengan catatan wesel atau surat berharga tersebut tidak terdapat penyimpangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pihak yang menerbitkan wesel atau surat berharga tersebut.

• **Clean Bills Purchased**

Purchase of discounted bills of exchange and other securities, provided that the bills of exchange or securities do not contain any irregularities in accordance with the provisions stipulated by the party issuing the bills of exchange or securities.

Produk Pelepasan Dana
Fund Release ProductsKredit Konsumtif
Consumptive Loans

KPR ASyig KPR ASyig merupakan fasilitas pembiayaan untuk tujuan pembelian rumah atau apartemen dan <i>developer</i> Agung Sedayu Group (ASG) yang besarnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar masing-masing <i>home buyer</i>.	KPR ASyig <i>KPR ASyig is a financing facility for the purpose of purchasing houses or apartments provided by Agung Sedayu Group (ASG) whose amount can be adjusted to the financing needs and ability to pay each home buyer.</i>
KPR Reguler Kredit Pemilikan Rumah atau Apartemen (KPR/KPA) dari Bank Artha Graha Internasional yang diberikan kepada perorangan untuk membeli rumah atau apartemen, melalui <i>developer</i> yang telah bekerja sama.	KPR Reguler <i>Home or apartment ownership loans (KPR/KPA) from Bank Artha Graha Internasional for individuals to buy houses or apartments, through developers who have established collaboration.</i>
KPR Sejahtera FLPP Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank Artha Graha Internasional berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pemenuhan Program Satu Juta Rumah.	KPR Sejahtera FLPP <i>Home Ownership Loan (KPR) from Bank Artha Graha Internasional in the form of a Housing Financing Liquidity Facility for Low Income People (MBR) in collaboration with the Ministry of Public Works and Public Housing in order to fulfill the One Million Houses Program.</i>
Kredit Tanpa Agunan (KTA) Kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur dalam mata uang Rupiah untuk keperluan konsumtif ataupun produktif selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dengan tidak mensyaratkan debitur untuk memberikan jaminan, dan diberikan atas dasar kemampuan bayar debitur berdasarkan <i>historical performance</i> debitur yang bersangkutan.	Unsecured Loan (KTA) <i>Unsecured Loan (KTA) is a credit facility provided to debtors in Rupiah for consumptive or productive purposes as long as it does not conflict with applicable regulations, does not require debtors to provide guarantees, and is given on the basis of the debtor's ability to pay based on the debtor's historical performance.</i>
Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) adalah kredit konsumen yang diberikan untuk membiayai pembelian kendaraan baru (mobil). Khusus untuk pembelian kendaraan ini harus melalui <i>dealer/agen</i> resmi dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang telah bekerja sama dengan BAGI. KKB ini bersifat <i>complimentary</i> (hanya diberikan kepada debitur/Nasabah yang memiliki fasilitas <i>funding/lending</i> status lancar di Bank Artha Graha Internasional).	Motor Vehicle Loans (KKB) <i>Motor Vehicle Loans (KKB) is a consumer loan provided to finance the purchase of a new vehicle (car). The purchase of the vehicle must go through an authorized dealer/agent from the Sole Agent of Brand Holder (ATPM) who has collaborated with BAGI. This KKB is complimentary (only given to debtors/Customers who have current funding/lending status facilities at Bank Artha Graha Internasional).</i>

Fasilitas Kredit Lainnya
Other Credit Facilities

Bank Garansi Jaminan Bank kepada pihak ketiga demi terjaminnya kelancaran pembayaran/pelaksanaan atas penyelesaian transaksi antara Nasabah dengan pihak ketiga sesuai perjanjian yang telah disepakati.	Bank Guarantee <i>Bank guarantee to third parties to ensure smooth payment/ implementation of transaction settlement between Customers and third parties in accordance with agreed agreements.</i>
Letter of Credit Dokumen instrumen yang diterbitkan oleh <i>Opening Bank</i> atas nama Nasabah (<i>applicant</i>) yang memberi kuasa kepada <i>beneficiary</i> untuk melakukan penarikan wesel/<i>draft</i>, yang akan dibayar oleh Bank jika semua persyaratan pada L/C telah dipenuhi.	Letter of Credit <i>Documents/instruments issued by the Opening Bank on behalf of the Customer (applicant) authorizing the beneficiary to withdraw bills/ drafts, which will be paid by the Bank if all requirements on the L/C have been met.</i>
Standby Letter of Credit Garansi dalam bentuk L/C yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan Bank tersebut berkewajiban untuk membayar pihak penerima garansi (<i>beneficiary</i>) apabila pihak yang dijamin (<i>account party</i>) cidera janji/wanprestasi.	Standby Letter of Credit <i>Guarantee in the form of L/C issued by the Bank which results in the Bank being obliged to pay the beneficiary if the guaranteed party (account party) defaults.</i>
Shipping Guarantee Surat jaminan/garansi yang diterbitkan oleh <i>Opening Bank</i> atas permintaan importir dan ditujukan kepada <i>Shipping Company/ Maskapai Pelayaran</i> untuk menjamin pengeluaran barang karena dokumen pengangkutan asli (<i>Bill of Lading</i>) belum tiba/diterima.	Shipping Guarantee <i>A letter of guarantee issued by the Opening Bank at the request of the importer and addressed to the Shipping Company to guarantee the issuance of goods because the original transportation document (Bill of Lading) has not arrived/received.</i>
Custom Guarantee Pengambilalihan kewajiban membayar oleh Bank atas permintaan Importir kepada Instansi Bea Cukai untuk menjamin pembayaran bea masuk barang impor yang dibebaskan atau ditangguhkan.	Custom Guarantee <i>Takeover of payment obligations by the Bank at the request of the importer to the Customs agency to guarantee the payment of import duties on imported goods that are exempted or suspended.</i>
Foreign Exchange Contract Fasilitas kredit yang diberikan jika Nasabah ingin melakukan transaksi dalam mata uang asing seperti transaksi <i>Spot, Forward</i> dan <i>Swap</i>.	Foreign Exchange Contract <i>Credit facility provided if Customers wish to make transactions in foreign currencies such as Spot, Forward and Swap.</i>

Layanan Digital Bank
Digital Bank Services

- Digital Apps**

Layanan perbankan berbasis *mobile* yang tersedia dalam Android dan iOS untuk menjawab kebutuhan transaksi finansial maupun non-finansial tanpa harus datang ke kantor cabang dengan fitur unggulan seperti pembukaan rekening *online*, transaksi *biller*, *cardless withdrawal*, *top up* e-Wallet, pembelian e-Commerce.

- QRIS (Quick Response Indonesia Standard)**

Layanan pembayaran berbasis QR berstandar Nasional melalui metode *scan QR Code*, menggunakan aplikasi *agi digital apps*, ke seluruh jaringan *merchant* yang tergabung dengan QRIS.

Selain itu, Bank juga menyediakan layanan penerimaan pembayaran QR Code di *merchant* yang bekerja sama dengan bank, melalui aplikasi AGI Pay, sehingga dapat menerima pembayaran QRIS dari seluruh lembaga yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.

- API (Application Programming Interface)**

Layanan antarmuka/*interface* yang menyediakan interkoneksi layanan perbankan antara sistem bank dan mitra bisnis dengan tetap memprioritaskan aspek *security* dalam bertransaksi dengan standarisasi SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran).

- Internet Banking Business**

Layanan perbankan yang berbasis web yang menawarkan kemudahan pengecekan dana perusahaan serta transaksi pembayaran yang didukung dengan keamanan dalam menjalankan transaksi dengan menggunakan tingkatan level otorisasi dalam bertransaksi dengan dukungan *soft token* dan *hard token*.

- Retail Internet Banking**

Layanan perbankan berbasis web yang ditujukan untuk Nasabah perorangan yang aktif dalam melakukan transaksional perbankan melalui *browser* dengan jaminan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi.

- Kartu ATM GrahaCash GPN**

Kartu ATM/Debit Chip sesuai Standar Nasional Teknologi Chip (SNTC) yang memberikan kemudahan bertransaksi melalui jaringan ATM serta transaksi debit belanja di seluruh mesin EDC *merchant* yang tergabung dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di seluruh Indonesia.

- Fitur Virtual Account and Billing System**

Layanan yang menjadi solusi dalam rekonsiliasi pembayaran tagihan dari pelanggan yang mudah diakses baik melalui integrasi API maupun *Corporate Internet Banking*, sehingga dapat menerima pembayaran melalui *channel* Bank maupun antar Bank dan transaksi dapat dilakukan kapanpun dan di manapun tanpa terbatas dengan jam operasional Bank.

- Digital Apps**

Mobile-based banking services available on Android and iOS to answer the needs of financial and non-financial transactions without having to go to a branch office with excellent features such as online account opening, *biller* transactions, *cardless withdrawals*, eWallet *top-ups*, e-Commerce purchases.

- QRIS (Quick Response Indonesia Standard)**

National standard QR-based payment services through the QR Code scan method, using the *agi digital apps* application, to all merchant networks that are members of QRIS.

In addition, the Bank also provides QR Code payment acceptance services at merchants that cooperate with banks, through the AGI Pay application so that it can accept QRIS payments from all institutions approved by Bank Indonesia.

- API (Application Programming Interface)**

Service interface that provides interconnection of banking services between bank systems and business partners while prioritizing security aspects in transactions with SNAP (National Open API Payment Standard) standardization.

- Internet Banking Business**

Web-based banking services that offer easy checking of company funds and payment transactions supported by security in carrying out transactions using authorization levels in transactions with the support of *soft tokens* and *hard tokens*.

- Retail Internet Banking**

Web-based banking services intended for individual Customers who are active in conducting transactional banking through a browser with guaranteed ease and security in transactions.

- GrahaCash GPN ATM Card**

ATM/Debit Card Chip comply with the National Standard for Chip Technology (SNTC) which provides convenience for transactions through ATM networks and shopping debit transactions at all EDC merchant machines incorporated in the National Payment Gateway (GPN) throughout Indonesia.

- Virtual Account and Billing System Feature**

Services that provide solution for the reconciliation of customers bill payments that are easily accessible both through API integration and *Corporate Internet Banking*, so that they can accept payments through Bank channels or interbank, and transactions can be made anytime and anywhere without being limited to the Bank's operating hours.

Layanan Digital Bank
Digital Bank Services

• **BI FAST**

Layanan transfer dana antar Bank melalui pendaftaran nomor rekening maupun melalui *proxy* rekening (alias) berupa e-mail dan nomor *handphone* Nasabah secara langsung/online dengan biaya transfer yang lebih murah.

• **BI FAST**

Interbank fund transfer services through account number registration or through account proxy (alias) in the form of e-mail and Customer mobile numbers directly/online with lower transfer fees.

• **Fitur Payroll**

Layanan yang menjadi solusi bagi kebutuhan Anda untuk pembayaran gaji karyawan secara cepat, tepat, dan mudah melalui *internet banking* bisnis, sehingga transaksi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa terbatas dengan jam operasional Bank.

• **Payroll Feature**

Services that solve your needs for fast, precise, and easy employee salary payments through Corporate Internet Banking, so that transactions can be done anytime and anywhere without being limited to Bank operating hours.

• **Laku Pandai**

Layanan keuangan tanpa jaringan kantor Bank, namun melalui kerja sama dengan pihak lain (agen) dengan didukung sarana teknologi informasi menggunakan *API management* untuk melayani Nasabah. Laku Pandai merupakan salah satu program yang disediakan dalam rangka keuangan inklusif.

• **Laku Pandai**

Financial services without a network of Bank offices, but through cooperation with other parties (agents) supported by information technology facilities using API Management to serve Customers. Laku Pandai is one of the programs provided in the framework of financial inclusion.

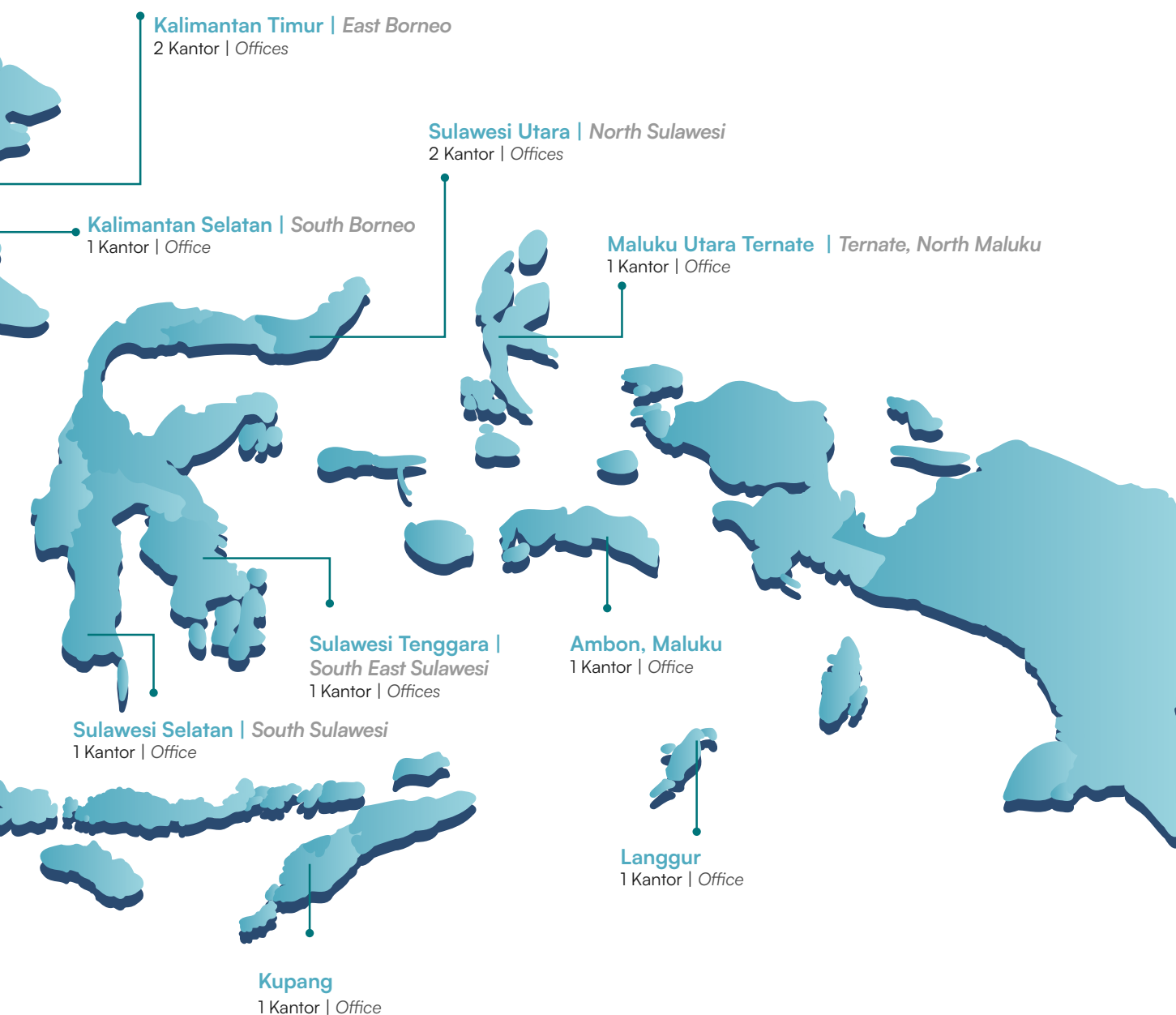
PETA JARINGAN BISNIS DAN WILAYAH OPERASI

Maps of Business Network and Operational Area



Jumlah Kantor Berdasarkan Wilayah
Number of Offices by Area

65 Kantor
Offices



Jumlah Kantor Berdasarkan Wilayah Number of Offices by Area

Area Area	KC	KCP	Kegiatan Pelayanan Kas Cash Service Activities		ATM				
			Payment	Mobile	KC	KCP	PP	OFF	Jumlah Total
DKI Jakarta	6	20	-	1	7	23	-	24	54
Jawa Barat West Java	4	7	-	-	4	7	-	16	27
Banten	-	2	-	-	-	2	-	4	6
Jawa Tengah Central Java	2	-	-	-	2	-	-	2	4
Jawa Timur East Java	1	1	-	-	1	1	-	1	3
Bali	1	1	-	-	1	1	-	6	8
Sumatra Utara North Sumatra	1	1	-	-	2	2	-	5	9
Sumatra Selatan South Sumatra	1	-	-	-	1	-	-	2	3
Sumatra Barat West Sumatra	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Riau	1	-	-	-	2	-	-	-	2
Kepulauan Riau Riau Island	1	-	-	-	1	-	-	3	4
Jambi	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Kepulauan Babel Babel Island	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Lampung	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Kalimantan Timur East Borneo	2	-	-	-	2	-	-	-	2
Kalimantan Barat West Borneo	1	-	-	-	1	-	-	4	5
Kalimantan Selatan South Borneo	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Sulawesi Selatan South Sulawesi	1	-	-	-	1	-	-	1	2
Sulawesi Utara North Sulawesi	2	-	-	-	2	-	-	-	2
Sulawesi Tenggara Southeast Sulawesi	1	-	-	-	2	-	-	1	3
Kupang (NTT) Kupang (East Nusa Tenggara)	1	-	-	-	1	-	-	4	5

Jumlah Kantor Berdasarkan Wilayah
Number of Offices by Area

Area Area	KC	KCP	Kegiatan Pelayanan Kas Cash Service Activities		ATM				
			Payment	Mobile	KC	KCP	PP	OFF	Jumlah Total
Maluku Utara North Maluku	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Maluku Ambon	1	1	-	-	1	1	-	7	9
Jumlah Total	32	33	-	1	36	37	-	83	156

Jumlah Kantor Berdasarkan Jenis Kantor
Number of Offices by Office Type

Jenis Kantor Office Type	2024	2023	2022	2021	2020
Kantor Cabang Branch Office	32	32	32	32	32
Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office	33	34	35	36	40
Kantor Kas Cash Office	-	-	-	-	2
Kegiatan Pelayanan Kas Cash Services Activities					
Payment Point	-	-	-	-	6
Mobile Terminal	1	1	1	1	1
ATM ATM					
On Premises	73	73	74	72	80
Off Premises	83	80	57	46	44
Jumlah ATM Total ATM	156	153	131	118	124
Jumlah Total	222	220	199	187	205

KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI

Association Membership

Bank Artha Graha Internasional bergabung dengan berbagai asosiasi/perhimpunan yang sesuai dengan kiprahnya dalam industri perbankan. Dengan bergabung di dalam asosiasi/perhimpunan ini, Bank bisa berbagi isu dan kebijakan tentang industri perbankan, termasuk dampak dan peluangnya bagi perbankan pada jangka pendek, menengah maupun panjang. Selama tahun 2024, Bank bergabung dengan asosiasi/perhimpunan berikut:

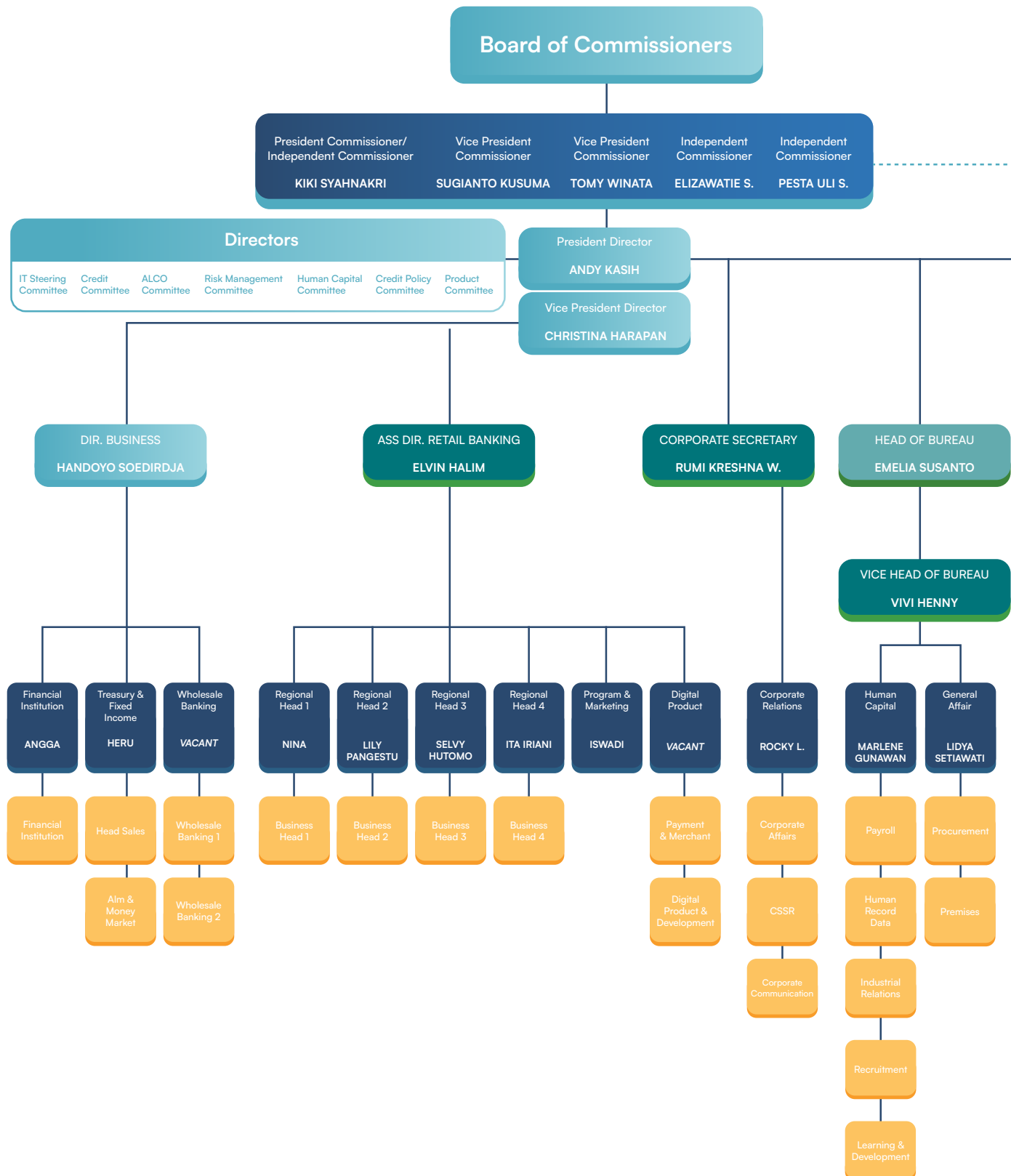
Bank Artha Graha Internasional joins various associations that are relevant to its work in the banking industry. By joining these associations, the Bank is able to share issues and policies on the banking industry, including its impact and opportunities for banks in the short, medium and long term. In 2024, the Bank joined the following associations:

Nama Asosiasi Association Name	Status Keanggotaan Membership Status
ICSA (Indonesia Corporate Secretary Association)	Anggota Member
AEI (Asosiasi Emiten Indonesia) AEI (Indonesian Issuers Association)	Anggota Member
LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) LAPS SJK (Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution)	Anggota Member
PERBANAS (Perhimpunan Bank Nasional) PERBANAS (National Bank Association)	Anggota Member
FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan) FKDKP (Banking Compliance Director Communication Forum)	Anggota Member
ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) ASPI (Indonesian Payment System Association)	Anggota Member
IASC (Indonesia Anti-Scam Centre)	Anggota Member

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.

STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure



Commissioners

AUDIT COMMITTEE

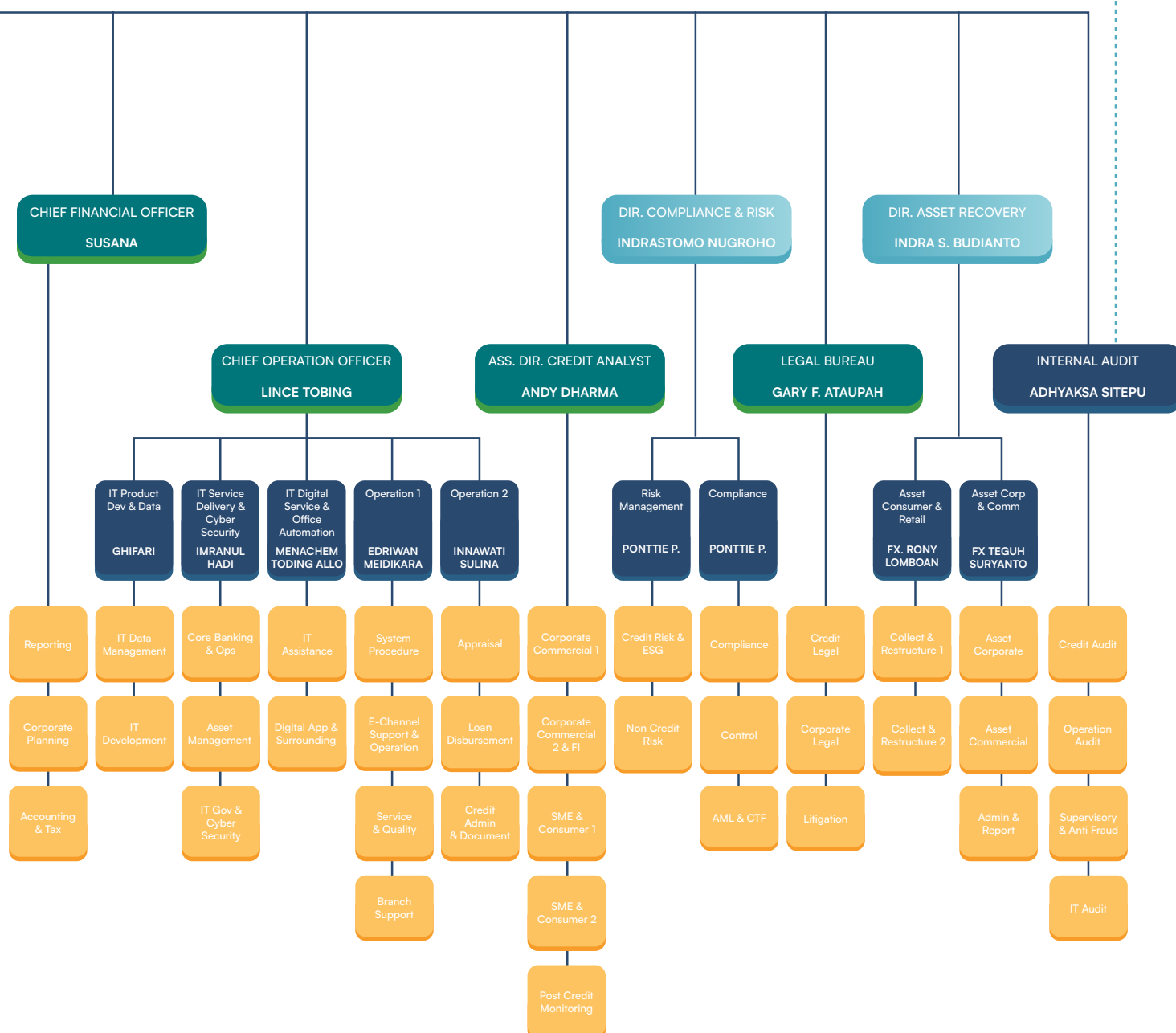
1. PESTA ULI SITANGGANG
2. SURYANI PURWITA
3. ANAS LATIEF

RISK MONITORING COMMITTEE

1. ELIZAWATIE S.
2. SURYANI PURWITA
3. ANAS LATIEF

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

1. KIKI SYAHNAKRI
2. TOMY WINATA
3. MARLENE GUNAWAN



PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Profile

Pada tahun 2024, komposisi Dewan Komisaris Bank tidak mengalami perubahan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2024 yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 17 Juli 2024.

Adapun profil dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

In 2024, the composition of the Bank's Board of Commissioners remained unchanged, in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on June 26, 2024, as stated in the Deed of Meeting Resolution No. 05 dated July 17, 2024.

The profiles of each member of the Bank's Board of Commissioners for the period ending December 31, 2024, are as follows:



KIKI SYAHNAKRI

Komisaris Utama/Komisaris Independen
President Commissioner/Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, berusia 77 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau pertama kali menjabat sebagai Komisaris Utama Bank berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 12 Juni 2005 dan terakhir kali diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 17 Juli 2023. Beliau telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 15/29/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 12 Februari 2013.

Beliau lulus dari Akademi Militer Nasional pada tahun 1971 dan berkarir di kemiliteran. Sepanjang karirnya, beliau telah menduduki berbagai jabatan penting, antara lain Asisten Operasi KASAD (1998-1999), Panglima Darurat Militer Timor Timur (September-November 1999), Panglima Daerah Militer IX Udayana (November 1999-November 2000), dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (November 2000-Mei 2002).

Saat ini, beliau juga tercatat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Bank, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di emiten dan perusahaan publik lain. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali Bank.

Pada tahun 2024, beliau telah mengikuti Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 untuk Komisaris dari LSPP.

Indonesian citizen, 77 years old as of December 2024 and domiciled in Jakarta. He first served as President Commissioner of the Bank based on Deed of Meeting Resolution No. 26 dated June 12, 2005 and was last appointed based on Deed of Meeting Resolution No. 16 dated July 17, 2023. He has passed the fit and proper test by Bank Indonesia based on Bank Indonesia Letter No. 15/29/GBI/DPIP/Secret dated February 12, 2013.

He graduated from the National Military Academy in 1971 and had a career in the military. Throughout his career, he has held various important positions, including Operations Assistant to KASAD (1998-1999), Military Emergency Commander of East Timor (September-November 1999), Commander of Military Region IX Udayana (November 1999-November 2000), and Deputy Chief of Staff of the Army (November 2000-May 2002).

Currently, he is also listed as the Chairman of the Bank's Nomination and Remuneration Committee, he has no concurrent positions in other listed and public companies. He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and controlling shareholders of the Bank.

In 2024, he participated in the Risk Management Certification Training and Examination Level 6 for Commissioners, conducted by LSPP.

TOMY WINATA

Wakil Komisaris Utama
Vice President Commissioner



Warga Negara Indonesia, berusia 66 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau pertama kali menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Bank berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 12 Juni 2005 dan terakhir kali diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 17 Juli 2023. Beliau telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 7/19/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 15 Juni 2005.

Beliau dikenal sebagai pengusaha yang telah mengembangkan usaha di berbagai bidang di Indonesia. Saat ini, beliau juga tercatat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.

Indonesian citizen, 66 years old as of December 2024 and domiciled in Jakarta. He first served as Vice President Commissioner of the Bank based on Deed of Meeting Resolution No. 26 dated June 12, 2005 and was last appointed based on Deed of Meeting Resolution No. 16 dated July 17, 2023. He has passed the fit and proper test by Bank Indonesia based on Bank Indonesia Letter No. 7/19/GBI/DPIP/Rahasia dated June 15, 2005.

He is known as an entrepreneur who has developed businesses in various fields in Indonesia. Currently, he is also listed as a member of the Bank's Remuneration and Nomination Committee.

SUGIANTO KUSUMA

Wakil Komisaris Utama
Vice President Commissioner



Warga Negara Indonesia, berusia 73 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau pertama kali menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Bank berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 12 Juni 2005 dan terakhir kali diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 17 Juli 2023. Beliau telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 7/19/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 15 Juni 2005.

Beliau merupakan pengusaha yang telah mengembangkan usaha di berbagai bidang di Indonesia.

Indonesian citizen, 73 years old as of December 2024 and domiciled in Jakarta. He first served as Vice President Commissioner of the Bank based on Deed of Meeting Resolution No. 26 dated June 12, 2005 and was last appointed based on Deed of Meeting Resolution No. 16 dated July 17, 2023. He has passed the fit and proper test by Bank Indonesia based on Bank Indonesia Letter No. 7/19/GBI/DPIP/Secret dated June 15, 2005.

He is an entrepreneur who has developed businesses in various fields in Indonesia.



ELIZAWATIE SIMON

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, berusia 63 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris Independen Bank berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 253 tanggal 25 Juli 2022. Beliau telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-59/D.03/2022 tanggal 20 April 2022.

Beliau meraih gelar Sarjana Hukum bidang Hukum Perdata dari Universitas Trisakti (1985). Sebelumnya, beliau berkarier sebagai Kepala Biro Hukum Bank Danamon (1982-1990), Kepala Biro Hukum PT Danayasa Arthatama (1990-1999). Beliau berkarier di Bank sebagai Kepala Biro Hukum (1999-2013), Komisaris Independen (Juni 2013), Direktur (November 2013), Komisaris (2018), Komisaris PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (2018), Komisaris Independen PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (2020-2021).

Saat ini, beliau juga tercatat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Bank, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di emiten dan perusahaan publik lain dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali Bank.

Pada tahun 2024, beliau mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7, Seminar Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 dan *The 19th Indonesia HR EXPO*.

Indonesian citizen, 63 years old as of December 2024, domiciled in Jakarta. Appointed as Independent Commissioner of the Bank based on Deed of Meeting Resolution No. 253 dated July 25, 2022. She has passed the fit and proper test by the Financial Services Authority in accordance with the Financial Services Authority (OJK) letter No. KEP-59/D.03/2022 dated April 20, 2022.

She holds a Bachelor of Laws degree in Civil Law from Trisakti University (1985). Previously, she worked as Head of Legal Bureau of Bank Danamon (1982-1990), Head of Legal Bureau of PT Danayasa Arthatama (1990-1999). She had a career in the Bank as Head of Legal Bureau (1999-2013), Independent Commissioner (June 2013), Director (November 2013), Commissioner (2018), Commissioner of PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (2018), Independent Commissioner of PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (2020-2021).

She is currently serving as the Chairperson of the Bank's Risk Monitoring Committee. She does not hold any concurrent positions in other publicly listed companies and has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Bank's controlling shareholders.

In 2024, she participated in the Level 7 Risk Management Certification, the Alignment Seminar for the Level 7 Risk Management Certification, and the 19th Indonesia HR EXPO.

PESTA ULI SITANGGANG

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Warga Negara Indonesia, 61 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris Independen Bank berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 17 Juli 2023 dan telah lulus *Fit & Proper Test* sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEPR-141/D.03/2023 tanggal 8 November 2023.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Sumatra Utara (USU) pada tahun 1988. Sebelumnya, beliau berkarier di KAP Prasetyo Utomo & Co - Arthur Andersen (1989-1999) dengan posisi terakhir sebagai *SC Manager*, kemudian sebagai *General Manager Internal Audit* dan *Financial Controller* di PT Pionerindo Gourmet Internasional Tbk (2000-2006), *Senior Manager Finance & Accounting* di PT Repex Persada Internasional (Fedex) (2006-2008), *Direktur* dan *Corporate Secretary* di PT Sentul City Tbk (2008-2013), *Senior Manager Keuangan* di PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (2013-2017), *Corporate Secretary* dan *Direktur* PT Danayasa Arthatama Tbk (2017-2021), *Advisor* PT Pangea Sinergi Solusindo (2022-2023).

Saat ini beliau juga tercatat sebagai Ketua Komite Audit Bank, beliau tidak memiliki rangkap jabatan di emiten dan perusahaan publik lain dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham pengendali Bank.

Pada tahun 2024, beliau memperoleh Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 6 untuk Komisaris dari LSPP dan mengikuti *The 19th Indonesia HR EXPO*.

Indonesian citizen, 61 years old as of December 2024, domiciled in Jakarta. She serves as Independent Commissioner of the Bank based on Deed of Meeting Resolution No. 16 dated July 17, 2023 and has passed the Fit & Proper Test in accordance with the letter of the Financial Services Authority (OJK) No. KEPR-141/D.03/2023 dated November 8, 2023.

She holds a Bachelor of Economics degree in Accounting from the University of North Sumatra (USU), Medan in 1988. Previously, she worked at KAP Prasetyo Utomo & Co - Arthur Andersen as SC Manager (1989-1999), then as General Manager Internal Audit and Financial Controller at PT Pionerindo Gourmet Internasional Tbk (2000-2006), PT Repex Persada Internasional (Fedex) as Senior Manager Finance & Accounting (2006-2008), PT Sentul City Tbk as Director and Corporate Secretary (2008-2013), PT Jakarta International Hotels & Development Tbk as Senior Manager Finance (2013-2017), PT Danayasa Arthatama Tbk as Corporate Secretary and Director (2017-2021), PT Pangea Sinergi Solusindo as Advisor (2022-2023).

She is currently serving as the Chairperson of the Bank's Audit Committee. She does not hold any concurrent positions in other publicly listed companies and has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Bank's controlling shareholders.

In 2024, she obtained the Level 6 Risk Management Certificate for Commissioners from LSPP and participated in the 19th Indonesia HR EXPO.

PROFIL DIREKSI

Board of Directors Profile

Pada tahun 2024, komposisi Direksi Bank tidak mengalami perubahan, sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2024, para pemegang saham setuju untuk mengangkat kembali Sdri. Christina Harapan sebagai Wakil Direktur Utama, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 17 Juli 2024.

Dengan demikian, profil dari masing-masing anggota Direksi Bank untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

In 2024, there were no changes to the composition of the Bank's Board of Directors. In accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on June 26, 2024, the shareholders agreed to reappoint Ms. Christina Harapan as Vice President Director, as stated in the Deed of Meeting Resolution No. 05 dated July 17, 2024.

Accordingly, the profiles of each member of the Bank's Board of Directors for the period ending December 31, 2024, are as follows:



ANDY KASIH

Direktur Utama
President Director

Warga Negara Indonesia, berusia 69 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Diangkat pertama kali sebagai Direktur Utama Bank berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 30 Juni 2008 dan terakhir kali diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 17 Juli 2023. Beliau telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 10/184/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 9 Desember 2008.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandala pada tahun 1984. Sebelumnya, beliau berkarier sebagai Kepala Akuntan PT Charoen Pokphand Indonesia Animal Feedmill (1979-1981), Kepala Akuntan dan Keuangan PT Impex Megah Surabaya (1981-1983), Executive Trainee Citibank (1982), Wakil Presiden Citibank (1994), Direktur Operasi Bank Subentra (1994), Direktur Operasi Bank (1996), Direktur IT dan Fincon Bank (1999-2001), Direktur IT dan Kepatuhan Bank (2001-2005), serta Direktur IT, Direktur Kepatuhan, dan Risk Management Bank (2005-2008).

Beliau tidak merangkap jabatan di perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Pada tahun 2024, beliau telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 dan Seminar Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7.

Indonesian citizen, 69 years old as of December 2024 and domiciled in Jakarta. He was first appointed as President Director of the Bank based on Deed of Meeting Resolution No. 95 dated June 30, 2008 and was last appointed based on Deed of Meeting Resolution No. 16 dated July 17, 2023. He has passed the fit and proper test by Bank Indonesia based on Bank Indonesia Letter No. 10/184/GBI/DPIP/Secret dated December 9, 2008.

He earned his Bachelor of Economics degree from Widya Mandala Catholic University in 1984. Previously, he worked as Chief Accountant of PT Charoen Pokphand Indonesia Animal Feedmill (1979-1981), Chief Accountant and Finance of PT Impex Megah Surabaya (1981-1983), Executive Trainee of Citibank (1982), Vice President of Citibank (1994), Operations Director of Subentra Bank (1994), Operations Director of the Bank (1996), IT and Fincon Director of the Bank (1999-2001), IT and Compliance Director of the Bank (2001-2005), and IT Director, Compliance Director, and Risk Management of the Bank (2005-2008).

He does not hold any concurrent positions in other companies and has no affiliation with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholders. In 2024, he completed the Level 7 Risk Management Certification and attended the Alignment Seminar for the Level 7 Risk Management Certification.

CHRISTINA HARAPAN

Wakil Direktur Utama
Vice President Director



Warga Negara Indonesia, berusia 46 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Diangkat pertama kali sebagai Wakil Direktur Utama Bank berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 17 Juli 2018 dan terakhir kali diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 17 Juli 2024. Beliau telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-8/PB.12/2019 tanggal 9 Januari 2019.

Beliau meraih gelar Sarjana Bisnis dari Universitas San Diego pada tahun 1999 dan Master bidang Bisnis Administrasi dari San Diego State University pada tahun 2000. Perjalanan karier beliau dimulai di Bank Artha Graha Internasional sebagai Pemimpin Tim Pengawasan Bisnis di Internal Audit (2008-2012). Selanjutnya, beliau dipromosikan menjadi Kepala Divisi Pengendalian Internal (2012-2014) yang bertugas dalam mengelola risiko kredit dan operasional, Kepala Biro Direksi (2014-2016), dan Komisaris Independen PT Bank ICBC Indonesia (Februari 2016-Mei 2018).

Pada tahun 2024, beliau mengikuti seminar penyelarasan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7, Seminar *Economy Outlook 2024, the Role of Woman Leadership in Digital Era* serta *the 19th Indonesia HR Expo*.

Indonesian citizen, 46 years old as of December 2024 and domiciled in Jakarta. She was first appointed as Vice President Director of the Bank pursuant to Deed of Meeting Resolution No. 9 dated July 17, 2018, and was most recently reappointed pursuant to Deed of Meeting Resolution No. 05 dated July 17, 2024. She has been declared fit and proper by the Financial Services Authority as stated in the Financial Services Authority Letter No. SR-8/PB.12/2019 dated January 9, 2019.

She earned a Bachelor of Business degree from the University of San Diego in 1999 and a Master of Business Administration from San Diego State University in 2000. Her career started at Bank Artha Graha Internasional as a Business Monitoring Team Leader in Internal Audit (2008-2012). Subsequently, she was promoted to Head of Internal Control Division (2012-2014) in charge of managing credit and operational risks, Head of Bureau of Directors (2014-2016), and Independent Commissioner of PT Bank ICBC Indonesia (February 2016-May 2018).

In 2024, she attended the Alignment Seminar and Level 7 Risk Management Certification, the 2024 Economic Outlook Seminar, the Role of Women Leadership in the Digital Era, and the 19th Indonesia HR Expo.



INDRA S. BUDIANTO

Direktur
Director

Warga Negara Indonesia, berusia 62 tahun per Desember 2024, berdomisili di Jakarta. Diangkat pertama kali sebagai Direktur Bank berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 225 tanggal 28 November 2014 dan terakhir kali diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 17 Juli 2023. Beliau telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-183/D.03/2015 tanggal 2 Oktober 2015.

Beliau meraih gelar *Diploma of Business* dari Ngee Ann Polytechnic, Singapura (1982), *Bachelor of Economic* (1989) dan *Master of Business Administration* dari University of La Verne, Claremont, Los Angeles, USA (1990) dan *Master of Science (Defense)* dari Universitas Pertahanan Indonesia (2012). Beliau pernah menjabat sebagai *General Manager* PT Putra Kalimantan Group yang bertanggung jawab untuk wilayah Medan, Dumai, Palembang, Samarinda, Balikpapan, dan Makassar (1995) dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Bank pada tahun (2018-2019).

Beliau tidak merangkap jabatan di perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Pada tahun 2024, beliau telah mengikuti Resertifikasi dan Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 dan *the 19th Indonesia HR Expo*.

Indonesian citizen, 62 years old as of December 2024 and domiciled in Jakarta. He was first appointed as Director of the Bank based on Deed of Meeting Resolution No. 225 dated November 28, 2014 and was last appointed based on Deed of Meeting Resolution No. 16 dated July 27, 2023. He has passed the fit and proper test by the Financial Services Authority based on the Financial Services Authority Letter No. SR-183/D.03/2015 dated October 2, 2015.

He holds a Diploma in Business Education from Ngee Ann Polytechnic, Singapore (1982), a Bachelor of Business Administration from University of La Verne, Claremont, Los Angeles, USA (1990) and a Master in Defense from Indonesia Defense University (2012). He has served as General Manager of PT Putra Kalimantan Group responsible for Medan, Dumai, Palembang, Samarinda, Balikpapan and Makassar (1995) and has served as Corporate Secretary of the Bank in 2018-2019.

He does not hold any concurrent positions in other companies and has no affiliation with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholders. In 2024, he participated in the Level 7 Risk Management Recertification and Alignment Seminar, as well as the 19th Indonesia HR Expo.

INDRASTOMO NUGROHO

Direktur Kepatuhan/Direktur Independen
Compliance Director/Independent Director



Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun per Desember 2024, berdomisili di Jakarta. Diangkat pertama kali sebagai Direktur Bank berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 17 Juli 2018 dan terakhir kali diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 17 Juli 2023 dan telah lulus *Fit & Proper Test* sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEPR-142/D.03/2023 tanggal 8 November 2023.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1996. Beliau memulai kariernya di dunia perbankan sebagai *Senior Manager Product* Bank Niaga (1996–2005), *Head of Liabilities Product* Bank Danamon (2005–2008), *Head of Centralize Processing* BTPN (2008–2009), *Head of Consumer Lending Product Development* Bank Negara Indonesia (2009–2013). Beliau menjabat di Bank sebagai *Deputi Direktur Pengembangan Produk dan Bisnis* (2013), *Deputi Direktur Commercial Banking* (2018), *Direktur Konsumer* (2018) dan *Direktur Digital & Ritel Banking* (2020).

Beliau tidak sedang merangkap jabatan di perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Pada tahun 2024, beliau telah mengikuti *Resertifikasi dan Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7* serta *The 19th Indonesia HR Expo*.

Indonesian citizen, 50 years old as of December 2024 and domiciled in Jakarta. He was first appointed as Director of the Bank based on Deed of Meeting Resolution No. 9 dated July 17, 2018 and was last appointed based on Deed of Meeting Resolution No. 16 dated July 17, 2023 and has passed the Fit & Proper Test in accordance with the letter of the Financial Services Authority (OJK) No. KEPR-142/D.03/2023 dated November 8, 2023.

He earned his Bachelor's degree in Economics from Trisakti University in 1996. He began his banking career as Senior Product Manager at Bank Niaga (1996–2005), followed by roles as Head of Liabilities Product at Bank Danamon (2005–2008), Head of Centralized Processing at BTPN (2008–2009), and Head of Consumer Lending Product Development at Bank Negara Indonesia (2009–2013). At the Bank, he has held several key positions, including Deputy Director of Product and Business Development (2013), Deputy Director of Commercial Banking (2018), Director of Consumer Banking (2018), and Director of Digital & Retail Banking (2020).

He is not currently holding any concurrent positions in other companies and has no affiliation with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholders. In 2024, he participated in the Level 7 Risk Management Recertification and Alignment Seminar, as well as the 19th Indonesia HR Expo.



HANDOYO SOEDIRDJA

Direktur
Director

Warga Negara Indonesia, 60 tahun per Desember 2024, berdomisili di Jakarta. Diangkat pertama kali sebagai Direktur Bank berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 7 Desember 2012 dan terakhir kali diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 17 Juli 2023 dan telah lulus *Fit & Proper Test* sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEPR-143/D.03/2023 tanggal 8 November 2023.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Science* dari Macquarie University, Sydney, Australia (1989) dan *Master of Business Administration* dibidang *Finance and Marketing* dari Bond University Queensland, Australia (1996). Sebelumnya, beliau berkarier sebagai *Financial Advisor/Analyst* di Deutsche Bank Australia (1995-1997), *Senior Financial Advisor/Business Analyst* di Credit Suisse First Boston/Challenger Australia (1997-2002), Direktur Keuangan Mosaic Oil NL (Listed Company di Australia), CEO Avexa Investment Ltd., dan Deputy Komisaris Avexa Investment (Listed Company di Australia), *Fund Manager* di Bell Potter Securities Limited Australia (2002-2004), *Senior Corporate Financial Advisor* di ABN Amro Morgans Limited Australia (2004-2009), *Private Equity Senior Financial Advisor* di UBS/Bell Potter Security Limited Australia (2009-2012), *Chief Executive Officer* di PT Kelas Kita Edukasi Indonesia (2020-2023), *Chief Executive Officer* di PT Project One Solution (2022-2023). Beliau menjabat di Bank sebagai Kepala Biro Direksi (September 2012—Desember 2012), Direktur Kepatuhan (2013-2014), Direktur Kredit Korporasi, *Capital Market & Treasury* (2014-2016), Direktur Kredit & *Treasury* (2017-2018).

Beliau tidak sedang merangkap jabatan di perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Pada tahun 2024, beliau mengikuti Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 untuk Direksi dan Sertifikasi *Treasury Dealer* Jenjang 7.

Indonesian citizen, 60 years old as of December 2024 and domiciled in Jakarta. He was first appointed as Director of the Bank based on Deed of Meeting Resolution No. 18 dated December 7, 2012 and was last appointed based on Deed of Meeting Resolution No. 16 dated July 17, 2023 and has passed the Fit & Proper Test in accordance with the letter of the Financial Services Authority (OJK) No. KEPR-143/D.03/2023 dated November 8, 2023.

He earned a Bachelor of Science degree from Macquarie University, Sydney, Australia (1989) and a Master of Business Administration in Finance and Marketing from Bond University Queensland, Australia (1996). Prior to this, he had a career as a Financial Advisor/Analyst at Deutsche Bank Australia (1995-1997), Senior Financial Advisor/Business Analyst at Credit Suisse First Boston/Challenger Australia (1997-2002), Finance Director at Mosaic Oil NL (Listed Company in Australia), CEO of Avexa Investment Ltd., and Deputy Commissioner of Avexa Investment (Listed Company in Australia), Fund Manager at Bell Potter Securities Limited Australia (2002-2004), Senior Corporate Financial Advisor at ABN Amro Morgans Limited Australia (2004-2009), Private Equity Senior Financial Advisor at UBS/Bell Potter Securities Limited Australia (2009-2012), Chief Executive Officer at PT Kelas Kita Edukasi Indonesia (2020-2023), and Chief Executive Officer at PT Project One Solution (2022-2023). He served at the Bank as Head of the Board Bureau (September 2012-December 2012), Compliance Director (2013-2014), Director of Corporate Credit, Capital Markets & Treasury (2014-2016), and Director of Credit & Treasury (2017-2018).

He is not currently holding any concurrent positions in other companies and has no affiliation with the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholders.

In 2024, he attended the Preparatory Program and Examination for the Level 7 Risk Management Certification for Directors and obtained the Level 7 Treasury Dealer Certification.

PEJABAT EKSEKUTIF

Executive Officials

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Keterangan Description
1.	EMELIA SUSANTO <i>Head of Bureau</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 47 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau bergabung di Bank Artha Graha Internasional sejak tanggal 30 Juni 2018 sebagai <i>Head of Bureau</i>. Mem peroleh Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 atau setara Jenjang 4 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, Sertifikasi <i>General Banking</i> Level 2 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dan <i>Certified Human Resources Professional</i> (CHRP) tahun 2021, <i>Advanced Human Capital Accomplished</i> (AHCA), dan <i>Administrative Human Resources Professional</i> (AHRP) dari UNIKA Atma Jaya pada tahun 2022. <i>Indonesian citizen, 47 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. She joined Bank Artha Graha Internasional on June 30, 2018, as Head of Bureau. She holds a Level 1 Risk Management Certification (equivalent to Level 4) from the Risk Management Certification Body, a Level 2 General Banking Certification from the Banking Professional Certification Institute, and obtained the Certified Human Resources Professional (CHRP) designation in 2021, as well as the Advanced Human Capital Accomplished (AHCA) and Administrative Human Resources Professional (AHRP) certifications from UNIKA Atma Jaya in 2022.</i>
2.	VIVI HENNY <i>Vice Head of Bureau</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 40 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Manajemen Bisnis dari LA Trobe University (2009). Mulai berkarier di Bank tahun 2010 dan saat ini beliau menjabat sebagai <i>Vice Head of Bureau</i> sejak tanggal 18 Oktober 2023 dan Komisaris Independen di PT Electronic City Indonesia Tbk (2020-sekarang). <i>Indonesian citizen, 40 years old as of December 2024 and domiciled in Jakarta. She graduated with Business Management Degree from LA Trobe University (2009). She pursued her career in Banking industry since 2010, and currently hold as Vice Head of Bureau since October 18, 2023, served as Independent Commissioner at PT Electronic City Indonesia Tbk (2020-present).</i>
3.	SUSANA <i>Chief Financial Officer</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai <i>Chief Financial Officer</i> (CFO) sejak tanggal 30 September 2022. Beliau meraih gelar Diploma dari Akademi Akuntansi YAI (1996), Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti (2013), dan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) dari Universitas Trisakti (2014). Sebelumnya berkarier di PT Buanagraha Arthaprima dengan jabatan terakhir sebagai <i>Finance and Accounting Manager</i> (2016), Direktur PT Bukit Lentera Sejahtera (2011-2016), Kepala SKAI PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (2017-2020), <i>Associate Direktur Financial Control & Budgeting</i> merangkap Sekretaris Perusahaan (2020-2021), dan Direktur Fincon, Admin Kredit & Legal (2022). <i>Indonesian citizen, 52 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. She has served as Chief Financial Officer (CFO) since September 30, 2022. She holds a Diploma from YAI Accounting Academy (1996), a Bachelor's degree in Accounting from Trisakti University (2013), and completed the Professional Accounting Education Program (PPAK) at Trisakti University (2014). Previously, she held various professional roles, including Finance and Accounting Manager at PT Buanagraha Arthaprima (2016), Director of PT Bukit Lentera Sejahtera (2011-2016), Head of Internal Audit Unit (SKAI) at PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (2017-2020), Associate Director of Financial Control & Budgeting concurrently serving as Corporate Secretary (2020-2021), and Director of Finance, Credit Administration & Legal (2022).</i>
4.	LINCE MARIA TOBING <i>Chief Operating Officer</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun per Desember 2024, berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai <i>Chief Operating Officer</i> sejak tanggal 23 Juli 2024. Beliau meraih gelar Sarjana Teknologi Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung. Berkarier selama lebih dari 30 tahun di industri perbankan pada beberapa Bank. Pernah menjabat sebagai <i>Collection & Fraud Management Head</i> Bank Bali (1990-1996) dan Bank Papan Sejahtera (1996-1998), <i>Risk Management Head</i> Bank HSBC (1998-2000), <i>Risk Management</i> dan <i>Project Management Head</i> American Express (2000-2006), dan <i>Senior Vice President</i> untuk beberapa posisi di Bank Danamon Indonesia (2006-2021) dengan jabatan <i>Service Strategy Program and Development Head</i>. Sebelumnya beliau berkarier di Bank sebagai <i>Associate Director Operation</i> (2021-2023), <i>Chief Operation Officer</i> (2023-Juli 2024). <i>Indonesian citizen, 58 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. She has served as Chief Operating Officer since July 23, 2024. She holds a Bachelor's degree in Agricultural Technology from Universitas Padjadjaran, Bandung. She has over 30 years of experience in the banking industry, having worked at several banks. She previously served as Collection & Fraud Management Head at Bank Bali (1990-1996) and Bank Papan Sejahtera (1996-1998), Risk Management Head at Bank HSBC (1998-2000), Risk Management and Project Management Head at American Express (2000-2006), and Senior Vice President in various positions at Bank Danamon Indonesia (2006-2021), most recently as Service Strategy Program and Development Head. She also held roles at the Bank as Associate Director of Operations (2021-2023) and Chief Operating Officer (2023-July 2024).</i>

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Keterangan Description
5.	ANDY DHARMA <i>Associate Director Credit Analyst</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau diangkat menjadi <i>Associate Director Credit Analyst</i> sejak tanggal 23 Juli 2024. Beliau meraih gelar <i>Bachelor of Commerce</i> dengan <i>double majors Banking and Marketing</i> dari Curtin University of Technology (2001) dan <i>Master Sains (Honors) Defense Economics</i> dari Universitas Pertahanan Indonesia (2012). Sebelumnya, berkariir di Bank sebagai peserta <i>Management Development Program</i> (2002), Staf <i>Treasury</i> (2002-2003), Staf <i>Risk Management Working Team</i> (2003-2008), Wakil Kepala Divisi Pengembangan Produk dan Servis (2008-2010), Wakil Kepala Divisi Kredit II (2010-2012), Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan (2012-2014), Kepala Divisi <i>International Banking</i> (2014-2015), Kepala Divisi <i>Treasury & International Banking</i> (2015-2017), Staf Khusus Direktorat Bisnis 2 (2017-2018), Deputy Direktur <i>Treasury and FI</i> (2018-2021), Direktur Bisnis & <i>Treasury</i> (2021) dan <i>Associate Director Risk Management</i> (2023). <i>Indonesian citizen, 50 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. He was appointed as Associate Director of Credit Analyst on July 23, 2024. He holds a Bachelor of Commerce degree with double majors in Banking and Marketing from Curtin University of Technology (2001) and a Master of Science (Honors) in Defense Economics from the Indonesia Defense University (2012). He previously held various positions at the Bank, including participant in the Management Development Program (2002), Treasury Staff (2002–2003), Member of the Risk Management Working Team (2003–2008), Deputy Head of Product and Service Development Division (2008–2010), Deputy Head of Credit Division II (2010–2012), Head of Corporate Secretary Division (2012–2014), Head of International Banking Division (2014–2015), Head of Treasury & International Banking Division (2015–2017), Special Staff to the Directorate of Business 2 (2017–2018), Deputy Director of Treasury and FI (2018–2021), Director of Business & Treasury (2021), and Associate Director of Risk Management (2023).</i>
6.	ELVIN HALIM <i>Associate Director Retail Banking</i>	Warga Negara Indonesia, 44 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai <i>Associate Director Retail Banking</i> sejak tanggal 26 Juni 2024. Meraih gelar sarjana dalam bidang Teknik Elektro dari Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta (2003) dan telah menyelesaikan <i>Program Certified Human Resources Professional</i> (2021), <i>Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7</i> (2022), dan <i>Advanced Human Capital Accomplished</i> (2022). Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Pemimpin Cabang, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Wilayah di PT Bank Sinarmas Tbk (2006-2013), <i>Production Engineering</i> di PT Yamaha Music Manufacturing Asia (2004-2005) dan memulai karir di Bank pada tahun 2014 sebagai Pemimpin Cabang (2014-2020) dan Deputy Direktur <i>Human Capital</i> (2020-2023), serta sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (2021-2023), dan <i>Corporate Secretary</i> (2023). <i>Indonesian citizen, 44 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. He has served as Associate Director of Retail Banking since June 26, 2024. He holds a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Atma Jaya Catholic University, Jakarta (2003), and has completed the Certified Human Resources Professional Program (2021), Level 7 Banking Risk Management Certification (2022), and the Advanced Human Capital Accomplished Program (2022). Throughout his career, he has held several key positions, including Deputy Branch Manager, Branch Manager, and Regional Manager at PT Bank Sinarmas Tbk (2006–2013), and Production Engineering at PT Yamaha Music Manufacturing Asia (2004–2005). He began his career at the Bank in 2014 as Branch Manager (2014–2020), Deputy Director of Human Capital (2020–2023), and also served as a member of the Remuneration and Nomination Committee (2021–2023), as well as Corporate Secretary (2023).</i>
7.	GARY FERDINAN ATAUPAH <i>Legal Bureau</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 31 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Tangerang. Beliau menjabat sebagai <i>Legal Bureau</i> sejak tanggal 30 September 2022. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Jakarta (2014) dan Magister Hukum dari Universitas Indonesia tahun (2018). Sebelumnya, beliau berkariir di Bank sebagai Sekretaris Direksi (2021-2022). <i>Indonesian citizen, 31 years old as of December 2024, and domiciled in Tangerang. He has served as Head of the Legal Bureau since September 30, 2022. He holds a Bachelor of Laws degree from Atma Jaya University, Jakarta (2014), and a Master of Laws degree from the University of Indonesia (2018). Previously, he served at the Bank as Board Secretary (2021–2022).</i>

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Keterangan Description
8.	ADHYAKSA SITEPU <i>Head of Internal Audit</i>	Warga Negara Indonesia, 55 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai <i>Head of Internal Audit</i> sejak tanggal 15 Oktober 2020. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (1993), <i>Master Business Administration</i> dari Newport University USA (1997) dan <i>Doctor of Philosophy</i> bidang Manajemen dari American World University (1998). Sebelumnya berkarier sebagai <i>Deputy Head Internal Audit</i> PT Jakarta International Hotels & Development Tbk. Selanjutnya berkarier di Bank sebagai <i>Deputy Direktur Anti Fraud</i>, Kontrol dan APU PPT (2018-2019), dan <i>Deputy Direktur Kepatuhan</i> (2019-2020). <i>Indonesian citizen, 55 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. He has served as Head of Internal Audit since October 15, 2020. He holds a Bachelor's degree in Economics majoring in Accounting from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (1993), a Master of Business Administration from Newport University, USA (1997), and a Doctor of Philosophy in Management from American World University (1998). He previously served as Deputy Head of Internal Audit at PT Jakarta International Hotels & Development Tbk. He later continued his career at the Bank as Deputy Director of Anti-Fraud, Control, and AML-CFT (2018—2019), and Deputy Director of Compliance (2019—2020).</i>
9.	RUMI KRESHNA WIBOWO <i>Corporate Secretary</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai <i>Corporate Secretary</i> sejak tanggal 26 Juni 2024. Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari STIE Bhakti Pembangunan (2016) dan Lulus Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XX tahun 2018 Lemhanas RI. Beliau berkarier di Bank sebagai <i>Team Verifikator BPPN</i> (2000), <i>Staf Kredit</i> (2000) <i>Business Development</i> (2003), <i>Kabag Kredit UMKM & Kemitraan II</i> (2008), <i>Staf Khusus Bidang Kemitraan & UMKM</i> (2009), <i>Kadiv SAM & Remedial</i> (2012), <i>Kepala SKAI</i> (2014), <i>Staf Khusus Direktur SDM</i> (2015), <i>Deputy Director Corporate Secretary</i> (2017), <i>Deputy Direktur Admin Sekretaris Perusahaan</i> (2018), <i>Kepala Divisi Special Aset Management</i> (2019) dan <i>Senior Officer Asset Recovery</i> (2024). <i>Indonesian citizen, 56 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. He has served as Corporate Secretary since June 26, 2024. He holds a Bachelor's degree in Accounting from STIE Bhakti Pembangunan (2016) and completed the Short Education Program (PPSA) Batch XX in 2018 at the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia (Lemhannas RI). He has built his career at the Bank through various roles, including Verifier Team Member at IBRA (2000), Credit Staff (2000), Business Development (2003), Head of MSME & Partnership Credit Section II (2008), Special Staff for Partnership & MSMEs (2009), Head of SAM & Remedial Division (2012), Head of Internal Audit Unit (2014), Special Staff to the HR Director (2015), Deputy Director of Corporate Secretary (2017), Deputy Director of Corporate Secretary Administration (2018), Head of Special Asset Management Division (2019), and Senior Officer of Asset Recovery (2024).</i>
10.	ROCKY S. LAURENS <i>Deputy Director Corporate Relations</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 48 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai <i>Deputy Director Corporate Relations</i> sejak tanggal 10 Juli 2023. Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Advent Indonesia. Sebelumnya, beliau berkarier di Bank sebagai <i>Staf Financial Control</i> (2005), <i>Management Development Program</i> (2011), <i>Account Officer</i> (2012), <i>Kepala Bagian Kontrol Keuangan</i> (2014), <i>Deputi Direktur Fincon, Accounting, Budgeting, Sistem dan Prosedur</i> (2017-2019), <i>Deputi Direktur Sistem dan Prosedur, serta Perwakilan Pengguna</i> (2018-2020), <i>Deputi Direktur Operasi</i> (2020-2022), dan <i>Deputy Director Operation 1</i> (2022-2023). <i>Indonesian citizen, 48 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. He has served as Deputy Director of Corporate Relations since July 10, 2023. He holds a Bachelor's degree in Accounting from Universitas Advent Indonesia. Previously, he developed his career at the Bank through various positions, including Financial Control Staff (2005), Management Development Program participant (2011), Account Officer (2012), Head of Financial Control Section (2014), Deputy Director of Financial Control, Accounting, Budgeting, Systems, and Procedures (2017—2019), Deputy Director of Systems and Procedures as well as User Representative (2018—2020), Deputy Director of Operations (2020—2022), and Deputy Director of Operation 1 (2022—2023).</i>

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Keterangan Description
11.	MARLENE GUNAWAN <i>Deputy Director Human Capital</i>	Warga Negara Indonesia, 39 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai <i>Deputy Director Human Capital</i> sejak tanggal 10 Juli 2023. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Tarumanagara (2008) dan Magister Manajemen Universitas Tarumanagara (2010). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai <i>Executive Officer</i> Kredit Korporasi Bank (2017), Deputi Direktur Bisnis 3 (2018-2020), Deputi Direktur Korporasi & FI (2020-2021), Deputi Direktur KPO Sudirman (2021), dan <i>Corporate Secretary</i> (2021-2023). <i>Indonesian citizen, 39 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. She has served as Deputy Director of Human Capital since July 10, 2023. She holds a Bachelor's degree in Accounting from Universitas Tarumanagara (2008) and a Master's degree in Management from Universitas Tarumanagara (2010). Previously, she held various positions at the Bank, including Executive Officer for Corporate Credit (2017), Deputy Director of Business 3 (2018–2020), Deputy Director of Corporate & FI (2020–2021), Deputy Director of KPO Sudirman (2021), and Corporate Secretary (2021–2023).</i>
12.	EDRIWAN MEIDIKARA <i>Deputy Director Operation 1</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 45 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai <i>Deputy Director Operation 1</i> sejak tanggal 10 Juli 2023. Beliau meraih gelar Sarjana Manajemen di STIE Perbanas Jakarta (2003) dan gelar Magister Manajemen di ABFI Perbanas Jakarta (2013). Sebelumnya, beliau menjabat di Bank sebagai Kepala Seksi Kredit Konsumer & UMKM (2013), Staf Wilayah 9 (2014), <i>Senior Credit Procedure</i> (2017), <i>Executive Officer</i> Sistem Prosedur Kredit & SDM (2019), <i>Executive Officer</i> Sistem Prosedur (2020), <i>Executive Officer</i> Sistem Prosedur Operation, SDM, Kredit & Treasury, dan <i>Executive Officer</i> Service & Quality (2022-2023). <i>Indonesian citizen, 45 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. He has served as Deputy Director of Operation 1 since July 10, 2023. He holds a Bachelor's degree in Management from STIE Perbanas Jakarta (2003) and a Master's degree in Management from ABFI Perbanas Jakarta (2013). Previously, he held several positions at the Bank, including Head of Consumer & MSME Credit Section (2013), Regional Staff for Region 9 (2014), Senior Credit Procedure Officer (2017), Executive Officer for Credit & HR Procedures (2019), Executive Officer for Procedures System (2020), Executive Officer for Operations, HR, Credit & Treasury Procedures, and Executive Officer for Service & Quality (2022–2023).</i>
13.	INNAWATI SULINA <i>Deputy Director Operation 2</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai <i>Deputy Director Operation 2</i> sejak tanggal 30 September 2022. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Tridharma Widya Jakarta (1994). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Staf SKAI (2001), Staf Komisaris (2002), Sekretariat Komisaris & Direksi (2011), Staf Khusus Sekretariat Komisaris (2013), Sekretariat Komisaris (2017-2020), dan Deputi Direktur Admin Kredit & Legal (2020-2022). <i>Indonesian citizen, 56 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. She has served as Deputy Director of Operation 2 since September 30, 2022. She holds a Bachelor's degree in Economics, majoring in Management, from Universitas Tridharma Widya Jakarta (1994). Previously, she held several positions at the Bank, including Internal Audit Staff (2001), Commissioner's Staff (2002), Secretariat for the Board of Commissioners and Directors (2011), Special Staff to the Commissioner's Secretariat (2013), Commissioner's Secretariat (2017–2020), and Deputy Director of Credit Administration & Legal (2020–2022).</i>
14.	LIDYA SETIAWATI <i>Deputy Director General Affairs</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai <i>Deputy Director General Affairs</i> sejak tanggal 23 Oktober 2020. Pada tahun 1995 meraih gelar Sarjana Marketing di Arizona State University dan gelar <i>Master International Business Management</i> di Hawaii Pacific University (1999). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Staf <i>Corporate Secretary</i> (2012), Staf <i>Premises</i> (2013), PJs Kabag <i>Premises</i> (2014), Pejabat <i>Cost Control</i> (2015), <i>Executive Officer</i> <i>Procurement & Premises</i> (2017), dan <i>Deputy Director General Affairs</i> (2020). <i>Indonesian citizen, 51 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. She has served as Deputy Director of General Affairs since October 23, 2020. She earned a Bachelor's degree in Marketing from Arizona State University in 1995 and a Master's degree in International Business Management from Hawaii Pacific University in 1999. Previously, she held various positions at the Bank, including Corporate Secretary Staff (2012), Premises Staff (2013), Acting Head of Premises (2014), Cost Control Officer (2015), and Executive Officer of Procurement & Premises (2017).</i>

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Keterangan Description
15.	PONTTIE PRASANUGRAHA PERKASA <i>Deputy Director Compliance</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 45 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai <i>Deputy Director Compliance</i> sejak tanggal 30 September 2022. Meraih gelar Sarjana Akuntansi (2003) dan Master Akuntansi dari Universitas Diponegoro Semarang (2007). Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Staf Operasi Cabang Harmoni (2003-2004), Staf Operasi Cabang Pandanaran Semarang (2004-2010), Account Officer Cabang Suryopranoto (2010-2011), Account Officer Cabang Pemuda (2011-2013), Staf SKMR (2013-2018), Executive Officer SKMR (2019-2020), Deputy Direktur SKMR-ERM (2020), dan Deputy Direktur SKMR & Kepatuhan (2021-2022). <i>Indonesian citizen, 45 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. He has served as Deputy Director of Compliance since September 30, 2022. He earned a Bachelor's degree in Accounting (2003) and a Master's degree in Accounting from Diponegoro University, Semarang (2007). Previously, he held various positions at the Bank, including Operations Staff at Harmoni Branch (2003–2004), Operations Staff at Pandanaran Semarang Branch (2004–2010), Account Officer at Suryopranoto Branch (2010–2011), Account Officer at Pemuda Branch (2011–2013), Risk Management and Monitoring Staff (2013–2018), Executive Officer of Risk Management and Monitoring (2019–2020), Deputy Director of Risk Management—ERM (2020), and Deputy Director of Risk Management and Compliance (2021–2022).</i>
16.	IMRANUL HADI <i>Deputy Director IT Service Delivery & Cyber Security</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai <i>Deputy Director IT Service Delivery & Cyber Security</i> sejak 23 Juli 2024. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik di Universitas Syiah Kuala (1991), S2 Bisnis & Manajemen di Universitas Prasetya Mulia (1996) dan S2 Manajemen Informatika di George Washington University (2002). Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Koordinator SKAI Bagian EDP Audit (2001), Kabag EDP Audit (2007), Kabag Audit Teknologi (2008), Staf Khusus Corporate Secretary (2012), Kabag EDP Quality Assurance (2013), Kabag IT Security & QA (2016), Executive Officer IT Security (2019-2020), Deputy Direktur Digital Banking (2020-2021), dan Deputy Direktur IT Governance (2021-2022), dan Deputy Direktur SKTI (2022-2024). <i>Indonesian citizen, 57 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. He has served as Deputy Director of IT Service Delivery & Cyber Security since July 23, 2024. He obtained a Bachelor's degree in Engineering from Syiah Kuala University (1991), a Master's degree in Business and Management from Prasetya Mulia University (1996), and a Master's degree in Information Management from George Washington University (2002). Previously, he held various positions as the Coordinator of SKAI in the EDP Audit Division (2001), Head of the EDP Audit Division (2007), Head of the Technology Audit Division (2008), Special Staff to the Corporate Secretary (2012), Head of EDP Quality Assurance (2013), Head of IT Security & QA (2016), Executive Officer for IT Security (2019-2020), Deputy Director of Digital Banking (2020-2021), and Deputy Director of IT Governance (2021-2022), and Deputy Director of SKTI (2022-2024).</i>
17.	NINA NOVRIANA ANDRIANI <i>Regional Head 1</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 47 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai <i>Regional Head 1</i> sejak tanggal 23 Juli 2024. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Islam Yogyakarta (2001). Berkariir di Bank sebagai Teller (2001), Customer Service (2004), Staff Sundries (2006), Account Officer (2011) Team Leader Marketing (2014), PJS Pemimpin Cabang Mangga Dua Square (2016), PJS Executive Officer Cabang Mangga Dua Square (2017), Executive Officer Cabang Mangga Dua Harco (2018), Executive Officer Cabang Menara Global (2019), Branch Director Menara Global (2023) dan Branch Director Cabang Mangga Dua Harco (2023). <i>Indonesian citizen, 47 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. She has served as Regional Head 1 since July 23, 2024. She earned a Bachelor's degree in Industrial Engineering from the Islamic University of Yogyakarta (2001). Her career at the Bank began as a Teller (2001), followed by roles as Customer Service (2004), Sundries Staff (2006), Account Officer (2011), Marketing Team Leader (2014), Acting Branch Manager of Mangga Dua Square Branch (2016), Acting Executive Officer of Mangga Dua Square Branch (2017), Executive Officer of Mangga Dua Harco Branch (2018), Executive Officer of Menara Global Branch (2019), and Branch Director of Menara Global Branch (2023) and Mangga Dua Harco Branch (2023).</i>
18.	LILY PANGESTU <i>Regional Head 2</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai <i>Regional Head 2</i> sejak tanggal 10 Juli 2023. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti Jakarta (1990) dan gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM di Jakarta (2021). Sebelumnya, beliau berkarir di bidang perbankan dimulai dari Marketing Officer SME di PT Bank Danamon Indonesia sejak (1992-2022) dengan jabatan terakhir sebagai Secured Branch & Alternate Channel Head. Selanjutnya bergabung di Bank sejak tanggal 12 Januari 2023 sebagai Secretariat to Bureau (2023). <i>Indonesian citizen, 57 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. She has served as Regional Head 2 since July 10, 2023. She holds a Bachelor's degree in Economics majoring in Accounting from Trisakti University, Jakarta (1990), and a Master's degree in Management from PPM School of Management, Jakarta (2021). Previously, she pursued a career in the banking sector starting as a Marketing Officer for SME at PT Bank Danamon Indonesia (1992–2022), with her last position being Secured Branch & Alternate Channel Head. She later joined the Bank on January 12, 2023, as Secretariat to Bureau (2023).</i>

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Keterangan Description
19.	SELVY HUTOMO <i>Regional Head 3</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Surabaya. Beliau menjabat sebagai <i>Regional Head 3</i> sejak tanggal 10 Juli 2023. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya (1992). Sebelumnya, beliau berkarier di Bank sebagai Koordinator Wilayah dan <i>Executive Officer</i> (2006). <i>Indonesian citizen, 56 years old as of December 2024, and domiciled in Surabaya. She has served as Regional Head 3 since July 10, 2023. She holds a Bachelor's degree in Law from Airlangga University, Surabaya (1992). Previously, she pursued a career at the Bank as Regional Coordinator and Executive Officer (2006).</i>
20.	ITA IRIANI DWI KOESHARSANTI <i>Regional Head 4</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Makassar. Beliau menjabat sebagai <i>Regional Head 4</i> sejak tanggal 23 Juli 2024. Beliau meraih gelar Sarjana Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPI Makassar (2010). Sebelumnya beliau berkarir sebagai <i>Branch Manager Area Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat</i> di PT KB Bank Bukopin (1992). <i>Indonesian citizen, 54 years old as of December 2024, and domiciled in Makassar. She has served as Regional Head 4 since July 23, 2024. She holds a Bachelor's degree in Management from Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPI Makassar (2010). Previously, she pursued a career as Branch Manager for the South Sulawesi and West Sulawesi Area at PT KB Bank Bukopin (1992).</i>
21.	FX TEGUH SURYANTO <i>Deputy Director Asset Corp & Commercial</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 45 tahun per Desember 2024, berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai <i>Deputy Director Asset Corporate & Commercial</i> sejak tanggal 10 Juli 2023. Beliau meraih gelar Sarjana Pertanian di Universitas Brawijaya Malang (2004) dan Magister Manajemen di Universitas Mercubuana Jakarta (2019). Sebelumnya, beliau berkarier di Bank sebagai <i>Teller</i> (2005), ODP III (2008), <i>Account Officer</i> (2009), <i>Team Leader Marketing</i> (2011), <i>Pimpinan Cabang</i> (2013), <i>Executive Officer Cabang</i> (2017), <i>Staf Branch Banking</i> (2017), <i>Staf Direktorat Kredit Korporasi</i> (2017), <i>Pjs Executive Officer Restruktur</i> (2020), <i>Executive Officer Remedial & Litigasi</i> (2020), <i>Pjs Deputy Direktur SAM & Remedial</i> (2021), dan <i>Deputy Director Recovery & Restructure</i> (2022–2023). <i>Indonesian citizen, 45 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. He has served as Deputy Director of Asset Corporate & Commercial since July 10, 2023. He earned a Bachelor's degree in Agriculture from Brawijaya University, Malang (2004), and a Master's degree in Management from Mercu Buana University, Jakarta (2019). Previously, he pursued a career at the Bank as a Teller (2005), ODP III (2008), Account Officer (2009), Team Leader Marketing (2011), Branch Manager (2013), Executive Officer at Branch (2017), Branch Banking Staff (2017), Corporate Credit Directorate Staff (2017), Acting Executive Officer for Restructuring (2020), Executive Officer for Remedial & Litigation (2020), Acting Deputy Director of SAM & Remedial (2021), and Deputy Director of Recovery & Restructure (2022–2023).</i>
22.	FX RONY LOMBOAN <i>Deputy Director Asset Consumer & Retail</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau diangkat menjadi <i>Deputy Director Asset Consumer & Retail</i> sejak tanggal 4 Juni 2024. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektro Universitas Trisakti (1996). Sebelumnya berkarier di Bank sebagai <i>Account Officer Cabang Suryopranoto</i> (1997), <i>Team Leader Marketing Cabang Suryopranoto</i> (2000), <i>Pimpinan Cabang Manado</i> (2002), <i>Staf Branch Banking</i> (2005), <i>Team Leader 2 Corporate Banking</i> (2005), Kepala Bagian Kredit (2008), Kepala Bagian Kredit Komersil & Korporasi (2012), Kepala Divisi Manajemen Risiko (2013), Kepala Divisi Kredit Komersil & Korporasi (2014), <i>Deputi Direktur Komersil & Korporasi</i> (2017), <i>Deputi Direktur Bisnis 1</i> (2018–2020), <i>Associate Director Kepatuhan & SKMR</i> (2020–2021) dan <i>Associate Director Asset Recovery</i> (2022–Juni 2024). <i>Indonesian citizen, 55 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. He was appointed as Deputy Director of Consumer & Retail Assets on June 4, 2024. He holds a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Trisakti University (1996). He has previously held various positions at the Bank, including Account Officer at Suryopranoto Branch (1997), Marketing Team Leader at Suryopranoto Branch (2000), Branch Manager of Manado Branch (2002), Branch Banking Staff (2005), Team Leader 2 Corporate Banking (2005), Head of Credit Division (2008), Head of Commercial & Corporate Credit Division (2012), Head of Risk Management Division (2013), Head of Commercial & Corporate Credit Division (2014), Deputy Director of Commercial & Corporate (2017), Deputy Director of Business 1 (2018–2020), Associate Director of Compliance & Risk Management Implementation (2020–2021), and Associate Director of Asset Recovery (2022–June 2024).</i>

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Keterangan Description
23.	GHIFARI DAULAGIRI <i>Deputy Director IT Product Development & Data</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 37 tahun per Desember 2024, berdomisili di Tangerang. Beliau menjabat sebagai <i>Deputy Director IT Product Development & Data</i> sejak tanggal 23 Juli 2024. Beliau meraih gelar Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung (2010). Sebelumnya, beliau berkarier di Standard Chartered Bank sebagai <i>Global Retail Decision Systems Manager</i> (2010-2018), dan Bukalapak sebagai <i>Head of Trust and Safety</i> (2018-2022). Beliau berkarir di bank sebagai Sekretaris Direksi (2022), <i>Deputy Director Digital Insight & Acquisition</i> (2022), dan <i>Deputy Director Digital Insight</i> (2022). <i>Indonesian citizen, 37 years old as of December 2024, and domiciled in Tangerang. He has served as Deputy Director of IT Product Development & Data since July 23, 2024. He holds a Bachelor's degree in Mathematics from the Bandung Institute of Technology (2010). Previously, he worked at Standard Chartered Bank as Global Retail Decision Systems Manager (2010–2018), and at Bukalapak as Head of Trust and Safety (2018–2022). He began his career at the Bank as Board Secretary (2022), Deputy Director of Digital Insight & Acquisition (2022), and Deputy Director of Digital Insight (2022).</i>
24.	HERU HELBIANTO <i>Deputy Director Treasury & Fixed Income</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai <i>Deputy Director Treasury & Fixed Income</i> sejak tanggal 31 Desember 2023. Beliau meraih gelar Sarjana Keuangan & Perbankan dari STIE Keuangan & Perbankan Indonesia Jakarta (1998) dan Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Trisakti Jakarta (2000). Sebelumnya, beliau berkarier sebagai <i>Vice President - Group Head Treasury & Global Market</i> di Bank CIMB Niaga (2010), <i>Head of Treasury Division</i> di Bank of India (2016), <i>General Manager</i> di Post Energy Group (2018), dan <i>Head of Treasury</i> di Bank KB Bukopin. <i>Indonesian citizen, 50 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. He has served as Deputy Director of Fixed Income since December 31, 2023. He holds a Bachelor's degree in Finance and Banking from STIE Keuangan & Perbankan Indonesia Jakarta (1998), and a Master's degree in Financial Management from Trisakti University Jakarta (2000). Previously, he held various positions including Vice President – Group Head of Treasury & Global Market at Bank CIMB Niaga (2010), Head of Treasury Division at Bank of India (2016), General Manager at Post Energy Group (2018), and Head of Treasury at Bank KB Bukopin.</i>
25.	ANGGA WICAKSANA <i>Deputy Director Financial Institution</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 37 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai <i>Deputy Director Financial Institution</i> sejak tanggal 31 Desember 2023. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2010) dan Magister Manajemen dari Universitas Muhammadiyah (2014). Sebelumnya, beliau berkarier sebagai <i>Assistant Supervisor</i> di Bank DKI (2010), <i>Senior Dealer</i> di PT Bank Resona Perdania (2018), <i>PLT Kepala Divisi Treasury</i> di PT Bank BPD Banten (2019). <i>Indonesian citizen, 37 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. He has served as Deputy Director of Financial Institution since December 31, 2023. He holds a Bachelor's degree in Economics from Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta (2010) and a Master's degree in Management from Muhammadiyah University (2014). Previously, he held positions including Assistant Supervisor at Bank DKI (2010), Senior Dealer at PT Bank Resona Perdania (2018), and Acting Head of Treasury Division at PT Bank BPD Banten (2019).</i>
26.	MENACHEM TODING ALLO <i>Deputy Director IT Digital Service & Office Automation</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 43 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai <i>Deputy Director IT Digital Service & Office Automation</i> sejak tanggal 23 Juli 2024. Beliau meraih gelar Diploma-3 Teknik Telekomunikasi dari Teknik Elektro Politeknik Negeri Ujung Pandang Makassar (2001) dan Sarjana Sistem Informatika dari STMIK Catur Sakti Kendari (2012). Sebelumnya, beliau berkarier sebagai <i>Business Representatif dan IT Support</i> di Artajasa Pembayaran Elektronis (2002), <i>Senior Engineer</i> di Bank BPD Sulawesi Tenggara (2005), <i>Lead Consultant/Client Support</i> di Indonesia Structured Services (Silverlake Indonesia) (2013). Berkarier di Bank sebagai <i>Executive Officer Management SI & Vendor Management</i> (2020), <i>Executive Officer Userep & SKTI</i> (2020), dan <i>Executive Officer Core & Payment</i> (2022), dan <i>Vice Deputy Director Core & Payment</i> (2023). <i>Indonesian citizen, 43 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. He has served as Deputy Director of IT Digital Service & Office Automation since July 23, 2024. He earned a Diploma in Telecommunication Engineering from the Department of Electrical Engineering, Ujung Pandang State Polytechnic Makassar (2001), and a Bachelor's degree in Information Systems from STMIK Catur Sakti Kendari (2012). Previously, he worked as a Business Representative and IT Support at Artajasa Electronic Payment (2002), Senior Engineer at Bank BPD Southeast Sulawesi (2005), and Lead Consultant/Client Support at Indonesia Structured Services (Silverlake Indonesia) (2013). He continued his career at the Bank as Executive Officer of IT Management & Vendor Management (2020), Executive Officer of Userep & SKTI (2020), Executive Officer of Core & Payment (2022), and Vice Deputy Director of Core & Payment (2023).</i>

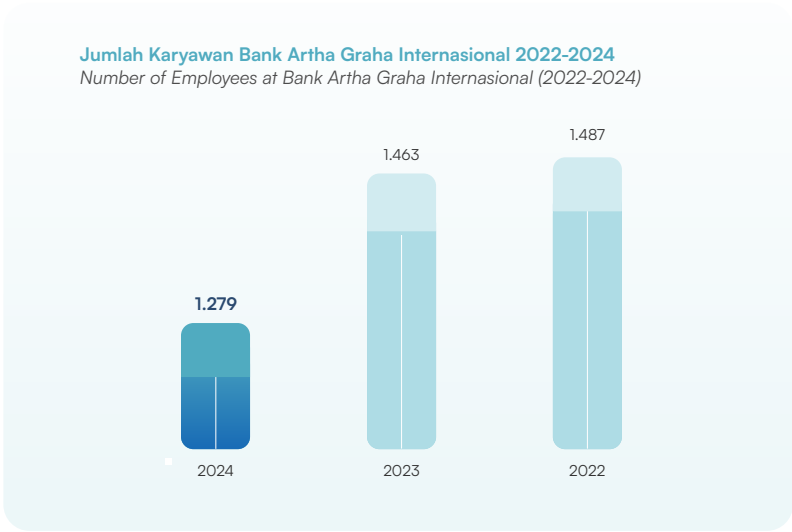
No	Nama dan Jabatan Name and Position	Keterangan Description
27.	ISWADI PRYANALI LINARDO <i>Deputy Director Program & Marketing</i>	Warga Negara Indonesia, berusia 46 tahun per Desember 2024 dan berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai <i>Deputy Director Program & Marketing</i> sejak tanggal 23 Juli 2024. Beliau meraih gelar Sarjana Desain Komunikasi Visual dari Universitas Bina Nusantara (2005). Sebelumnya beliau berkarir sebagai <i>Visual Communication Design & Promotion</i> di MRA Media-Broadcast Div. (2004), <i>Retail Marketing</i> di LG Electronic Indonesia (2008), <i>Senior Marketing Communication Specialist</i> di Toshiba Singapore Pte. Ltd. (2010), <i>Integrated Marketing Communication Assistant Manager</i> di Samsung Electronics Indonesia (2014), <i>Retail Banking Marketing Communication Head</i> di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2017), <i>Head Marketing Insight & Channel Strategy</i> di PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2019). <i>Indonesian citizen, 46 years old as of December 2024, and domiciled in Jakarta. He has served as Deputy Director of Program & Marketing since July 23, 2024. He earned a Bachelor's degree in Visual Communication Design from Bina Nusantara University (2005). Previously, he held various positions including Visual Communication Design & Promotion at MRA Media — Broadcast Division (2004), Retail Marketing at LG Electronics Indonesia (2008), Senior Marketing Communication Specialist at Toshiba Singapore Pte. Ltd. (2010), Integrated Marketing Communication Assistant Manager at Samsung Electronics Indonesia (2014), Retail Banking Marketing Communication Head at PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2017), and Head of Marketing Insight & Channel Strategy at PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2019).</i>

DEMOGRAFI KARYAWAN

Employee Demographics

Jumlah Karyawan Bank Artha Graha Internasional pada akhir tahun 2024 tercatat sejumlah 1.279 orang, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 1.463 orang.

The total number of Employees at Bank Artha Graha Internasional as of the end of 2024 was recorded at 1,279, a decrease compared to the previous year, which stood at 1,463 employees.



Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Employee Composition by Gender

Jenis Kelamin Gender	2024		2023		2022	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Pria Male	635	49,65	738	50,44	754	50,71
Wanita Female	644	50,35	725	49,56	733	49,29
Jumlah Total	1.279	100	1.463	100	1.487	100

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition by Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2024		2023		2022	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Karyawan Tetap Permanent Employees	938	73,34	1.121	76,62	1.242	83,52
Karyawan Kontrak Contract Employees	341	26,66	342	23,38	245	16,48
Jumlah Total	1.279	100	1.463	100	1.487	100

Komposisi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia

Employee Composition by Age Range

Rentang Usia Age Range	2024		2023		2022	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
18-24 Tahun 18-24 Years Old	173	13,53	208	14,22	138	9,28
25-45 Tahun 25-45 Years Old	806	63,02	876	59,88	927	62,34
46-50 Tahun 46-50 Years Old	141	11,02	180	12,30	199	13,38
>50 Tahun >50 Years Old	159	12,43	199	13,60	223	15,00
Jumlah Total	1.279	100	1.463	100	1.487	100

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Employee Composition by Education Level

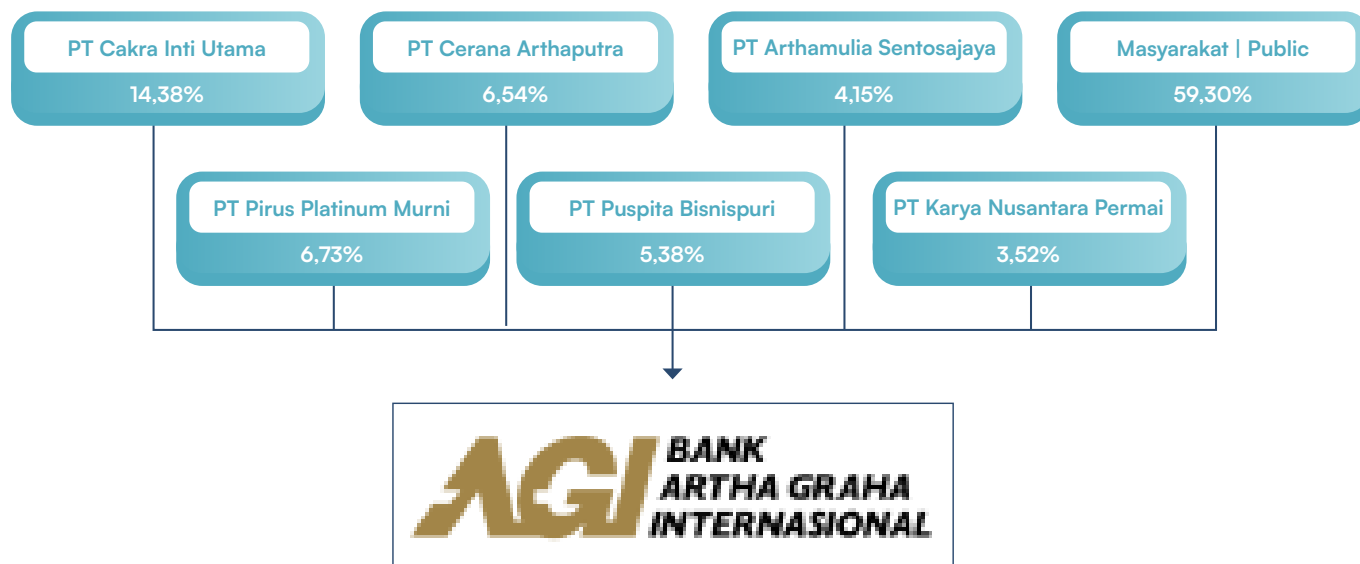
Jenjang Pendidikan Education Level	2024		2023		2022	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
S3 Doctor's degree	1	0,08	1	0,07	1	0,07
S2 Master's degree	48	3,75	45	3,08	51	3,43
S1 Bachelor's degree	1.011	79,05	1.109	75,80	1.082	72,76
D3 Diploma	161	12,59	191	13,06	210	14,12
SMA atau Sederajat Senior High School or Equivalent	52	4,07	98	6,70	120	8,07
< SMA < Senior High School	6	0,47	19	1,30	23	1,55
Jumlah Total	1.279	100	1.463	100	1.487	100

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi
Employee Composition by Organizational Level

Level Organisasi <i>Organizational Level</i>	2024		2023		2022	
	Jumlah <i>Total</i>	%	Jumlah <i>Total</i>	%	Jumlah <i>Total</i>	%
Senior Vice President	1	0,08	3	0,21	3	0,20
Vice President	13	1,02	8	0,55	6	0,40
Assistant Vice President	21	1,64	21	1,44	17	1,14
Senior Manager	14	1,09	8	0,55	10	0,67
Manager	24	1,88	26	1,78	29	1,95
Senior Assistant Manager	72	5,63	82	5,60	69	4,64
Assistant Manager	85	6,65	84	5,74	88	5,92
Junior Assistant Manager	129	10,09	138	9,43	145	9,75
First Officer	478	37,37	512	35,00	517	34,77
Staff	432	33,78	527	36,02	537	36,11
Non Staff	10	0,78	54	3,69	66	4,44
Jumlah <i>Total</i>	1.279	100	1.463	100	1.487	100

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholder Structure and Composition



KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

Pemegang Saham Shareholders	31 Desember 2024 December 31, 2024			1 Januari 2024 January 1, 2024		
	Jumlah Saham Total Shares (shares)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Paid Capital (IDR)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham Total Shares (shares)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Paid Capital (IDR)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Nilai Nominal Saham = Rp110,88/lembar saham Nominal Value of Shares = IDR110.88/share						
Kepemilikan Saham 5% atau Lebih Share Ownership of 5% or More						
PT Cakra Inti Utama	2.908.909.842	322.539.923.280,96	14,38	2.908.909.842	322.539.923.280,96	14,38
PT Pirus Platinum Murni	1.361.238.977	150.934.177.769,76	6,73	1.361.238.977	150.934.177.769,76	6,73
PT Cerana Arthaputra	1.322.157.253	146.600.796.212,64	6,54	1.322.157.253	146.600.796.212,64	6,54
PT Puspita Bisnispuri	1.087.913.290	120.627.825.595,20	5,38	1.087.913.290	120.627.825.595,20	5,38
Kepemilikan Saham Kurang dari 5% Share Ownership Less Than 5%						
PT Arthamulia Sentosa Jaya	839.439.091	93.077.006.410,08	4,15	839.439.091	93.077.006.410,08	4,15
PT Karya Nusantara Permai	712.647.774	79.018.385.181,12	3,52	712.647.774	79.018.385.181,12	3,52
Masyarakat Public	11.991.106.680	1.329.573.908.678,40	59,30	11.991.106.680	1.329.573.908.678,40	59,30
Jumlah Total	20.223.412.907	2.242.372.023.128,16	100	20.223.412.907	2.242.372.023.128,16	100

Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi
Share Ownership by Board of Commissioners and Directors

Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2024 January 1, 2024		31 Desember 2024 December 31, 2024	
	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage (%)
Sugianto Kusuma	450.450.450	2,227	450.450.450	2,227
Christina Harapan	845.500	0,004	845.500	0,004
Handoyo Soedirdja	500.000	0,002	9.000.000	0,040

Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Status Kepemilikan
Shareholder Composition Based on Ownership Status

Status Kepemilikan Ownership Status	Jumlah Investor Total Investor	Jumlah Saham (lembar saham) Total Shares (number of shares)	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
Pemodal Nasional National Investors			
Perorangan Indonesia Indonesian Individual	14.842	1.314.870.433	6,502
Perseroan Terbatas Limited Liability Company	108	15.651.833.021	77,395
Asuransi Insurance	7	5.332.241	0,026
Yayasan Foundation	10	24.306	0,000
Koperasi Cooperative	-	-	0,000
Danareksa Danareksa	-	-	0,000
Lain-Lain Others	2	401	0,000
Sub-Jumlah Sub-Total	14.969	16.972.060.402	83,923

Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Status Kepemilikan
Shareholder Composition Based on Ownership Status

Status Kepemilikan <i>Ownership Status</i>	Jumlah Investor <i>Total Investor</i>	Jumlah Saham (lembar saham) <i>Total Shares (number of shares)</i>	Persentase Kepemilikan (%) <i>Ownership Percentage (%)</i>
Pemodal Asing <i>Foreign Investors</i>			
Perorangan Asing <i>Foreign Individuals</i>	39	695.888	0,003
Badan Usaha Asing <i>Foreign Business Entities</i>	44	3.250.656.617	16,074
Lain-Lain <i>Others</i>	-	-	0,000
Sub-Jumlah <i>Sub-Total</i>	83	3.251.352.505	16,077
Jumlah Total	15.052	20.223.412.907	100,000

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Pemegang Saham PT Pirus Platinum Murni, PT Cerana Arthaputra, PT Puspita Bisnispuri, PT Arthamulia Sentosajaya, PT Karya Nusantara Permai adalah Bapak Tomy Winata dan Bapak Sugianto Kusuma, sehingga pemegang saham pengendali terakhir Bank Artha Graha Internasional adalah Bapak Tomy Winata dan Bapak Sugianto Kusuma.

MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

The shareholders of PT Pirus Platinum Murni, PT Cerana Arthaputra, PT Puspita Bisnispuri, PT Arthamulia Sentosajaya, and PT Karya Nusantara Permai are Mr. Tomy Winata and Mr. Sugianto Kusuma, accordingly, the ultimate controlling shareholders of Bank Artha Graha Internasional are Mr. Tomy Winata and Mr. Sugianto Kusuma.

ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Bank Artha Graha Internasional tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, maupun Perusahaan Ventura hingga periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

SUBSIDIARIES AND ASSOCIATE ENTITIES

Until the end of 2024, Bank Artha Graha Internasional did not have any Subsidiaries, Associate Entities, or Venture Companies.

STRUKTUR GRUP

Bank Artha Graha Internasional tidak memiliki grup usaha hingga periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

GROUP STRUCTURE

Until the end of 2024, Bank Artha Graha Internasional did not have a business group.

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN SAHAM

Chronology of Share Issuance and/or Listing

Pada tanggal 10 Juli 1990, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) berdasarkan Surat No. SI-124/SHM/MK.10/1990 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat sejumlah 5.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham yang merupakan 20% dari modal yang ditempatkan. Pada tanggal 23 Agustus 1990, saham tersebut masing-masing dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 19 April 1999, Bursa Efek Surabaya menyetujui permohonan Bank untuk membatalkan pencatatan saham Bank di Bursa Efek Surabaya.

Pada tanggal 24 September 1999, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam berdasarkan Surat No. S-1761/PM/1999 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I kepada para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (HMETD) sejumlah 9.625.000.000 saham seri B dengan nilai nominal Rp15 per saham dan harga penawaran Rp100 per saham. Pada tanggal 27 September 1999, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta.

Pada tanggal 17 April 2007, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) berdasarkan Surat No. S-1746/BL/2007 untuk melakukan PUT II kepada para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan HMETD sejumlah 840.007.286 saham dengan nilai nominal Rp110,88 per saham dan harga penawaran Rp115 per saham. Pada tanggal 2 Mei 2007, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 1 Desember 2008, Bank memperoleh efektif dari Ketua Bapepam dan LK berdasarkan Surat No. S-8684/BL/2008 untuk melakukan PUT III kepada para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan HMETD sejumlah 2.695.025.224 saham dengan nilai nominal Rp110,88 per saham dan harga penawaran Rp111,00 per saham. Pada tanggal 7 Januari 2009, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 5 Desember 2012, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dan LK berdasarkan Surat No. S-13878/BL/2012 untuk melakukan PUT IV kepada para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan HMETD sejumlah 4.513.198.014 saham dengan nilai nominal sebesar Rp110,88 per saham dan harga penawaran sebesar Rp111,00 per saham. Pada tanggal 21 Desember 2012, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

On July 10, 1990, the Bank obtained an effective statement from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) through Letter No. SI-124/SHM/MK.10/1990 to conduct an Initial Public Offering of 5,000,000 shares with a nominal value of IDR1,000 per share, representing 20% of the issued capital. On August 23, 1990, the shares were listed on both the Jakarta Stock Exchange and the Surabaya Stock Exchange. On April 19, 1999, the Surabaya Stock Exchange approved the Bank's request to delist its shares from the Surabaya Stock Exchange.

On September 24, 1999, the Bank obtained an effective statement from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) through Letter No. S-1761/PM/1999 to conduct its First Limited Public Offering (PUT I) to the Shareholders in connection with the issuance of Pre-emptive Rights (HMETD) totaling 9,625,000,000 Series B shares with a nominal value of IDR15 per share and an offering price of IDR100 per share. On September 27, 1999, the shares were listed on the Jakarta Stock Exchange.

On April 17, 2007, the Bank obtained an effective statement from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) through Letter No. S-1746/BL/2007 to conduct its Second Limited Public Offering (PUT II) to the Shareholders in connection with the issuance of Pre-emptive Rights (HMETD) totaling 840,007,286 shares with a nominal value of IDR110.88 per share and an offering price of IDR115 per share. On May 2, 2007, the shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

On December 1, 2008, the Bank obtained an effective statement from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) through Letter No. S-8684/BL/2008 to conduct its Third Limited Public Offering (PUT III) to the Shareholders in connection with the issuance of Pre-emptive Rights (HMETD) totaling 2,695,025,224 shares with a nominal value of IDR110.88 per share and an offering price of IDR111.00 per share. On January 7, 2009, the shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

On December 5, 2012, the Bank obtained an effective statement from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) through Letter No. S-13878/BL/2012 to conduct its Fourth Limited Public Offering (PUT IV) to the Shareholders in connection with the issuance of Pre-emptive Rights (HMETD) totaling 4,513,198,014 shares with a nominal value of IDR110.88 per share and an offering price of IDR111.00 per share. On December 21, 2012, the shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

Pada tanggal 23 November 2016, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No. S-682/D.04/2016 untuk melakukan PUT V kepada para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan HMETD sejumlah 2.707.918.808 saham dengan nilai nominal sebesar Rp110,88 per saham dan harga penawaran sebesar Rp111,00 per saham.

Bank secara bersamaan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 4.513.198.013 saham dimana 6 (enam) saham hasil pelaksanaan HMETD melekat 10 (sepuluh) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan membayar harga yang sama dengan harga pelaksanaan HMETD yakni Rp111,00 (seratus sebelas rupiah) per saham dalam periode pelaksanaan yakni 19 Juni 2017 sampai dengan 7 Desember 2021.

Pelaksanaan Waran Seri I sampai dengan 7 Desember 2021 sebanyak 4.427.219.858 saham, sehingga Waran Seri I yang tidak dilaksanakan sebanyak 85.978.155 saham. Berikut adalah kronologis jumlah saham Bank yang ditempatkan dan disetor penuh serta saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sejak Penawaran Umum Saham Perdana sampai dengan tanggal 31 Desember 2024:

On November 23, 2016, the Bank obtained an effective statement from the Executive Head of Capital Market Supervision of the Financial Services Authority (OJK) through Letter No. S-682/D.04/2016 to conduct its Fifth Limited Public Offering (PUT V) to the Shareholders in connection with the issuance of Pre-emptive Rights (HMETD) totaling 2,707,918,808 shares with a nominal value of IDR110.88 per share and an offering price of IDR111.00 per share.

The Bank simultaneously issued Warrant Series I totaling 4,513,198,013 warrants, whereby 10 (ten) Warrant Series I were granted free of charge as an incentive for every 6 (six) shares resulting from the exercise of Pre-emptive Rights (HMETD) exercised by shareholders. Each Warrant Series I entitles its holder to purchase 1 (one) new share of the Company at the same price as the HMETD exercise price, which is IDR111.00 (one hundred eleven rupiah) per share, during the exercise period from June 19, 2017, to December 7, 2021.

The exercise of Warrant Series I up to December 7, 2021, amounted to 4,427,219,858 shares, leaving 85,978,155 Warrant Series I unexercised. The following is a chronology of the Bank's issued and fully paid-up shares, as well as the shares listed on the Indonesia Stock Exchange, from the Initial Public Offering up to December 31, 2024:

Tanggal Date	Jenis Tindakan Korporasi Type of Corporate Actions	Nilai Nominal Nominal Value	Jumlah Saham (lembar saham) Total Shares (shares)	Jumlah Saham Beredar (lembar saham) Total Shares Outstanding (shares)
23 Agustus 1990 August 23, 1990	Pencatatan Perdana Initial Public Offering	1.000	5.000.000	5.000.000
9 Oktober 1990 October 9, 1990	Pencatatan Parsial Partial Listing	1.000	1.500.000	6.500.000
4 Agustus 1993 August 4, 1993	Pencatatan Parsial Partial Listing	1.000	3.042.800	9.542.800
19 November 1993 November 19, 1993	Saham Bonus Bonus Shares	1.000	9.542.800	19.085.600
21 Juli 1997 July 21, 1997	Pencatatan Parsial Partial Listing	1.000	15.914.400	35.000.000
5 Juli 1998 July 5, 1998	Saham Bonus Bonus Shares	1.000	8.750.000	43.750.000
27 September 1999 September 27, 1999	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	15	6.737.500.000	6.781.250.000
1 September 2000 September 1, 2000	Partial Delisting (1.00%) Partial Delisting (1.00%)	15	(96.875.000)	6.684.375.000

Tanggal Date	Jenis Tindakan Korporasi Type of Corporate Actions	Nilai Nominal Nominal Value	Jumlah Saham (lembar saham) Total Shares (shares)	Jumlah Saham Beredar (lembar saham) Total Shares Outstanding (shares)
5 Januari 2001 January 5, 2001	Pencatatan Saham Pendiri Founder's Share Listing	15	2.906.250.000	9.590.625.000
13 Juli 2005 July 13, 2005	Merger dengan PT Bank Artha Graha Merger with PT Bank Artha Graha	18,48	20.347.234.677	29.937.859.677
5 Januari 2007 January 5, 2007	Pencatatan Saham Tambahan Additional Share Listing	18,48	2	29.937.859.679
10 Januari 2007 January 10, 2007	Reverse Stock 6:1	110,88	(24.948.216.399)	4.989.643.280
2 Mei 2007 May 2, 2007	Penawaran Umum Terbatas II Limited Public Offering II	110,88	840.007.286	5.829.650.566
29 Mei 2007 May 29, 2007	Partial Delisting (1,00%) Partial Delisting (1.00%)	110,88	(8.400.073)	5.821.250.493
7 Januari 2009 January 7, 2009	Penawaran Umum Terbatas III Limited Public Offering III	110,88	2.695.025.224	8.516.275.717
7 Januari 2009 January 7, 2009	Partial Delisting (1,00%) Partial Delisting (1.00%)	110,88	(26.950.252)	8.489.325.465
21 Desember 2016 December 21, 2016	Penawaran Umum Terbatas IV Limited Public Offering IV	110,88	4.513.198.014	13.002.523.479
21 Desember 2016 December 21, 2016	Partial Delisting (1,00%) Partial Delisting (1.00%)	110,88	(45.131.980)	12.957.391.499
21 Desember 2016 December 21, 2016	Penawaran Umum Terbatas V Limited Public Offering V	110,88	2.707.918.808	15.665.310.307
21 Desember 2016 December 21, 2016	Partial Delisting (1,00%) Partial Delisting (1.00%)	110,88	(27.079.189)	15.638.231.118
10 Desember 2021 December 10, 2021	Pelaksanaan Waran Seri I Series I Warrant Exercise	110,88	4.427.219.858	20.065.450.976
10 Desember 2021 December 10, 2021	Partial Delisting (1,00%) Partial Delisting (1.00%)	110,88	(44.272.199)	20.021.178.777

Seluruh pelaksanaan penawaran umum Bank Artha Graha Internasional dilaksanakan oleh Bursa Efek Indonesia.

The entire implementation of the public offering of Bank Artha Graha Internasional shares was carried out by the Indonesia Stock Exchange.

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA

Bank Artha Graha Internasional tidak menyajikan informasi terkait kronologi penerbitan obligasi, sukuk atau obligasi konversi karena untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Bank tidak menerbitkan dan mencatatkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi.

CHRONOLOGY OF ISSUANCE AND/OR LISTING OF OTHER SECURITIES

Bank Artha Graha Internasional does not present information related to the chronology of issuance of bonds, sukuk or convertible bonds because for the period ended December 31, 2024, the Bank did not issue and list bonds, sukuk or convertible bonds.

LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Capital Market Supporting Institutions and/or Professions

KANTOR AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Nama <i>Name</i>	Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono
Jaringan Asosiasi <i>Association Network</i>	Nexia Internasional
Nama Akuntan Publik <i>Name of Public Accountant</i>	Ahmad Nadhif Thoyyibin, S.E., Ak., S.H., M.Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
Alamat <i>Address</i>	Wisma Bumiputera Lantai 12 12th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Setiabudi, Jakarta Pusat 12910 (021) 522 4581, 522 4582
Jasa yang Diberikan <i>Services Provided</i>	Audit Laporan Keuangan <i>Financial</i> <i>Financial Statement Audit</i>
Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>	2024

BIRO ADMINISTRASI EFEK Securities Administration Bureau

Nama <i>Name</i>	PT Raya Saham Registra
Alamat <i>Address</i>	Plaza Sentral Lantai 2 Plaza Sentral 2nd Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 (021) 252 5666, 252 5028
Jasa yang Diberikan <i>Services Provided</i>	Pencatatan Saham <i>Share Listing</i>
Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>	2024

NOTARIS Notary

Nama <i>Name</i>	Christina Susanto, S.H., M.Kn
Alamat <i>Address</i>	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 15, Suite 1510 Tower 1, 15th Floor, Suite 1510 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 Tlp: 085101299299 Hp: 0811853000
Jasa yang Diberikan <i>Services Provided</i>	Penyusunan Akta-Akta <i>Preparation of Deeds</i>
Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>	2024

PENCATATAN SAHAM
Share Listing

Nama <i>Name</i>	PT Bursa Efek Indonesia
Alamat <i>Address</i>	Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 (021) 515 0515, 515 0330
Jasa yang Diberikan <i>Services Provided</i>	Jasa Pencatatan Saham di Bursa <i>Share Listing Services at the Stock Exchange</i>
Periode Penugasan <i>Assignment Period</i>	2024

WEBSITE BANK

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Perusahaan Publik dan Emiten, Bank Artha Graha Internasional telah memiliki website yang beralamat www.arthagraha.com.

Website dipergunakan sebagai alat untuk mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan oleh Bank, dengan desain penyajian yang menarik, tampil dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. *Website* Bank disertai sistem navigasi yang simpel sehingga memudahkan pengunjungnya dalam mencari informasi. Data dan informasi yang ditampilkan senantiasa diperbaharui secara berkala atau setiap kali ada perubahan, selain untuk memenuhi ketentuan peraturan juga menerapkan salah satu prinsip GCG yaitu keterbukaan.

Pada *website* Bank, terdapat beberapa kanal utama, antara lain:

1. Beranda;
2. Tentang BAGI;
3. Produk dan Layanan;
4. Hubungan Investor;
5. Berita;
6. Karier; dan
7. Hubungi Kami.

Dengan tersedianya situs web Bank sebagai sarana keterbukaan informasi tentang Bank, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat luas dan Pemegang Saham.

BANK'S WEBSITE

As stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015 on the Website of Public Companies and Issuers, Bank Artha Graha Internasional has a website with the address www.arthagraha.com.

The website is used as a tool to promote products or services offered by the Bank, with an attractive presentation design, displayed in two languages, namely English and Indonesian. The Bank's website is accompanied by a simple navigation system that makes it easier for visitors to find information. The data and information displayed is always updated regularly or whenever there are changes, in addition to fulfilling regulatory requirements as well as implementing one of the GCG principles, namely transparency.

On the Bank's website, there are several main channels, among others:

1. Home;
2. About BAGI;
3. Products and Services;
4. Investor Relations;
5. News;
6. Careers; and
7. Contact Us.

With the availability of the Bank's website as a means of disclosing information about the Bank, it is hoped that it will increase the trust of the wider community and Shareholders.

ALAMAT KANTOR CABANG & KANTOR CABANG PEMBANTU

Address of Branch Offices & Sub-Branch Offices

Kantor Cabang Branch Office			
Nama Kantor Office Name	Alamat Address	Nama Kantor Office Name	Alamat Address
KC - KPO Sudirman + 2 ATM	Gedung Artha Graha Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190	KC - Artha Gading + ATM	Komplek Rukan Artha Gading Niaga Jl. Boulevard Artha Gading Blok A No. 1, 2, 3, 19, 20, 21, Jakarta Utara DKI Jakarta 14240
KC - Matraman + ATM	Jl. Matraman Raya No. 38 Jakarta Timur, DKI Jakarta 13150	KC - Pangeran Jayakarta + ATM	Jl. Pangeran Jayakarta No. 115 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10730
KC - Melawai + ATM	Jl. Melawai Raya Blok B III No. 194 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160	KC - Suryopranoto + ATM	Jl. Suryopranoto No. 1-9 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10160
KC - Bogor + ATM	Jl. Siliwangi No. 2, RT. 001, RW. 011 Bondongan, Bogor Selatan, Bogor Jawa Barat West Java 16131	KC - Lampung + ATM	Jl. Laksmana Malahayati E/161 Teluk Betung, Bandar Lampung 35224
KC - Bandung Asia Afrika + ATM	Jl. Asia Afrika No. 123 A Bandung, Jawa Barat West Java 40112	KC - Banjarmasin + ATM	Jl. Lambung Mangkurat No. 54 Kertak Baru Ilir Banjarmasin Tengah, Kalimantan Selatan South Kalimantan 70111
KC - Cirebon Kartini + ATM	Jl. RA Kartini No. 3, Kejaksaan, Cirebon Jawa Barat West Java 45123	KC - Balikpapan + ATM	Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 28 F & G Sungai Nangka, Balikpapan Selatan Kalimantan Timur East Kalimantan 76114
KC - Semarang Pandanaran + ATM	Jl. Pandanaran No. 103, Semarang Jawa Tengah Central Java 50243	KC - Surabaya Karet + ATM	Jl. Karet No. 64, Surabaya Jawa Timur East Java 60161
KC - Solo + ATM	Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 202 Timuran Banjarsari, Solo Jawa Tengah Central Java 57131	KC - Bali Diponegoro + ATM	Kompleks Pertokoan Diponegoro Megah Jl. Diponegoro 100 Blok B 18-20 Denpasar, Bali 80113
KC - Medan Pemuda + 2 ATM	Jl. Pemuda No. 3, Medan Sumatra Utara North Sumatra 20151	KC - Kupang + ATM	Jl. Jend. Sudirman RT. 008, RW.002 Kuanino, Kotaraja, Kupang Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara 85111
KC - Batam + ATM	Jl. Raden Patah No. 70, Nagoya, Batam Kepulauan Riau Riau Island 29444	KC - Kendari + 2 ATM	Jl. H. Abdullah Silondae No. 83 Korumba, Mandonga, Kendari Sulawesi Tenggara South East Sulawesi 93114
KC - Pekanbaru + 2 ATM	Jl. Riau No. 19C, Air Hitam, Payung Sekaki, Pekanbaru Riau Riau Island 28296	KC - Makassar Ahmad Yani + ATM	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 35 ABCD Makassar, Sulawesi Selatan South Sulawesi 90174
KC - Palembang + ATM	Komplek Ruko Taman Mandiri Blok A3 - A4 Jl. Kapten A. Rivai, Palembang Sumatra Selatan South Sumatra 30116	KC - Cikarang + ATM	Komp. Ruko KUSUKA Jl. Raya Industri Cikarang, Cibarusah No. 78 Blok I/M & I/L, Sukaresmi Cikarang Selatan, Bekasi Jawa Barat West Java 17530
KC - Jambi + ATM	Jl. Hayam Wuruk No. 162 AB Talang Jauh, Jelutung, Jambi 36133	KC - Ternate + ATM	Jl. Pahlawan Revolusi No. 50 Gamalama, Ternate Maluku Utara North Maluku 97721
KC - Pangkal Pinang + ATM	Komplek Bangka Square Jl. Soekarno Hatta (Raya KOBA) KM 5 No. 1, Dul Pangkalan Baru Bangka Tengah, Pangkal Pinang Bangka Belitung 33684	KC - Manado Sam Ratulangi + ATM	Jl. Sam Ratulangi No. 3, Manado Sulawesi Utara North Sulawesi 95111

Kantor Cabang Branch Office			
Nama Kantor Office Name	Alamat Address	Nama Kantor Office Name	Alamat Address
KC - Pontianak + ATM	Jl. Sultan Abdurrahman No. C5-6, Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat <i>West Kalimantan</i> 78121	KC - Bitung + ATM	Jl. Ir. Soekarno No. 78 Bitung Timur, Bitung Sulawesi Utara <i>North Sulawesi</i> 95522
KC - Samarinda + ATM	Ruko Permata Kaltim Jl. Pahlawan No. 20-22 Samarinda Kalimantan Timur <i>East Kalimantan</i> 75123	KC - Diponegoro, Ambon + ATM	Jl. Diponegoro SK III/33 Ahusen Sirimau Ambon, Maluku 97127

Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office			
Nama Kantor Office Name	Alamat Address	Nama Kantor Office Name	Alamat Address
KCP - Kwitang + ATM	Jl. Kwitang Raya No. 24-26 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10420	KCP - Bintaro + ATM	Jl. Bintaro Utama III A Blok A No. 12 Bintaro Jaya Sektor III A, Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten 15225
KCP - Tzu Chi + ATM	Gedung Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Jl. Boulevard Raya No. 15 Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara DKI Jakarta 14460	KCP - Menara Global + 2 ATM	Gedung Menara Global Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, GF Suite B, Kuningan Timur Setiabudi, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950
KCP - Pantai Indah Kapuk + 2 ATM	ASG Headquarter, GF 01 Unit D Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470	KCP - Kantor Pemasaran Bukit Golf Mediterania	Jl. Pantai Indah Barat No. 1 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara DKI Jakarta 14470
KCP - Mangga Dua Harco + ATM	Komplek Mangga Dua Plaza Blok B No. 1 Jl. Mangga Dua Raya Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10730	KCP - Cinere + ATM	Jl. Cinere Raya Blok M No. 82 Cinere Limo, Sawangan, Depok Jawa Barat <i>West Java</i> 16514
KCP - Sunter + ATM	Jl. Sunter Agung Utara Raya Komplek BAP Blok A 36D No. 55 Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, DKI Jakarta 14350	KCP - Cipanas + ATM	Jl. Raya Cipanas KM 81,2 Lobby Palace Hotel Cipanas, Cianjur Jawa Barat <i>West Java</i> 43252
KCP - Bursa Efek Indonesia (BEI) + 2 ATM	Gedung BEI Tower 1 Lt. Dasar Unit GF 13 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190	KCP - Greenville + ATM	Jl. Mangga Raya Unit 21 A No. 7 Greenville, Jakarta Barat DKI Jakarta 11510
KCP - Tanah Abang + ATM	Komplek Ruko Tekstil Tanah Abang Bukit Blok D 36 No. 20 Jl. K.H. Fachrudin, Tanah Abang Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250	KCP - Wiladatika + ATM	Commercial Building The Wiladatika Residence Lt. 1 Jl. Raya Lapangan Tembak RT. 003, RW. 010, Kelapa Dua Wetan Ciracas, Cibubur, Jakarta Timur DKI Jakarta 13730
KCP - Mall of Indonesia	Lt. Lower Ground Mall of Indonesia Jl. Boulevard Barat Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240	KCP - Kopi + ATM	Jl. Kopi No. 2 Jakarta Barat DKI Jakarta 11230
KCP - Hotel Borobudur + 3 ATM	Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710	KCP - Puri Indah + ATM	Komplek Ruko Sentra Niaga Puri Indah Jl. Puri Indah Raya Blok T6 No. 25 Kembangan Selatan Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610

Kantor Cabang Pembantu Sub-Branch Office			
Nama Kantor Office Name	Alamat Address	Nama Kantor Office Name	Alamat Address
KCP - The Villas	Lt. Dasar Club House The Villas Kelapa Gading Square Jl. Boulevard Barat Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240	KCP - Ujung Menteng + ATM	Gedung Electronic City Jl. Raya Bekasi KM. 26 No. 29 RT. 006, RW. 002, Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13960
KCP - Gading Serpong + ATM	Komp Ruko Alexandrite Blok ALX 3/11 Jl. Boulevard Raya, Gading Serpong Tangerang, Banten 15180	KCP - Mangga Besar + ATM	Jl. Mangga Besar Raya No. 104 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10740
KCP - Cokroaminoto + ATM	Jl. HOS Cokroaminoto No. 40 Menteng, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10350	KCP - Bandung Raya Sudirman + ATM	Jl. Jenderal Sudirman No. 57 Bandung, Jawa Barat <i>West Java</i> 40241
KCP - Taman Palem + ATM	Komplek Perumahan Taman Palem Lestari Jl. Boulevard Blok D1 No. 19 Cengkareng Barat, Cengkareng Jakarta Barat, DKI Jakarta 11790	KCP - Medan Cemara Asri + 2 ATM	Komplek Cemara Asri Jl. Cemara Boulevard Blok H1 No. 111-111A, Medan Sumatra Utara <i>North Sumatra</i> 20371
KCP - Mangga Dua Pasar Pagi + ATM	Gedung Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua Lt. 3 Blok D No. 1A Jl. Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Utara, DKI Jakarta 14430	KCP - Bali Kuta + ATM	Komplek Pertokoan Discovery Shopping Mall Blok A1, A2, A3 Jl. Kartika Plaza, Kuta, Bali 80361
KCP - Sekolah Santo Aloysius	Komplek Perumahan Batununggal No. 30 Jl. Soekarno Hatta, Bandung Jawa Barat <i>West Java</i>	KCP — Langgur + ATM	Jl. Jend. Sudirman, Ohoi Langgur Kei Kecil, Maluku Tenggara Maluku 97611
KCP - Karawang + ATM	Jl. Jend Ahmad Yani No. 88 Nagasari, Karawang Barat Jawa Barat <i>West Java</i> 41312	KCP — Surabaya HR Muhammad + ATM	Pertokoan Surya Inti I Blok. B-6 Jl. H.R. Muhammad Pradah Kalikendal Surabaya, Jawa Timur <i>East Java</i> 60189
KCP - Bandung BKR + ATM	Jl. BKR No. 52 A-B Pasirluyu, Regol, Bandung Jawa Barat <i>West Java</i> 40254	KCP — Subang + 2 ATM	Perumahan Subang Green City Ruko Entrance No. 1-2 Jl. Raya Cinangsi Cibogo Subang, Jawa Barat <i>West Java</i> 41285

ATM Off Premises ATM Off Premises			
Nama ATM ATM Name	Alamat Address	Nama ATM ATM Name	Alamat Address
Discovery Kartika Plaza Hotel (DKPH) Kuta Bali (2 ATM)	Lobby Discovery Kartika Plaza Hotel Kuta Jl. Kartika Plaza Kuta, Bali 80361	Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang	Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur, Karawang Jawa Barat <i>West Java</i> 41361
Brastagi Supermarket	Jl. Gatot Subroto No. 288, Medan Sumatra Utara <i>North Sumatra</i> 20118	PT CCH Indonesia 1 & 2 (2 ATM)	Jl. Desa Giri Asih No. 16, Bandung Jawa Barat <i>West Java</i> 40154
Brastagi Tiara Convention	Jl. Cut Mutia No. 1, Madras Hulu Medan Polonia, Medan Sumatra Utara <i>North Sumatra</i> 20152	PT Baja Perkasa Sentosa	Jl. Gorda KM. 4 No. 20 Cikande, Maja Julang, Kibin, Serang Banten 42186

ATM Off Premises ATM Off Premises			
Nama ATM ATM Name	Alamat Address	Nama ATM ATM Name	Alamat Address
Brastagi Cemara Asri	Jl. Cemara No. 53 Pulo Brayan Darat II, Medan Sumatra Utara <i>North Sumatra</i> 20373	Gedung YLPI Pesantren Buntet ke -2	Gedung YLPI Pesantren Desa Mertapada Kulon Astanajapura, Cirebon Jawa Barat <i>West Java</i> 45181
Mitra Aneka Rezeki 1 & 3 (2 ATM)	Perkebunan Jl. Lingkar Pendamar Sungai Deras Kubu, Kubu Raya, Pontianak Kalimantan Barat <i>West Kalimantan</i> 78383	Cimanggis Golf Estate	Marketing Galery Cimanggis Golf Estate Jl. Cimanggis Boulevard, Tapos Depok Jawa Barat <i>West Java</i> 16457
Mitra Aneka Rezeki 2	PT MAR Distrik Kebun Kampung Estate (KKBE) Jl. Lingkar Ambawang Desa Sungai, Teluk Pakedai, Kubu Raya Pontianak, Kalimantan Barat <i>West Kalimantan</i> 78391	PT Yuzu Indonesia	Kawasan Industri Newton Techno Park Jl. Jati 1 Blok J5 No. 05 Lippo Cikarang, Jawa Barat <i>West Java</i> 17550
Mitra Aneka Rezeki 4	Pabrik Kelapa Sawit Dusun Parit Sembilan, Nantai Raja Pontianak, Kalimantan Barat <i>West Kalimantan</i> 78384	Artha Industrial Hill (AIH)	Jl. Trans Heksa Karawang Ciketing II Wanakerta, Telukjambe Barat Karawang, Jawa Barat <i>West Java</i> 41361
Hollywood Square	Jl. Saranani, Korumba, Mandonga Kendari, Sulawesi Tenggara <i>South East Sulawesi</i> 93111	Roti Okeke Cipanas	Jl. Raya Cipanas No. 416 Cipendawa, Pacet, Cianjur Jawa Barat <i>West Java</i> 43253
Electronic City Bintaro	Komersial Bisnis District Blok B7/D01 Jl. Boulevard Bintaro Jaya Tangerang Selatan, Banten 15227	PP 28	Jl. Pasir Putih Raya No. 28 Ancol, Pademangan, Jakarta Utara DKI Jakarta 14430
Angel Product	Jl. Raya Bojonegoro KM. 7 Bojonegoro, Serang, Banten 42454	SGA Sunter	PT Bakti Artha Rekse Sejahtera Jl. Agung Timur IX, Blok N1 No. 1A RT. 09, RW. 11, Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara, DKI Jakarta 14310
Grand Depok City	ATM Center Depok Fantasi Water Park Perumahan Grand Depok City Jl. Kartini Sukmajaya, Depok Jawa Barat <i>West Java</i> 16418	Mall Artha Gading 2	Jl. Boulevard Artha Gading Selatan No. 1 Lantai 2F/B1/018-019/B/003 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240
Taman Buah Mekarsari Cileungsi	Booth ATM Information Hall Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM. 3 Cileungsi, Bogor, Jawa Barat <i>West Java</i> 16830	Tiban Batam	Supermarket Cipta Puri Indah Komplek Pasar Cipta Puri, Blok GG No. 11-16, Tiban Baru, Sekupang Batam 29424
PT Karawang Prima Sejahtera Steel Karawang	Jl. Raya Badami Kampung Kereteg RT. 01, RW. 01 Taman Mekar, Pangkalan, Karawang Jawa Barat <i>West Java</i> 41314	Sentral Pasar Raya (SPR) Plaza 1 & 2 (2 ATM)	ATM Gallery Lantai Lower Ground Sentral Pasar Raya (SPR) Plaza Jl. Prof. M. Yamin (ex Terminal Goan Hoat) RT. 01, RW. 04, Kampung Jao Padang Barat, Padang Sumatra Barat <i>West Sumatra</i> 25116
Gedung Revenue Tower	District 8 SCBD (Lot 13) Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190	Masjid Istiqlal - Jakarta	Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10710

ATM Off Premises ATM Off Premises			
Nama ATM ATM Name	Alamat Address	Nama ATM ATM Name	Alamat Address
Pesantren Buntet	Buntet Mart Jl. Komplek AKPER Pondok Buntet Pesantren, Mertapada Kulon, Astanajapura, Cirebon Jawa Barat <i>West Java</i> 45181	Pacific Place SCBD - Jakarta	Gedung Pacific Place Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Senayan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
Electronic City Sudirman	Galery ATM Gedung Electronic City Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 DKI Jakarta 12190	Metro Penthouse Bandung	Jl. Soekarno Hatta No. 638 Sekejati, Buah Batu, Bandung Jawa Barat <i>West Java</i> 40286
Gedung Artha Graha B1	SCBD Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190	Rama Emerald Multi Sukses - Surabaya	Jl. Raya Tenaru Wates Cangkir, Driyorejo, Gresik Jawa Timur <i>East Java</i> 61177
Tower A Lot 18 SCBD	Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Lot. 18 Tower A, Perkantoran SCBD DKI Jakarta 12190	Bali - Grandlucky Sunset Road	Bodega Bali Beruntung Jl. Sunset Road No. 29 Kuta Badung, Bali 80361
Mall Artha Gading I	Mall Artha Gading ATM Center Lantai Dasar Jl. Boulevard Artha Gading Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240	Bali - Grandlucky Sanur	Jl. Bypass Ngurahrai No. 240 Sanur, Denpasar Selatan Denpasar, Bali 80228
Discovery Hotel & Convention Center	Jl. Lodan Timur No. 7 Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara DKI Jakarta 14430	Hill Park Sibolangit Medan	Jl. Jamin Ginting KM. 45 Sibolangit, Deli Serdang, Medan Sumatra Utara <i>North Sumatra</i> 20151
Fresh Market - Bukit Golf Mediterrania	ATM Center - Fresh Market Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard Jakarta Utara, DKI Jakarta 14430	Rumah Sakit Bunda Thamrin - Medan Pemuda	ATM Center Rumah Sakit Bunda Thamrin Jalan Sri Batanghari, Medan Sumatra Utara <i>North Sumatra</i> 20112
Sport Club PIK FIT	Jl. Raya Pantai Indah Kapuk Bukit Golf Mediterrania Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara DKI Jakarta 14460	Central Market PIK	Kawasan Pantai Maju Jl. Golf Island Boulevard Kamal Muara, Penjaringan Jakarta Utara, DKI Jakarta 14470
Rumah Duka Sentosa Gatot Subroto	Jl. Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710	Tokyo Riverside Apartment Lemo - PIK	Jl. Otista Pantai Indah Kapuk 2 Lemo, Teluk Naga Tangerang Banten 15510
The Mansion Dukuh Golf - Kemayoran	Tower Jasmine, Capillano ATM Center Apartemen The Mansion at Dukuh Golf Kemayoran Kompleks Kemayoran Blok D4-1/2 Pademangan Timur, Pademangan Jakarta Utara, DKI Jakarta 14410	Cityhome MOI Artha Gading	Mall of Indonesia, Jakarta Utara DKI Jakarta 14240
Ancol Beach City Mall	Taman Impian Jaya Ancol Pantai Carnival, Kota Tua, Ancol Pademangan, Jakarta Utara DKI Jakarta 14430	Hotel Royal Phoenix - Semarang	Jl. Sriwijaya No. 30-32, Wonodri Semarang Selatan Jawa Tengah <i>Central Java</i> 50242
Metro Indah Mall Bandung	ATM Center MIM GF No. 2 Kawasan Niaga MTC Jl. Soekarno Hatta 590, Bandung Jawa Barat <i>West Java</i> 40286	Halo Mart Makasar	Jl. Hertasning Baru No. 29 Depan Aroeppala Food Court, Makasar Sulawesi Selatan <i>South Sulawesi</i> 90222

ATM Off Premises ATM Off Premises			
Nama ATM ATM Name	Alamat Address	Nama ATM ATM Name	Alamat Address
Sinar Bangunan Building Center	Jl. Bundaran PU Tuak Daun Merah (TDM) Oebufu, Kupang NTT <i>East Nusa Tenggara</i> 85361	PT Samudra Indo Sejahtera (SIS) 2	Jl. Dullah Raya KM. 8 Ngadi, Pulau Dullah Utara, Tual Maluku 97611
RSK Tzu Chi Bedah Cinta Kasih PIK	Jl. Kamal Raya Outer Ring Road Rusun Bumi Citra Idaman Cengkareng Timur, Cengkareng Jakarta Barat, DKI Jakarta 11730	GOTA Supermarket - Langgur	Jl. Jenderal Sudirman Ohijang, Kei Kecil, Maluku Tenggara Maluku 97622
Industri Gula Nusantara (IGN)	Jl. Soekarno Hatta KM. 6 Cepiring Timur, Cepiring, Kendal Jawa Tengah <i>Central Java</i> 51352	Toko Sumberjaya - Langgur	Jl. Jenderal Sudirman Ohijang, Langgur, Maluku Tenggara Maluku 97622
Tzu Chi Hospital PIK	Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard RT. 004, RW. 003 Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara DKI Jakarta 14470	Toko Mitra Abadi - Langgur	Jl. Hotel Langgur Langgur, Kei Kecil Maluku Tenggara 97622
Alana Hotel	Jl. Ir. H. Juanda No. 76 Sentul City Bogor Jawa Barat <i>West Java</i> 16810	Pasar Tual - Langgur	Jl. Abdul Gani Ronua Pasar Lodal EL (Samping Pos Satpol PP) Maluku Tenggara 97622
PT Samudera Indo Sejahtera Tual	Desa Ngadi, Pulau Dullah Utara, Tual Maluku 97612	Mall Bumi Kedaton	Mall Bumi Kedaton, Lantai Basement Bandar Lampung 35132
Gedung Elysee	Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot. 21, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190	Dutalia Supermarket - Kupang	Jl. Tim-Tim KM. 7 Kelapa Lima Oesapa Barat Kelapa Lima, Kupang NTT <i>East Nusa Tenggara</i> 85226
Gedung Mitra	ATM Center Mitra Building GF7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930	Supertop Kupang	Jl. Amabi No. 77 Maulafa, Kupang NTT <i>East Nusa Tenggara</i> 85361
Apartment Bellezza Permata Hijau	ATM Center Lt. 2 Tower Bellezza Arcade Mall & Office Work Jl. Letjen Soepeno No. 34, Arteri Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12210	Menara Anugrah Kuningan	Jl. Dr. Ida Anak Agung Gede Agung Lot 8.6 - 8.7 Kawasan Mega Kuningan Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950
LV 8 Resort Hotel Bali	Lobby Hotel LV8 Jl. Discovery No. 8, Badung Denpasar, Bali 80361	RSKI Galang	Jl. Trans Bareleng Sijantung, Galang, Kota Batam Kepulauan Riau 29485
Discovery Shopping Mall - Kuta	Discovery Shopping Mall Kuta (Lantai 3) Jl. Kartika Plaza, Kuta, Badung Bali 80361	Makmur Elok Graha (MEG) Batam	Ruko Taman Golf Residence 3 Jl. Niaga Golf Raya Sukajadi Blok N2 No. 17-23 Sukajadi, Batam Kepulauan Riau <i>Riau Island</i> 29435
Mitra Aneka Rezeki Palembang 1 & 2 (2 ATM)	Jl. Palembang Jambi KM. 53, Palembang Sumatra Selatan <i>South Sumatra</i> 30958	Toko Cahaya Tual	Jl. DR. J. Laimena, RT. 021, RW. 002 Ketsoblak, Pulau Dullah Selatan, Tual Maluku 97612
Kiara Artha Park	ATM Center Jl. Banten, Kebonwaru Batununggal, Bandung Jawa Barat <i>West Java</i> 40272	Sei Sedap Kupang	Jl. H.R. Koroh, Sikumana Maulafa, Kupang NTT <i>East Nusa Tenggara</i> 85351

04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Di tengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan dan ketidakpastian di sepanjang tahun 2024, kinerja Bank Artha Graha Internasional tetap terjaga baik secara operasional dan maupun keuangan yang memperkuat landasan untuk pertumbuhan lebih baik di masa mendatang.

Amidst a challenging and uncertain economic environment throughout 2024, Bank Artha Graha Internasional achieved commendable performance by overcoming various obstacles and challenges, and recorded operational and financial results that have strengthened the foundation for better growth in the future.



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

Analisis Ekonomi Global

Hingga akhir tahun 2024, kondisi perekonomian global masih dipengaruhi isu keamanan dipicu oleh konflik geopolitik berkepanjangan di Eropa, konflik di Timur Tengah dan dinamika perekonomian di negara-negara maju. Hal ini tercermin dari ekspektasi pemotongan suku bunga bank sentral AS yang diperkirakan tidak akan sebesar sebelumnya, di tengah masih kuatnya data ekonomi AS, yang terlihat dari tingginya tingkat inflasi dan kondisi tenaga kerja yang tetap solid. Pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat di akhir 2024, juga menambah tekanan terhadap prospek perekonomian dan perdagangan global, mengingat kebijakan protektif yang digaungkan selama masa kampanye, seperti pengenaan tarif impor signifikan terhadap negara-negara lain, termasuk Tiongkok. Selain itu, risiko geopolitik yang masih ada dapat memicu fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar dollar AS.

Mengacu pada laporan *World Economic Outlook* dari *International Monetary Fund* (IMF) Januari 2025, ekonomi global diperkirakan akan tumbuh sedikit melambat menjadi 3,2% pada tahun 2024, namun mulai sedikit meningkat menjadi 3,3% di 2025. Perekonomian global di tahun 2024 didukung oleh perkembangan perekonomian Amerika Serikat yang lebih baik dari ekspektasi awal, berkat perbaikan pada tingkat penganggurannya, membaiknya permintaan domestik, serta tren inflasi yang merendah.

Kondisi tersebut menggerakkan ekspektasi pelaku pasar terhadap penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) menjadi lebih rendah dari estimasi semula. Pada pertemuan *Federal Open Market Committee* (FOMC) bulan Desember 2024, The Fed kembali memangkas FFR sebesar 25 bps ke level 4,50%, sesuai dengan perkiraan pasar. Namun, pada tahun 2025 The Fed diperkirakan hanya akan memotong suku bunga sebanyak 50 bps, lebih kecil daripada perkiraan sebelumnya yang sebesar 100 bps.

Perekonomian di Eropa juga menunjukkan tren membaik selama 2024, sebagaimana tercermin dari penjualan ritel-nya yang meningkat. Meski demikian kawasan Eropa masih menghadapi tantangan dari sisi manufakturnya. *European Central Bank* (ECB) juga kembali menurunkan suku bunga menjadi 3,15% pada Desember 2024. IMF memproyeksikan pertumbuhan zona Eropa sebesar 0,8% pada di 2024.

ECONOMIC AND INDUSTRY REVIEW

Global Economic Analysis

By the end of 2024, the global economy remained influenced by security concerns arising from prolonged geopolitical conflicts in Europe, tensions in the Middle East, and economic fluctuations in developed countries. This was reflected in the expectations for U.S. Federal Reserve interest rate cuts, which were predicted to be less aggressive than previously anticipated, amid persistent strength in U.S. economic data—evidenced by elevated inflation levels and a resilient labor market. The leadership transition in the United States at the end of 2024 also added pressure on global economic and trade prospects, particularly due to the protectionist policies promoted during the campaign period, such as the imposition of significant import tariffs on other countries, including China. Furthermore, ongoing geopolitical risks continue to contribute to fluctuations in commodity prices and the U.S. dollar exchange rate.

Referring to the January 2025 World Economic Outlook report by the International Monetary Fund (IMF), global economic growth is projected to slightly slow to 3.2% in 2024, before edging up to 3.3% in 2025. The global economy in 2024 was supported by stronger-than-expected performance in the United States, driven by improvements in unemployment, strengthening domestic demand, and a declining inflation trend.

These conditions fueled market expectations for a downward revision of the Federal Funds Rate (FFR) to a level lower than previously estimated. In the December 2024 meeting of the Federal Open Market Committee (FOMC), the Fed again cut the FFR by 25 basis points, bringing it to 4.50%, in line with market forecasts. However, for 2025, the Fed is now expected to lower rates by only 50 basis points, compared to the previous projection of 100 basis points.

In Europe, economic conditions also showed improvement throughout 2024, as reflected in rising retail sales. Nevertheless, the region continued to face challenges in the manufacturing sector. The European Central Bank (ECB) also reduced its benchmark interest rate to 3.15% in December 2024. The IMF projects that the Eurozone economy will grow by 0.8% in 2024.

Perekonomian negara-negara maju di kawasan Eropa juga menunjukkan tren membaik selama 2024. Meski demikian kawasan Eropa masih menghadapi tantangan dari sisi manufakturnya. European Central Bank (ECB) juga kembali menurunkan suku bunga menjadi 3,15% pada Desember 2024. IMF memproyeksikan pertumbuhan zona Eropa sebesar 0,8% pada 2024.

Dari sisi volume perdagangan dunia, IMF memproyeksikan pertumbuhan sebesar 3,4% pada 2024, atau meningkat pesat dibandingkan capaian di 2023 yang hanya sebesar 0,7%. Dalam rilisnya, IMF juga memprediksi inflasi global, sekalipun mulai menurun tetap berada di level yang tinggi, yakni di kisaran 5,7% dari 6,7% pada 2023. Sedangkan Global Manufacturing PMI menurut J.P. Morgan dan S&P Global, pada November 2024 berada di level 49,4 atau berada di zona kontraksi (di bawah 50,0). Namun posisi tersebut menunjukkan peningkatan dari bulan sebelumnya di level 48,7.

Analisis Ekonomi Indonesia

Di tengah kondisi global tersebut, perekonomian nasional tetap menunjukkan ketangguhannya dengan mencatatkan pertumbuhan positif. Merujuk pada data BPS, perekonomian Indonesia di tahun 2024 tumbuh 5,03% (yoy), hanya sedikit melemah dari 5,05% di tahun sebelumnya, ditopang oleh pertumbuhan sebagian besar lapangan usaha. Industri pengolahan kembali mendominasi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh positif dengan porsi mencapai 18,98%, diikuti sektor perdagangan 13,07%, konstruksi 10,09%, dan pertambangan 9,15%. Adapun lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah jasa lainnya yang tumbuh 9,80%, transportasi & pergudangan tumbuh 8,69%, serta akomodasi meningkat 8,56%.¹ Sementara proyeksi IMF dalam laporan World Economic Outlook, Januari 2025, menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024 adalah di kisaran 5,0%, sama dengan tahun sebelumnya.

Pengendalian laju inflasi yang melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan membuat inflasi domestik berhasil dikendalikan sehingga berada di level 1,57%, menurun dari 2,6%. Inflasi *volatile food* yang menjadi kontributor utama inflasi seperti beras, cabai, dan bawang putih juga terus menunjukkan tren menurun di Desember 2024.

The economy of advanced countries in Europe also showed signs of improvement throughout 2024. However, the region continued to face challenges in the manufacturing sector. The European Central Bank (ECB) further reduced its interest rate to 3.15% in December 2024. The IMF projected economic growth in Europe at 0.8% in 2024.

From the perspective of global trade volume, the IMF forecasts growth of 3.4% in 2024, a significant improvement compared to the 0.7% growth recorded in 2023. In its release, the IMF also predicted that while global inflation is beginning to decline, it will remain elevated, around 5.7%, down from 6.7% in 2023. Meanwhile, the Global Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) by J.P. Morgan and S&P Global stood at 49.4 in November 2024, remaining in contraction territory (below 50.0). However, it showed an improvement from the previous month's level of 48.7.

Indonesia Economic Analysis

Amid these global conditions, the national economy demonstrated its resilience by recording positive growth. According to data from Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's economy grew by 5.03% year-on-year (yoy) in 2024, only slightly lower than the 5.05% recorded in the previous year. This growth was supported by expansion across most economic sectors. The manufacturing industry remained the dominant contributor to economic growth, accounting for 18.98%, followed by trade at 13.07%, construction at 10.09%, and mining at 9.15%. The highest growth rates by sector were recorded in other services at 9.80%, transportation and warehousing at 8.69%, and accommodation at 8.56%.¹ Meanwhile, the International Monetary Fund (IMF), in its January 2025 World Economic Outlook, projected Indonesia's economic growth for 2024 at around 5.0%, the same as the previous year.

The successful management of inflation, which involved all levels of government, helped to keep domestic inflation under control at 1.57%, down from 2.6%. Volatile food inflation-particularly in rice, chili, and garlic-also showed a downward trend in December 2024.

¹ BPS (Badan Pusat Statistik)

Perekonomian Indonesia juga terus menerus ada di dalam zona ekspansi yang cukup bertahan semenjak pandemi berakhir, berkat berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki iklim investasi. Perbaikan iklim investasi mendorong terjadinya realisasi investasi, baik dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja maupun kredit konsumsi di berbagai daerah. Realisasi investasi infrastruktur konektivitas, baik dalam kerangka PSN maupun non PSN terus meningkat. Hal ini mendorong permintaan agregat barang antar wilayah juga mengalami peningkatan. Optimisme yang tercermin di pasar domestik, sebagaimana juga tampak dari indeks PMI maupun indeks keyakinan konsumen mendorong tumbuhnya peluang bagi pelaku usaha, termasuk pelaku usaha di segmen UMKM, sebagai target *market* Bank Artha Graha Internasional.

Selanjutnya di sektor perdagangan, neraca perdagangan Indonesia terus menunjukkan kinerja positif dan mencatatkan surplus 60 bulan berturut-turut sejak tahun 2020. Secara kumulatif, neraca perdagangan Januari hingga Desember 2024 mencapai USD 331,04 miliar, membuat cadangan devisa Nasional kembali mencatatkan kenaikan, menjadi sebesar USD 155,7 miliar. Jumlah cadangan akhir Desember 2024 tersebut setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 (tiga) bulan impor.

Lebih lanjut, laju ekonomi domestik sekalipun tetap sangat *resilient*, cukup terpengaruh oleh kondisi perekonomian global, yang penuh tidak pastian dan tantangan tersebut, ditunjukkan dengan berbagai indikator. Aktivitas produksi berjalan fluktuatif tercermin dari PMI Manufaktur Indonesia yang terus bergerak dinamis antara kontraksi dan ekspansif dengan indeks terendah adalah 48,9 di Agustus, setelah sebelumnya mencapai puncaknya sebesar 54,2 di bulan Maret 2024. Adapun di Desember 2024 indeks PMI ini kembali menunjukkan fase ekspansif, di 51,2. Konsumsi listrik tumbuh 10,54% untuk bisnis, 4,20% untuk industri dan 8,75 untuk rumah tangga. Dari sisi konsumsi, Indeks Keyakinan Konsumen masih terjaga cukup tinggi mencapai 127,70 di bulan Desember 2024. Sementara Indeks Penjualan Riil tumbuh positif mencapai 1,8%.²

Dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi katalis utama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan pertumbuhan sebesar 4,94% yoy. Kontribusi konsumsi rumah tangga yang mencapai 54,04% merefleksikan daya beli masyarakat masih relatif terjaga dengan baik didukung oleh pengelolaan inflasi dengan baik oleh Pemerintah.

Indonesia's economy continued to operate within an expansionary zone since the end of the pandemic, thanks to ongoing efforts by the Indonesian government to improve the investment climate. These improvements led to increased investment realization, including investment loans, working capital loans, and consumer credit across various regions. Connectivity infrastructure investments, both under the National Strategic Projects (PSN) and outside of it, continued to increase. This stimulated aggregate interregional goods demand. Optimism in the domestic market, as reflected in the Purchasing Managers' Index (PMI) and consumer confidence index, helped boost opportunities for businesses, including MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) a key target market for Bank Artha Graha Internasional.

In the trade sector, Indonesia's trade balance continued its positive momentum, recording a 60-months consecutive surplus since 2020. Cumulatively, the trade balance from January to December 2024 reached USD 331.04 billion, contributing to a rise in foreign exchange reserves, which stood at USD 155.7 billion at the end of December 2024. This amount is equivalent to financing 6.7 months of imports or 6.5 months of imports plus government external debt payments, and well above the international adequacy standard of around 3 (three) months of imports.

Although Indonesia's domestic economic performance remained resilient, it was still affected to some extent by the challenging and uncertain global environment. This was reflected in several indicators. Production activity fluctuated, as shown by the Indonesia Manufacturing PMI, which moved between contraction and expansion throughout the year. The index fell to its lowest at 48.9 in August, after peaking at 54.2 in March 2024. By December 2024, it had returned to an expansionary phase at 51.2. Electricity consumption also increased, growing by 10.54% for businesses, 4.20% for industry, and 8.75% for households. From a consumption perspective, the Consumer Confidence Index remained relatively high at 127.70 in December 2024, while the Real Sales Index grew positively by 1.8%.²

From the expenditure side, household consumption remained the primary driver of Indonesia's Gross Domestic Product (GDP), growing by 4.94% yoy. Its contribution of 54.04% reflects relatively strong purchasing power, supported by effective government inflation control.

² BI (Bank Indonesia)

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif terjaga tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat tingkat pengangguran terbuka mampu ditekan ke level 4,91% per Agustus 2023 dari periode sama di tahun sebelumnya yang sebesar 5,32%.

Penguatan pemulihan ekonomi serta berbagai program perlindungan sosial juga mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,36% per Maret 2023 menjadi 8,57% di September 2024, semakin lebih rendah bahkan dari masa pra covid 2019 yang sebesar 9,41%.

Kinerja perekonomian Indonesia tersebut membuat di tahun 2024, lembaga pemeringkat kredit menegaskan *Sovereign Credit Rating* Indonesia pada peringkat BBB (S&P), Baa2 (Moody's) dan BBB (Fitch) dengan *outlook* stabil. Peringkat *Investment Grade* ini diberikan berdasarkan penilaian beberapa faktor antara lain fundamental kredit melihat prospek pertumbuhan jangka menengah Indonesia yang menguntungkan, konsumsi domestik yang baik untuk mendukung pertumbuhan GDP sebesar 5,0%, tingkat inflasi yang terkendali, dan kebijakan fiskal yang berhati-hati.

Analisis Industri Perbankan

Kinerja intermediasi perbankan dalam mendukung kegiatan perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif dengan profil risiko yang tetap terjaga. Per Desember 2024, *outstanding* kredit perbankan nasional melanjutkan pertumbuhan *double digit growth* sebesar 10,39% yoy, menjadi sebesar Rp7.827 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 13,62%, diikuti oleh Kredit Konsumsi 10,61%, sedangkan Kredit Modal Kerja 8,35%. Berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 15,67%, sementara kredit UMKM juga tetap tumbuh sebesar 3,37%.

Adapun Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh sebesar 4,48% yoy (Desember) menjadi Rp8.837,2 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 3,34%, 6,78%, dan 3,50% yoy. Pertumbuhan DPK pada 2024 tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 3,73% yoy. Dengan demikian rata-rata LDR perbankan nasional di tahun 2024 menjadi sebesar 88,57%, naik dari 84,17% di tahun sebelumnya.

Kualitas kredit perbankan nasional juga tetap terjaga dengan rasio NPL *gross* sebesar 2,08% dan NPL *net* sebesar 0,74%. *Loan at Risk* (LaR) juga menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 9,28%. Rasio LaR tersebut di bawah level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93% pada Desember 2019.

This stable economic growth also contributed to improved public welfare. The open unemployment rate dropped to 4.91% as of August 2023, from 5.32% in the same period the previous year.

The strengthening economic recovery and ongoing social protection programs also led to a decline in the poverty rate, from 9.36% in March 2023 to 8.57% in September 2024, even lower than the pre-COVID level of 9.41% in 2019.

Indonesia's solid economic performance in 2024 led credit rating agencies to reaffirm the country's sovereign credit ratings: BBB from S&P, Baa2 from Moody's, and BBB from Fitch, all with a stable outlook. These investment-grade ratings were based on several factors, including strong credit fundamentals, favorable medium-term growth prospects, robust domestic consumption supporting 5.0% GDP growth, controlled inflation, and prudent fiscal policy.

Banking Industry Analysis

The performance of banking intermediation in supporting Indonesia's economic activities continued to show positive growth in 2024, with a well-maintained risk profile. As of December 2024, national banking credit outstanding recorded double-digit growth of 10.39% year-on-year, reaching IDR7,827 trillion. Based on the type of credit usage, Investment Loans posted the highest growth at 13.62%, followed by Consumer Loans at 10.61%, and Working Capital Loans at 8.35%. By debtor category, corporate loans grew by 15.67%, while loans to micro, small, and medium enterprises (MSMEs) also continued to grow by 3.37%.

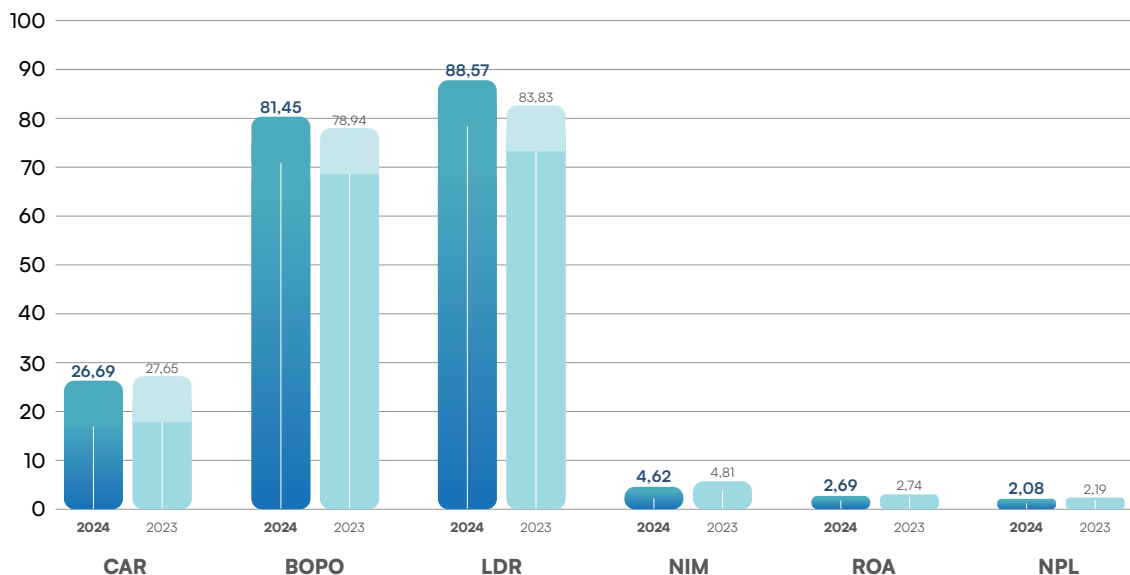
Meanwhile, third-party funds (DPK) in the banking sector increased by 4.48% year-on-year in December, amounting to IDR8,837.2 trillion. This growth was supported by an increase in demand deposits by 3.34%, savings by 6.78%, and time deposits by 3.50%. The third-party fund growth in 2024 was higher than in 2023, which recorded a growth of 3.73% year-on-year. Consequently, the average Loan to Deposit Ratio (LDR) of the national banking industry rose to 88.57% in 2024, up from 84.17% the previous year.

The quality of national banking credit remained stable, as reflected in the gross Non-Performing Loan (NPL) ratio of 2.08% and the net NPL ratio of 0.74%. The Loan at Risk (LaR) ratio also showed a declining trend, reaching 9.28%, lower than the pre-pandemic level of 9.93% in December 2019.

Ketahanan perbankan juga tetap kuat tercermin dari permodalan (CAR) yang berada di level tinggi yaitu sebesar 26,69%, menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian global.

Sehingga secara umum industri perbankan berada pada posisi yang sangat baik di tahun 2024. Indikator kinerja industri perbankan secara umum meningkat dari tahun sebelumnya, seperti ditunjukkan pada grafik berikut.

Indikator Kinerja Perbankan Nasional 2023 - 2024
2023 - 2024 National Banking Performance Indicators



Untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia (BI) terus memperkuat respons bauran kebijakan. Kebijakan moneter tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*), sementara kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (*pro-growth*).

Sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, BI mempertahankan BI-Rate pada level 6,00%. Keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang *pro-stability*, yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024.

The resilience of the banking sector remained strong, as shown by the Capital Adequacy Ratio (CAR), which stood at a high level of 26.69%, providing a solid buffer to mitigate risks amid global uncertainties.

In general, the banking industry was in a very solid position in 2024. Most performance indicators showed improvement compared to the previous year, as illustrated in the following charts.

To maintain stability and support economic growth, Bank Indonesia (BI) continued to strengthen its policy mix response. Monetary policy remained focused on maintaining stability (*pro-stability*), while macroprudential policy, digitalization of the payment system, money market deepening, and programs supporting inclusive and green economic-financial development were consistently directed toward promoting growth (*pro-growth*).

In line with this policy mix direction, BI maintained the BI-Rate at 6.00%. The decision to keep the BI-Rate at this level remained consistent with the *pro-stability* focus of monetary policy, aimed at strengthening the stabilization of the Rupiah exchange rate and as a *pre-emptive* and *forward-looking* measure to ensure inflation stays within the target range of $2.5\% \pm 1\%$ in 2024.

Kendati industri perbankan Indonesia *resilient* dan berdaya saing, tetapi industri perbankan tetap harus mengedepankan kehati-hatian dan teliti dalam penyaluran kredit untuk menghindari menurunnya kualitas aset.

STRATEGI BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL 2024

Merespons kondisi perekonomian nasional yang penuh tantangan dan kondisi industri perbankan yang dihadapkan pada ketatnya persaingan dalam mendapatkan sumber pendanaan dengan diwarnai dengan tingginya biaya dana, strategi pengembangan bisnis yang dijalankan Bank pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Strategi Pendanaan

Strategi pendanaan di tahun 2024 tetap fokus pada peningkatan dana murah serta akuisisi nasabah baru. Adapun *action plan* Bank di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kerjasama dengan B2B2C untuk meningkatkan dana murah dimana salah satunya melalui pemanfaatan produk bank penyimpan dana margin (BPDM).
2. Pengembangan Digital Apps untuk mempermudah dan mempercepat pembukaan rekening *online* kombinasi dengan program MGM (*member get member*) untuk meningkatkan jumlah akuisisi nasabah melalui *online channel*.
3. Pembukaan rekening khusus *merchant* dan peningkatan kerjasama pedagang UMKM menjadi *merchant* QRIS untuk mendukung *cashless transaction*.
4. Rencana penambahan fitur QRIS Cross Border serta Tuntas (Tarik, Setor, serta Transfer) di 2024 diharapkan dapat meningkatkan akseptansi QRIS di masyarakat.
5. Pengembangan *Digital Marketing* untuk promosi produk dan program melalui jalur pemasaran digital dan memperkuat *tools marketing engine system* dalam meningkatkan *active user* dan potensi dana murah.

Penyaluran Dana

Sesuai dengan rencana bisnis yang telah dicanangkan, berikut beberapa hal terkait penyaluran dana yaitu:

1. Penyaluran Kredit per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp10.605,4 miliar.

Although the Indonesian banking industry remains resilient and competitive, banks must continue to uphold prudence and conduct careful credit distribution to prevent any deterioration in asset quality.

BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL STRATEGY IN 2024

In response to the challenging national economic conditions and the banking industry's landscape, which is marked by intense competition in securing funding sources amid high cost of funds, the Bank's business development strategy in 2024 was as follows:

Funding Strategy

The funding strategy in 2024 remains focused on increasing low-cost funds and acquiring new customers. The Bank's action plan for 2024 includes the following:

1. *Developing partnerships under the B2B2C model to grow low-cost funds, including through the utilization of the Bank's Margin Fund Holding Product (BPDM).*
2. *Enhancing Digital Apps to facilitate and accelerate online account opening, combined with a Member Get Member (MGM) program to increase customer acquisition through online channels.*
3. *Opening special accounts for merchants and expanding collaboration with MSME traders to become QRIS merchants in support of cashless transactions.*
4. *Plans to add Cross-Border QRIS and TUNTAS features (Withdrawals, Deposits, and Transfers) in 2024 are expected to boost QRIS acceptance among the public.*
5. *Expanding Digital Marketing initiatives to promote products and programs through digital marketing channels and strengthening the marketing engine system to increase active users and the potential for low-cost funding.*

Fund Distribution

In accordance with the business plan that has been outlined, the following are some key points related to fund distribution:

1. *Credit distribution as of December 31, 2024, amounted to IDR10,605.4 billion.*

2. Dari segi kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sampai Semester II Tahun 2024 realisasi sebesar Rp376,7 miliar. Rasio UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 3,55%.

Langkah-langkah yang dilakukan Bank untuk mencapai pertumbuhan kredit dibagi sesuai segmen:

• **Konsumer**

- Pemasaran KPR Reguler di *Primary Market* dengan Developer Rekanan Kerja sama dengan Program Bunga Khusus yang kompetitif.
- Penawaran Pembiayaan KPR kepada nasabah eksisting yang aktif bertransaksi di BAGI.
- Pemasaran KTA kerjasama dengan *payroll* karyawan/debitur potensial dan dikenal Cabang/BAGI.
- Cross selling placement* dana produk *bundling funding*, Developer (termasuk *Supplier, Vendor & Kontraktor*) KPR Reguler Program Bunga Khusus, Notaris dan lembaga pemerintahan.
- Pembiayaan *Digital Lending* melalui Kerjasama dengan *Platform Digital* dalam kebutuhannya untuk pembiayaan Produktif (SME - *Working Capital & Supply Chain Financing*) dan pembiayaan Konsumtif (KPR Reguler, *Consumer Loan, Buy Now Pay Later (BNPL)* dan *Cash Loan*).
- Cross selling placement* dana melalui kerjasama kredit dengan *platform digital*.

• **Ritel/SME**

- Meningkatkan pada *suply chain financing* pembiayaan pada *supplier/buyer* dari perusahaan anchor nasabah/debitur *existing*.
- Kerjasama dengan platform digital/B2B fintech untuk pembiayaan sektor usaha kecil dan menengah.
- Penyaluran kredit kepada *chanelling* koperasi untuk meningkatkan sektor ekonomi dan mikro.
- Cross selling* kepada nasabah yang belum mempunyai fasilitas kredit SME.
- Mengoptimalkan pencairan fasilitas* kredit baru dalam meningkatkan portofolio kredit

• **Korporasi/Komersial**

- Melakukan intensifikasi bisnis debitur *existing*, diantaranya pendekatan kepada induk maupun anak usaha debitur, *customer dan supplier (Cross selling dan Up selling)*
- Ekstensifikasi bisnis untuk debitur/nasabah baru yang berasal dari *value chain corporate banking*, nasabah *funding* eksisting dan non debitur.

2. In terms of credit to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), the realization up to the second semester of 2024 was IDR376.7 billion. The MSME credit ratio to total credit was recorded at 3.55%.

The initiatives undertaken by the Bank to achieve credit growth are categorized by segment:

• **Consumer**

- Marketing of Regular Mortgage Loans (KPR) in the Primary Market through Partner Developers in collaboration with a Special Competitive Interest Rate Program.
- Offering Mortgage Financing (KPR) to existing customers who actively transact with BAGI.
- Marketing of Unsecured Loans (KTA) in cooperation with payroll customers/potential debtors who are known by Branches/BAGI.
- Cross-selling of fund placements through bundled funding products with developers (including suppliers, vendors, and contractors) under the Special Interest Mortgage Program, as well as with notaries and government institutions.
- Digital lending financing through partnerships with digital platforms to support both productive financing needs (SME - Working Capital & Supply Chain Financing) and consumer financing (Regular Mortgage, Consumer Loans, Buy Now Pay Later (BNPL), and Cash Loans).
- Cross-selling of fund placements through credit partnerships with digital platforms.

• **Retail/SME**

- Increasing supply chain financing for suppliers/ buyers of anchor companies that are existing customers/debtors.
- Collaborating with digital platforms/B2B fintech companies to finance the small and medium enterprise (SME) sector.
- Disbursing loans through cooperative channeling to boost the economic and micro sectors.
- Cross-selling to customers who have not yet obtained SME credit facilities.
- Optimizing the disbursement of new credit facilities to grow the loan portfolio.

• **Corporate/Commercial**

- Intensifying business with existing debtors, including outreach to the parent and subsidiary companies of the debtor, as well as their customers and suppliers (cross-selling and up-selling).
- Expanding business to new debtors/customers derived from the value chain of corporate banking, existing funding customers, and non-debtors.

- c. Penyaluran pembiayaan *supply chain* dan *distributor financing*.
- d. Mendorong pembiayaan aktif melalui sindikasi dan menjalin kerjasama yang aktif dengan lembaga pembiayaan lainnya.
- Selain melakukan strategi untuk mencapai pertumbuhan kredit, juga melakukan langkah-langkah pencegahan penurunan kualitas kredit untuk menjaga tingkat kesehatan Bank, sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyaluran kredit secara selektif dan prudent dengan memperhatikan mitigasi terhadap risiko penyaluran kredit dan melakukan pemantauan penerimaan pembayaran dari debitur, *monitoring aging* piutang serta analisis laporan keuangan.
 - b. Melakukan kunjungan secara rutin ke lokasi usaha debitur untuk memastikan bahwa operasional usaha debitur berjalan dengan baik dan lancar serta melakukan *review* secara berkala kondisi keuangan sehingga dapat mengambil langkah preventif lebih dini untuk menyelesaikan masalah yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian Bank di kemudian hari.
 - c. Melakukan evaluasi kebijakan perkreditan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia.
 - d. Meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia khususnya keterampilan analisa perkreditan dengan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan.
 - e. Mempercepat penanganan dan penyelesaian kredit yang berpotensi bermasalah dan kredit bermasalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas portofolio kredit, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Melakukan upaya penagihan secara intensif dan mempercepat eksekusi aset agunan dan tindakan hukum terkait.
 - ii. Menjual agunan debitur dan melaksanakan eksekusi AYDA, dengan prioritas pada aset yang lebih mudah dipasarkan.
 - iii. Menghapus buku untuk kredit yang sulit ditagih, sambil tetap melanjutkan upaya penagihan.
 - iv. Peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya dalam bidang analisis perkreditan dan evaluasi kebijakan perkreditan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. *Disbursing financing through supply chain and distributor financing schemes.*
- d. *Promoting active financing through syndications and establishing active cooperation with other financial institutions.*
- *In addition to implementing strategies to achieve credit growth, the Bank also takes preventive measures to maintain credit quality and ensure the Bank's soundness level, as follows:*
 - a. *Distributing credit selectively and prudently, considering risk mitigation in credit distribution and monitoring debtor payment receipts, aging of receivables, and financial statement analysis.*
 - b. *Conducting regular visits to debtor business locations to ensure that their operations are running smoothly, and periodically reviewing their financial condition to take early preventive steps to address potential issues that could lead to future losses for the Bank.*
 - c. *Evaluating credit policies on an ongoing basis in accordance with prevailing regulations and guidance from the Financial Services Authority (OJK) and/or Bank Indonesia.*
 - d. *Improving the quality of Human Resources, especially in credit analysis skills, through continuous training.*
 - e. *Accelerating the handling and resolution of potential problem loans and non-performing loans to maintain and enhance credit portfolio quality, with the following actions:*
 - i. *Intensive collection efforts and expediting the execution of collateral assets and related legal actions.*
 - ii. *Selling debtor collateral and executing AYDA (Asset Yield Disposal Actions), prioritizing assets that are easier to market.*
 - iii. *Writing off loans that are difficult to collect, while continuing collection efforts.*
 - iv. *Enhancing Human Resources, particularly in credit analysis and the ongoing evaluation of credit policies in line with applicable regulations.*

Permodalan

Pencapaian Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada Semester II Tahun 2024 sebesar 26,35%. Rasio tersebut masih tetap terjaga pada level diatas minimal 9,37% (tingkat permodalan yang wajib *risk profile*).

Human Capital

Selama periode tahun 2024, Direktorat *Human Capital* telah melaksanakan sejumlah inisiatif dan program kerja sesuai dengan target atau rencana pengembangan *Human Capital* yang telah ditetapkan oleh Bank untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1. **Re-arrange Organization**
Akuisisi dan penempatan karyawan sesuai dengan kompetensinya sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai. Dilakukan perampingan jumlah *human capital* untuk mendukung model bisnis.
2. **Shaping the New Future**
Untuk mencapai hasil yang lebih baik dimasa depan dan regenerasi pejabat dilakukan pencarian kandidat baru calon pejabat baik secara internal maupun *prohire*. Mengembangkan kompetensi karyawan dengan cara memberikan pelatihan, memberikan *coaching* dan *mentoring* serta mempertahankan kader yang dimiliki (lulusan peserta program).
3. **Empowering Human Capital**
Melakukan penyusunan kompetensi sesuai dengan spesifikasi jabatannya.
4. **Regeneration & Engagement**
Pemberian *reward* dan insentif kepada karyawan/Cabang yang berhasil mencapai target.

Jaringan Kantor

Untuk meningkatkan performa jaringan kantor/cabang, maka evaluasi yang dilakukan antara lain:

1. Mengeksplorasi potensi bisnis yang ada di sekitar jaringan kantor yang mendukung kebijakan setiap daerah, melalui kerjasama dengan pelaku UMKM, MUSPIDA/PEMDA, TNI dan mitra TNI, serta instansi Pemerintahan lainnya.
2. *Business development* dengan pengembangan digitalisasi untuk mendukung *ecosystem* bisnis bank dalam mengakuisisi nasabah dari Sekolah, Pasar, Koperasi, Yayasan, dan komunitas-komunitas lainnya.
3. Melakukan efisiensi melalui konsolidasi jaringan kantor dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan produktivitas dan kinerja jaringan kantor.

Capital

In the second semester of 2024, the Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) stood at 26.25%. This level remains well above the minimum capital requirement of 9.37% (mandated by risk profile).

Human Capital

In 2024, the Human Capital Directorate has implemented a number of initiatives and work programs in accordance with the Human Capital development targets or plans set by the Bank for 2024 as follows:

1. **Re-arrange Organization**
The acquisition and placement of employees are carried out according to their competencies to ensure that the set targets can be achieved. A downsizing of human capital is also conducted to support the business model.
2. **Shaping the New Future**
To achieve better outcomes in the future and ensure leadership regeneration, new candidates for leadership positions are sought both internally and through professional hiring. Employee competencies are developed through training, coaching, and mentoring, while retaining existing talent (graduates of internal development programs).
3. **Empowering Human Capital**
Preparing competencies according to job specifications.
4. **Regeneration & Engagement**
Providing rewards and incentives to employees or branches that successfully achieve their targets.

Office Network

To enhance the performance of the office/branch network, the Bank carried out several evaluations and initiatives, including:

1. Exploring business potential in areas surrounding branch locations in support of regional policies, through collaborations with MSMEs, local government, and military authorities (MUSPIDA/PEMDA), TNI and TNI-affiliated partners, as well as other government institutions.
2. Business development through digitalization efforts to strengthen the Bank's business ecosystem and facilitate customer acquisition from schools, markets, cooperatives, foundations, and other community groups.
3. Improving efficiency by consolidating branch networks to further optimize productivity and overall branch performance.

4. Pelaksanaan dan penguatan kinerja terhadap seluruh jaringan kantor di lokasi-lokasi strategis sesuai dengan rencana bisnis yang ditetapkan dalam meraih peluang bisnis yang ada, serta perkembangan kinerja keuangannya.
5. Optimalisasi kinerja *sales* dan *marketing* untuk meningkatkan pertumbuhan usaha jaringan kantor melalui *cross selling*, *up selling* dan *down selling* secara menyeluruh terhadap nasabah eksisting serta akuisisi baru dari potensi *referral* baik dari keluarga maupun kolega nasabah.
6. Selama Semester II Tahun 2024 terdapat beberapa penempatan unit ATM baru.

Teknologi Informasi (TI)

Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank. Beberapa upaya dalam usaha mendukung bisnis bank antara lain:

1. Pengembangan Fitur *API Management*, *Mobile Apps* dan *Internet Banking*
 - a. Pengembangan *API Standard* dan *Catalog* pada “Dukcapil untuk e-KYC, BI-FAST, Pencairan, Pembayaran dan Pelunasan P2P Lending Mitra”.
 - b. Pengembangan Fase 1 Tahap 2 BI-FAST.
 - c. *Upgrade Core Banking System*, perubahan *ATM Switching* dan perubahan *Middleware*.
 - d. *Enhancement* fitur *Core Banking* sesuai dengan kebutuhan bisnis seperti *Anjak Piutang*, *Enhancement PRK*, *Limit Teller*, *Enhancement Payroll*, *AutoDebet*, *Transaksi SDB*, dan lain-lain.
 - e. Pengembangan digital apps AGI sebagai solusi transaksi perbankan melalui perangkat *mobile* berupa fitur tabungan emas, *biller*, *loyalty point*, e-KYC dan *opening account*.
 - f. Pengembangan aplikasi *Digital Lending* sebagai produk pinjaman untuk kepentingan konsumtif maupun modal kerja kepada pelaku UMKM melalui aplikasi *mobile* maupun *platform online* dengan memanfaatkan solusi manajemen resiko yang terintegrasi.
 - g. Pengembangan solusi transaksi keuangan berbasis *web* untuk nasabah korporasi.
2. Pengembangan fitur guna mendukung operasional dan pelaporan Bank
 - a. Pengembangan aplikasi *Credit Risk Rating* guna mengukur *credit scoring* dari calon debitur.
 - b. *Enhancement dashboard & report MIS* sesuai kebutuhan informasi bisnis.
 - c. *Enterprise data service - Enrichment data* dari MB, IBB, ATM, T24 dan *channel* lainnya.

4. *Strengthening performance across all branch networks located in strategic areas in line with the Bank's business plans, to capture potential business opportunities and drive financial performance.*
5. *Optimizing the performance of sales and marketing teams to support business growth across branches, through comprehensive cross-selling, up-selling, and down-selling strategies targeting existing customers as well as new acquisitions through referrals from customers' families and colleagues.*
6. *During the second half of 2024, several new ATM units were deployed.*

Information Technology (IT)

Information Technology Development in 2024 was implemented in line with the Bank's Business Plan. Various efforts to support the Bank's business operations included the following:

1. *Development of API Management Features, Mobile Apps, and Internet Banking*
 - a. *Development of Standard APIs and Catalogs for integration with: Dukcapil for e-KYC, BI-FAST, Disbursement, Payment, and Repayment for Partner P2P Lending.*
 - b. *Development of Phase 1, Stage 2 of BI-FAST.*
 - c. *Core Banking System upgrade, ATM Switching replacement, and Middleware changes.*
 - d. *Enhancements to Core Banking features in line with business needs, such as Factoring, PRK Enhancement, Teller Limits, Payroll Enhancement, Auto-Debit, Safe Deposit Box (SDB) Transactions, and others.*
 - e. *Development of the AGI digital app as a mobile banking solution, featuring digital gold savings, biller integration, loyalty points, e-KYC, and account opening.*
 - f. *Development of a Digital Lending application to offer consumer and working capital loans for MSMEs via mobile apps and online platforms, supported by integrated risk management solutions.*
 - g. *Development of a web-based financial transaction solution for corporate customers.*
2. *Feature Development to Support Bank Operations and Reporting*
 - a. *Development of a Credit Risk Rating application to assess credit scoring of prospective debtors.*
 - b. *Enhancement of MIS dashboards and reports to meet business information needs.*
 - c. *Enterprise Data Service - Data enrichment from Mobile Banking, Internet Banking, ATM, T24, and other channels.*

- d. Pengembangan aplikasi Library IT untuk memudahkan dalam melakukan inventarisasi penyimpanan *media backup data*, *software* aplikasi dan lainnya di *Library*.
- e. Pengembangan aplikasi *iReporting* untuk sentralisasi aplikasi laporan regulator.

3. Penguatan infrastruktur dan peningkatan sistem keamanan di internal
 - a. *Active Directory* - Pengelolaan *Policy EUC* yang digunakan karyawan.
 - b. Keamanan data & *network* menggunakan *Trendmicro VisionOne XDR*.
 - c. Pengembangan aplikasi administrasi permintaan pemeliharaan dan perubahan kewenangan akses *User ID* aplikasi.
 - d. Penyediaan aplikasi *monitoring* untuk memantau *performance* dan *response time server*.
 - e. Pemindahan pusat data (*Data Center*).
 - f. *SOC* dan *SIEM* untuk *monitoring traffic* dan *security*.
 - g. *Upgrade operation system* di *end user workstation* menjadi *Windows 10/11*.

- d. *Development of an IT Library application to facilitate inventory and storage of data backup media, application software, and others.*
- e. *Development of the iReporting application to centralize regulatory reporting systems.*

3. *Infrastructure Strengthening and Internal Security System Enhancement*
 - a. *Active Directory - Management of EUC Policies used by employees.*
 - b. *Data and network security using Trendmicro VisionOne XDR.*
 - c. *Development of an administrative application for managing maintenance requests and access authority changes for application User IDs.*
 - d. *Provision of monitoring applications to track server performance and response times.*
 - e. *Relocation of the Data Center.*
 - f. *Implementation of SOC and SIEM for traffic and security monitoring.*
 - g. *Upgrade of end-user workstation operating systems to Windows 10/11.*

TINJAUAN OPERASIONAL

Pola industri perbankan Indonesia mengalami pergeseran pasca pandemi covid-19. Kebutuhan nasabah akan layanan yang berbasis digital mengalami peningkatan yang signifikan. Di lain pihak, kebutuhan kredit di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga mengalami peningkatan seiring dengan kembali bergeraknya roda ekonomi. Hal-hal tersebut cukup mempengaruhi strategi dan kebijakan strategis yang dijalankan Bank Artha Graha Internasional sepanjang tahun 2024.

Aspek Pemasaran

Guna mencapai sasaran pemasaran tahun 2024, Bank Artha Graha Internasional berupaya menjalankan usahanya dengan merumuskan strategi pemasaran produk dan layanan yang dimiliki. Strategi pemasaran mengacu pada kebijakan yang telah disusun sehingga sejalan dengan misi Perseroan melalui pengembangan produk dan bisnis untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi Bank Artha Graha Internasional di industri perbankan Indonesia dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Bank melalui:

1. Pengembangan kerjasama dengan B2B partner untuk meningkatkan dana murah dan memperluas *channel* akuisisi nasabah.

OPERATIONAL REVIEW

The Indonesian banking industry has undergone a shift in patterns following the covid-19 pandemic. Customer demand for digital-based services has increased significantly. On the other hand, credit demand in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector has also grown in line with the revitalization of economic activity. These developments have had a considerable impact on the strategies and strategic policies implemented by Bank Artha Graha Internasional throughout 2024.

Marketing Aspects

To achieve marketing targets in 2024, the Bank aims to implement its efforts by formulating product and service marketing strategies. These strategies are aligned with established policies to support the Company's mission through product and business development, to maintain and strengthen Bank Artha Graha Internasional's position in the Indonesian banking industry. This is carried out by upholding the principles of prudence and sound banking practices through the following efforts:

1. *Developing partnerships with B2B partners to increase low-cost funds and expand customer acquisition channels.*

2. Mengembangkan dan menambah fitur pembayaran melalui agi digital apps guna mendorong nasabah aktif bertransaksi sehingga dapat menjadi salah satu Bank utama (*main bank*) bagi nasabah.
3. Peningkatan Kerjasama Merchant UMKM dalam rangka mendukung *cashless transaction* sehingga dapat menerima transaksi pembayaran dari seluruh penyedia pembayaran QRIS yang ada di Indonesia.
4. Meningkatkan Akuisisi *Online* guna memperkuat proses *customer onboarding* dengan mengembangkan fitur pembukaan rekening *online* dengan terintegrasi dengan e-KYC yang terkoneksi dengan Dukcapil.
5. Pengembangan Digital Marketing guna meningkatkan *brand awareness* serta *customer base* dan pemanfaatan *big-data* untuk seleksi target serta *segment customer* dengan strategi marketing yang akan digunakan.

Pangsa Pasar

Bank Artha Graha Internasional merupakan satu dari 106 bank yang beroperasi di Indonesia. Saat ini, Bank Artha Graha Internasional masuk dalam KBMI 1 (Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti kelompok 1), yaitu bank dengan modal inti di bawah Rp6 triliun, bersama 70 bank lainnya.

Pangsa pasar Bank di industri perbankan nasional saat ini masih relatif kecil, namun demikian, Bank Artha Graha Internasional memiliki peran yang cukup besar dalam membantu menggerakkan perekonomian melalui penyaluran kredit bagi dunia usaha, khususnya kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan juga mendorong konsumsi melalui produk kredit konsumen yang ditawarkan Bank.

2. *Enhancing and adding payment features through AGI digital apps to encourage customers to actively transact, aiming to position the Bank as one of their main banking institutions.*
3. *Expanding partnerships with MSME merchants to support cashless transactions, enabling them to accept payments from all QRIS providers in Indonesia.*
4. *Increasing online acquisition to strengthen the customer onboarding process by developing an online account opening feature integrated with e-KYC and connected to the national population database (Dukcapil).*
5. *Advancing digital marketing efforts to boost brand awareness and expand the customer base, while leveraging big-data to select targeted customer segments and implement appropriate marketing strategies.*

Market Share

Bank Artha Graha Internasional is one of 106 banks operating in Indonesia. Currently, the Bank is classified under KBMI 1 (Commercial Bank Group Based on Core Capital Group 1), which includes banks with core capital below IDR6 trillion, along with 70 other banks.

Although the Bank's market share in the national banking industry remains relatively small, Bank Artha Graha Internasional plays a significant role in supporting economic activity through the distribution of credit to businesses-particularly Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)-as well as in stimulating consumer spending through its consumer credit products.

Dalam Miliar Rupiah In Billion Rupiah						
Uraian Description	Kategori Category	2024	2023	Kategori Category	2024	2023
Aset Assets	Bank Umum Commercial Bank	12.460.955	11.765.838	KBMI 1	1.447.348	1.377.863
	BAGI	30.126	26.104	BAGI	30.126	26.104
	Pangsa Pasar BAGI terhadap Bank umum BAGI's Market Share Compared to Commercial Banks	0,24%	0,22%	Pangsa Pasar BAGI terhadap KBMI 1 BAGI's Market Share Compared to KBMI 1 Banks	2,08%	1,89%

Dalam Miliar Rupiah In Billion Rupiah						
Uraian Description	Kategori Category	2024	2023	Kategori Category	2024	2023
Kredit Credit	Bank Umum Commercial Bank	7.827.148	7.090.243	KBMI 1	804.546	751.536
	BAGI	10.605	12.147	BAGI	10.605	12.147
	Pangsa Pasar BAGI terhadap Bank umum <i>BAGI's Market Share to Commercial Banks</i>	1,32%	0,17%	Pangsa Pasar BAGI terhadap KBMI 1 <i>BAGI's Market Share to KBMI 1 Banks</i>	1,32%	1,62%
DPK	Bank Umum Commercial Bank	8.837.242	8.457.929	KBMI 1	974.815	918.307
	BAGI	23.891	20.632	BAGI	23.891	20.632
	Pangsa Pasar BAGI terhadap Bank umum <i>BAGI's Market Share to Commercial Banks</i>	0.27%	0,24%	Pangsa Pasar BAGI terhadap KBMI 1 <i>BAGI's Market Share to Commercial Banks</i>	2,45%	2,25%

PROSPEK USAHA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS

Prospek Usaha

Perekonomian global pada 2025 masih dihadapkan dengan meningkatnya risiko dan ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan perbaikan ekonomi di negara maju yang dibayangi oleh inflasi, berlanjutnya ketegangan geopolitik di Eropa dan Timur Tengah, fragmentasi geo-ekonomi, kebijakan perdagangan yang masih perlu dicermati dan tingginya nilai tukar dolar Amerika. Berbagai tantangan tersebut mendorong makin pentingnya upaya pengendalian inflasi, konsolidasi fiskal, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta komunikasi kebijakan guna memperkuat stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. IMF dalam *World Economic Outlook* yang dirilis pada Januari 2025 memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global di 2025 akan mulai meningkat menjadi 3,3% atau sedikit meningkat dengan prediksi capaian 3,2% di 2024.

Meskipun dinamika ketegangan geopolitik masih perlu diperhatikan, tren penurunan suku bunga kebijakan negara maju, terutama AS, diperkirakan akan berlanjut. Untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, respons kebijakan untuk mengurangi dampak rambatan global tentunya diperlukan kehati-hatian oleh para pemangku kepentingan, termasuk dalam hal mendorong aliran modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar.

BUSINESS PROSPECT AND DEVELOPMENT STRATEGY

Business Prospect

The global economy in 2025 continues to face heightened risks and uncertainties. This is in line with the ongoing economic recovery in developed countries, which remains overshadowed by inflation, ongoing geopolitical tensions in Europe and the Middle East, geo-economic fragmentation, trade policy challenges, and the persistently strong U.S. dollar. These various challenges underscore the increasing importance of inflation control efforts, fiscal consolidation, coordinated monetary and fiscal policies, and effective policy communication to strengthen macroeconomic stability and support economic growth. According to the International Monetary Fund (IMF) in its *World Economic Outlook* released in January 2025, global economic growth in 2025 is projected to increase slightly to 3.3%, up from the estimated 3.2% in 2024.

Despite continued geopolitical tensions, the trend of declining policy interest rates in developed countries—particularly the United States—is expected to persist. To maintain stability and support economic growth, policy responses aimed at mitigating global spillover effects must be carried out cautiously by all stakeholders, including efforts to attract foreign capital flows and strengthen exchange rate stability.

Namun di tengah dinamika risiko perekonomian global, perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap baik. Perekonomian domestik pada 2025 diperkirakan dapat tumbuh di atas 5,0% (yoy), melanjutkan kinerja positif selama 2024 yang didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga, khususnya untuk kelas menengah ke atas. Investasi terus tumbuh seiring penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Kinerja ekspor nonmigas diperkirakan meningkat, didorong produk manufaktur dan pertambangan.

Ke depan, peningkatan aktivitas perekonomian Indonesia diperkirakan akan terus berlanjut dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,2% (yoy) di 2025. Namun hal ini tentunya perlu didukung antara lain dari penguatan permintaan domestik dan reformasi struktural guna mendukung peningkatan produktivitas dan penguatan struktur pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang tinggi.

Sedangkan stabilitas sektor jasa keuangan nasional pada 2025 juga diharapkan akan tetap terjaga, di tengah pelonggaran kebijakan moneter yang didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang *manageable*, serta kinerja sektor jasa keuangan yang tumbuh positif. Kinerja industri perbankan nasional juga diperkirakan terjaga stabil, didukung oleh tingkat permodalan atau CAR perbankan yang tetap kuat, kinerja intermediasi yang masih dalam tren pertumbuhan yang positif, serta penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan yang masih tumbuh moderat.

Dalam industri perbankan, perkembangan transaksi dan layanan *digital banking* terus berkembang mendukung kemudahan transaksi ekonomi. Pesatnya perkembangan teknologi digital dan internet serta perubahan pola belanja masyarakat turut mendorong perkembangan *digital banking*. Dalam satu dekade terakhir, perkembangan transaksi *Automatic Teller Machine* (Anjungan Tunai Mandiri), kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik menunjukkan tren peningkatan. Nilai transaksi *digital banking* diperkirakan terus meningkat. Data BI menunjukkan pada tahun 2024 telah mencapai 43,5 miliar transaksi, tumbuh 36,6% (yoy). Kemudahan sumber pendanaan juga menjadi daya tarik perusahaan *fintech* sebagai alternatif pinjaman bank.

Dalam menghadapi tahun 2025, Bank akan terus menerus menerapkan pertumbuhan bisnis secara *prudent*, efisiensi biaya dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki untuk meraih target

Amid these global economic risks, Indonesia's economy is projected to remain strong. Domestic economic growth in 2025 is forecast to exceed 5.0% (YoY), continuing the positive performance from 2024, driven by household consumption and investment. Household consumption remains robust, especially among the middle to upper-income segments. Investment is expected to grow, supported by the completion of various National Strategic Projects (PSN), including the development of the new capital city, Ibu Kota Nusantara (IKN). Non-oil and gas exports are also projected to increase, particularly in manufacturing and mining products.

Looking ahead, Indonesia's economic activity is expected to continue to expand, with a projected growth rate of 5.2% (YoY) in 2025. This growth must be supported by strengthened domestic demand and structural reforms aimed at increasing productivity and reinforcing the economic growth structure, particularly in sectors with high labor absorption and added value.

In parallel, the stability of the national financial services sector is expected to remain intact in 2025, amid a more accommodative monetary policy stance supported by strong capitalization, adequate liquidity, manageable risk profiles, and continued positive performance of the financial services sector. The performance of Indonesia's banking industry is also projected to remain stable, backed by strong capital adequacy (CAR), continued positive trends in financial intermediation, and moderate growth in third-party funds (DPK) collection.

Within the banking industry, digital banking transactions and services continue to evolve, facilitating easier economic transactions. The rapid advancement of digital technology and internet access, combined with shifting consumer spending habits, have significantly driven the growth of digital banking. Over the past decade, there has been a consistent increase in transactions involving ATMs, debit cards, credit cards, and e-money. The total value of digital banking transactions is expected to continue rising, with Bank Indonesia data showing 43.5 billion transactions in 2024—an increase of 36.6% YoY. Additionally, the ease of funding access has made fintech companies an increasingly attractive alternative to conventional bank loans.

As the Bank faces 2025, it will continue to adopt prudent business growth strategies, cost efficiency measures, and optimal use of available resources to achieve its set targets, while maintaining

yang ditetapkan oleh Bank, serta fokus kepada *Human Capital*. Proses akuisisi 1 juta nasabah merupakan target yang hendak dicapai oleh Bank seiring dengan akselerasi transformasi *digital banking* dimana rencana strategis Bank telah berada pada tahapan *Sustainable Business Expansion*.

Bank berkeinginan untuk terus tumbuh menjadi lebih baik dan mengambil peran sebagai *agent of development* bagi industri perbankan di Indonesia. Pada tahun 2025, Bank akan senantiasa bergerak pada koridor ketentuan yang ada, dengan sigap meraih peluang serta berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kesehatan Bank dan selalu berupaya mencapai hasil yang semakin maksimal.

Strategi Pengembangan Bisnis

Bank telah menyusun beberapa inisiatif strategi untuk mengantisipasi, mengatasi tantangan dan meraih peluang pertumbuhan dari dinamika kondisi perekonomian global maupun nasional di tahun mendatang. Beberapa inisiatif tersebut mencakup:

1. Diversifikasi produk pembiayaan melalui implementasi digital lending untuk keperluan konsumtif maupun modal kerja dengan pemanfaatan *Big-Data analytic* serta *scoring engine*.
2. Melakukan penyaluran/pembiayaan kredit melalui *channelling* koperasi untuk meningkatkan sektor mikro dan UMKM.
3. Pengembangan bisnis ke *supply chain financing* & *distributor financing* dari debitur eksisting maupun debitur baru dengan meningkatkan transaksi pembayaran baik *offline* maupun *online*.
4. Fokus pada penghimpunan dana murah berbasis mobile yang terhubung dengan *e-Commerce*, *fintech*, dan *merchant*. Produk pendanaan seperti tabungan milenial, tabungan masa depan, produk investasi, tabungan emas dan lain-lain.
5. Akselerasi kolaborasi dengan mitra bisnis, baik dari penghimpunan dan penyaluran dana, untuk mendorong akuisisi nasabah dan transaksi melalui integrasi sistem berbasis teknologi dalam kaitan membangun ekosistem digital.
6. Melakukan *cross selling* dan *value chain financing* dengan jaringan usaha yang dimiliki AG Network dan nasabah/debitur eksisting guna menambah *customer base* Bank. Intensifikasi bisnis menggunakan sistem *closed loop* yang berisiko rendah, melihat besarnya peluang pasar ritel di tahun 2030.
7. Peningkatan *fee based income* melalui komisi dan biaya administrasi, *transactional banking*, transaksi valuta asing, *trade finance*, kolaborasi dengan perusahaan *Fintech*

a strong focus on *Human Capital*. The acquisition of one million customers is a key milestone the Bank aims to reach, aligned with the acceleration of its digital banking transformation, as the Bank moves into the stage of *Sustainable Business Expansion*.

Bank Artha Graha Internasional aspires to continuously grow stronger and fulfill its role as an agent of development within the Indonesian banking industry. In 2025, the Bank will consistently operate within the regulatory framework, seize opportunities proactively, uphold prudent banking principles, prioritize financial health, and strive for ever-improving results.

Business Development Strategy

The Bank has formulated several strategic initiatives to anticipate and address challenges while seizing growth opportunities arising from the dynamic global and national economic landscape in the coming year. These initiatives include:

1. Diversifying financing products through the implementation of digital lending for both consumer and working capital needs, utilizing *Big-Data analytics* and a credit scoring engine.
2. Disbursing/providing credit through cooperative channeling to enhance support for the micro and SME sectors.
3. Expanding into supply chain financing and distributor financing for both existing and new debtors, by increasing payment transactions through both offline and online channels.
4. Focusing on low-cost fund mobilization via mobile-based platforms integrated with e-commerce, fintech, and merchants. Funding products include millennial savings, future savings, investment products, gold savings, and others.
5. Accelerating collaboration with business partners in both fund collection and distribution to drive customer acquisition and transaction volume through technology-based system integration, in support of building a digital ecosystem.
6. Implementing cross-selling and value chain financing across AG Network's business entities and existing customers/debtors to expand the Bank's customer base. Business intensification will be conducted through a low-risk closed-loop system, in view of the large potential in the retail market by 2030.
7. Increasing fee-based income through commissions and administrative fees, transactional banking, foreign exchange transactions, trade finance, collaboration with fintech

- Payment & e-Commerce*, penjualan produk *bancassurance* dan transaksi yang dibangun dari kerjasama pihak ketiga maupun pengembangan *channel* milik Bank.
8. Pengembangan kompetensi SDM dengan meningkatkan *product knowledge* dan *selling skill* dari seluruh tim marketing Konsumer.
 9. Optimalisasi tenaga sales di Cabang untuk berkontribusi dalam meningkatkan portofolio kredit melalui percepatan proses persetujuan, pemberian program insentif dan *pricing* yang kompetitif.
 10. Perbaikan Bisnis proses penyaluran & administrasi kredit.

TINJAUAN PER SEGMENT OPERASI

Segmen operasi adalah komponen dari Bank yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain Bank, dimana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh Direksi Bank untuk membuat keputusan mengenai sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada Direksi Bank meliputi komponen-komponen yang dapat didistribusikan secara langsung kepada suatu segmen dan komponen-komponen yang dapat dialokasikan dengan dasar yang wajar. Komponen yang tidak dapat dialokasikan terutama terdiri dari aset dan liabilitas pajak penghasilan, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan serta aset tetap.

Bank menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". PSAK revisi ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dimana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi.

Bank memiliki 4 (empat) pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Bank:

1. Produktif - termasuk pinjaman yang diberikan kepada sektor produktif, diantaranya, kredit modal kerja dan investasi.
2. Konsumtif - termasuk pinjaman yang diberikan untuk keperluan konsumtif.
3. Treasuri - segmen ini terkait dengan kegiatan treasuri Bank termasuk transaksi *money market*, *trade finance*, valuta asing, dan surat berharga.
4. Lain-lain - termasuk aktivitas *back office* dan divisi yang tidak menghasilkan laba.

payment and e-commerce companies, *bancassurance* product sales, and transaction activities established through third-party partnerships or the Bank's channels.

8. Enhancing human resource competencies by improving product knowledge and selling skills across the entire consumer marketing team.
9. Optimizing sales personnel at branch offices to contribute to credit portfolio growth by accelerating the approval process and offering competitive incentive programs and pricing.
10. Improving the business process for credit disbursement and administration.

OPERATING SEGMENT REVIEW

An operating segment is a component of the Bank that engages in business activities from which it may earn revenue and incur expenses, including revenues and expenses relating to transactions with other components of the Bank. The operating results of each segment are reviewed regularly by the Bank's Board of Directors to make decisions regarding the allocation of resources to the segment and to assess its performance, and for which discrete financial information is available. The segment results reported to the Bank's Board of Directors include items that are directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis. Unallocated components mainly consist of income tax assets and liabilities, including current and deferred taxes, and fixed assets.

The Bank applies PSAK No. 5 (Revised 2009), "Operating Segments." This revised standard requires disclosures that enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity is engaged and the economic environments in which it operates.

The Bank has 4 (four) reportable segments. The following describes the operations of each reportable segment:

1. Productive - includes loans granted to productive sectors, such as working capital loans and investment loans.
2. Consumer - includes loans granted for personal consumption purposes.
3. Treasury - this segment includes the Bank's treasury activities such as money market transactions, trade finance, foreign exchange transactions, and securities.
4. Others - includes back-office operations and divisions that do not generate profit.

Selain itu, Bank juga melaporkan segmen geografis yang dibedakan dalam menghasilkan jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

Bank melaporkan segmen geografis berdasarkan daerah Jakarta, Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Indonesia wilayah timur dan lainnya.

Adapun kinerja dari keempat segmen operasi tersebut untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Moreover, the Bank also reports geographical segments which are differentiated based on the provision of services in specific economic environments (regions), where each component has different risks and returns compared to components operating in other economic environments.

The Bank reports geographical segments by region: Jakarta, Java, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Eastern Indonesia, and others.

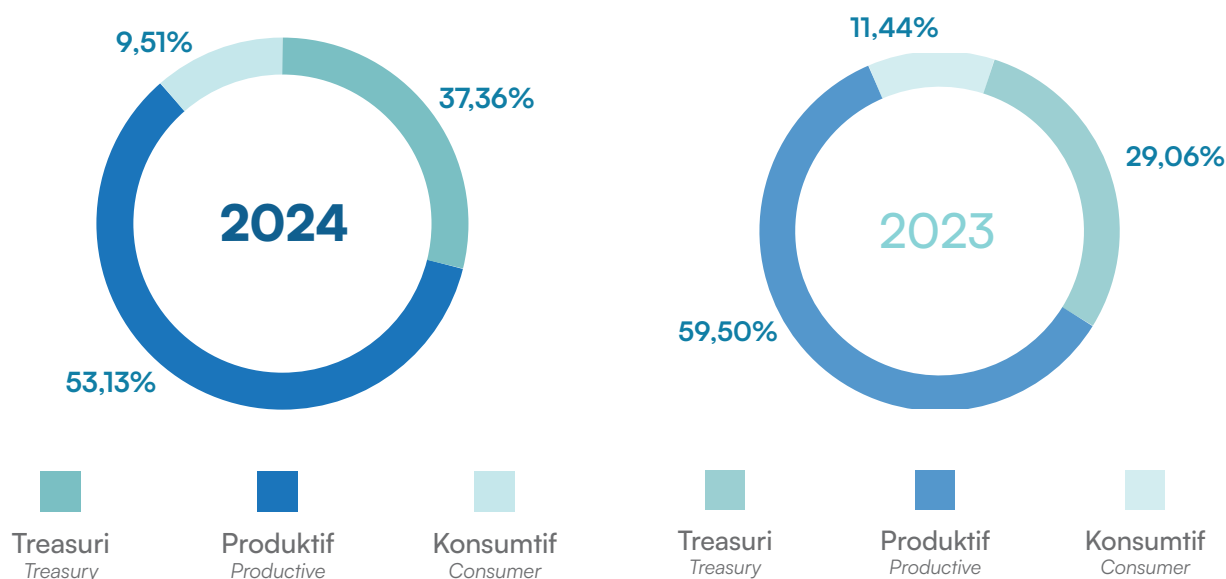
The performance of these four operating segments for the years 2024 and 2023 is presented as follows:

Dalam Jutaan Rupiah
In Million Rupiah

Uraian Description	Produktif Productive	Konsumtif Consumptive	Tresuri Treasury	Lain-Lain Others	Jumlah Total
2024					
Pendapatan Bunga Interest Income	874.512	156.570	614.982	-	1.646.064
Jumlah Aset Total Assets	8.264.968	2.340.510	15.362.193	4.158.722	30.126.393
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(82.507)	(449.398)	(1.965)	(366.158)	(900.028)
2023					
Pendapatan Bunga Interest Income	883.412	169.791	431.550	-	1.484.753
Jumlah Aset Total Assets	9.598.720	2.548.648	9.883.790	4.072.453	26.103.611
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(403.043)	(107.593)	(1.186)	(327.349)	(839.171)

Dalam Jutaan Rupiah In Million Rupiah					
Uraian Description	Deposito Time Deposits	Giro Demand Deposits	Tabungan Savings	Non-DPK Non-Third Party Funds	Jumlah Total
2024					
Beban Bunga Interest Expenses	(607.282)	(59.782)	(10.644)	(58.287)	(735.995)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	15.538.627	6.517.641	1.834.505	1.895.924	25.786.697
2023					
Beban Bunga Interest Expenses	(397.543)	(50.781)	(10.515)	(43.935)	(502.774)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	12.482.696	6.631.415	1.517.590	1.300.877	21.932.578

Pendapatan Bunga Bank Artha Graha Internasional Berdasarkan Segmen
Interest Income of Bank Artha Graha Internasional by Segment



SEGMENT GEOGRAFIS

Bank beroperasi di dua wilayah geografis utama yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) dan di luar DKI Jakarta. Tabel berikut menjelaskan informasi segmen berdasarkan segmen geografis:

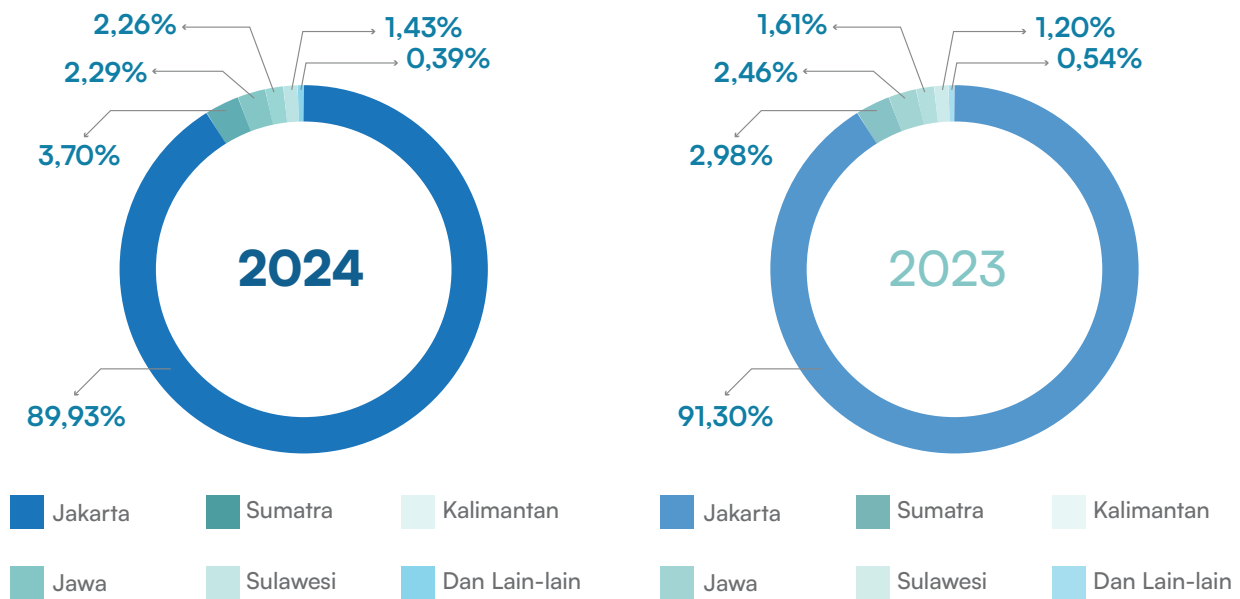
GEOGRAPHICAL SEGMENT

The Bank operates in two main geographical areas, the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta) and areas outside of DKI Jakarta. The following table presents segment information by geographical segments:

Uraian Description	Jakarta Jakarta	Jawa Java	Sumatra Sumatra	Sulawesi Sulawesi	Kalimantan Kalimantan	Lainnya Others	Jumlah Total
2024							
Pendapatan Bunga dan Operasional Lainnya Interest Income and Other Operating Income	1.801.811	45.257	74.138	45.900	28.641	7.902	2.003.649
Beban Bunga dan Operasional Interest Expenses and Operating Expenses	(1.459.488)	(89.120)	(150.102)	(54.160)	(22.492)	(31.020)	(1.806.382)
Laba Operasional Operating Profit	342.323	(43.863)	(75.964)	(8.260)	6.149	(23.118)	197.267
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	117.427	9.468	21.050	9.000	2.934	(7.405)	152.474
Jumlah Aset Total Assets	24.505.022	1.870.280	2.460.168	648.357	110.484	532.062	30.126.393
2023							
Pendapatan Bunga dan Operasional Lainnya Interest Income and Other Operating Income	1.640.952	53.581	44.162	28.987	21.563	8.126	1.797.371
Beban Bunga dan Operasional Interest Expenses and Operating Expenses	(1.321.104)	(82.690)	(102.894)	(45.651)	(16.531)	(41.425)	(1.610.295)
Laba Operasional Operating Profit	319.848	(29.109)	(58.732)	(16.664)	5.032	(33.299)	187.076
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	146.859	17.050	20.772	(9.325)	3.583	(32.186)	146.753
Jumlah Aset Total Assets	21.588.590	1.447.675	2.018.834	566.357	107.300	374.846	26.103.611

Pendapatan Bunga Bank Artha Graha Internasional Berdasarkan Segmen Geografis

Interest Income of Bank Artha Graha Internasional by Geographical Segment



Tinjauan Keuangan

Financial Review

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang menyatakan opini laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk pada tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The following financial review refers to the Financial Statements for the years ended December 31, 2024, have been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono, which expressed an unqualified opinion stating that the financial statements fairly present, in all material respects, the financial position of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk as of December 31, 2024, as well as its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan Bank Artha Graha Internasional terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta Laporan Arus Kas disajikan sebagai berikut.

FINANCIAL PERFORMANCE

The financial performance of Bank Artha Graha Internasional consists of the performance of the Statement of Financial Position, the Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, and the Statement of Cash Flow, which are presented as follows.

Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position

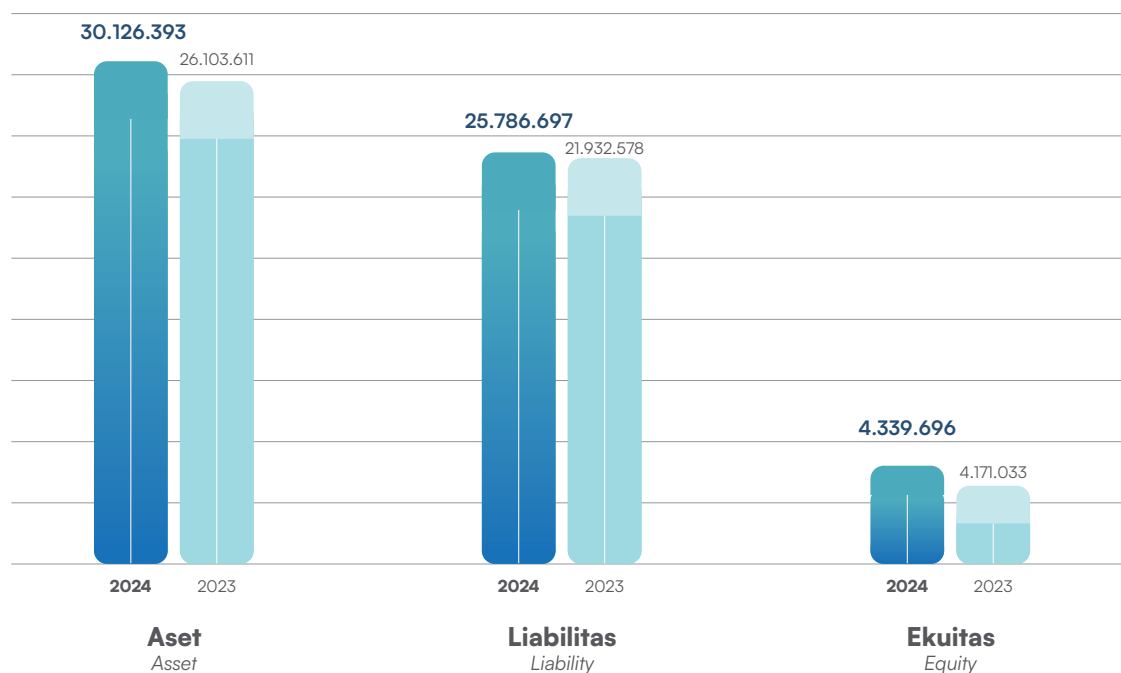
dalam jutaan rupiah
in million rupiah

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan / (Penurunan) Growth / (Decline)	
			Rp	%
Aset Assets				
Aset Keuangan Financial Assets	26.816.156	22.592.430	4.223.726	18,70
Aset Non Keuangan Non-Financial Assets	3.310.237	3.511.181	(200.944)	(5,72)
Jumlah Aset Total Assets	30.126.393	26.103.611	4.022.782	15,41
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity				
Liabilitas Keuangan Financial Liabilities	25.672.357	21.801.990	3.870.367	17,75
Liabilitas Non Keuangan Non-Financial Liabilities	114.340	130.588	(16.248)	(12,44)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	25.786.697	21.932.578	3.854.119	17,57
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.339.696	4.171.033	168.663	4,04
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	30.126.393	26.103.611	4.022.782	15,41

Posisi Keuangan Bank Artha Graha Internasional 2023 - 2024

Bank Artha Graha International Financial Position 2023 - 2024

Dalam Jutaan Rupiah
In Million Rupiah



ASET

Jumlah aset Bank Artha Graha Internasional per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp30,12 triliun, meningkat 15,41% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp26,10 triliun. Peningkatan tersebut dikontribusikan oleh naiknya aset keuangan sebesar Rp4,22 triliun.

ASSETS

As of December 31, 2024, the total assets of Bank Artha Graha Internasional amounted to IDR30.12 trillion, an increase of 15.41% from the previous year's total of IDR26.10 trillion. This increase was primarily driven by the rise in financial assets amounting to IDR4.22 trillion.

Aset Keuangan Financial Assets

dalam jutaan rupiah
in million rupiah

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan / (Penurunan) Growth / (Decline)	
			Rp	%
Kas Cash	769.354	369.134	400.220	108,42
Giro pada Bank Indonesia Current accounts with Bank Indonesia	3.024.920	2.658.276	366.644	13,79
Giro pada Bank Lain - Bersih Current accounts with Other Banks - Net	349.430	338.297	11.133	3,29
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Placement with Bank Indonesia and Other Banks	2.177.464	711.075	1.466.389	206,22
Efek-Efek Securities	8.501.562	5.787.414	2.714.148	46,90

Aset Keuangan

Financial Assets

dalam jutaan rupiah
in million rupiah

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan / (Penurunan) Growth / (Decline)	
			Rp	%
Wesel Ekspor Export Bills	166.681	131.863	34.818	26,40
Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali Securities Purchased under Agreements to Resell	976.063	125.469	850.594	677,93
Tagihan Derivatif Derivative Receivables	48	35	13	37,14
Kredit yang Diberikan - Bersih Loans - Net	10.073.572	11.636.733	(1.563.161)	(13,43)
Pendapatan Bunga yang Masih Akan Diterima Acceptance Receivables	253.265	326.422	(73.157)	(22,41)
Tagihan Akseptasi Investment in Shares	166.025	131.362	34.663	26,39
Penyertaan Saham Other Assets	6	6	-	0,00
Aset Lain-Lain Total Financial Assets	357.766	376.344	(18.578)	(4,94)
Jumlah Aset Keuangan Total Financial Assets	26.816.156	22.592.430	4.223.726	18,70

Jumlah aset keuangan Bank tahun 2024 tercatat sebesar Rp26,81 triliun, meningkat 18,70% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp22,59 triliun. Peningkatan tersebut terutama dikontribusikan oleh adanya kenaikan efek-efek sebesar Rp2,71 triliun (2023: Rp5,79 triliun).

Aset keuangan Bank Artha Graha Internasional tahun 2024 utamanya berupa kredit yang diberikan (neto), yaitu mencapai 37,56% (2023: 51,51%) dari total aset keuangan. Namun, pada tahun 2024, jumlah kredit yang diberikan Bank menurun 13,43% dari senilai Rp10,07 triliun pada tahun 2024 dari sebesar Rp11,64 triliun di tahun 2023.

Berdasarkan tujuan penggunaan, kredit Bank diklasifikasikan menjadi kredit produktif, konsumtif, dan lain-lain dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kredit produktif diberikan kepada individu atau perusahaan pada segmen UMKM, Komersial, dan Korporasi untuk keperluan modal kerja atau investasi dalam bentuk fasilitas *Revolving Loan*, *Fixed Loan*, *Supply Chain Financing*, *Pinjaman Rekening Koran*, *Money Market Line*, *Negosiasi Wesel Ekspor*, *Kredit Ekspor*, *Trust Receipt*, *Advances Under L/C*, *Clean Bills Purchased*.

In 2024, the Bank's total financial assets amounted to IDR26.81 trillion, an increase of 18.70% from the previous year's figure of IDR22.59 trillion. This increase was primarily driven by a rise in securities to IDR2.71 trillion (2023: IDR5.79 trillion).

Bank Artha Graha Internasional's financial assets in 2024 were mainly composed of net loans, which accounted for 37.56% (2023: 51.51%) of total financial assets. In 2024, the total loans disbursed by the Bank decrease by 13.43% from IDR10.07 trillion in 2023 from IDR11.64 trillion in 2023.

Based on the purpose of use, the Bank's loans are classified into productive loans, consumer loans, and others, with the following descriptions:

1. Productive Loans are provided to individuals or companies in the MSMEs, Commercial, and Corporate segments for working capital or investment purposes in the form of *Revolving Loan*, *Fixed Loan*, *Supply Chain Financing*, *Current Account Loan*, *Money Market Line*, *Negotiated Export Notes*, *Export Credit*, *Trust Receipt*, *Advances Under L/C*, *Clean Bills Purchased*.

- Kredit Konsumtif terdiri dari Kredit Kepemilikan Rumah (KPR Graha), KPR Asyig, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Kepemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
- Lain-lain mencakup *Letter of Credit*, *Standby Letter of Credit*, *Shipping Guarantee*, *Custom Guarantee*, dan *Foreign Exchange Contact*.

- Consumer Loans consist of Home Ownership Loans (KPR Graha), KPR Asyig, Collateralless Credit (KTA), Housing Finance Liquidity Facility Mortgage (KPR FLPP), and Motor Vehicle Loans (KKB).
- Others include a Letter of Credit, Standby Letter of Credit, Shipping Guarantee, Custom Guarantee, and foreign exchange contact.

Perkembangan penyaluran kredit tersebut dalam dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The loan disbursement over the past two years is as follows:

dalam jutaan rupiah
in million rupiah

Uraian Description	2024		2023		Pertumbuhan/ (Penurunan) Growth / (Decline)	
	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	Rp	%
Kredit Produktif Productive Loans	8.264.969	77,93	9.598.721	79,02	(1.291.419)	(13,45)
Kredit Konsumtif Consumer Loans	2.340.510	22,07	2.548.648	20,98	(250.471)	(9,83)
Jumlah Total	10.605.479	100	12.147.369	100	(1.541.890)	(12,69)

Pada tahun 2024, penyaluran kredit produktif mencatatkan penurunan sebesar 13,45% menjadi sebesar Rp8,31 triliun dari Rp9,60 triliun di tahun sebelumnya dan penyaluran kredit konsumtif mencatatkan penurunan 9,83% menjadi sebesar Rp2,30 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,55 triliun.

In 2024, the disbursement of productive loans recorded an decrease of 13.45%, reaching IDR8.31 trillion, up from IDR9.60 trillion in the previous year and the disbursement of consumer loans recorded an decrease of 9.83%, amounting to IDR2.30 trillion, compared to IDR2.55 trillion in the previous year.

Aset Non Keuangan Non-Financial Asset

dalam jutaan rupiah
in million rupiah

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan/(Penurunan) Growth / (Decline)	
			Rp	%
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses	122.810	144.641	(21.831)	(15,09)
Aset Tetap - Bersih Fixed Assets - Net	2.123.376	2.127.797	(4.421)	(0,21)
Aset Tak Berwujud - Bersih Intangible Assets - Net	25.487	31.873	(6.386)	(20,04)
Agunan yang Diambil Alih - Bersih Foreclosed Assets - Net	808.883	936.110	(127.227)	(13,59)
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	229.681	270.760	(41.079)	(15,17)
Jumlah Aset Non Keuangan Total Non-Financial Assets	3.310.237	3.511.181	(200.944)	(5,72)

Jumlah aset non keuangan Bank tahun 2024 tercatat sebesar Rp3,31 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,51 triliun. Penurunan jumlah aset non keuangan tersebut terutama disebabkan oleh karena adanya penurunan nominal pada akun agunan yang diambil alih - bersih sebesar Rp127,22 miliar setara dengan 13,59%.

LIABILITAS

Jumlah liabilitas Bank Artha Graha Internasional per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp25,7 triliun, meningkat 17,57% dari tahun sebelumnya yang senilai Rp21,93 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh naiknya liabilitas keuangan sebesar 17,75%.

Liabilitas Keuangan Financial Liabilities

dalam jutaan rupiah
in million rupiah

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan/(Penurunan) Growth / (Decline)	
			Rp	%
Liabilitas Segera <i>Liabilities Due Immediately</i>	115.621	95.711	19.910	20,80
Simpanan dari Nasabah <i>Deposits from Customers</i>	23.890.773	20.631.701	3.259.072	15,80
Simpanan dari Bank Lain <i>Deposits from Other Banks</i>	452.454	336.958	115.496	34,28
Liabilitas efek yang dijual dengan janji dijual kembali <i>Liabilities from Securities Sold under Repurchase Agreements</i>	499.281	-	499.281	100,00
Liabilitas Derivatif <i>Derivative Liabilities</i>	-	1.057	(1.057)	(100,00)
Liabilitas Akseptasi <i>Acceptance Liabilities</i>	166.682	131.863	34.819	26,41
Bunga Masih Harus Dibayar <i>Accrued Interest Payable</i>	35.100	26.693	8.407	31,50
LTN Subordinasi <i>Subordinated LTN</i>	200.000	200.000	-	0,00
Liabilitas Lain-Lain <i>Other Liabilities</i>	312.446	378.007	(65.561)	(17,34)
Jumlah Liabilitas Keuangan Total Financial Liabilities	25.672.357	21.801.990	3.870.367	17,75

Jumlah liabilitas keuangan Bank Artha Graha Internasional per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp25,67 triliun, meningkat 17,75% dari tahun sebelumnya yang senilai Rp21,80 triliun, terutama disebabkan oleh naik simpanan dari nasabah sebesar Rp3,26 triliun dan liabilitas efek yang dijual dengan janji dijual kembali sebesar Rp499,28 miliar.

The total non-financial assets of the Bank in 2024 were recorded at IDR3.31 trillion, lower than the previous year's total of IDR3.51 trillion. The decrease in non-financial assets was primarily due to a reduction in the nominal value of seized collateral - net, amounting to IDR127.22 billion, equivalent to 13.59%.

LIABILITIES

As of December 31, 2024, the total liabilities of Bank Artha Graha Internasional amounted to IDR25.7 trillion, an increase of 17.57% from the previous year's figure of IDR21.93 trillion. This was primarily driven by an increase in financial liabilities of 17.75%.

As of December 31, 2024, the total financial liabilities of Bank Artha Graha Internasional amounted to IDR25.67 trillion, an increase of 17.75% from the previous year's figure of IDR21.80 trillion. This change was primarily due to the increase in deposits from other banks by IDR3.26 trillion and deposits from customers by IDR499.28 billion.

Adapun simpanan dari nasabah pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp23,89 triliun, meningkat 15,80% dari tahun sebelumnya senilai Rp20,63 triliun. Peningkatan jumlah saldo simpanan nasabah tahun 2024 disebabkan oleh naiknya deposito hingga sebesar Rp3,05 triliun atau tumbuh 15,80%.

Deposits from customers in 2024 stood at IDR23,89 trillion, an increase of 15,80% from IDR20.63 trillion in the previous year. The increase in customer deposit balances in 2024 was driven by a rise in time deposits, which grew by IDR3,05 trillion or 15,80%.

Simpanan Nasabah Customer Deposits

dalam jutaan rupiah
in million rupiah

Uraian Description	2024		2023		Pertumbuhan/ (Penurunan) Growth / (Decline)	
	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi (%) Composition (%)	Rp	%
Giro Demand Deposits	6.517.641	27,28	6.631.415	32,14	(113.774)	(1,72)
Tabungan Savings	1.834.505	7,68	1.517.590	7,36	316.915	20,88
Deposito Time Deposits	15.538.627	65,04	12.482.696	60,50	3.055.931	24,48
Jumlah Dana Pihak Ketiga Total Third-Party Funds	23.890.773	100,00	20.631.701	100,00	3.259.072	15,80
CASA CASA	8.352.146	34,96	8.149.005	39,50	203.141	2,49

Bank terus berupaya untuk meningkatkan porsi *Current Account Saving Account* (CASA) dalam struktur pendanaannya. Tahun 2024, rasio CASA Bank mengalami penurunan sebesar 4,54% dari tahun sebelumnya yang sebesar 39,50%. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan total DPK yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp3,26 triliun dibandingkan dengan tahun 2023. Namun, secara nominal CASA terdapat peningkatan sebesar Rp203 miliar atau tumbuh 2,49% yang disebabkan oleh kenaikan pada komposisi tabungan sebesar Rp316,9 miliar, sedangkan giro turun sebesar Rp113,7 miliar. Dalam rangka berupaya meningkatkan CASA, pada tahun 2024 Bank menjalankan strategi tetap aktif memaksimalkan kolaborasi dengan mitra bisnis melalui kerjasama B2B2C, baik itu pelaku usaha mikro, menengah dan besar dalam penggunaan layanan QRIS Acquirer milik Bank.

The Bank continues to make efforts to increase the proportion of *Current Account Saving Account* (CASA) in its funding structure. In 2024, the Bank's CASA ratio decreased by 4.54% from the previous year's 39.50%. This was due to a significant increase in total third-party funds (DPK), which reached IDR3.26 trillion compared to 2023. However, in nominal terms, CASA saw an increase of IDR203 billion, or a growth of 2.49%, driven by a rise in savings deposits of IDR316.9 billion, while current accounts decreased by IDR113.7 billion. As part of efforts to increase CASA, in 2024, the Bank implemented a strategy to remain actively engaged in maximizing collaboration with business partners through B2B2C cooperation, including with micro, medium, and large businesses in utilizing the Bank's QRIS Acquirer services.

Peran cabang Bank masih tetap diperlukan sebagai jembatan untuk mengakuisisi nasabah secara *offline*. Diharapkan *event-event* yang diselenggarakan oleh cabang, baik itu inisiatif dari cabang maupun kolaborasi dengan mitra bisnis dapat berperan serta dalam mendorong peningkatan pendanaan dan jumlah nasabah yang bekerja sama. Selain itu, dorongan melalui program akuisisi dan transaksi akan terus dilakukan guna menarik minat nasabah untuk bertransaksi melalui *channel* Bank.

The Bank's branches continue to play a vital role as a bridge for acquiring customers *offline*. Events held by branches-either through their own initiatives or in collaboration with business partners-are expected to support the growth of funding and the number of partnering customers. In addition, customer acquisition and transaction programs will continue to be promoted to encourage customers to use the Bank's channels for their transactions.

Liabilitas Non Keuangan
Non-Financial Liabilitiesdalam jutaan rupiah
in million rupiah

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan/(Penurunan) Growth / (Decline)	
			Rp	%
Utang Pajak Tax Payables	15.189	11.713	3.476	29,68
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Post-Employment Benefit Liabilities	99.151	118.875	(19.724)	(16,59)
Jumlah Liabilitas Non Keuangan Total Non-Financial Liabilities	114.340	130.588	(16.248)	(12,44)

Liabilitas non-keuangan Bank tahun 2024 tercatat sebesar Rp114 miliar, turun 12,44% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp131 miliar. Penurunan tersebut dikontribusikan oleh berkurangnya saldo liabilitas imbalan pasca kerja sebesar 16,59% atau setara dengan Rp19,7 miliar.

The Bank's non-financial liabilities in 2024 amounted to IDR114 billion, an decrease of 12.44% from the previous year's figure of IDR131 billion. This decrease was attributed to the rise/fall in the balance of post-employment benefit liabilities by 16.59%, equivalent to IDR19.7 billion.

Ekuitas
Equitydalam jutaan rupiah
in million rupiah

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan/ (Penurunan) Growth / (Decline)	
			Rp	%
Modal Saham Share Capital	2.242.372	2.242.372	-	0,00
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	415.285	415.285	-	0,00
Revaluasi Aset Tetap Revaluation of Fixed Assets	1.379.822	1.379.822	-	0,00
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti setelah Dikurangi Pajak Remeasurement of Defined Benefit Plans, Net of Tax	78.699	61.575	17.124	27,81
Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Efek-Efek yang Tersedia untuk Dijual setelah Pajak Unrealized Gains on Changes in Fair Value of Available-for-Sale Securities, Net of Tax	1.407	2.342	(935)	(39,92)
Saldo Laba Retained Earnings	222.111	69.637	152.474	218,96
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.339.696	4.171.033	168.663	4,04

Jumlah ekuitas Bank per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp4,34 triliun, meningkat 4,04% dari tahun sebelumnya yang senilai Rp4,17 triliun. Peningkatan ekuitas terjadi karena Bank mencatatkan laba tahun berjalan hingga sebesar Rp152,47miliar.

As of December 31, 2024, the Bank's total equity stood at IDR4.34 trillion, an increase of 4.04% from the previous year's IDR4.17 trillion. The increase in equity was driven by the Bank's profit for the year, which amounted to IDR152.47 billion. In 2024, the Bank recorded total interest income of IDR1.65

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

dalam jutaan rupiah
in million rupiah

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan/(Penurunan) Growth / (Decline)	
			Rp	%
Pendapatan Bunga Interest Income	1.646.064	1.484.753	161.311	10,86
Beban Bunga Interest Expenses	(735.995)	(502.774)	(233.221)	46,39
Pendapatan Bunga - Neto Interest Income - Net	910.069	981.979	(71.910)	(7,32)
Pendapatan Operasional Lainnya - Neto Other Operating Income - Net	357.585	312.618	44.967	14,38
Beban Operasional Lainnya Other Operating Expenses	(1.070.387)	(1.107.521)	37.134	(3,35)
Laba (Rugi) Operasional Operating Profit (Loss)	197.267	187.076	10.191	5,45
Pendapatan (Beban) Non-Operasional Non-Operating Income (Expense)	(7.512)	(3.719)	(3.793)	101,99
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Profit (Loss) Before Tax Expense	189.755	183.357	6.398	3,49
Beban Pajak Tax Expenses	(37.281)	(36.604)	(677)	1,85
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	152.474	146.753	5.721	3,90
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	16.189	19.910	(3.721)	(18,69)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Total Comprehensive Income (Loss)	168.663	166.663	2.000	1,20
Laba per Saham Dasar (dalam angka penuh) Basic Earnings per Share (in full amount)	7,54	7,26	0,28	3,86

Pendapatan Bunga

Interest Income

dalam jutaan rupiah
in million rupiah

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan/(Penurunan) Growth / (Decline)	
			Rp	%
Kredit yang Diberikan Loans Disbursed	1.031.081	1.053.203	(22.122)	(2,10)
Efek-Efek Securities	476.778	331.975	144.803	43,62
Wesel Ekspor Export Bills	8.229	4.887	3.342	68,39
Penempatan pada Bank Indonesia Placements with Bank Indonesia	114.697	89.488	25.209	28,17

Pendapatan Bunga

Interest Income

dalam jutaan rupiah
in million rupiah

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan/(Penurunan) Growth / (Decline)	
			Rp	%
Penempatan pada Bank Lain dan lain-lain Placements with Other Banks and Others	15.279	5.200	10.079	193,83
Jumlah Pendapatan Bunga Total Interest Income	1.646.064	1.484.753	161.311	10,86

Pada tahun 2024, Bank membukukan pendapatan bunga total sebesar Rp1,65 triliun, naik 10,86% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,48 triliun. Kenaikan pendapatan bunga utamanya dikontribusikan oleh adanya peningkatan pendapatan dari penempatan pada efek-efek sebesar Rp144,80 miliar atau naik 43,62% menjadi total sebesar Rp476,78 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp331,97 miliar.

trillion, an increase of 10.86% from the previous year's IDR1.48 trillion. This increase in interest income was primarily driven by a rise in income from placements in securities, which grew by IDR144.80 billion or 43.62%, reaching a total of IDR476.78 billion compared to IDR331.97 billion in the previous year.

In 2024, Bank Artha Graha Internasional's total interest expense

Beban Bunga

Interest Expense

dalam jutaan rupiah
in million rupiah

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan/(Penurunan) Growth / (Decline)	
			Rp	%
Simpanan Nasabah Deposits from Customers	677.709	458.840	218.869	47,70
Dana Kelolaan Tidak Kena Pajak Non-Taxable Managed Funds	16.940	18.674	(1.734)	(9,29)
Simpanan dari Bank Lain Deposits from Other Banks	22.346	6.260	16.086	256,96
LTN Subordinasi I Tahap I LTN Subordinated I Phase I	19.000	19.000	-	0,00
Jumlah Beban Bunga Total Interest Expenses	735.995	502.774	233.221	46,39

Jumlah beban bunga Bank Artha Graha Internasional tahun 2024 tercatat sebesar Rp736 miliar, naik 46,39% dari tahun sebelumnya sebesar Rp503 miliar. Peningkatan beban bunga tersebut utamanya dikontribusikan oleh naiknya beban bunga simpanan nasabah sebesar Rp219 miliar atau 47,70% menjadi sebesar Rp678 miliar dan naiknya beban simpanan dari bank lain sebesar Rp16 miliar atau 256,96% menjadi sejumlah Rp22,3 miliar dari tahun 2023 yang tercatat senilai Rp6,26 miliar.

amounted to IDR736 billion, an increase of 46.39% from IDR503 billion in the previous year. This increase was primarily driven by the rise in interest expense on customer deposits, which increased by IDR219 billion or 47.70% to IDR678 billion, and the rise in interest expense on deposits from other banks, which grew by IDR16 billion or 256.96% to IDR22.3 billion from IDR6.26 billion in 2023.

Other Operating Income

Pendapatan Operasional Lainnya

Tahun 2024, Bank Artha Graha Internasional membukukan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp357 miliar, naik 14,38% dari tahun sebelumnya yang senilai Rp313 miliar. Peningkatan pendapatan operasional lainnya tahun 2024 utamanya berasal dari pendapatan *fee based* yang naik sebesar Rp113 miliar yang di dominasi oleh pendapatan transaksi digital dan *treasury*.

Beban Operasional Lainnya

Jumlah beban operasional lainnya tahun 2024 tercatat menurun sebesar 3,35% menjadi sebesar Rp1,07 triliun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya beban operasi sebesar Rp41,89 miliar dan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non keuangan bersih turun sebesar Rp28,63 miliar, sehingga Bank membukukan beban operasi dan penurunan nilai aset keuangan dan non keuangan bersih tahun 2024 masing-masing sebesar Rp547,74 miliar dan Rp75,03 miliar.

Laba (Rugi) Operasional

Tahun 2024, Bank Artha Graha Internasional membukukan laba operasional sebesar Rp197 miliar. Pencapaian tersebut lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp187 miliar.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Tahun 2024, Bank Artha Graha Internasional membukukan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp190 miliar, meningkat 3,49% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp183 miliar.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan yang dibukukan Bank Artha Graha Internasional di tahun 2024 adalah sebesar Rp152 miliar, meningkat 3,90% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp147 miliar.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun 2024, Bank Artha Graha Internasional membukukan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp169 miliar, meningkat 1,20% dari tahun sebelumnya dimana Bank membukukan laba komprehensif sebesar Rp167 miliar.

Laba (Rugi) per Saham

Seiring dengan naiknya laba Bank di tahun 2024, laba per saham Bank Artha Graha Internasional juga meningkat menjadi Rp7,54 per saham dari tahun sebelumnya sebesar Rp7,26 per saham.

In 2024, Bank Artha Graha Internasional recorded other operating income of IDR357 billion, an increase of 14,38% from the previous year's figure of IDR313 billion. The increase in other operating income in 2024 was primarily driven by a rise in fee-based income, which grew by IDR113 billion, mainly contributed by digital transaction income and treasury income.

Other Operating Expenses

The total other operating expenses in 2024 decreased by 3,35% to IDR1.07 trillion. This decline was mainly driven by a reduction in operating expenses amounting to IDR41.89 billion and a decrease in net impairment losses on financial and non-financial assets of IDR28.63 billion. As a result, the Bank recorded operating expenses and net impairment losses on financial and non-financial assets in 2024 of IDR547.74 billion and IDR75.03 billion, respectively.

Operating Profit (Loss)

In 2024, Bank Artha Graha Internasional recorded an operating profit of IDR197 billion. This achievement was an improvement compared to the previous year, which stood at IDR187 billion.

Profit (Loss) Before Tax

In 2024, Bank Artha Graha Internasional recorded a profit before income tax of IDR190 billion, an increase of 3,49% compared to the previous year, which amounted to IDR183 billion.

Profit (Loss) for the Year

The profit for the year recorded by Bank Artha Graha Internasional in 2024 amounted to IDR152 billion, an increase of 3.90% compared to the previous year, which stood at IDR147 billion.

Comprehensive Profit (Loss) for the Year

In 2024, Bank Artha Graha Internasional recorded comprehensive income for the year amounting to IDR169 billion, an increase of 1.20% from the previous year, in which the Bank recorded comprehensive income of IDR167 billion.

Earnings (Loss) per Share

In line with the increase in the Bank's profit in 2024, the earnings per share of Bank Artha Graha Internasional also rose to IDR7.54 per share, up from IDR7.26 per share in the previous year.

The total cash and cash equivalents of Bank Artha Graha

Arus Kas
Cash Flowdalam jutaan rupiah
in million rupiah

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan/(Penurunan) Growth / (Decline)	
			Rp	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	5.831.023	(464.102)	6.295.125	(1.356,41)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(3.613.942)	(438.430)	(3.175.512)	724,29
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	-	-	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas - Neto Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents - Net	2.217.081	(902.532)	3.119.613	(345,65)
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Effect of Changes in Exchange Rates	27.391	(2.778)	30.169	(1.086,00)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	4.076.785	4.982.095	(905.310)	(18,17)
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	6.321.257	4.076.785	2.244.472	55,05

Jumlah kas dan setara kas Bank Artha Graha Internasional pada akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp6,32 triliun, jumlah tersebut meningkat dibandingkan jumlah kas dan setara kas pada awal tahun yang sebesar Rp4,08 triliun. Peningkatan jumlah kas dan setara kas tersebut dikontribusikan oleh kenaikan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp6,29 triliun, sedangkan kas dari aktivitas investasi turun sebesar Rp3,17 triliun.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2024 tercatat sebesar Rp5,83 triliun, naik Rp6,29 triliun dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan utamanya karena adanya penambahan yang cukup signifikan dari kredit yang diberikan Rp3,47 triliun dan simpanan nasabah sebesar Rp2,95 triliun.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2024 tercatat sebesar Rp3,61 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp438 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan pada pembelian efek-efek bersih.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak tercatat adanya Arus Kas bersih yang diperoleh/digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2024.

Internasional at the end of 2024 amounted to IDR6.32 trillion, an increase compared to the cash and cash equivalents at the beginning of the year, which stood at IDR4.08 trillion. The increase in cash and cash equivalents was contributed by a rise in cash from operating activities amounting to IDR6.29 trillion, while cash from investing activities decreased by IDR3.17 trillion.

Cash Flow from Operating Activities

Net cash flows generated from operating activities in 2024 amounted to IDR5.83 trillion, an increase of IDR6.29 trillion compared to the previous year. This was mainly due to a significant increase in loans disbursed amounting to IDR3.47 trillion and customer deposits totaling IDR2.95 trillion.

Cash Flow from Investing Activities

Net cash flows used for investing activities in 2024 amounted to IDR3.61 trillion, an increase from IDR438 billion in the previous year. This increase was due to a rise in net purchases of securities.

Cash Flows from Financing Activities

There was no recorded net cash flow from financing activities in 2024.

Rasio Keuangan
Financial Ratiodalam %
in %

Uraian Description	2024	2023
Aset Produktif Earning Assets		
Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non-Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non-Produktif Non-performing Earning Assets and Non-Productive Assets to Total Earning Assets and Non-Earning Assets	5,25	7,12
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif Non-performing Earning Assets to Total Earning Assets	0,98	1,09
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan terhadap Aset Produktif Allowance for Impairment Losses for Financial Assets to Earning Assets	2,05	2,64
Pemenuhan CKPN Kredit yang Diberikan Fulfillment of CKPN of Loans	88,46	103,99
Rasio Kredit Bermasalah - Bruto (NPL - Gross) Gross NPL	2,40	1,74
Rasio Kredit Bermasalah - Bersih (NPL - Net) Net NPL	0,77	0,31
Rasio Rentabilitas Profitability Ratio		
Imbal Hasil Aktiva (ROA) Return on Asset (ROA)	0,55	0,60
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) Return on Equity (ROE)	4,23	4,24
Margin Bunga Bersih (NIM) Net Interest Margin (NIM)	4,07	5,58
Beban Operasional Lain terhadap Penghasilan Operasional (BOPO) Other Operating Expenses to Operating Income (BOPO)	90,32	90,11
Liabilitas terhadap Aset Liabilities to Assets	85,59	84,02
Liabilitas terhadap Ekuitas Liabilities to Equity	594,20	525,83
Cost to Income (CIR)	78,64	78,05
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio		
Rasio Intermediasi Makroprudensial Macroprudential Intermediation Ratio	55,26	58,03
Current Account Savings Account (CASA)	34,96	39,50
Rasio Kepatuhan Compliance Ratios		
Persentase Pelanggaran BMPK Percentage Violation of Legal Lending Limit	-	-
Pihak Terkait Related Parties	-	-
Pihak Tidak Terkait Third Parties	-	-
Persentase Pelampauan BMPK Percentage Lending in Excess of the Legal Lending Limit	-	-
GWM Rupiah Reserve Requirement Rupiah	13,03	12,73
GWM Valuta Asing Reserve Requirement Foreign Exchange	4,36	4,96
Posisi Devisa Neto Net Open Position	0,63	0,81

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTABILITAS PIUTANG

Kemampuan Bank dalam memenuhi seluruh kewajiban baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek, dapat diukur melalui beberapa rasio, antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Kemampuan membayar utang juga tercermin dari telah ikutnya Bank sebagai peserta program penjaminan pada Lembaga Penjaminan Simpanan. Rincian penjelasan tentang kemampuan membayar utang Bank adalah sebagai berikut:

Rasio Likuiditas

Bank membukukan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) sebesar 55,26% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 58,03%. Penurunan rasio ini utamanya dipengaruhi oleh kenaikan dana pihak ketiga. Peningkatan dana pihak ketiga didominasi dari peningkatan deposito, sehingga secara rasio CASA pun juga mengalami penurunan menjadi sebesar 34,96% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 39,50%.

Rasio Solvabilitas

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) merupakan parameter untuk mengukur rasio permodalan Bank dengan memastikan kecukupan modal untuk dapat memenuhi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Rasio KPMM mencapai 26,35% pada tahun 2024, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 24,96%.

Rasio Rentabilitas

Rasio *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) Bank tercatat sebesar 0,55% dan 4,23% pada tahun 2024. Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan ROA dan ROE tahun 2023 yang masing-masing sebesar 0,60% dan 4,24%. Bank juga mencatat rasio *Net Interest Margin* (NIM) di tahun 2024 mencapai 4,07%, lebih rendah dibandingkan rasio pada tahun sebelumnya yang sebesar 5,58% yang disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga bersih sebesar Rp72,4 miliar. Kemudian rasio BOPO adalah sebesar 90,32% di tahun 2024 atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 90,11%.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Kolektibilitas piutang Bank diukur menggunakan indikator rasio pinjaman bermasalah (NPL). Sebagaimana terlihat pada peningkatan NPL *Netto* dari 0,31% di tahun 2023 menjadi 0,77% di tahun 2024. Berdasarkan kolektibilitas sesuai peraturan Bank Indonesia, pinjaman yang dikelola Bank dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

DEBT SERVICING ABILITY AND RECEIVABLES COLLECTIBILITY

The Bank's ability to meet all its obligations, both long-term and short-term, is measured through several ratios, including liquidity ratio, solvency ratio, and profitability ratio. The Bank's debt servicing capability is also reflected in its participation in the deposit insurance program administered by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan or LPS). A detailed explanation of the Bank's debt servicing ability is as follows:

Liquidity Ratio

The Bank recorded a Macroprudential Intermediation Ratio (MIR) of 55.26% in 2024, compared to 58.03% in the previous year. This decrease was primarily driven by an increase in third-party funds. The rise in third-party funds was mainly contributed by an increase in time deposits, which also led to a decline in the CASA ratio to 34.96%, down from 39.50% in the previous year.

Solvency Ratio

The Minimum Capital Adequacy Ratio (KPMM) is a parameter used to measure the bank's capital ratio, ensuring that the capital is sufficient to cover credit risk, market risk, and operational risk. The KPMM ratio reached 26.35% in 2024, higher than the previous year's ratio of 24.96%.

Profitability Ratio

In line with the increase in the bank's net income for the year, the Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) ratios for the bank reached 0.55% and 4.23% in 2024. This performance is higher compared to the ROA and ROE ratios for 2023, which were 0.60% and 4.24%, respectively. Meanwhile, the bank's Net Interest Margin (NIM) ratio in 2024 reached 4.07%, lower than the ratio of 5.58% in the previous year. The bank's Cost-to-Income Ratio (BOPO) stood at 90.32% in 2024, higher/lower than the previous year's ratio of 90.11%.

Receivables Collectibility

The collectibility of the bank's receivables is measured using the Non-Performing Loan (NPL) ratio indicator. As seen from the decrease in the Net NPL ratio from 0.31% in 2023 to 0.77% in 2024. Based on collectibility in accordance with Bank Indonesia regulations, the loans managed by the bank are classified as follows:

Kolektibilitas Piutang
Collectability of Receivablesdalam jutaan rupiah
in million rupiah

Uraian Description	2024	2023	Pertumbuhan/(Penurunan) Growth / (Decline)	
			Rp	%
Lancar Current	10.079.461	11.355.419	(1.275.958)	(11,24)
Dalam Perhatian Khusus Under Special Attention	271.916	580.673	(308.757)	(53,17)
Kurang Lancar Substandard	17.103	20.539	(3.436)	(16,73)
Diragukan Doubtful	20.894	12.772	8.122	63,59
Macet Loss	216.105	177.966	38.139	21,43
Jumlah Kredit Total Loans	10.605.479	12.147.369	(1.541.890)	(12,69)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(531.907)	(510.636)	(21.271)	4,17
Jumlah Kredit - Bersih Net Loans	10.073.572	11.636.733	(1.563.161)	(13,43)

STRUKTUR PERMODALAN

Bank Artha Graha Internasional berupaya meningkatkan nilai Bank diantaranya melalui penetapan struktur modal yang optimal. Hal tersebut juga menjadi bagian dalam memenuhi ketentuan OJK mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMN).

Kebijakan Struktur Modal

Kebijakan terkait struktur permodalan bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan bisnis dan ekspansi usaha serta mempertahankan kelangsungan pengembangan bisnis di kemudian hari. Disamping itu, kebijakan permodalan ditetapkan guna memenuhi peraturan mengenai kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan bahwa struktur permodalan Bank telah efisien. Bank Artha Graha Internasional menyusun rencana permodalan berdasarkan kebutuhan kecukupan permodalan sebagaimana yang dipersyaratkan. Rencana permodalan tersebut disusun oleh Direksi sebagai bagian dari Rencana Bisnis Bank untuk kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris.

CAPITAL STRUCTURE

Bank Artha Graha Internasional strives to enhance the Bank's value, among others, by establishing an optimal capital structure. This effort also forms part of the Bank's compliance with the OJK regulation on the Minimum Capital Adequacy Requirement (CAR).

Capital Structure Policy

The policy on capital structure aims to ensure that the Bank maintains a strong capital base to support its business development strategies and expansion plans, as well as to sustain long-term business growth. In addition, the capital policy is designed to comply with regulatory capital adequacy requirements and to ensure that the Bank's capital structure is efficient. Bank Artha Graha Internasional prepares its capital plan based on the capital adequacy requirements as mandated. This capital plan is developed by the Board of Directors as part of the Bank's Business Plan and subsequently approved by the Board of Commissioners.

Berdasarkan ketentuan kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI), Bank Artha Graha Internasional masuk dalam KBMI 1, yaitu bank dengan modal inti di bawah Rp6 triliun. Untuk itu, bank berupaya untuk menambah modal inti yang terencana dengan estimasi yang akurat, sesuai komitmen Pemegang Saham serta dalam mekanisme yang telah sesuai ketentuan.

Rincian Struktur Modal

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, modal Bank terdiri dari:

- **Modal Inti**
Modal inti merupakan modal bank yang terdiri dari Modal Inti Utama (*Common Equity Tier - CET 1*) dan Modal Inti Tambahan (*Additional Tier 1*). Modal inti utama mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclose reserve*). Cadangan tambahan modal terdiri atas faktor penambah (agio, cadangan umum, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan opsi saham) dan faktor pengurang (kerugian komprehensif lainnya dari transaksi aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, dan PPA non produktif). Di akhir tahun 2024, Modal Inti yang dimiliki oleh Bank Artha Graha Internasional adalah sebesar Rp3,59 triliun, naik 0,20% atau bertambah senilai Rp7,19 miliar dibandingkan Modal Inti di tahun 2023 yang sebesar Rp3,58 triliun.
- **Modal Pelengkap (Maksimum 100% dari Modal Inti)**
Modal pelengkap meliputi cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah maksimum 1,25% dari ATMR Risiko Kredit dan Cadangan Tujuan.

Based on the core capital-based bank classification (Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti/KBMI), Bank Artha Graha Internasional falls under KBMI 1, which refers to banks with core capital below Rp6 trillion. Accordingly, the Bank strives to increase its core capital in a well-planned manner with accurate estimates, in line with the commitment of shareholders and through mechanisms that comply with prevailing regulations.

Capital Structure Details

Referring to Bank Indonesia regulations, the Bank's capital consists of:

- **Core Capital**
Core capital refers to the bank's capital comprising Common Equity Tier 1 (CET 1) and Additional Tier 1 capital. Common Equity Tier 1 includes paid-in capital and disclosed reserves. Disclosed reserves consist of positive components (such as share premium, general reserves, retained earnings, current year profit, and stock options) and negative components (such as other comprehensive losses from transactions involving financial assets classified as available-for-sale, shortfall in Allowance for Earning Asset Losses (PPA) compared to the Allowance for Impairment Losses, and PPA for non-earning assets). As of the end of 2024, the Core Capital held by Bank Artha Graha Internasional amounted to IDR3.59 trillion, an increase of 0.20% or IDR7.19 billion compared to the Core Capital in 2023, which stood at Rp 3.58 trillion.
- **Supplementary Capital (Maximum 100% of Core Capital)**
Supplementary capital includes general reserves for PPA on earning assets, which are required to be calculated at a maximum of 1.25% of Risk-Weighted Assets for Credit Risk, as well as Appropriated Reserves.

dalam jutaan rupiah
in million rupiah

Jenis Modal Types of Capital	2024	2023
Modal Inti Core Capital	3.591.911	3.584.721
Modal Pelengkap Supplementary Capital	373.786	363.711
Jumlah Modal Total Capital	3.965.697	3.948.432

**Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**Report on Calculation of Capital Adequacy Requirement as of
December 31, 2024 and 2023dalam jutaan rupiah
in million rupiah

Komponen Modal Capital Components		2024	2023
Komponen Modal Capital Components			
I	Modal Inti (Tier 1) Tier 1 Capital	3.591.911	3.584.721
	Modal Inti Utama (CET1) Common Equity Tier 1 (CET 1)	3.591.911	3.584.721
	1. Modal Disetor 1. Paid-up Capital	2.242.372	2.242.372
	2. Cadangan Tambahan Modal 2. Additional Capital Reserve	1.604.707	1.644.982
	3. Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan 3. Non-controlling interests that can be taken into account	-	-
	4. Faktor Pengurang Modal Inti 4. Tier 1 Capital Deduction Factor	(255.168)	(302.633)
	Modal Inti Tambahan (AT1) Additional Tier 1 Capital (AT1)	-	-
	Modal Pelengkap (Tier 2) Supplementary Capital (Tier 2)	373.786	363.711
	1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2 1. Capital instruments in the form of shares or others that meet the requirements of Tier 2	200.000	200.000
	2. Agio/Disagio	-	-
II	3. Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit) 3. PPKA general reserves on earning assets that must be calculated (at a maximum of 1.25% RWA Credit Risk)	173.786	163.711
	4. Faktor Pengurang Modal Pelengkap 4. Complementary Capital Deduction Factor	-	-
	Total Modal Inti dan Modal Pelengkap Total Core and Supplementary Capital	3.965.697	3.948.432
Aset Tertimbang Menurut Risiko Risk-Weighted Assets			
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk		13.902.911	14.519.135
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Operasional Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk		1.036.269	977.823
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Pasar Risk-weighted Assets (RWA) for Market Risk		105.898	321.312
Total ATMR Total RWA		15.045.078	15.818.270
Rasio KPMM Sesuai Profil Risiko (%) CAR Ratio Based on Risk Profile (%)		9,37	9,39

**Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023***Report on Calculation of Capital Adequacy Requirement as of
December 31, 2024 and 2023*dalam jutaan rupiah
in million rupiah

Komponen Modal Capital Components	2024	2023
Alokasi Pemenuhan Kpmm Sesuai Profil Risiko <i>Allocation of Car Fulfillment According to Risk Profile</i>		
Dari CET 1 (%) <i>From CET 1</i>	4,50	4,50
Dari AT 1 (%) <i>From AT</i>	-	-
Dari Tier 2 (%) <i>From Tier 2</i>	2,48	2,30
Rasio KPMM <i>CAR Ratios</i>		
Rasio CET1 (%) <i>CET1 Ratio</i>	23,87	22,66
Rasio Tier 1 (%) <i>Tier 1 Ratio</i>	23,87	22,66
Rasio Tier 2 (%) <i>Tier 2 Ratio</i>	2,48	2,30
Rasio KPMM (%) <i>CAR Ratio</i>	26,35	24,96
CET 1 untuk BUFFER (%) <i>CET 1 to BUFFER</i>	19,37	18,16
Persentase Buffer yang Wajib Dipenuhi oleh Bank <i>Percentage of Buffer to be Met by the Bank</i>		
Capital Conservation Buffer (%)	-	-
Countercyclical Buffer (%)	-	-
Capital Surcharge for Systemic Banks (%)	-	-

**DAMPAK PERUBAHAN TINGKAT SUKU BUNGA
TERHADAP KINERJA BANK**

Pada tahun 2024, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 6,00%. Seiring dengan bertahannya suku bunga di tahun 2024 tersebut, Bank Artha Graha Internasional memfokuskan upaya pada pertumbuhan dana murah (CASA) dan juga mengurangi dana mahal. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga *cost of fund* menjadi lebih efisien dan memperoleh struktur pendanaan yang lebih baik. Dalam merespons tingginya suku bunga di pasar uang, Bank Artha Graha Internasional juga melakukan penyesuaian suku bunga simpanan namun dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan tingkat suku bunga acuan, kondisi likuiditas Bank dan juga tingkat kompetisi dengan bank-bank lain.

**IMPACT OF INTEREST RATE CHANGES ON THE
BANK'S PERFORMANCE**

In 2024, Bank Indonesia maintained its benchmark interest rate at 6.00%. In line with this, Bank Artha Graha Internasional focused its efforts on growing low-cost funds (CASA) while also reducing high-cost funds. This strategy was implemented to maintain a more efficient cost of funds and secure a better funding structure. In response to the high interest rates in the money market, Bank Artha Graha Internasional also made adjustments to its deposit interest rates, but these were carried out gradually while taking into account the benchmark interest rate, the Bank's liquidity conditions, and the level of competition with other banks.

Suku Bunga Dasar Kredit

Sebagai sebuah bank umum, Bank memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dalam mata uang Rupiah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

SBDK dipakai sebagai pedoman penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada Nasabah. Namun demikian, SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Adapun perbandingan SBDK tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Base Lending Rate

As a commercial bank, the Bank is required to report and publish its Base Lending Rate (SBDK) in Rupiah, as stipulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 37/POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports.

The SBDK serves as a guideline for determining the interest rate to be applied to loans to customers. However, the SBDK does not yet account for the risk premium estimate, the amount of which depends on the Bank's assessment of the risk associated with each debtor or group of debtors. The comparison of the Base Lending Rate for 2024 is as follows:

Periode Period	Kredit Korporasi Corporate Loans	Kredit Ritel Retail Loans	Kredit Mikro Micro Loans	Kredit Konsumsi Consumer Loans	
				KPR	Non KPR
Desember 2023 2023 December	10,49%	10,35%	-	12,12%	15,20%
Maret 2024 2024 March	9,94%	10,69%	-	12,23%	14,96%
Juni 2024 2024 June	10,08%	10,68%	-	12,45%	14,98%
September 2024 2024 September	9,14%	9,32%	-	9,81%	13,06%
Desember 2024 2024 December	9,62%	10,82%	11,35%	9,42%	14,62%

TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF

Bank melakukan transaksi derivatif dalam bentuk pembelian dan penjualan spot dan forward valuta asing. Risiko pasar dari transaksi derivatif timbul dari potensi perubahan nilai akibat fluktuasi kurs mata uang asing, sedangkan risiko kredit timbul dalam hal pihak lain tidak memenuhi kewajibannya pada Bank. Rincian tagihan dan liabilitas derivatif adalah sebagai berikut:

SPOT AND DERIVATIVE TRANSACTIONS

The Bank engages in derivative transactions in the form of foreign exchange spot and forward purchases and sales. Market risk from derivative transactions arises from potential changes in value due to foreign exchange rate fluctuations, while credit risk arises if the counterparty fails to fulfill its obligations to the Bank. The details of derivative receivables and liabilities are as follows:

dalam USD
in USD

Uraian Description	Tagihan Derivatif Derivative Bills		Liabilitas Derivatif Derivative Liabilities	
	2024	2023	2024	2023
Penjualan Forward Forward Selling	48	23	-	948
Pembelian Spot Spot Buying	-	12	-	109
Jumlah Total	48	35	-	1.057

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Bank Artha Graha Internasional tidak melakukan pengikatan dengan pihak manapun terkait investasi barang modal pada tahun 2024. Oleh karena itu, Bank tidak menyajikan informasi terkait tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah yang direncanakan Bank untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Bank merealisasikan investasi barang modal untuk tahun 2024 sebagai berikut:

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL INVESTMENTS

Bank Artha Graha Internasional did not enter into any commitments with any parties related to capital investments in 2024. Therefore, the Bank does not present information regarding the purpose of such commitments, the expected sources of funds to fulfill the commitments, the currency of denomination, or the planned measures by the Bank to mitigate risks related to foreign currency positions.

REALIZATION OF CAPITAL INVESTMENT

The Bank realized capital investment for the year 2024 as follows:

No.	Jenis Barang Modal Capital Goods Type	Tujuan Investasi Investment Objective	2024	2023
1	Tanah Land	Pengembangan Bisnis Bank Bank's Business Development	-	-
2	Inventaris Kantor Office Inventory		17.349	15.043
3	Bangunan Building		4.491	9.963
4	Instalasi Installation		3.117	2.330
Jumlah Total			24.957	27.336

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Bank menyatakan tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. Terkait dengan hal tersebut, Bank tidak menyajikan informasi terkait hal tersebut beserta dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS AFTER THE ACCOUNTANT'S REPORTING DATE

The Bank declares that there were no material information or facts occurring after the accountant's reporting date. Accordingly, the Bank does not present any related information or its potential impact on future performance and business risk.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAN

Bank Artha Graha Internasional dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) telah menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai untuk tahun buku 2024. Perbandingan target yang ditetapkan dengan realisasi tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

COMPARISON BETWEEN TARGETS AND REALIZATION AS WELL AS ONE-YEAR FORWARD PROJECTION

Bank Artha Graha Internasional, in its Bank Business Plan (RBB), set a number of targets to be achieved for the 2024 financial year. The comparison between the established targets and the actual realization for the 2024 financial year is as follows:

Dalam jutaan rupiah
In million rupiah

Uraian Description	Target 2024 2024 Target	Realisasi 2024 2024 Realization	Pencapaian Target (%) Target Achievement (%)	Target 2025 2025 Target
Pendapatan Bunga Interest Income	1.933.173	1.646.064	85,15	1.127.850
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	263.788	152.474	57,80	203.423
Laba per Saham Dasar (angka penuh) Basic Earnings per Share (full amount)	13,04	7,54	57,82	-
Aset Assets	30.219.701	30.126.393	99,69	32.137.682
Kredit Gross Gross Loans	14.082.238	10.605.479	75,31	12.738.859
Dana Pihak Ketiga Third Party Funds	24.539.000	23.890.773	97,36	25.892.773
ROA (%)	0,93	0,55	59,14	0,66
ROE (%)	6,59	4,23	64,19	5,44
NPL Gross (%)	2,02	2,40	84,17	2,14
NPL Net (%)	0,47	0,77	61,04	0,68
RIM (%)	78,40	55,26	70,48	61,82
NIM (%)	4,03	4,07	100,99	3,89
CASA (%)	42,41	34,96	82,43	39,41
BOPO (%)	87,51	90,32	96,89	90,61
CAR (%)	29,89	26,35	88,16	31,70

Dalam jutaan rupiah
In million rupiah

Uraian Description	Target 2024 2024 Target	Realisasi 2024 2024 Realization	Pencapaian Target (%) Target Achievement (%)	Target 2025 2025 Target
Karyawan Employees	1.340	1.279	95,45	1.215
Kantor Cabang Branch Offices	32	32	100,00	-
Kantor Cabang Pembantu (dalam setahun) Sub-Branch Office (in a year)	34	33	97,06	-

Proyeksi Tahun 2025

Memasuki tahun 2025, Bank Artha Graha Internasional telah menetapkan sejumlah target yang tertuang pada Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025. Adapun beberapa target yang ditetapkan Bank tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di atas.

2025 Projections

As 2025 begins, Bank Artha Graha Internasional has set a number of targets as outlined in the Bank's 2025 Business Plan (RBB). Several of the targets established for 2025 can be seen in the table above.

KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Kebijakan Dividen

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Bank, pembagian Dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Bank dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan Aset Bersih Bank kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh serta cadangan wajib. Pembagian dividen interim ditetapkan oleh Direksi setelah disetujui Dewan Komisaris.

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kebijakan dividen ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Bank, serta berpedoman kepada peraturan yang terkait di bidang perbankan. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan yang dilaksanakan tanggal 28 Juni 2024, Pemegang Saham Bank menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen karena pada Tahun Buku 2023 seluruh laba bersih Bank dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan ekspansi usaha Bank.

Terkait dengan hal tersebut, maka Bank tidak menyajikan informasi terkait: tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non-kas; jumlah dividen per saham (kas dan/atau non-kas); dan jumlah dividen per tahun yang dibayar.

DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION

Dividend Policy

In accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the Bank's Articles of Association, dividend distribution is based on the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS). Prior to the end of the financial year, interim dividends may be distributed as long as permitted by the Bank's Articles of Association and such distribution does not result in the Bank's Net Assets falling below the issued and fully paid-up capital plus mandatory reserves. The distribution of interim dividends is determined by the Board of Directors upon approval from the Board of Commissioners.

Through the General Meeting of Shareholders, the Bank's dividend policy is determined by taking into account the Bank's financial condition and level of soundness, and by adhering to applicable banking regulations. Based on the resolution of the Annual GMS held on June 28, 2024, the Bank's Shareholders approved not to distribute dividends, as the entire net profit for the 2023 Fiscal Year was allocated to strengthen the Bank's capital structure and support business expansion.

Accordingly, the Bank does not present any information regarding: the date of cash dividend payment and/or the distribution date of non-cash dividends; the amount of dividend per share (cash and/or non-cash); or the total annual dividend paid.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada tahun 2024, Bank tidak menerbitkan saham ataupun melakukan konversi efek lain. Aksi korporasi terakhir telah dilaksanakan di tahun 2021 terkait pelaksanaan Waran Seri I. Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan sebanyak 4.513.198.013 dengan total pelaksanaan Waran Seri I adalah 4.427.219.858 dengan jumlah Waran Seri I yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 sebanyak 85.978.155. Telah disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 20 Desember 2021 dan tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat No. SR-44/PB.332/2021 tanggal 29 Desember 2021. Dengan demikian, Bank tidak memiliki informasi kewajiban pelaporan penggunaan dana hasil penawaran umum.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Pada Tahun 2024, Bank Artha Graha Internasional tidak mempunyai informasi mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang dan modal, transaksi material, transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Oleh karena itu, Bank tidak menyajikan informasi terkait: tanggal, nilai dan objek transaksi; nama pihak yang melakukan transaksi; sifat hubungan afiliasi (jika ada); penjelasan mengenai kewajiban transaksi; pemenuhan ketentuan terkait; dan dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam kegiatan usaha normal. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Terkait transaksi dengan pihak-pihak berelasi, Bank melaporkan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Bank menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi", yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

REALIZATION OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

In 2024, the Bank did not issue any shares nor conduct any conversion of other securities. The last corporate action was carried out in 2021 in connection with the execution of Series I Warrants. A total of 4,513,198,013 Series I Warrants were issued, with 4,427,219,858 warrants exercised. The number of Series I Warrants not exercised as of December 7, 2021, amounted to 85,978,155. This information was submitted to the Financial Services Authority (OJK) on December 20, 2021, and was recorded in the OJK's supervisory administration based on letter No. SR-44/PB.332/2021 dated December 29, 2021. Accordingly, the Bank does not have any reporting obligations regarding the use of proceeds from a public offering.

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

In 2024, Bank Artha Graha Internasional did not engage in any activities related to investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, debt or capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, or conflict-of-interest transactions. Accordingly, the Bank does not present any information related to the date, value, and object of such transactions; the name of the transacting party; the nature of any affiliated relationship (if applicable); an explanation of the fairness of the transaction; compliance with relevant regulations; or, in the case of an affiliated relationship, disclosures beyond those mentioned.

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED/RELATED PARTIES

The Bank engages in transactions with related parties in the normal course of business. Transactions with related parties are conducted under terms and conditions similar to those prevailing in transactions with third parties. With respect to transactions with related parties, the Bank reports that there were no transactions containing conflicts of interest.

The Bank applies PSAK No. 7 (Revised 2015) on "Related Party Disclosures", which requires the disclosure of relationships, transactions, and outstanding balances with related parties, including commitments, in the financial statements.

Pihak-pihak berelasi tersebut terdiri dari:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat memiliki relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; dan
 - c. Personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk dan yang terkait dengan entitas lain);
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. Entitas tersebut adalah program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (1); dan
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Nama dan Sifat Hubungan Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau pengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Bank adalah sebagai berikut:

The related parties consist of:

1. *A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:*
 - a. *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - b. *Has significant influence over the reporting entity; and*
 - c. *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
2. *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - a. *The entity and the reporting entity are members of the same group (i.e., each parent, subsidiary, and fellow subsidiary is related to the others);*
 - b. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a group to which the other entity belongs);*
 - c. *Both entities are joint ventures of the same third party;*
 - d. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
 - e. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, then the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
 - f. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in item (1); and*
 - g. *A person identified in item (a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*

Name and Nature of Related Party Relationships

Related parties refer to companies and individuals that have ownership or management relationships, either directly or indirectly, with the Bank. The related parties are as follows:

Nama Pihak Berelasi Name of Related Party	Sifat Pihak Berelasi Name of Related Party	Jenis Transaksi Type of Transaction
PT Buanagraha Arthaprima	Memiliki kesamaan pemegang saham Has same shareholders	BOT, giro dan deposito berjangka BOT, Demand Deposits, and Time Deposits
PT Cerana Arthaputra	Pemegang Saham Bank Bank Shareholders	Jaminan Perusahaan dan giro Corporate Guarantee and Demand Deposits
PT Karya Nusantara Permai	Pemegang Saham Bank Bank Shareholders	Jaminan Perusahaan dan giro Corporate Guarantee and Demand Deposits
PT Pirus Platinum Murni	Pemegang Saham Bank Bank Shareholders	Jaminan Perusahaan dan giro Corporate Guarantee and Demand Deposits
PT Cakra Inti Utama	Pemegang Saham Bank Bank Shareholders	Giro dan deposito berjangka Demand Deposits and Time Deposits
PT Puspita Bisnisपुरी	Pemegang Saham Bank Bank Shareholders	Jaminan Perusahaan dan giro Corporate Guarantee and Demand Deposits
PT Arthamulia Sentosajaya	Pemegang Saham Bank Bank Shareholders	Jaminan Perusahaan dan Giro Corporate Guarantee and Demand Deposits
PT Andana Utamagraha	Afiliasi Affiliate	Giro Demand Deposits
PT Electronic City Indonesia Tbk	Afiliasi Affiliate	Giro dan Deposito Berjangka Demand Deposits and Time Deposits
PT Erajaya Swasembada Tbk	Afiliasi Affiliate	Giro Demand Deposits
PT Jakarta Internasional Hotels & Development Tbk	Afiliasi Affiliate	Giro Demand Deposits
PT Karya Megah Permai	Afiliasi Affiliate	Giro Demand Deposits
PT Makmur Jaya Serasi	Afiliasi Affiliate	Giro dan Deposito Berjangka Demand Deposits and Time Deposits
PT Tunas Satya Prakarsa	Afiliasi Affiliate	Giro dan Deposito Berjangka Demand Deposits and Time Deposits
PT Grahaputra Sentosa	Afiliasi Affiliate	Giro Demand Deposits
PT Artha Telekomindo	Afiliasi Affiliate	Giro dan Deposito Berjangka Demand Deposits and Time Deposits
PT Danayasa Arthatama	Afiliasi Affiliate	Giro Demand Deposits
PT Agung Sedayu	Afiliasi Affiliate	Giro dan Deposito Berjangka Demand Deposits and Time Deposits
PT Agung Sedayu Permai	Afiliasi Affiliate	Giro dan Deposito Berjangka Demand Deposits and Time Deposits
PT Multi Artha Pratama	Afiliasi Affiliate	Giro dan Deposito Berjangka Demand Deposits and Time Deposits

Nama Pihak Berelasi <i>Name of Related Party</i>	Sifat Pihak Berelasi <i>Name of Related Party</i>	Jenis Transaksi <i>Type of Transaction</i>
PT Global Persada Inti	Afiliasi <i>Affiliate</i>	Giro dan Deposito Berjangka <i>Demand Deposits and Time Deposits</i>
PT Artha Propertindo Indonesia	Afiliasi <i>Affiliate</i>	Giro <i>Demand Deposits</i>
PT Adinusa Puripratama	Afiliasi <i>Affiliate</i>	Giro <i>Demand Deposits</i>
PT Harapan Sinar Sejahtera	Afiliasi <i>Affiliate</i>	Giro <i>Demand Deposits</i>
PT Catur Kusuma Abadi Sejahtera	Afiliasi <i>Affiliate</i>	Giro dan Deposito Berjangka <i>Demand Deposits and Time Deposits</i>
PT Gemilang Inti Persada	Afiliasi <i>Affiliate</i>	Giro <i>Demand Deposits</i>
PT Artha Graha Network	Afiliasi <i>Affiliate</i>	Giro <i>Demand Deposits</i>
PT Detik Amita Sakti	Afiliasi <i>Affiliate</i>	Giro <i>Demand Deposits</i>
PT Lava Pratama Indonesia	Afiliasi <i>Affiliate</i>	Giro <i>Demand Deposits</i>
PT Lentera Dusatu Propertindo	Afiliasi <i>Affiliate</i>	Giro <i>Demand Deposits</i>
PT Kharisma Arya Paksi	Afiliasi <i>Affiliate</i>	Giro dan Deposito Berjangka <i>Demand Deposits and Time Deposits</i>
PT Kresna Aji Sembada	Afiliasi <i>Affiliate</i>	Giro <i>Demand Deposits</i>
PT Artha Graha General Insurance	Afiliasi <i>Affiliate</i>	Giro dan Deposito Berjangka <i>Demand Deposits and Time Deposits</i>
PT Bangun Kosambi Sukses	Afiliasi <i>Affiliate</i>	Giro <i>Demand Deposits</i>
PT Pantai Indah Kapuk Dua	Afiliasi <i>Affiliate</i>	Giro <i>Demand Deposits</i>
Yayasan Buddha Tzu Chi	Afiliasi <i>Affiliate</i>	Giro dan Deposito Berjangka <i>Demand Deposits and Time Deposits</i>
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat <i>Board of Commissioners, Board of Directors, Officials</i>	Manajemen dan Karyawan Kunci <i>Management and Key Employees</i>	Giro, Tabungan dan Deposito Berjangka <i>Demand Deposits, Savings, Time Deposits</i>

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi*Realization of Related Party Transactions*dalam jutaan rupiah
in million rupiah

Uraian <i>Description</i>	2024	2023
Laporan Posisi Keuangan <i>Statement of Financial Position</i>		
Kredit yang Diberikan - Bersih <i>Loans - Net</i>	326.814	311.120
Persentase dari Total Kredit yang Diberikan (%) <i>Percentage of Total Loans (%)</i>	3,08	2,56
Persentase dari Total Aset (%) <i>Percentage of Total Assets (%)</i>	1,08	1,19
Simpanan Nasabah <i>Customer Deposits</i>	1.179.864	1.219.579
Persentase dari Total Simpanan Nasabah (%) <i>Percentage of Total Customer Deposits (%)</i>	4,94	5,91
Persentase dari Total Liabilitas (%) <i>Percentage of Total Liabilities (%)</i>	4,57	5,56
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>		
Pendapatan Bunga <i>Interest Income</i>	18.119	15.342
Persentase dari Jumlah Pendapatan Bunga (%) <i>Percentage of Total Interest Expense (%)</i>	1,10	1,03
Beban Bunga <i>Interest Expenses</i>	30.723	15.422
Persentase dari Jumlah Beban Bunga (%) <i>Percentage of Total Interest Expense (%)</i>	4,17	3,07
Beban Manajemen Kunci <i>Key Management Expenses</i>	37.036	37.126
Persentase dari Jumlah Beban Tenaga Kerja (%) <i>Percentage of Total Labor Expenses (%)</i>	12,90	13,26
Beban Sewa <i>Rent Expense</i>	22.059	24.187
Persentase dari Jumlah Beban Operasi (%) <i>Percentage of Total Operating Expenses (%)</i>	4,03	4,1

Kewajaran dan Alasan Dilakukan Transaksi

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan secara wajar sejalan dengan kepentingan Bank. Seluruh transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan atas kebutuhan usaha Bank demi meningkatkan kinerja Bank.

Fairness and Reason for the Transaction

Transactions with related parties are conducted fairly in line with the Bank's interests. All transactions with related parties are based on the Bank's business needs to improve its performance.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Dalam melaksanakan transaksi dengan pihak berelasi, Bank mengacu pada peraturan yang berlaku sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum; dan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Compliance with Relevant Regulations and Provisions

In conducting transactions with related parties, the Bank adheres to the following applicable regulations:

1. Bank Indonesia Regulation No. 8/13/PBI/2006 regarding Amendments to PBI No. 7/3/PBI/2005 on the Maximum Limit of Credit Extension by Commercial Banks;
2. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 15/POJK.03/2018 regarding the Maximum Limit of Credit or Maximum Fund Allocation by Banks to Support the Growth of the Tourism Sector and Increase Foreign Exchange;
3. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 32/POJK.03/2018 regarding the Maximum Limit of Credit and Large Fund Provision for Commercial Banks;
4. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 38/POJK.03/2019 regarding Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.03/2018 on the Maximum Limit of Credit and Large Fund Provision for Commercial Banks; and
5. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliate Transactions and Conflicts of Interest Transactions.

Komitmen dan Kontinjensi

Commitments and Contingencies

dalam jutaan rupiah
in million rupiah

Uraian Description	2024	2023
Tagihan Komitmen Commitment Receivables		
Pembelian Spot dan Forward Valuta Asing Purchases of Foreign Exchange Spot and Forward	222.895	421.161
Liabilitas Komitmen Commitment Liabilities		
Fasilitas Kredit kepada Debitur yang Belum Digunakan Unused Credit Facilities to Debtors	(973.904)	(466.698)
Irrevocable L/C yang Masih Berjalan Outstanding Irrevocable Letters of Credit	(37.688)	-
Penjualan Spot dan Forward Valuta Asing Sale of Foreign Exchange Spot and Forward	(23.689)	(208.905)
Lainnya Others	(6.592)	-
Komitmen - Bersih Commitment - Net	(818.978)	(254.442)

Komitmen dan Kontinjensi

Commitments and Contingencies

dalam jutaan rupiah
in million rupiah

Uraian Description	2024	2023
Tagihan Kontinjensi Contingent Receivables		
Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian Interest Income in Process of Settlement	6.178	6.178
Liabilitas Kontinjensi Contingent Payables		
Garansi yang Diterbitkan Guarantees Issued	(19.227)	(24.759)
Setoran Titipan Deposits	(113.497)	(104.691)
Lain-Lain Others	(164.873)	(156.692)
Kontinjensi - Bersih Contingent - Net	(291.419)	(279.964)
Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi - Bersih Commitment and Contingent Liabilities - Net	(1.110.397)	(534.406)

LARANGAN, BATASAN DAN/ATAU HAMBATAN SIGNIFIKAN UNTUK MELAKUKAN TRANSFER DANA ANTARA BANK DAN ENTITAS LAIN DALAM SUATU KELOMPOK USAHA

Bank tidak memiliki pembatasan dalam prosedur operasional terkait transfer dana Nasabah, baik dalam bentuk transfer masuk maupun transfer keluar antara Bank dan entitas lain dalam satu kelompok usahanya. Dalam pelaksanaan Bank tetap mensyaratkan kelengkapan dokumen pendukung dari Nasabah sebelum melakukan pengaksepahan Perintah Transfer Dana atas transaksi Lalu Lintas Devisa (LLD) berupa transfer dana keluar dalam bentuk valuta asing dengan nilai setara di atas USD100.000,00 (seratus ribu dollar Amerika Serikat), Nasabah harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank, sebagaimana dipersyaratkan di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 21/15/PBI/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah.

PROHIBITIONS, RESTRICTIONS, AND/OR SIGNIFICANT IMPEDIMENTS TO FUND TRANSFERS BETWEEN THE BANK AND OTHER ENTITIES WITHIN A BUSINESS GROUP

The Bank does not have any operational restrictions regarding customer fund transfers, whether inbound or outbound, between the Bank and other entities within the same business group. However, in the execution of these transactions, the Bank requires complete supporting documentation from the customer before accepting a Fund Transfer Order for Foreign Exchange Traffic (FET) transactions, specifically for outbound foreign currency transfers with an equivalent value exceeding USD100,000.00 (one hundred thousand United States dollar). The customer must provide the required supporting documents to the Bank, as stipulated in Bank Indonesia Regulation No. 21/15/PBI/2019 dated December 9, 2019, concerning the Monitoring of Foreign Exchange Traffic Activities by Banks and Customers.

TRANSAKSI-TRANSAKSI PENTING LAINNYA DALAM JUMLAH YANG SIGNIFIKAN

Bank Artha Graha Internasional tidak melaksanakan transaksi-transaksi penting lainnya dalam jumlah yang signifikan pada tahun 2024.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN PADA TAHUN 2024

Bank melakukan kajian terhadap peraturan baru maupun amendemen dari peraturan yang telah ada sebelumnya untuk mengidentifikasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari perubahan ketentuan tersebut dan kepatuhan Bank terhadap peraturan tersebut. Penjelasan tentang peraturan dan perubahannya yang efektif berlaku di sepanjang tahun 2024 dan dampaknya terhadap kinerja Bank adalah sebagai berikut:

OTHER SIGNIFICANT TRANSACTIONS

Bank Artha Graha Internasional did not engage in any other significant transactions in 2024.

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS AND THEIR IMPACT ON THE COMPANY IN 2024

The Bank conducts reviews of new regulations as well as amendments to existing regulations in order to identify any potential impacts arising from these changes and to ensure the Bank's compliance with the applicable provisions. The following is an overview of the regulations and amendments that became effective during 2024 and their impact on the Bank's performance:

No.	Nama Peraturan Perundang-undangan <i>Laws and Regulations</i>	Penjelasan <i>Explanation</i>	Pengaruh Terhadap Bank <i>Impact on the Bank</i>
1	- UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. - UU No. 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan & Penguatan Sektor Keuangan. - POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. - POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. <i>Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation;</i> <i>Law No. 4 of 2022 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector;</i> <i>OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 concerning the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks;</i> <i>OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.</i>	- Penambahan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. - Penambahan ketentuan UU No. 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan & Penguatan Sektor Keuangan. - Penambahan ketentuan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. - Penambahan ketentuan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. <i>Inclusion of provisions from Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation.</i> <i>Inclusion of provisions from Law No. 4 of 2022 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector.</i> <i>Inclusion of provisions from Regulation No. 45/POJK.03/2015 concerning the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks.</i> <i>Inclusion of provisions from OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.</i>	Telah dilakukan penyesuaian PKP No. 0024.03.0 tanggal 28 Desember 2023 Perihal: Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / Good Corporate Governance (GCG). <i>An adjustment has been made to PKP No. 0024.03.0 dated December 28, 2023, regarding: Good Corporate Governance (GCG).</i>

No.	Nama Peraturan Perundang-undangan <i>Laws and Regulations</i>	Penjelasan <i>Explanation</i>	Pengaruh Terhadap Bank <i>Impact on the Bank</i>
2	POJK No. 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum. <i>POJK Regulation No. 21 of 2023 concerning Digital Services by Commercial Banks.</i>	Penyesuaian dasar hukumnya yaitu POJK No. 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum. <i>The legal basis was adjusted in accordance with OJK Regulation No. 21 of 2023 concerning Digital Services by Commercial Banks.</i>	Telah dilakukan penyesuaian PAP No. 140101.03.0 tanggal 10 September 2024 Perihal: Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. <i>An adjustment has been made to PAP No. 140101.03.0 dated September 10, 2024, regarding: The Provision of Digital Banking Services by Commercial Banks.</i>
3	- POJK No. 33/POJK.04/2017 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. - SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. - OJK Regulation No. 33/POJK.04/2017 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. - OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.	- Penambahan ketentuan POJK No. 33/POJK.03/2017 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. - Penambahan ketentuan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. - Penyesuaian ketentuan terkait Ketentuan Umum Persyaratan Etika. - Penyesuaian ketentuan terkait Struktur Organisasi Direksi. - Penyesuaian ketentuan terkait Prosedur dan Mekanisme Kerja. - Inclusion of provisions from OJK Regulation No. 33/POJK.03/2017 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; - Inclusion of provisions from OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks; - Adjustment of provisions related to General Ethical Requirements; - Adjustment of provisions related to the Organizational Structure of the Board of Directors; - Adjustment of provisions related to Work Procedures and Mechanisms	Telah dilakukan penyesuaian PKP No. 0027.04.0 tanggal 28 Desember 2023 Perihal: Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. <i>An adjustment has been made to PKP No. 0027.04.0 dated December 28, 2023, concerning: Guidelines and Code of Conduct for the Board of Directors.</i>

No.	Nama Peraturan Perundang-undangan <i>Laws and Regulations</i>	Penjelasan <i>Explanation</i>	Pengaruh Terhadap Bank <i>Impact on the Bank</i>
4	- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. - UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. - UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. - POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. - SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank. - POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. - SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. <i>Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.</i> <i>Law No. 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.</i> <i>Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector.</i> <i>OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 concerning the Assessment of Competence and Suitability of Key Parties in Financial Services Institutions.</i> <i>OJK Circular Letter No. 39/SEOJK.03/2016 concerning the Assessment of Competence and Suitability for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Board Members, and Prospective Commissioners of Banks.</i> <i>OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.</i> <i>OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.</i>	- Penambahan ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. - UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. - UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. - POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. - SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank. - POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. - SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. - Penyesuaian ketentuan umum terkait Persyaratan dan Etika. - Penyesuaian ketentuan terkait Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. <i>Inclusion of provisions from Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.</i> <i>Law No. 6 of 2023 concerning the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.</i> <i>Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector.</i> <i>OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 concerning the Assessment of the Competence and Suitability of Key Parties in Financial Services Institutions.</i> <i>OJK Circular Letter No. 39/SEOJK.03/2016 concerning the Assessment of Competence and Suitability for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Board Members, and Prospective Commissioners of Banks.</i> <i>OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.</i> <i>OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.</i> <i>Adjustment of general provisions related to Ethical Requirements.</i> <i>Adjustment of provisions concerning the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners</i>	Telah dilakukan penyesuaian PKP No. 0006.05.0 tanggal 28 Desember 2023 Perihal: Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. <i>An adjustment has been made to PKP No. 0006.05.0 dated December 28, 2023, concerning: Guidelines and Code of Conduct for the Board of Commissioners.</i>

No.	Nama Peraturan Perundang-undangan <i>Laws and Regulations</i>	Penjelasan <i>Explanation</i>	Pengaruh Terhadap Bank <i>Impact on the Bank</i>
5	POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. <i>OJK Regulation No. 37/POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports.</i>	- Penyesuaian dasar hukumnya menjadi POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. - Perubahan narasi dengan penambahan laporan keberlanjutan. <i>Adjustment of the legal basis to OJK Regulation No. 37/POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports.</i> <i>Revision of the narrative with the inclusion of a sustainability report.</i>	Telah dilakukan penyesuaian PKP No. 0015.03.0 tanggal 20 Juni 2024 Perihal: Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. <i>An adjustment has been made to PKP No. 0015.03.0 dated June 20, 2024, concerning: Annual Report and Sustainability Report.</i>
6	- POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. - POJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. <i>OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.</i> <i>OJK Regulation No. 9/POJK.04/2018 concerning the Acquisition of Public Companies.</i>	Penyesuaian dasar hukumnya yaitu 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan POJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. <i>The legal basis adjustments are Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Business Activity Changes, and POJK No. 9/POJK.04/2018 concerning the Acquisition of Public Companies.</i>	Telah dilakukan penyesuaian PKP No. 001.03.0 tanggal 20 Juni 2024 Perihal: Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan Transaksi Afiliasi. <i>An adjustment has been made to PKP No. 001.03.0 dated June 20, 2024, concerning: Guidelines for Handling Conflicts of Interest and Affiliated Transactions.</i>
7	- POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. - POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. <i>OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS) for Public Companies.</i> <i>OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.</i>	- Penyesuaian dasar hukumnya yaitu POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. - Perubahan narasi serta penambahan pada ketentuan terkait pelaksanaan RUPS. <i>Adjustment of the legal basis to OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS) for Public Companies.</i> <i>Revision of the narrative and the addition of provisions related to the implementation of the GMS.</i>	Telah dilakukan penyesuaian PKP No. 0026.04.0 tanggal 15 Juni 2024 Perihal: Prosedur Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. <i>An adjustment has been made to PKP No. 0026.04.0 dated June 15, 2024, concerning: Procedures for the Implementation of the General Meeting of Shareholders.</i>
8	SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. <i>OJK Circular Letter No. 40/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks.</i>	Penambahan ketentuan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. <i>Inclusion of provisions from OJK Circular Letter No. 40/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks and OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.</i>	Telah dilakukan penyesuaian PKP No.0033.03.1 tanggal 20 Juni 2024 Perihal: Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi PT BAGI, Tbk. <i>An adjustment has been made to PKP No. 0033.03.1 dated June 20, 2024, concerning: The Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for PT BAGI Tbk.</i>

No.	Nama Peraturan Perundang-undangan Laws and Regulations	Penjelasan Explanation	Pengaruh Terhadap Bank Impact on the Bank
9	POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. <i>OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.</i>	Penambahan ketentuan POJK No 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. <i>Inclusion of provisions from OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.</i>	Telah dilakukan penyesuaian PKP No. 0026.04.0 tanggal 15 Juni 2024 Perihal: Prosedur Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. <i>An adjustment has been made to PKP No. 0026.04.0 dated June 15, 2024, concerning: Procedures for the Implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS).</i>
10	- POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. - SEOJK No. 34/SEOJK.03/2021 tentang Buku Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Umum Konvensional (BUK). <i>OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.</i> <i>OJK Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2021 concerning the Accounting Manual for Conventional Commercial Banks (BUK).</i>	- Penambahan ketentuan POJK No 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. - Penambahan ketentuan SEOJK No. 34/SEOJK.03/2021 tentang Buku Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Umum Konvensional (BUK). <i>Inclusion of provisions from OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.</i> <i>Inclusion of provisions from OJK Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2021 concerning the Accounting Manual for Conventional Commercial Banks (BUK).</i>	Telah dilakukan penyesuaian PKP No. 0019.02.0 tanggal 20 Juni 2024 Perihal: Dividen. <i>An adjustment has been made to PKP No. 0019.02.0 dated June 20, 2024, concerning: Dividends.</i>

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Terdapat sejumlah revisi dan amandemen PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - IAI yang relevan untuk Bank, yang berlaku efektif untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2024:

- Amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material;
- Amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;
- Amandemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensifkan;
- Amandemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;
- Amandemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan

CHANGE IN ACCOUNTING POLICY

There have been a number of revisions and amendments to PSAK and ISAK issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) - IAI that are relevant to the Bank and effective for financial statements as of December 31, 2024:

- Amendment to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" regarding the disclosure of accounting policies, which changes the term "significant" to "material" and provides clarification on material accounting policies;
- Amendment to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" regarding the classification of liabilities;
- Amendment to PSAK 16: "Property, Plant, and Equipment" regarding proceeds before intended use;
- Amendment to PSAK 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" concerning the definition of "accounting estimates" and its explanation;
- Amendment to PSAK 46: "Income Taxes" regarding deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction.

6. PSAK No. 109 yang sebelumnya PSAK 71: “Instrumen Keuangan” tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan, termasuk klasifikasi, pengukuran, penurunan nilai dan akuntansi lindung nilai.

Saat ini, Bank sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari PSAK yang dikeluarkan dan direvisi tersebut terhadap laporan keuangannya.

TINGKAT KESEHATAN BANK

Bank melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap Tingkat Kesehatan Bank setiap semester yang berpedoman pada Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian meliputi faktor Profil Risiko (*Risk Profile*), Tata Kelola (*Good Corporate Governance*), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*) untuk menghasilkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank.

Hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) Bank terhadap Tingkat Kesehatan Bank pada akhir tahun 2024 memperoleh peringkat komposit “Sehat” atau PK-2. Hal ini mencerminkan bahwa “Kondisi Bank yang secara umum Sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan”.

6. PSAK No. 109, previously PSAK 71: “Financial Instruments,” regarding the recognition, measurement, presentation, and disclosure of financial instruments, including classification, measurement, impairment, and hedge accounting.

Currently, the Bank is evaluating and has not yet determined the impact of the issued and revised PSAK on its financial statements.

BANK SOUNDNESS LEVEL

The Bank conducts a self-assessment of its Bank Soundness Level every semester, based on the provisions of OJK Regulation No. 4/POJK.03/2016 concerning the Assessment of Commercial Bank Soundness Level using a Risk-Based Bank Rating (RBBR) approach. The assessment covers the following factors: Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital, to determine a composite rating of the Bank’s soundness level.

Based on the Bank’s self-assessment at the end of 2024, the Bank obtained a composite rating of “Sound” or PK-2. This reflects that “The Bank is generally in a sound condition and is considered capable of withstanding significant negative impacts from changes in business conditions and other external factors, as indicated by the assessment factors, including risk profile, governance implementation, earnings, and capital, which are generally good. In the event of any weaknesses, such weaknesses are generally not significant.”

Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Review

HUMAN CAPITAL

Strategi Pengembangan Human Capital

Untuk mewujudkan salah satu butir misi-nya, yaitu “Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdedikasi”, Bank Artha Graha Internasional terus menjalankan program kerja pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada jangka pendek dan menengah, yang program maupun pelaksanaannya diselaraskan dengan Rencana Bisnis Bank dan Rencana Jangka Panjang Bank.

Bank Artha Graha Internasional memiliki tujuan besar yaitu Bank mampu menarik dan mempertahankan talenta terbaik Indonesia yang memiliki kapabilitas unggul dengan tingkat produktivitas yang tinggi untuk mencapai tujuan strategis dan target bisnis Bank.

Program-program pengembangan *Human Capital* (bukan program pelatihan) yang dijalankan tahun 2024, adalah Regenerasi dan *Engagement*.

Realisasi Pengembangan Human Capital 2024

Selama periode tahun 2024, Direktorat *Human Capital* telah melaksanakan sejumlah inisiatif dan program kerja sesuai dengan target atau rencana pengembangan *Human Capital* yang telah ditetapkan oleh Bank untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1. *Re-arrange Organization*
Akuisisi dan penempatan karyawan sesuai dengan kompetensinya sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai. Dilakukan perampingan jumlah *human capital* untuk mendukung model bisnis.
2. *Shaping the New Future*
Untuk mencapai hasil yang lebih baik dimasa depan dan regenerasi pejabat dilakukan pencarian kandidat baru calon pejabat baik secara internal maupun *prohire*. Mengembangkan kompetensi karyawan dengan cara memberikan pelatihan, memberikan *coaching* dan *mentoring* serta mempertahankan kader yang dimiliki (lulusan peserta program).
3. *Empowering Human Capital*
Melakukan penyusunan kompetensi sesuai dengan spesifikasi jabatannya.
4. *Regeneration & Engagement*
Pemberian reward dan insentif kepada karyawan/Cabang yang berhasil mencapai target.

HUMAN CAPITAL

Human Capital Development Strategy

To actualize one of its mission points, namely “Developing reliable and dedicated human resources”, Bank Artha Graha Internasional continues to carry out Human Capital development work programs in the short and medium term in line with the Bank’s Business Plan and Long-term Plan.

Bank Artha Graha International’s main objective is to draw in and keep Indonesia’s top talents, who have outstanding competencies and high productivity levels, in order to accomplish the strategic goals and business goal of the bank.

The Human Capital development programs (excluding training programs) implemented in 2024 are Regeneration and Engagement.

Realization of Human Capital Development in 2024

In 2024, the Human Capital Directorate has implemented a number of initiatives and work programs in accordance with the Human Capital development targets or plans set by the Bank for 2024 as follows:

1. *Re-arrange Organization*
The acquisition and placement of employees are carried out according to their competencies to ensure that the set targets can be achieved. A downsizing of human capital is also conducted to support the business model.
2. *Shaping the New Future*
To achieve better outcomes in the future and ensure leadership regeneration, new candidates for leadership positions are sought both internally and through professional hiring. Employee competencies are developed through training, coaching, and mentoring, while retaining existing talent (graduates of internal development programs).
3. *Empowering Human Capital*
Preparing competencies according to job specifications.
4. *Regeneration & Engagement*
Providing rewards and incentives to employees or branches that successfully achieve their targets.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN MANAJEMEN HUMAN CAPITAL

Rekrutmen

Bank memiliki berbagai *channel* rekrutmen yang memberikan kesempatan bagi berbagai lapisan masyarakat untuk bergabung bersama Bank Artha Graha Internasional. Pelaksanaan rekrutmen karyawan tahun 2024 dilakukan melalui berbagai *channel* rekrutmen dari eksternal maupun internal untuk memastikan pemenuhan karyawan di unit kerja sesuai dengan kebutuhan jumlah maupun kapabilitas. Pelaksanaan rekrutmen di Bank telah menerapkan kesetaraan gender dan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Sepanjang tahun 2024, Bank telah melakukan rekrutmen sebanyak 214 orang karyawan baru untuk berbagai posisi.

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja karyawan Bank Artha Graha Internasional dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, setiap 2 (dua) kali dalam setahun. Penilaian kinerja karyawan Bank dilakukan metode *Performance Management* yang dilakukan secara objektif dengan berlandaskan pada indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil penilaian kinerja (*Performance Management Evaluation*) yang akan dikombinasikan dengan pemenuhan kompetensi teknis Karyawan dengan menggunakan metode *Nine Grids* ini akan menjadi dasar untuk promosi, jenjang karier Karyawan dan pemberian *reward and recognition*.

Sebagai indikator yang dapat diukur dalam *Performance Management* tersebut adalah:

1. Key Performance Indicator (KPI)

A. Pilar A (Karakter)

a) Dasar:

1. Kesetiaan;
2. Kejujuran/Integritas;
3. Kedisiplinan;
4. Tanggung jawab;
5. Konsistensi;
6. Penguasaan pekerjaan;
7. Kepekaan Sosial; dan
8. Toleransi keberagaman

b) Manajerial:

1. Kemampuan memecahkan masalah;
2. Perencanaan kerja;
3. Inisiatif;
4. *Leadership*;
5. *Negotiation skills*; dan
6. *Communication skills*.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT POLICY AND IMPLEMENTATION

Recruitment

Bank Artha Graha Internasional offers possibilities for people from different social strata to apply through a variety of recruitment methods. In 2024, hiring new employees was conducted through a variety of internal and external recruitment channels in order to guarantee that the work unit is staffed with enough people to meet its capacity and number of needs. In the process of hiring, the Bank included possibilities for gender equality and people with impairments. Throughout 2024, the Bank recruited a total of 214 new employees for various positions

Performance Appraisal

Bank Artha Graha Internasional's employee performance appraisal is conducted consistently and continuously, twice a year. The performance assessment of the Bank's employees is carried out by the Performance Management method which is carried out objectively based on predetermined indicators.

The results of performance management evaluation which will be combined with the fulfillment of technical competencies of employees using the *Nine Grids* method will be the basis for promotions, career paths of employees and the provision of rewards and recognition.

The indicators that can be measured in Performance Management are:

1. Key Performance Indicator (KPI)

A. Pillar A (Character)

a) Basis:

1. Loyalty;
2. Honesty/Integrity;
3. Discipline;
4. Responsibility;
5. Consistency;
6. Job mastery;
7. Social sensitivity; and
8. Tolerance of diversity.

b) Managerial:

1. Problem solving ability;
2. Work planning;
3. Initiative;
4. Leadership;
5. Negotiation skills;
6. Communication skills;

- B. Pilar B (Kinerja):
- a) Financial Performance;
 - b) Customer Franchise;
 - c) Internal Process; dan
 - d) People & Development.

- C. Pilar C (Credit Penalty)

Pengembangan Karier

Pengembangan karier merupakan salah satu strategi untuk mempersiapkan, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang bertalenta. Bank memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan di setiap level organisasi untuk dapat mengembangkan kariernya di Bank sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.

Bank telah menerapkan kebijakan pengembangan karier sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran SDM No. 003.02.0 tentang Ketentuan Promosi dan Demosi. Pengembangan karier ini dilakukan karena hal tersebut memengaruhi tingkat kepuasan Karyawan. Oleh karena itu, Bank memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada seluruh Karyawan untuk mengembangkan karier berdasarkan kompetensi dan kebutuhan. Bank Artha Graha Internasional telah melaksanakan pengembangan karier bagi 510 karyawan dengan berbagai posisi di sepanjang tahun 2024.

Pengembangan Kompetensi

Seluruh karyawan Bank memiliki hak yang sama untuk mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi guna mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas kerja. Melalui program tersebut, setiap karyawan dibekali berbagai materi yang berkaitan dengan dinamika industri perbankan, seperti pertumbuhan bisnis, layanan dan produk baru, pengembangan produk digital, serta penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank.

Agar pelaksanaannya lebih terarah dan tepat sasaran, Bank telah menyusun 4 (empat) jenis kegiatan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

- 1. Pelatihan Operasional**
Memberikan/meningkatkan pengetahuan serta keterampilan para peserta terkait pengelolaan operasional perbankan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya;
- 2. Pelatihan Kredit**
Membekali/meningkatkan pengetahuan serta keterampilan para peserta terkait pengelolaan kredit & marketing;

- B. *Pillar B (Performance):*
- a) Financial Performance;*
 - b) Customer Franchise;*
 - c) Internal Process;*
 - d) People & Development;*

- C. *Pillar C (Credit Penalty)*

Career Development

Career development is one of the methods to prepare, develop, and retain talented workers. The Bank provides equal chances to all employees at every level of the organization to be able to develop their careers in the Bank in accordance with their talents and competences.

The Bank has implemented a career development policy as stipulated in HR Circular Letter No. 003.02.0 regarding Promotion and Demotion Provisions. This career development is implemented as it affects the level of Employee satisfaction. Therefore, the Bank provides equal opportunities to all Employees to develop their careers based on competencies and needs. Bank Artha Graha Internasional implemented career development for 510 employees with various positions throughout 2024.

Competency Development

All employees of the Bank have the same rights to participate in various competency development programs to encourage the improvement of work quality and productivity. Through these programs, each employee is equipped with various materials related to the dynamics of the banking industry, such as business growth, new services and products, digital product development, as well as the implementation of risk management and Bank governance.

In order to ensure that the implementation is more focused and targeted, the Bank has organized 4 (four) types of competency development activities as follows.

- 1. Operational Training**
To provide or to improve participants' knowledge and abilities in the area of managing banking operations in order to enhance their performance.
- 2. Credit Training**
To improve the participants' knowledge and skills related to credit management & marketing.

3. Pelatihan Manajerial

Membekali pengetahuan serta keterampilan para peserta terkait bidang manajerial/*soft skill* (Leadership dan keterampilan mengelola Karyawan/pekerjaan); dan

4. Pelatihan Lainnya

Membekali/meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta di luar pengetahuan perbankan, tetapi masih ada kaitan dengan pengelolaan perbankan (*Human Capital*, IT, Legal, dll).

3. Managerial Training

Giving participants the information and competencies necessary for managerial and soft skills development (leadership and job management).

4. Other Training

Empowering or improving participants' expertise in areas unrelated to banking, but nevertheless relevant to banking management (*Human Capital*, IT, Legal, etc.)

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Implementation of Competency Development

Jumlah program yang diselenggarakan Number of programs held	Pelatihan/Kegiatan Sosialisasi Training/Socialization Activities
Metode pelaksanaan program Program implementation methods	Onsite dan Online Onsite and Online
Fokus program Program focus	Pemenuhan kewajiban Sertifikasi SPPUR, Penyetaraan Sertifikasi Manajemen Risiko, Account Officer Program dan Kaderisasi SO Kepala Kantor Layanan Fulfillment of SPPUR Certification obligations and Cadreization of SO Heads of Service Offices and Team Leaders
Biaya pelaksanaan program Program implementation costs	Rp9.925.554.009

Remunerasi

Remunerasi merupakan hak yang diberikan kepada karyawan atas kinerja dan tanggung jawab yang telah dilakukan. Bank Artha Graha Internasional senantiasa memberikan remunerasi yang kompetitif dan berpedoman pada prinsip *pay for performance*, *internal equity*, dan *external competitiveness*.

Pemberian remunerasi diharapkan mampu memotivasi dan mempertahankan karyawan terbaik untuk memenuhi SDM yang profesional dan berkualitas, sehingga pertumbuhan bisnis Bank dapat tercapai. Penetapan remunerasi juga turut memperhatikan kondisi keuangan Bank, jenjang dan bobot, serta pencapaian kinerja karyawan.

Kebijakan remunerasi Bank Artha Graha Internasional juga mematuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Remunerasi yang diberikan oleh Bank terdiri *fix* dan *variable*. Komponen *fix* terdiri dari gaji dan *cash subsidy* sesuai dengan jenjang jabatan. Sementara komponen *variable*, terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu insentif dan bonus. Insentif diberikan kepada karyawan di fungsi penjualan (*sales*), baik pendanaan

Remuneration

Remuneration is the right given to employees for their performance and responsibilities. Bank Artha Graha Internasional always provides competitive remuneration based on the principles of *pay for performance*, *internal equity*, and *external competitiveness*.

The remuneration is expected to motivate and retain the best employees to fulfill professional and qualified human resources, so that the Bank's business growth can be achieved. The Bank's financial health, its level and weight, and the accomplishment of staff performance goals are all taken into consideration when determining compensation.

Bank Artha Graha Internasional's remuneration policy also complies with the provisions contained in OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks.

Remuneration provided by the Bank consists of fixed and variable components. The fixed component consists of salary and cash subsidy in accordance with the position. Meanwhile, the variable component consists of 2 (two) types, namely incentives and bonuses. Incentives are given to employees

(funding) maupun pinjaman (lending), serta fungsi penagihan (collection). Bonus diberikan kepada karyawan berprestasi di support function.

Selain itu, Bank memberikan komponen benefit berupa subsidi iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan fasilitas asuransi kesehatan sesuai dengan jenjang dan kapasitas karyawan. Kebijakan remunerasi tersebut dievaluasi secara berkala oleh Bank dengan tujuan memastikan prinsip *fairness* diterapkan dengan objektif, serta untuk membedakan apresiasi kepada karyawan berdasarkan jenjang jabatan dan kontribusi yang diberikan (performance based).

Hubungan Industrial

Kebijakan hubungan industrial adalah sesuatu yang diperlukan oleh Bank dalam rangka menjamin kelangsungan usaha, menciptakan iklim kerja yang kondusif, menimbulkan kebanggaan bagi pekerja, dan menghadirkan reputasi positif dari pihak eksternal.

Terciptanya hubungan industrial yang harmonis jelas merupakan sarana dalam memastikan peningkatan kondisi kerja, produktivitas, daya saing, dan kualitas kerja. Disamping itu, kondisi hubungan industrial juga menjadi indikator penerapan *Good Corporate Governance* bagi Bank.

Dalam mengembangkan hubungan industrial, Bank mengacu pada Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang - Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, karena itu Bank memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk mendapatkan haknya dengan bergabung dalam Serikat Pekerja.

Di lingkungan Bank Artha Graha Internasional terdapat organisasi serikat pekerja, yaitu IKAJIH Unit. Kepengurusan serikat pekerja tersebut telah disusun oleh Bank dan disahkan oleh seluruh anggotanya. Kepengurusan tersebut menghasilkan peraturan/ketentuan yang telah disepakati bersama antara pengusaha dan Karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang berisikan hak dan kewajiban baik oleh Karyawan kepada Bank maupun bank kepada Karyawan.

in the sales function, both funding and lending, as well as the collection function. Bonuses are given to outstanding employees in the support function.

In addition, the Bank provides a benefit component in the form of subsidized contributions to the Health Social Security (BPJS Kesehatan), Employment Social Security (BPJS Ketenagakerjaan), and health insurance facilities in accordance with the level and capacity of employees. The remuneration policy is evaluated periodically by the Bank with the aim of ensuring the principle of *fairness* is applied objectively, as well as to differentiate appreciation to employees based on the level of position and contribution (performance based).

Industrial Relations

The Bank requires an industrial relations policy to maintain business continuity, develop a positive work environment, foster employee pride, and offer a favorable standing with outside parties.

It is known that improving industrial relations can lead to better working conditions, productivity, competitiveness, and quality of work. Furthermore, The state of labor relations also reflects how well the Bank is implementing *Good Corporate Governance*.

In developing industrial relations, the Bank refers to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation and Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Fixed Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time and Termination of Employment, therefore the Bank provides freedom to all employees to obtain their rights by joining the Labor Union.

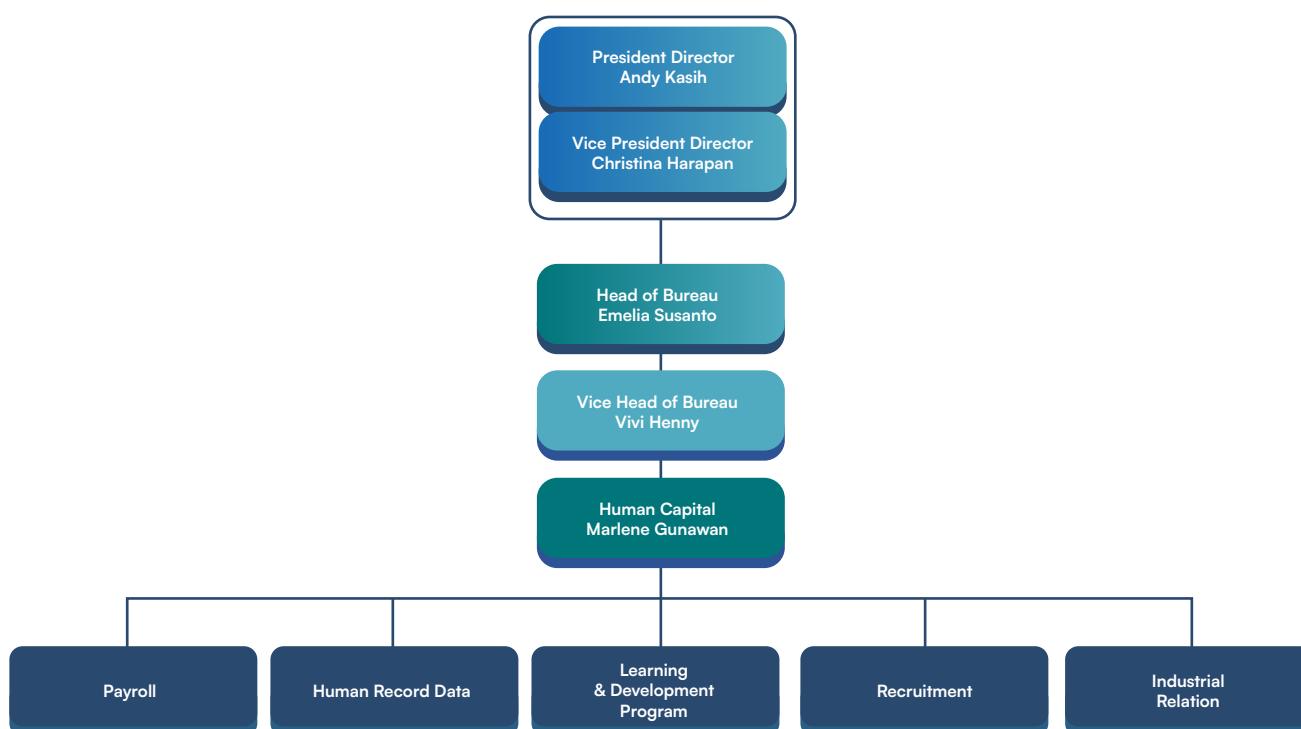
Within Bank Artha Graha Internasional, there is a trade union organization, namely IKAJIH Unit. The management of the labor union has been prepared by the Bank and ratified by all its members. The management produces rules/regulations that have been mutually agreed between employers and employees in the form of a Collective Labor Agreement (CLA), which contains the rights and obligations of both employees to the Bank and the bank to employees.

Pengelola Human Capital

Pengelolaan *Human Capital* di Bank Artha Graha Internasional berada di bawah *Deputy Director Human Capital* yang dibantu oleh 5 (lima) *Executive Officer* yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan *Human Capital* terdiri dari *Executive Officer Payroll*, *Executive Officer Human Record Data*, *Executive Officer Learning & Development*, *Executive Officer Recruitment*, dan *Executive Officer Industrial Relations*.

Human Capital Management

Human Capital Management at Bank Artha Graha Internasional is under the *Deputy Director of Human Capital* who is assisted by 5 (five) *Executive Officers* responsible for *Human Capital* management consisting of *Executive Officer Payroll*, *Executive Officer Human Record Data*, *Executive Officer Learning & Development*, *Executive Officer Recruitment*, and *Executive Officer Industrial Relations*.



Meskipun memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun kelima *Executive Officer* tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena mencakup seluruh proses pengelolaan *Human Capital* di Bank.

Although they have different duties and responsibilities, the five *Executive Officers* are an inseparable unit that covers the entire *Human Capital* management process in the Bank.

Bank Artha Graha Internasional berkomitmen untuk melakukan pengelolaan *Human Capital* secara komprehensif, mulai dari proses rekrutmen hingga karyawan memasuki masa pensiun. Keseluruhan proses dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Bank Artha Graha Internasional juga memiliki kebijakan internal yang mengatur teknis pelaksanaan dalam setiap proses pengelolaan *Human Capital* tersebut.

Bank Artha Graha Internasional is committed to comprehensive *Human Capital* management, from the hiring process through employee retirement. Every step of the procedure is completed in compliance with the relevant laws and rules. In addition, Bank Artha Graha Internasional also has internal policies that regulate the technical implementation of each *Human Capital* management process.

Beberapa kebijakan internal Bank yang terkait dengan pengelolaan *Human Capital* antara lain:

1. Ketentuan Penilaian Karyawan dalam SE HC 024.03.0;
2. Ketentuan Pemilihan dan Penilaian Kader/Kaderisasi dalam SE HC 057.02.0;
3. Ketentuan Skema Pemberian *Reward* Karyawan dalam SE HC 060.01.0;
4. Ketentuan Kepala Kantor Layanan *Development Program* dalam SE HC 050.02.0; dan
5. Ketentuan Rekrutmen, Seleksi, dan Penerimaan Karyawan dalam SE HC 006.02.0.

Bank secara berkala melakukan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pengembangan *Human Capital* Tahun 2025

Bank Artha Graha Internasional menetapkan 4 (empat) sasaran strategis untuk tahun 2025, yaitu:

1. *Re-arrange Organization.*
2. *Shaping the New Future;*

Strategi dan *action plan* yang disiapkan untuk mencapai sasaran diatas sebagai berikut:

1. *Re-arrange Organization*
 - a. Melakukan penempatan dan perputaran karyawan sesuai dengan potensi dan kompetensi untuk meningkatkan wawasan dan skill karyawan.
 - b. Mengimplementasikan HCIS sehingga proses kerja *Human Capital* menjadi lebih efektif.
2. *Shaping the New Future*
 - a. Penguatan kaderisasi jangka Panjang dengan memberikan program pelatihan yang tepat sasaran
 - b. Penyusunan career programme kader terbaik dan terpilih yang berfokus pada kemampuan dan kompetensi untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada.

Some of the Bank's internal policies related to *Human Capital* management include:

1. *Employee Appraisal Provisions in SE HC 024.03.0;*
2. *Provisions on Cadre Selection and Assessment/Cadre Development in SE HC 057.02.0;*
3. *Provisions on Employee Reward Scheme in SE HC 060.01.0;*
4. *Provisions of Head of Service Office Development Program in SE HC 050.02.0; and*
5. *Provisions on Employee Recruitment, Selection, and Acceptance in SE HC 006.02.0.*

The Bank periodically reviews these policies to ensure compliance with the prevailing laws and regulations.

Human Capital Development Plan for 2025

Bank Artha Graha Internasional sets 4 (four) strategic goals for 2025:

1. *Re-arrange Organization;*
2. *Shaping the New Future;*

The following are the plans of action and tactics developed to accomplish the aforementioned goals:

1. *Re-arrange Organization*
 - a. *Assigning and rotating employees based on their potential and competencies to broaden their knowledge and skills.*
 - b. *Implementing HCIS (Human Capital Information System) to make Human Capital processes more effective.*
2. *Shaping the New Future*
 - a. *Strengthening long-term regeneration by providing targeted training programs.*
 - b. *Developing career programs for the best and selected talents, focusing on skills and competencies to face current challenges and opportunities.*

TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERBANKAN DIGITAL

Transaksi berbasis teknologi informasi - transaksi digital - kini telah merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat luas, baik untuk memenuhi kebutuhan perbankan, transaksi komersial, transaksi layanan publik hingga transaksi layanan kesehatan. Data BI menunjukkan frekuensi transaksi *digital banking* di tahun 2024 mencapai 43,5 miliar kali, tumbuh 36,1% secara tahunan (*year on year/yoy*) dengan nilai mencapai Rp87 kuadriliun, meningkat 50,6%. Untuk tahun 2025, Bank Indonesia memprakirakan volume transaksi *digital banking* ini akan kembali meningkat hingga 52,3%.

Mempertimbangkan besarnya potensi bisnis yang dapat diraih dari perkembangan transaksi digital, yakni transaksi melalui aplikasi *mobile* dan internet tersebut, Bank Artha Graha Internasional mengembangkan layanan transaksi digital berbasis teknologi informasi terkini untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya. Untuk itu, Bank sejak beberapa tahun terakhir mengembangkan kompetensi penyelenggaraan kegiatan operasional digital berbasis teknologi informasi, baik dari sisi kompetensi SDM maupun infrastruktur TI, baik *hardware* maupun *software*.

Teknologi Informasi (TI) berperan penting dalam mendukung aktivitas operasional Bank, termasuk dalam memenuhi kebutuhan nasabah agar lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan TI di Bank Artha Graha Internasional dilakukan dengan mengembangkan layanan digital, yakni mengintegrasikan layanan *mobile banking* sehingga memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan kapan pun dan dimana pun.

STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI

Bank meyakini pentingnya penerapan kegiatan operasional digital berbasis Teknologi Informasi (TI) terkini dalam mendukung bisnis Bank. Untuk meraih peluang terbaik dari perkembangan transaksi digital dan meningkatkan efisiensi kegiatan operasional perbankan dari sistem konvensional ke perbankan digital, Bank telah menyusun dan menerapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi yang dijadikan acuan dalam pengembangan inisiatif TI maupun pemenuhan infrastruktur dan keamanan TI.

INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL BANKING

Information technology-based digital transactions have now permeated various aspects of public life, including banking needs, commercial transactions, public services, and healthcare services. Data from Bank Indonesia indicates that the frequency of digital banking transactions in 2024 reached 43.5 billion, growing by 36.1% year-on-year (YoY), with a transaction value reaching IDR87 quadrillion, an increase of 50.6%. For 2025, Bank Indonesia projects that the volume of digital banking transactions will increase again by up to 52.3%.

Considering the significant business potential that can be leveraged from the growth of digital transactions, transactions conducted via mobile and internet applications, Bank Artha Graha Internasional is developing digital transaction services based on the latest information technology to meet the needs of its customers. In recent years, the Bank has been developing competencies in operating digital activities based on information technology, both in terms of human resources and IT infrastructure, including hardware and software.

Information Technology (IT) plays a crucial role in supporting the Bank's operational activities, including meeting customer needs more effectively and efficiently. At Bank Artha Graha Internasional, IT utilization is carried out by developing digital services: integrating mobile banking services to enable customers to access banking services anytime and anywhere.

INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY

The Bank believes in the importance of implementing digital operations based on the latest Information Technology (IT) to support its business. To seize the best opportunities from the development of digital transactions and to enhance the efficiency of banking operations by transitioning from conventional to digital banking, the Bank has developed and implemented an Information Technology Strategic Plan. This plan serves as a reference for the development of IT initiatives as well as for fulfilling IT infrastructure and security requirements.

Beberapa langkah strategis yang telah ditetapkan sesuai arah kebijakan bank guna mendukung berbagai rencana produk dan aktivitas baru berbasis digital, mencakup:

1. Melakukan evaluasi dan mengintegrasikan proses bisnis melalui implementasi teknologi dan sistem integrasi, agar pelaksanaan eksekusi di lapangan dapat berjalan sesuai dengan regulasi dan kepatuhan.
2. Akselerasi kapabilitas IT dalam mendukung optimalisasi proses bisnis untuk mendukung kehandalan produk dan layanan digital untuk meningkatkan akuisisi, transaksi dan penyaluran kredit.
3. Penguatan pengukuran dan pengawasan proses digitalisasi dan *cyber security* dari aspek risiko dan kredit.
4. Memperkuat pemasaran *platform* berbasis *digital banking* dengan inisiatif *digital marketing* dan kolaborasi digital untuk meningkatkan akuisisi dan transaksi nasabah berbasis data.

Target jangka pendek yang ingin dicapai dalam satu tahun ke depan untuk menerapkan langkah strategis tersebut di atas yaitu dengan cara meningkatkan kapabilitas TI termasuk penguatan *cyber security* sehingga dapat mengakomodir kolaborasi bank dengan mitra strategis seperti *fintech*, *e-Commerce*, *Merchant Online* dan *Mitra Offline* dengan tetap memperhatikan aspek keamanan bank dan nasabah.

Target jangka menengah yang ingin dicapai yaitu dengan memperkuat *Human Capital* yang dapat mewujudkan arahan strategis bank melalui pengembangan kompetensi teknis, *soft skills* dan *leadership* serta penguasaan bisnis *digital banking*. Selain itu melakukan penyelarasan *roadmap* teknologi informasi dengan teknologi terkini untuk mendukung bisnis bank secara berkelanjutan serta penguatan *cyber security* dan *digital maturity*.

PROGRAM STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERBANKAN DIGITAL TAHUN 2024

1. Pengembangan Fitur API Management, Mobile Apps dan Internet Banking
 - a. Pengembangan API Standard dan Catalog pada "Dukcapil untuk e-KYC, BI-FAST, Pencairan, Pembayaran dan Pelunasan P2P Lending Mitra".

Several strategic steps have been established in line with the Bank's policy direction to support various new digital-based product and activity plans, including:

1. Conducting evaluations and integrating business processes through the implementation of technology and system integration, ensuring field execution is aligned with regulations and compliance requirements.
2. Accelerating IT capabilities to optimize business processes in order to strengthen the reliability of digital products and services to enhance customer acquisition, transaction volume, and loan distribution.
3. Strengthening measurement and monitoring of the digitalization process and cyber security from both risk and credit perspectives.
4. Strengthening the marketing of digital banking platforms through digital marketing initiatives and digital collaboration to enhance customer acquisition and data-driven transactions.

The short-term target to be achieved within the next year for implementing these strategic steps is to enhance IT capabilities, including strengthening cyber security, to enable collaboration between the Bank and strategic partners such as fintech companies, e-commerce platforms, online merchants, and offline partners, while maintaining the security of both the Bank and its customers.

The medium-term target is to strengthen Human Capital that can realize the Bank's strategic direction through the development of technical competencies, soft skills, leadership, and mastery of digital banking business. In addition, aligning the IT roadmap with the latest technology to support the Bank's business sustainably, as well as reinforcing cybersecurity and digital maturity.

INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL BANKING STRATEGIC PROGRAM IN 2024

1. Development of API Management Features, Mobile Apps, and Internet Banking
 - a. Development of Standard APIs and Catalogs for integration with: Dukcapil for e-KYC, BI-FAST, Disbursement, Payment, and Repayment for Partner P2P Lending.

- b. Pengembangan Fase 1 Tahap 2 BI-FAST.
 - c. *Upgrade Core Banking System*, perubahan ATM Switching dan perubahan Middleware.
 - d. *Enhancement* fitur *Core Banking* sesuai dengan kebutuhan bisnis seperti Anjak Piutang, *Enhancement* PRK, Limit Teller, *Enhancement* Payroll, AutoDebet, Transaksi SDB, dan lain-lain.
 - e. Pengembangan digital apps AGI sebagai solusi transaksi perbankan melalui perangkat *mobile* berupa fitur tabungan emas, *biller*, *loyalty point*, e-KYC dan *opening account*.
 - f. Pengembangan aplikasi *Digital Lending* sebagai produk pinjaman untuk kepentingan konsumtif maupun modal kerja kepada pelaku UMKM melalui aplikasi *mobile* maupun *platform online* dengan memanfaatkan solusi manajemen resiko yang terintegrasi.
 - g. Pengembangan solusi transaksi keuangan berbasis *web* untuk nasabah korporasi.
 2. Pengembangan fitur guna mendukung operasional dan pelaporan Bank
 - a. Pengembangan aplikasi *Credit Risk Rating* guna mengukur *credit scoring* dari calon debitur.
 - b. *Enhancement dashboard & report MIS* sesuai kebutuhan informasi bisnis.
 - c. *Enterprise data service - Enrichment* data dari MB, IBB, ATM, T24 dan *channel* lainnya.
 - d. Pengembangan aplikasi Library IT untuk memudahkan dalam melakukan inventarisasi penyimpanan *media backup data*, *software* aplikasi dan lainnya di *Library*.
 - e. Pengembangan aplikasi *iReporting* untuk sentralisasi aplikasi laporan regulator.
 3. Penguatan infrastruktur dan peningkatan sistem keamanan di internal
 - a. *Active Directory - Pengelolaan Policy EUC* yang digunakan karyawan.
 - b. Keamanan data & *network* menggunakan *Trendmicro VisionOne XDR*.
 - c. Pengembangan aplikasi administrasi permintaan pemeliharaan dan perubahan kewenangan akses *User ID* aplikasi.
 - d. Penyediaan aplikasi *monitoring* untuk memantau *performance* dan *response time server*.
 - e. Pemindahan pusat data (*Data Center*).
 - f. SOC dan SIEM untuk *monitoring traffic* dan *security*.
 - g. *Upgrade operation system* di *end user workstation* menjadi Windows 10/11.
- b. *Development of Phase 1, Stage 2 of BI-FAST.*
 - c. *Core Banking System upgrade*, ATM Switching replacement, and Middleware changes.
 - d. *Enhancements to Core Banking features in line with business needs*, such as *Factoring*, *PRK Enhancement*, *Teller Limits*, *Payroll Enhancement*, *Auto-Debit*, *Safe Deposit Box (SDB) Transactions*, and others.
 - e. *Development of the AGI digital app as a mobile banking solution*, featuring *digital gold savings*, *biller integration*, *loyalty points*, *e-KYC*, and *account opening*.
 - f. *Development of a Digital Lending application to offer consumer and working capital loans for MSMEs via mobile apps and online platforms*, supported by *integrated risk management solutions*.
 - g. *Development of a web-based financial transaction solution for corporate customers.*
 2. *Feature Development to Support Bank Operations and Reporting*
 - a. *Development of a Credit Risk Rating application to assess credit scoring of prospective debtors.*
 - b. *Enhancement of MIS dashboards and reports to meet business information needs.*
 - c. *Enterprise Data Service - Data enrichment from Mobile Banking, Internet Banking, ATM, T24, and other channels.*
 - d. *Development of an IT Library application to facilitate inventory and storage of data backup media, application software, and others.*
 - e. *Development of the iReporting application to centralize regulatory reporting systems.*
 3. *Infrastructure Strengthening and Internal Security System Enhancement*
 - a. *Active Directory - Management of EUC Policies used by employees.*
 - b. *Data and network security using Trendmicro VisionOne XDR.*
 - c. *Development of an administrative application for managing maintenance requests and access authority changes for application User IDs.*
 - d. *Provision of monitoring applications to track server performance and response times.*
 - e. *Relocation of the Data Center.*
 - f. *Implementation of SOC and SIEM for traffic and security monitoring.*
 - g. *Upgrade of end-user workstation operating systems to Windows 10/11.*

KEAMANAN SIBER

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan akan digitalisasi untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan, Bank memiliki inisiatif untuk meningkatkan keamanan siber (*cyber security*). Hal ini tidak terlepas dari mitigasi terhadap serangan siber yang muncul seiring dengan berpindahnya preferensi layanan nasabah dari *channel* konvensional (*cabang/onsite*) menjadi *channel* digital.

Sebagai upaya memperkuat keamanan siber secara terus menerus, Bank Artha Graha Internasional berkomitmen meningkatkan perlindungan infrastruktur, jaringan, aplikasi, dan data. Penguatan *Security Operation Center (Monitoring 24x7)* dan manajemen risiko keamanan siber untuk transaksi digital merupakan bagian dari peningkatan kewaspadaan keamanan siber.

Untuk meningkatkan keamanan transaksi dalam rangka memastikan nasabah terlindungi dari kejahatan (*fraud*) *online* dan internet, Bank juga menerapkan sistem-sistem keamanan yang bertaraf internasional guna mencegah maupun mendeteksi adanya transaksi mencurigakan.

Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan terkait ketahanan dan keamanan siber perbankan, bank harus sudah memastikan bahwa layanannya sudah memenuhi standar keamanan yang minimal. Namun begitu perlu juga kiranya menerapkan strategi tambahan agar sistem keamanan mereka bisa lebih optimal. Berikut merupakan beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam dunia perbankan untuk menjaga keamanan siber, berdasarkan pengalaman dan *best practices* di dunia.

1. Menyediakan kebijakan dan prosedur terkait pengamanan siber yang mengatur antara lain kebijakan penggunaan kata sandi yang kuat, kebijakan akses terbatas serta pengaturan untuk melindungi dan mengamankan data nasabah.
2. Menerapkan kebijakan akses ke sistem dengan penggunaan sandi yang kompleks, serta melakukan peninjauan secara teratur karyawan yang memerlukan akses yang diberikan izin khusus.
3. Menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan yang kuat untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, untuk mengidentifikasi upaya masuk yang tidak sah, kegiatan mencurigakan di dalam jaringan dengan menggunakan aplikasi SIEM/SOC.

CYBER SECURITY

In line with advancements in information technology and the growing need for digitalization to facilitate banking transactions for customers, the Bank has taken initiatives to enhance its cyber security. This is closely tied to the need to mitigate cyber attacks that have emerged as customer preferences shift from conventional service channels (branches/onsite) to digital channels.

As part of its continuous efforts to strengthen cyber security, Bank Artha Graha Internasional is committed to enhancing the protection of its infrastructure, networks, applications, and data. This includes the reinforcement of the Security Operation Center (24x7 monitoring) and cyber security risk management for digital transactions, which are key components of the Bank's heightened vigilance toward cyber threats.

To ensure secure transactions and protect customers from online and internet-based fraud, the Bank also implements internationally recognized security systems designed to prevent and detect suspicious activities.

Following regulations from the Financial Services Authority (OJK) regarding banking cyber resilience and security, banks are required to ensure that their services meet minimum security standards. However, it is also essential to adopt additional strategies to further optimize the security systems. The following are some strategies that can be implemented in the banking sector to maintain cyber security, based on global experience and best practices.

1. *Establishing cyber security policies and procedures, which include regulations on the use of strong passwords, limited access policies, and arrangements to protect and secure customer data.*
2. *Implementing system access policies that require the use of complex passwords, and conducting regular reviews of employees who are granted special access permissions.*
3. *Enforcing robust monitoring and supervision systems to detect suspicious activities, including unauthorized access attempts and unusual behavior within the network, through the use of SIEM (Security Information and Event Management) and SOC (Security Operations Center) applications.*

4. Melindungi jaringan data dengan penggunaan <i>firewall</i>, enkripsi data. Serta memperbaharui jaringan dan infrastruktur secara teratur untuk mengatasi celah kerentanan. 5. Mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan dalam kode aplikasi, jaringan dan sistem secara keseluruhan melalui pelaksanaan uji penetrasi <i>testing</i> dan audit keamanan oleh pihak independen secara berkala. 6. Pelatihan keamanan siber untuk semua karyawan untuk meningkatkan kesadaran terhadap serangan <i>phishing</i>, serta pentingnya menjaga kerahasiaan data dan melaporkan aktivitas mencurigakan. 7. Melakukan <i>review</i> dan simulasi secara berkala rencana pemulihan bencana dan rencana darurat mencakup langkah-langkah pemulihan bencana, pemulihan data dan pemulihan operasional untuk mengurangi dampak serangan.	4. <i>Securing data networks through the use of firewalls and data encryption, as well as regularly updating the network and infrastructure to address vulnerabilities.</i> 5. <i>Identifying and remedying vulnerabilities in application code, networks, and systems as a whole by conducting regular penetration testing and independent security audits.</i> 6. <i>Conducting cybersecurity training for all employees to raise awareness of phishing attacks, highlight the importance of data confidentiality, and encourage the reporting of suspicious activities.</i> 7. <i>Regularly reviewing and simulating disaster recovery and emergency response plans, which include steps for disaster recovery, data restoration, and operational continuity to minimize the impact of cyberattacks.</i>

DISASTER RECOVERY

Data Center merupakan pusat pengendali IT dan pengolahan data yang berfungsi sebagai sarana pendukung utama operasional bank dalam bidang TI. Saat ini bank menggunakan 2 (dua) lokasi *Data Center* dimana dimaksudkan untuk menjaga agar layanan TI tetap tersedia apabila terjadi bencana pada *Data Center*, baik secara keseluruhan ataupun sebagian dari peralatan yang ada.

Disaster Recovery diberlakukan saat infrastruktur teknologi informasi pada *Data Center* tidak dapat diperbaiki sesuai ketentuan *Business Impact Analysis* (BIA).

Bank memastikan langkah pemulihan bencana, pemulihan data dan pemulihan operasional telah dirinci sesuai fungsi bisnis yang kritis berdasarkan hasil BIA, dengan melakukan pengujian *Disaster Recovery* terhadap aplikasi secara berkala.

DISASTER RECOVERY

The Data Center serves as the central hub for IT control and data processing, functioning as a key support facility for the Bank's IT operations. Currently, the Bank operates 2 (two) Data Center locations to ensure that IT services remain available in the event of a disaster affecting the Data Center, whether in whole or in part.

Disaster Recovery is activated when the information technology infrastructure at the Data Center cannot be restored in accordance with the provisions of the Business Impact Analysis (BIA).

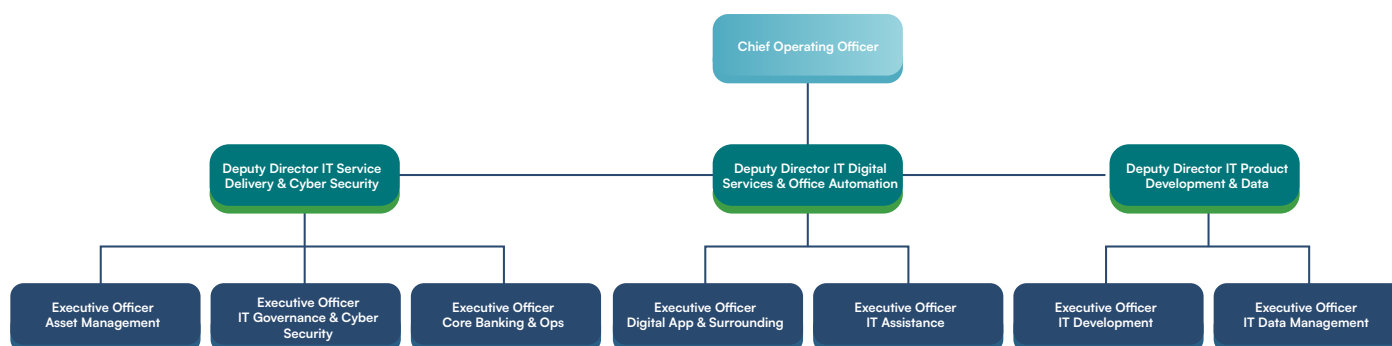
The Bank ensures that disaster recovery procedures, data recovery, and operational recovery are detailed in alignment with critical business functions, as identified through the BIA, by conducting regular Disaster Recovery testing on its applications.

PENGELOLA TI DAN DIGITAL BANKING

Penanggung jawab pengelolaan dan pengembangan TI di Bank Artha Graha Internasional berada di bawah *Deputy Director IT Service Delivery & Cyber Security*, *Deputy Director IT Digital Services & Office Automation*, dan *Deputy Director IT Product Development & Data* yang berada di bawah supervisi *Chief Operating Officer*.

IT AND DIGITAL BANKING MANAGEMENT

Responsibility for the management and development of IT at Bank Artha Graha Internasional falls under the Deputy Director of IT Service Delivery & Cyber Security, the Deputy Director of IT Digital Services & Office Automation, and the Deputy Director of IT Product Development & Data, all of whom operate under the supervision of the Chief Operating Officer.



Adapun tugas dari masing-masing adalah sebagai berikut:

- 1. Deputy Director IT Service Delivery & Cyber Security**
Memastikan perencanaan strategis dan kebijakan teknologi informasi yang dapat memenuhi kebutuhan dan menunjang kepentingan bisnis perusahaan dan diimplementasikan. Memastikan tersedianya pelayanan teknologi informasi bagi semua unit kerja, pengembangan IT dijalankan secara efektif dan efisien serta system IT yang berfungsi di setiap unit kerja telah mempertimbangkan faktor keamanan.
- 2. Deputy Director IT Digital Service & Office Automation**
Memastikan *project* integrasi dengan *Partner/Merchant* dapat terealisasi dan terlaksana dengan baik, permintaan *user* (unit kerja Bank/*Partner* bisnis) baik pengembangan/perubahan aplikasi telah ditindaklanjuti sebagai dukungan terhadap kelancaran kerja *user*. Mengawasi pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan *e-Channel* aplikasi digital, aplikasi *surrounding* serta sistem pendukungnya sebagai dukungan terhadap kelancaran kerja *user* dilaksanakan sesuai SLA.

Responsibilities of Each Role are as Follows:

- 1. Deputy Director IT Service Delivery & Cyber Security**
Ensures the strategic planning and information technology policies align with business needs and support the company's interests and are properly implemented. Ensures the availability of IT services for all work units, that IT development is conducted effectively and efficiently, and that IT systems in each work unit operate with appropriate consideration for security factors.
- 2. Deputy Director IT Digital Service & Office Automation**
Ensures that integration projects with partners/merchants are properly executed, and that user requests (from Bank work units or business partners), whether for application development or modification, are appropriately addressed to support user productivity. Oversees the development, implementation, and maintenance of digital *e-Channel* applications, surrounding applications, and supporting systems to ensure they function effectively in accordance with SLA standards.

3. Deputy Director IT Product Development & Data

Memastikan peran tim data dalam pemenuhan KPI bisnis *Digital & Network*, sebagai penentu strategi dalam rangka meningkatkan *level* kematangan data di organisasi, melakukan *assessment* secara rutin mengenai *level* kematangan infrastruktur data. Memastikan ketersediaan sistem penyediaan data dan operasi tim data serta memastikan pengembangan kemampuan bawahan agar tercapai target kinerja yang ditetapkan.

4. Executive Officer Asset Management

Memastikan perangkat keras seperti mesin ATM, CPU, *printer*, mesin EDC, UPS, *scanner*, dan perangkat IT lainnya berfungsi optimal, kemudian memastikan pengelolaan vendor (*Vendor Management*) dilaksanakan dengan benar, memastikan tersedianya perencanaan, strategi dan pelaksanaan simulasi *DRP (Disaster Recovery Planning)*. Memastikan pemeliharaan *user ID, table* dan parameter aplikasi serta penggunaan *High Level User* dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Memastikan kebijakan dan prosedur *Library* berjalan dengan baik serta bersama Deputy Director IT dan Executive Officer lainnya menyiapkan rencana kerja dan anggaran biaya (*budget*) tahunan IT dan memantau implementasinya.

5. Executive Officer IT Governance & Cyber Security

Membuat perencanaan untuk strategi pengamanan informasi di lingkungan Bank, memastikan pelaksanaan pengadaan, operasional dan pemeliharaan perangkat/ sistem pengamanan teknologi informasi dilakukan sesuai ketentuan. Melakukan koordinasi pengamanan teknologi informasi yang memadai dengan pihak internal dan eksternal, melakukan koordinasi dan supervisi pelaksanaan sosialisasi atau edukasi terkait pengamanan teknologi informasi, mengidentifikasi resiko-resiko dan solusinya dalam program pengamanan teknologi informasi serta supervisi pengembangan dan penerapan kebijakan, standarisasi, petunjuk dan prosedur keamanan teknologi informasi sesuai ketentuan PBI dan POJK.

6. Executive Officer Core Banking & Ops

Mengawasi dan memastikan operasional harian aplikasi T24 berjalan tanpa gangguan, berkoordinasi dengan vendor atau pihak ketiga jika ada masalah atau kebutuhan terkait aplikasi T24 dan menangani masalah teknis yang muncul dalam aplikasi, kesalahan sistem, dan masalah kinerja.

3. Deputy Director IT Product Development & Data

Ensures the data team contributes to meeting the KPIs of Digital & Network business, acts as a strategic driver for improving the organization's data maturity level, and conducts regular assessments of data infrastructure maturity. Ensures the availability of data provisioning systems and smooth operation of the data team, and fosters subordinates' skill development to meet performance targets.

4. Executive Officer Asset Management

*Ensures optimal functioning of hardware such as ATMs, CPUs, printers, EDC machines, UPS, scanners, and other IT equipment. Ensures proper vendor management, the availability of planning, strategy, and execution of *DRP (Disaster Recovery Planning)* simulations. Ensures maintenance of user IDs, application tables and parameters, and the use of High-Level Users in accordance with applicable rules and procedures. Oversees the implementation of library policies and procedures and collaborates with the Deputy Director IT and other Executive Officers to prepare the annual IT work plan and budget and monitors its implementation.*

5. Executive Officer IT Governance & Cyber Security

Plans the Bank's information security strategy, ensures that procurement, operation, and maintenance of IT security systems are in compliance with applicable regulations. Coordinates adequate IT security efforts internally and externally, supervises and coordinates socialization or education regarding IT security, identifies risks and solutions in IT security programs, and supervises the development and implementation of policies, standards, guidelines, and IT security procedures in accordance with Bank Indonesia and OJK regulations.

6. Executive Officer Core Banking & Operations

Supervises and ensures uninterrupted daily operation of the T24 application, coordinates with vendors or third parties regarding issues or requirements related to T24, and handles technical issues, system errors, and performance problems within the application.

7. Executive Officer IT Digital Apps & Surrounding

Mengawasi pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan aplikasi digital serta sistem pendukungnya sebagai dukungan terhadap kelancaran kerja user dan dilaksanakan sesuai SLA. Mengelola integrasi antara sistem aplikasi dengan platform lain yang digunakan dalam perusahaan, kemudian memastikan ketersediaan sistem dan prosedur yang selaras dengan perkembangan bisnis dan regulasi, melalui penyempurnaan prosedur yang sudah ada. Bersama Deputy Director IT, serta Executive Officer lainnya menyiapkan rencana kerja dan anggaran biaya (budget) tahunan IT dan memantau implementasinya.

8. Executive Officer IT Assistance

Memastikan project integrasi dengan Partner/Merchant dapat terealisasi dan terlaksana dengan baik, memastikan user (unit bisnis Bank, Partner) terkait permintaan integrasi baik pengembangan/perubahan service layanan telah ditindaklanjuti sebagai dukungan terhadap kelancaran kerja user. Memastikan ketersediaan sistem dan prosedur yang selaras dengan perkembangan bisnis dan regulasi, melalui penyempurnaan prosedur yang sudah ada.

9. Executive Officer IT Development

Berperan dalam mengembangkan dan menerapkan strategi IT yang sejalan dengan tujuan bisnis, memastikan strategi IT mendukung tujuan keseluruhan organisasi, mengawasi perencanaan, pelaksanaan dan penyampaian proyek IT. Memastikan proyek selesai tepat waktu dalam anggaran dan memenuhi standar kualitas, memberikan panduan dan dukungan kepada anggota tim untuk mencapai tujuan departemen serta memastikan pengembangan perangkat lunak mengikuti praktik terbaik dan standar industri.

10. Executive Officer IT Data Management

Mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta prosedur tata kelola data, memastikan kepatuhan terhadap standard dan regulasi tata kelola data, menetapkan standar kualitas data dan memantau kualitas data diseluruh organisasi, menerapkan proses pembersihan, validasi dan pengayaan data. Merancang dan memelihara arsitektur data untuk mendukung kebutuhan bisnis, memastikan integrasi data dan interoperabilitas antar sistem dan platform yang berbeda serta mengawasi pengembangan dan penyampaian laporan serta analisis MIS.

7. Executive Officer IT Digital Apps & Surrounding

Oversees the development, implementation, and maintenance of digital applications and supporting systems to ensure smooth user operations, in line with SLA standards. Manages integration between application systems and other platforms used by the company. Ensures the availability of systems and procedures aligned with business developments and regulations through the refinement of existing procedures. Works together with the Deputy Director IT and other Executive Officers to prepare the annual IT work plan and budget, and monitors its implementation.

8. Executive Officer IT Assistance

Ensures integration projects with partners/merchants are properly executed and ensures that user requests (from Bank business units or partners) regarding service development or changes are addressed as support for user productivity. Ensures the availability of systems and procedures aligned with business developments and regulations through continuous improvement of existing procedures.

9. Executive Officer IT Development

Plays a role in developing and implementing IT strategies aligned with business goals, ensures IT strategies support the organization's overall objectives, and oversees planning, execution, and delivery of IT projects. Ensures that projects are completed on time, within budget, and meet quality standards. Provides guidance and support to team members to achieve departmental goals and ensures software development follows best practices and industry standards.

10. Executive Officer IT Data Management

Develops and implements data governance policies and procedures, ensures compliance with data governance standards and regulations, establishes data quality standards and monitors data quality across the organization. Implements processes for data cleansing, validation, and enrichment. Designs and maintains data architecture to support business needs, ensures data integration and interoperability across different systems and platforms, and oversees the development and delivery of MIS reports and analytics.

TATA KELOLA TI

Keberadaan arsitektur TI di lingkup Bank tak lepas dari terlaksananya penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara efektif dan efisien di setiap aspek bisnis Bank. Pada prinsipnya, penerapan sistem TI berfokus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menjaga kerahasiaan, mempertahankan integritas, meningkatkan ketersediaan, kepatuhan, dan keandalan dalam hal operasional teknologi informasi.

Untuk menunjang tata kelola TI, manajemen melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Bank juga senantiasa melakukan penyempurnaan dan pengembangan perangkat lunak maupun perangkat keras dalam pengelolaan TI untuk mendukung strategi bisnis Bank dalam memberikan fasilitas dan kemudahan bertransaksi serta meningkatkan kualitas pelayanan.

RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERBANKAN DIGITAL TAHUN 2025

Untuk mendukung pencapaian ekspansi bisnis tersebut diatas, Bank juga akan melakukan inisiatif untuk peningkatan kapasitas kapabilitas infrastruktur dan layanan serta efisiensi proses operasional seperti:

- A. Penguatan Pondasi
 - 1. Upgrade Core Banking
 - 2. AGI Digital Apps (eKYC, OTP WA, QRIS CPM)
 - 3. Implementasi HCIS
 - 4. Upgrade System Switching
 - 5. Customer Journey & Campaign Distribution Tools
- B. Transformasi digital dengan memperkuat integrasi dengan mitra strategis, e-commerce, dan merchant untuk menciptakan ekosistem layanan yang luas dan terintegrasi
 - 1. Digital Lending
 - 2. Lending Digital Core
 - 3. Implementasi eKYC (Online Onboarding)
 - 4. Internet Banking Bisnis (Cross Currency, SWIFT)
 - 5. QRIS Merchant (Tarik, Transfer, Setor)
 - 6. Direct Debit (Digital Apps, NFC, Virtual Core)
- C. Penguatan sistem keamanan data melalui cyber security untuk melindungi nasabah sejalan dengan regulasi yang berlaku.
 - 1. PRIVASIMU (Implementasi UU PDP 2022)
 - 2. Fraud Detection System
 - 3. Refreshment Firewall
 - 4. Refreshment Web Application Firewall
 - 5. Upgrade Windows 11

IT GOVERNANCE

The presence of IT architecture within the Bank is inseparable from the effective and efficient implementation of good corporate governance across all aspects of the Bank's business. Fundamentally, the implementation of IT systems is focused on enhancing effectiveness and efficiency, maintaining confidentiality, preserving integrity, improving availability, ensuring compliance, and reinforcing the reliability of IT operations.

To support IT governance, management identifies various internal and external factors. The Bank continuously refines and develops both software and hardware in IT management to support the Bank's business strategy, facilitate and simplify transactions, and improve service quality.

INFORMATION TECHNOLOGY AND DIGITAL BANKING DEVELOPMENT PLAN FOR 2025

To support the achievement of the aforementioned business expansion, the Bank will also initiate efforts to enhance infrastructure and service capabilities as well as improve operational process efficiency through the following initiatives:

- A. Foundation Strengthening
 - 1. Core Banking Upgrade
 - 2. AGI Digital Apps (eKYC, WhatsApp OTP, QRIS CPM)
 - 3. HCIS Implementation
 - 4. Switching System Upgrade
 - 5. Customer Journey & Campaign Distribution Tools
- B. Digital Transformation Strengthening integration with strategic partners, e-commerce platforms, and merchants to create a broad and integrated service ecosystem:
 - 1. Digital Lending
 - 2. Lending Digital Core
 - 3. eKYC Implementation (Online Onboarding)
 - 4. Business Internet Banking (Cross Currency, SWIFT)
 - 5. QRIS for Merchants (Withdrawal, Transfer, Deposit)
 - 6. Direct Debit (Digital Apps, NFC, Virtual Core)
- C. Enhancement of Data Security Systems Strengthening cybersecurity to protect customers in line with applicable regulations:
 - 1. PRIVASIMU (Implementation of the 2022 Personal Data Protection Law)
 - 2. Fraud Detection System
 - 3. Firewall Upgrade
 - 4. Web Application Firewall Upgrade
 - 5. Windows 11 Upgrade

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Bank Artha Graha Internasional meyakini penerapan praktik terbaik GCG bukanlah semata memenuhi peraturan yang berlaku, tapi merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pertumbuhan usaha yang optimal, berkelanjutan dan berkualitas. Penerapan praktik terbaik prinsip-prinsip GCG merupakan landasan dan sarana bagi pencapaian visi, misi dan tujuan Perusahaan.

Bank Artha Graha Internasional believes that the implementation of best practices in Good Corporate Governance (GCG) is not merely a matter of regulatory compliance, but an integral part of achieving optimal, sustainable, and high-quality business growth. The application of GCG principles serves as a foundation and a means to realize the Company's vision, mission, and objectives.



KOMITMEN, DASAR PENERAPAN, DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Commitment, Foundation Implementation, and Principles of Corporate Governance

KOMITMEN

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan praktik terbaik GCG pada setiap aktivitas operasional Perusahaan. Bagi Perseroan, penerapan praktik terbaik GCG bukanlah semata memenuhi peraturan yang berlaku, tetapi merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pertumbuhan usaha yang optimal, berkelanjutan dan berkualitas. Penerapan praktik terbaik GCG juga merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk turut mendukung pembangunan bangsa secara maksimal melalui peran intermediasi yang dijalankan.

Perseroan menyadari pentingnya penerapan praktik terbaik prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dan sarana bagi pencapaian visi, misi dan tujuan Perusahaan. Perseroan juga meyakini, komitmen yang tinggi dan konsistensi dalam menerapkan praktik terbaik GCG akan dapat mencegah praktik-praktik *fraud*, korupsi, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya melalui meningkatnya fungsi pengawasan dalam pengelolaan Perusahaan. Oleh karenanya, Perseroan bertekad untuk senantiasa melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan kualitas penerapan praktik terbaik GCG sesuai dengan perkembangan terkini.

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan GCG di Bank Artha Graha Internasional merujuk pada peraturan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di industri perbankan, mencakup antara lain:

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia

1. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

COMMITMENT

The Company is committed to implementing best practices in Corporate Governance (GCG) in all of its operational activities. For the Company, the implementation of best practices in GCG is not merely about complying with applicable regulations, but is a crucial part of achieving optimal, sustainable, and high-quality business growth. The application of best GCG practices is also part of the Company's efforts to contribute maximally to national development through its intermediary role.

The Company recognizes the importance of implementing best practices of GCG principles as a foundation and means for achieving its vision, mission, and objectives. The Company also believes that a strong commitment and consistency in applying best GCG practices will prevent fraud, corruption, abuse of authority, and other misconducts through enhanced oversight functions in the management of the Company. Therefore, the Company is determined to continuously evaluate and improve the quality of the implementation of best GCG practices in line with the latest developments.

BASIS FOR CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The implementation of Corporate Governance (GCG) at Bank Artha Graha Internasional refers to the laws and regulations applicable in the banking industry, including, but not limited to:

Law (UU) of the Republic of Indonesia

1. Law No. 7 of 1992 on Banking, as amended by Law No. 10 of 1998, and further amended partially by Law No. 11 of 2020 on Job Creation and Law No. 6 of 2023 on the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law;
2. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended partially by Law No. 11 of 2020 on Job Creation and Law No. 6 of 2023 on the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law;

3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi; dan
4. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Emiten atau Perusahaan Publik

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
3. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
4. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
5. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
7. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Audit Internal

1. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit;
2. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal; dan
3. POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Konvensional

1. POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
2. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
3. POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
4. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
5. POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum; dan
6. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

3. Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure; and
4. Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.

Financial Services Authority Regulations (POJK)

Issuers or Public Companies

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Public Companies;
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Public Companies;
3. POJK No. 35/POJK.04/2014 on the Corporate Secretary of Public Companies;
4. POJK No. 8/POJK.04/2015 on the Website of Public Companies;
5. POJK No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Governance Guidelines for Public Companies;
6. POJK No. 31/POJK.04/2015 on the Disclosure of Material Information or Facts by Public Companies; and
7. POJK No. 29/POJK.04/2016 on the Annual Report of Public Companies.

Internal Audit

1. POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Audit Committee Charter;
2. POJK No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter; and
3. POJK No. 1/POJK.03/2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function at Commercial Banks.

Conventional

1. POJK No. 4/POJK.03/2016 concerning the Assessment of the Soundness Level of Commercial Banks;
2. POJK No. 18/POJK.03/2016 concerning Risk Management Implementation for Commercial Banks;
3. POJK No. 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks;
4. POJK No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of the Compliance Function at Commercial Banks;
5. POJK No. 37/POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Reports by Commercial Banks; and
6. POJK No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.

Lembaga Jasa Keuangan;

1. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)

1. SEOJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
2. SEOJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
3. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; dan
4. SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Lain-Lain

1. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG); dan
2. Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Artha Graha Internasional Tbk No. 06 tanggal 17 Juli 2024.

Financial Services Institutions

1. POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test for Primary Parties of Financial Services Institutions.

Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK)

1. SEOJK No. 32/POJK.04/2015 dated November 17, 2015 regarding Public Company Governance;
2. SEOJK No. 55/POJK.04/2015 dated December 29, 2015 regarding the Establishment and Implementation uidelines for the Audit Committee;
3. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks; and
4. SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 dated June 29, 2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

Others

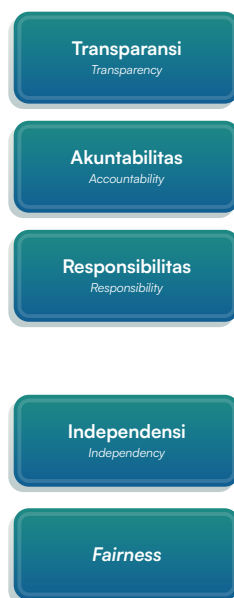
1. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) from the National Committee on Governance Policy (KNKG); and
2. The Company's Articles of Association as stated in the Deed of Meeting Resolution and Amendment to the Articles of Association of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk No. 06 dated July 17, 2024.

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Prinsip-prinsip penerapan GCG yang dilakukan oleh Bank Artha Graha Internasional mengacu pada 4 pilar governansi sebagaimana disampaikan dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yaitu:

CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

The principles of GCG implementation at Bank Artha Graha Internasional refer to the four pillars of governance as outlined in the Indonesian Code of Good Corporate Governance (PUGKI) issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG), namely:

PEDOMAN GCG
2006, 2019PEDOMAN GOVERNANSI
2021Perilaku Beretika
Ethical Conduct

Dalam melaksanakan kegiatannya, Bank senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

In conducting its activities, the Bank consistently upholds honesty, treats all parties with respect, honors its commitments, and builds as well as maintains moral values and trust. The Bank considers the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality and is managed independently to ensure that each corporate organ operates without domination or interference from any other party.

Akuntabilitas
Accountability

Bank dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Bank dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

The Bank is able to account for its performance in a transparent and fair manner. To this end, the Bank is managed properly, in a measurable way, and in accordance with corporate interests while taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite for achieving sustainable performance.

Transparansi Transparency	Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Bank menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Bank mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. <i>To maintain objectivity in conducting its business, the Bank provides material and relevant information in a manner that is accessible and understandable to stakeholders. The Bank takes the initiative to disclose not only matters required by laws and regulations but also those that are important for decision-making by shareholders, creditors, and other stakeholders.</i>
Keberlanjutan Sustainability	Bank mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. <i>The Bank complies with applicable laws and regulations and is committed to fulfilling its responsibilities toward society and the environment. This commitment aims to contribute to sustainable development through collaboration with all relevant stakeholders to improve lives in a way that aligns with the Bank's business interests and the broader sustainable development agenda.</i>

Adapun 8 (delapan) prinsip governansi terkini yang diterapkan oleh Bank Artha Graha Internasional dengan mengacu pada PUGKI dimaksud adalah:

The 8 (eight) current governance principles implemented by Bank Artha Graha Internasional, referring to the PUGKI, are as follows:

Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris <i>Principle 1:</i> <i>Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners</i>	Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan. <i>The Board of Directors and the Board of Commissioners carry out their roles and responsibilities independently to create sustainable value in the long-term interests of the corporation and its shareholders, while taking into account the interests of stakeholders.</i>
Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris <i>Principle 2:</i> <i>Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners</i>	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris. Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan. <i>Members of the Board of Directors and Board of Commissioners are selected and appointed in a manner that ensures the composition of the Board of Directors as the managing body and the Board of Commissioners as the supervisory body is diverse. Each consists of individuals with the commitment, knowledge, capability, experience, and expertise required to appropriately fulfill their respective management and supervisory roles.</i> <i>Remuneration is designed to effectively align the interests of members of the Board of Directors and Board of Commissioners with the corporation's long-term interests and sustainable value creation.</i>
Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris <i>Principle 3:</i> <i>Working Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners</i>	Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi. <i>The Board of Directors and the Board of Commissioners maintain a close, open, constructive, professional, and trust-based working relationship for the best interests of the corporation.</i>

Prinsip 4: Perilaku Etis <i>Principle 4:</i> <i>Ethical Conduct</i>	Bank memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi. <i>The Bank is committed to acting ethically and responsibly, upholding organizational values and culture.</i>
Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan <i>Principle 5:</i> <i>Risk Management, Internal Control, and Compliance</i>	Bank menjalankan praktik governansi korporat yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja korporat dalam menjalankan bisnis secara berintegritas. <i>The Bank integrates corporate governance practices with the implementation of internal control systems, risk management, and an effective compliance management system to support the achievement of the Bank's goals, vision, mission, objectives, and performance targets while conducting business with integrity.</i>
Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi <i>Principle 6:</i> <i>Disclosure and Transparency</i>	Bank membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi. <i>The Bank ensures accurate and timely disclosure of all material information concerning the corporation.</i>
Prinsip 7: Hak-hak Pemegang Saham <i>Principle 7:</i> <i>Shareholder Rights</i>	Bank melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka. <i>The Bank protects and facilitates the exercise of shareholder rights and ensures fair treatment of all shareholders, including minority shareholders. All shareholders have the opportunity to seek effective redress for violations of their rights.</i>
Prinsip 8: Hak-hak Pemangku Kepentingan <i>Principle 8:</i> <i>Stakeholder Rights</i>	Bank mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial. <i>The Bank recognizes stakeholder rights as stipulated in applicable laws and regulations or in agreements with the corporation, and encourages active cooperation with stakeholders in creating wealth, employment, and financially sustainable business operations.</i>

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUSAHAAN

Developments in the Implementation of Good Corporate Governance within the Company

ROADMAP PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN GCG

Perseroan telah menyusun *Roadmap* GCG untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap berbagai aspek tata kelola perusahaan yang perlu ditingkatkan serta untuk menumbuhkan komitmen Manajemen dalam menerapkan GCG yang kemudian senantiasa diikuti dengan langkah penyempurnaan dan konsistensi penerapannya. Gambaran pelaksanaan tersebut diukur melalui pelaksanaan *self assessment* yang dilakukan secara berkala, yang hasilnya dijadikan acuan untuk melakukan program-program perbaikan kualitas penerapan di periode-periode berikutnya.

SELF-ASSESSMENT KUALITAS PENERAPAN GCG

Self-assessment kualitas penerapan GCG dilakukan secara periodik setiap semester yaitu pada bulan Juni dan Desember pada tahun berjalan. Penilaian sendiri ini dimaksudkan untuk memetakan kekuatan (*strength*) dan kelemahan pelaksanaan GCG di Bank Artha Graha Internasional yang ditinjau dari tiga aspek yaitu:

1. Governance Structure

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Perseroan. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Perseroan adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Perseroan. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Perseroan antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

2. Governance Process

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *Stakeholders*.

GCG QUALITY IMPROVEMENT ROADMAP

The Company has developed a GCG Roadmap to provide a comprehensive overview of the various corporate governance aspects that require improvement and to foster Management's commitment to implementing GCG. This is continuously followed by enhancement efforts and consistent application. The implementation is evaluated through periodic self-assessments, the results of which serve as a reference for improving the quality of governance practices in subsequent periods.

SELF-ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION QUALITY

Self-assessment of GCG implementation quality is conducted periodically every semester, in June and December of the current year. The purpose of this self-assessment is to map out the strengths and weaknesses in the implementation of GCG at Bank Artha Graha Internasional, reviewed from the following three aspects:

1. Governance Structure

The governance structure assessment aims to evaluate the adequacy of the Company's governance structure and infrastructure to ensure that the implementation of GCG principles produces outcomes that meet stakeholder expectations. The Company's governance structure includes the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and relevant work units. Governance infrastructure includes policies and procedures, management information systems, and the roles and functions of each organizational structure.

2. Governance Process

This assessment evaluates the effectiveness of the governance implementation process, supported by adequate governance structure and infrastructure, to ensure the resulting outcomes align with Stakeholder expectations.

3. Governance Outcome

Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan. Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

- a. Kecukupan transparansi laporan;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Perlindungan konsumen;
- d. Objektivitas dalam melakukan *assessment/audit*;
- e. Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
- f. Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada regulator.

Self-Assessment yang dilakukan meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yang meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Proses penilaian *self-assessment* tata kelola Bank Artha Graha Internasional melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian tata kelola dimaksud.

3. Governance Outcome

This assessment focuses on the quality of outcomes that fulfill stakeholder expectations as a result of the governance process, supported by adequate structure and infrastructure. Outcomes include both qualitative and quantitative aspects, such as:

- a. *Transparency of reporting;*
- b. *Compliance with laws and regulations;*
- c. *Consumer protection;*
- d. *Objectivity in assessments/audits;*
- e. *Bank performance, including profitability, efficiency, and capital adequacy; and/or*
- f. *Improvement or deterioration in compliance with prevailing regulations and resolution of bank-related issues such as fraud, legal lending limit violations (BMPK), and regulatory reporting breaches.*

The self-assessment covers 11 (eleven) GCG implementation assessment factors, including:

1. *Performance of duties and responsibilities of the Board of Directors;*
2. *Performance of duties and responsibilities of the Board of Commissioners;*
3. *Completeness and performance of Committees;*
4. *Management of conflict of interest;*
5. *Implementation of the compliance function;*
6. *Implementation of the internal audit function;*
7. *Implementation of the external audit function;*
8. *Implementation of risk management, including internal control systems;*
9. *Provision of funds to related parties and large exposures;*
10. *Transparency of the Bank's financial and non-financial condition, governance report, and internal reporting; and*
11. *The Bank's strategic plan.*

PARTIES CONDUCTING THE ASSESSMENT

The self-assessment process of Bank Artha Graha Internasional's governance involves the full participation of the Board of Commissioners, Board of Directors, and work units relevant to the respective assessment factors.

SKOR PENILAIAN

Kesimpulan umum hasil penilaian mandiri (Self-Assessment) pelaksanaan Good Corporate Governance Bank pada tahun 2024.

Hasil Self-Assessment Periode Januari - Juni 2024

Self-Assessment Results for the Period January - June 2024

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola Self-Assessment Results on Governance Implementation	
Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank. <i>This rating reflects that the Bank's Management has generally implemented Good Governance practices. This is evidenced by the adequate fulfillment of governance principles. Any weaknesses identified in the application of governance principles are generally not significant and can be addressed through the Bank's normal course of management actions.</i>

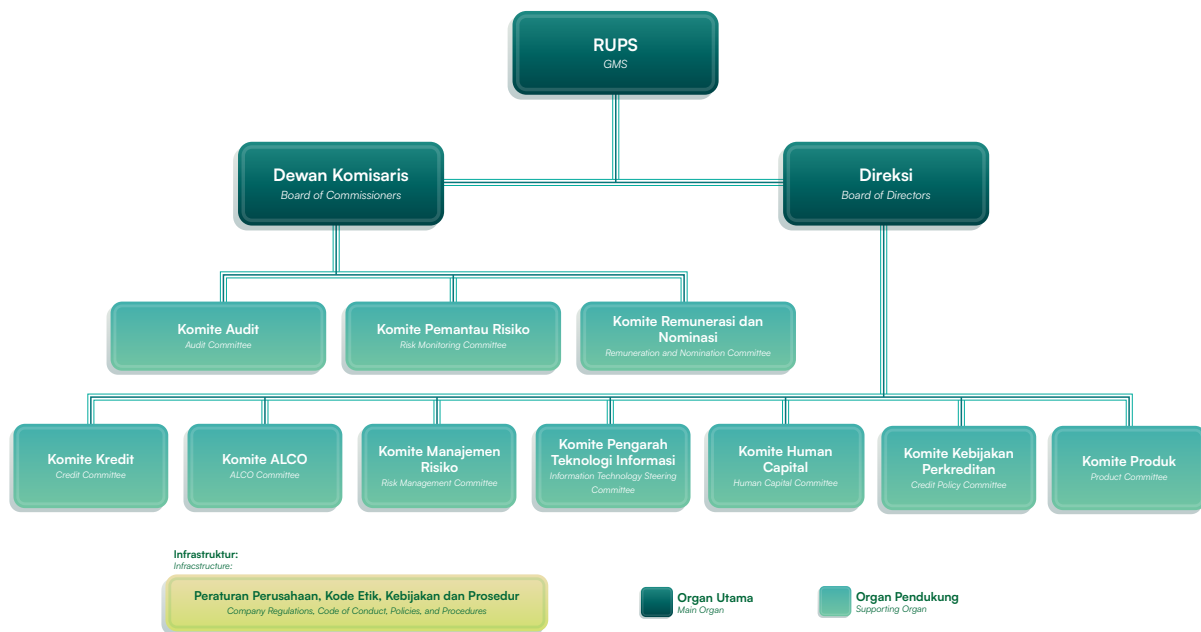
Hasil Self-Assessment Periode Juli - Desember 2024

Self-Assessment Results for the Period July - December 2024

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola Self-Assessment Results on Governance Implementation	
Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank. <i>This rating reflects that the Bank's Management has generally implemented Good Governance practices. This is evidenced by the adequate fulfillment of governance principles. Any weaknesses identified in the application of governance principles are generally not significant and can be addressed through the Bank's normal course of management actions.</i>

STRUKTUR DAN PROSES TATA KELOLA

Governance Structure and Process



Struktur tata kelola Bank Artha Graha Internasional mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta Anggaran Dasar Bank.

Secara garis besar, berikut adalah peran organ utama di dalam struktur GCG Bank Artha Graha Internasional:

1. RUPS adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak dapat diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar;
2. Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi; dan
3. Direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Bank Artha Graha Internasional's governance structure refers to the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the Financial Services Authority Regulation on the Implementation of Governance for Commercial Banks, as well as the Bank's Articles of Association.

Generally, the roles of the main organs in Bank Artha Graha Internasional's GCG structure are as follows:

1. GMS is an organ that has authority that cannot be given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or the Articles of Association;
2. The Board of Commissioners is the organ in charge of conducting general and/or special supervision in accordance with the Articles of Association and advising the Board of Directors; and
3. The Board of Directors is the organ authorized and fully responsible for the management of the Company for the interests of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and representing the Company, in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Sistem kepengurusan Bank menganut model 2 (dua) badan atau *two tier system*, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Selain keberadaan organ utama, Bank Artha Graha Internasional juga memiliki organ-organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, mencakup:

1. Organ Pendukung Dewan Komisaris
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko; dan
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Organ Pendukung Direksi
 - a. Komite Kredit;
 - b. Komite ALCO;
 - c. Komite Manajemen Risiko;
 - d. Komite Pengarah Teknologi Informasi;
 - e. Komite Human Capital;
 - f. Komite Kebijakan Perkreditan; dan
 - g. Komite Produk.

PROSES TATA KELOLA

Proses tata kelola merupakan proses penerapan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan, sehingga dapat memberikan hasil tata kelola yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Bank senantiasa memastikan penerapan GCG dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *Best Practice* dengan memberlakukan beberapa kebijakan (*soft structure*) yang berkaitan dengan penerapan GCG, yaitu:

1. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Pedoman Kerja Komite;
3. Kode Etik;
4. Kebijakan Manajemen Risiko; dan
5. Piagam Audit.

The Bank's management system adheres to the 2 (two) tier system, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors with clear authorities and responsibilities in accordance with their respective functions as mandated in the laws and regulations and the Articles of Association.

In addition to the main organs, Bank Artha Graha Internasional also has supporting organs under the Board of Commissioners and Board of Directors, including:

1. *Supporting Organ of the Board of Commissioners*
 - a. Audit Committee;*
 - b. Risk Monitoring Committee; and*
 - c. Remuneration and Nomination Committee.*
2. *Supporting Organ of the Board of Directors*
 - a. Credit Committee;*
 - b. ALCO Committee;*
 - c. Risk Management Committee;*
 - d. Information Technology Steering Committee;*
 - e. Human Capital Committee;*
 - f. Credit Policy Committee; and*
 - g. Product Committee.*

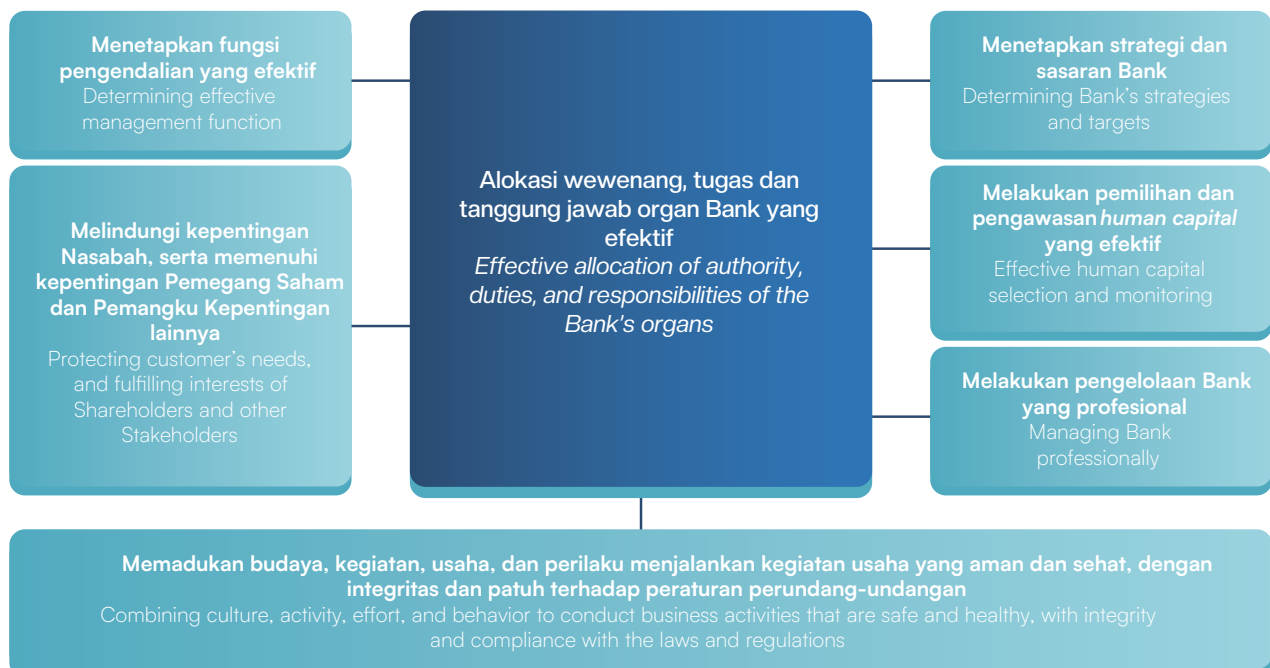
GOVERNANCE PROCESS

The governance process is a process of applying the principles of governance supported by the adequacy of corporate governance structures and infrastructure, so as to provide governance results in accordance with stakeholder expectations. The Bank always ensures that GCG implementation can run in accordance with laws and regulations and best practices by enforcing several policies (soft structure) related to GCG implementation, namely:

1. *Guidelines for the Board of Commissioners and Directors;*
2. *Committee Guidelines;*
3. *Code of Ethics;*
4. *Risk Management Policy; and*
5. *Audit Charter.*

Bank Artha Graha Internasional melaksanakan mekanisme GCG dalam sebuah tatanan untuk mengintegrasikan seluruh organ GCG yang memiliki tugas, wewenang maupun tanggung jawab yang berbeda-beda. Mekanisme tata kelola yang diterapkan di Bank Artha Graha Internasional digambarkan sebagai berikut:

Bank Artha Graha Internasional implements the GCG mechanism in order to integrate all GCG organs that have different responsibilities. The governance mechanism implemented in Bank Artha Graha Internasional is described as follows:



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan Bank Artha Graha Internasional, yang memiliki hak dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. RUPS juga menjadi media komunikasi antara Pemegang Saham dengan Dewan Komisaris dan Direksi melalui forum untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas serta hasil kinerja Bank kepada Pemegang Saham.

DASAR HUKUM

Dalam menyelenggarakan RUPS, Bank mengacu pada berbagai peraturan dan ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
3. Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 06 Tahun 2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

JENIS RUPS

Dalam pelaksanaannya, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

1. RUPS Tahunan

RUPS ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku. Agenda utama RUPS Tahunan terdiri dari pengajuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan dari Direksi untuk disahkan dan disetujui oleh Pemegang Saham, melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun depan, memutuskan penggunaan laba, penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, mengangkat atau memberhentikan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dan memutuskan hal-hal lain yang diperlukan.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the Corporate Governance structure of Bank Artha Graha Internasional, which holds rights and authority not possessed by the Board of Commissioners and the Board of Directors, within the limits set by the applicable laws and the Articles of Association of the Company. GMS also serves as a communication platform between the Shareholders and the Board of Commissioners and the Board of Directors, through a forum for presenting accountability reports on the execution of duties and the performance results of the Bank to the Shareholders.

LEGAL BASIS

In conducting the General Meeting of Shareholders (GMS), the Bank refers to various regulations and provisions, including:

1. *Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;*
2. *OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders for Public Companies;*
3. *OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders for Public Companies Electronically;*
4. *Deed of Resolution of the Meeting on the Amendment of the Articles of Association No. 06 of 2024 dated July 17, 2024, concerning the Amendment of the Articles of Association of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.*

TYPE OF GMS

In its implementation, the General Meeting of Shareholders (GMS) consists of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

1. Annual GMS

The AGMS must be held no later than 6 (six) months after the end of the financial year. The main agenda of the AGMS includes the submission of the Financial Statements and the Annual Report by the Board of Directors for approval and ratification by the Shareholders, the appointment of a Public Accounting Firm for the following year, decisions on profit distribution, determination of salaries and allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, the appointment or dismissal of members of the Board of Directors or the Board of Commissioners, and any other necessary matters.

2. RUPS Luar Biasa

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan kapan saja sesuai keperluan Perseroan oleh Direksi ataupun Dewan Komisaris, atas permintaan dari Pemegang Saham.

2. Extraordinary GMS

The EGMS can be convened at any time as needed by the Company's Board of Directors or Board of Commissioners, upon the request of the Shareholders.

TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPS

Prosedur penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian rencana penyelenggaraan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS;
2. Pengumuman RUPS kepada para Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, tidak termasuk tanggal pengumuman dan pemanggilan RUPS;
3. Pemanggilan RUPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan pelaksanaan RUPS;
4. Penyampaian bukti pengumuman dan pemanggilan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan pengumuman dan pemanggilan; dan
5. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perusahaan Terbuka.

Penyajian informasi terkait RUPS disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris dan memuat informasi yang sama sebagaimana pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

SISTEM PENYELENGGARAAN RAPAT

Penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau e-RUPS merupakan sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan RUPS. Melalui penyelenggaraan RUPS ini diharapkan mampu meningkatkan praktik tata kelola yang baik bagi Bank Artha Graha Internasional sehingga dapat semakin meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham terhadap Bank, dan pada akhirnya membawa dampak positif terhadap keberlangsungan Bank.

PROCEDURES FOR ORGANIZING GMS

The procedures for convening the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) are as follows:

1. *Submission of the GMS plan to the Financial Services Authority (OJK) must be made no later than 5 (five) working days prior to the GMS announcement;*
2. *Announcement of the GMS to Shareholders must be made at the latest 14 (fourteen) days prior to the GMS invitation date, excluding the dates of the announcement and the invitation;*
3. *The GMS invitation must be issued no later than 21 (twenty-one) days prior to the GMS date, excluding the dates of the invitation and the GMS itself;*
4. *Submission of evidence of the GMS announcement and invitation to the Financial Services Authority must be made no later than 2 (two) working days after the issuance of the announcement and invitation; and*
5. *The obligation to publish announcements, invitations, corrections to invitations, re-invitations, and GMS summary minutes-as stipulated in the Financial Services Authority Regulation-must be fulfilled by Public Companies with shares listed on a stock exchange through at least the following platforms:*
 - a. *the e-GMS provider's website;*
 - b. *the stock exchange's website; and*
 - c. *the Public Company's website.*

Information related to the GMS must be presented in both Indonesian and a foreign language, with the foreign language being at least English and containing the same information as that published in Indonesian.

MEETING ORGANIZATION SYSTEM

The implementation of the General Meeting of Shareholders electronically, or e-GMS, refers to an electronic system or platform used to facilitate the conduct of the GMS. This approach is expected to enhance the Bank's governance practices, thereby strengthening shareholder confidence in Bank Artha Graha Internasional and ultimately contributing positively to the Bank's sustainability.

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2024

Pada tahun 2024 Perseroan menyelenggarakan dua RUPS, yakni RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB), dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Juni 2024, pukul 10.52-11.45 WIB bertempat di Discovery Sky, Lantai 9, Hotel Discovery Ancol, Jalan Lodan Timur No. 7, Ancol Taman Impian, Jakarta Utara, 14430.

Mata Acara Rapat

Agenda RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2024;
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris; dan
5. Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan.

Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris:

Board of Commissioners:

Komisaris Utama/Komisaris Independen

President Commissioner/Independent Commissioner

Bapak/Mr. Kiki Syahnakri

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Ibu/Mrs. Elizawatie Simon

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Ibu/Mrs. Pesta Uli Sitanggang

IMPLEMENTATION OF THE 2024 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In 2024, the Company convened two GMS meetings, namely the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), held on Wednesday, June 26, 2024, from 10:52 to 11:45 WIB at Discovery Sky, 9th Floor, Hotel Discovery Ancol, Jalan Lodan Timur No. 7, Ancol Taman Impian, North Jakarta, 14430.

Meeting Agenda

AGMS Agenda:

1. Approval of the Annual Report, including ratification of the Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2023 Fiscal Year;
2. Determination of the allocation of the Company's Net Profit for the 2023 Fiscal Year;
3. Appointment of the Public Accounting Firm for the 2024 Fiscal Year;
4. Determination of salaries and allowances for members of the Board of Directors and salaries or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners; and
5. Changes to the Company's Management Composition

EGMS Agenda:

1. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association.

Board of Commissioners and Board of Directors Present at the Meeting

Direksi:*Board of Directors:*

Direktur Utama <i>President Director</i>	Bapak/Mr. Andy Kasih
Wakil Direktur Utama <i>Vice President Director</i>	Ibu/Mrs. Christina Harapan
Direktur <i>Director</i>	Bapak/Mr. Indra S. Budianto
Direktur <i>Director</i>	Bapak/Mr. Indrastomo Nugroho
Direktur <i>Director</i>	Bapak/Mr. Handoyo Soedirdja

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Kiki Syahnakri, Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KOM-BAGI/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024.

Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah, berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

1. RUPST: 17.782.312.491 saham, atau mewakili 87,92% dari 20.223.412.907 saham; dan
2. RUPSLB: 17.782.232.191 saham, atau mewakili 87,92% dari 20.223.412.907 saham.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Meeting Chairperson

The Meeting was chaired by Mr. Kiki Syahnakri, President Commissioner/Independent Commissioner of the Company, pursuant to the Resolution of the Board of Commissioners No. 001/KOM-BAGI/VI/2024 dated June 25, 2024.

Shareholders Attendance

The Meeting was attended by shareholders and their legitimate proxies as recorded in the Shareholders Register issued by PT Raya Saham Registra, the Company's Share Registrar, with the following details:

1. AGMS: 17,782,312,491 shares, representing 87.92% of the total 20,223,412,907 shares; and
2. EGMS: 17,782,232,191 shares, representing 87.92% of the total 20,223,412,907 shares.

Question and/or Opinion Submission

Shareholders and their proxies were given the opportunity to raise questions and/or express opinions for each agenda item of the Meeting; however, no questions or opinions were submitted.

Decision-Making Mechanism

All resolutions of the Meeting were adopted based on deliberation to reach a consensus. In the event that no consensus was reached, the resolution would be adopted by voting.

Keputusan Rapat RUPS Tahunan

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.

Resolution of the Annual General Meeting (AGM)

Meeting Agenda 1:

Approval of the Annual Report, including the ratification of the Financial Statements and the Supervisory Board's Report for the fiscal year 2023.

Perhitungan Suara Vote Count			
Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain	Total Setuju Total Agree
17.782.309.491 saham shares (99,99%)	Nihil None	3.000 saham shares (0,00%)	17.782.312.491 saham shares (100,00%)
Keputusan			
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;			
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan laporannya Nomor Ref: 00043/3.0409/AU.1/07/0524-3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan "Opini menyajikan secara Wajar".			
Resolution			
1. To duly receive and approve the Annual Report of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2023, including the Company's Activity Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the fiscal year 2023.			
2. To receive and ratify the Company's Financial Statements for the fiscal year 2023, which were audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono under report No. Ref: 00043/3.0409/AU.1/07/0524-3/1/III/2024 dated March 28, 2024, with a "Present Fairly Opinion."			

Mata Acara 2

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023

Meeting Agenda 2

Determination of the Use of the Company's Net Profit for the Financial Year 2023

Perhitungan Suara Vote Count			
Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain	Total Setuju Total Agree
17.773.992.925 saham shares (99,95%)	8.316.566 saham shares (0,04%)	3.000 saham shares (0,00%)	17.773.995.925 saham shares (99,95%)
Keputusan			
Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan seluruh laba bersih tersebut dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan ekspansi usaha Perseroan.			
Resolution			
To approve that no dividends shall be distributed for the fiscal year ending on December 31, 2023, and that the entire net profit shall be allocated to strengthen the Company's capital structure and support its business expansion.			

Mata Acara 3

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2024

Meeting Agenda 3

Appointment of Public Accountant Firm for Financial Year 2024

Perhitungan Suara
Vote Count

Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain	Total Setuju Total Agree
17.782.309.491 saham shares (99,99%)	Nihil None	3.000 saham shares (0,00%)	17.782.312.491 saham shares (100,00%)

Keputusan

Menyetujui memberikan kuasa dan/atau mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk:

- Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024, dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan kriteria POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia serta memiliki reputasi, jika Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional;
- Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

Resolution

Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners, based on the recommendation of the Audit Committee, to:

- Reappoint the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono to audit the Company's financial statements for the fiscal year ending 31 December 2024, and/or appoint a substitute Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK), in accordance with the criteria set forth in OJK Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, and Bank Indonesia, and that has a good reputation, in the event the appointed Public Accounting Firm is unable to complete the audit of the annual historical financial information for the Professional Assignment Period;
- Determine the honorarium and other terms related to the appointment of the said Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

Mata Acara 4

Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris.

Meeting Agenda 4

Determination of salaries and benefits of Board of Directors, and salaries or honorarium and benefits of Board of Commissioners.

Perhitungan Suara
Vote Count

Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain	Total Setuju Total Agree
17.782.309.491 saham shares (99,99%)	Nihil None	3.000 saham shares (0,00%)	17.782.312.491 saham shares (100,00%)

Keputusan

Menyetujui tidak adanya kenaikan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris.

Resolution

Approved no increase in salaries and benefits for members of the Board of Directors and benefits for members of the Board of Commissioners.

Mata Acara 5

Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan

Meeting Agenda 5*Changes in the Composition of the Company's Management***Perhitungan Suara**
Vote Count

Setuju <i>Agree</i>	Tidak Setuju <i>Disagree</i>	Abstain	Total Setuju <i>Total Agree</i>
17.765.906.091 saham shares (99,90%)	16.403.400 saham shares (0,09%)	3.000 saham shares (0,00%)	17.765.909.091 saham shares (99,90%)

Keputusan

- Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan yaitu:

Direksi Ibu Christina Harapan, selaku Wakil Direktur Utama. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Kiki Syahnakri
- Wakil Komisaris Utama : Bapak Tomy Winata
- Wakil Komisaris Utama : Bapak Sugianto Kusuma
- Komisaris Independen : Ibu Elizawatie Simon
- Komisaris Independen : Ibu Pesta Uli Sitanggang

Direksi

- Direktur Utama : Bapak Andy Kasih
- Wakil Direktur Utama : Ibu Christina Harapan
- Direktur Kepatuhan/Direktur Independen : Bapak Indrastomo Nugroho
- Direktur : Bapak Indra Sintung Budianto
- Direktur : Bapak Handoyo Soedirdja

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi terkait keputusan tersebut, dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Resolution

- To reappoint a member of the Company's Board of Directors, namely:

Board of Directors Mrs. Christina Harapan, as Vice President Director. Thus, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors shall be as follows:

Board of Commissioners

- President Commissioner/Independent Commissioner : Mr. Kiki Syahnakri
- Vice President Commissioner : Mr. Tomy Winata
- Vice President Commissioner : Mr. Sugianto Kusuma
- Independent Commissioner : Mrs. Elizawatie Simon
- Independent Commissioner : Mrs. Pesta Uli Sitanggang

Board of Directors

- President Director : Mr. Andy Kasih
- Vice President Director : Mrs. Christina Harapan
- Compliance Director/Independent Director : Mr. Indrastomo Nugroho
- Director : Mr. Indra Sintung Budianto
- Director : Mr. Handoyo Soedirdja

- To grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to state or incorporate the resolution regarding the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors into a notarial deed, including to state the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors pursuant to the said resolution, and to report the changes in the Company's data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as well as to perform any and all actions necessary in connection with the said resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.

Keputusan Rapat RUPS Luar Biasa

Resolutions of EGMS

Mata Acara 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Meeting Agenda 1

Approval of Amendments to the Company's Articles of Association.

Perhitungan Suara
Vote Count

Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain	Total Setuju Total Agree
17.765.825.791 saham shares (99,90%)	16.403.400 saham shares (0,09%)	3.000 saham shares (0,00%)	17.765.828.791 saham shares (99,90%)

Keputusan

- Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
 - Ketentuan tentang Direksi;
 - Ketentuan tentang Tugas dan Wewenang Direksi;
 - Ketentuan tentang Dewan Komisaris; dan
 - Ketentuan tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.
- Menyetujui penambahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
 - Ketentuan tentang Aspek Transparansi Direksi; dan
 - Ketentuan tentang Aspek Transparansi Dewan Komisaris.
- Menyetujui mengubah dan menyusun kembali seluruh pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dari pasal pertama sampai dengan pasal terakhir, dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan akta notaris tersendiri dihadapan Notaris, memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Resolution

- Approved the amendments to several provisions in the Company's Articles of Association, namely:
 - Provisions regarding the Board of Directors;
 - Provisions regarding the Duties and Authorities of the Board of Directors;
 - Provisions regarding the Board of Commissioners; and
 - Provisions regarding the Duties and Authorities of the Board of Commissioners.
- Approved the addition of several provisions to the Company's Articles of Association, namely:
 - Provisions regarding the Transparency of the Board of Directors; and
 - Provisions regarding the Transparency of the Board of Commissioners.
- Approved the amendment and restatement of all articles in the Company's Articles of Association from the first article to the final article to align with and comply with OJK Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.
- Granted power of attorney to the Company's Board of Directors to state the resolutions on the amendments to the Articles of Association in a separate notarial deed before a Notary, to apply for approval and/or notify the amendment of the Articles of Association/Company Data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to take all necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Selasa, 27 Juni 2023, pukul 10.18-10.57 WIB bertempat di Flores A Room, Lobby Level Hotel Borobudur Jakarta Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 01, Jakarta Pusat 10710.

Realisasi Keputusan RUPST dan RUPSLB Tahun 2023

Keputusan RUPS pemegang saham di tahun 2023 dan tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas keputusan pemegang saham tersebut disajikan di bawah ini.

2023 ANNUAL GMS OF PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK

In 2023, the Company held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on Tuesday, 27 June 2023, from 10:18 to 10:57 Western Indonesia Time (WIB), at Flores A Room, Lobby Level, Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 01, Central Jakarta 10710.

Realization of Resolutions from the 2023 Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders

The resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) in 2023 and the follow-up actions taken by management in response to those resolutions are presented below.

Tanggal Date	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow-Up
27 Juni 2023 <i>June 27, 2023</i>	Mata Acara Pertama 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022; 2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan laporannya Nomor Ref: 00034/3.0409/AU.1/07/0524-2/1/III/2023, tanggal 29 Maret 2023 dengan Opini menyajikan secara Wajar. First Agenda Item 1. To accept and approve the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the Fiscal Year 2022, including the Activity Report of the Company and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2022; 2. To receive and ratify the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2022 audited by Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono with its report Number Ref: 00034/3.0409/AU.1/07/0524-2/1/III/2023, dated March 29, 2023 with a Fair Presentation Opinion.	Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022. <i>Approval of the Annual Report, including ratification of the Financial Statements and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2022 fiscal year.</i>
	Mata Acara Kedua Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan seluruh laba bersih tersebut dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan ekspansi usaha Perseroan. Second Agenda Item <i>Approved that there will be no dividend distribution for the Fiscal Year ending December 31, 2022 and that the entire net profit will be used to strengthen the Company's capital structure and business expansion.</i>	Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022. <i>Determination of Net Profit Allocation for the 2022 Fiscal Year</i>

Tanggal Date	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow-Up
	Mata Acara Ketiga Menyetujui memberikan kuasa dan/atau mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk: - Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan kriteria POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia serta memiliki reputasi, jika Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional; - Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. Third Agenda Item <i>Approved to grant power and/or delegate authority to the Company's Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee to:</i> <i>Re-appoint Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono to audit the Company's books for the Financial Year ending on December 31, 2023, and/or a substitute Public Accounting Firm that has been registered with the Financial Services Authority (OJK), in accordance with the criteria of POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Offices in Financial Services Activities, and Bank Indonesia and has a reputation, if the appointed Public Accounting Firm is unable to complete the provision of audit services for annual historical financial information during the Professional Assignment Period;</i> <i>Determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.</i>	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2023 <i>Appointment of Public Accountant Firm for Financial Year 2023</i>
	Mata Acara Keempat Menyetujui tidak adanya kenaikan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan tunjangan anggota Dewan Komisaris. Fourth Agenda <i>Approved no increase in salaries and benefits for members of the Board of Directors and no increase in benefits for members of the Board of Commissioners.</i>	Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris. <i>Determination of salaries and benefits for members of the Board of Directors and salaries or honoraria and benefits for the Board of Commissioners.</i>

Tanggal Date	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow-Up
	Mata Acara Kelima 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Nicolaus Eko Riwayanto selaku Komisaris Independen dan Bapak Andy Dharma selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengucapkan terima kasih atas kinerja dan jasa-jasanya selama menjabat selaku Komisaris Independen dan Direktur Perseroan. 2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Anas Latief selaku Direktur Kepatuhan/Direktur Independen Perseroan, terhitung sejak efektifnya pengangkatan Bapak Indrastomo Nugroho selaku penggantinya yang akan disebut, dengan mengucapkan terima kasih atas kinerja dan jasa-jasanya selama menjabat selaku Direktur Kepatuhan/Direktur Independen Perseroan. 3. Mengangkat Bapak Indrastomo Nugroho selaku Direktur Kepatuhan/Direktur Independen menggantikan Bapak Anas Latief, berlaku efektif sejak yang bersangkutan memperoleh persetujuan (<i>Fit and Proper</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 4. Memberhentikan Bapak Indrastomo Nugroho selaku Direktur Perseroan berlaku efektif sejak yang bersangkutan memperoleh persetujuan (<i>Fit and Proper</i>) dari OJK selaku Direktur Kepatuhan/Direktur Independen. 5. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yaitu: Dewan Komisaris • Bapak Kiki Syahnakri, selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen; • Bapak Tomy Winata, selaku Wakil Komisaris Utama; • Bapak Sugianto Kusuma, selaku Wakil Komisaris Utama. Direksi • Bapak Andy Kasih, selaku Direktur Utama; • Bapak Indra S. Budianto, selaku Direktur. 6. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yaitu: Dewan Komisaris Ibu Pesta Uli Sitanggang*), selaku Komisaris Independen; *Berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan (<i>Fit and Proper</i>) Direksi Bapak Handoyo Soedirdja*), selaku Direktur; *Berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan (<i>Fit and Proper</i>) Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris 1. Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Kiki Syahnakri 2. Wakil Komisaris Utama : Bapak Tomy Winata 3. Wakil Komisaris Utama : Bapak Sugianto Kusuma 4. Komisaris Independen : Ibu Elizawatie Simon 5. Komisaris Independen : Ibu Pesta Uli Sitanggang*) *Efektif setelah diperolehnya persetujuan <i>Fit and Proper Test</i> Direksi 1. Direktur Utama : Bapak Andy Kasih 2. Wakil Direktur Utama : Ibu Christina Harapan 3. Direktur Kepatuhan/Direktur Independen : Bapak Indrastomo Nugroho*) 4. Direktur : Bapak Indra Sintung Budianto 5. Direktur : Bapak Handoyo Soedirdja*) *Efektif setelah diperolehnya persetujuan <i>Fit and Proper Test</i> 7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan/ menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi terkait keputusan tersebut, dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 8. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) POJK 55/2016 yang menyatakan bahwa Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dalam RUPS mengenai Independensinya, maka dengan itu Bapak Kiki Syahnakri selaku Komisaris Utama/ Komisaris Independen telah menyatakan Independensinya yang tertuang dalam Surat Pernyataan Independensi tertanggal 23 Juni 2023.	Perubahan Susunan Kepengurusan Perseroan. <i>Changes to the Company's Management Composition.</i>

Tanggal Date	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow-Up
	Fifth Agenda - Honorably discharged Mr. Nicolaus Eko Riwayanto as Independent Commissioner and Mr. Andy Dharma as Director of the Company, effective as of the closing of this Meeting, with gratitude for their performance and services during their tenure; - Honorably discharged Mr. Anas Latief as Compliance Director/Independent Director of the Company, effective upon the appointment of Mr. Indrastomo Nugroho as his replacement, with gratitude for his performance and services during his tenure; - Appointed Mr. Indrastomo Nugroho as Compliance Director/Independent Director replacing Mr. Anas Latief, effective upon obtaining Fit and Proper approval from the Financial Services Authority (OJK); - Discharged Mr. Indrastomo Nugroho as Director of the Company, effective upon obtaining Fit and Proper approval from OJK as Compliance Director/Independent Director; - Reappointed members of the Board of Commissioners and Board of Directors: Board of Commissioners - Mr. Kiki Syahnakri, as President Commissioner/Independent Commissioner; - Mr. Tomy Winata, as Vice President Commissioner; - Mr. Sugianto Kusuma, as Vice President Commissioner; Board of Directors - Mr. Andy Kasih, as President Director; - Mr. Indra S. Budianto, as Director; - Appointed new members of the Board of Commissioners and Board of Directors: Board of Commissioners Ms. Pesta Uli Sitanggang*), as Independent Commissioner; *Effective upon obtaining Fit and Proper approval Board of Directors Mr. Handoyo Soedirdja*), as Director; *Effective upon obtaining Fit and Proper approval Resulting in the following composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors: Board of Commissioners - President Commissioner/Independent Commissioner: Mr. Kiki Syahnakri - Vice President Commissioner: Mr. Tomy Winata - Vice President Commissioner: Mr. Sugianto Kusuma - Independent Commissioner: Ms. Elizawatie Simon - Independent Commissioner: Ms. Pesta Uli Sitanggang*) *)Effective upon obtaining Fit and Proper approval - Granted authority and power to the Company's Board of Directors, with substitution rights, to declare/record the resolution on the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors into a notarial deed, including stating the composition in relation to the resolution, and notify changes to the Company's data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and perform all necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations - Based on Article 26 paragraph (1) of POJK 55/2016 which stipulates that an Independent Commissioner who has served for 2 (two) consecutive terms may be reappointed for the next term as Independent Commissioner provided that they declare their independence in the GMS, Mr. Kiki Syahnakri as President Commissioner/Independent Commissioner has declared his independence, as stated in the Declaration of Independence dated June 23, 2023.	

RUPS Luar Biasa Tahunan 2023 PT Bank Artha Graha Internasional Tbk*Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) 2023 of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk*

Tanggal Date	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow-Up
27 Juni 2023 June 27, 2023	Mata Acara Pertama - Menyetujui mengubah Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2020 dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. - Menyetujui mengubah dan menyusun kembali seluruh pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dari pasal pertama sampai dengan pasal terakhir, dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. - Menyetujui mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2020 dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dengan nomor KBLI: - KBLI 64121 tentang Bank Umum Konvensional - KBLI 64123 tentang Unit Usaha Syariah Bank Umum - Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan akta notaris tersendiri di hadapan Notaris, memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. <i>Approval of changes to the Company's Articles of Association.</i>
	<i>First Agenda</i> <i>Approved the amendment of Article 26 of the Company's Articles of Association for 2020 to align and comply with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 14/POJK.04/2022 regarding the Submission of Periodic Financial Reports by Issuers or Public Companies.</i> <i>Approved the amendment and reorganization of all articles in the Company's Articles of Association from the first to the last article, to align and comply with the provisions of OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies.</i> <i>Approved the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association for 2020 to align and comply with the provisions of the Head of the Central Statistics Agency Regulation No. 2 of 2020 regarding the Indonesian Standard Industrial Classification with KBLI number:</i> <i>KBLI 64121 concerning Conventional Commercial Banks</i> <i>KBLI 64123 concerning Sharia Business Units of Commercial Banks</i> <i>Granted authority to the Company's Board of Directors to declare the amendment of the Company's Articles of Association with a separate notarial deed in the presence of a Notary, request approval and/or notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia of the amendments, and perform all necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations.</i>	

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif kolegial untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggung jawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Bank dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Dalam menjalankan kegiatannya Dewan Komisaris memerlukan suatu pedoman dan tata tertib kerja agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris ini diharapkan dapat menjadi panduan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu pengawasan Bank yang didasari pada prinsip Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).

PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman Tata Laksana Kerja (*Board Charter*) yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. 0006.05.0 tanggal 28 Desember 2023 sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi pengawasan. Selain itu, Dewan Komisaris juga mengacu pada pedoman lainnya seperti:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;

The Board of Commissioners is a corporate organ that is tasked and responsible collectively and collegially for supervising and advising the Board of Directors and ensuring that the Bank implements GCG at all levels of the organization. In carrying out its duties, the Board of Commissioners is responsible to the GMS. The accountability of the Board of Commissioners to the GMS is a manifestation of supervisory accountability for the management of the Bank in the context of implementing GCG principles.

In carrying out its activities, the Board of Commissioners requires guidelines and work rules so that these objectives can be achieved effectively and efficiently. The guidelines and work rules of the Board of Commissioners are expected to guide the Board of Commissioners in carrying out its duties and authorities, namely supervision of the Bank based on the principles of Good Corporate Governance.

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

The Board of Commissioners has a Board Charter as outlined in Decree No. 0006.05.0 dated December 28, 2023 as a guideline in carrying out its supervisory duties and responsibilities. In addition, the Board of Commissioners also refers to other guidelines such as:

1. *Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies as partially amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation and Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law;*
2. *Law No. 7 of 1992 on Banking as amended by Law No. 10 of 1998 and as partially amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation and Law No. 6 of 2023 on Stipulating Government regulations in lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law;*
3. *Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening;*
4. *Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.03/2021 on Commercial Banks;*
5. *Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers and Public Companies;*

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum; dan
10. Anggaran Dasar PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

KETENTUAN MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS. Namun, masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:

1. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis;
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meninggal dunia;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
5. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Tahun 2024, komposisi Dewan Komisaris Bank Artha Graha Internasional tidak mengalami perubahan sesuai keputusan RUPS Tahunan Tahun 2024 yang diselenggarakan pada 26 Juni 2024, sehingga komposisi Dewan Komisaris Bank tetap menjadi sebagai berikut:

6. *Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.03/2016 regarding Capability and Appropriateness Assessment for Main Parties of Financial Services Institutions;*
7. *Circular Letter of the Financial Services Authority No. 39/SEOJK.03/2016 regarding Fit and Proper Assessment for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Members of the Board of Directors, and Prospective Members of the Board of Commissioners of Banks;*
8. *Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks;*
9. *Circular Letter of the Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Corporate Governance of Commercial Banks; and*
10. *Articles of Association of Bank Artha Graha Internasional.*

TERM OF OFFICE PROVISIONS

The term of office of a member of the Board of Commissioners is set for three years and may be reappointed based on a GMS resolution. However, the term of office of a member of the Board of Commissioners will automatically end if the member of the Board of Commissioners:

1. *Resigns with written notice;*
2. *No longer meets the requirements of the applicable legislation;*
3. *Passed away;*
4. *Is dismissed by resolution of the GMS; and*
5. *Is declared bankrupt or placed under guardianship based on a court decision.*

BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

In 2024, the composition of the Board of Commissioners of Bank Artha Graha Internasional changed in accordance with the resolution of the 2024 Annual GMS held on June 26, 2024, and the composition of the Bank's Board of Commissioners is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Kiki Syahnakri	Komisaris Utama/ Komisaris Independen <i>President Commissioner/ Independent Commissioner</i>	1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 12 Juni 2005; 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 04 Juli 2008; 3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 10 Juni 2011; 4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 3 Juni 2014; 5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 16 Juni 2017; 6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 5 Oktober 2020; dan 7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 17 Juli 2023. 1. <i>Deed of Meeting Resolution No. 26 dated June 12, 2005;</i> 2. <i>Deed of Meeting Resolution No. 05 dated July 4, 2008;</i> 3. <i>Deed of Meeting Resolution No. 16 dated June 10, 2011;</i> 4. <i>Deed of Meeting Resolution No. 8 dated June 3, 2014;</i> 5. <i>Deed of Meeting Resolution No. 20 dated June 16, 2017;</i> 6. <i>Deed of Meeting Resolution No. 7 dated October 5, 2020; and</i> 7. <i>Deed of Meeting Resolution No. 16 dated July 17, 2023.</i>	2023-2026
Tomy Winata	Wakil Komisaris Utama <i>Vice President Commissioner</i>	1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 12 Juni 2005; 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 04 Juli 2008; 3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 10 Juni 2011; 4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 3 Juni 2014; 5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 16 Juni 2017; 6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 5 Oktober 2020; dan 7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 17 Juli 2023. 1. <i>Deed of Meeting Resolution No. 26 dated June 12, 2005;</i> 2. <i>Deed of Meeting Resolution No. 05 dated July 4, 2008;</i> 3. <i>Deed of Meeting Resolution No. 16 dated June 10, 2011;</i> 4. <i>Deed of Meeting Resolution No. 8 dated June 3, 2014;</i> 5. <i>Deed of Meeting Resolution No. 20 dated June 16, 2017;</i> 6. <i>Deed of Meeting Resolution No. 7 dated October 5, 2020; and</i> 7. <i>Deed of Meeting Resolution No. 16 dated July 17, 2023.</i>	2023-2026
Sugianto Kusuma	Wakil Komisaris Utama <i>Vice President Commissioner</i>	1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 12 Juni 2005; 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 04 Juli 2008; 3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 10 Juni 2011; 4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 3 Juni 2014; 5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 16 Juni 2017; 6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 5 Oktober 2020; dan 7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 17 Juli 2023. 1. <i>Deed of Meeting Resolution No. 26 dated June 12, 2005;</i> 2. <i>Deed of Meeting Resolution No. 05 dated July 4, 2008;</i> 3. <i>Deed of Meeting Resolution No. 16 dated June 10, 2011;</i> 4. <i>Deed of Meeting Resolution No. 8 dated June 3, 2014;</i> 5. <i>Deed of Meeting Resolution No. 20 dated June 16, 2017;</i> 6. <i>Deed of Meeting Resolution No. 7 dated October 5, 2020; and</i> 7. <i>Deed of Meeting Resolution No. 16 dated July 17, 2023.</i>	2023-2026

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Periode
Elizawatie Simon	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.9 tanggal 4 Juli 2019; dan 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 253 tanggal 25 Juli 2022. 1. <i>Deed of Meeting Resolution No. 9 dated July 4, 2019; and</i> 2. <i>Deed of Meeting Resolution No. 253 dated July 25, 2022.</i>	2022-2025
Pesta Uli Sitanggang	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 17 Juli 2023; 1. <i>Deed of Meeting Resolution No. 16 dated July 17, 2023</i>	2023-2026

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris. Dalam hal ini, seluruh anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh Regulator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Tabel berikut menjelaskan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terhadap anggota Komisaris Bank:

FIT AND PROPER ASSESSMENT

Prospective members of the Board of Commissioners must obtain approval from the Financial Services Authority before carrying out their actions, duties and functions as the Board of Commissioners. In this case, all members of the Board of Commissioners must meet the requirements of having passed the fit and proper test assessment in accordance with the provisions required by the Regulator as stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Assessment for Main Parties of Financial Services Institutions.

The following table sets out the approvals from the Financial Services Authority and Bank Indonesia of the Bank's Commissioners:

Nama Name	Jabatan Position	Penyelenggara Organizer	Tanggal Kelulusan Date of Completion	No. Surat Letter No.
Kiki Syahnakri	Komisaris Utama/ Komisaris Independen <i>Commissioner/ Independent Commissioner</i>	Bank Indonesia	12 Februari 2013 <i>February 12, 2013</i>	Surat Bank Indonesia No.15/29/GBI/DPIP/Rahasia <i>Bank Indonesia Letter No. 15/29/GBI/DPIP/Rahasia</i>
Tomy Winata	Wakil Komisaris Utama <i>Vice President Commissioner</i>	Bank Indonesia	15 Juni 2005 <i>June 15, 2005</i>	Surat Bank Indonesia No. 7/19/GBI/DPIP/Rahasia <i>Bank Indonesia Letter No. 7/19/GBI/DPIP/Rahasia</i>
Sugianto Kusuma	Wakil Komisaris Utama <i>Vice President Commissioner</i>	Bank Indonesia	15 Juni 2005 <i>June 15, 2005</i>	Surat Bank Indonesia No. 7/19/GBI/DPIP/Rahasia <i>Bank Indonesia Letter No. 7/19/GBI/DPIP/Rahasia</i>

Nama Name	Jabatan Position	Penyelenggara Organizer	Tanggal Kelulusan Date of Completion	No. Surat Letter No.
Elizawatie Simon	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Otoritas Jasa Keuangan <i>Financial Services Authority</i>	20 April 2022 <i>April 20, 2022</i>	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-72/PB.12/2022 <i>Financial Services Authority Letter No. SR-72/PB.12/2022</i>
Pesta Uli Sitanggang	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Otoritas Jasa Keuangan <i>Financial Services Authority</i>	8 November 2023 <i>November 8, 2023</i>	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-252/PB.02/2023 <i>Financial Services Authority Letter No. SR-252/PB.02/2023</i>

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris Bank wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko jenjang 6 sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2022. Sertifikat tersebut menjadi salah satu indikator dalam penilaian *fit and proper test* yang harus dijalani oleh Dewan Komisaris yang akan menjabat.

Pada tahun 2024, sebagian besar anggota Dewan Komisaris Bank Artha Graha Internasional telah memenuhi ketentuan tersebut dan yang belum memiliki Sertifikat Manajemen Risiko akan segera dilakukan pemenuhan sertifikasi sesuai dengan ketentuan regulator.

KOMISARIS INDEPENDEN

Sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dalam penerapan Tata Kelola, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank, *check and balance*, serta melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan khususnya pemilik dana dan Pemegang Saham non-pengendali. Lebih lanjut didalam POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan Pemangku Kepentingan. Untuk mendukung independensi dalam pelaksanaan tugas dimaksud, perlu pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off*) bagi pihak yang akan menjadi Pihak Independen.

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

Members of the Bank's Board of Commissioners are required to hold a Level 6 Risk Management Certificate as stipulated in the Circular Letter of the Financial Services Authority No. 28/SEOJK.03/2022. This certificate serves as one of the indicators in the *fit and proper test* assessment that must be undertaken by incoming members of the Board of Commissioners.

As of 2024, the majority of the members of the Board of Commissioners of Bank Artha Graha Internasional have complied with this requirement, while those who have not yet obtained the Risk Management Certificate will undergo certification in accordance with applicable regulatory provisions.

INDEPENDENT COMMISSIONER

As stipulated in SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the implementation of governance for commercial banks, the presence of Independent Commissioners and Independent Parties is essential in the application of Good Corporate Governance to avoid conflicts of interest in the execution of duties at all levels of the Bank's organization, ensure checks and balances, and protect the interests of stakeholders, particularly fund owners and non-controlling shareholders. Furthermore, POJK No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks requires the presence of Independent Commissioners and Independent Parties to foster a more objective working environment that upholds fairness and equality among various interests, including those of minority shareholders and stakeholders. To support independence in the execution of such duties, provisions regarding a cooling-off period for individuals designated as Independent Parties are also regulated.

Selanjutnya diatur ketentuan tentang Komisaris Independen yang ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

Bank Artha Graha Internasional memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen dari 5 (lima) Anggota dewan Komisaris, yang berarti lebih dari 50% dari seluruh anggota Dewan Komisaris dan telah memenuhi ketentuan tersebut.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Masing-masing Komisaris Independen Bank telah membuat Surat Pernyataan Independensi sesuai dengan aspek independensi yang mengacu pada ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 pasal 25 ayat 1 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Peraturan OJK No. 33/PJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mengatur persyaratan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal ini, persyaratan diangkatnya anggota Dewan Komisaris Independen minimal sama dengan persyaratan untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris non-Independen ditambah dengan beberapa aturan lain di antaranya terkait independensi sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

The regulation further stipulates that at least 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Commissioners must be Independent Commissioners.

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, ownership, and/or family relationship with any member of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and/or the Controlling Shareholder, or any relationship with the Bank that could affect their ability to act independently.

Bank Artha Graha Internasional has 3 (three) Independent Commissioners out of a total of 5 (five) members of the Board of Commissioners, representing more than 50% of the total membership, thereby complying with the applicable requirements.

Independence Statement of Independent Commissioners

Each of the Bank's Independent Commissioners has made a Statement of Independence in accordance with the independence aspects referring to the provisions of POJK No. 33/POJK.04/2014 article 25 paragraph 1 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Independent Commissioners Criteria

OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies regulates the requirements for the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. In this case, the requirements for appointing an independent member of the Board of Commissioners are at least the same as the requirements for appointing a non-independent member of the Board of Commissioners plus several other rules including those related to independence as described in the following table:

Kriteria Criteria	Komisaris Independen Independent Commissioner		
	Kiki Syahnakri	Elizawatie Simon	Pesta Uli Sitanggang
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya	√	√	√
<i>Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the following period.</i>			

Kriteria Criteria	Komisaris Independen Independent Commissioner		
	Kiki Syahnakri	Elizawatie Simon	Pesta Uli Sitanggang
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut <i>Has no affiliation with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Issuer or Public Company.</i>	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut <i>Has no affiliation with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Major Shareholders of the said Issuer or Public Company.</i>	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut <i>Has no direct or indirect business relationship related to the business activities of the Issuer or Public Company</i>	✓	✓	✓

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Pedoman Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan Direksi, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
4. Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang berkenaan dengan Perseroan yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
5. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the Board of Commissioners Charter, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are as follows:

1. The Board of Commissioners is tasked with supervising and is responsible for overseeing the policies of the Board of Directors, the overall management of the Company and its business, and providing advice to the Board of Directors.
2. Under certain circumstances, the Board of Commissioners is required to convene the Annual GMS and other GMS meetings in accordance with its authority as stipulated in the prevailing laws and regulations and the Articles of Association.
3. The Board of Commissioners must carry out its duties, authorities, and responsibilities in good faith and with due care.
4. The Board of Directors is required to provide explanations regarding all matters related to the Company as requested by members of the Board of Commissioners for the purpose of carrying out their duties.
5. In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners must direct, monitor, and evaluate the implementation of governance, risk management, and compliance in an integrated manner, as well as the Bank's strategic policies, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS resolutions.

6. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
 7. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.
 8. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah;
 - b. Hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan ketentuan perundang-undangan.
 9. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 6 (enam) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
 10. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
 11. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari sejak ditemukan:
 - a. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 12. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
 13. Pedoman dan tata tertib kerja paling sedikit wajib mencantumkan:
 - a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
 - b. Pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris;
 - c. Pengaturan etika kerja Dewan Komisaris;
 - d. Pengaturan rapat Dewan Komisaris;
 - e. Larangan terhadap Dewan Komisaris;
 - f. Evaluasi terhadap Dewan Komisaris; dan
 - g. Pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
6. *The Board of Commissioners receives and exercises the authorities delegated and/or granted to it in accordance with the prevailing laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS resolutions.*
 7. *The Board of Commissioners may perform other supervisory duties and authorities.*
 8. *In performing its supervisory duties, the Board of Commissioners is prohibited from participating in decision-making related to the Bank's operational activities, except for:*
 - a. *The provision of funds to related parties in accordance with the Financial Services Authority Regulation on the legal lending limit and large exposures for commercial banks and Islamic commercial banks;*
 - b. *Other matters as stipulated in the Bank's Articles of Association or other applicable laws and regulations.*
 9. *The involvement of the Board of Commissioners in the decision-making of the Bank's operational activities as referred to in point 6 (six) constitutes part of its supervisory function and does not remove the Board of Directors' responsibility for managing the Bank.*
 10. *The Board of Commissioners must supervise the follow-up actions taken by the Board of Directors in response to audit findings or reviews and recommendations from the Bank's internal audit unit, external auditors, the Financial Services Authority, and/or other supervisory authorities or institutions.*
 11. *The Board of Commissioners must report to the Financial Services Authority no later than 5 (five) days after discovering:*
 - a. *Violations of laws and regulations in the financial or banking sectors or those related to the Bank's business activities; and/or*
 - b. *Circumstances or potential circumstances that may jeopardize the Bank's business continuity.*
 12. *The Board of Commissioners is required to have a code of conduct and working guidelines that are binding for every member of the Board of Commissioners.*
 13. *The code of conduct and working guidelines must at least include:*
 - a. *Duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners;*
 - b. *Procedures and authority of the Board of Commissioners in decision-making;*
 - c. *Work ethics of the Board of Commissioners;*
 - d. *Rules for the Board of Commissioners' meetings;*
 - e. *Prohibitions applicable to the Board of Commissioners;*
 - f. *Evaluation of the Board of Commissioners; and*
 - g. *Working relationship framework between the Board of Commissioners and the Board of Directors.*

14. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
 15. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
 16. Dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. Dalam hal RUPS tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari tersebut RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
 17. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
 18. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. The Board of Commissioners, by majority vote, is entitled to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors at any time if the said members act contrary to the Articles of Association and applicable laws and regulations, or if they are deemed detrimental to the Company's purposes and objectives or neglect their obligations.
 15. The temporary dismissal must be notified in writing to the concerned party along with the reasons.
 16. Within 90 (ninety) days of the date of the temporary dismissal, the Board of Commissioners must convene a GMS to revoke or confirm the temporary dismissal. The temporarily dismissed Director must be given the opportunity to be present and defend themselves. If the GMS is unable to reach a resolution or is not held within the 90 (ninety) day period, the temporary dismissal shall become null and void.
 17. The Board of Commissioners must allocate sufficient time to optimally perform its duties and responsibilities in accordance with the code of conduct and working guidelines.
 18. The Board of Commissioners must safeguard all data and information related to the Bank as submitted by the Board of Directors and in accordance with the applicable laws and regulations.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sesuai POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

In accordance with POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Board of Commissioners must hold a meeting at least 1 (one) time in 2 (two) months. In addition, the Board of Commissioners is also required to hold a joint meeting with the Board of Directors at least 1 (one) time in 4 (four) months.

Nama Name	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting			Rapat Bersama Direksi Joint Meeting with Board of Directors		
	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	%	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	%
Kiki Syahnakri	14	14	100	14	14	100
Tomy Winata	14	2	14,29	14	2	14,29
Sugianto Kusuma	14	2	14,29	14	2	14,29
Elizawatie Simon	14	14	100	14	14	100
Pesta Uli Sitanggang	14	14	100	14	14	100

PROGRAM PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Bank memberikan kesempatan kepada Dewan Komisaris untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan dan sertifikasi, maupun program peningkatan kompetensi lainnya seperti seminar dan *workshop*.

Berikut disampaikan pelatihan pendidikan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2024

BOARD OF COMMISSIONERS TRAINING PROGRAM

The Bank provides opportunities for the Board of Commissioners to develop and improve their competencies through training and certification, as well as other competency improvement programs such as seminars and *workshops*.

The following are the educational training programs and/or competency developments attended by the Board of Commissioners throughout 2024.

Peserta Participants	Jenis Pelatihan Type of Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Kiki Syahnakri	Pelatihan Training	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 <i>Risk Management Certification Level 6 Briefing</i>	15 Agustus 2024 <i>August 15, 2024</i>	Banker Association for Risk Management (BARa)
	Sertifikasi Certification	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 <i>Risk Management Certification Level 6 Examination</i>	16 Agustus 2024 <i>August 16, 2024</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Elizawatie Simon	Sertifikasi Certification	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Certification Level 7 Examination</i>	26 April 2024 <i>April 26, 2024</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
	Pelatihan Training	Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang 7 <i>Alignment of Risk Management Certification Level 7</i>	30-31 Mei 2024 <i>May 30-31, 2024</i>	Banker Association for Risk Management (BARa)
	Pelatihan Training	The 19 th Indonesia HR EXPO	11-12 Desember 2024 <i>December 11-12, 2024</i>	INTIPESAN Conference
Pesta Uli Sitanggang	Pelatihan Training	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 <i>Risk Management Certification Level 6 Briefing</i>	28-29 Februari 2024 <i>February 28-29, 2024</i>	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPi)
	Sertifikasi Certification	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 <i>Risk Management Certification Level 6 Examination</i>	19 Maret 2024 <i>March 19, 2024</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
	Pelatihan Training	The 19th Indonesia HR EXPO	11-12 Desember 2024 <i>December 11-12, 2024</i>	INTIPESAN Conference

Program Pengenalan Perusahaan bagi Komisaris Baru

Dalam hal pengangkatan Komisaris baru, Bank memastikan Komisaris memahami tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan informasi kepada pihak terkait agar mendapatkan pemahaman lebih tentang Bank Artha Graha Internasional guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

KEPUTUSAN, REKOMENDASI, DAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris Bank Artha Graha Internasional telah mengambil beberapa keputusan yaitu:

1. Menunjuk Bapak Kiki Syahnakri selaku Komisaris Utama/Independen untuk memimpin RUPS;
2. Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan yaitu Ibu Christina Harapan selaku Wakil Direktur Utama;
3. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai kantor akuntan dan/atau kantor akuntan publik pengganti yang terdaftar pada OJK, yang akan mengaudit buku- buku Bank untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024; dan
4. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penyesuaian dengan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank, ketentuan terkait pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris Bank Artha Graha Internasional adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank mengenai maksud tersebut sedikitnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
2. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

Company Introduction Program for New Commissioners

In the event of the appointment of a new Commissioner, the Bank ensures that the Commissioner understands his/her duties and responsibilities and provides information to relevant parties in order to gain a better understanding of Bank Artha Graha Internasional to support the implementation of his/her duties and responsibilities.

RESOLUTIONS, RECOMMENDATIONS, AND IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2024, the Board of Commissioners of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk has made the following resolutions:

1. *Appointed Mr. Kiki Syahnakri as President Commissioner/ Independent Commissioner to chair the General Meeting of Shareholders (GMS);*
2. *Reappointed members of the Board of Directors of the Company, including Ms. Christina Harapan as Vice President Director;*
3. *Reappointed the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono as the public accountant and/or substitute public accountant registered with the Financial Services Authority (OJK), to audit the Bank's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024;*
4. *Approved the amendment of the Company's Articles of Association to align with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.*

MECHANISM FOR RESIGNATION AND DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

As stipulated in the Guidelines and Code of Conduct of the Board of Commissioners of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, the provisions related to the resignation and dismissal of the Board of Commissioners are as follows:

1. *A member of the Board of Commissioners has the right to resign from their position and must submit a resignation request to the Bank at least 90 days before the intended resignation date;*
2. *The Bank is required to hold a General Meeting of Shareholders (GMS) to decide on the resignation request within a maximum period of 90 days after receiving the resignation letter. A resigning member of the Board of*

Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak tanggal pengangkatan sampai dengan pengunduran dirinya dalam RUPS;

3. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal; dan
4. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau mengisi lowongan adalah untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau digantikan tersebut.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki komite-komite penunjang yang telah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut telah memiliki pedoman kerja yang jelas, sehingga pelaksanaan tugasnya bisa terarah dan efektif. Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Commissioners remains accountable for their duties from the date of their appointment until their resignation at the GMS;

3. *The Bank must provide transparency to the public and notify the Financial Services Authority (OJK) regarding the resignation in accordance with applicable capital market regulations;*
4. *The GMS may appoint another individual to fill the position of a member of the Board of Commissioners who has been dismissed or to fill a vacancy. The term of office of the person appointed to replace the dismissed or vacant member shall be for the remaining term of the dismissed or replaced member.*

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has supporting committees that have duties and responsibilities to support the performance of the Board of Commissioners. These committees have clear guidelines, so that the implementation of their duties can be directed and effective. The committees under the Board of Commissioners include the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration, and Nomination Committee.

Uraian Description	Dasar Penilaian Basis of Assessment	Penilaian Kinerja Performance Assessment
Komite Audit Audit Committee	1. Pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; 2. Review pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Audit dilakukan secara bulanan yang disampaikan dalam pembahasan temuan serta tindak lanjutnya. Hasil review terhadap pemeriksaan yang dilakukan KAP telah sesuai dengan standar audit yang ditetapkan; 3. Monitoring terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh Direksi atas pemenuhan komitmen hasil temuan pemeriksaan internal dan eksternal; dan 4. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.	Baik Good
Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	1. Hasil evaluasi, kajian hal-hal yang berhubungan dengan risiko serta memberikan arahan dan saran dalam pengembangan manajemen risiko di Bank; dan 2. Memantau dan mengevaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Direktorat Risk Management.	Baik Good
Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee	1. Hasil evaluasi Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Pejabat eksekutif dan pegawai; 2. Telah menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; 3. Telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; dan 4. Telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.	Baik Good

DIREKSI

Board of Directors

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab atas jalannya pengelolaan Bank untuk kepentingan Bank serta sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. Direksi memiliki wewenang serta bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola Bank. Secara garis besar, masing-masing Direktur dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Bank agar dapat menghasilkan keuntungan dan memastikan kesinambungan usaha Bank sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

PEDOMAN KERJA/PIAGAM DIREKSI

Bank telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi 0027.04.0 tanggal 28 Desember 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi agar sesuai dengan aturan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Direksi juga mengacu pada peraturan perundang-undangan lainnya seperti:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan;
3. POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum;
4. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum;
7. Anggaran Dasar PT Bank Artha Graha Internasional Tbk; dan
8. Dan saling terkait dengan Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (*Risk Management*).

The Board of Directors is a corporate organ responsible for the management of the Bank for the benefit of the Bank and in accordance with the purposes and objectives of the Bank. The Board of Directors has the authority as well as the duty and responsibility collegially in managing the Bank. In general, each Director can carry out duties and make decisions in accordance with the division of duties and authority. The Board of Directors is responsible for the management of the Bank in order to generate profits and ensure the sustainability of the Bank's business in accordance with the articles of association and laws and regulations.

BOARD OF DIRECTORS' CHARTER

The Bank has established the Board of Directors' Work Guidelines and Charter 0027.04.0 dated December 28, 2023, as a guide for the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors to ensure compliance with the principles of good corporate governance. The Board of Directors also refers to other relevant regulations, such as:

1. *Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;*
2. *Law No. 10 of 1998 on Banking;*
3. *OJK Regulation No. 12/POJK.03/2021 on Commercial Banks;*
4. *OJK Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks;*
5. *OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers and Public Companies;*
6. *OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Governance for Commercial Banks;*
7. *Articles of Association of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk; and*
8. *And related to the Risk Management Policy Guidelines.*

KETENTUAN MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS. Namun, masa jabatan anggota Direksi akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Direksi tersebut:

1. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis;
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meninggal dunia;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
5. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.

KOMPOSISI DIREKSI

Tahun 2024, komposisi Dewan Komisaris Bank Artha Graha Internasional tidak mengalami perubahan sesuai keputusan RUPS Tahunan Tahun 2024 yang diselenggarakan pada 26 Juni 2024, sehingga komposisi Direksi Bank menjadi sebagai berikut:

TERM OF OFFICE PROVISIONS

The term of office of a member of the Board of Directors is set for 3 (three) years and may be reappointed based on a resolution of the GMS. However, the term of office of a member of the Board of Directors will expire automatically if the member of the Board of Directors:

1. Resigns with written notice;
2. No longer meets the requirements of the applicable legislation;
3. Passed away;
4. Is dismissed by resolution of the GMS; and
5. Is declared bankrupt or placed under guardianship based on a court decision.

BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION

In 2024, the composition of the Board of Commissioners of Bank Artha Graha Internasional remains unchanged as per the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the year 2024, held on June 26, 2024. Therefore, the composition of the Bank's Board of Directors is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Andy Kasih	Direktur Utama President Director	1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 30 Juni 2008; 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 10 Juni 2011; 3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 4 Juli 2014; 4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 16 Juni 2017; 5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 5 Oktober 2020; dan 6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 17 Juli 2023.	2023-2026
Christina Harapan	Wakil Direktur Utama Vice President Director	1. Deed of Meeting Resolution No. 95 dated June 30, 2008; 2. Deed of Meeting Resolution No. 16 dated June 10, 2011; 3. Deed of Meeting Resolution No. 5 dated July 4, 2014; 4. Deed of Meeting Resolution No. 20 dated June 16, 2017; 5. Deed of Meeting Resolution No. 7 dated October 5, 2020; and 6. Deed of Meeting Resolution No. 16 dated July 17, 2023.	
		1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 17 Juli 2018; 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 177 tanggal 23 Agustus 2021; dan 3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tanggal 17 Juli 2024.	2024-2027
		1. Deed of Meeting Resolution No. 09 dated July 17, 2018; 2. Deed of Meeting Resolution No. 177 dated August 23, 2021; and 3. Deed of Meeting Resolution No. 05 dated July 17, 2024.	

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Indrastomo Nugroho	Direktur Kepatuhan/ Direktur Independen <i>Compliance Director/ Independent Director</i>	1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 17 Juli 2023. 1. <i>Deed of Meeting Resolution No. 16 dated July 17, 2023.</i>	2023-2026
Indra S. Budianto	Direktur <i>Director</i>	1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 225 tanggal 28 November 2014; 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 16 Juni 2017; 3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 5 Oktober 2020; dan 4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 17 Juli 2023. 1. <i>Deed of Meeting Resolution No. 225 dated November 28, 2014;</i> 2. <i>Deed of Meeting Resolution No. 20 dated June 16, 2017;</i> 3. <i>Deed of Meeting Resolution No. 7 dated October 5, 2020; and</i> 4. <i>Deed of Meeting Resolution No. 16 dated July 17, 2023.</i>	2023-2026
Handoyo Soedirdja	Direktur <i>Director</i>	1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 17 Juli 2023. 1. <i>Deed of Meeting Resolution No. 16 dated July 17, 2023.</i>	2023-2026

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Direksi. Dalam hal ini, seluruh anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh Regulator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Tabel berikut menjelaskan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terhadap anggota Direksi Bank:

FIT AND PROPER ASSESSMENT

Prospective members of the Board of Directors must obtain approval from the Financial Services Authority before carrying out their actions, duties and functions as Directors. In this case, all members of the Board of Directors must meet the requirements of having passed the fit and proper test assessment in accordance with the provisions required by the Regulator as stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Assessment for Main Parties of Financial Services Institutions.

The following table sets out the approvals from the Financial Services Authority and Bank Indonesia for members of the Bank's Board of Directors:

Nama Name	Jabatan Position	Penyelenggara Organizer	Tanggal Kelulusan Date of Completion	No. Surat Letter No.
Andy Kasih	Direktur Utama <i>President Director</i>	Bank Indonesia	9 Desember 2008 <i>December 9, 2008</i>	Surat Bank Indonesia No. 10/184/GBI/DPIP/Rahasia <i>Bank Indonesia Letter No. 10/184/GBI/DPIP/Rahasia</i>
Christina Harapan	Wakil Direktur Utama <i>Vice President Director</i>	Otoritas Jasa Keuangan <i>Financial Services Authority</i>	9 Januari 2019 <i>January 9, 2019</i>	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-8/PB.12/2019 <i>Financial Services Authority Letter No. SR-8/PB.12/2019</i>

Nama Name	Jabatan Position	Penyelenggara Organizer	Tanggal Kelulusan Date of Completion	No. Surat Letter No.
Indrastomo Nugroho	Direktur Kepatuhan/ Direktur Independen <i>Compliance Director/ Independent Director</i>	Otoritas Jasa Keuangan <i>Financial Services Authority</i>	8 November 2023 <i>November 8, 2023</i>	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-252/PB.02/2023 <i>Financial Services Authority Letter No. SR-252/PB.02/2023</i>
Indra S. Budianto	Direktur <i>Director</i>	Otoritas Jasa Keuangan <i>Financial Services Authority</i>	2 Oktober 2015 <i>October 2, 2015</i>	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-123/PB.12/2019 <i>Financial Services Authority Letter No. SR-123/PB.12/2019</i>
Handoyo Soedirdja	Direktur <i>Director</i>	Otoritas Jasa Keuangan <i>Financial Services Authority</i>	8 November 2023 <i>8 November 2023</i>	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-252/PB.02/2023 <i>Financial Services Authority Letter No. SR-252/PB.02/2023</i>

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Direksi Bank wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko jenjang 7 sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 28/SEOJK.03/2022. Sertifikat tersebut menjadi salah satu indikator dalam penilaian *fit and proper test* yang harus dijalani oleh Direksi yang akan menjabat.

Pada tahun 2024, seluruh anggota Dewan Direksi Bank Artha Graha Internasional telah memenuhi ketentuan tersebut. Direksi yang telah lulus sertifikasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

Members of the Board of Directors are required to hold a Level 7 Risk Management Certificate as stipulated in the Circular Letter of the Financial Services Authority No. 28/SEOJK.03/2022. This certification serves as one of the indicators in the *fit and proper test* that must be undertaken by prospective members of the Board of Directors.

As of 2024, all members of the Board of Directors of Bank Artha Graha Internasional have fulfilled this requirement. The following members of the Board of Directors have successfully obtained the Risk Management Certification:

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Manajemen Risiko <i>Risk Management Certification</i>	Penyelenggara Organizer
Andy Kasih	Direktur Utama <i>President Director</i>	Jenjang 7 <i>Level 7</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Christina Harapan	Wakil Direktur Utama <i>Vice President Director</i>	Jenjang 7 <i>Level 7</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Indrastomo Nugroho	Direktur Kepatuhan/Direktur Independen <i>Compliance Director/ Independent Director</i>	Jenjang 7 <i>Level 7</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Indra S. Budianto	Direktur <i>Director</i>	Jenjang 7 <i>Level 7</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Handoyo Soedirdja	Direktur <i>Director</i>	Jenjang 7 <i>Level 7</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Direksi mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Bank.
Tugas Pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin dan mengurus Bank sesuai dengan tujuan Bank; dan
 - b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Bank.
2. Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam menerapkan Tata Kelola yang baik pada Perseroan, Direksi paling sedikit wajib membentuk:
 - a. satuan kerja audit intern,
 - b. satuan kerja manajemen risiko, dan
 - c. satuan kerja kepatuhan.
4. Direksi berwenang mewakili Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS.
5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas dan wewenangnya dengan prinsip kehati-hatian dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. Komite manajemen risiko;
 - b. Komite kebijakan perkreditan atau pembiayaan;
 - c. Komite kredit atau pembiayaan; dan
 - d. Komite pengarah Teknologi Informasi.dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Bank, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Bank, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan atau susunan unit kerja Sekretaris Perusahaan berikut pertanggungjawabnya.
6. Pembagian tugas dan wewenang di antara para anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, pembagian tugas, dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the provisions set out in the Guidelines and Rules of Procedures for the Board of Directors, the Board of Directors carries out the following duties and responsibilities:

1. *The Board of Directors is responsible for managing the Bank in the best interest of the Bank and in pursuit of the Bank's objectives.*
The primary duties of the Board of Directors are:
 - a. *To lead and manage the Bank in accordance with its objectives; and*
 - b. *To control, maintain, and manage the Bank's assets.*
2. *The Board of Directors must carry out its duties, authorities, and responsibilities in good faith and with prudence.*
3. *In implementing sound corporate governance, the Board of Directors is at minimum required to establish:*
 - a. *an internal audit unit,*
 - b. *a risk management unit, and*
 - c. *a compliance unit.*
4. *The Board of Directors is authorized to represent the Bank in accordance with applicable laws and regulations, the Bank's Articles of Association, and General Meeting of Shareholders (GMS) resolutions.*
5. *Each member of the Board of Directors is obligated to perform their duties and authorities in good faith and with full responsibility, observing the principles of prudence and applicable laws and regulations. To support the effective execution of its duties and responsibilities, the Board of Directors may establish committees consisting of, at minimum:*
 - a. *Risk Management Committee;*
 - b. *Credit or Financing Policy Committee;*
 - c. *Credit or Financing Committee; and*
 - d. *an Information Technology Steering Committee.**The Board of Directors is also obligated to evaluate the performance of these committees at the end of each financial year. In supporting the implementation of good corporate governance principles, the Board of Directors is required to establish and is authorized to appoint and dismiss the Corporate Secretary or the Corporate Secretary unit and determine its responsibilities.*
6. *The division of duties and authorities among the members of the Board of Directors shall be determined by the GMS. If the GMS does not stipulate such division, it shall be determined by a resolution of the Board of Directors.*

7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
 8. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
 9. Pedoman dan tata tertib kerja paling sedikit paling sedikit wajib mencantumkan pengorganisasian Perseroan dan pembagian tugas Direksi; tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi; pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Direksi; pengaturan etika kerja Direksi; pengaturan rapat Direksi; larangan terhadap Direksi; evaluasi kinerja Direksi; pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris.
 10. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
 11. Merumuskan dan bertanggung jawab atas tercapainya visi, misi dan strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang perusahaan melalui koordinasi kerja dan pemantauan kinerja dan prestasi setiap unit kerja.
 12. Merumuskan arah kebijakan dan sasaran bidang kepatuhan dan manajemen risiko Bank dalam memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka prinsip kehati-hatian.
 13. Direksi berhak mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan berhak mengikat Bank dengan pihak lain atau pihak lain dengan Bank serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa khusus:
 - a. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Menjual saham milik Bank pada perusahaan lain;
 - c. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak atau perusahaan-perusahaan; dan
 - d. Menyewakan, menjaminkan atau memberati barang-barang tidak bergerak milik Bank. Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris, yang dalam pelaksanaannya terhadap pihak ketiga surat/akta yang bersangkutan cukup ditandatangani oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama bersama-sama dengan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.
7. *The Board of Directors must account for the execution of its duties to the shareholders through the GMS.*
 8. *The Board of Directors must possess binding guidelines and rules of procedures for each member.*
 9. *The guidelines and rules of procedures must at minimum include the organizational structure and division of responsibilities within the Company; duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors; decision-making authorities and procedures; code of conduct; rules governing meetings; prohibitions; performance evaluations; and the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
 10. *The Board of Directors bears full responsibility in carrying out its duties in the best interest of the Bank in achieving its goals and objectives.*
 11. *To formulate and be accountable for achieving the Bank's vision, mission, and short-, medium-, and long-term strategies through coordination, performance monitoring, and achievement of each work unit.*
 12. *To define the direction of policy and objectives in the areas of compliance and risk management in line with all Financial Services Authority (OJK) regulations and other applicable laws as part of the prudential principles.*
 13. *The Board of Directors is entitled to represent the Bank in and out of court in all matters and events, and to bind the Bank with other parties or other parties with the Bank, and to carry out all actions related to management and ownership. However, the following actions require approval from the Board of Commissioners:*
 - a. *Establishing a new business or participating in another company, either domestically or internationally;*
 - b. *Selling the Bank's shares in other companies;*
 - c. *Purchasing, selling, or otherwise transferring rights to immovable property or companies; and*
 - d. *Leasing, pledging, or encumbering the Bank's immovable property. In such cases, the relevant documents or deeds must be signed by the President Commissioner or Vice President Commissioner together with one (1) member of the Board of Commissioners appointed by a resolution of the Board of Commissioners.*

14. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Bank baik dalam satu transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir dalam RUPS, dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Apabila dalam RUPS pertama yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan acara yang sama seperti RUPS pertama. RUPS kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua. Jikalau kuorum dalam RUPS kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Bank. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
15. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS.
16. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
17. Direksi Wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
18. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

14. Any legal action to transfer, release rights, or pledge assets that represent more than 50% (fifty percent) of the Bank's net assets, whether in a single standalone transaction or in related transactions, must obtain the approval of the General Meeting of Shareholders (GMS) attended or represented by shareholders holding at least $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total shares with voting rights present at the GMS. The resolution must be approved by more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total shares with voting rights present at the GMS. If the required quorum is not met in the first GMS, a second GMS may be held with the same agenda as the first. The second GMS must be attended or represented by shareholders holding at least $\frac{2}{3}$ (two-thirds) of the total shares with valid voting rights, and the resolution must be approved by more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total shares with voting rights present at the second GMS. If the quorum for the second GMS is also not met, a third GMS is valid and authorized to make decisions if attended by shareholders with valid voting rights, in a quorum determined by the OJK, at the Bank's request. The third GMS notice must indicate that the second GMS was held and did not meet the required quorum.
15. To undertake legal actions involving conflict of interest between the personal economic interests of a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, or shareholders and the economic interests of the Company, the Board of Directors must obtain approval from the GMS.
16. The Board of Directors must follow up on audit findings and recommendations from the Internal Audit Unit, external auditors, the OJK's supervisory results, and/or other supervisory authorities.
17. The Board of Directors is accountable for its duties to shareholders through the GMS.
18. The Board of Directors must manage the Bank in accordance with its authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and applicable laws.

19. Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 20. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
 21. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan. Penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan:
 - a. Untuk proyek bersifat khusus;
 - b. Didasarkan pada kontrak kerja yang jelas; dan
 - c. Merupakan Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 22. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
 23. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman dan tata tertib kerja paling sedikit wajib mencantumkan:
 - a. Pengorganisasian Perseroan dan pembagian tugas Direksi;
 - b. Tugas, tanggungjawab dan wewenang Direksi;
 - c. Pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Direksi;
 - d. Pengaturan etika kerja Direksi;
 - e. Pengaturan rapat Direksi;
 - f. Larangan terhadap Direksi;
 - g. Evaluasi kinerja Direksi; dan
 - h. Pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris.
 24. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
19. *The Board of Directors must apply good corporate governance principles at all levels of the Bank's organization.*
 20. *The Board of Directors must disclose strategic human resources policies to employees.*
 21. *The Board of Directors is prohibited from engaging individual advisors and/or professional services as consultants, except under the following conditions:*
 - a. *The engagement is for a specific project;*
 - b. *It is based on a clear employment contract; and*
 - c. *Be an Independent Party and possess the qualifications to work on specific projects as referred to in point a*
 22. *The Board of Directors must provide accurate, relevant, and timely data and information to the Board of Commissioners.*
 23. *The Board of Directors must have binding guidelines and rules of procedures for every member. At minimum, the guidelines must include:*
 - a. *Company organization and the division of tasks among the Board of Directors;*
 - b. *Duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors;*
 - c. *Authority structure and decision-making procedures;*
 - d. *Code of conduct for the Board of Directors;*
 - e. *Rules governing Board of Directors meetings;*
 - f. *Prohibitions applicable to the Board of Directors;*
 - g. *Performance evaluation of the Board of Directors; and*
 - h. *Working relationship pattern between the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
 24. *Resolutions of the Board of Directors made in accordance with the guidelines and rules of procedures are binding and are the collective responsibility of all members of the Board of Directors.*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-
MASING DIREKSIDUTIES AND RESPONSIBILITIES OF EACH
DIRECTOR

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Tanggung Jawab <i>Responsibilities</i>
Andy Kasih Direktur Utama <i>President Director</i>	• Mengoordinasikan pelaksanaan pengurusan Bank sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; • Mengoordinasikan, mengarahkan, dan melakukan supervisi direktorat-direktorat dalam Bank secara berkesinambungan sesuai dengan bidangnya masing-masing agar berjalan dengan lancar, efektif, efisien, dan tetap dalam strategi jangka panjang Bank; • Mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan persaingan pasar dengan mendorong unit bisnis memasarkan produk dan jasa dengan lebih dinamis dan kompetitif, dengan pengkajian yang komprehensif dari Direktorat Risk Management dan Compliance; • Meningkatkan citra Bank di tingkat nasional dan internasional serta turut membina hubungan baik dengan bank koresponden, investment bank, lembaga keuangan, Nasabah, dan otoritas moneter, baik di dalam maupun di luar negeri; • Bertanggung jawab atas bidang Corporate Secretary; • Bertanggung jawab atas bidang Head of Bureau; • Bertanggung jawab atas bidang Financial Control; • Bertanggung jawab atas bidang Operation; • Bertanggung jawab atas bidang Credit Analyst; • Bertanggung jawab atas bidang Compliance and Risk; • Bertanggung jawab atas bidang Legal Bureau; • Bertanggung jawab atas bidang Asset Recovery; dan • Bertanggung jawab atas bidang Internal Audit. • <i>Coordinate the Bank's management as stipulated in the Articles of Association and resolutions of the GMS, with due observance of prevailing regulations;</i> • <i>Coordinate, direct, and supervise the Bank's directorates on an ongoing basis within their respective areas to ensure smooth, effective, and efficient operations in line with the Bank's long-term strategy;</i> • <i>Lead necessary change processes to meet market competition challenges by encouraging business units to market products and services more dynamically and competitively, supported by comprehensive assessments from the Risk Management and Compliance Directorate;</i> • <i>Enhance the Bank's reputation at the national and international levels, and foster strong relationships with correspondent banks, investment banks, financial institutions, customers, and monetary authorities, both domestic and international;</i> • <i>Responsible for the Corporate Secretary function;</i> • <i>Responsible for the Head of Bureau function;</i> • <i>Responsible for the Financial Control function;</i> • <i>Responsible for the Operation function;</i> • <i>Responsible for the Credit Analyst function;</i> • <i>Responsible for the Compliance and Risk function;</i> • <i>Responsible for the Legal Bureau function;</i> • <i>Responsible for the Asset Recovery function; and</i> • <i>Responsible for the Internal Audit function.</i>

Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggung Jawab Responsibilities
Christina Harapan Wakil Direktur Utama Vice President Director	- Bersama-sama dengan Direktur Utama mengoordinasikan pelaksanaan pengurusan Bank sesuai penetapan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; - Bersama-sama dengan Direktur Utama mengoordinasikan, mengarahkan, serta melakukan supervisi Direktorat dalam Bank secara berkesinambungan sesuai dengan bidangnya masing-masing agar berjalan dengan lancar, efektif, efisien, dan tetap dalam strategi jangka panjang Bank; - Bersama-sama dengan Direktur Utama meningkatkan citra Bank di tingkat nasional dan internasional, serta turut membina hubungan baik dengan bank koresponden, investment bank, lembaga keuangan, Nasabah, dan otoritas moneter, baik di dalam maupun di luar negeri; - Bersama-sama dengan Direktur Utama mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam mengarahkan dan membina jaringan kantor untuk mencapai target pangsa pasar dan meningkatkan volume bisnis (dana dan kredit); - Bertanggung jawab atas bidang <i>Business</i> dan <i>Treasury</i>; dan - Bertanggung jawab atas bidang <i>Retail Banking</i> dan <i>Digital Acquisition Retail Business</i> <i>In coordination with the President Director, coordinate the Bank's management in accordance with the Articles of Association and resolutions of the GMS, while observing prevailing regulations;</i> <i>In coordination with the President Director, coordinate, direct, and supervise the Bank's Directorates on an ongoing basis within their respective areas to ensure smooth, effective, efficient operations aligned with the Bank's long-term strategy;</i> <i>In coordination with the President Director, enhance the Bank's reputation at both national and international levels, and foster good relationships with correspondent banks, investment banks, financial institutions, customers, and monetary authorities, both domestic and international;</i> <i>In coordination with the President Director, oversee the implementation of activities to guide and develop the branch network in achieving market share targets and increasing business volume (funding and lending);</i> <i>Responsible for the Business and Treasury functions; and</i> <i>Responsible for the Retail Banking and Digital Acquisition Retail Business functions.</i>
Indrastomo Nugroho Direktur Kepatuhan/ Direktur Independen Compliance Director/ Independent Director	- Bertanggung jawab atas bidang <i>Compliance</i>; dan - Bertanggung jawab atas bidang <i>Risk Management</i>. <i>Responsible for Compliance; and</i> <i>Responsible for Risk Management</i>
Indra S. Budianto Direktur Director	- Bertanggung jawab atas bidang <i>Asset Recovery Consumer & Retail</i>; dan - Bertanggung jawab atas bidang <i>Asset Recovery Corporate & Commercial</i>. <i>Responsible for the Consumer & Retail Asset Recovery; and</i> <i>Responsible for Corporate & Commercial Asset Recovery.</i>
Handoyo Soedirdja Direktur Director	- Bertanggung jawab atas bidang <i>Financial Institution</i>; - Bertanggung jawab atas bidang <i>Treasury</i> dan <i>Fixed Income</i>; - Bertanggung jawab atas bidang <i>Wholesales Banking</i> <i>Responsible for the Financial Institution function;</i> <i>Responsible for the Treasury and Fixed Income function;</i> <i>Responsible for the Wholesale Banking function.</i>

RAPAT DIREKSI

Merujuk pada ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Namun demikian, Direksi dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Direksi atau permintaan Dewan Komisaris, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Dalam setiap rapat Direksi dibuatkan risalah rapat oleh Sekretaris Perusahaan dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat. Risalah rapat berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan.

Sepanjang tahun 2024 Direksi telah melaksanakan rapat internal Direksi sebanyak 13 kali. Adapun agenda dan rekapitulasi kehadiran Direksi dalam rapat di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Rapat Direksi Board of Directors Meeting		
	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	%
Andy Kasih	13	11	84,61
Christina Harapan	13	11	84,61
Indrastomo Nugroho	13	12	92,30
Indra S. Budianto	13	12	92,30
Handoyo Soedirdja	13	11	84,61

AGENDA RAPAT INTERNAL DIREKSI

1. Realisasi angka Utama Setiap Bulan;
2. Kinerja Bisnis Setiap Bulan;
3. Pelaksanaan Kepatuhan Bank;
4. Rencana Bisnis Bank;
5. Kinerja Asset Recovery; dan
6. Hal-hal Strategis Lainnya.

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Referring to the provisions of POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Board of Directors is required to hold a meeting at least once a month.

However, the Board of Directors may hold a meeting at anytime at the request of 1 (one) or several members of the Board of Directors or the request of the Board of Commissioners, by stating the matters to be discussed.

Minutes of each meeting of the Board of Directors are prepared by the Corporate Secretary and signed by the chairman of the meeting and all members of the Board of Directors present at the meeting. The minutes of the meeting contain matters discussed and matters decided.

In 2024, the Board of Directors conducted 13 internal Board of Directors meetings. The agenda and attendance summary of the Board of Directors meetings in 2024 are as follows:

BOARD OF DIRECTORS INTERNAL MEETING AGENDA

1. Realization of Monthly Key Figures;
2. Monthly Business Performance;
3. Implementation of Bank Compliance;
4. Bank Business Plan;
5. Asset Recovery Performance; and
6. Other Strategic Matters.

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN BAGI DIREKSI BARU

Jika dalam satu periode operasional terdapat Direksi baru, Bank memastikan Direksi memahami tugas dan tanggung jawabnya dan proses bisnis Bank yang dilaksanakan oleh Direksi selain dapat bekerja selaras dengan Organ Perseroan lainnya. Sehubungan tidak adanya anggota Direksi baru, pada tahun 2024, Bank tidak melakukan program Pengenalan Perusahaan bagi Direksi baru.

PROGRAM PELATIHAN DIREKSI

Bank memberikan kesempatan kepada Direksi untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan dan sertifikasi, maupun program peningkatan kompetensi lainnya seperti seminar dan *workshop*.

Berikut disampaikan pelatihan pendidikan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2024.

CORPORATE ORIENTATION PROGRAM FOR NEW MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

If there is a new Board of Directors during an operational period, the Bank ensures that the Board understands their duties and responsibilities, as well as the business processes of the Bank carried out by the Board, in addition to working in harmony with other corporate organs. In relation to the absence of new Board members, the Bank did not conduct an Induction Program for new Directors in 2024.

BOARD OF DIRECTORS TRAINING PROGRAM

The Bank provides opportunities for the Directors to develop and improve their competencies through training and certification, as well as other competency improvement programs such as seminars and workshops.

The following are the education and/or competency improvement training attended by the Board of Directors throughout 2024.

Peserta Participants	Jenis Pelatihan Type of Training	Materi Pendidikan Education Materials	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Andy Kasih	Sertifikasi Certification	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Certification Examination Level 7</i>	2 Mei 2024 <i>May 2, 2024</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
	Pelatihan Training	Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang 7 <i>Alignment of Risk Management Certification Level 7</i>	3-4 Juli 2024 <i>July 3-4, 2024</i>	Banker Association for Risk Management (BARa)
	Pelatihan Training	<i>The 19th Indonesia HR EXPO</i>	11-12 Desember 2024 <i>December 11-12, 2024</i>	INTIPESAN Conference

Peserta Participants	Jenis Pelatihan Type of Training	Materi Pendidikan Education Materials	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Christina Harapan	Pelatihan Training	Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang 7 <i>Alignment of Risk Management Certification Level 7</i>	7-8 Maret 2024 <i>March 7-8, 2024</i>	Banker Association for Risk Management (BARa)
	Pelatihan Training	Seminar Economic Outlook 2024: Menopang Keberlanjutan Perekonomian melalui Transisi EBT & UMKM Naik Kelas <i>Seminar on Economic Outlook 2024: Supporting Economic Sustainability through the Transition to Renewable Energy and MSME Advancement</i>	22 Maret 2024 <i>March 22, 2024</i>	Perbanas
	Sertifikasi Certification	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Certification Examination Level 7</i>	26 April 2024 <i>April 26, 2024</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
	Pelatihan Training	The 19th Indonesia HR EXPO	11-12 Desember 2024 <i>December 11-12, 2024</i>	INTIPESAN Conference
Indrastomo Nugroho	Pelatihan Training	Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang 7 <i>Alignment of Risk Management Certification Level 7</i>	7-8 Maret 2024 <i>March 7-8, 2024</i>	Banker Association for Risk Management (BARa)
	Sertifikasi Certification	Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Re-Certification Level 7</i>	6 April 2024 <i>April 6, 2024</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
	Pelatihan Training	The 19th Indonesia HR EXPO	11-12 Desember 2024 <i>December 11-12, 2024</i>	INTIPESAN Conference
Indra S. Budianto	Sertifikasi Certification	Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Re-Certification Level 7</i>	26 April 2024 <i>April 26, 2024</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
	Pelatihan Training	Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang 7 <i>Alignment of Risk Management Certification Level 7</i>	3-4 Juli 2024 <i>July 3-4, 2024</i>	Banker Association for Risk Management (BARa)
	Pelatihan Training	The 19th Indonesia HR EXPO	11-12 Desember 2024 <i>December 11-12, 2024</i>	INTIPESAN Conference

Peserta Participants	Jenis Pelatihan Type of Training	Materi Pendidikan Education Materials	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Handoyo Soedirdja	Pelatihan Training	Pembekalan sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Certification Preparation Level 7</i>	29 Februari 2024-1 Maret 2024 <i>February 29 - March 1, 2024</i>	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
	Sertifikasi Certification	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Certification Examination Level 7</i>	2 April 2024 <i>April 2, 2024</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
	Pembekalan Preparation	Pembekalan Sertifikasi <i>Treasury Dealer</i> jenjang 7 <i>Certification Preparation Level 7</i>	26 Agustus 2024 <i>August 26, 2024</i>	Apuvindo
	Sertifikasi Certification	Ujian Sertifikasi <i>Treasury Dealer</i> jenjang 7 <i>Certification Examination Level 7</i>	2 Oktober 2024 <i>October 2, 2024</i>	ACI
	Pelatihan Training	<i>The 19th Indonesia HR EXPO</i>	11-12 Desember 2024 <i>December 11-12, 2024</i>	INTIPESAN Conference

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mengatur mekanisme terkait pengunduran diri dan pemberhentian Direksi Bank Artha Graha Internasional yang melalui tahapan sebagai berikut:

1. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Bank mengenai maksudnya itu sekurang-kurangnya 90 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
3. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya.

RESIGNATION AND DISMISSAL MECHANISM OF BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors Charter regulates the mechanism related to the resignation and dismissal of the Board of Directors of Bank Artha Graha Internasional through the following stages:

1. A member of the Board of Directors has the right to resign from their position and must submit a resignation request to the Bank regarding their intention at least 90 days before the resignation date.
2. The Bank is required to hold a General Meeting of Shareholders (GMS) to decide on the resignation request of the Board member within a maximum of 90 days after receiving the resignation letter.
3. A Board member who resigns as mentioned above may still be held accountable from the time of their appointment until their resignation in the following GMS.

4. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi; dan
 - b. Diterimanya keputusan atas hasil penyelenggaraan RUPS mengenai permohonan pengunduran diri anggota Direksi.
 5. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - e. Dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.
 6. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank.
 7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
4. *The Bank is required to disclose information to the public and notify the Financial Services Authority (OJK) no later than 2 (two) working days after:*
 - a. *Acceptance of the resignation request of the Board of Directors; and*
 - b. *Acceptance of the resolution on the results of the GMS regarding the request for resignation of a member of the Board of Directors.*
 5. *The term of office of a member of the Board of Directors automatically ends if the member of the Board of Directors:*
 - a. *Resigns with written notice;*
 - b. *No longer meets the requirements of the applicable legislation;*
 - c. *Passed away;*
 - d. *Is dismissed by resolution of the GMS; and*
 - e. *Is declared bankrupt or under guardianship based on a stipulation Court.*
 6. *The dismissal or replacement of members of the Board of Directors must prioritize the best interests of the Bank.*
 7. *In the event that a member of the Board of Directors is temporarily dismissed, the Board of Commissioners must organize a GMS to revoke or strengthen the temporary dismissal decision.*

PENILAIAN KINERJA KOMITE DAN UNIT KERJA YANG BERADA DI BAWAH DIREKSI

Direksi melakukan penilaian terhadap kinerja unit kerja di bawahnya dengan mengevaluasi pemenuhan tugas dan tanggung jawab pada setiap akhir periode. Komite Kredit, Komite ALCO, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Produk dan Komite Human Capital dipandang telah memberikan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang sejalan dengan strategi dan Rencana Bisnis Bank pada tahun 2024.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES AND WORK UNITS UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors assesses the performance of the work units under it by evaluating the fulfillment of duties and responsibilities at the end of each period. The Credit Committee, ALCO Committee, Risk Management Committee, Information Technology Steering Committee and Human Capital Committee are considered to have performed well in carrying out their respective duties and responsibilities in line with the Bank's strategy and Business Plan in 2024.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sharia Supervisory Board

Bank Artha Graha Internasional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah karena sampai dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Bank tidak memiliki Unit Usaha Syariah atau Bank Syariah. Oleh karena itu, Bank tidak menyajikan informasi terkait Dewan Pengawas Syariah.

Bank Artha Graha Internasional does not have a Sharia Supervisory Board because until the period ended December 31, 2024, the Bank did not have a Sharia Business Unit or Sharia Bank. Therefore, the Bank does not present information related to the Sharia Supervisory Board.

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Information Disclosure and Conflict of Interest Policy

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank wajib menjaga independensi dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan tertentu.

In carrying out their functions, duties and responsibilities, members of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors must maintain independence and avoid any form of conflict of interest, whether for personal, group, or specific interests.

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berpedoman pada regulasi yang berlaku ditetapkan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan jika terdapat benturan kepentingan dalam pengelolaan Bank. Oleh karena itu, dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 Bab VI Pasal 80, anggota Direksi maupun Dewan Komisaris hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan;
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan; dan
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

CONFLICT OF INTEREST MANAGEMENT

Based on the prevailing regulations, it is stipulated that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and Executive Officers are prohibited from taking actions that may harm the Bank or reduce the Bank's profits and must disclose conflicts of interest in every decision if there is a conflict of interest in the management of the Bank. Therefore, with reference to the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 Chapter VI Article 80, Directors and the Board of Commissioners should always:

1. Prioritize the interests of the Company and not reduce the Company's finances in the event of a conflict of interest;
2. Avoid making decisions in situations and conditions where there is a conflict of interest;
3. Disclose family relationships, financial relationships, management relationships, ownership relationships with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Bank and/or other parties in the context of the Company's business; and
4. Make disclosures in terms of decision-making must still be taken in conditions of conflict of interest.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dengan berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank Artha Graha Internasional mengungkapkan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai Pasal 57 huruf a dan Pasal 32 huruf a yang menyatakan bahwa dalam pemenuhan pelaksanaan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris atau Direksi mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SHARE OWNERSHIP OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Guided by the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, Bank Artha Graha Internasional discloses the share ownership of members of the Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with Article 57 letter a and Article 32 letter a which state that fulfillment of the implementation of Governance, members of the Board of Commissioners or Board of Directors disclose share ownership that reaches 5% (five percent) or more, both in the Bank concerned and in other banks and companies domiciled at home and abroad.

The share ownership of the Board of Commissioners and Directors in 2024 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership
Kiki Syahnakri	Komisaris Utama/Komisaris Independen <i>President Commissioner/Independent Commissioner</i>	Nihil <i>None</i>
Tomy Winata	Wakil Komisaris Utama <i>Vice President Commissioner</i>	Nihil <i>None</i>
Sugianto Kusuma	Wakil Komisaris Utama <i>Vice President Commissioner</i>	2,23%
Elizawatie Simon	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Nihil <i>None</i>
Pesta Uli Sitanggang	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Nihil <i>None</i>
Andy Kasih	Direktur Utama <i>President Director</i>	Nihil <i>None</i>
Christina Harapan	Wakil Direktur Utama <i>Vice President Director</i>	0,00%
Indrastomo Nugroho	Direktur Kepatuhan/Direktur Independen <i>Compliance Director/Independent Director</i>	Nihil <i>None</i>
Indra S. Budianto	Direktur <i>Director</i>	Nihil <i>None</i>
Handoyo Soedirdja	Direktur <i>Director</i>	0,04%

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Concurrent Positions of Board of Commissioners and Board of Directors

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Pasal 46 dinyatakan bahwa:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
 - a. Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
 - b. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - d. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - e. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) Perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - b. Komisaris Non-Independen menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank; dan/atau
 - c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
3. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.
4. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat surat pernyataan untuk:
 - a. Menjaga integritas;
 - b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
 - c. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian.
5. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan publik.

Referring to Financial Services Authority Regulation POJK No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, Article 46 states that:

1. Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or Executive Officers:
 - a. In financial institutions or financial companies, both banks and non-banks;
 - b. In more than 1 (one) non-financial institution or non financial company, whether domiciled at home or abroad;
 - c. In the field of functional duties at bank financial institutions and/or non-bank financial institutions domiciled at home or abroad;
 - d. In other positions that may create a conflict of interest in the performance of duties as a member of the Board of Commissioners; and/or
 - e. In other positions in accordance with the provisions of laws and regulations
2. Excluding concurrent positions as referred to in paragraph (1) in the event that:
 - a. Members of the Board of Commissioners serve as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or Executive Officers who carry out supervisory functions in 1 (one) non-bank subsidiaries controlled by the Bank;
 - b. Non-Independent Commissioners carry out the functional duties of Bank's Shareholders in the form of legal entities in the Bank and/or Bank's business groups; and/or
 - c. Members of the Board of Commissioners hold positions in non-profit organizations or institutions.
3. The duties in the positions and functions as referred to in paragraph (2) may be carried out as long as the person concerned does not neglect the implementation of duties and responsibilities as a member of the Bank's Board of Commissioners.
4. Candidates for members of the Board of Commissioners who have positions as referred to in paragraph (2) must make a statement letter to:
 - a. Maintain integrity;
 - b. Avoid any form of conflict of interest; and
 - c. Avoid actions that may harm the Bank and/or cause the Bank to violate prudential principles.
5. Independent Commissioners are prohibited from holding concurrent public positions.

Berikut informasi rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Artha Graha Internasional tahun 2024:

The following is information on the concurrent positions of the Board of Commissioners and Directors of Bank Artha Graha Internasional in 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Rangkap Jabatan Concurrent Position in	
		Jabatan Position	Nama Perusahaan/Instansi Lain Companies/Agencies
Kiki Syahnakri	Komisaris Utama/Komisaris Independen <i>President Commissioner/Independent Commissioner</i>	Tidak Ada <i>None</i>	Tidak Ada <i>None</i>
Tomy Winata	Wakil Komisaris Utama <i>Vice President Commissioner</i>	Tidak Ada <i>None</i>	Tidak Ada <i>None</i>
Sugianto Kusuma	Wakil Komisaris Utama <i>Vice President Commissioner</i>	Tidak Ada <i>None</i>	Tidak Ada <i>None</i>
Elizawatie Simon	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Tidak Ada <i>None</i>	Tidak Ada <i>None</i>
Pesta Uli Sitanggang	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Tidak Ada <i>None</i>	Tidak Ada <i>None</i>
Andy Kasih	Direktur Utama <i>President Director</i>	Tidak Ada <i>None</i>	Tidak Ada <i>None</i>
Christina Harapan	Wakil Direktur Utama <i>Vice President Director</i>	Tidak Ada <i>None</i>	Tidak Ada <i>None</i>
Indrastomo Nugroho	Direktur Kepatuhan/Direktur Independen <i>Compliance Director/Independent Director</i>	Tidak Ada <i>None</i>	Tidak Ada <i>None</i>
Indra S. Budianto	Direktur <i>Director</i>	Tidak Ada <i>None</i>	Tidak Ada <i>None</i>
Handoyo Soedirdja	Direktur <i>Director</i>	Tidak Ada <i>None</i>	Tidak Ada <i>None</i>

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Affiliate Relationship between of Board of Commissioners and Board of Directors

Bank melakukan pengelolaan dengan baik hubungan afiliasi yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi supaya dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan terbebas dari benturan kepentingan. Tabel berikut menjelaskan hubungan afiliasi yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi Bank Artha Graha Internasional di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The Bank properly manages the affiliations of the Board of Commissioners and Board of Directors so that in carrying out their duties and making decisions they are free from conflicts of interest. The following table explains the affiliations held by the Board of Commissioners and Directors of Bank Artha Graha Internasional in 2024 as follows:

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Hubungan Keuangan <i>Financial Relationship</i>			Hubungan Keluarga <i>Family Relationship</i>			Hubungan Kepemilikan Saham <i>Shareholding Relationship</i>		
		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>	Pemegang Saham Utama <i>Major Shareholders</i>	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>	Pemegang Saham Utama <i>Major Shareholders</i>	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>	Pemegang Saham Utama <i>Major Shareholders</i>
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>										
Kiki Syahnakri	Komisaris Utama/ Komisaris Independen <i>President Commissioner/ Independent Commissioner</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tomy Winata	Wakil Komisaris Utama <i>Vice President Commissioner</i>	X	X	√	X	X	X	√	X	√
Sugianto Kusuma	Wakil Komisaris Utama <i>Vice President Commissioner</i>	X	X	√	X	X	X	√	X	√
Elizawatie Simon	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pesta Uli Sitanggang	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Hubungan Keuangan <i>Financial Relationship</i>			Hubungan Keluarga <i>Family Relationship</i>			Hubungan Kepemilikan Saham <i>Shareholding Relationship</i>		
		Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>	Pemegang Saham Utama <i>Major Shareholders</i>	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>	Pemegang Saham Utama <i>Major Shareholders</i>	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>	Pemegang Saham Utama <i>Major Shareholders</i>
Direksi <i>Board of Directors</i>										
Andy Kasih	Direktur Utama <i>President Director</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Christina Harapan	Wakil Direktur Utama <i>Vice President Director</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	✓
Indrastomo Nugroho	Direktur Kepatuhan/ Direktur Independen <i>Compliance Director/ Independent Director</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indra S. Budianto	Direktur <i>Director</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Handoyo Soedirdja	Direktur <i>Director</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Diversity Policy of Board of Commissioners and Board of Directors

Bank Artha Graha Internasional senantiasa memegang erat prinsip keberagaman yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, tanpa memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, dan gender guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris maupun Direksi. Hal tersebut berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Di tahun 2023 komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah mempertimbangkan keberagaman baik dari aspek usia, gender, latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman kerja. Keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi dijelaskan di tabel berikut ini:

Bank Artha Graha Internasional always upholds the principle of diversity by providing equal opportunities for all people, regardless of ethnicity, religion, race, class, and gender differences to support the effectiveness of the duties of the Board of Commissioners and Board of Directors. This is guided by the provisions of the Financial Services Authority listed in the Appendix to the Circular Letter of the Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.

In 2024, the composition of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors considered diversity in terms of age, gender, educational background, expertise, and work experience. The diversity of members of the Board of Commissioners and Board of Directors is explained in the following table:

Aspek Keberagaman Diversity Aspect	Keterangan Description
Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Keahlian Expertise	Memiliki keahlian dan kompetensi di bidang Militer, Hukum, and Organization Development Have expertise and competence in the fields of Military, Law, and Organization Development
Pendidikan Education	Latar pendidikan S1 Bachelor's degree education background
Pengalaman Kerja Work Experience	Pihak yang ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman di berbagai bidang, seperti militer, hukum, perbankan, dan konsultan organization development Those appointed as members of the Board of Commissioners have experience in various fields, such as military, law, banking, and organization development consultant
Usia Age	Rata-rata usia Dewan Komisaris berada pada usia yang memungkinkan seseorang untuk terus bekerja dan berkarya, yaitu antara 61-77 tahun The average age of the Board of Commissioners is at an age that allows a person to continue working, which is between 61-77 years
Jenis Kelamin Gender	Perseroan memiliki 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang berjenis kelamin perempuan The Company has 2 (two) member of the Board of Commissioners who is female
Direksi Board of Directors	
Keahlian Expertise	Memiliki keahlian dan kompetensi di bidang Ekonomi, Bisnis Administrasi, Pertahanan, dan Manajemen Have expertise and competence in Economics, Business Administration, Defense, and Management
Pendidikan Education	Latar pendidikan S1 Bachelor's degree education background
Pengalaman Kerja Work Experience	Pihak yang ditunjuk sebagai anggota Direksi memiliki pengalaman di berbagai bidang, seperti akuntan, keuangan, IT, manajemen risiko, dan jabatan lainnya di industri perbankan Those appointed as members of the Board of Directors have experience in various fields

Aspek Keberagaman <i>Diversity Aspect</i>	Keterangan <i>Description</i>
Usia <i>Age</i>	Rata-rata usia Direksi berada pada usia yang memungkinkan seseorang untuk terus bekerja dan berkarya, yaitu antara 45-69 tahun <i>The average age of Directors is at an age that allows one to continue working and creating, which is between 45-69 years old</i>
Jenis Kelamin <i>Gender</i>	Perseroan memiliki 1 (satu) anggota Direksi yang berjenis kelamin perempuan <i>The Company has 1 (one) member of the Board of Directors who is female</i>

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Performance Assessment of Board of Commissioners and Directors

Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Bank Artha Graha Internasional dievaluasi secara berkala oleh pemegang saham melalui mekanisme RUPS, setelah sebelumnya Dewan Komisaris dan Direksi melakukan penilaian mandiri atas kinerja individual maupun kolektif kolegial.

The performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank Artha Graha Internasional is evaluated periodically by the shareholders through the GMS mechanism, after the Board of Commissioners and the Board of Directors have conducted a self-assessment of their individual and collegial performance.

Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang saham untuk melakukan penunjukan kembali. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

The results of the evaluation of the performance of the Board of Commissioners and Directors individually are one of the bases for consideration for shareholders to reappoint. The results of the evaluation of the performance of the Board of Commissioners as a whole and the performance of each member of the Board of Directors are an integral part of the remuneration scheme for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Selain itu, kinerja Dewan Komisaris dan Direksi juga dilakukan bersamaan dengan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) Tata Kelola atau GCG terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang mencakup 3 (tiga) aspek *governance* terdiri dari *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

In addition, the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors is also carried out in conjunction with the GCG Self-Assessment of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners which includes 3 (three) aspects of governance consisting of governance structure, governance process and governance outcome.

No	Kriteria - Indikator <i>Criteria - Indicator</i>	Peringkat Komposit <i>Composite Rating</i>	
		30 Juni 2024 <i>June 30, 2024</i>	31 Desember 2024 <i>December 31, 2024</i>
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris <i>Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners</i>	1	1
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi <i>Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors</i>	1	2

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Remuneration and Nomination of Board of Directors and Board of Commissioners

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta penetapan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan wewenang pemegang saham melalui mekanisme RUPS.

The appointment of members of the Board of Commissioners and Directors and the determination of the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors are the authority of the shareholders through the GMS mechanism.

PROSEDUR NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Artha Graha Internasional diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pemegang Saham Pengendali dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank untuk kemudian dilakukan pembahasan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Selain itu, calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Artha Graha Internasional juga dapat berasal dari sumber lainnya.

Nama-nama yang diusulkan sebagai calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Artha Graha Internasional harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pedoman dan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Pedoman dan Tata Kerja Direksi, yaitu:

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS NOMINATION PROCEDURE

Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Artha Graha Internasional are appointed and dismissed by the GMS. Controlling Shareholders may propose the names of candidates for members of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors for discussion by the Remuneration and Nomination Committee. In addition, candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Artha Graha Internasional may also come from other sources.

The names proposed as candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Artha Graha Internasional must meet the criteria set forth in the Board of Commissioners' Charter and Board of Directors' Charter, namely:

Kriteria Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Bank Artha Graha Internasional wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS, sesuai Anggaran Dasar Bank, serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Dewan Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali;
3. Anggota Dewan Komisaris Independen harus memiliki:
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
 - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan
4. Mantan anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
5. Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada poin 4 bagi:
 - a. Mantan Direktur Utama pada Bank; dan
 - b. Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank, paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
6. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha bank yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
7. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada poin 6 wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.
8. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.
9. Komisaris Independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.

Criteria for the Board of Commissioners

All members of the Board of Commissioners of PT Bank Artha Graha Internasional must meet the following criteria:

1. Members of the Board of Commissioners shall be appointed by the GMS for a term of office of up to 3 (three) years, effective from the date of appointment as resolved in the GMS, in accordance with the Bank's Articles of Association, and subject to any other conditions applicable to the appointment.
2. Members whose term has ended may be reappointed.
3. Independent Commissioners must possess:
 - a. Sufficient knowledge in banking that is relevant to the role of Independent Commissioner; and
 - b. Experience in the banking and/or financial sector.
4. Former members of the Board of Directors, Executive Officers, or parties affiliated with the Bank whose relationship may affect their ability to act independently must undergo a minimum cooling-off period of 1 (one) year before being appointed as Independent Commissioners at the same Bank.
5. The cooling-off period as referred to in point 4 shall be at least 6 (six) months for:
 - a. Former Presidents Director of the Bank; and
 - b. Former Directors who oversaw the supervisory function or Executive Officers responsible for supervision within the Bank.
6. Non-Independent Commissioners may transition to Independent Commissioners within the same Bank or banking group, provided that they meet the requirements for Independent Commissioners.
7. Non-Independent Commissioners who intend to transition to Independent Commissioners in the same Bank must undergo a minimum cooling-off period of 1 (one) year.
8. The transition from Non-Independent to Independent Commissioner must obtain approval from the Financial Services Authority (OJK) through a fit and proper assessment in accordance with OJK regulations concerning fit and proper testing for financial institutions.
9. Independent Commissioners shall serve a defined term and may be reappointed by the GMS for a maximum of 2 (two) consecutive terms.

10. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:
- Hasil penilaian Kinerja Komisaris Independen;
 - Hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
 - Hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - Pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Kriteria Direksi

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, calon anggota Direksi Bank harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Anggota Direksi wajib memenuhi integritas seperti:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan kegiatan usaha Bank yang sehat;
 - Tidak Sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaiankembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam daftar tidak lulus; dan
 - Cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
- Kompetensi yang paling kurang terdiri dari:
 - Memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi (keahlian) yang memadai di bidang yang dibutuhkan dalam pengelolaan Bank dan relevan dengan jabatannya;
 - Melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat, antara lain:
 - Menjalankan peran kepemimpinan dalam mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan (*value creation*) melalui upaya sebagai berikut:
 - Kompetitif dan visioner yang ditunjukkan dengan memiliki komitmen pada kinerja jangka panjang;
 - Memiliki sikap beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan bisnis, operasional, dan layanan Bank;

10. Independent Commissioners who have served 2 (two) consecutive terms may be reappointed for a subsequent term by taking into consideration:
- The performance evaluation of the Independent Commissioner;
 - The result of the Board of Commissioners' meeting stating that the Independent Commissioner remains capable of acting independently;
 - The assessment from the Head of Internal Audit and the Executive Officer responsible for human resources confirming the Independent Commissioner's continued ability to act independently; and
 - A declaration of independence by the Independent Commissioner at the GMS.

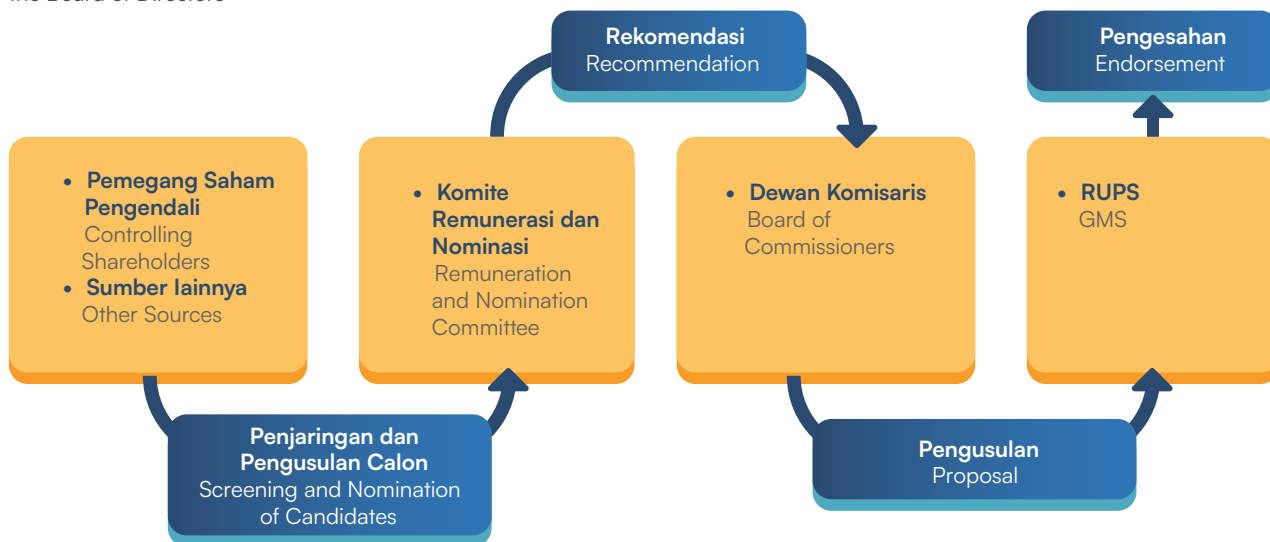
Criteria for the Board of Directors

Based on the Guidelines and Rules of Procedure for the Board of Directors, candidates for the Bank's Board of Directors must meet the following criteria:

- Members of the Board of Directors must meet integrity requirements, including:
 - Having good character and morals;
 - Demonstrating commitment to comply with the laws and regulations, including the Bank's provisions and regulations, as well as supporting the policies of the Financial Services Authority;
 - Demonstrating commitment to the development of a sound Bank business;
 - Not currently undergoing the consequences of a final result of a reassessment of key parties with an "unqualified" rating and/or not included in the disqualified list; and
 - Being legally competent to take legal action.
- The minimum competency requirements include:
 - Possessing adequate knowledge and/or competence (expertise) in areas required for Bank management and relevant to the position held;
 - Conducting strategic management to develop a sound Bank, including:
 - Playing a leadership role in creating sustainable value through the following efforts:
 - Being competitive and visionary, as shown by a commitment to long-term performance;
 - Acting ethically and responsibly in conducting the Bank's business, operational, and service activities;

- Berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan; dan
 - Memiliki kemampuan dalam beradaptasi, bertahan, dan bertumbuh.
- ii. Mengelola dan menjalankan rencana strategis Bank (jangka panjang, menengah, dan pendek) dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi terkini secara efektif, berdaya saing, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian;
 - iii. Menjalankan dan memimpin penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif dan efisien yang selaras dengan visi, misi, dan strategi Bank serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku;
 - iv. Mendukung dan melaksanakan pengembangan kualitas sumber daya manusia Bank;
 - v. Memastikan akuntabilitas dan integritas sistem keuangan dan pelaporan, termasuk laporan keuangan berkelanjutan, secara tepat waktu dan akurat yang sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; dan
 - vi. Memastikan dukungan terhadap kewenangan dan perangkat pendukung dewan pengawas syariah agar dapat melaksanakan tugas dengan efektif.
- c. Memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia, bagi anggota Direksi yang merupakan tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan.
3. Reputasi keuangan yang paling kurang yaitu:
- a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - e. Menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - f. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris selalu diterima oleh RUPS atau selalu memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
- *Contributing to society and the environment; and*
 - *Possessing the ability to adapt, survive, and grow.*
- ii. *Managing and executing the Bank's strategic plans (long-, medium-, and short-term) through innovation and the effective use of up-to-date information technology, in a competitive manner, and by prioritizing prudential principles;*
 - iii. *Leading and implementing risk management and internal control systems effectively and efficiently, in alignment with the Bank's vision, mission, and strategy, as well as in compliance with applicable laws and standards;*
 - iv. *Supporting and implementing the development of the Bank's human resource quality;*
 - v. *Ensuring accountability and integrity of financial and reporting systems, including sustainable financial reports, in a timely and accurate manner in accordance with applicable provisions and standards; and*
 - vi. *Ensuring support for the authority and supporting instruments of the Sharia Supervisory Board to perform their duties effectively.*
- c. *Possessing knowledge of Indonesia, particularly regarding its economy, culture, and language, for members of the Board of Directors who are foreign workers, in accordance with the Financial Services Authority regulations on the employment of foreign workers and knowledge transfer programs in the banking sector.*
3. *Minimum financial reputation requirements include:*
- a. *Not having non-performing loans and/or financing;*
 - b. *Never having been declared bankrupt;*
 - c. *Never having served as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;*
 - d. *Never having been convicted of a criminal offense that harmed state finances and/or related to the financial sector;*
 - e. *Holding an annual GMS (General Meeting of Shareholders);*
 - f. *Having their accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners always accepted by the GMS or always submitting such accountability to the GMS;*

- g. Tidak pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau laporan tahunan dan/atau laporan keuangan tidak disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS;
 - h. Mendukung pelaksanaan pengelolaan Bank yang sehat; dan
 - i. Menjaga reputasi bank.
4. Tidak termasuk dalam daftar orang yang dilarang menjadi Pemegang Saham dan/atau pengurus Bank dan/atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 5. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus Bank atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit & Proper Test*) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
 6. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
 7. Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan atau tanggal pencalonan sebagai anggota Direksi
 8. Khusus bagi Direktur Utama, merupakan pihak yang independen terhadap pemilik Bank atau pemegang saham pengendali.
 9. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini wajib dipenuhi selama masa jabatan anggota Direksi.
- g. *Never having caused a company that obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority to fail in submitting annual reports and/or financial reports to the Financial Services Authority and/or for the annual reports and/or financial reports to not be approved and/or ratified by the GMS;*
 - h. *Supporting the implementation of sound Bank management; and*
 - i. *Upholding the Bank's reputation.*
4. *Not included in the list of individuals prohibited from becoming shareholders and/or management of a Bank and/or Rural Bank in accordance with the provisions set by the Financial Services Authority.*
 5. *Never committed disgraceful acts in banking, finance, or other business sectors; never been convicted of criminal acts; and not currently subject to sanctions prohibiting appointment as Bank or Rural Bank management as stipulated in the Fit and Proper Test regulations issued by the Financial Services Authority.*
 6. *The majority of members of the Board of Directors must not have family relationships up to the second degree with other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.*
 7. *Never been declared bankrupt and never served as a shareholder, member of the Board of Directors, or member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt based on a court ruling within 5 (five) years before the date of application or nomination as a member of the Board of Directors.*
 8. *Specifically for the President Director, must be independent of the Bank owner or controlling shareholder.*
 9. *Never served as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who during their tenure:*
 - a. *Failed to hold an Annual GMS;*
 - b. *Had their accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners not accepted by the GMS or failed to submit such accountability to the GMS; and*
 - c. *Caused a company that obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority to fail in submitting annual reports and/or financial reports to the Financial Services Authority. The requirements as referred to in this provision must be fulfilled throughout the term of office of the member of the Board of Directors.*

Mekanisme Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi*Nomination Mechanism for the Board of Commissioners and the Board of Directors*

Setelah dilakukan pembahasan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, kemudian nama calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi diajukan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuannya pada saat RUPS.

After discussion by the Remuneration and Nomination Committee, the names of candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors are submitted to the Board of Commissioners for approval at the GMS.

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Besaran remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS Tahunan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan kajian dan rekomendasi atas remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Artha Graha Internasional untuk selanjutnya akan ditinjau ulang oleh RUPS sebagai organ tertinggi untuk penentuan dan persetujuannya. Remunerasi Direksi yang telah disetujui RUPS akan didelegasikan implementasinya kepada Dewan Komisaris.

PROCEDURES FOR PROPOSING AND DETERMINING REMUNERATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The amount of remuneration and other facilities provided for the Board of Commissioners and Board of Directors are determined by the Annual GMS by taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee. The Remuneration and Nomination Committee provides a review and recommendation on the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Artha Graha Internasional to be reviewed by the GMS as the highest organ for determination and approval. The remuneration of the Board of Directors approved by the GMS will be delegated for implementation to the Board of Commissioners.



DASAR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Bank Artha Graha Internasional berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

PENGUNGKAPAN INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Beberapa indikator yang menjadi dasar penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Artha Graha Internasional yang mengacu kepada pencapaian kinerja Bank dan individual adalah sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Prestasi kerja individu;
3. Kewajaran dengan *peer group*; dan
4. Pertimbangan dan strategi jangka panjang Bank.

BASIS FOR DETERMINATION OF REMUNERATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

In determining the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors, Bank Artha Graha Internasional is guided by Financial Services Authority Regulation No. 45/POJK.03/2015 and Financial Services Authority Circular Letter No. 40/SEOJK.03/2016 on the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks.

DISCLOSURE OF INDICATORS FOR DETERMINATION OF REMUNERATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Some of the indicators that form the basis for determining the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Artha Graha Internasional, which refers to the Bank's and individual performance achievements, areas follows:

1. *Financial performance and fulfillment of reserves, as stipulated in laws and regulations;*
2. *Individual work performance;*
3. *Fairness with peer group; and*
4. *Long-term considerations and strategies of the Bank.*

PENANGGUHAN ATAU PENARIKAN KEMBALI REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penangguhan atau penarikan kembali remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berlaku apabila Bank mengalami kerugian. Kerugian tersebut menyebabkan Bank tidak dapat membagikan remunerasi secara penuh ataupun yang bersifat variabel dengan nilai yang relatif kecil. Hal ini sebagaimana diatur dalam peraturan pemberian remunerasi bagi Bank Umum.

Selain itu, Bank juga wajib menangguhkan pembayaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang bersifat variabel (*malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*), jika kondisi Bank mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud dalam hal ini adalah yang berdampak negatif terhadap keuangan Bank, seperti *fraud* yang dilakukan oleh pihak yang menjadi *material risk takers* sehingga merugikan Bank, atau kondisi lainnya. Penangguhan dapat dilaksanakan dengan jangka waktu minimal selama 3 (tiga) tahun dan dapat disesuaikan menjadi lebih panjang, sesuai dengan jangka waktu risiko. Apabila hal tersebut terjadi, maka Dewan Komisaris dan Direksi dilarang melakukan tindakan lindung nilai atas remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan.

KAITAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN RISIKO DAN KINERJA

Sebagaimana telah dijelaskan dalam penangguhan atau penarikan kembali remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi erat kaitannya dengan risiko dan kinerja Bank. Risiko-risiko akan selalu ada, akan tetapi tergantung dari seberapa besar dampak yang ditimbulkan dan lamanya jangka waktu risiko tersebut.

PENGUNGKAPAN MATERIAL RISK-TAKER

Dengan mengacu kepada POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, pihak yang menjadi *material risk taker* sesuai Pedoman Kebijakan Perusahaan No.0033.02.1 tanggal 21 Februari 2020 perihal Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi PT Bank Artha Graha Internasional Tbk sebagai berikut:

1. Seluruh Direksi.
2. Pejabat dan *business unit*, yaitu:
 - a. Business UMKM & Konsumer (*Regional Head & Executive Officer*);

SUSPENSION OR WITHDRAWAL OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS REMUNERATION

Suspension or withdrawal of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors applies if the Bank suffers losses. The loss causes the Bank to be unable to distribute remuneration in full or which is variable with a relatively small value. This is as stipulated in the regulations on remuneration for Commercial Banks.

In addition, the Bank is also obliged to suspend the payment of variable remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors (malus) or withdraw the variable remuneration that has been paid (clawback), if the Bank experiences a loss. The losses referred to in this case are those that have a negative impact on the Bank's finances, such as fraud committed by parties who become material risk takers that harm the Bank, or other conditions. The suspension can be implemented with a minimum period of 3 (three) years and can be adjusted to be longer, according to the period of risk. If this occurs, the Board of Commissioners and Board of Directors are prohibited from hedging the deferred variable remuneration.

LINKAGE OF BOARD REMUNERATION TO RISK AND PERFORMANCE

As explained in the suspension or withdrawal of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors is closely related to the risks and performance of the Bank. Risks will always exist, but it depends on how big the impact is and the duration of the risk.

MATERIAL RISK-TAKER DISCLOSURE

With reference to POJK No. 45/POJK.03/2015 concerning the Implementation of Governance in the provision of Remuneration for Commercial Banks, the parties who are material risk takers according to the Corporate Policy Manual No. 0033.02.1 dated February 21, 2020 concerning the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk as follows:

1. All Directors.
2. Officers and business units, namely:
 - a. MSME & Consumer Business (*Regional Head & Executive Officer*);

- b. Business Korporasi & Komersial dan *Treasury* (Regional Head, Deputy Director & Executive Officer);
3. Deputy Director, Executive Officer, dan Senior Officer KPNO maupun cabang yang memiliki BWMK (Batas Wewenang Memutus Kredit) di luar daftar pejabat pada poin 2 (dua) di atas.

- b. Corporate & Commercial Business and Treasury (Regional Head, Deputy Director & Executive Officer);
3. Deputy Director, Executive Officer, and Senior Officer of KPNO and branches that have BWMK (Limit of Authority to Terminate Credit) outside the list of officers in point 2 above.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pada tahun 2024, Bank Artha Graha Internasional menentukan struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang terdiri dari honorarium, *benefit* yang sesuai dengan ketentuan Bank yang besarnya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

REMUNERATION STRUCTURE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

In 2024, Bank Artha Graha Internasional determined the remuneration structure of the Board of Commissioners and the Board of Directors consisting of honorarium, benefits in accordance with the provisions of the Bank whose amount in 2024 is as follows:

Remunerasi dan Fasilitas <i>Remuneration and Facilities</i>	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>	
	Jumlah <i>Total</i>	Rp (Juta) <i>Rp (Million)</i>	Jumlah <i>Total</i>	Rp (Juta) <i>Rp (Million)</i>
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) <i>Remuneration (salary, bonus, regular allowances, profit sharing, and other non-cash benefits)</i>	5	16.382	5	16.205
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi dan sebagainya) dalam ekuivalen Rupiah yang: <i>Other facilities in kind (housing, transportation, etc.) in Rupiah equivalent that:</i>				
1. Dapat dimiliki <i>Can be owned</i>	-	-	-	-
2. Tidak dimiliki <i>Not owned</i>				
3. Perumahan <i>Housing</i>	-	-	-	-
4. Transportasi <i>Transportation</i>	4	1.651	4	1.674
5. Asuransi Kesehatan <i>Health Insurance</i>	3	502	4	710

Kisaran Jumlah Remunerasi per Tahun <i>Range of Remuneration Amount per Year</i>	Jumlah Dewan Komisaris <i>Number of Board of Commissioners</i>	Jumlah Direksi <i>Number of Board of Directors</i>
Di atas Rp2 miliar <i>Above IDR2 billion</i>	4	4
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar <i>Above IDR1 billion - IDR2 billion</i>	1	-
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar <i>Above IDR500 million - IDR1 billion</i>	-	1
Rp500 juta ke bawah <i>IDR500 million and below</i>	-	-

No	Keterangan <i>Description</i>	Rasio <i>Ratio</i>
1	Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah <i>Salary Ratio of the Highest and Lowest Employee</i>	46,29 : 1
2	Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah <i>Salary Ratio of the Highest and Lowest Director</i>	4,00 : 1
3	Rasio Gaji Dewan Komisaris yang Tertinggi dan Terendah <i>Salary Ratio of the Highest and Lowest Commissioner</i>	3,41 : 1
4	Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Pegawai Tertinggi <i>Salary Ratio of the Highest Director and Highest Employee</i>	2,79 : 1

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Supporting Organs of the Board of Commissioners

Dalam menjalankan tugas pengawasan, penasihatannya maupun pengarahan terhadap pengelolaan Bank, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, mencakup:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

In supervising the management of the Bank, the Board of Commissioners is assisted by Committees that are responsible to the Board of Commissioners, including:

1. Audit Committee
2. Risk Monitoring Committee
3. Remuneration and Nomination Committee

KOMITE AUDIT

Audit Committee

Sebagai salah satu organ pendukung Dewan Komisaris, Komite Audit bertugas membantu dan mendukung Dewan Komisaris dalam memenuhi tugas dan fungsi pengawasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal, serta efektivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal.

The Audit Committee, as a supporting organ of the Board of Commissioners, is tasked with assisting and supporting the Board of Commissioners in fulfilling its duties and supervisory functions on matters relating to financial information, internal control systems, and the effectiveness of audits conducted by internal and external auditors.

DASAR HUKUM

Pembentukan Komite Audit Bank Artha Graha Internasional berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

LEGAL BASIS

The establishment of the Audit Committee of Bank Artha Graha Internasional is guided by the Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Implementation Guideline of the Audit Committee.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

Komite Audit Bank Artha Graha Internasional telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit sebagai pedoman dalam menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya membantu Dewan Komisaris. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit No. 0003.02.0 tanggal 9 Desember 2016 mencakup dasar hukum, wewenang, tugas, tanggung jawab, struktur organisasi komite hingga tata cara pelaksanaan rapat.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

The Audit Committee of Bank Artha Graha Internasional has an Audit Committee Charter as a guideline in carrying out its roles, duties and responsibilities to assist the Board of Commissioners. The Audit Committee Charter No. 0003.02.0 dated December 9, 2016 covers the legal basis, authority, duties, responsibilities, committee organizational structure and meeting procedures.

KRITERIA ANGGOTA KOMITE AUDIT

Kriteria Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

AUDIT COMMITTEE MEMBER CRITERIA

The criteria for Audit Committee Members are as follows:

1. Must have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the field of work, and be able to communicate well;

2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

2. *Must understand financial statements, the company's business, especially those related to services or business activities of the Issuer or Public Company, the audit process, risk management, and laws and regulations in the field of Capital Markets and other relevant laws and regulations;*
3. *Must comply with the Audit Committee code of ethics established by the Issuer or Public Company;*
4. *Willing to improve competence continuously through education and training;*
5. *Must have at least 1 (one) member with educational background and expertise in accounting and finance;*
6. *Not an insider of a Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Service Firm or other parties providing insurance services, non-insurance services, appraisal services and/or other consulting services to the relevant Issuer or Public Company within the last 6 (six) months;*
7. *Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for Independent Commissioner;*
8. *Does not have direct or indirect shares in the Issuer or Public Company;*
9. *In the event that a member of the Audit Committee acquires shares of the Issuer or Public Company either directly or indirectly as a result of a legal event, such shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after the acquisition of such shares;*
10. *Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of Issuers or Public Companies; and*
11. *Has no direct or indirect business relationship related to the business activities of the Issuer or Public Company.*

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI, DAN DASAR PENGANGKATAN KOMITE AUDIT

Komposisi struktur Komite Audit wajib memperhatikan indikator berikut:

1. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar perusahaan;

STRUCTURE, NUMBER, COMPOSITION, AND BASIS OF APPOINTMENT OF AUDIT COMMITTEE

The composition of the Audit Committee structure must consider the following indicators:

1. The Audit Committee consists of at least 3 (three) members from Independent Commissioners and parties from outside the company; and

2. Anggota Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari:
- 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota;
 - 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi;
 - 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

2. *Members of the Audit Committee shall consist of at least:*
- 1 (one) Independent Commissioner as Chairperson and concurrent member;*
 - 1 (one) independent party who has expertise in finance or accounting;*
 - 1 (one) independent party who has expertise in the field of law or banking.*

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. 002/BAGI-KOM/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023, Susunan Komite Audit per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Based on Commissioner Decree No. 002/BAGI-KOM/ XII/2023 dated December 6, 2023, the composition of the Audit Committee as of December 31, 2024 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Periode Period	Keahlian Expertise	Keterangan Description
Pesta Uli Sitanggang	Ketua Chairperson	- Surat Keputusan Komisaris No. 002/BAGI-KOM/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023; dan - Surat Keputusan Direksi No. SK-MT/HC/0007/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 - Board of Commissioner Decree No. 002/BAGI-KOM/ XII/2023 dated December 06, 2023 - Board of Director Decree No. SK-MT/HC/0007/XII/2023 dated December 06, 2023	2023-2026	Akuntansi Accounting	Komisaris Independen Independent Commissioner
Suryani Purwita	Anggota Member	- Surat Keputusan Komisaris No. 002/BAGI-KOM/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023; dan - Surat Keputusan Direksi No. SK-MT/HC/0008/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 - Board of Commissioner Decree No. 002/BAGI-KOM/ XII/2023 dated December 06, 2023 - Board of Director Decree No. SK-MT/HC/0008/ XII/2023 dated December 06, 2023	2023-2026	Akuntansi Accounting	Pihak Independen Independent Party
Anas Latief	Anggota Member	- Surat Keputusan Komisaris No. 002/BAGI-KOM/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023; dan - Surat Keputusan Direksi No. SK-MT/HC/0009/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 - Board of Commissioner Decree No. 002/BAGI-KOM/ XII/2023 dated December 06, 2023 - Board of Director Decree No. SK-MT/HC/0009/ XII/2023 dated December 06, 2023	2023-2026	Perbankan/ Manajemen Risiko Banking/ Risk Management	Pihak Independen Independent Party

PROFIL KOMITE AUDIT

Profil Pesta Uli Sitanggang sebagai Ketua Komite Audit telah disampaikan pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini. Adapun profil Suryani Purwita dan Anas Latief adalah sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE PROFILE

The profile of Pesta Uli Sitanggang as Chairperson of the Audit Committee is presented in the Company Profile chapter in this Annual Report. The profiles of Suryani Purwita and Anas Latief are as follows:

Nama <i>Name</i>	Suryani Purwita
Jabatan <i>Position</i>	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>
Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Basis of Appointment</i>	• Surat Keputusan Komisaris No.002/BAGI-KOM/XII/2023, tanggal 06 Desember 2023 • Surat Keputusan Direksi No. SK-MT/SDM/0002/XI/2022, tanggal 01 November 2022 • Surat Keputusan Direksi No. SK-MT/SDM/0006/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021 • Board of Commissioners Decree No.002/BAGI-KOM/XII/2023, dated December 06, 2023 • Board of Directors Decree No. SK-MT/SDM/0002/XI/2022, dated November 01, 2022 • Board of Directors Decree No. SK-MT/SDM/0006/X/2021, dated October 25, 2021
Usia <i>Age</i>	65 tahun year
Kewarganegaraan dan Domisili <i>Citizenship and Domicile</i>	WNI, Jakarta <i>Jakarta, Indonesia</i>
Riwayat Pendidikan <i>Education</i>	Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Trisakti, Jakarta (1984) <i>Bachelor of Economics, Accounting Department, Trisakti University (1984)</i>
Riwayat Pekerjaan <i>Career History</i>	• Komisaris Independen PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (2005-2012). • Komisaris PT Bank Artha Graha (2004-2005); • Direktur Consumer Banking PT Bank Artha Graha (1999-2004); dan • Direktur Marketing & SDM PT Bank Artha Pratama (1998-1999); • Independent Commissioner of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (2005-2012). • Commissioner of PT Bank Artha Graha (2004-2005); • Director of Consumer Banking PT Bank Artha Graha (1999-2004); and • Marketing & HR Director of PT Bank Artha Pratama (1998-1999);

Nama <i>Name</i>	Anas Latief
Jabatan <i>Position</i>	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>
Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Surat Keputusan Komisaris No. 002/BAGI-KOM/XII/2023, tanggal 06 Desember 2023 <i>Board of Commissioners Decree No. 002/BAGI-KOM/XII/2023, dated December 06, 2023</i>
Usia <i>Age</i>	64 tahun year
Kewarganegaraan dan Domisili <i>Citizenship and Domicile</i>	WNI, Jakarta <i>Jakarta, Indonesia</i>
Riwayat Pendidikan <i>Education</i>	Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Hasanuddin, Makassar (1986). <i>Bachelor of Economics, Department of Management, Hasanuddin University, Makassar (1986).</i>
Riwayat Pekerjaan <i>Career History</i>	• Direktur Kepatuhan & Direktur Independen PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (2019-2023). • Direktur Operasional, Finance, Accounting, Sysdur dan Administrasi Kredit PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (2014-2019); • Kepala Divisi diberbagai Bidang di PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (2009-2014); dan • Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (2005-2009); • Compliance Director & Independent Director of PT bank Artha Graha International Tbk (2019-2013); • Director of Operations, Finance, Accounting, Sysdur and Credit Administration PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (2014-2019); • Head of Division in various fields at PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (2009-2014); and • President Director of Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (2005-2009);

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit diwajibkan dapat menunjukkan status maupun sikap independensi dalam menjalankan tugas sebagaimana telah diatur dalam peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan tujuan agar anggota Komite Audit tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapat dan melaksanakan tugasnya.

INDEPENDENCE OF AUDIT COMMITTEE MEMBERS

Independence for Audit Committee members is required and has been regulated in OJK regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment and Implementation Guidelines for the Audit Committee with the aim that Audit Committee members are not influenced by personal interests or other parties in expressing opinions and carrying out their duties.

Kriteria Criteria	Anggota Komite Audit Audit Committee Member		
	Pesta Uli Sitanggang	Suryani Purwita	Anas Latief
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors</i>	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi <i>Does not have a management relationship in the company, subsidiaries, or affiliated companies</i>	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite lainnya <i>Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or other Committee members</i>	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah <i>Not serving as an administrator of political parties, officials, and the government</i>	✓	✓	✓

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee has the following duties and responsibilities:

1. Monitoring and evaluating the planning and implementation of audits, as well as monitoring the follow-up of audit results in order to assess the adequacy of internal controls including the adequacy of the financial reporting process;
2. Providing an independent professional opinion to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and the Audit Committee, and identify matters that require the attention of the Board of Commissioners; and

3. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala atau insidental apabila terdapat hal-hal penting yang dapat mengganggu jalannya Bank.

Komite Audit juga memiliki tugas dan tanggung jawab atas pemantauan serta evaluasi pada:

1. Pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Internal (Satuan Kerja Audit Intern, Kontrol, dan Kepatuhan);
2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit yang berlaku; dan
3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Bank yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE AUDIT

Rapat Komite Audit diselenggarakan secara berkala setiap bulan. Rapat tersebut dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Adapun jadwal pelaksanaan dan agenda rapat komite audit adalah sebagai berikut:

3. *The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners for the implementation of the tasks that have been determined and reports to the Board of Commissioners periodically or incidentally if there are important matters that can interfere with the running of the Bank.*

The Audit Committee also has duties and responsibilities for monitoring and evaluation on:

1. *Implementation of the duties of the Internal Supervisory Unit (Internal Audit, Control and Compliance);*
2. *Conformity of the audit implementation by the public accounting firm with the applicable audit standards; and*
3. *Conformity of financial statements with applicable accounting standards.*

AUTHORITY OF AUDIT COMMITTEE

In carrying out its duties, the Audit Committee has the following authority:

1. *Accessing the Bank's documents, data, and information about the Bank's employees, funds, assets, and resources as needed;*
2. *Communicating directly with employees, including the Board of Directors and those who perform internal audit, risk management, and accountant functions related to the duties and responsibilities of the Audit Committee;*
3. *Involving independent parties outside the Audit Committee members as needed to assist in carrying out their duties (if needed); and*
4. *Performing other authorities granted by the Board of Commissioners.*

AUDIT COMMITTEE MEETING

The Audit Committee meetings are held regularly every month. The meetings can be conducted if attended by more than 1/2 (half) of the members. The schedule and agenda for the Audit Committee meetings are as follows:

Tanggal Rencana Planning Date	Tanggal Realisasi Realization Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance
16/01/2024 January 16, 2024	16/01/2024 January 16, 2024	1. Tindakanlanj terhadap pembahasan meeting bulan sebelumnya; 2. Laporan hasil pemeriksaan Internal Audit dan Anti <i>Fraud</i> sampai dengan 31 Desember 2023 dan progress tindakanlanjutnya; dan 3. Laporan Direktorat Kepatuhan posisi Desember 2023 dan progress tindakanlanj pemeriksaan OJK. 1. <i>Follow-up on the previous meeting's discussions;</i> 2. <i>Report on Internal Audit and Anti Fraud findings until December 31, 2023, and progress on follow-up actions;</i> 3. <i>Report from the Compliance Directorate for December 2023 and progress on follow-up from OJK examination.</i>	Kuorum Quorum
13/02/2024 February 13, 2024	13/02/2024 February 13, 2024	1. Tindakanlanj terhadap pembahasan meeting bulan sebelumnya; 2. Laporan hasil pemeriksaan Internal Audit dan Anti <i>Fraud</i> bulan Januari 2024 dan progress tindakanlanjutnya; dan 3. Laporan Direktorat Kepatuhan Januari 2024 dan progress tindakanlanj pemeriksaan OJK. 1. <i>Follow-up on the previous meeting's discussions;</i> 2. <i>Report on Internal Audit and Anti Fraud findings for January 2024 and progress on follow-up actions;</i> 3. <i>Report from the Compliance Directorate for January 2024 and progress on follow-up from OJK examination.</i>	Kuorum Quorum
12/03/2024 March 12, 2024	13/03/2024 March 13, 2024	1. Tindakanlanj terhadap pembahasan meeting bulan sebelumnya; 2. Laporan hasil pemeriksaan Internal Audit dan Anti <i>Fraud</i> sampai dengan 28 Februari 2024 dan progress tindakanlanjutnya; dan 3. Laporan Direktorat Kepatuhan Februari 2024 dan progress tindakanlanj pemeriksaan OJK. 1. <i>Follow-up on the previous meeting's discussions;</i> 2. <i>Report on Internal Audit and Anti Fraud findings until February 28, 2024, and progress on follow-up actions;</i> 3. <i>Report from the Compliance Directorate for February 2024 and progress on follow-up from OJK examination.</i>	Kuorum Quorum
16/04/2024 April 16, 2024	16/04/2024 April 16, 2024	1. Tindakanlanj terhadap pembahasan meeting bulan sebelumnya; 2. Laporan hasil pemeriksaan Internal Audit dan Anti <i>Fraud</i> sampai dengan 31 Maret 2024 dan progress tindakanlanjutnya; dan 3. Laporan Direktorat Kepatuhan Maret 2024 dan progress tindakanlanj pemeriksaan OJK 1. <i>Follow-up on the previous meeting's discussions;</i> 2. <i>Report on Internal Audit and Anti Fraud findings until March 31, 2024, and progress on follow-up actions;</i> 3. <i>Report from the Compliance Directorate for March 2024 and progress on follow-up from OJK examination.</i>	Kuorum Quorum

Tanggal Rencana <i>Planning Date</i>	Tanggal Realisasi <i>Realization Date</i>	Agenda <i>Agenda</i>	Kehadiran <i>Attendance</i>
07/05/2024 <i>May 7, 2024</i>	14/05/2024 <i>May 14, 2024</i>	1. Tindaklanjut terhadap pembahasan meeting bulan sebelumnya; 2. Laporan hasil pemeriksaan Internal Audit dan Anti <i>Fraud</i> sampai dengan 30 April 2024 dan progress tindaklanjutnya; 3. Laporan Direktorat Kepatuhan April 2024 dan progress tindaklanjut pemeriksaan OJK; dan 4. Evaluasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Tahunan PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023.	Kuorum <i>Quorum</i>
11/06/2024 <i>June 11, 2024</i>	13/06/2024 <i>June 13, 2024</i>	1. Tindaklanjut terhadap pembahasan meeting bulan sebelumnya; 2. Laporan hasil pemeriksaan Internal Audit dan Anti <i>Fraud</i> sampai dengan 31 Mei 2024 dan progress tindaklanjutnya; 3. Laporan Direktorat Kepatuhan Mei 2024 dan progres tindaklanjut pemeriksaan OJK; dan 4. Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa Laporan Keuangan Bank yang berakhir pada tahun 2024.	Kuorum <i>Quorum</i>
09/07/2024 <i>July 9, 2024</i>	09/07/2024 <i>July 9, 2024</i>	1. Tindaklanjut terhadap pembahasan meeting bulan sebelumnya; 2. Laporan hasil pemeriksaan Internal Audit dan Anti <i>Fraud</i> sampai dengan 30 Juni 2024 dan progress tindaklanjutnya; dan 3. Laporan Direktorat Kepatuhan Juni 2024 dan progres tindaklanjut pemeriksaan OJK.	Kuorum <i>Quorum</i>

Tanggal Rencana <i>Planning Date</i>	Tanggal Realisasi <i>Realization Date</i>	Agenda <i>Agenda</i>	Kehadiran <i>Attendance</i>
06/08/2024 <i>August 6, 2024</i>	13/08/2024 <i>August 13, 2024</i>	1. Tindakanlanjut terhadap pembahasan meeting bulan sebelumnya; 2. Laporan hasil pemeriksaan Internal Audit dan Anti <i>Fraud</i> sampai dengan 31 Juli 2024 dan progress tindakanlanjutnya; dan 3. Laporan Direktorat Kepatuhan Juli 2024 dan progres tindakanlanjut pemeriksaan OJK. 1. <i>Follow-up on the previous meeting's discussions;</i> 2. <i>Report on Internal Audit and Anti Fraud findings until July 31, 2024, and progress on follow-up actions;</i> 3. <i>Report from the Compliance Directorate for July 2024 and progress on follow-up from OJK examination.</i>	Kuorum <i>Quorum</i>
10/09/2024 <i>September 10, 2024</i>	10/09/2024 <i>September 10, 2024</i>	1. Tindakanlanjut terhadap pembahasan meeting bulan sebelumnya; 2. Laporan hasil pemeriksaan Internal Audit dan Anti <i>Fraud</i> sampai dengan 31 Agustus 2024 dan progress tindakanlanjutnya; dan 3. Laporan Direktorat Kepatuhan Agustus 2024 dan progres tindakanlanjut pemeriksaan OJK. 1. <i>Follow-up on the previous meeting's discussions;</i> 2. <i>Report on Internal Audit and Anti Fraud findings until August 31, 2024, and progress on follow-up actions;</i> 3. <i>Report from the Compliance Directorate for August 2024 and progress on follow-up from OJK examination.</i>	Kuorum <i>Quorum</i>
08/10/2024 <i>October 8, 2024</i>	15/10/2024 <i>October 15, 2024</i>	1. Tindakanlanjut terhadap pembahasan meeting bulan sebelumnya; 2. Laporan hasil pemeriksaan Internal Audit dan Anti <i>Fraud</i> sampai dengan 30 September 2024 dan progress tindakanlanjutnya; dan 3. Laporan Direktorat Kepatuhan September 2024 dan progres tindakanlanjut pemeriksaan OJK. 1. <i>Follow-up on the previous meeting's discussions;</i> 2. <i>Report on Internal Audit and Anti Fraud findings until September 30, 2024, and progress on follow-up actions;</i> 3. <i>Report from the Compliance Directorate for September 2024 and progress on follow-up from OJK examination.</i>	Kuorum <i>Quorum</i>
12/11/2024 <i>November 12, 2024</i>	19/11/2024 <i>November 19, 2024</i>	1. Tindakanlanjut terhadap pembahasan meeting bulan sebelumnya; 2. Laporan hasil pemeriksaan Internal Audit dan Anti <i>Fraud</i> sampai dengan 31 Oktober 2024 dan progress tindakanlanjutnya; 3. Laporan Direktorat Kepatuhan Oktober 2024 dan progres tindakanlanjut pemeriksaan OJK; dan 4. RBB Tahun 2025 Direktorat Internal Audit. 1. <i>Follow-up on the previous meeting's discussions;</i> 2. <i>Report on Internal Audit and Anti Fraud findings until October 31, 2024, and progress on follow-up actions;</i> 3. <i>Report from the Compliance Directorate for October 2024 and progress on follow-up from OJK examination;</i> 4. <i>RBB for 2025 for the Internal Audit Directorate.</i>	Kuorum <i>Quorum</i>
10/12/2024 <i>December 10, 2024</i>	19/12/2024 <i>December 19, 2024</i>	1. Tindakanlanjut terhadap pembahasan meeting bulan sebelumnya; 2. Laporan hasil pemeriksaan Internal Audit dan Anti <i>Fraud</i> sampai dengan 30 November 2024 dan progress tindakanlanjutnya; dan 3. Laporan Direktorat Kepatuhan November 2024 dan progres tindakanlanjut pemeriksaan OJK. 1. <i>Follow-up on the previous meeting's discussions;</i> 2. <i>Report on Internal Audit and Anti Fraud findings until November 30, 2024, and progress on follow-up actions;</i> 3. <i>Report from the Compliance Directorate for November 2024 and progress on follow-up from OJK examination.</i>	Kuorum <i>Quorum</i>

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Program pengembangan kompetensi yang diikuti anggota Komite Audit sepanjang tahun 2024 telah diuraikan dalam bab Tata Kelola Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini, baik yang diselenggarakan oleh internal Bank maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT

Laporan Aktivitas Komite Audit selama tahun 2024 yang harus disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai penerapan tata kelola perusahaan sesuai ruang lingkup aktivitas di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank, berdasarkan hasil pemantauan terhadap pos-pos dalam Laporan Keuangan Publikasi untuk posisi 31 Desember 2023, posisi 31 Maret 2024, posisi 30 Juni 2024, posisi 30 September 2024 dan posisi 31 Desember 2024, dengan pencapaian sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT

To support the Audit Committee in carrying out its duties and responsibilities, the Bank provides opportunities for Audit Committee members to participate in training and competency development programs, either organized by the Bank's internal or external parties.

IMPLEMENTATION OF THE AUDIT COMMITTEE'S DUTIES

The Audit Committee's activity report for 2024, which must be submitted to the Board of Commissioners as part of the implementation of corporate governance in accordance with the scope of its activities, includes the following:

1. Reviewing the financial information to be issued by the Bank, based on the monitoring of items in the Published Financial Statements for the positions of December 31, 2023, March 31, 2024, June 30, 2024, September 30, 2024, and December 31, 2024, with the following achievements:

Laporan Keuangan per Triwulanan Quarterly Financial Reports

Keterangan Description	31 Desember 2023 December 31, 2023	31 Maret 2024 March 31, 2024	30 Juni 2024 June 30, 2024	31 September 2024 September 30, 2024	31 Desember 2024 December 31, 2024
Total Aset Total Assets	26.103.611	26.089.597	28.514.366	28.018.456	30.126.393
Pinjaman yang Diberikan Total Loans	12.147.369	10.745.518	10.403.622	10.250.416	10.605.479
Dana Pihak Ketiga Third-Party Funds	20.631.701	20.635.547	23.183.501	22.422.839	23.890.773
Total Modal Total Capital	3.948.432	4.011.906	4.060.211	3.968.811	3.965.697
Modal Inti Tier 1 Capital	3.584.721	3.635.076	3.685.273	3.595.422	3.591.911
CKPN	837.985	844.348	872.362	874.807	898.066
- Kredit	510.636	509.499	516.313	512.758	531.907
- AYDA	327.349	334.849	356.049	362.049	366.159
AYDA	1.263.460	1.263.404	1.247.890	1.241.422	1.175.042
Laba Tahun Lalu Last Year's Profit	(77.115)	69.637	69.637	69.637	69.637
Laba Tahun Berjalan Net Profit for the Year	146.753	36.809	70.510	127.006	152.474
KPMM	24,96%	25,16%	26,80%	26,44%	26,35%

Laporan Keuangan per Triwulanan

Quarterly Financial Reports

Keterangan Description	31 Desember 2023 December 31, 2023	31 Maret 2024 March 31, 2024	30 Juni 2024 June 30, 2024	31 September 2024 September 30, 2024	31 Desember 2024 December 31, 2024
ROA	0,60%	0,58%	0,53%	0,63%	0,55%
ROE	4,24%	4,10%	3,88%	4,69%	4,23%
NIM	5,58%	4,61%	4,67%	4,44%	4,07%
BOPO	90,11%	91,98%	92,54%	91,07%	90,32%
NPL Gross	1,74%	2,00%	2,46%	2,50%	2,40%
NPL Neto	0,31%	0,50%	0,90%	0,89%	0,77%

- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Bank tidak terdapat pelanggaran/ penyimpangan terhadap ketentuan internal ataupun ketentuan eksternal yang berlaku baik ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun perundang-undangan lainnya, semua aktivitas bank dilaksanakan secara sehat dan aman berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa informasi keuangan oleh Akuntan Publik (AP) atau Kantor Akuntan Publik (KAP). Komite Audit telah menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas pelaksanaan pemberian jasa audit oleh KAP untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2023 kepada OJK sesuai dengan surat Bank No.SK/0020/DIRUT/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Publikasi Posisi 31 Desember 2023 oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, dalam melaksanakan jasa audit tahun buku 2023 KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono tidak terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dengan KAP.
- Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Akuntan Publik (AP) atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa, bahwa Komite Audit merekomendasikan KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk melaksanakan jasa audit atas informasi keuangan PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk (BAGI) tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sesuai surat Rekomendasi No. SK/0004/KA/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024.
- Review of compliance with laws and regulations related to the Bank's activities. Based on the results of the review of the activities carried out by the Bank, there were no violations / deviations from the internal provisions or external provisions that applied, both provisions of Bank Indonesia, the Financial Services Authority and other laws and regulations, all bank activities were carried out in a healthy and safe manner based on prudential principles.
- The Audit Committee evaluated the provision of financial information services by the Public Accountant (PA) or Public Accounting Firm (KAP). The Audit Committee has submitted the Evaluation Report on the provision of audit services by KAP for the fiscal year ending December 31, 2023, to the OJK, as stated in the Bank's letter No. SK/0020/DIRUT/III/2024 dated March 28, 2024, regarding the Submission of the Published Financial Statements as of December 31, 2023, by KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono. In carrying out audit services for the 2023 fiscal year, KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono did not encounter any differences of opinion between the Management and the KAP.
- The Audit Committee has provided a recommendation to the Board of Commissioners for the appointment of a Public Accountant (PA) or Public Accounting Firm (KAP) based on independence, scope of assignment, and service fees. The Audit Committee recommends KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono to perform the audit services for the financial information of PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk (BAGI) for the fiscal year ending December 31, 2024, as stated in the Recommendation Letter No. SK/0004/KA/VI/2024 dated June 19, 2024.

5. Dalam hal terjadi perbaikan/*maintenance system bank*, saat ini nasabah sudah diinformasikan melalui *email*, *wa blast*, dan info pada *e-channel*.
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan Tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal, beberapa hal yang menjadi perhatian seperti:
 - a. Menindaklanjuti semua temuan yang terjadi melalui pembahasan/koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk dicarikan solusi penyelesaiannya sehingga meminimalkan temuan-temuan tidak terulang kembali.
 - b. Melakukan pemantauan progress penyelesaian temuan-temuan yang masih pending.
 - c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian intern pada seluruh aktivitas operasional bank untuk meminimalkan terjadi pelanggaran pada operasional.
 - d. Progress perbaikan pada sistem terus dilakukan pemantauan dan pemeriksaan secara periodik untuk memastikan benar sistem tersebut telah berjalan dengan baik.
 - e. Temuan pada aspek *customer service* mendominasi pemeriksaan di bidang operasional, sehingga perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi secara berkesinambungan untuk menambah dan meningkatkan wawasan dan keterampilan petugas.
 - f. Masih ditemukan KC/KCP belum melakukan penilaian jaminan secara berkala.
 - g. Penilaian atau rating Internal Audit terhadap cabang berdasarkan *Risk Based Audit* yang tertuang di dalam Prosedur Pedoman Pemeriksaan Intern (PPI) telah dilakukan.
 - h. Masih ditemukan KC/KCP belum melakukan *backup image ATM dan EJ (Electronic journal)* dengan lengkap dan pengiriman *backup image ATM dan EJ ke Unit Library* belum dilakukan secara konsisten.
 - i. Sosialisasi *Anti Fraud* dilakukan kepada seluruh karyawan, untuk menumbuhkembangkan budaya risiko dan *anti fraud*, agar memahami dan mengerti hal-hal yang harus dilakukan dalam mencegah terjadinya *fraud* serta memiliki rasa *awareness* atas pemahaman tersebut.
5. *In the event of bank system repair/maintenance, currently customers had been informed via email, WA blast, and info on e-channel.*
6. *Review of the examinations by internal auditors and oversight of the follow-up by the Board of Directors on the findings of internal auditors, including several matters of concern such as:*
 - a. *Follow-up on findings to be discussed with the relevant parties to find a solution so that these findings do not reoccur.*
 - b. *For findings that were pending, to continue monitoring the progress of their completion.*
 - c. *Improved supervision and internal control on all operational activities at each bank office to minimize violations.*
 - d. *The progress of improvements to the system continued to be monitored and checked periodically to ensure that the system is running properly.*
 - e. *Findings related to customer service were the most prominent in the operational audit, indicating the need for ongoing training and outreach to broaden and improve staff knowledge and skills.*
 - f. *It was discovered that KC/KCP had not conducted regular collateral assessment.*
 - g. *Internal Audit assessment or rating of branches based on Risk Based Audit as stated in the Internal Audit Guideline Procedure had been conducted.*
 - h. *Several Branch and Sub-Branch Offices (KC/KCP) were still found to have incomplete ATM image and Electronic Journal (EJ) backups, and the submission of these backups to the Library Unit has not been performed consistently.*
 - i. *Anti-Fraud Socialization had been conducted to all employees to ensure employees' understanding of aspects that must be carried out in preventing fraud and ensuring awareness of this understanding.*

7. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan OJK dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan tersebut:
 - a. Komitmen tindak lanjut pemeriksaan OJK untuk dilakukan *monitoring* secara menyeluruh baik terkait pemenuhan pembayaran maupun dokumen administrasi lainnya dan terhadap komitmen yang belum terpenuhi sesuai *target date* yang telah disepakati segera dimintakan pemenuhannya sehingga tidak ada lagi komitmen yang belum terpenuhi.
 - b. Melakukan review hasil temuan pemeriksaan OJK, untuk dijadikan masukan bagi Internal Audit dalam melakukan pemeriksaan baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang dan *monitoring* terhadap temuan-temuan yang menjadi *concern* pemeriksaan OJK agar temuan tersebut tidak terulang.
7. *Review of OJK examinations and oversight of the follow-up on the examination findings:*
 - a. *FSA examination follow-up commitments to be monitored thoroughly both related to the fulfillment of payments and other administrative documents and for commitments that had not been fulfilled according to the agreed target date were immediately requested for fulfillment so that there were no more unfulfilled commitments.*
 - b. *Reviewing the results of OJK audit findings, to serve as input for Internal Audit in conducting inspections of both the Head Office and Branch Offices and monitoring findings that are a concern for OJK audits so that these findings are not repeated.*

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Remuneration and Nomination Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya terkait dengan pemberian rekomendasi atas Remunerasi dan Nominasi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan anggota Komite-Komite di tingkat Dewan Komisaris, beserta kerangka secara keseluruhan remunerasi Pejabat Eksekutif dan pegawai sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

The Remuneration and Nomination Committee is a Committee established and responsible to the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities related to providing recommendations on the Remuneration and Nomination of members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and members of Committees at the Board of Commissioners level, along with the overall framework of remuneration of Executive Officers and employees in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

DASAR HUKUM

1. Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Umum.
2. Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang penerapan tata Kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum.
3. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik.

LEGAL BASIS

1. OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the implementation of governance for Commercial Banks..
2. OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 concerning the implementation of Governance in the provision of remuneration for Commercial Banks.
3. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 regarding the Remuneration and Nomination Committee of Issuers or Public Companies.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA

Dalam menjalankan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi No. 0005.02.1 tanggal 14 November 2019.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE CHARTER

The Remuneration and Nomination Committee in carrying out its duties refers to the Remuneration and Nomination Committee Charter No. 0005.02.1 dated November 14, 2019.

KRITERIA ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi membutuhkan kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang sesuai dengan kebutuhan Bank untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

CRITERIA FOR REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEMBERS

The Remuneration and Nomination Committee requires educational qualifications and work experience in accordance with the needs of the Bank to support the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI, DAN DASAR PENGANGKATAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan susunan sesuai ketentuan berikut:

1. Seorang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan

STRUCTURE, NUMBER, COMPOSITION, AND BASIS OF APPOINTMENT OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The composition of the Remuneration and Nomination Committee consists of at least 3 (three) members, with the following composition:

1. A Chairperson who is also a member, who is an Independent Commissioner; and

2. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
- Anggota Dewan Komisaris;
 - Pihak yang berasal dari luar Bank; dan
 - Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi *Human Capital*.

2. Other members may come from:
- Member of the Board of Commissioners;
 - Parties originating from outside the Bank; and
 - Those who hold managerial positions under the Board of Directors in charge of *Human Capital*.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 002/BAGI-KOM/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:

The composition of the Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2023 is based on the Decision of the Board of Commissioners No. 002/BAGIKOM/ XII/2023 dated December 6, 2023, as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period	Keahlian Expertise	Keterangan Description
Kiki Syahnakri	Ketua Chairperson	- Surat Keputusan Komisaris No. 002/BAGI-KOM/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 - Surat Keputusan Direksi No. SK-MT/HC/0013/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 - Board of Commissioner Decree No. 002/BAGI-KOM/XII/2023 dated December 6, 2023 - Board of Director Decree No. SK-MT/HC/0013/XII/2023 dated December 6, 2023	2023-2026	Perbankan Banking	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner
Tomy Winata	Anggota Member	- Surat Keputusan Komisaris No. 002/BAGI-KOM/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 - Surat Keputusan Direksi No. SK-MT/HC/0014/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 - Board of Commissioner Decree No. 002/BAGI-KOM/XII/2023 dated December 6, 2023 - Board of Director Decree No. SK-MT/HC/0014/XII/2023 dated December 6, 2023	2023-2026	Manajemen Management	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner
Marlene Gunawan	Anggota Member	- Surat Keputusan Komisaris No. 002/BAGI-KOM/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 - Surat Keputusan Direksi No. SK-MT/HC/0015/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 - Board of Commissioner Decree No. 002/BAGI-KOM/XII/2023 dated December 6, 2023 - Board of Director Decree No. SK-MT/HC/0015/XII/2023 dated December 6, 2023	2023-2026	Manajemen Management	Deputy Director Human Capital

PROFIL KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Profil ketua dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE PROFILE

The profile of the Chairperson and members of the Remuneration and Nomination Committee can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report book.

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Independensi dan profesionalitas Komite Remunerasi dan Nominasi dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

INDEPENDENCE OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEMBERS

The independence and professionalism of the Remuneration and Nomination Committee is required in carrying out its duties and responsibilities to support the supervisory function of the Board of Commissioners. The independence of the Remuneration and Nomination Committee members can be seen in the following table:

Kriteria Criteria	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of Remuneration and Nomination Committee		
	Kiki Syahnakri	Tomy Winata	Marlene Gunawan
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors</i>	✓	-	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi <i>Does not have a management relationship in the company, subsidiaries, or affiliated companies</i>	✓	-	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite lainnya <i>Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or other Committee members</i>	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah <i>Not serving as an administrator of political parties, officials, and the government</i>	✓	✓	✓

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Terkait Remunerasi:

- Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; serta
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Terkait Nominasi:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem, serta prosedur pemilihan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Remuneration and Nomination Committee has the following duties and responsibilities:

Remuneration Function:

- Carrying out an evaluation of the remuneration policy;
- Providing input to the Board of Commissioners regarding:
 - Remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the GMS; and
 - Remuneration policy for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors.

Nomination Function:

- Preparing and providing recommendations regarding the system, as well as procedures for the election or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;

2. Merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS;
3. Merekomendasikan pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
4. Merekomendasikan usulan penggantian atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris dalam RUPS; dan
5. Merekomendasikan usulan penggantian atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris dalam RUPS.

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank wajib memastikan kebijakan tersebut telah sesuai dengan:

1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Prestasi kerja individual;
3. Kewajaran dengan peer group; dan
4. Pertimbangan dan strategi jangka panjang Bank.

2. *Recommending candidates for the Board of Commissioners or Board of Directors to the Board of Commissioners to be presented at the GMS;*
3. *Recommending independent parties who will become members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners;*
4. *Recommending proposals for the replacement or appointment of members of the Board of Commissioners in the GMS; and*
5. *Recommending proposals for the replacement or appointment of members of the Board of Directors by the Board of Commissioners in the GMS.*

The Remuneration and Nomination Committee of the Bank shall ensure that the policy is in accordance with:

1. *Financial performance and fulfillment of reserves as stipulated in applicable laws and regulations;*
2. *Individual work performance;*
3. *Fairness with peer group; and*
4. *Long-term considerations and strategies of the Bank.*

RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.

Sepanjang tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Adapun agenda dan rekapitulasi kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEETINGS

Remuneration and Nomination Committee Meetings The Remuneration and Nomination Committee meets regularly at least 1 (one) time in 4 (four) months, and the Remuneration and Nomination Committee Meeting can be conducted if attended by a majority of the Remuneration and Nomination Committee members and one of the majority of the Remuneration and Nomination Committee members is the Chairperson of the Remuneration and Nomination Committee.

Throughout 2024, the Remuneration and Nomination Committee conducted 4 (four) meetings. The agenda and attendance summary of Remuneration and Nomination Committee members in meetings in 2024 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance %
Kiki Syahnakri	Ketua Chairperson	4	4	100%
Marlene Gunawan	Anggota Member	4	4	100%

Agenda Rapat

Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1.	24 Januari 2024 January 24, 2024	- Program Kerja dan Realisasi tahun 2023 - Penyusunan Program Kerja tahun 2024 <i>Work Program and Realization for 2023</i> <i>Preparation of Work Program for 2024</i>
2.	20 Februari 2024 February 20, 2024	- Hasil Penilaian KPI Direksi tahun 2023 - Hasil P2P Karyawan <i>IKPI Assessment Results for the Board of Directors in 2023</i> <i>Employee P2P Results</i>
3.	24 Juni 2024 June 24, 2024	- Highlight POJK No. 34/POJK.04/20214 - Program Kerja KRN Tahun 2024 - Rekomendasi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang jatuh tempo masa jabatannya pada saat RUPS - Usulan Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS - Turnover karyawan dan ketentuan pengunduran diri - Lain-lain: Usulan penerapan COLA di BAGI <i>Highlights of POJK No. 34/POJK.04/20214</i> <i>KRN Work Program for 2024</i> <i>Recommendation for the Reappointment of Board of Directors Members whose term expires during the AGM</i> <i>Proposal of Candidates for the Board of Commissioners and Directors to the Board of Commissioners for the AGM</i> <i>Employee turnover and resignation policy</i> <i>Other: Proposal to implement COLA at BAGI</i>
4.	19 Desember 2024 December 19, 2024	- Evaluasi kinerja KRN 2024 - Rencana kegiatan tahun 2025 - Realisasi biaya karyawan 2023 (audited) vs RBB 2024 (proyeksi sampai dengan Desember 2024) <i>Evaluation of KRN's performance in 2024</i> <i>Activity plan for 2025</i> <i>Employee cost realization for 2023 (audited) vs. RBB 2024 (projection until December 2024)</i>

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Untuk menunjang Komite Remunerasi dan Nominasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank memberikan kesempatan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal Bank atau yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

To support the Remuneration and Nomination Committee in carrying out its duties and responsibilities, the Bank provides opportunities for members of the Remuneration and Nomination Committee to participate in training and competency development programs, either organized by the Bank's internal or external parties. The competency development programs followed by the Remuneration and Nomination Committee in 2024 are as follows:

Nama Peserta Participant Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	Penyelenggara Organizer	Tempat dan Waktu Venue and Date
Kiki Syahnakri	Ketua Chairperson	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 - Komisaris Risk Management Certification Level 6 - Commissioner	Bankers Association for Risk Management (BARa) dan LSPP	15-16 Agustus 2024 August 15-16, 2024
Marlene Gunawan	Anggota Member	The Role of Women Leadership in Digital Era	LPPI	Jakarta, 23 April 2024 Jakarta, April 23, 2024
		Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	LSPP	Jakarta, 7 Mei 2024 Jakarta, May 7, 2024
		Workshop Laporan Resolusi (LPS) & Recovery (OJK)	Denny Sudrajat	Jakarta, 21-22 September 2024 Jakarta, September 21-22, 2024
		Program Outlook - Empowering Human Capital for a Brighter Future	Synergy Partner Prima	Jakarta, 17 Oktober 2024 Jakarta, October 17, 2024
		Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Pelaporan Online Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran (SK SP)	Bank Indonesia	Jakarta, 21 Oktober 2024 Jakarta, October 21, 2024
		HR Leaders & HR Tech Strategy	Rockbird Media Pte. Ltd.	Jakarta, 19 November 2024 Jakarta, November 19, 2024
		The 19th Indonesia HR EXPO	INTIPESAN Conference	Jakarta, 11-12 Desember 2024 Jakarta, December 11-12, 2024

Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi*Implementation of Remuneration and Nomination Committee Duties*

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1.	24 Januari 2024 January 24, 2024	1. Penyusunan Program Kerja tahun 2024 1. Preparation of Work Program for 2024
2.	20 Februari 2024 February 20, 2024	1. Analisa Hasil Penilaian Sendiri KPI Direksi tahun 2023 2. Hasil Penilaian wawancara dengan karyawan 1. Analysis of the 2023 KPI Self-Assessment Results of the Board of Directors 2. Results of Employee Interviews
3.	24 Juni 2024 June 24, 2024	1. Highlight POJK No. 34/POJK.04/2014 2. Program kerja KRN tahun 2024 3. Pengangkatan kembali Anggota Direksi yang jatuh tempo masa jabatannya pada saat RUPS 4. Usulan pengangkatan Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS 5. Turnover karyawan dan ketentuan pengunduran diri 1. Highlight of POJK No. 34/POJK.04/2014 2. KRN Work Program for 2024 3. Reappointment of Board of Directors Members whose term has expired at the Annual General Meeting (RUPS) 4. Proposal for Appointment of Candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors to be presented at RUPS 5. Employee turnover and resignation policy
4.	19 Desember 2024 December 19, 2024	1. Evaluasi kinerja KRN 2024 dan Penyusunan rencana kegiatan tahun 2025 1. Evaluation of KRN Performance in 2024 and Preparation of Activity Plan for 2025

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugasnya mengacu kepada pedoman dan tata tertib yang disediakan Bank. Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Komite juga bertanggung jawab dalam menentukan kriteria dan mengidentifikasi para calon, mengkaji, menyetujui nominasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif Bank agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di kantor pusat atau kantor cabang, maka beberapa jajaran eksekutif yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh akan mendapatkan rotasi.

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

In carrying out its duties, the Remuneration and Nomination Committee refers to the guidelines and rules provided by the Bank. The Remuneration and Nomination Committee prepares and provides recommendations regarding the system and procedures for the selection and/or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS. The Committee is also responsible for determining criteria and identifying candidates, reviewing and approving nominees in accordance with the specified criteria. In order to prepare the Bank's executives to gain full knowledge and experience as officers in the head office or branch offices, some executives who are considered to have the potential to be developed further will be rotated.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Risk Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komite Pemantau Risiko bertugas memonitor dan menilai risiko yang dapat diambil oleh Bank untuk memastikan telah dilakukannya pengelolaan risiko dengan baik, terutama pada pengelolaan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko bank lainnya.

DASAR HUKUM

Dasar pembentukan Komite Pemantau Risiko Bank Artha Graha Internasional adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA

Dalam menjalankan tugasnya Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Pedoman Kebijakan Perusahaan No. 0004.02.0 tanggal 20 Juni 2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.

KRITERIA ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki kriteria-kriteria sebagaimana yang ditetapkan oleh Regulator sebagai berikut:

1. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko;
2. Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko;
3. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Perseroan yang sama; dan
4. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

The Risk Monitoring Committee was established to assist the Board of Commissioners in carrying out its risk oversight responsibilities in accordance with applicable regulations. The Risk Monitoring Committee is tasked with monitoring and assessing the risks that can be taken by the Bank to ensure good risk management, especially in managing credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, and other bank risks.

LEGAL BASIS

The basis for the establishment of the Risk Monitoring Committee of Bank Artha Graha Internasional is the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.

RISK MONITORING COMMITTEE CHARTER

The Risk Monitoring Committee in carrying out its duties is guided by the Risk Monitoring Committee Charter No. 0004.02.0 dated June 20, 2024 concerning the Implementation of Duties and Ethics of Risk Monitoring Committee members.

RISK MONITORING COMMITTEE MEMBER CRITERIA

Members of the Risk Monitoring Committee have the following criteria as stipulated by the Regulator:

1. *Members of the Risk Monitoring Committee shall consist of at least 1 (one) Independent Commissioner as Chairperson and concurrent member, 1 (one) Independent Party with expertise in finance and 1 (one) Independent Party with expertise in risk management;*
2. *Independent commissioners and independent parties who are members of the Risk Monitoring Committee shall constitute at least 51% of the total members of the Risk Monitoring Committee;*
3. *The Chairperson of the Committee may only concurrently serve as Chairperson of the Committee at a maximum of 1 (one) other Committee in the same Company; and*
4. *Committee members must have integrity, good character, and morals.*

SUSUNAN, JUMLAH, KOMPOSISI, DAN DASAR PENGANGKATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO**STRUCTURE, NUMBER, COMPOSITION, AND BASIS OF APPOINTMENT OF RISK MONITORING COMMITTEE**

Komposisi Komite Pemantau Risiko Bank paling sedikit terdiri dari:

1. Seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite;
2. Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
3. Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Susunan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 31 Desember 2024 adalah berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 002/BAGI-KOM/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:

The composition of the Bank's Risk Monitoring Committee consists of at least:

1. An Independent Commissioner who serves as Chairperson of the Committee;
2. An independent party with financial expertise; and
3. An independent party with expertise in risk management.

The composition of the Risk Monitoring Committee as of December 31, 2024 is based on the Decision of the Board of Commissioners No. 002/BAGI-KOM/XII/2023 dated December 6, 2024, as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period	Keahlian Expertise	Keterangan Description
Elizawatie Simon	Ketua Chairperson	1. Surat Keputusan Komisaris No. 002/BAGI-KOM/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 2. Surat Keputusan Direksi No. SK-MT/HC/0010/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 1. Board of Commissioner Decree No. 002/BAGI-KOM/XII/2023 dated December 6, 2023 2. Board of Director Decree No. SK-MT/HC/0010/XII/2023 dated December 6, 2023	2023-2026	Hukum Perdata Civil Law	Komisaris Independen Independent Commissioner
Suryani Purwita	Anggota Member	1. Surat Keputusan Komisaris No. 002/BAGI-KOM/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 2. Surat Keputusan Direksi No. SK-MT/HC/0011/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 1. Board of Commissioner Decree No. 002/BAGI-KOM/XII/2023 dated December 6, 2023 2. Board of Director Decree No. SK-MT/HC/0011/XII/2023 dated December 6, 2023	2023-2026	Akuntansi Accounting	Pihak Independen Independent Party
Anas Latief	Anggota Member	1. Surat Keputusan Komisaris No. 002/BAGI-KOM/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 2. Surat Keputusan Direksi No. SK-MT/HC/0012/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 1. Board of Commissioner Decree No. 002/BAGI-KOM/XII/2023 dated December 6, 2023 2. Board of Director Decree No. SK-MT/HC/0012/XII/2023 dated December 6, 2023	2023-2026	Perbankan/ Manajemen Risiko Banking/Risk Management	Pihak Independen Independent Party

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko yang menjabat sebagai Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

Profil Suryani Purwita dan Anas Latief sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada sub-bab Komite Audit dalam pembahasan sebelumnya.

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Independensi dan profesionalitas Komite Pemantau Risiko dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Independensi anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Kriteria Criteria	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Audit Committee		
	Elizawatie Simon	Suryani Purwita	Anas Latief
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Directors	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Does not have a management relationship in the company, subsidiaries, or affiliated companies	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite lainnya Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or other Committee members	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah Not serving as an administrator of political parties, officials, and the government	✓	✓	✓

RISK MONITORING COMMITTEE PROFILE

The profile of the Chairperson of the Risk Monitoring Committee who serves as Commissioner can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

The profiles of Suryani Purwita and Anas Latief as members of the Risk Monitoring Committee can be seen in the Audit Committee sub-chapter in the previous discussion.

INDEPENDENCE OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEMBERS

The independence and professionalism of the Remuneration and Nomination Committee is required in carrying out its duties and responsibilities to support the supervisory function of the Board of Commissioners. The independence of the Remuneration and Nomination Committee members can be seen in the following table:

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Bank Artha Graha Internasional adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Penyelenggaraan Rapat Komite Pemantau Risiko dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum sebagai berikut:

1. Rapat komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank; dan
2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (Dua Belas) kali, dengan agenda dan frekuensi kehadiran anggota rapat dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance %
Elizawatie Simon	Ketua Chairperson	12	12	100
Suryani Purwita	Anggota Member	12	12	100
Anas Latief	Anggota Member	12	12	100

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF RISKMONITORING COMMITTEE

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee of Bank Artha Graha Internasional are as follows:

1. Evaluating the conformity between risk management policies and the implementation of these policies; and
2. Monitoring and evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Committee and Risk Management Work Unit.

RISK MONITORING COMMITTEE MEETINGS

The organization of Committee Meetings refers to the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks as follows:

1. Committee meetings are held in accordance with the needs of the Bank; and
2. Risk Monitoring Committee meetings can only be held if attended by at least 51% (fifty-one percent) of the committee members including 1 (one) Independent Commissioner and 1 (one) Independent Party.

The Risk Monitoring Committee held a total of 12 (twelve) meetings throughout 2024. The agenda and frequency of attendance of meeting members can be seen in the following table:

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko*Risk Oversight Committee Meeting Agenda*

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1.	19 Januari 2024 January 19, 2024	1. Laporan Profil Risiko Periode 31 Desember 2023 vs 30 September 2023 2. Stress Test Likuiditas Periode 31 Desember 2023 1. Risk Profile Report as of December 31, 2023 vs September 30, 2023 2. Liquidity Stress Test as of December 31, 2023
2.	23 Februari 2024 February 23, 2024	1. Laporan Profil Risiko Periode 31 Januari 2024 vs 31 Desember 2023 2. Stress Test Likuiditas Periode 31 Januari 2024 3. Stress Test Profil Risiko Periode 31 Desember 2023 untuk pelaporan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) 1. Risk Profile Report as of January 31, 2024 vs December 31, 2023 2. Liquidity Stress Test as of January 31, 2024 3. Risk Profile Stress Test as of December 31, 2023 for Bank Soundness Level (TKB) reporting
3.	22 Maret 2024 March 22, 2024	1. Laporan Profil Risiko Periode 29 Februari 2024 vs 31 Januari 2024 2. Stress Test Likuiditas Periode 29 Februari 2024 3. Simulasi Kredit Kualitas Rendah (KKR) periode Februari 2024 (proyeksi debitur lepas flag Covid-19) 1. Risk Profile Report as of February 29, 2024 vs January 31, 2024 2. Liquidity Stress Test as of February 29, 2024 3. Simulation of Low-Quality Loans (KKR) for February 2024 (projection of borrowers exiting Covid-19 flag)
4.	23 April 2024 April 23, 2024	1. Laporan Profil Risiko Periode 31 Maret 2024 vs 31 Desember 2023 2. Stress Test Likuiditas Periode 31 Maret 2024 1. Risk Profile Report as of March 31, 2024 vs December 31, 2023 2. Liquidity Stress Test as of March 31, 2024
5.	20 Mei 2024 May 20, 2024	1. Laporan Profil Risiko Periode 30 April 2024 vs 31 Maret 2024 2. Stress Test Likuiditas Periode 30 April 2024 1. Risk Profile Report as of April 30, 2024 vs March 31, 2024 2. Liquidity Stress Test as of April 30, 2024
6.	21 Juni 2024 June 21, 2024	1. Laporan Profil Risiko Periode 31 Mei 2024 vs 30 April 2024 2. Laporan Rasio LaR Pasca Lepas Flag Debitur Relaksasi Covid-19 3. Stress Test Risiko Kredit Periode Mei 2024 1. Risk Profile Report as of May 31, 2024 vs April 30, 2024 2. LaR Ratio Report after Removal of Covid-19 Relief Flag 3. Credit Risk Stress Test for May 2024
7.	31 Juli 2024 July 31, 2024	1. Laporan Profil Risiko Periode 30 Juni 2024 vs 31 Maret 2024 2. Laporan Review Parameter dan Threshold Profil Risiko 3. Laporan Pemantauan Risiko Kredit Periode Mei 2024 1. Risk Profile Report as of June 30, 2024 vs March 31, 2024 2. Review Report on Risk Profile Parameters and Thresholds 3. Credit Risk Monitoring Report for May 2024
8.	22 Agustus 2024 August 22, 2024	1. Laporan Profil Risiko Periode 31 Juli 2024 vs 30 Juni 2024 2. Laporan Pemantauan Debitur Write Off 1. Risk Profile Report as of July 31, 2024 vs June 30, 2024 2. Monitoring Report on Written-Off Debtors
9.	20 September 2024 September 20, 2024	1. Laporan Profil Risiko Periode 31 Agustus 2024 vs 31 Juli 2024 1. Risk Profile Report as of August 31, 2024 vs July 31, 2024

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko*Risk Oversight Committee Meeting Agenda*

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
10.	18 Oktober 2024 October 18, 2024	- Laporan Profil Risiko Periode 30 September 2024 vs 30 Juni 2024 - Laporan Portfolio Risk Appetite & Risk Tolerance Risiko Kredit Periode September 2024 - Risk Profile Report as of September 30, 2024 vs June 30, 2024 - Credit Risk Portfolio Risk Appetite & Risk Tolerance Report for September 2024
11.	18 November 2024 November 18, 2024	- Laporan Profil Risiko Periode 31 Oktober 2024 vs 30 September 2024 - Laporan Portfolio Risk Appetite & Risk Tolerance Risiko Kredit Periode Oktober 2024 - Stress Test Risiko Kredit - Risk Profile Report as of October 31, 2024 vs September 30, 2024 - Credit Risk Portfolio Risk Appetite & Risk Tolerance Report for October 2024 - Credit Risk Stress Test
12.	13 Desember 2024 December 13, 2024	- Laporan Profil Risiko Periode 30 November 2024 vs 31 Oktober 2024 - Proyeksi Laporan Profil Risiko Kredit Periode 31 Desember 2024 vs 30 September 2024 - Laporan Portfolio Risk Appetite & Risk Tolerance Risiko Kredit Periode November 2024 - Simulasi Penambahan PPANP AYDA - Risk Profile Report as of November 30, 2024 vs October 31, 2024 - Projected Credit Risk Profile Report as of December 31, 2024 vs September 30, 2024 - Credit Risk Portfolio Risk Appetite & Risk Tolerance Report for November 2024 - Simulation of Additional PPANP for AYDA

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Untuk menunjang Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank memberikan kesempatan kepada anggota Komite Pemantau Risiko untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal Bank atau yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Adapun program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite Pemantau Risiko tahun 2024 adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT OF RISKMONITORING COMMITTEE

To support the Risk Monitoring Committee in carrying out its duties and responsibilities, the Bank provides opportunities for members of the Risk Monitoring Committee to participate in training and competency development programs, either organized by the Bank's internal or external parties. The competency development programs followed by the Risk Monitoring Committee in 2024 are as follows:

Nama Peserta Participant Name	Jabatan Position	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	Penyelenggara Organizer	Tempat dan Waktu Venue and Date
Elizawatie Simon	Ketua Chairperson	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	LSPP	Jakarta, 26 April 2024 Jakarta, April 26, 2024
		Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko - Jenjang 7	Bankers Association for Risk Management (BARa)	Jakarta, 21-22 Mei 2024 Jakarta, May 21-22, 2024
		The 19th Indonesia HR EXPO	INTIPESAN Conference	Jakarta, 11-12 Desember 2024 Jakarta, December 11-12, 2024
Suryani Purwita	Anggota Member	-	-	-
Anas Latief	Anggota Member	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	LSPP	Jakarta, 26 April 2024 Jakarta, April 26, 2024

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMANTAU RISIKO

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko Bank telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Anggota Komite terdiri dari 3 (tiga) orang: 1 (satu) orang Komisaris Independen; 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang manajemen risiko; 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian Bidang Keuangan) dan telah sesuai dengan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Penyelenggaraan rapat Komite Pemantau Risiko tahun 2024 telah dilakukan secara berkala sesuai dengan POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Selama Tahun 2024 telah diselenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 12 (dua belas) kali dengan Tingkat kehadiran Ketua dan Anggota Komite 100% (Kuorum);
3. Melakukan penelaahan Profil Risiko periode bulan berjalan sesuai dengan penilaian matriks kualitatif OJK, selama tahun 2024 Peringkat Komposit Profil Risiko terjaga di PK-2 (Satisfactory);
4. Melakukan pengawasan Likuiditas Bank dengan pengujian (Stress Testing);
5. Melakukan pemantauan terhadap Kredit Kualitas Rendah dimana telah dilakukan pencabutan flag relaksasi Covid-19 berdasarkan *assessment* dan rekomendasi dari Risk Management di bulan Mei 2024 sebagai salah satu upaya untuk menurunkan rasio Kredit Kualitas Rendah dari 25,29% di bulan April menjadi 19,28% di bulan Mei 2024;
6. Merekomendasikan Sektor Ekonomi yang menjadi prioritas di tahun 2025 berdasarkan kajian Direktorat Risk Management;
7. Melakukan pemantauan terhadap portfolio kredit yang signifikan dan pemantauan terhadap *risk appetite* dan *risk tolerance* terutama risiko kredit;
8. Melakukan pemantauan terhadap potensi peningkatan NPL serta potensi penurunan modal inti yang disebabkan karena peningkatan PPANP berdasarkan hasil *Stress Testing* Risiko Kredit oleh Direktorat Risk Management; dan
9. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan Komite Manajemen Risiko (KMR) terkait Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

Throughout 2024, the Risk Monitoring Committee of the Bank has carried out its duties and responsibilities, including:

1. The Committee comprises 3 (three) members: 1 (one) Independent Commissioner; 1 (one) Independent Party with expertise in risk management; and 1 (one) Independent Party with expertise in finance. This composition is in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks;
2. Risk Monitoring Committee meetings in 2024 were held periodically in compliance with POJK No. 17 of 2023. During 2024, the Committee convened a total of 12 (twelve) meetings, with 100% attendance by the Chairperson and members, meeting the quorum requirement;
3. Reviewed the Bank's Risk Profile for the current month in accordance with OJK's qualitative matrix assessment. Throughout 2024, the Composite Risk Profile Rating was maintained at PK-2 (Satisfactory);
4. Oversaw the Bank's liquidity condition through stress testing exercises;
5. Monitored Low-Quality Loans, where the Covid-19 relaxation flag was revoked based on assessments and recommendations from the Risk Management Directorate in May 2024. This initiative contributed to a reduction in the Low-Quality Loan ratio from 25.29% in April to 19.28% in May 2024;
6. Provided recommendations on priority economic sectors for 2025 based on a review by the Risk Management Directorate;
7. Monitored significant credit portfolios as well as credit risk appetite and tolerance;
8. Monitored potential increases in Non-Performing Loans (NPL) and potential reductions in core capital due to increases in Allowance for Impairment Losses on Non-Productive Assets (PPANP), based on the results of credit risk stress testing by the Risk Management Directorate; and
9. Reviewed the implementation of the Risk Management Committee (RMC) concerning credit risk, market risk, and operational risk.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Supporting Organs of Board of Directors

Bank Artha Graha Internasional memiliki 5 (lima) Komite yang dibentuk dan ditunjuk oleh Direksi untuk membantu melaksanakan tugas Direksi. Komite ini bertugas untuk memberikan opini secara objektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis, serta memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Komite di bawah Direksi terdiri dari:

1. Komite Kredit;
2. Komite Asset and Liabilities;
3. Komite Manajemen Risiko;
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi;
5. Komite Human Capital;
6. Komite Kebijakan Perkreditan; dan
7. Komite Produk.

Bank Artha Graha Internasional has 5 (five) Committees formed and appointed by the Board of Directors to assist in carrying out the duties of the Board of Directors. These committees are tasked with providing objective opinions to the Board of Directors and helping to improve the effectiveness of the systematic implementation of the duties of the Board of Directors, as well as making contributions in accordance with their areas of duties and responsibilities.

Committees under the Board of Directors consist of:

1. Credit Committee;
2. Asset and Liabilities Committee;
3. Risk Management Committee;
4. Information Technology Steering Committee;
5. Human Capital Committee;
6. Credit Policy Committee; and
7. Product Committee.

KOMITE KREDIT

Credit Committee

Komite Kredit dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kredit yang ditetapkan Bank, serta mengevaluasi dan memberikan keputusan kredit agar sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan. Setiap keputusan kredit pada prinsipnya tidak dapat diputuskan oleh satu orang saja melainkan harus merupakan hasil keputusan bersama yaitu hasil keputusan dari Komite Kredit untuk menjamin keputusan kredit yang objektif dengan kualitas kredit yang baik.

Fungsi pokok Komite Kredit adalah:

1. Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif; dan
2. Memberikan keputusan atau rekomendasi atas permohonan kredit yang diajukan.

The Credit Committee is formed to assist the Board of Directors in making decisions related to credit policies set by the Bank, as well as evaluating and providing credit decisions in accordance with the established authority limits. Every credit decision in principle cannot be decided by one person alone but must be the result of a joint decision, namely the decision of the Credit Committee to ensure objective credit decisions with good credit quality.

The main functions of the Credit Committee are:

1. Providing direction if a more in-depth and comprehensive credit analysis is required; and
2. Providing decisions or recommendations on submitted credit applications.

DASAR HUKUM

Komite Kredit Bank Artha Graha Internasional dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE KREDIT

Komite Kredit berpedoman pada Pedoman Kebijakan Perkreditan tentang Komite Kredit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KREDIT

Komite Kredit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan-usulan mengenai kredit secara objektif, jujur, cermat, dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan, Surat Edaran Kredit, memo-memo internal, ketentuan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) yang diberikan;
2. Memberikan rekomendasi kepada Komite Kredit yang mempunyai BWMK yang lebih tinggi;
3. Menolak permintaan dan pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas; dan
4. Melakukan koordinasi dengan *Asset and Liabilities Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan perkreditan.

LEGAL BASIS

Bank Artha Graha Internasional's Credit Committee was established with reference to the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.03/2017 on the Obligation to Prepare and Implement Credit or Bank Financing Policies for Commercial Banks.

CREDIT COMMITTEE GUIDELINES

The Credit Committee is guided by the Credit Policy Guidelines on Credit Committee in carrying out its duties and responsibilities.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF CREDIT COMMITTEE

The Credit Committee has the following duties and responsibilities:

1. *Approving or rejecting credit proposals objectively, honestly, carefully, and in accordance with the provisions contained in the Credit Policy Guidelines, Credit Circulars, internal memos, Bank Indonesia regulations, Financial Services Authority Regulations, and applicable laws and regulations, in accordance with the given Limit of Authority to Decide on Credit (BWMK);*
2. *Providing recommendations to the Credit Committee which has a higher BWMK;*
3. *Rejecting requests and influence from parties with an interest in the credit applicant to grant credit approval that is only a formality; and*
4. *Coordinating with the Asset and Liabilities Committee (ALCO) on credit funding aspects*

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KREDIT

Struktur dan keanggotaan Komite Kredit Bank Artha Graha Internasional terdiri dari:

1. Komite Kredit Komersil dan Korporasi;
2. Komite Kredit SME & Konsumer (untuk limit > Rp5 milyar); dan
3. Komite Kredit Restrukturisasi.

PROFIL KOMITE KREDIT

Profil anggota Komite Kredit yang menjabat sebagai Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE KREDIT

Komite Kredit dalam menjalankan tugasnya berkomitmen untuk menjaga independensi dan anggota Komite Kredit diatur dalam kebijakan tersendiri mengenai Komite Kredit Kantor Pusat.

RAPAT KOMITE KREDIT

Komite Kredit melaksanakan rapat sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali di sepanjang tahun 2024 dengan agenda sebagai berikut:

CREDIT COMMITTEE STRUCTURE AND MEMBERSHIP

Structure and Membership of the Credit Committee of Bank Artha Graha Internasional:

1. Commercial and Corporate Credit Committee;
2. SME & Consumer Credit Committee (for limits greater than IDR5 billion); and
3. Restructuring Credit Committee.

CREDIT COMMITTEE PROFILE

The profile of Credit Committee members who serve as Directors can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

INDEPENDENCE STATEMENT OF CREDIT COMMITTEE

The Credit Committee in carrying out its duties is committed to maintaining independence although until now the independence statement is not yet available.

CREDIT COMMITTEE MEETINGS

The Credit Committee held 32 (thirty two) meetings throughout 2024 with the following agenda:

Rapat Komite Kredit Credit Committee Meetings	Jumlah Agenda Total Agenda
Perpanjangan Fasilitas Kredit Credit Facility Extension	22
Perpanjangan Fasilitas FI FI Facility Extension	5
Penambahan Fasilitas Kredit Addition of Credit Facility	23
Penambahan Fasilitas FI Addition of FI Facilities	1
Permohonan Baru atau Sounding New Application or Sounding	73
Permohonan Relaksasi/Restruktur/Perubahan Fasilitas Request for Relaxation/Restructure/Change of Facility	4
Permohonan Lainnya (kerja sama Pembiayaan, Perubahan syarat, perubahan Pricing, dll) Other Requests (financing cooperation, change of terms, change of pricing, etc.)	11
Jumlah Total	139

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE KREDIT

Pada tahun 2024 Komite Kredit telah menjalankan fungsi dalam pemberian keputusan atas usulan pengajuan fasilitas kredit dengan mengacu pada Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) yang telah ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian. Untuk seluruh pengajuan fasilitas kredit, sebelum diputuskan oleh komite kredit harus direview oleh Direktorat Credit Analyst. Keputusan kredit diberikan atas pengajuan fasilitas baik untuk kredit baru, perpanjangan fasilitas kredit, penambahan fasilitas kredit, restrukturisasi/relaksasi fasilitas kredit dan hal lainnya yang terkait dengan fasilitas kredit.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Program pengembangan kompetensi yang diikuti anggota Komite Kredit sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF CREDIT COMMITTEE ACTIVITIES

In 2024, the Credit Committee has performed its function in making decisions on credit facility proposals, in accordance with the established Credit Decision Authority Limits (BWMK), while ensuring that risk management and prudence principles are upheld. For all credit facility proposals, before being decided by the Credit Committee, they must be reviewed by the Credit Analyst Directorate. Credit decisions are made on proposals for new credit facilities, credit facility extensions, additional credit facilities, credit restructuring/relaxation, and any other matters related to credit facilities.

COMPETENCY DEVELOPMENT

Competency development programs attended by Credit Committee members throughout 2024 are as follows:

Nama Name	Pelatihan Training	Pihak Penyelenggara Organizer	Tempat dan Waktu Venue and Time
Handoyo Soedirdja	Pembekalan dan Ujian SMR Jenjang 7 Fast Track - Direksi <i>Preparation and Examination for SMR Level 7 Fast Track - Board of Directors</i>	LPPI dan LSPP	Jakarta, 29 Februari 2024 - 1 Maret 2024 dan 22 Maret 2024 <i>Jakarta, February 29, 2024 - March 1, 2024 and March 22, 2024</i>
	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Treasury Dealer Jenjang 7 <i>Preparation and Examination for Treasury Dealer Certification Level 7</i>	APUVINDO dan ACI	Jakarta, 26 Agustus 2024 dan 2 Oktober 2024 <i>Jakarta, August 26, 2024 and October 2, 2024</i>
Andy Dharma	Financial Risk Manager (FRM) - Preparation Program	Binus University Business School	Jakarta, 6 Februari - 18 April 2024 <i>Jakarta, February 6 - April 18, 2024</i>
	Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Re-certification for Risk Management Level 7</i>	Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan	Jakarta, 26 April 2024 <i>Jakarta, April 26, 2024</i>

Nama Name	Pelatihan Training	Pihak Penyelenggara Organizer	Tempat dan Waktu Venue and Time
Elvin Halim	Resertifikasi Sertifikat Manajemen Risiko <i>Re-certification for Risk Management Certification</i>	LSPP	Jakarta, 26 April 2024 <i>Jakarta, April 26, 2024</i>
	Workshop Laporan Resolusi (LPS) & Recovery (OJK) <i>Resolution Report (LPS) & Recovery Workshop (OJK)</i>	Denny Sudrajat	Jakarta, 21-22 September 2024 <i>Jakarta, September 21-22, 2024</i>
	HR Leaders & HR Tech Strategy Meeting	Rockbird Media Pte. Ltd.	Jakarta, 19 November 2024 <i>Jakarta, November 19, 2024</i>
	The 19th Indonesia HR EXPO	INTIPESAN Conference	Jakarta, 11-12 Desember 2024 <i>Jakarta, December 11-12, 2024</i>
Lily Pangestu	Refreshment SMR <i>SMR Refresher</i>	RMG	Jakarta, 15-17 Januari 2024 <i>Jakarta, January 15-17, 2024</i>
	Refreshment SMR <i>SMR Refresher</i>	RMG	Jakarta, 3-19 Februari 2024 <i>Jakarta, February 3-19, 2024</i>
	Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 <i>Re-certification for Risk Management Level 5</i>	BSMR	Jakarta, 2 Maret 2024 <i>Jakarta, March 2, 2024</i>
	Workshop Laporan Resolusi (LPS) & Recovery (OJK) <i>Resolution Report (LPS) & Recovery Workshop (OJK)</i>	Denny Sudrajat	Jakarta, 21-22 September 2024 <i>Jakarta, September 21-22, 2024</i>
Selvy Hutomo	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 <i>Risk Management Certification Level 6</i>	LSPP	Jakarta, 3 Mei 2024 <i>Jakarta, May 3, 2024</i>
Nina Novriana	Sertifikasi Sertifikat Manajemen Risiko <i>Risk Management Certification</i>	LSPP	Jakarta, 3 Mei 2024 <i>Jakarta, May 3, 2024</i>
	Training Selling Insurance Behaviour	Tokio Marine	Jakarta, 8 Juni 2024 <i>Jakarta, June 8, 2024</i>
	Workshop Laporan Resolusi (LPS) & Recovery (OJK) <i>Resolution Report (LPS) & Recovery Workshop (OJK)</i>	Denny Sudrajat	Jakarta, 21-22 September 2024 <i>Jakarta, September 21-22, 2024</i>
Ita Iriani Dwi Koesharsanti	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 <i>Risk Management Certification Level 5</i>	LPPI dan LSPP	Jakarta, 17-18 dan 19 Oktober 2024 <i>Jakarta, October 17-18 and 19, 2024</i>

KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Asset and Liabilities Committee

Komite Asset and Liabilities (ALCO) dibentuk untuk mencapai tingkat profitabilitas Bank secara optimal, serta memastikan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko pasar terkendali serta meminimalisasi *idle funds* melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*asset and liabilities management*).

The Asset and Liabilities Committee (ALCO) was established to achieve an optimal level of profitability of the Bank, as well as to ensure that liquidity risk, interest rate risk, and foreign exchange risk are controlled and to minimize idle funds through the establishment of asset and liabilities management policies and strategies.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA ALCO

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ALCO tertuang dalam Pedoman ALCO (ALMA) No. 00004.02.0 tanggal 15 Mei 2023.

ALCO GUIDELINES

The Guidelines and Work Rules of ALCO are contained in ALCO (ALMA) Guidelines No. 00004.02.0 dated May 15, 2023.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN ALCO

Berikut struktur dan keanggotaan ALCO pada tahun 2024

1. Ketua I merangkap anggota: Direktur Utama
2. Ketua II merangkap anggota: Wakil Direktur Utama
3. Ketua III merangkap anggota: Direktur yang membawahi Bidang *Treasury*
4. Anggota: Seluruh anggota Direksi
5. ALCO Supporting Team:
 - Koordinator: *Deputy Director Treasury & Fixed Income*
 - Deputy Director:
 - i. Direktorat *Wholesale Banking*
 - ii. Direktorat *Financial Institution*
 - iii. Direktorat *Regional Head*
 - iv. Direktorat *Asset Consumer & Retail*
 - v. Direktorat *Asset Corp & Comm*
 - vi. Direktorat *Fincon*
 - vii. Direktorat *Operation 1*
 - viii. Direktorat *Risk & Management*
 - ix. Direktorat *Internal Audit (SKAI)*
 - x. Direktorat *Compliance*
 - Executive Officer Cabang Induk dan Pembantu

ALCO STRUCTURE AND MEMBERSHIP

The following is the structure and membership of ALCO in 2024:

1. Chairperson I and concurrently a member: President Director
2. Chairperson II and concurrently a member: Vice President Director
3. Chairperson III and concurrently a member: Director in charge of Treasury
4. Members: All members of the Board of Directors
5. ALCO Supporting Team:
 - Coordinator: *Deputy Director Treasury & Fixed Income*
 - Deputy Director:
 - i. Directorate of Business Banking
 - ii. Directorate of Financial Institution
 - iii. Directorate of Regional Head
 - iv. Directorate of Asset Consumer & Retail
 - v. Directorate of Asset Corp & Comm
 - vi. Directorate of Fincon
 - vii. Directorate of Operation 1
 - viii. Directorate of Risk & Management
 - ix. Directorate of Internal Audit (SKAI)
 - x. Directorate of Compliance
 - Executive Officer of Main Branch

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ALCO

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab ALCO:

1. Menata portofolio di kedua sisi neraca berupa aset dan kewajiban untuk mencapai hasil *net interest margin/spread* yang optimal dengan tingkat risiko yang dapat diukur dan dikendalikan ke level yang dapat diterima oleh Pemangku Kepentingan Bank;
2. Menentukan arah kebijakan dan strategi pengembangan usaha Bank, antara lain mengenai struktur tingkat bunga pendanaan (*funding*) serta pinjaman atau penempatan (*lending*), rencana ekspansi usaha, dan lain-lain;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF ALCO

The following are the duties and responsibilities of ALCO:

1. Managing portfolios on both sides of the balance sheet in the form of assets and liabilities to achieve optimal net interest margin/spread results with a level of risk that can be measured and controlled to an acceptable level for Bank Stakeholders;
2. Determining the direction of the Bank's business development policies and strategies, including the interest rate structure of funding and lending, business expansion plans, and others;

3. Mengurangi kemungkinan terjadinya *mismatch* atas likuiditas Bank, melalui penetapan keputusan atas rencana ekspansi di sisi aset dengan penghimpunan dana di sisi kewajiban;
 4. Penetapan strategi pendanaan, termasuk penetapan suku bunga dana pihak ketiga dan suku bunga antar kantor (rekening antar kantor);
 5. Mengambil keputusan atas suku bunga pinjaman dengan mempertimbangkan tingkat biaya dana (*cost of fund*), serta hal-hal lain yang dianggap perlu untuk memperlancar operasional Bank;
 6. Menetapkan batas dan pedoman pengelolaan serta pengendalian risiko khusus yang berdampak pada risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing;
 7. Melakukan evaluasi terhadap posisi risiko suku bunga Bank dan strategi *Asset and Liability Management* (ALMA) guna memastikan bahwa hasil risk taking position Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga serta sesuai dengan *risk limit Bank*;
 8. Penetapan jenis dan alokasi aset yang diklasifikasikan sebagai aset likuiditas berkualitas tinggi;
 9. Penetapan strategi *hedging*;
 10. Melakukan kaji ulang deviasi antara hasil realisasi dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis bank (RBB);
 11. Melakukan pengembangan, kaji ulang dan modifikasi strategi manajemen likuiditas (ALMA) pada berbagai jenis valuta, wilayah, serta lini bisnis;
 12. Melakukan evaluasi dan mitigasi risiko segera terhadap kondisi likuiditas dan profil risiko Bank, jika terjadi perubahan yang berdampak signifikan;
 13. Melakukan evaluasi terhadap pengendalian risiko likuiditas yang dilaksanakan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas, gap likuiditas dan risiko likuiditas harian, pengelolaan *maturity profile* dan *net cash flow projection*, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas, pengelolaan aktiva likuiditas berkualitas tinggi, serta rencana pendanaan darurat;
 14. Melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi terkini;
 15. Melakukan penetapan dan evaluasi terhadap indikator utama yang merupakan indikator peringatan dini (*early warning indicator*) untuk risiko likuiditas;
 16. Penyampaian informasi kepada Direksi mengenai tiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang memengaruhi strategi dan kebijakan ALMA; dan
 17. Menyusun laporan ALCO untuk disampaikan kepada Direksi.
3. *Reducing the possibility of a mismatch in the Bank's liquidity, through decisions on expansion plans on the asset side and fundraising on the liability side;*
 4. *Determining funding strategies, including interest rates for third party funds and inter-office interest rates (interoffice accounts);*
 5. *Making decisions on lending interest rates by considering the level of cost of funds, as well as other matters deemed necessary to facilitate the Bank's operations;*
 6. *Establishing limits and guidelines for the management and control of specific risks affecting liquidity risk, interest rate risk, and foreign exchange risk;*
 7. *Evaluating the Bank's interest rate risk position and Asset and Liability Management (ALMA) strategy to ensure that the Bank's risk taking position is consistent with interest rate risk management objectives and in accordance with the Bank's risk limits;*
 8. *Determining the type and allocation of assets classified as high quality liquid assets;*
 9. *Determining hedging strategy;*
 10. *Reviewing deviations between realized results and budget projections and the bank's business plan (RBB);*
 11. *Developing, reviewing and modifying liquidity management (ALMA) strategies across currencies, regions and business lines;*
 12. *Conducting immediate evaluation and risk mitigation of the Bank's liquidity condition and risk profile, in the event of changes that have a significant impact;*
 13. *Evaluating liquidity risk control implemented through funding strategy, management of liquidity position, liquidity gap and daily liquidity risk, management of maturity profile and net cash flow projection, management of liquidity position and liquidity risk, management of high quality liquid assets, and emergency funding plan;*
 14. *Adjusting risk management policies and strategies for liquidity risk as necessary based on the latest evaluation results;*
 15. *Establishing and evaluating key indicators that are early warning indicators for liquidity risk;*
 16. *Submitting information to the Board of Directors on any developments in relevant laws and regulations that affect ALMA's strategies and policies; and*
 17. *Preparing ALCO report to be submitted to the Board of Directors.*

PROFIL KOMITE ALCO

Profil ketua dan anggota Komite ALCO yang menjabat sebagai Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

ALCO COMMITTEE PROFILE

The profile of the Chairperson and members of the ALCO Committee who serve as Directors is available in the Company Profile chapter in this Annual Report.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE ALCO

Komite ALCO dalam menjalankan tugasnya berkomitmen untuk menjaga independensi meskipun sampai saat ini pernyataan independensi belum tersedia.

INDEPENDENCE STATEMENT OF ALCO

The ALCO Committee in carrying out its duties is committed to maintaining independence although until now the independence statement is not yet available.

RAPAT ALCO

Sepanjang tahun 2024, ALCO melaksanakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan agenda sebagai berikut:

ALCO MEETINGS

In 2024, ALCO held 11 (eleven) meetings, with the following agenda Implementation of ALCO Activities:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1.	25 Januari 2024 January 25, 2024	
2.	23 Februari 2024 February 23, 2024	
3.	21 Maret 2024 March 21, 2024	1. Menerapkan <i>strategy</i> dan <i>pricing</i> suku bunga pendanaan, kredit dan rekening antar kantor
4.	27 Mei 2024 May 27, 2024	2. Membahas konsentrasi pendanaan dan pembiayaan
5.	24 Juni 2024 June 24, 2024	3. Membahas <i>maturity profile</i> pendanaan dan pembiayaan
6.	22 Juli 2024 July 22, 2024	4. Membahas tren likuiditas melalui pemantauan beberapa indikator rasio likuiditas
7.	21 Agustus 2024 August 21, 2024	5. Membahas <i>pipeline</i> Kredit dan Obligasi Korporasi
8.	24 September 2024 September 24, 2024	6. Membahas Geopolitik <i>tension</i> beserta dampaknya terhadap ekonomi global
9.	29 Oktober 2024 October 29, 2024	7. Membahas kebijakan Pemerintahan yang baru seiring dengan pelantikan Presiden baru
10.	26 November 2024 November 26, 2024	1. Implementation of <i>strategy</i> and <i>pricing</i> for funding interest rates, credit, and inter-office accounts
11.	23 Desember 2024 December 23, 2024	2. Discussion on funding and financing concentration
		3. Discussion on <i>maturity profile</i> of funding and financing
		4. Review of liquidity trends by monitoring various liquidity ratio indicators
		5. Discussion on the credit and corporate bond pipeline
		6. Discussion on geopolitical tensions and their impact on the global economy
		7. Discussion on new government policies in line with the inauguration of the new President

PELAKSANAAN KEGIATAN ALCO

Pelaksanaan tugas dan wewenang komite ALCO pada tahun 2024 meliputi penentuan strategi dan *pricing* suku bunga pendanaan, kredit dan rekening antar kantor, mengkaji *maturity profile* pendanaan dan pembiayaan beserta membahas tren likuiditas perbankan selama 2024. Disisi lain Komite ALCO juga membahas dan mengkaji dampak dari Konflik Geopolitik terhadap ekonomi nasional dan global beserta dampaknya terhadap kinerja perbankan.

IMPLEMENTATION OF ALCO ACTIVITIES

The implementation of the duties and authority of the ALCO committee in 2024 included determining the strategy and pricing of funding interest rates, loans and inter-office accounts, reviewing the maturity profile of funding and financing and discussing banking liquidity trends during 2024. On the other hand, the ALCO Committee also discussed and reviewed the impact of Geopolitical Conflicts on the national and global economy and its impact on banking performance.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Program pengembangan kompetensi yang diikuti anggota ALCO sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT

Competency development programs attended by ALCO members throughout 2024 are as follows:

Nama Peserta Participant Name	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer	Tempat dan Waktu Venue and Date
Handoyo Soedirdja	Pembekalan dan Ujian SMR Jenjang 7 - Direksi <i>Preparatory Course and Examination for Risk Management Certification Level 7 - Board of Directors</i>	LPPI dan LSPP	Jakarta, 29 Februari, 1 dan 22 Maret 2024 <i>Jakarta February 29, March 1 and 22, 2024</i>
Heru Helbianto	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Treasury Dealer Jenjang 7 <i>Preparatory Course and Examination for Risk Management Certification Level 7 - Board of Directors</i>	APUVINDO dan ACI	Jakarta, 26 Agustus dan 2 Oktober 2024 <i>Jakarta, August 26 and October 2, 2024</i>
	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko <i>Risk Management Certification Refreshment</i>	Risiko Manajemen Gagasan (RMG)	Jakarta, 3-19 Februari 2024 <i>Jakarta, February 3-19, 2024</i>
	Resertifikasi Manajemen Risiko <i>Risk Management Re-Certification</i>	BSMR	Jakarta, 1 Maret 2024 <i>Jakarta, March 1, 2024</i>
	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Treasury Dealer Jenjang 7 <i>Preparatory Course and Examination for Treasury Dealer Certification Level 7</i>	APUVINDO dan ACI	Jakarta, 20 Juli dan 4 Agustus 2024 <i>Jakarta, July 20 and August 4, 2024</i>
Angga Wicaksana	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko <i>Risk Management Certification Refreshment</i>	Risiko Manajemen Gagasan (RMG)	Jakarta, 15-17 Januari dan 3-19 Februari 2024 <i>Jakarta, January 15-17 and February 3-19, 2024</i>
	Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 <i>Risk Management Re-Certification Level 5</i>	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	Jakarta, 1 Maret 2024 <i>Jakarta, March 1, 2024</i>
	Pembekalan Sertifikasi Treasury Dealer Jenjang 7 <i>Preparatory Course for Treasury Dealer Certification Level 7</i>	APUVINDO	Jakarta, 24 Agustus 2024 <i>Jakarta, August 24, 2024</i>

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Committee

Komite Manajemen Risiko yang dibentuk untuk memastikan kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank. Selain itu, Komite Manajemen Risiko juga menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta menyempurnakan penerapan manajemen risiko.

The Risk Management Committee is established to ensure that the risk management framework provides adequate protection against all risks of the Bank. In addition, the Risk Management Committee also develops policies, strategies and guidelines for the implementation of risk management, as well as improving the implementation of risk management.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko Bank Artha Graha Internasional dibentuk berdasarkan:

1. Anggaran Dasar PT Bank Artha Graha Internasional Tbk;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum; dan
5. Surat Keputusan Direksi PT Bank Artha Graha Internasional Tbk No. DIR-COM & RM/01557/X/2019 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

BASIS FOR THE ESTABLISHMENT OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee of Bank Artha Graha Internasional was established based on the following:

1. Articles of Association of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk;
2. Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks;
3. Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks;
4. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 34/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks; and
5. Board of Directors Decree of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk No. DIR-COM & RM/01557/X/2019 concerning the Establishment of the Risk Management Committee of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE GUIDELINES

The Risk Management Committee refers to the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks in carrying out its duties and responsibilities.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Bank Artha Graha Internasional pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

STRUCTURE AND MEMBERSHIP OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The membership of the Risk Management Committee of Bank Artha Graha Internasional in 2024 is as follows:

Jabatan <i>Position</i>	Jumlah Personil <i>Number of Personnel</i>	Keahlian <i>Expertise</i>	Sertifikasi Profesi <i>Professional Certification</i>
Ketua <i>Chairperson</i>			
Direktur Kepatuhan/ Direktur Independen <i>Compliance Director/ Independent Director</i>	1	Ahli di bidang perbankan dan keuangan <i>Expert in banking and finance</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Certification Level 7</i>
Anggota <i>Member</i>			
Seluruh Direksi <i>All Directors</i>	4	Ahli di bidang perbankan dan keuangan <i>Expert in banking and finance</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Certification Level 7</i>
Head of Bureau	1	Ahli di bidang <i>Human Capital</i> <i>Expert in Human Capital</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai Jenjang <i>Risk Management Certification (as per level)</i>
Corporate Secretary	1	Ahli di bidang perbankan <i>Expert in banking</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Certification Level 7</i>
Chief Financial Officer	1	Ahli di bidang Akuntansi <i>Expert in Accounting</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Certification Level 7</i>
Chief Operation Officer	1	Ahli di bidang perbankan <i>Expert in banking</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 <i>Risk Management Certification Level 5</i>
Seluruh Associate Director <i>All Associate Directors</i>	2	Ahli di bidang perbankan <i>Expert in banking</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Certification Level 7</i>
Legal Bureau	1	Ahli di bidang Hukum <i>Expert in Legal</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 <i>Risk Management Certification Level 5</i>
Seluruh Deputy Director <i>All Deputy Directors</i>	20	Ahli di bidang perbankan <i>Expert in banking</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai Jenjang <i>Risk Management Certification (as per level)</i>
Head of Internal Audit	1	Ahli di bidang perbankan dan keuangan <i>Expert in banking and finance</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Certification Level 7</i>

PROFIL KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil ketua dan anggota Komite Manajemen Risiko yang menjabat sebagai Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE PROFILE

The profile of the Chairperson and members of the Risk Management Committee who serve as Directors can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Bank Artha Graha Internasional berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara independen, objektif, dan profesional, sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta regulasi yang berlaku. Dengan menghindari konflik kepentingan dan memastikan transparansi dalam evaluasi serta mitigasi risiko, Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi yang bebas dari intervensi pihak manapun guna menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan operasional bank. Melalui peran ini, Komite Manajemen Risiko mendukung pertumbuhan bank yang sehat dan berkelanjutan serta menjaga kepercayaan *stakeholder*, termasuk nasabah, regulator, dan pemegang saham.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Penerapan Manajemen Risiko;
2. Menyusun kebijakan, terkait manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka manajemen risiko, serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
3. Menyempurnakan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang memengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi; dan
4. Menetapkan kebijakan dan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibanding dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

INDEPENDENCE STATEMENT OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Bank Artha Graha Internasional is committed to carrying out its duties independently, objectively, and professionally, in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG) and prevailing regulations. By avoiding conflicts of interest and ensuring transparency in risk evaluation and mitigation, the Risk Management Committee is responsible for providing recommendations that are free from any external interference, in order to safeguard the Bank's financial stability and operational sustainability. Through this role, the Risk Management Committee supports the Bank's sound and sustainable growth while maintaining the trust of stakeholders, including customers, regulators, and shareholders.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The duties and responsibilities of the Risk Management Committee include:

- 1. Provide recommendations to the President Director regarding matters relating to the Implementation of Risk Management;*
- 2. Developing policies, related to risk management and its changes, including risk management strategies, risk appetite and risk tolerance, risk management framework, and contingency plans to anticipate the occurrence of abnormal conditions;*
- 3. Improving the risk management process periodically or incidentally as a result of changes in the Bank's external and internal conditions that affect the adequacy of capital, the Bank's risk profile, and the ineffective implementation of risk management based on the evaluation results; and*
- 4. Establishing policies and business decisions that deviate from normal procedures, such as significant business expansion compared to the bank's previously established business plan or taking positions/risk exposures that exceed predetermined limits.*

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETINGS

Sepanjang tahun 2024, Komite Manajemen Risiko melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dengan agenda sebagai berikut:

Throughout 2024, the Risk Management Committee held 4 (four) meetings with the following agenda:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1.	29 April 2024 April 29, 2024	- Laporan profil risiko triwulan I tahun 2024 - Stress Test risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas - Laporan pengukuran kecukupan rasio <i>Liquidty Coverage Ratio</i> (LCR) & <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR) - Update progress <i>development</i> aplikasi <i>Operational Risk Management</i> (ORM) - Update progress pembentukan <i>Business Continuity Management</i> (BCM) terkait <i>Alternate Site & Perlengkapan</i> - Report on the risk profile for Q1 2024 - Stress test for credit risk, market risk, and liquidity risk - Report on the measurement of the <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR) & <i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR) adequacy - Update on the progress of the <i>Operational Risk Management</i> (ORM) application development - Update on the progress of establishing the <i>Business Continuity Management</i> (BCM) related to <i>Alternate Site & Equipment</i>
2.	15 Juli 2024 July 15, 2024	- Laporan Profil risiko triwulan II tahun 2024 - Hasil review parameter dan <i>threshold</i> pengukuran parameter profil risiko - Pemantauan risiko kredit s/d periode Mei 2024 - Update progres <i>development</i> aplikasi <i>Operational Risk Management</i> (ORM) - Report on the risk profile for Q2 2024 - Review results of parameters and thresholds for risk profile measurement - Monitoring of credit risk until May 2024 - Update on the progress of the <i>Operational Risk Management</i> (ORM) application development
3.	26 Agustus 2024 August 26, 2024	- Laporan profil risiko periode Juli 2024 dibanding Juni 2024 - Tindak lanjut eksposur risiko kredit - Report on the risk profile for the period July 2024 compared to June 2024 - Follow-up on credit risk exposure
4.	29 Oktober 2024 October 29, 2024	- Analisa sektor ekonomi prioritas tahun 2025 - Rekomendasi sektor ekonomi prioritas yang mendapatkan insentif KLM - Analysis of priority economic sectors for 2025 - Recommendations for priority economic sectors receiving KLM incentives

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE ACTIVITIES

Program Kerja Work Program	Realisasi 2024 Realization 2024
Tingkat Profil Risiko di PK-2 <i>Risk Profile Level in PK-2</i>	Selama tahun 2024 Tingkat Profil Risiko terjaga di PK-2 <i>Throughout 2024, the Risk Profile level is maintained at PK-2.</i>
Pemantauan kredit bermasalah <i>Monitoring Non-Performing Loans (NPL)</i>	Penurunan rasio LaR dari 26,15% menjadi 19,28% <i>Reduction of the Loan at Risk (LaR) ratio from 26.15% to 19.28%.</i>
Penurunan eksposur risiko operasional <i>Reduction of Operational Risk Exposure</i>	Development aplikasi Operational Risk Management (ORM) <i>Development of the Operational Risk Management (ORM) application.</i>
Pembuatan laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2025 <i>Creation of Sustainable Financial Action Plan (RAKB) Report for 2025</i>	Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2025 tepat waktu di bulan November tahun 2024 <i>The Sustainable Financial Action Plan (RAKB) Report for 2025 will be submitted on time in November 2024.</i>
Rekomendasi sektor ekonomi prioritas untuk tahun 2025 <i>Recommendation for Priority Economic Sectors for 2025</i>	Tinjauan dan rekomendasi sektor ekonomi prioritas untuk tahun 2025 <i>Review and recommendation of priority economic sectors for 2025.</i>

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Program pengembangan kompetensi yang diikuti anggota Komite Manajemen Risiko sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT

Competency development programs attended by members of the Risk Management Committee throughout 2024 are as follows:

Nama Peserta Name of Participant	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer	Tempat dan Waktu Venue and Date
Indrastomo Nugroho	Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang 7 <i>Risk Management Certification Alignment Level 7</i>	Banker Association for Risk Management (BARa)	Jakarta, 7-8 Maret 2024 <i>Jakarta, March 7-8, 2024</i>
	Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Certification Re-certification Level 7</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	Jakarta, 6 April 2024 <i>Jakarta, April 6, 2024</i>
	The 19th Indonesia HR EXPO	INTIPESAN Conference	Jakarta, 11-12 Desember 2024 <i>Jakarta, December 11-12, 2024</i>
Ponttie Prasnanugraha Perkasa	Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Certification Re-certification Level 7</i>	Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan	Jakarta, 26 April 2024 <i>Jakarta, April 26, 2024</i>
	Implementasi PSAK 71 <i>PSAK 71 Implementation</i>	Intelsysdata	Jakarta, 12-13 Juli 2024 <i>Jakarta, July 12-13, 2024</i>
	Workshop Laporan Resolusi (LPS) & Recovery (OJK) <i>Workshop on Resolution Reports (LPS) & Recovery (OJK)</i>	Denny Sudrajat	Jakarta, 21-22 September 2024 <i>Jakarta, September 21-22, 2024</i>

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology Steering Committee

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank umum dan No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi terdiri dari:

- Ketua : Direktur Compliance & Risk
Anggota : 1. Direksi
2. Seluruh Direktorat yang berada dibawah:
a. Direktur Business;
b. Direktur Compliance & Risk;
c. Direktur Asset & Recovery;
d. Head of Bureau;
e. Corporate Secretary;
f. Chief Financial Officer; dan
g. Chief Operating Officer.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rencana strategis teknologi informasi sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
2. Merumuskan kebijakan dan prosedur teknologi informasi yang utama seperti kebijakan pengamanan teknologi informasi dan manajemen risiko penggunaan teknologi informasi;
3. Memeriksa kesesuaian proyek teknologi informasi yang disetujui dengan rencana strategis teknologi informasi;

BASIS OF ESTABLISHMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

The Information Technology Steering Committee was established based on the Circular Letter of the Financial Services Authority No. 21/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks, Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2020 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 38/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks and No. 11/POJK.03/2022 concerning the Implementation of Information Technology by Commercial Banks.

STRUCTURE AND MEMBERSHIP OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

The Information Technology Steering Committee consists of:

- Chairperson : Director of Compliance & Risk
Members : 1. Board of Directors
2. All Directorates under the following:
a. Director of Business;
b. Director of Compliance & Risk;
c. Director of Asset & Recovery;
d. Head of Bureau;
e. Corporate Secretary;
f. Chief Financial Officer; and
g. Chief Operating Officer.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

The authority and responsibility of the Information Technology Steering Committee is to provide recommendations to the Board of Commissioners and Directors, including as follows:

1. Preparing information technology strategic plan in accordance with the strategic plan of the Bank's business activities;
2. Formulating key information technology policies and procedures such as information technology security policies and information technology risk management;
3. Examining the conformity of approved information technology projects with the information technology strategic plan;

4. Memeriksa kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek teknologi informasi dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *Service Level Agreement*;
5. Memeriksa kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank;
6. Mengawasi investasi yang optimal atas penyelenggaraan dan penggunaan teknologi informasi sesuai dengan kegiatan usaha Bank;
7. Memantau kinerja teknologi informasi, risiko penyelenggaraan dan penggunaan teknologi informasi, serta upaya peningkatannya termasuk mengevaluasi atas efektivitas biaya teknologi informasi terhadap penyelenggaraan kegiatan;
8. Mengupayakan penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu; dan
9. Menetapkan skala prioritas proyek teknologi informasi yang bersifat kritis.

4. *Examining the suitability of the implementation of information technology projects with the project charter agreed in the Service Level Agreement;*
5. *Examining the suitability of information technology with the needs of management information systems that support the management of the Bank's business activities;*
6. *Overseeing optimal investment in the implementation and use of information technology in accordance with the Bank's business activities;*
7. *Monitoring the performance of information technology, the risks associated with its operation and usage, as well as the efforts to improve it, including evaluating the cost-effectiveness of information technology in supporting business operations;*
8. *Striving to resolve various information technology-related issues that cannot be effectively, efficiently, and promptly addressed by the user and provider work units; and*
9. *Determining the priority scale of critical information technology projects.*

PROFIL KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Profil ketua dan anggota Komite Teknologi Informasi yang menjabat sebagai Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE PROFILE

The profile of the Chairperson and members of the Information Technology Committee who serve as Directors is available in the Company Profile chapter in this Annual Report.

PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Teknologi Informasi dalam menjalankan tugasnya berkomitmen untuk menjaga independensi meskipun sampai saat ini pernyataan independensi belum tersedia.

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE

The Information Technology Committee in carrying out its duties is committed to maintaining independence although until now the independence statement is not yet available.

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Pengangkatan dan perubahan Komite Pengarah Teknologi Informasi disesuaikan dengan struktur organisasi Bank Artha Graha Internasional yang berlaku dan disahkan oleh Direksi.

APPOINTMENT AND DISMISSAL MECHANISM OF INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE APPOINTMENTS AND CHANGES TO THE INFORMATION TECHNOLOGY

Steering Committee are adjusted to the prevailing organizational structure of Bank Artha Graha Internasional and authorized by the Board of Directors.

RAPAT KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2024, Komite Pengarah Teknologi Informasi melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dengan agenda sebagai berikut:

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE MEETINGS

Throughout 2023, the Information Technology Steering Committee held 4 (four) meetings with the following agenda:

No	Tanggal Date	Pokok Pembahasan Key Discussion Points
1.	08 Januari 2024 January 8, 2024	Update Implementasi Upgrade T24 Update on T24 Upgrade Implementation
2.	28 Februari 2024 February 28, 2024	Update Upgrade T24 dan Usulan Produk di T24 Update on T24 Upgrade and Product Proposals in T24
3.	01 April 2024 April 1, 2024	Update Operation dan Progress Upgrade T24 Update on Operations and Progress of T24 Upgrade
4.	01 Agustus 2024 August 1, 2024	1. Upgrade T24 2. LRPTI 3. Finalisasi IT Cost 4. Manpower kedepan 5. Posisi IT Today 6. Roadmap kedepan 7. Critical items done in 2024 - 2025 (semester 1) 8. Penguatan dalam penerapan SLA 99,95% untuk payment, QRIS, apps 9. Penguatan Cyber Security 10. Pemanfaatan cloud & on premises 11. lain-lain 1. T24 Upgrade 2. LRPTI 3. Finalization of IT Costs 4. Future Manpower Plans 5. Current IT Position 6. Roadmap for the Future 7. Critical Items Completed in 2024 - 2025 (Semester 1) 8. Strengthening the implementation of SLA 99.95% for payments, QRIS, apps 9. Strengthening Cybersecurity 10. Utilization of Cloud & On-premises 11. Miscellaneous

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, anggota komite melakukan pemantauan kinerja TI dan upaya peningkatannya melalui pengawasan dan evaluasi realisasi program kerja yang telah disepakati sesuai rencana strategis kegiatan usaha Bank, serta melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran TI. Sehingga Teknologi Informasi dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan usaha Bank, dengan detail sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE ACTIVITIES

In carrying out their management duties, committee members monitor IT performance and improve it through monitoring and evaluating the realization of agreed work programs in accordance with the Bank's strategic plan for business activities, as well as monitoring the use of the IT budget. So that Information Technology can be applied in accordance with the Bank's business needs, with the following details:

Program Kerja Work program	Realisasi 2024 Realization 2024
Pengembangan Fitur API Management, Mobile Apps dan Internet Banking API Management, Mobile Apps and Internet Banking Feature Development	- Pengembangan API Standard & Catalog: - API Dukcapil/Vendor untuk EKYC - API BI-FAST - API Enhancement pencairan, pembayaran dan pelunasan P2P Lending Mitra - Penambahan fitur baru di agi apps untuk fitur <i>life</i> (tabungan emas), <i>biller</i>, <i>loyalty point</i>, <i>eKYC opening account</i> - Pengembangan layanan QRIS Tuntas untuk Tarik setor dan transfer QRIS - Penambahan fitur <i>cross currency</i> dan transaksi SWIFT. <i>Digital Lending</i> - Pengembangan produk pinjaman untuk kepentingan konsumtif maupun modal kerja kepada pelaku UMKM melalui aplikasi <i>mobile</i> maupun <i>platform online</i>.
Pengembangan Fitur guna mendukung operasional dan pelaporan Bank Feature Development to Support Bank Operations and Reporting	- API Standard & Catalog Development: - Dukcapil/Vendor API for EKYC - BI-FAST API - Enhancement APIs for disbursement, payment, and settlement of P2P Lending Partner transactions - Addition of new features in AGI apps for <i>life</i> features (gold savings, <i>biller</i>, <i>loyalty points</i>, <i>eKYC account opening</i>) - Development of QRIS Tuntas services for deposit withdrawals and QRIS transfers - Addition of cross-currency features and SWIFT transactions <i>Digital Lending</i> - Development of loan products for both consumer and working capital purposes for SMEs through mobile apps and online platforms
Pengembangan Fitur guna mendukung operasional dan pelaporan Bank Feature Development to Support Bank Operations and Reporting	- Pengembangan <i>dashboard</i> dan <i>report</i> MIS sesuai dengan kebutuhan bisnis untuk meminimalisir proses manual dalam proses pelaporan Antasena, SLIK, LPS/SCV, APOLO, OBOX, OBLIGOR, PSAK - Pengembangan fitur pengajuan pinjaman yang terintegrasi dengan beragam sumber data untuk memperkaya sistem skoring dalam otomasi Analisa kredit dan perilaku nasabah, serta terintegrasi dengan proses verifikasi nasabah secara elektronik (eKYC) - Mengambil informasi teks dari tiket transaksi, untuk pemeriksaan fisik tiket - Penguatan fungsi kepatuhan agar memastikan seluruh kegiatan operasional telah <i>comply</i> sesuai dengan ketentuan regulator dan internal bank yang berlaku
Penguatan infrastruktur dan peningkatan sistem keamanan di internal Infrastructure Strengthening and Security System Enhancements	- Implementasi penggunaan <i>Active Directory</i> untuk mengelola <i>policy user</i> - Pengkinian/pelaksanaan <i>upgrade operating system</i> di <i>end user workstation</i> untuk tetap mendapatkan <i>patch</i> dan keamanan Windows terkini (<i>Upgrade OS</i> di komputer klien menjadi Windows 10/11). - Aplikasi administrasi permintaan pemeliharaan dan perubahan kewenangan User ID Aplikasi - Pemantauan terhadap <i>log-log server</i>, perangkat jaringan dan perangkat keamanan melalui SIEM (Security Information & Event Management) dan SOC (Security Operation Center) yang beroperasi 24/7.
	- Implementation of <i>Active Directory</i> for user policy management - Updating/implementation of operating system upgrades on end-user workstations to ensure they receive the latest security patches and updates (<i>Upgrade client computers to Windows 10/11</i>) - Administration application for maintenance requests and changes to user ID application permissions - Monitoring server logs, network devices, and security devices through SIEM (Security Information & Event Management) and SOC (Security Operation Center), operating 24/7

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Program pengembangan kompetensi yang diikuti anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT

Competency development programs attended by members of the Information Technology Steering Committee throughout 2024 are as follows:

Nama Peserta <i>Participant Name</i>	Pelatihan <i>Training</i>	Pihak Penyelenggara <i>Organizer</i>	Tempat dan Waktu <i>Venue and Time</i>
Andy Kasih	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Certification Level 7</i>	LSPP	Jakarta, 26 April 2024 <i>Jakarta, April 26, 2024</i>
	Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Alignment Seminar Level 7</i>	Bankers Association for Risk Management (BARa) <i>Risk Management (BARa)</i>	Jakarta, 3-4 Juli 2024 <i>Jakarta, July 3-4, 2024</i>
Lince Maria Tobing	Workshop Penilai Jaminan <i>Collateral Valuation Workshop</i>	Internal Bank dan KJPP Herman Meirizki & Rekan	Jakarta, 9-11 Mei 2024 <i>Jakarta, May 9-11, 2024</i>
	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 <i>Risk Management Certification Preparation and Examination Level 4</i>	LPPI dan LSPP	Jakarta, 28-29 Mei 2024, 12 Juni 2024 <i>Jakarta, May 28-29, 2024, June 12, 2024</i>
	Implementasi PSAK 71 <i>PSAK 71 Implementation</i>	Intelsysdata	Jakarta, 12-13 Juli 2024 <i>Jakarta, July 12-13, 2024</i>
	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 <i>Risk Management Certification Preparation and Examination Level 5</i>	LPPI dan LSPP	Jakarta, 17-18 & 19 Oktober 2024 <i>Jakarta, October 17-18 & 19, 2024</i>
Ghifari Daulagiri	Refreshment SMR <i>SMR Refreshment</i>	RMG	22-27 April 2024 <i>April 22-27, 2024</i>
	Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 <i>Risk Management Certification Renewal Level 5</i>	LSPP	7 Mei 2024 <i>May 7, 2024</i>
	Workshop Laporan Resolusi (LPS) & Recovery (OJK) <i>Resolution Report (LPS) & Recovery (OJK) Workshop</i>	Denny Sudrajat	21-22 September 2024 <i>September 21-22, 2024</i>
	Workshop: Lessons from the World's Best Digital Bank 2024 - NuBank	Intellectual Business Community	24 Oktober 2024 <i>October 24, 2024</i>
Imranul Hadi	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 <i>Risk Management Certification Level 6</i>	LSPP	7 Mei 2024 <i>May 7, 2024</i>
	Workshop Laporan Resolusi (LPS) & Recovery (OJK) <i>Resolution Report (LPS) & Recovery (OJK) Workshop</i>	Denny Sudrajat	21-22 September 2024 <i>September 21-22, 2024</i>

KOMITE HUMAN CAPITAL

Human Capital Committee

Dalam upaya meningkatkan efektifitas proses pengambilan keputusan terkait *Human Capital*, diperlukan kajian materi yang komprehensif melalui pembahasan dalam rapat komite *Human Capital*. Dengan demikian, Manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat demi tercapainya pengelolaan *Human Capital* yang berkualitas, konsisten, berkesinambungan sesuai dengan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan. *Human Capital* menjadi perhatian dan prioritas utama Bank mengingat *Human Capital* adalah aset yang penting bagi bank.

In an effort to improve the effectiveness of the decisionmaking process related to Human Capital, a comprehensive review of the material is required through discussion in the Human Capital committee meeting. Thus, Management can make the right decisions in order to achieve quality, consistent, sustainable Human Capital management in accordance with the vision, mission and values of the company. Human Capital is the Bank's main concern and priority considering that Human Capital is an important asset for the Bank.

FUNGSI KOMITE HUMAN CAPITAL

Mengacu pada penjelasan di atas, maka Direksi membentuk Komite *Human Capital* yang berfungsi untuk membantu Direksi dalam memberi saran, pertimbangan dan rekomendasi sebagai komitmen manajemen dalam pengelolaan *Human Capital* yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan *Human Capital*. Fungsi Komite *Human Capital* juga diperlukan dalam upaya mengakselerasi implementasi kebijakan-kebijakan *Human Capital* agar berdampak positif bagi karyawan dan Bank.

HUMAN CAPITAL COMMITTEE FUNCTIONS

Referring to the above explanation, the Board of Directors established the Human Capital Committee which functions to assist the Board of Directors in providing advice, considerations and recommendations as a management commitment in Human Capital management which can be a reference in making decisions related to Human Capital management. The function of the Human Capital Committee is also needed in an effort to accelerate the implementation of Human Capital policies in order to have a positive impact on employees and the Bank.

DASAR HUKUM KOMITE HUMAN CAPITAL

Usulan Pembentukan Komite *Human Capital* telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Artha Graha Internasional Tbk pada tanggal 25 Juli 2022. Usulan ini direalisasikan pada bulan September 2022. Tahun 2024 diperbaharui dengan SK Direksi No. 007/ KEP-DIR/ IV/2024 tentang Komite *Human Capital* PT Bank Artha Graha Internasional Tbk tanggal 1 April 2024, untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

LEGAL BASIS FOR THE HUMAN CAPITAL COMMITTEE

The proposal for the establishment of the Human Capital Committee was presented at the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk on July 25, 2022. This proposal was realized in September 2022. In 2024, it was updated with the Board of Directors Decree No. 007/KEP-DIR/IV/2024 regarding the Human Capital Committee of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk dated April 1, 2024, for a term of 3 (three) years from the date of enactment.

KOMPOSISI ANGGOTA KOMITE HUMAN CAPITAL

1. Ketua	: President Director
2. Anggota	: Vice President Director Jajaran Direksi Vice Head of Bureau Human Capital Deputy Director <i>Human Capital</i> Associate Director Retail Banking

COMPOSITION OF HUMAN CAPITAL COMMITTEE MEMBERS

1. Chairperson	: President Director
2. Member	: Vice President Director Board of Directors Vice Head of Bureau Human Capital Deputy Director <i>Human Capital</i> Associate Director Retail Banking

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB HUMAN CAPITAL

1. Memberi arahan strategik dan memutuskan kebijakan umum dalam hal pengelolaan *Human Capital* termasuk perubahannya (jika diperlukan) yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Strategi dan Kebijakan Umum tentang *Human Capital*;
 - b. Kompensasi dan keuntungan (*benefit*) karyawan - termasuk gaji, bonus, program retensi, dll;
 - c. Manajemen penilaian kinerja - termasuk promosi/demosi jabatan;
 - d. Manajemen Talenta/Kader - termasuk identifikasi kader, program pengembangan kader;
 - e. Perencanaan Suksesi (*Succession Planning*);
 - f. Struktur Organisasi;
 - g. Jenjang Kepangkatan;
 - h. Pelatihan dan Pengembangan karyawan;
 - i. Budaya dan nilai-nilai perusahaan serta keterikatan karyawan;
 - j. Pengembangan hubungan karyawan dan industri termasuk upaya antisipatif dan tindak lanjut penyelesaian kasus pelanggaran dan kejahatan Bank, *fraud*, masalah integritas, dll dalam upaya peningkatan kepatuhan karyawan dan pencegahan permasalahan karyawan;
 - k. Perencanaan tenaga kerja dan mitigasi perubahan;
 - l. Kesehatan dan keselamatan organisasi;
 - m. Penyelarasan kebijakan dan sinergi *Human Capital* Bank dengan anak perusahaan/group; dan
 - n. Dan lain-lain sesuai kebutuhan bank.
2. Melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab lain yang mungkin diberikan Direksi kepada Komite *Human Capital* sesuai kebutuhan dari waktu ke waktu.
3. Bertanggung jawab kepada Direksi dan secara rutin melaporkan kegiatan serta hasil rapat kepada Direksi.

PEDOMAN KEBIJAKAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN RAPAT KOMITE

1. Penyelenggaraan rapat Komite *Human Capital* diadakan minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan;
2. Undangan rapat harus disampaikan kepada seluruh anggota Komite selambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat;
3. Agenda dan materi rapat Komite *Human Capital* dibagikan kepada seluruh peserta rapat selambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat;
4. Rapat dapat terlaksana dan dinyatakan kuorum apabila dihadiri lebih dari 50% anggota Komite;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF HUMAN CAPITAL COMMITTEE

1. *Providing strategic direction and decide on general policies in terms of Human Capital management including changes (if necessary) covering the following areas:*
 - a. *General Strategy and Policy on Human Capital;*
 - b. *Employee compensation and benefits - including salaries, bonuses, retention programs, etc;*
 - c. *Performance appraisal management - including promotion/demotion;*
 - d. *Talent/Cadre Management - including cadre identification, cadre development programs;*
 - e. *Succession Planning;*
 - f. *Organizational Structure;*
 - g. *Rank;*
 - h. *Employee training and development;*
 - i. *Company culture and values and employee engagement;*
 - j. *Development of employee and industry relations including anticipatory and follow-up efforts to resolve cases of Bank violations and crimes, fraud, integrity issues, etc. in an effort to improve employee compliance and prevent employee problems;*
 - k. *Workforce planning and change mitigation;*
 - l. *Organizational health and safety;*
 - m. *Policy alignment and synergy of the Bank's Human Capital with subsidiaries/groups; and*
 - n. *And other matters according to the needs of the bank.*
2. *Carrying out other duties and responsibilities that may be assigned by the Board of Directors to the Human Capital Committee as needed from time to time.*
3. *Responsible to the Board of Directors and regularly reports activities and meeting results to the Board of Directors.*

POLICY GUIDELINES AND MECHANISM OF COMMITTEE MEETINGS

1. *The Human Capital Committee meetings are held at least 1 (one) time in 1 (one) month or as needed;*
2. *Meeting invitations must be delivered to all Committee members at least 3 (three) days prior to the meeting;*
3. *The Human Capital Committee meeting agenda and materials are distributed to all meeting participants at the latest 2 (two) days prior to the meeting;*
4. *Meetings can be held and declared a quorum if attended by more than 50% of the Committee members;*

5. Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan dengan cara mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara penentuan suara terbanyak (voting);
6. Seluruh proses pengambilan keputusan (termasuk jika ada perbedaan pendapat) agar dibuat secara tertulis dalam risalah rapat termasuk alasan perbedaan pendapat dan didokumentasikan dengan baik dan lengkap;
7. Risalah rapat akan dibagikan kepada seluruh anggota Komite, anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan (jika diperlukan);
8. Setiap anggota Komite yang secara pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu situasi, transaksi, kontrak atau hal lain yang diusulkan dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihak, harus menyatakan/mendeklarasi hal ini dan tidak berhak ikut dalam pengambilan suara, kecuali rapat Komite menentukan lain. Hal ini untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan; dan
9. Ketentuan dalam Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan Rapat Komite ini dapat dikaji ulang sesuai kebutuhan.

5. Decisions are made based on deliberation for consensus. If a decision by way of consensus is not reached, then the decision will be taken by way of determination of a majority vote (voting);
6. The entire decision-making process (including if there are differences of opinion) should be made in writing in the minutes of the meeting including the reasons for dissent and documented properly and completely;
7. Minutes of the meeting will be distributed to all Committee members, members of the Board of Directors and the Corporate Secretary (if required);
8. Any Committee member who personally, directly or indirectly, has an interest in a situation, transaction, contract or other proposed matter to which the Company is a party, must declare this and is not entitled to participate in voting, unless the Committee meeting determines otherwise. This is to avoid any conflict of interest; and
9. The provisions in this Policy and Mechanism of Committee Meetings may be reviewed as needed.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Program pengembangan kompetensi yang diikuti anggota Komite *Human Capital* sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT

Competency development programs attended by members of the Human Capital Committee throughout 2024 are as follows:

Nama Peserta Participant Name	Pelatihan Training	Pihak Penyelenggara Organizer	Tempat dan Waktu Venue and Date
Andy Kasih	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Certification in Risk Management Level 7</i>	LSPP	Jakarta, 26 April 2024 <i>Jakarta, April 26, 2024</i>
	Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko - Jenjang 7 <i>Risk Management Alignment Seminar - Level 7</i>	Bankers Association for Risk Management (BARa)	Jakarta, 3-4 Juli 2024 <i>Jakarta, July 3-4, 2024</i>
Christina Harapan	Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko - Jenjang 7 <i>Risk Management Alignment Seminar - Level 7</i>	Bankers Association for Risk Management (BARa)	Jakarta, 7-8 Maret 2024 <i>Jakarta, March 7-8, 2024</i>
	Seminar Economic Outlook 2024: Menopang Keberlanjutan Perekonomian melalui Transisi EBT & UMKM Naik Kelas <i>Economic Outlook 2024: Supporting Economic Sustainability through EBT Transition & UMKM Upgrading</i>	Perbanas	Jakarta, 22 Maret 2024 <i>Jakarta, March 22, 2024</i>
	<i>The Role of Women Leadership in Digital Era</i>	LPPI	Jakarta, 23 April 2024 <i>Jakarta, April 23, 2024</i>
	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Recertification in Risk Management Level 7</i>	LSPP	Jakarta, 26 April 2024 <i>Jakarta, April 26, 2024</i>
	<i>The 19th Indonesia HR EXPO</i>	INTIPESAN Conference	Jakarta, 11-12 Desember 2024 <i>Jakarta, December 11-12, 2024</i>

Nama Peserta Participant Name	Pelatihan Training	Pihak Penyelenggara Organizer	Tempat dan Waktu Venue and Date
Indra S. Budianto	Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Recertification in Risk Management Level 7</i>	LSPP	Jakarta, 26 April 2024 <i>Jakarta, April 26, 2024</i>
	Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko - Jenjang 7 <i>Risk Management Alignment Seminar - Level 7</i>	Bankers Association for Risk Management (BARa)	Jakarta, 3-4 Juli 2024 <i>Jakarta, July 3-4, 2024</i>
	<i>The 19th Indonesia HR EXPO</i>	INTIPESAN Conference	Jakarta, 11-12 Desember 2024 <i>Jakarta, December 11-12, 2024</i>
Handoyo Soedirdja	Pembekalan dan Ujian SMR Jenjang 7 - Direksi <i>Briefing and Examination for SMR Level 7 - Board of Directors</i>	LPPI, LSPP	Jakarta, 29 Februari, 1 dan 22 Maret 2024 <i>Jakarta, February 29, March 1 & March 22, 2024</i>
	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Treasury Dealer Jenjang 7 <i>Briefing and Examination for Treasury Dealer Certification Level 7</i>	APUVINDO, ACI	Jakarta, 26 Agustus dan 2 Oktober 2024 <i>Jakarta, August 26 & October 2, 2024</i>
Emelia Susanto	<i>Refreshment SMR</i>	Risiko Manajemen Gagasan (RMG)	Jakarta, 3-19 Februari 2024 <i>Jakarta, February 3-19, 2024</i>
	<i>Program Outlook - Empowering Human Capital for a Brighter Future</i>	Synergy Partner Prima	Jakarta, 17 Oktober 2024 <i>Jakarta, October 17, 2024</i>
	<i>HR Leaders & HR Tech Strategy Meeting</i>	Rockbird Media Pte, Ltd.	Jakarta, 19 November 2024 <i>Jakarta, November 19, 2024</i>
	<i>The 19th Indonesia HR EXPO</i>	INTIPESAN Conference	Jakarta, 11-12 Desember 2024 <i>Jakarta, December 11-12, 2024</i>
	<i>Certified Human Resources Auditor (CHRA)</i>	Media SDM Indonesia	Jakarta, 16-18 Desember 2024 <i>Jakarta, December 16-18, 2024</i>
Vivi Henny	<i>HR Leaders & HR Tech Strategy Meeting</i>	Rockbird Media Pte, Ltd.	Jakarta, 19 November 2024 <i>Jakarta, November 19, 2024</i>
	Pembekalan Certified Human Capital Leader (CHCL) Program	ProPeople	Jakarta, 7 Des 2024 - 22 Feb 2025 <i>Jakarta, December 7, 2024 - February 22, 2025</i>
	<i>The 19th Indonesia HR EXPO</i>	INTIPESAN Conference	Jakarta, 11-12 Desember 2024 <i>Jakarta, December 11-12, 2024</i>

Nama Peserta Participant Name	Pelatihan Training	Pihak Penyelenggara Organizer	Tempat dan Waktu Venue and Date
Marlene Gunawan	<i>The Role of Women Leadership in Digital Era</i>	LPPI	Jakarta, 23 April 2024 <i>Jakarta, April 23, 2024</i>
	Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 <i>Recertification in Risk Management Level 6</i>	LSPP	Jakarta, 7 Mei 2024 <i>Jakarta, May 7, 2024</i>
	Workshop Laporan Resolusi (LPS) & Recovery (OJK)	Denny Sudrajat	Jakarta, 21-22 September 2024 <i>Jakarta, September 21-22, 2024</i>
	Program Outlook - Empowering Human Capital for a Brighter Future	Synergy Partner Prima	Jakarta, 17 Oktober 2024 <i>Jakarta, October 17, 2024</i>
	Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Pelaporan Online Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran (SK SP) <i>Focus Group Discussion (FGD) on the Implementation of Online Reporting for Competency Standardization in Payment Systems (SK SP)</i>	Bank Indonesia	Jakarta, 18 & 21 Oktober 2024 <i>Jakarta, October 18 & 21, 2024</i>
	HR Leaders & HR Tech Strategy Meeting	Rockbird Media Pte, Ltd.	Jakarta, 19 November 2024 <i>Jakarta, November 19, 2024</i>
	The 19th Indonesia HR EXPO	INTIPESAN Conference	Jakarta, 11-12 Desember 2024 <i>Jakarta, December 11-12, 2024</i>
Elvin Halim	Resertifikasi Sertifikat Manajemen Risiko <i>Recertification for Risk Management Certification</i>	LSPP	Jakarta, 26 April 2024 <i>Jakarta, April 26, 2024</i>
	Workshop Laporan Resolusi (LPS) & Recovery (OJK) <i>Workshop on Resolution Report (LPS) & Recovery (OJK)</i>	Denny Sudrajat	Jakarta, 21-22 September 2024 <i>Jakarta, September 21-22, 2024</i>
	HR Leaders & HR Tech Strategy Meeting	Rockbird Media Pte, Ltd.	Jakarta, 19 November 2024 <i>Jakarta, November 19, 2024</i>
	The 19th Indonesia HR EXPO	INTIPESAN Conference	Jakarta, 11-12 Desember 2024 <i>Jakarta, December 11-12, 2024</i>

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Credit Policy Committee

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dibentuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, menunjang bisnis bank dan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat dalam melaksanakan kegiatan usaha perkreditan atau pembiayaan sejak dalam proses pemberian Kredit atau Pembiayaan, pengawasan setelah Kredit atau Pembiayaan diberikan, maupun prosedur penyelesaian dalam hal terdapat Kredit atau Pembiayaan yang bermasalah.

The Credit Policy Committee (KKP) is established to apply the principles of prudence and sound credit or financing practices in carrying out credit or financing activities, starting from the process of granting Credit or Financing, monitoring after Credit or Financing is granted, and the resolution procedures in the event of problematic Credit or Financing.

FUNGSI KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan perkreditan.

FUNCTION OF THE CREDIT POLICY COMMITTEE

Support the effectiveness of the Board of Directors' duties and responsibilities in formulating and implementing credit policies.

DASAR HUKUM KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan dibentuk berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. Anggaran Dasar PT Bank Artha Graha Internasional Tbk;
4. Surat Keputusan Direksi PT Bank Artha Graha Internasional Tbk No. 006/KEP-DIR/IV/2024 tentang Komite Kebijakan Perkreditan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

LEGAL BASIS OF THE CREDIT POLICY COMMITTEE

The Credit Policy Committee is established based on:

1. *Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.03/2017 regarding the Obligation to Formulate and Implement Credit or Financing Policies for Commercial Banks;*
2. *Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 dated September 14, 2023, regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks;*
3. *The Articles of Association of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk;*
4. *The Decree of the Board of Directors of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk No. 006/KEP-DIR/IV/2024 regarding the Credit Policy Committee of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.*

KOMPOSISI ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Ketua : Direktur Utama
Wakil Ketua : Direktur Compliance & Risk
Anggota :

- Wakil Direktur Utama
- Direktur Business
- Direktur Asset Recovery
- Associate Director Credit Analyst
- Associate Director Retail Banking

COMPOSITION OF THE CREDIT POLICY COMMITTEE MEMBERS

Chairperson : President Director
Vice Chairperson : Director of Compliance & Risk
Members :

- Vice President Director
- Director of Business
- Director of Asset Recovery
- Associate Director Credit Analyst
- Associate Director Retail Banking

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KKP

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
2. Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan Bank.
3. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan.
 - a. Kajian dan persetujuan terhadap perubahan kebijakan:
 - i. Wholesale Credit Policy
 - ii. Retail Credit Policy
 - iii. Consumer Credit Policy
 - iv. Problem Account Management Policy
 - v. Write-off and Restructuring Policy
 - b. Modeling:
Pengembangan, Validasi dan Kajian Scorecard:
 - i. SME Emerging Business Banking (EBB) Behaviour Scorecard
 - ii. Retail Banking Scorecard
 - c. Kajian atas Parameter Model Pencadangan Kerugian PSAK 71:
 - i. Validasi Model Value at Risk (VaR) dan validasi model perhitungan Suku Bunga dalam Banking Book (IRRBB).
 - ii. Penilaian hasil uji tuntas dan proses pemetaan untuk Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit.
 - d. Melakukan kajian dan memberikan persetujuan dispensasi Kebijakan Kredit Memantau dan mengevaluasi:
 - i. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan (termasuk distribusi peringkat rating, migrasi dan pelaporan eksposur).
 - ii. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Kredit.
 - iii. Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu.
 - iv. Ketaatan pelaksanaan ketentuan BMPK.
 - v. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Kredit.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CREDIT POLICY COMMITTEE

1. Provide input to the Board of Directors in formulating Bank Credit Policies, especially related to the principles of prudence in crediting.
2. Supervise the implementation of the Bank's Credit Policy to ensure it is applied consistently and appropriately and formulate solutions when obstacles or issues arise in implementing the Bank's Credit Policy.
3. Conduct regular reviews of the Bank's Credit Policy and provide recommendations to the Board of Directors when changes or improvements are needed.
 - a. Review and approve policy changes, including:
 - i. Wholesale Credit Policy
 - ii. Retail Credit Policy
 - iii. Consumer Credit Policy
 - iv. Problem Account Management Policy
 - v. Write-off and Restructuring Policy
 - b. Modeling:
Development, Validation, and Review of Scorecards:
 - i. SME Emerging Business Banking (EBB) Behaviour Scorecard
 - ii. Retail Banking Scorecard
 - c. Review of PSAK 71 Loss Calculation Model Parameters:
 - i. Validation of the Value at Risk (VaR) Model and the calculation model for Interest Rates in the Banking Book (IRRBB).
 - ii. Evaluation of the results of due diligence and mapping for Risk-Weighted Assets (RWA) for Credit Risk.
 - d. Review and approve Credit Policy dispensations. Monitor and evaluate:
 - i. The development and quality of the overall credit portfolio (including the distribution of ratings, migration, and exposure reporting).
 - ii. The correctness of the credit decision-making authority.
 - iii. The correctness of the credit granting process, its development, and quality, especially to related parties and large debtors.
 - iv. Compliance with BMPK (Bank's Credit Policy).
 - v. Adherence to applicable laws and regulations in credit granting.

- vi. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit.
- vii. Penyelesaian Kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank.
- viii. Efektivitas struktur pengelolaan risiko kredit.
- ix. Kecukupan infrastruktur perkreditan yang dimiliki oleh Bank.
- x. Penerapan dan pelaksanaan parameter risiko kredit, model dan *scorecard Internal Rating Based (IRB)* ataupun *Credit Grading*.
- xi. Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dijalankan.
- xii. Pelaporan dan pengawasan atas dispensasi Kebijakan/Prosedur Kredit yang diperbolehkan dengan persetujuan pejabat yang berwenang.

- vi. *Efforts to maintain adequate credit provision reserves.*
- vii. *Resolution of problematic credits according to the Bank's Credit Policy.*
- viii. *The effectiveness of the credit risk management structure.*
- ix. *The adequacy of the Bank's credit infrastructure.*
- x. *Penerapan dan pelaksanaan parameter risiko kredit, model dan scorecard Internal Rating Based (IRB) ataupun Credit Grading.*
- xi. *Provide suggestions and corrective measures based on monitoring and evaluation outcomes.*
- xii. *Reporting and supervision of Credit Policy/ Procedure dispensations with the approval of authorized officers.*

Tugas dan Tanggung Jawab Khusus KKP

Memberikan persetujuan dan pelaksanaan pembelian surat berharga yang disertai dengan *note purchase agreement*, perjanjian Kredit, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan oleh nasabah, pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang, dan pemberian jaminan Bank diataranya meliputi akseptasi, endorsemen, dan surat-surat berharga.

Special Duties and Responsibilities of The KKP

Grant approval and execute the purchase of securities with accompanying purchase agreements, credit agreements, purchase of other securities issued by customers, debt factoring, and provision of Bank guarantees, including acceptance, endorsement, and letter of securities.

TATA TERTIB RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KKP

1. Rapat Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rapat Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
3. Apabila terdapat masalah mendesak untuk dibahas di dalam Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) maka Unit Kerja terkait dapat mengusulkan kepada Sekretaris KKP untuk melakukan Rapat Komite.
4. Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KKP dapat dilakukan melalui edaran kepada anggota KKP atau melalui Rapat KKP yang sah.
5. Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Rapat Komite dianggap sah bila disetujui oleh 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Komite yang hadir ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite.

MEETING PROCEDURE AND DECISION-MAKING OF THE KKP

1. *KKP meetings are held as needed and at least once a year.*
2. *KKP meetings are quorate when attended by at least 2/3 (two-thirds) of the members.*
3. *If there is an urgent issue for discussion within the KKP, the relevant Work Unit can propose to the KKP Secretary to convene a meeting.*
4. *Decision-Making: Decisions regarding the use of KKP authority can be made through circulars to KKP members or during a valid KKP meeting.*
5. *KKP meeting decisions are made through deliberation and consensus. If no agreement is reached, the decision is valid if approved by 1/2 (half) of the attending Committee members plus 1 (one) additional member.*

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite ini baru resmi dibentuk pada bulan April 2024. Oleh karenanya belum ada program pengembangan khusus yang telah dijalankan. Namun demikian, mengingat bahwa seluruh anggota KKP adalah manajemen puncak dari Bank, maka program pengembangan kompetensi yang kelak akan dijalankan merupakan bagian dari program pengembangan kompetensi Direksi Bank.

COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE CREDIT POLICY COMMITTEE

This committee was officially established in April 2024. Therefore, no specific competency development program has been implemented yet. However, given that all KKP members are top management of the Bank, the future competency development program will be part of the Board of Directors' competency development program.

KOMITE PRODUK

Product Committee

Komite Produk merupakan suatu tim kerja dengan tugas pokok menilai kelayakan sesuatu usulan produk atau aktivitas baru, pengembangan produk atau aktivitas yang dimiliki maupun pengembangan program yang diajukan dan kemudian membuat rekomendasi terhadap usulan produk tersebut sebelum disetujui oleh Direksi.

The Product Committee is a working team tasked with assessing the feasibility of new product or activity proposals, the development of existing products or activities, as well as the development of proposed programs. The committee then provides recommendations on these product proposals before they are approved by the Board of Directors.

DASAR HUKUM KOMITE PRODUK

Komite Produk dibentuk berdasarkan:

1. Pedoman Kebijakan Perkreditan No: 590101.01.0

LEGAL BASIS OF THE PRODUCT COMMITTEE

The Product Committee is established based on:

1. Credit Policy Guidelines No: 590101.01.0

KOMPOSISI ANGGOTA KOMITE PRODUK

1. Ketua : Direktur Business
2. Wakil Ketua : Associate Director Credit Analyst
3. Sekretaris : Deputy Director Corporate Relations
4. Anggota disesuaikan dengan jenis produknya

COMPOSITION OF THE PRODUCT COMMITTEE MEMBERS

1. Chairperson : Director of Business
2. Vice Chairperson : Associate Director of Credit Analyst
3. Secretary : Deputy Director of Corporate Relations
4. The members are adjusted according to the type of product.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE PRODUK

Tugas dan Tanggung Jawab

Membantu Direksi dalam membuat perencanaan terkait pengembangan produk/aktivitas/program berorientasi bisnis (*Funding* maupun *Lending*) *existing* dan baru, termasuk:

1. Memastikan kelayakan (*feasibility*) teknis seperti infrastruktur, prosedur, *cost benefit analysis* dan lainnya;
2. Memberi dan memastikan solusi atas berbagai kendala teknis;
3. Melakukan *monitoring* dan menindaklanjuti progress pengembangan produk/aktivitas/program;
4. Membahas kerjasama dengan pihak ketiga terkait rencana pengembangan produk/aktivitas dan *joint program/promosi*;
5. Memastikan produk/aktivitas/program sudah memenuhi ketentuan regulator;
6. Membuat konsep strategi komunikasi pemasaran di antaranya materi promosi, materi, *event*, dan *tools/perengkapan*;
7. Memberi rekomendasi usulan pengembangan dari unit kerja terkait sebelum diajukan ke Direksi;
8. Melakukan evaluasi pencapaian produk/aktivitas/program;
9. Melakukan review produk/aktivitas/program;
10. Melakukan review/evaluasi terhadap info tarif;
11. Merumuskan strategi komunikasi pemasaran termasuk design dan isi (*content*) materi promosi;
12. Memberikan Keputusan terkait program promosi yang telah memiliki anggaran;
13. Menyetujui kerjasama dengan pihak ketiga atas produk/aktivitas/*program existing*;
14. Memberikan *In Principle Approval* atas usulan produk/aktivitas/program baru;
15. Melakukan pengembangan produk/aktivitas *existing* yang memerlukan pengembangan dari sisi Teknologi Informasi dan/atau perubahan bisnis proses; dan
16. Memantau produk dan aktivitas yang memerlukan pengembangan dari sisi Teknologi Informasi dan/atau perubahan bisnis proses.

DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES OF THE PRODUCT COMMITTEE

Duties and Responsibilities

Assist the Board of Directors in planning related to the development of existing and new business-oriented products/activities/programs (both *Funding* and *Lending*), including:

1. En sure the technical feasibility, such as infrastructure, procedures, cost-benefit analysis, and others;
2. Provide and ensure solutions to various technical obstacles;
3. Monitor and follow up on the progress of product/activity/program development;
4. Discuss cooperation with third parties related to product/activity development plans and joint programs/promotions;
5. Ensure that products/activities/programs comply with regulatory requirements;
6. Develop a marketing communication strategy, including promotional materials, events, and tools/equipment;
7. Provide recommendations for development proposals from related work units before submitting them to the Board of Directors;
8. Evaluate the achievements of products/activities/programs.
9. Review products/activities/programs;
10. Review/evaluate tariff information;
11. Formulate marketing communication strategies, including the design and content of promotional materials;
12. Make decisions regarding promotional programs that have a budget;
13. Approve cooperation with third parties for existing products/activities/programs;
14. Provide In-Principle Approval for proposals of new products/activities/programs;
15. Develop existing products/activities that require development in terms of Information Technology and/or business process changes; and
16. Monitor products and activities that require development in terms of Information Technology and/or business process changes.

Wewenang Komite Produk

1. Memutuskan strategi komunikasi pemasaran termasuk *design* dan *content* materi promosi.
2. Memutuskan Info Tarif.
3. Memutuskan program promosi yang telah memiliki Anggaran.
4. Menyetujui kerjasama dengan pihak ketiga atas produk/ aktivitas/program yang masih berlaku/berjalan.
5. Memberikan *In Prinsip Approval* atas usulan produk/ aktivitas/program baru.

Authority of the Product Committee

1. Decide on the marketing communication strategy, including design and promotional content.
2. Decide on tariff information.
3. Decide on promotional programs that have a budget.
4. Approve cooperation with third parties for products/ activities/programs that are still valid/running.
5. Provide in-principle approval for new product/activity/ program proposals.

PEDOMAN KEBIJAKAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN RAPAT KOMITE PRODUK

1. Dalam pengembangan produk tertentu, Komite Produk dapat mengundang unit kerja lain yang terkait (termasuk *Branch Director*)
2. Komite Produk mengadakan rapat minimal 1x (satu kali) dalam setahun ataupun secara *ad hoc* (bila perlu).
3. Dalam hal dilakukan pengambilan Keputusan oleh Komite Produk dilakukan mekanisme *voting* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Komite Produk dipimpin oleh Ketua dan dalam hal Ketua berhalangan maka rapat dapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.
 - b. Rapat Komite Produk adalah sah dan berhak mengambil keputusan bila dihadiri oleh Ketua atau Wakil Ketua dan dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota Komite Produk.
 - c. Keputusan Rapat Komite Produk diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - d. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara (*voting*) dengan mekanisme:
 - i. Hak *voting* dimiliki oleh anggota Komite Produk setingkat *Deputy Director*.
 - ii. Keputusan *voting* diambil berdasarkan *simple majority*.
 - iii. Jika hasil *voting* seimbang maka Ketua Komite Produk yang akan menentukan keputusan.

GUIDELINES FOR POLICY AND MECHANISMS OF PRODUCT COMMITTEE MEETINGS

1. In the development of certain products, the Product Committee may invite other relevant work units (including the *Branch Director*).
2. The Product Committee shall hold meetings at least once a year or on an *ad hoc* basis when necessary.
3. If a decision needs to be made by the Product Committee, a voting mechanism will be applied with the following provisions:
 - a. The Product Committee meeting is chaired by the Chairperson, and in the event the Chairperson is unavailable, the meeting may be chaired by one of the Vice Chairpersons.
 - b. A Product Committee meeting is valid and authorized to make decisions if it is attended by the Chairperson or a Vice Chairperson and more than 50% (fifty percent) of the Product Committee members.
 - c. Decisions of the Product Committee meetings shall be made based on deliberation and consensus.
 - d. If consensus cannot be reached, a vote will be conducted using the following mechanism:
 - i. Voting rights are held by Product Committee members at the Deputy Director level.
 - ii. Voting decisions are made based on a simple majority.
 - iii. If the voting result is tied, the final decision shall be made by the Chairperson of the Product Committee.

4. Setiap usulan produk/aktivitas/program sudah harus memperoleh keputusan maksimal pada rapat berikutnya.
5. Tugas administratif terkait Komite Produk (termasuk di dalamnya, pembuatan notulen rapat) dilakukan secara bersamaan ataupun bergantian antara Direktorat *Digital Banking* dan Direktorat *Treasury*.
6. Setiap direktorat/sub direktorat dapat mengusulkan/ menyampaikan agenda pembahasan kepada Ketua Komite.
7. Komite Produk dapat membentuk kelompok kerja (pokja) yang menampung ide-ide kreatif dari keseluruhan Bank (semua level di KPNO dan Cabang) terkait produk/ aktivitas/program Bank, dengan tujuan untuk membahas ide-ide inovatif terkait produk/aktivitas/program serta membuatkan usulannya, mempersiapkan kebutuhan pendukung termasuk melakukan *benchmarking* (riset pasar) dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE PRODUK

Komite ini baru resmi dibentuk pada bulan April 2024. Oleh karenanya belum ada program pengembangan khusus yang telah dijalankan untuk meningkatkan kompetensi anggota Komite Produk.

4. *Each product/activity/program proposal must receive a decision no later than the following committee meeting.*
5. *Administrative tasks related to the Product Committee (including the preparation of meeting minutes) shall be carried out jointly or alternately by the Directorate of Digital Banking and the Directorate of Treasury.*
6. *Each directorate/sub-directorate may propose or submit agenda items for discussion to the Committee Chairperson.*
7. *The Product Committee may establish working groups (task forces) that gather creative ideas from across the Bank (all levels at Head Office and Branches) regarding Bank products/activities/programs. These working groups aim to discuss innovative ideas, prepare proposals, identify supporting needs, conduct benchmarking (market research), and address other necessary matters.*

COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE PRODUCT COMMITTEE

This committee was officially established in April 2024. Therefore, there has been no specific competency development program yet to enhance the members' competencies of the Product Committee.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berperan penting dalam menjembatani komunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal Bank seperti komunikasi dengan pegawai, Regulator, para Pemegang Saham, Investor, dan Pemangku Kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan juga berperan dalam memastikan bahwa Bank telah patuh pada peraturan dan ketentuan di bidang Pasar Modal.

Komunikasi yang dibangun Sekretaris Perusahaan diselenggarakan melalui berbagai saluran yang dimiliki Bank seperti kantor dan nomor kontak, situs perusahaan, media sosial, lembar *feedback*, dan lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa Bank telah menjalankan fungsi keterbukaan informasi kepada para Pemangku Kepentingan.

Corporate Secretary has an important role in bridging communication to both internal and external parties of the Bank such as communication with employees, regulators, shareholders, investors, and other stakeholders. Corporate Secretary also plays a role in ensuring that the Bank complies with the rules and regulations of the Capital Market.

Communication established by Corporate Secretary is organized through various channels owned by the Bank such as offices and contact numbers, company websites, social media, feedback sheets, and others. This is to ensure that the Bank has carried out the function of information disclosure to the Stakeholders.

PEDOMAN KERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pedoman kerja Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan harus menyampaikan kegiatan dan laporan Sekretaris Perusahaan yang meliputi:

1. Kegiatan Umum;
2. Kegiatan Tata Kelola dan Informasi Korporat;
3. Kegiatan Komunikasi Korporat; dan
4. Tanggung Jawab Sosial dan Pengamanan Perusahaan

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi berdasarkan mekanisme internal Bank dan dilaporkan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan profesional serta integritasnya di masyarakat dan bisnis.

PROFIL PEJABAT SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-MT/HC/0133/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 efektif per tanggal 26 Juni 2024, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Rumi Kreshna Wibowo. Profil lengkap dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

CORPORATE SECRETARY GUIDELINES

The work guidelines of Corporate Secretary refer to the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary. Corporate Secretary shall submit activities and reports of the Corporate Secretary which include:

1. General Activities;
2. Corporate Governance and Information activities;
3. Corporate Communication Activities; and
4. Corporate Social Responsibility and Safeguarding.

PARTIES APPOINTING AND DISMISSING CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary is directly responsible to the Board of Directors and is appointed and dismissed based on a Board of Directors Decree based on the Bank's internal mechanism and reported to the OJK and the Indonesia Stock Exchange. The appointment of Corporate Secretary takes into account his/her professional ability and integrity in society and business.

CORPORATE SECRETARY PROFILE

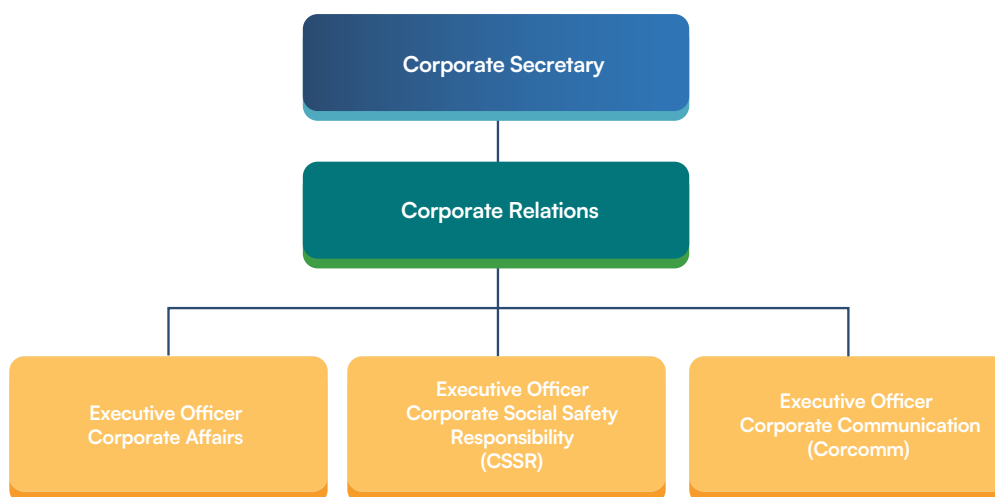
Based on the Decree of the Board of Directors No. SK-MT/HC/0133/VI/2024 dated June 26, 2024 effective as of June 26, 2024, the Corporate Secretary is Rumi Kreshna Wibowo. The full profile can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report book.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary berada langsung di bawah Direktur Utama sehingga tiap bentuk pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Direktur Utama. Pelaksanaan fungsi dan peran *Corporate Secretary* dibantu oleh *Deputy Director Corporate Relations*, *Executive Officer Corporate Affairs*, *Executive Officer Corporate Social Safety Responsibility (CSSR)*, dan *Executive Officer Corporate Communication (Corcomm)*.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary is directly under the President Director and every form of implementation of its duties is directly accountable to the President Director. The implementation of the functions and roles of *Corporate Secretary* is assisted by the *Executive Officer Corporate Affairs*, *Executive Officer Corporate Social Safety Responsibility (CSSR)*, and *Executive Officer Corporate Communication (Corcomm)*.



MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan sebagaimana yang tertuang dalam pedoman dan tata tertib Sekretaris Perusahaan.

1. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan:
 - a. Sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan keputusan Direksi;
 - b. Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh seorang anggota Direksi;
 - c. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun pada Emiten atau Perusahaan Publik lain;

MECHANISM OF APPOINTMENT AND DISMISSAL OF CORPORATE SECRETARY

The Board of Directors is authorized to appoint and dismiss *Corporate Secretary* as stated in the guidelines of the *Corporate Secretary*.

1. Appointment of Company Secretary:
 - a. *Corporate Secretary* is appointed by resolution of the Board of Directors;
 - b. *Corporate Secretary* may be concurrently employed by the Board of Directors;
 - c. *Corporate Secretary* is prohibited from holding any position in another Issuer or Public Company;

- d. Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan, Perseroan wajib menunjuk penggantinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan Sekretaris Perusahaan;
 - e. Perseroan wajib menyampaikan laporan ke Bursa paling lambat pada Hari Bursa yang sama dengan dilakukannya penunjukan Sekretaris Perusahaan dan mengumumkan di Bursa;
 - f. Selama terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan, jabatan tersebut dapat dirangkap oleh anggota Direksi atau orang perseorangan yang ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan sementara tanpa memperhatikan persyaratan Sekretaris Perusahaan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - g. Kekosongan Sekretaris Perusahaan dapat disebabkan antara lain berakhirnya masa tugas, pemberhentian, pengunduran diri, atau berhalangan tetapnya Sekretaris Perusahaan.
2. Pemberhentian Sekretaris Perusahaan berdasarkan keputusan Direksi.

- d. In the event of a vacancy of Corporate Secretary, the Company shall appoint a replacement within a maximum period of 60 (sixty) days from the occurrence of the vacancy of Corporate Secretary;
 - e. The Company must submit a report to the Stock Exchange at the latest on the same Exchange Day as the appointment of Corporate Secretary and announce it on the Stock Exchange;
 - f. In the event of a vacancy of Corporate Secretary, the position may be concurrently held by a member of the Board of Directors or an individual appointed as temporary Corporate Secretary without regard to the requirements of Corporate Secretary stipulated by the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies; and
 - g. The vacancy of Corporate Secretary may be caused by, among others, the expiration of the term of office, dismissal, resignation, or permanent absence of a Corporate Secretary.
2. The dismissal of Corporate Secretary is based on the decision of the Board of Directors.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Fungsi *Corporate Secretary* melaksanakan tugas paling kurang:
 - a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; Pemberian masukan kepada Direksi misalnya masukan dalam melaksanakan ketentuan kewajiban Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam POJK yang mengatur mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - i. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs Web Perseroan
 - ii. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu
 - iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi
 - iv. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. *Corporate Secretary* function performs the following duties at least:
 - a. Keeping a breast of developments in the Capital Market, especially the prevailing laws and regulations in the Capital Market;
 - b. Providing input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector; Providing input to the Board of Directorssuch as input in implementing the provisions of the obligations of the Board of Directors and Board of Directors such Meetings, as referred to in the POJK which regulates the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
 - c. Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in the implementation of corporategovernance which includes:
 - i. Information disclosure to the public, including the availability of information on the Company's website
 - ii. Timely submission of reports to OJK
 - iii. Organization and documentation of Board of Directors' meetings
 - iv. Implementation of orientation program on the Company for the Board of Directors and/or Board of Commissioners

- d. Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan keluarganya baik dalam Perseroan maupun afiliasinya yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - e. Membuat daftar Pemegang Saham termasuk kepemilikan 5% (lima persen) atau lebih;
 - f. Membantu Direksi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - g. Sebagai penghubung antar Perseroan dengan Pemegang Saham, OJK, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
2. *Corporate Secretary* dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi *Corporate Secretary* wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
 3. *Corporate Secretary* dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi *Corporate Secretary* dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan Bank;
 4. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, *Corporate Secretary* harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan. Pendidikan dan/atau pelatihan yang dimaksud dapat diperoleh antara lain melalui pelatihan, sosialisasi atau seminar yang diselenggarakan pihak yang berkompeten;
 5. *Corporate Secretary* bertanggung jawab kepada Direksi; dan
 6. Setiap informasi yang disampaikan oleh *Corporate Secretary* kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari Bank.

d. Preparing a special list relating to the Board of Directors, Board of Commissioners and the families both in the Company and its affiliates which includes, among others, share ownership, business relationships and other roles that pose a conflict of interest with the Company;

- e. Preparing a list of Shareholders including ownership of 5% (five percent) or more;*
- f. Assisting the Board of Directors in organizing the General Meeting of Shareholders; and*
- g. As a liaison between the Company and Shareholders, OJK, and other Stakeholders.*

2. *Corporate Secretary and employees in the work unit that carries out the Corporate Secretary function must maintain the confidentiality of documents, data and information that are confidential except in the context of fulfilling obligations in accordance with laws and regulations or otherwise specified in laws and regulations;*
3. *Corporate Secretary and employees in the work unit that carries out the Corporate Secretary function are prohibited from taking personal advantage either directly or indirectly to the detriment of the Bank;*
4. *In order to improve knowledge and understanding to assist in the performance of its duties, Corporate Secretary must participate in education and/or training. The education and/or training referred to can be obtained, among others, through training, socialization or seminars held by competent parties;*
5. *Corporate Secretary is responsible to the Board of Directors; and*
6. *Any information conveyed by Corporate Secretary to the public is official information from the Bank.*

PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2024

Pada tahun 2024 *Corporate Secretary* Bank Artha Graha Internasional menjalankan beragam kegiatan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa;
2. Memfasilitasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam menyelenggarakan *Public Expose*;
3. Membantu penyelenggaraan dan pendokumentasian rapat Direksi, rapat Komisaris, rapat *Management Committee* serta pemantauan hasil keputusan manajemen;

IMPLEMENTATION OF DUTIES IN 2024

Bank Artha Graha Internasional's *Corporate Secretary* reported on the various activities carried out throughout 2024 as follows:

1. *Facilitated the Board of Commissioners and Board of Directors in organizing the Annual GMS and Extraordinary GMS;*
2. *Facilitating the Board of Commissioners and the Board of Directors in holding a Public Expose;*
3. *Assisted in organizing and documenting Board of Directors meetings, Commissioners meetings, Management Committee meetings and monitoring the results of management decisions;*

4. Membuat Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PB/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
5. Memastikan pemantauan kepatuhan perusahaan melalui pemenuhan laporan rutin guna memenuhi regulasi baik secara bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan kepada Regulator;
6. Membantu penyelenggaraan *Corporate Action Bank*;
7. Memastikan terjaganya hubungan baik dengan para pemangku kepentingan/*stakeholders*;
8. Melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan pengamanan Bank; dan
9. Mengelola *website* dan media sosial Bank demi menjaga *image* perusahaan.

4. Prepared Annual Reports and Sustainability Reports that were guided by applicable laws and regulations, including Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Bank Indonesia Regulation No. 14/14/PB/2012 concerning Transparency and Publication of Bank Reports, Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016, Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, and Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies;
5. Fulfilled routine reporting to meet regulations on a monthly, quarterly, semi-annual and annual basis to the Regulator;
6. Assisted in the implementation of the Bank's Corporate Action;
7. Ensuring the maintenance of good relations with stakeholders;
8. Carried out the Bank's social responsibility and security activities; and
9. Managed the Bank's website and social media to maintain Company's image.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Program pengembangan kompetensi yang diikuti *Corporate Secretary* sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT

The competency development programs that the *Corporate Secretary* participated in throughout 2024 are as follows:

Nama Peserta Participant Name	Training Pelatihan	Pihak Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Rumi Kreshna Wibowo	Pembekalan & Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Certification Preparation & Assessment Level 7</i>	RMG dan LSPP	16 Agustus 2024 August 16, 2024
	Workshop Laporan Resolusi (LPS) dan Recovery (OJK) <i>Resolution (LPS) and Recovery (OJK) Report Workshop</i>	Denny Sudrajat	21-22 September 2024 September 21-22, 2024
	HR Leaders & HR Tech Strategy Meeting	Rockbird Media Pte. Ltd.	19 November 2024 November 19, 2024
	The 19 th Indonesia HR EXPO	Intipesan Conference	11-12 Desember 2024 December 11-12, 2024

INTERNAL AUDIT

Internal Audit

Fungsi Internal Audit bagi manajemen sebagai *strategic business partner* dalam mengoptimalkan implementasi terkait GCG melalui kajian dan audit pelaksanaan kebijakan dan prosedur dalam aktivitas operasional Bank yang efektif. Fungsi dan tanggung jawab audit ini wajib diterapkan dan dilaksanakan dengan prinsip independen.

Fungsi internal audit dijalankan melalui proses evaluasi berdasarkan *risk based* audit secara objektif dan jasa konsultasi. Fungsi tersebut dilakukan melalui pendekatan yang proaktif, berkomunikasi secara efektif, berorientasi pada bisnis dan *stakeholders*, pemahaman terhadap pokok permasalahan (*root of the problem*) dan area yang memiliki risiko tinggi, penekanan temuan pada kualitas, serta merekomendasikan penyelesaian yang praktis dan *workable*.

Internal Audit berperan memberikan keyakinan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pengendalian internal dan pelaksanaan kegiatan operasional, akuntansi, manajemen risiko dan kegiatan Bank lainnya telah terselenggara dengan baik dan mampu menjamin kepentingan Bank serta *stakeholder*.

DASAR HUKUM

Pedoman kerja Internal Audit disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

PIAGAM INTERNAL AUDIT

Internal Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Internal Audit yang tertuang dalam Pedoman Pengawasan Intern (PPI) No. 10204.01.0 tanggal 15 Desember 2017, Pedoman Pengawasan Intern (PPI) No. 10204.02.0 tanggal 31 Mei 2019, Pedoman Pengawasan Intern (PPI) No. 10204.02.1 tanggal 25 Mei 2022 yang telah diperbarui menjadi Pedoman Pengawasan Intern (PPI) No. 10204.03.0 tanggal 30 Desember 2024.

Isi dari pedoman tersebut mencakup:

1. Tujuan;
2. Ketentuan Umum:
 - a. Fungsi dan Peranan Internal Audit (SKAI);
 - b. Tanggung Jawab Pengendalian Intern;
 - c. Prinsip-prinsip Pengendalian Intern;
 - d. Fungsi Pemeriksaan Intern;
 - e. Tata Cara dan Ketentuan Pendukung; serta
 - f. Administrasi Dokumen.

The internal audit function is a strategic business partner for management in optimizing the implementation of GCG through effective review and audit of the implementation of policies and procedures in the Bank's operational activities. This audit function and responsibility must be implemented and carried out with independent principles.

The internal audit function is carried out through an evaluation process based on objective risk-based audit and consulting services. The function is carried out through a proactive approach, effective communication, business- and stakeholder-oriented approaches, understanding of the root problem and high-risk areas, emphasis on quality findings, and recommendations of practical and workable solutions.

The Internal Audit plays a role in providing assurance based on the results of the examination that internal control and the implementation of operational activities, accounting, risk management and other Bank activities have been well organized and able to guarantee the interests of the Bank and stakeholders.

LEGAL BASIS

The Internal Audit work guidelines are prepared based on the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.03/2019 dated January 28, 2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks.

INTERNAL AUDIT CHARTER

Internal Audit carries out its duties and responsibilities based on the Guidelines and Code of Conduct for Internal Audit as stipulated in the Internal Supervision Guidelines (PPI) No.10204.01.0 dated December 15, 2017, Internal Supervision Guidelines (PPI) No. 10204.02.0 dated May 31, 2019, and Internal Supervision Guidelines (PPI) No. 10204.02.1 dated May 25, 2022, which have been updated to Internal Supervision Guidelines (PPI) No. 10204.03.0 dated December 30, 2024.

The content of the guidelines includes:

1. Objective;
2. General Provisions:
 - a. Function and Role of Internal Audit;
 - b. Internal Control Responsibilities;
 - c. Principles of Internal Control;
 - d. Internal Audit Function;
 - e. Procedures and Supporting Provisions; and
 - f. Document Administration.

3. Prosedur; dan
4. Penutup.

KODE ETIK AUDITOR

Berdasarkan pedoman tersebut, Internal Audit wajib mematuhi dan menerapkan kode etik yang terdiri dari:

1. Integritas
Setiap auditor intern harus memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dari tindakan:
 - a. Dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya;
 - b. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Menghindari benturan kepentingan; dan
 - d. Mengimplementasikan Kode Etik Audit Intern.

Setiap auditor internal harus menghindari situasi yang diketahui atau dicurigai melanggar hukum dan harus melaporkan situasi tersebut langsung kepada pejabat yang berwenang di Bank Artha Graha Internasional sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku.

2. Objektivitas
 - a. Setiap auditor internal berkewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kejujuran, objektivitas, dan ketekunan;
 - b. Setiap auditor internal harus memiliki kebebasan sikap mental dan kepercayaan yang jujur akan hasil pekerjaan auditnya; dan
 - c. Membuat konsep prosedur, merancang sistem, memasang sistem, melaksanakan sistem, bukan merupakan fungsi audit. Setiap karyawan Bank Artha Graha Internasional dalam kapasitasnya sebagai auditor internal tidak diperkenankan sama sekali untuk turut terlibat atau melibatkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan di atas karena dinilai mengurangi objektivitas audit.
3. Kerahasiaan
 - a. Setiap auditor internal harus bijaksana (*prudent*) dalam menggunakan informasi yang diperolehnya selama melakukan tugas audit;
 - b. Setiap auditor internal harus menjaga agar informasi yang bersifat rahasia jangan sampai bocor, dengan pengecualian yaitu menyampaikan informasi rahasia kepada pihak-pihak yang berhak memperolehnya, sesuai dengan perintah atau pengarahan dari Kepala Internal Audit;

3. Procedures; and
4. Cover.

AUDITOR'S CODE OF ETHICS

Based on these guidelines, Internal Audit must comply with and implement the code of ethics which consists of:

1. Integrity
Each internal auditor must uphold integrity in the performance of their duties, as reflected in the following actions:
 - a. Being reliable, firm, honest, and trustworthy;
 - b. Maintaining the confidentiality of information obtained during the course of their duties;
 - c. Avoiding conflicts of interest; and
 - d. Implementing the Internal Audit Code of Ethics.

Every internal auditor must avoid situations that are known or suspected of violating the law and must report such situations directly to the authorized officials at Bank Artha Graha Internasional in accordance with the applicable organizational structure.

2. Objectivity
 - a. *Every internal auditor is obliged to carry out their duties with honesty, objectivity, and diligence;*
 - b. *Each internal auditor must have freedom of mental attitude and honest belief in the results of his audit work; and*
 - c. *Each internal auditor is obliged to conceptualize procedures, design systems, install systems, implement systems, and is not an audit function. Any employee of Bank Artha Graha Internasional in his/her capacity as an internal auditor is not allowed to be involved at all in any of the aforementioned tasks as it will reduce the objectivity of the audit.*
3. Confidentiality
 - a. *Every internal auditor must be prudent in using the information obtained during the audit task;*
 - b. *Each internal auditor must keep confidential information from being leaked, with the exception of conveying confidential information to those entitled to obtain it, in accordance with orders or directions from the Head of Internal Audit;*

- c. Setiap auditor internal tidak boleh menggunakan informasi yang bersifat rahasia untuk keuntungan pribadi atau dengan cara yang dapat merugikan kesejahteraan organisasi pada umumnya, anggota Dewan Komisaris sebagai perwakilan para pemilik saham, dan/atau manajemen; serta
- d. Setiap auditor internal harus mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan guna menjaga kerahasiaan catatan-catatan dan berbagai data yang seharusnya bersifat rahasia.

4. Kompetensi dan Profesionalisme

- a. Setiap auditor intern harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern terhadap Bank secara menyeluruh;
- b. Memastikan setiap auditor intern menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis; dan
- c. Memastikan setiap auditor intern harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi demi terjaminnya pemenuhan tujuan audit intern di PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

- c. *Each internal auditor must not use confidential information for personal gain or in a way that could be detrimental to the welfare of the organization at large, members of the Board of Commissioners as representatives of shareholders, and/or management; and*

- d. *Every internal auditor must take the necessary security measures to maintain the confidentiality of records and data that should be confidential.*

4. Competence and Professionalism

- a. *Each internal auditor must possess the knowledge, skills, and competencies required to carry out the internal audit function comprehensively across the Bank;*
- b. *Ensuring that every internal auditor applies their knowledge, skills, and competencies in a professional and skeptical manner; and*
- c. *Ensuring that each internal auditor possesses the knowledge, skills, and competencies necessary to achieve the objectives of internal audit at PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.*

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA INTERNAL AUDIT

Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

PROFIL PEJABAT INTERNAL AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKMT/SDM/0704/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dijabat oleh Adhyaksa Sitepu. Profil lengkap dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF INTERNAL AUDIT HEAD

The Head of Internal Audit is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners by considering the recommendations of the Audit Committee as stipulated in POJK No. 1/POJK.03/2019 concerning Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks.

PROFILE OF INTERNAL AUDIT OFFICER

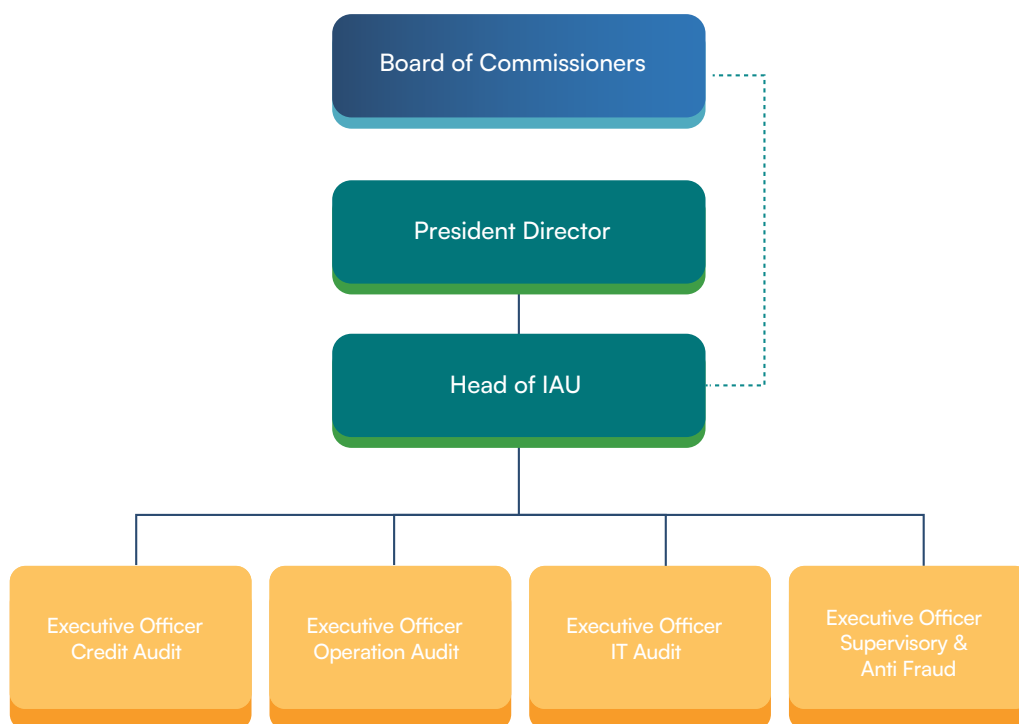
Based on the Decree of the Board of Directors No. SK-MT/HR/0704/X/2020 dated October 14, 2020, the Head of Internal Audit is Adhyaksa Sitepu. The full profile is available in the Company Profile chapter in this Annual Report book.

STRUKTUR ORGANISASI, KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT DALAM STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI PERSONEL INTERNAL AUDIT

ORGANIZATIONAL STRUCTURE, POSITION OF INTERNAL AUDIT IN ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND COMPOSITION OF INTERNAL AUDIT PERSONNEL

Berikut adalah Struktur Organisasi Internal Audit:

The following is the Internal Audit Organizational Structure, namely:



Internal Audit merupakan organ kerja independen yang berada dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama yang didukung penuh oleh Dewan Komisaris serta jajaran Manajemen Bank. Internal Audit juga dibantu oleh Executive Officer dalam pelaksanaan tugasnya.

Internal Audit is an independent working organ that is directly responsible to the President Director and is fully supported by the Board of Commissioners and the Bank's Management. Internal Audit is also assisted by the Executive Officer in carrying out its duties.

Komposisi personel Internal Audit Bank Artha Graha Internasional, hingga akhir Desember 2024, adalah sebagai berikut:

The composition of Internal Audit personnel of Bank Artha Graha Internasional, until the end of December 2024, is as follows:

Jabatan <i>Position</i>	Jumlah Personil <i>Number of Personnel</i>
Kepala Internal Audit <i>Internal Audit Head</i>	1
Executive Officer (Kredit, Operasi, Teknologi dan Supervisory & Anti Fraud) <i>Executive Officer (Credit, Operations, Technology and Supervision & Anti-Fraud)</i>	4
Staf Auditor Kredit <i>Credit Auditor Staff</i>	5
Staf Auditor Operasi <i>Operations Auditor Staff</i>	10
Staf Auditor Teknologi <i>Technology Auditor Staff</i>	4
Staf Supervisory <i>Supervision Staff</i>	4
Staf Anti Fraud <i>Anti-Fraud Staff</i>	5
Jumlah <i>Total</i>	33

INDEPENDENSI INTERNAL AUDIT

Seluruh aktivitas audit yang dilakukan oleh Internal Audit Bank Artha Graha Internasional selalu berlandaskan pada prinsip independensi, tanpa ada unsur intervensi dari pihak mana pun yang mampu mempengaruhi kinerjanya.

METODE AUDIT

Dalam melaksanakan audit, metode audit yang digunakan Internal Audit Bank Artha Graha Internasional adalah metode *risk based* audit dengan menerapkan fokus audit pada kegiatan dan transaksi yang memiliki risiko tinggi.

INDEPENDENCE OF INTERNAL AUDIT

All audit activities carried out by Bank Artha Graha Internasional's Internal Audit are always based on the principle of independence, without any element of intervention from any party that can affect its performance.

AUDIT METHOD

In conducting audits, the Internal Audit of Bank Artha Graha Internasional implement a risk-based audit method, focusing audit activities on areas and transactions that carry high risk.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Internal Audit Bank Artha Graha Internasional memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen; dan
5. Internal Audit harus memiliki tanggung jawab terhadap profesi dengan selalu menerapkan prinsip kerja yang cermat, seksama dan tegas untuk melayani organisasi Bank Artha Graha Internasional dengan cara yang konsisten dengan berbagai norma audit intern dan Kode Etik.

PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2024

Pelaksanaan kegiatan audit Internal Audit Bank diterapkan secara berkala pada Kantor Cabang dan Kantor Pusat Non Operasional (KPNO). Adapun target pemeriksaan untuk tahun 2024 adalah sejumlah 151 pemeriksaan dengan capaian adalah sebanyak 139 pemeriksaan (92%).

Fokus kerja yang ingin dicapai Internal Audit di tahun 2024, adalah:

1. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang dan Kantor Pusat Non Operasional (KPNO) sesuai dengan rencana audit dengan fokus pemeriksaan pada temuan berisiko tinggi dan temuan berulang;
2. Meningkatkan standarisasi dan kualitas pemeriksaan; dan
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Bank Artha Graha Internasional Internal Audit has the following duties and responsibilities:

1. Assisting the duties of the President Director and the Board of Commissioners in conducting supervision by describing operationally both planning, implementing and monitoring audit results;
2. Making analysis and judgment in finance, accounting, operations, and other activities through audits;
3. Identifying any possibilities to improve and increase the efficiency of the use of resources and funds;
4. Providing suggestions for improvement and objective information about the activities examined at all levels of management; and
5. Internal Audit must have a responsibility to the profession by always applying the principles of careful, thorough and decisive work to serve the Bank Artha Graha Internasional organization in a manner consistent with various internal audit norms and the Code of Ethics.

IMPLEMENTATION OF DUTIES IN 2024

The Bank's Internal Audit activities are periodically applied to Branch Offices or Operating Centers and Non-Operational Headquarters (KPNO). In 2024, out of 151 audit targets, 139 audits (92%) were successfully achieved.

The focus of work that Internal Audit wants to achieve in 2024, are as follows:

1. Carrying out audits of Branch Offices or Operating Centers and Non-Operational Headquarters (KPNO) in accordance with the audit plan with a focus on examining high-risk findings and recurring findings;
2. Improving the standardization and quality of audits; and
3. Improving auditor competence and professionalism.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Berikut program pengembangan kompetensi yang diikuti Internal Audit sepanjang tahun 2024:

COMPETENCY DEVELOPMENT

The competency development programs that Internal Audit participated in throughout 2024 are as follows:

No	Materi Material	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Execution Date
1	Refreshment Sertifikat Manajemen Risiko <i>Risk Management Certification Refreshment</i>	Risiko Manajemen Gagasan (RMG)	3-19 Februari 2024 <i>February 3-19, 2024</i>
2	Webinar: Artificial Intelligence Changes the Face of the Financial Sector	OJK	7 Maret 2024 <i>March 7, 2024</i>
3	Resertifikasi Manajemen Risiko <i>Risk Management Recertification</i>	BSMR	2-8 Maret 2024 <i>March 2-8, 2024</i>
4	Pembekalan & Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 <i>Risk Management Certification Training & Examination Level 4</i>	LPPI	28-29, 31 Mei 2024 <i>May 28-29, 31, 2024</i>
5	Pembekalan Sertifikasi Audit Intern - Level Supervisor <i>Internal Audit Certification Training - Supervisor Level</i>	Asanka	30-31 Mei 2024 <i>May 30-31, 2024</i>
6	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Audit Intern Level Auditor <i>Internal Audit Certification Training and Examination - Auditor Level</i>	Asanka & LSPP	3-4,14 Juni 2024 <i>June 3-4, 14, 2024</i>
7	Forum Penguatan Fungsi GRC: Diseminasi Standar Audit Internal Terkini <i>GRC Function Strengthening Forum: Dissemination of Latest Internal Audit Standards</i>	OJK	7 Juni 2024 <i>June 7, 2024</i>
8	Resertifikasi Audit Intern <i>Internal Audit Recertification</i>	LSPP	14 Juni 2024 <i>June 14, 2024</i>
9	Workshop Laporan Resolusi (LPS) & Recovery (OJK) <i>Resolution (LPS) & Recovery (OJK) Report Workshop</i>	Denny Sudrajat	21-22 September 2024 <i>September 21-22, 2024</i>
10	The 19th Indonesia HR EXPO <i>The 19th Indonesia HR EXPO</i>	Intipesan	11-12 Desember 2024 <i>December 11-12, 2024</i>

AKUNTAN PUBLIK

Public Accountant

Pada tahun 2024 Bank Artha Graha Internasional kembali melakukan pemilihan dan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Tahun Buku 2024. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Auditor Eksternal yang ditunjuk diwajibkan mampu memberikan informasi dan data yang akuntabel, independen, dan wajar khususnya atas aspek keuangan, operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Audit ekstern dilakukan oleh pihak independen yang telah memenuhi persyaratan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi Bank diwajibkan melakukan pelaporan profil Risiko Bank. Laporan profil risiko tersebut mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank, yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar serta operasional usaha yang dijalankan Bank tidak menyalahi ketentuan Regulasi yang berlaku.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Bank Artha Graha Internasional tahun buku 2024 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 09/POJK.09/2023 yang ditunjuk untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank.

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, Perusahaan menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan AP dan KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Penunjukan tersebut dilakukan secara independen yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan Bank, untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank, dan telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.

In 2024, Bank Artha Graha Internasional once again conducted the selection and appointment of a Public Accounting Firm to audit the Financial Statements for the 2024 Fiscal Year. This is in order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports. External Auditors are required to be able to provide accountable, independent, and fair information and data, especially on financial aspects, operations, and compliance with applicable regulations.

The external audit is conducted by an independent party that has met the requirements to ensure that the Bank's accounting records are required to report the Bank's risk profile. The risk profile report includes an assessment of Inherent Risk and an assessment of the Quality of the Bank's Risk Management Implementation, which is prepared in accordance with the provisions of the Statement of Accounting and Financial Standards (PSAK) and the reports prepared present the financial position and results of operations fairly and the business operations carried out by the Bank do not violate the provisions of applicable regulations.

The appointment of Bank Artha Graha Internasional's Public Accounting Firm for the financial year 2024 was determined through the Annual GMS based on recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 09/POJK.09/2023 appointed to audit the Bank's Financial Statements.

APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTANT

Based on the decision of the Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) held on June 28, 2024, the Company approved the reappointment of the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono to conduct an audit of the Company's financial records for the fiscal year ending December 31, 2024, as well as. Additionally, the meeting determined the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accountant (AP) and Public Accounting Firm (KAP), taking into account the recommendations from the Audit Committee.

The appointment was made independently, without any conflicts of interest with the Bank, to audit the Bank's Financial Statements, and is in accordance with professional standards, the engagement agreement, and the scope of the audit.

Hasil penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

The results of the appointment of the Public Accounting Firm and Public Accountant in the last 5 (five) years are as follows:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) Accountant Name (Partner in Charge)	Izin KAP KAP License
2024	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Ahmad Nadhif Thoyyibin, S.E., Ak., S.H., M.Ak., CA., CPA., ASEAN CPA	STTD.KAP-00034/PM.22/2017 tanggal 18 Oktober 2017 STTD.KAP-00034/PM.22/2017 dated October 18, 2017
2023	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Harris Siregar, SE.,Ak., CA., CPA, ASEAN CPA., BKP	STTD.KAP-00034/PM.22/2017 tanggal 18 Oktober 2017 STTD.KAP-00034/PM.22/2017 dated October 18, 2017
2022	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Harris Siregar, SE.,Ak., CA., CPA, ASEAN CPA., BKP	STTD.KAP-00034/PM.22/2017 tanggal 18 Oktober 2017 STTD.KAP-00034/PM.22/2017 dated October 18, 2017
2021	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Harris Siregar, SE.,Ak., CA., CPA, ASEAN CPA., BKP	STTD.KAP-00034/PM.22/2017 tanggal 18 Oktober 2017 STTD.KAP-00034/PM.22/2017 dated October 18, 2017
2020	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Barugamuri Dachi, M. Ak., CA., CPA	STTD.KAP-00034/PM.22/2017 tanggal 18 Oktober 2017 STTD.KAP-00034/PM.22/2017 dated October 18, 2017
2019	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Florus Daeli, SE., Ak., MM., CPA., CA., CRA., CLI., CTA., ASEAN CPA	STTD.KAP-00034/PM.22/2017 tanggal 18 Oktober 2017 STTD.KAP-00034/PM.22/2017 dated October 18, 2017

JASA LAIN DAN BIAYA YANG DIBERIKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tidak memberikan jasa lain selain audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku berakhir.

KOORDINASI AUDITOR EKSTERNAL DAN KOMITE AUDIT

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen Bank Artha Graha Internasional telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh regulator yang disahkan dalam RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit. Komite Audit senantiasa memberikan saran, rekomendasi, dan pendapat yang bersifat independen terkait permasalahan yang dihadapi. Selain itu, hasil pendampingan dan pengawasan secara intensif yang dilakukan akan dilaporkan kepada Direksi Bank.

OTHER SERVICES AND FEES PROVIDED BY PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND PUBLIC ACCOUNTANT

The Public Accounting Firm and Public Accountant did not provide other services other than the audit of the annual financial statements in the financial year ended.

EXTERNAL AUDITOR AND AUDIT COMMITTEE COORDINATION

The appointment of Bank Artha Graha Internasional's Independent Public Accounting Firm is in accordance with the procedures regulated by the regulators and authorized in the Annual GMS based on the recommendation of the Audit Committee. The Audit Committee always provides independent advice, recommendations and opinions related to the problems encountered. In addition, the results of intensive assistance and supervision carried out will be reported to the Bank's Board of Directors.

FUNGSI KEPATUHAN

Compliance Function

Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan sebagai unit independen yang membantu pelaksanaan tugas dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan Bank dipimpin oleh Kepala Divisi yang telah memenuhi kriteria sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan beserta Divisi Kepatuhan wajib memegang teguh independensi dalam memberikan pendapat tanpa memihak kepada kepentingan pihak lain, menjunjung tinggi integritas serta tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan Bank. Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan. Limit ditentukan secara jelas sesuai persetujuan Komite Manajemen Risiko.

DASAR HUKUM

Cakupan Fungsi Kepatuhan Bank Artha Graha Internasional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA FUNGSI KEPATUHAN

Pedoman terkait tata kerja fungsi Kepatuhan Bank tertuang dalam Pedoman Tata Kerja Direktorat Compliance No. 10100.05.0 tanggal 28 Februari 2023 tentang Pedoman Tata Kerja Sub Direktorat Compliance dan APU PPT.

PROFIL KEPALA SATUAN KERJA KEPATUHAN

Profil Ponttie Prasnanugraha Perkasa sebagai *Deputy Director Compliance* Bank dapat dilihat pada profil Pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.

The Bank has established a Compliance Working Unit/ Compliance Division as an independent unit that assists the implementation of the duties of the Director in charge of the Compliance Function and is directly responsible to the Director in charge of the Compliance Function. The Bank's Compliance Working Unit is led by a Division Head who has met the criteria as the Head of Compliance Working Unit as stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 concerning Implementation of Compliance Function of Commercial Banks.

In carrying out the compliance function, the Compliance Director and the Compliance Division must uphold independence in providing opinions without favoring the interests of other parties, upholding integrity and not using information obtained for personal/group interests outside the interests of the Bank. Officers and staff in the compliance work unit are prohibited from being placed in a position to face conflicts of interest in carrying out the responsibilities of the Compliance Function. Limits are clearly defined in accordance with the approval of the Risk Management Committee.

LEGAL BASIS

The scope of the Compliance Function of Bank Artha Graha Internasional in carrying out its duties and responsibilities is guided by the Financial Services Authority Regulation No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks.

COMPLIANCE FUNCTION GUIDELINES

Guidelines related to the work procedures of the Bank's Compliance function are contained in the Compliance Directorate Work Procedure Guidelines No. 10100.05.0 dated February 28, 2023 concerning Work Procedure Guidelines for the Sub-Directorate of Compliance and AML CTF.

PROFILE OF COMPLIANCE WORKING UNIT HEAD

The profile of Ponttie Prasnanugraha Perkasa as the Bank's Deputy Director Compliance is available in the Executive Officer profile in this Annual Report.

STRATEGI FUNGSI KEPATUHAN

1. Meningkatkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan prinsip kepatuhan (*compliance principles*) dalam pengembangan kegiatan usaha dan operasional melalui layanan perbankan digital (*digital banking*) dan layanan lainnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan berlaku;
2. Mematuhi seluruh peraturan perbankan yang berlaku, dalam meminimalkan risiko kepatuhan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan operasional Bank khususnya layanan perbankan digital (*digital banking*); dan
3. Kepatuhan merupakan tanggung jawab seluruh karyawan unit kerja pada Bank, sehingga setiap jenjang tingkatan organisasi pada seluruh kegiatan usaha Bank memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap terciptanya budaya kepatuhan (*compliance culture*), sedangkan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai *supporting unit* dan *strategic business partner* melaksanakan fungsi kepatuhan Bank dalam mendukung budaya kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan dengan baik dengan melakukan *reminder* kembali.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab dari Fungsi Kepatuhan Bank Artha Graha Internasional di antaranya:

1. Merumuskan strategi dalam mendorong terciptanya budaya kepatuhan, dengan melakukan langkah-langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh aktivitas usaha bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha bank sesuai ketentuan Otoritas atau regulator serta perundang-undangan yang berlaku, dengan melakukan penilaian dan evaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank;
3. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan berlaku, dengan melakukan review atau kajian kepatuhan terhadap aktivitas/produk yang akan diterbitkan;
4. Melakukan analisis secara rutin dan memberi masukan terhadap regulasi baru yang berdampak signifikan terhadap Bank Artha Graha Internasional kepada manajemen dan tindak lanjutnya;
5. Memastikan terkait kesiapan atas pengembangan, perubahan status dan penutupan jaringan kantor;
6. Memantau terhadap pemenuhan rasio kepatuhan dalam rangka prinsip kehati-hatian Bank;
7. Melakukan pengawasan kegiatan penyelesaian pengaduan Nasabah;

COMPLIANCE FUNCTION STRATEGY

1. *Improving prudential principles and compliance principles in the development of business activities and operations through digital banking services and other services properly and correctly in accordance with applicable regulations;*
2. *Complying with all applicable banking regulations, in minimizing compliance risks related to the Bank's business activities and operations, especially digital banking services; and*
3. *Compliance is the responsibility of all employees of work units in the Bank, so that each level of organization in all business activities of the Bank has its own responsibility for the creation of a compliance culture, while the Compliance Working Unit as a supporting unit and strategic business partner carries out the Bank's compliance function in supporting the compliance culture to manage compliance risk properly by conducting reminders.*

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of the Compliance Function of Bank Artha Graha Internasional include:

1. *Formulating strategies to encourage the creation of a culture of compliance, by taking steps to support the creation of a culture of compliance in all bank business activities at every level of the organization;*
2. *Ensuring that all policies, provisions, systems and procedures as well as the Bank's business activities are in accordance with the provisions of the Authority or regulator as well as applicable laws, by assessing and evaluating the effectiveness, adequacy and suitability of the Bank's policies, provisions, systems and procedures;*
3. *Taking precautions so that policies or decisions taken by the Board of Directors do not deviate from the applicable provisions, by conducting a review or compliance study of activities/products to be issued;*
4. *Conducting regular analysis and providing feedback on new regulations that have a significant impact on Bank Artha Graha Internasional to the management and its follow-up;*
5. *Ensuring readiness for the development, change of status and closure of the office network;*
6. *Monitoring the fulfillment of compliance ratios in the framework of the Bank's prudential principles;*
7. *Supervising Customer complaint resolution activities;*

8. Melakukan *monitoring* dan *reminder* terhadap penyampaian seluruh kepatuhan pelaporan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait, sesuai dengan waktu yang ditetapkan; dan
9. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang telah disepakati oleh Bank dengan Otoritas pengawasan yang berwenang.

8. *Monitoring and reminding the submission of all compliance reporting to Bank Indonesia or the Financial Services Authority carried out by related work units, in accordance with the specified time; and*
9. *Ensuring the Bank's compliance with the commitments agreed by the Bank with the authorized supervisory authorities.*

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA FUNGSI KEPATUHAN

1. Pemantauan terhadap pencapaian RBB sebagai wujud terlaksananya komitmen pencapaian sesuai dengan strategi yang ditetapkan dalam RBB;
2. Penyusunan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur internal serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengelola risiko kepatuhan dalam pelaksanaan praktik tata kelola bank yang sehat dalam memantau pelaksanaan perkreditan maupun operasional untuk menekan risiko kerugian yang terjadi akibat adanya pelaksanaan yang tidak sesuai prosedur berlaku;
4. Pemantauan terhadap pemenuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia maupun Otoritas lain yang berwenang; dan
5. Memberikan pemahaman kepada seluruh karyawan atas pelaksanaan program APU-PPT dalam mengenal profil nasabah (*know your customer*) untuk mencegah penyalahgunaan atas pembukaan rekening untuk tindakan penipuan oleh nasabah.

IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE FUNCTION WORK PROGRAMS

1. *Monitoring RBB achievements as a form of implementation of achievement commitments in accordance with the strategies set out in the RBB;*
2. *Preparing internal policies, provisions, systems and procedures as well as business activities the Bank in accordance with the provisions of Bank Indonesia, the Financial Services Authority and applicable laws and regulations;*
3. *Managing compliance risk in the implementation of sound bank governance practices in monitoring the implementation of credit and operations to minimize the risk of losses incurred due to the existence of the Bank's compliance risk;*
4. *Monitoring the fulfillment of the Bank's commitments to the Financial Services Authority, Bank Indonesia and other authorized authorities; and*
5. *Providing understanding to all employees on the implementation of AML-CTF program in Know Your Customer (KYC) profile to prevent misuse of account opening for fraud by customers.*

PROGRAM APU, PPT & PPPSPM

AML, CTF & PF-WMD Program

Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) merupakan program yang wajib diterapkan oleh Bank dalam melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan pengguna jasa Bank. Secara operasional dalam penerapannya di Bank, Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM telah diatur dalam Kebijakan, Standar Prosedur maupun Petunjuk Teknis APU, PPT & PPPSPM.

Tujuan penerapan program adalah untuk mencegah dan melindungi Bank agar tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang (*Money Laundering*) dan pendanaan terorisme termasuk pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pelaku kejahatan.

DASAR HUKUM

Pembentukan unit kerja APU PPT Bank dilakukan dengan berpedoman kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan; dan
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.

PEDOMAN APU, PPT & PPPSPM

Penyusunan pedoman APU, PPT & PPPSPM tertuang dalam Surat Edaran Operasi No. 138.10.2 tanggal 23 Desember 2024 tentang Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM).

PENERAPAN APU, PPT & PPPSPM

Pelaksanaan APU, PPT & PPPSPM Bank Artha Graha Internasional mengacu pada 5 (lima) pilar yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Fungsi pelaksanaan, pengawasan, serta penerapan APU, PPT & PPPSPM telah dilakukan oleh pengurus dengan memberikan rekomendasi terhadap Laporan Triwulan yang disampaikan oleh Unit Kerja APU PPT.

The Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorism Financing (CTF) and Prevention of the Financing of Weapons of Mass Destruction Proliferation (PF-WMD) Program is a program that must be implemented by the Bank in conducting business relationships with prospective customers and users of Bank services. In its implementation at the Bank, the AML, CTF & PF-WMD Program has been regulated in the AML, CTF & PF-WMD Policy, Standard Procedures and Technical Guidelines.

The purpose of implementing the program is to prevent and protect the Bank from being used as a means of money laundering crimes and the funding of terrorism including the funding of proliferation of weapons of mass destruction carried out directly or indirectly by criminals.

LEGAL BASIS

The establishment of the Bank's AML CTF work unit is carried out by referring to:

1. *Financial Services Authority Regulation No. 8 of 2023 dated June 14, 2023 on the Implementation of Anti-Money Laundering Program, Prevention of Financing of Terrorism, and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector; and*
2. *Circular Letter of the Financial Services Authority No. 32/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Programs in the Banking Sector.*

AML, CTF & PF-WMD GUIDELINE

The preparation of AML, CTF & PF-WMD guidelines is contained in Operational Circular No. 138.10.2 dated December 23, 2024 concerning Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML, CTF & PF-WMD).

AML, CTF & PF-WMD IMPLEMENTATION

The implementation of AML, CTF & PF-WMD of Bank Artha Graha Internasional refers to 5 (five) pillars, namely:

1. *Active Supervision of the Board of Commissioners and Directors*

The function of implementation, supervision, and implementation of AML, CTF & PF-WMD has been carried out by the management by providing recommendations on the Quarterly Report submitted by the AML, CTF Work Unit.

2. Kebijakan dan Prosedur
Penerapan program APU, PPT & PPPSPM tertuang dalam Surat Edaran Operasi No. 138.10.2 tanggal 23 Desember 2024 tentang Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM) yang pelaksanaannya terus dilaksanakan secara bertahap, konsisten, serta berkesinambungan.
 - a. Penomoran *Customer Identification File* (CIF) nasabah dengan menganut *single* CIF;
 - b. Kelengkapan data nasabah baru pada *system core banking* dan pembaruan data nasabah;
 - c. Pengawasan dan *monitoring* terhadap transaksi keuangan nasabah untuk mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan; dan
 - d. Pengawasan dan *monitoring* nasabah berisiko tinggi (*high risk customer*).
3. Pengendalian Internal
Pemeriksaan rutin dilaksanakan oleh Internal Audit guna melihat efektivitas pelaksanaan program APU PPT pada kantor cabang dan kantor pusat. Hasil pemeriksaan disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan, dimana setiap temuan akan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja APU PPT, unit kerja terkait di Kantor Pusat dan kantor cabang terkait.
4. Sistem Informasi Manajemen
Bank senantiasa mengembangkan sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif dan efisien. Sistem informasi manajemen tersebut mengidentifikasi karakteristik nasabah dan pola transaksi yang dilakukan untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan internal maupun eksternal. Saat ini, Bank sudah mempunyai sistem baru yang disebut aplikasi APU PPT yang telah diimplementasikan pada awal bulan Februari 2021.
5. *Human Capital* dan Pelatihan
Pelatihan APU, PPT & PPPSPM terus dilakukan secara berkesinambungan untuk semua karyawan. Sedangkan untuk karyawan yang berhadapan langsung dengan nasabah dan karyawan pelaksana yang terkait langsung dengan pelaksanaan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, pelatihan rutin dilakukan dalam bentuk *refreshment*.

PROGRAM KERJA APU PPT TAHUN 2024

1. Menyampaikan laporan terkait APU-PPT (LTKT - Laporan Transaksi Keuangan Tunai, LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, LTKL - Laporan Transaksi Dana dari dan ke Luar Negeri) dan Laporan Sipesat kepada PPATK;

2. *Policies and Procedures*
The implementation of the AML, CTF & PF-WMD program is stipulated in Operations Circular No. 138.10.2 dated December 23, 2024 concerning Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Prevention of Financing for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML, CTF & PF-WMD) are implemented in a gradual, consistent, and continuous manner.
 - a. *Customer Identification File (CIF) numbering with single CIF;*
 - b. *Completeness of new customer data in the core banking system and customer data updates;*
 - c. *Supervision and monitoring of customer financial transactions to detect suspicious financial transactions; and*
 - d. *Supervision and monitoring of high risk customers.*
3. *Internal Control*
Routine checks are carried out by Internal Audit to see the effectiveness of the implementation of the AML CTF program at branch offices and head office. The examination results are submitted in the form of an Audit Report, where each finding will be followed up by the AML CTF Work Unit, related work units at the Head Office and related branch offices.
4. *Management Information System*
The Bank continues to develop information systems that can identify, analyze, monitor, and provide reports effectively and efficiently. The management information system identifies customer characteristics and transaction patterns to be adjusted to internal and external needs. Currently, the Bank has a new system called the AML CTF application which was implemented in early February 2021.
5. *Human Capital and Training*
AML, CTF & PF-WMD training is continuously conducted for all employees. As for employees who deal directly with customers and implementing employees who are directly related to the implementation of Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, routine training is carried out in the form of refreshment.

AML CTF WORK PROGRAM IN 2024

1. *Submitted reports related to AML-CTF (LTKT - Cash Financial Transaction Report, LTKM - Suspicious Financial Transaction Report, LTKL - Fund Transaction Report from and to Overseas) and Sipesat Report to PPATK;*

2. Penilaian risiko TPPU-TPPT berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA);
3. Pengkinian data nasabah; dan
4. Sosialisasi APU, PPT & PPPSPM kepada seluruh karyawan secara berkelanjutan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERKAIT APU PPT

PPATK

1. Pertemuan Koordinasi Tahun 2024;
2. Program Mentoring Berbasis Risiko TPPU dan TPPT yang Berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pada Teknologi Finansial Tahun 2024;
3. Pertemuan Koordinasi CAT (*Colaborative Analisis Team*);
4. Pertemuan Koordinasi Tim Kerja Analisis Kolaboratif terkait Pemilu dan Pilkada 2024;
5. *Kick Off* Penilaian Efektivitas Kinerja PPATK Tahun 2024;
6. Rapat Koordinasi terkait *Data Masking*;
7. *Launching* Pelaksanaan FIR on ML/TF tahun 2024;
8. Seminar internasional PPATK dan Unair "*Green Financial Crime*";
9. Diseminasi Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja PPATK Tahun 2024; dan
10. Seminar "Mengantisipasi Tantangan dan Kejahatan Baru di Era Ekonomi Digital 5.0".

OJK

1. *Coaching* Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko TPPU, TPPT dan/atau PPSPM secara Individu (IRA) oleh OJK;
2. Rapat Dengan Pendapat RPOJK SIPELAKU;
3. Seminar Kesiapan Penyusunan IRA dan Penguatan Indikator TKM bagi PJK;
4. Sosialisasi terkait Pemanfaatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha;
5. Webinar Penanganan Kejahatan Siber termasuk Perjudian Daring sebagai Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Rapat Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Pembukaan & Penutupan Rekening RKDK;
7. *How to Prevent Money Laundering and Terrorism Financing*;

2. Conducted Risk assessment of ML-TPPT based on Risk Based Approach (RBA);
3. Updated customer data; and
4. Conducted Socialization of AML, CTF & PF-WMD to all employees on an ongoing basis.

COMPETENCY DEVELOPMENT RELATED TO AML CTF

PPATK

1. 2024 Coordination Meeting;
2. 2024 Risk-Based Mentoring Program on ML/TF Originating from Human Trafficking and Financial Technology Crimes;
3. Coordination Meeting of the Collaborative Analysis Team (CAT);
4. Coordination Meeting of the Collaborative Analysis Working Group Related to the 2024 General and Regional Elections;
5. Kick-Off for the 2024 PPATK Performance Effectiveness Assessment;
6. Coordination Meeting on Data Masking;
7. Launch of the 2024 FIR on ML/TF Implementation;
8. PPATK and Airlangga University International Seminar on "Green Financial Crime";
9. Dissemination of the 2024 PPATK Performance Effectiveness Index Assessment Results; and
10. Seminar on "Anticipating New Challenges and Crimes in the Digital Economy 5.0 Era"

OJK

1. Coaching on the Preparation of Individual Risk Assessment (IRA) Documents for ML/TF and/or Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction by Financial Service Providers
2. Hearing Session on the Draft OJK Regulation (RPOJK) on SIPELAKU
3. Seminar on IRA Preparation Readiness and Strengthening TKM Indicators for Financial Service Providers
4. Socialization on the Use of Business Identification Numbers (NIB) for Business Actors
5. Webinar on Tackling Cybercrime Including Online Gambling as Predicate Offenses of Money Laundering
6. Coordination Meeting on the Preparation of Technical Guidelines for Opening & Closing RKDK Accounts
7. How to Prevent Money Laundering and Terrorism Financing

8. Bedah Buku Terkait Keamanan Siber;
9. Kelas Literasi OJK : UU Perampasan Aset, Mengapa Harus Disahkan; dan
10. Sosialisasi SIGAP 2024.

FKDKP

1. *Training* Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Tindak Pidana Asal;
2. FGD FKDKP - Kesiapan Industri Perbankan dalam Implementasi UU No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; dan
3. Kelengkapan Data guna Analisa dalam Pelaporan goAML kepada PPAATK.

ADVANCE AI

1. *Seminar Transformative Role of eKYCP Solutions.*

ASPI

1. Diskusi terkait kebijakan dan solusi untuk data transaksi yang masih di-*masking*; dan
2. *Update* Pembentukan IASC (Indonesia Anti Scam Centre).

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh Bank secara berkesinambungan dan dirancang untuk dapat memberikan keyakinan yang sesuai dengan pencapaian seperti:

1. Pengendalian kegiatan operasional yang efektif dan efisien;
2. Pengendalian keuangan dan keandalan laporan keuangan;
3. Ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Penjagaan terhadap aset.

Dengan penerapan sistem pengendalian internal, Bank berusaha untuk mengelola risiko-risiko ke tingkat yang dapat ditoleransi.

8. *Book Review on Cybersecurity*
9. *OJK Literacy Class: Asset Forfeiture Law — Why It Must Be Enacted*
10. *2024 SIGAP Socialization*

FKDKP

1. *Training on Identifying Suspicious Financial Transactions & Determining Predicate Crimes;*
2. *FKDKP Focus Group Discussion — Banking Industry Readiness in Implementing Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection; and*
3. *Data Completeness for Analysis in goAML Reporting to PPAATK.*

ADVANCE AI

1. *Seminar on the Transformative Role of eKYCP Solutions.*

ASPI

1. *Discussion on policies and solutions for masked transaction data; and*
2. *Update on the Establishment of the Indonesia Anti-Scam Centre (IASC)*

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The internal control system is a supervisory process mechanism established by the Bank on an ongoing basis and is designed to provide appropriate assurance in achieving such objectives:

1. *Effective and efficient control of operational activities;*
2. *Financial control and reliability of financial statements;*
3. *Adherence and compliance with applicable laws and regulations; and*
4. *Safeguarding of assets.*

By implementing an internal control system, the Bank strives to manage risks to a tolerable level.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; dan
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

KESESUAIAN DENGAN COSO (INTERNAL CONTROL FRAMEWORK)

Bank Artha Graha Internasional menerapkan sistem pengendalian internal yang terdiri atas dua aspek penting yaitu pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Pengendalian internal atas operasional dan Pelaporan Keuangan Bank dijalankan berdasarkan acuan internasional COSO - *Internal Control Integrated Framework* yang meliputi 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Aktivitas Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi; dan
5. Kegiatan Pemantauan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL YANG MENYELURUH

Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan efisien yang menjadi tanggung jawab keseluruhan unit kerja operasional maupun unit kerja pendukung. Pengendalian internal ini dilakukan dalam setiap aktivitas *front end control* dan harus mematuhi prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*). Berikut fungsi yang menjalankan pengawasan dalam pengendalian internal:

1. Sub Direktorat Control untuk pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan internal Bank melalui pemeriksaan operasional secara periodik dan harian dengan penerapan *back end control*;
2. Direktorat Compliance untuk pengawasan kepatuhan terhadap penerapan ketentuan eksternal yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam penetapan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;

LEGAL BASIS

1. *Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks;*
2. *Circular Letter of the Financial Services Authority No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks; and*
3. *Circular Letter of the Financial Services Authority No. 35/SEOJK.03/2017 concerning Guidelines for Internal Control System Standards for Commercial Banks.*

WITH COSO (INTERNAL CONTROL FRAMEWORK)

Bank Artha Graha Internasional implements an internal control system that consists of two important aspects, namely operational control and financial control. Internal control over the Bank's operations and financial reporting is based on the international reference of COSO - *Internal Control Integrated Framework* which includes 5 (five) control components, namely:

1. *Control Environment;*
2. *Risk Assessment;*
3. *Control Activities;*
4. *Information and Communication; and*
5. *Monitoring Activities.*

COMPREHENSIVE INTERNAL CONTROL SYSTEM

An effective and efficient Internal Control System is the responsibility of all operational and supporting work units. This internal control is carried out in every front end control activity and must comply with the separation of functions principle (*four eyes principle*). The following functions carry out supervision in internal control:

1. *Sub Directorate Control to supervise compliance with the Bank's internal regulations through periodic and daily operational checks with the implementation of back end control;*
2. *Compliance Directorate to supervise compliance with the application of applicable external regulations to prevent irregularities committed by management in determining policies related to prudential principles;*

3. Direktorat Risk Management melaksanakan kaji ulang secara bertahap dengan menetapkan:
 - a. Kecukupan kerangka manajemen risiko;
 - b. Keakuratan metodologi penilaian risiko; dan
 - c. Kecukupan sistem informasi manajemen risiko.
4. Internal Audit
 - a. Melakukan kaji ulang penerapan manajemen risiko secara berkala.
 - b. Melakukan pemeriksaan sampling secara periodik dan berdasarkan basis risiko.

TINJAUAN HASIL EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bank Artha Graha Internasional melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dengan memprioritaskan pemantauan risiko utama, termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan-satuan kerja operasional maupun *Internal Audit*, *Control*, *Risk Management*, dan *Compliance*. Selanjutnya, hasil evaluasi dikomunikasikan dengan Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit agar diperoleh rekomendasi perbaikan guna mencapai peningkatan yang berkelanjutan dari setiap lini usaha Bank.

TINJAUAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL

Bank telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal atas Laporan Keuangan *Audited* periode 31 Desember 2024. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Komisaris dan Direksi menyimpulkan bahwa hingga 31 Desember 2024, sistem Pengendalian Internal Perseroan atas Laporan Keuangan telah berjalan dengan efektif.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi berpandangan bahwa penerapan sistem pengendalian intern sudah berjalan dengan baik. Dalam pengawasan terhadap penerapan sistem pengendalian internal, Direksi dibantu oleh Internal Audit yang merupakan Satuan Kerja dalam organisasi Bank. Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan Aktivitas Internal Audit.

3. *The Risk Management Directorate carries out a phased review by establishing:*
 - a. *Adequacy of the risk management framework;*
 - b. *The accuracy of the risk assessment methodology; and*
 - c. *Adequacy of risk management information system.*
4. *Internal Audit:*
 - a. *Conducts periodic reviews of risk management implementation.*
 - b. *Conducts sampling checks periodically and on a risk basis.*

REVIEW OF INTERNAL CONTROL SYSTEM EVALUATION RESULTS

Bank Artha Graha Internasional evaluates the effectiveness of the internal control system by prioritizing the monitoring of key risks, including periodic evaluations, both by operational work units and Internal Audit, Control, Risk Management, and Compliance. Furthermore, the evaluation results are communicated with the Board of Directors and reported to the Board of Commissioners through the Audit Committee in order to obtain recommendations for improvement in order to achieve continuous improvement of each line of business of the Bank.

REVIEW OF INTERNAL CONTROL EFFECTIVENESS

The Bank has evaluated the effectiveness of the internal control system over the Audited Financial Statements for the period of December 31, 2024. Based on the evaluation, the Board of Commissioners and Board of Directors concluded that until December 31, 2024, the Company's Internal Control system over the Financial Statements had been running effectively.

STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors is of the view that the internal control system has been implemented successfully. In monitoring the implementation of the internal control system, the Board of Directors is assisted by the Internal Audit Unit, which is a working unit within the Bank's organization. In performing its duties, Internal Audit communicates directly with the Board of Commissioners through the Audit Committee to inform various matters related to Internal Audit activities.

PERKARA HUKUM

LEGAL CASES

Permasalahan Hukum <i>Legal Cases</i>	Jumlah <i>Total</i>		
	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>	PKPU/Pailit <i>PKPU/Bankruptcy</i>
Telah Selesai <i>Resolved</i>	13	1	5
Dalam proses Penyelesaian <i>In the Settlement Process</i>	32	23	12
Jumlah <i>Total</i>	45	24	17

No	PERDATA <i>CIVIL CASE</i>	
1	Para Pihak <i>Parties</i>	Penggugat/ <i>Plaintiff</i> : PT Hayam Wuruk Sakti Tergugat/ <i>Defendant</i> : PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
	Pokok Perkara <i>Subject Matter</i>	Perbuatan Melawan Hukum <i>Unlawful Act</i>
	Status Perkara <i>Case Status</i>	Gugatan Dicabut <i>Lawsuit Withdrawn</i>
	Pengaruh Terhadap Kinerja Bank <i>Effect on Bank Performance</i>	Tidak Signifikan karena telah dilakukan Mitigasi <i>Not Significant as Mitigation has been implemented</i>
	Saksi Administratif <i>Administrative Sanctions</i>	Tidak Ada Sanksi Administratif <i>No Administrative Sanctions</i>
2	Para Pihak <i>Parties</i>	Penggugat/ <i>Plaintiff</i> : PT Royal Abadi Dentalindo Tergugat/ <i>Defendant</i> : PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
	Pokok Perkara <i>Subject Matter</i>	Perbuatan Melawan Hukum <i>Unlawful Act</i>
	Status Perkara <i>Case Status</i>	Gugatan Dicabut <i>Lawsuit Withdrawn</i>
	Pengaruh Terhadap Kinerja Bank <i>Effect on Bank Performance</i>	Tidak Signifikan karena telah dilakukan Mitigasi <i>Not Significant as Mitigation has been implemented</i>
	Saksi Administratif <i>Administrative Sanctions</i>	Tidak Ada Sanksi Administratif <i>No Administrative Sanctions</i>

SANKSI ADMINISTRATIF

Bank mendapatkan sanksi administratif yang tidak signifikan oleh otoritas yang berwenang selama tahun 2024 dalam rangka pembinaan.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

The Bank received insignificant administrative sanctions by the authority in 2024 in the context of guidance.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Access to Company Information and Data

Bank Artha Graha Internasional menyediakan kemudahan akses untuk mendapatkan informasi dan data perusahaan bagi para pemegang saham maupun masyarakat luas.

Informasi yang disajikan beragam terkait dengan produk, jasa, berita terkini, kinerja bank hingga pengembangan yang sedang dan sudah dilaksanakan, secara terbuka disajikan kepada masyarakat dalam bentuk informasi baik itu melalui media cetak, televisi ataupun daring seperti *website* dan media sosial. Informasi tersebut disediakan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin dengan berdasarkan prinsip transparansi/keterbukaan dari GCG yang dapat diperoleh melalui:

1. Situs web Bank Artha Graha Internasional: www.arthagraha.com;
2. Corporate Secretary;
3. Graha Call: 0800-191-8880;
4. Graha Chat: 0811-191-88880;
5. Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan;
6. *Press release* secara berkala pada media cetak maupun daring;
7. Media Sosial: Instagram, Facebook, X, TikTok, dan Youtube; dan
8. Media Gathering, Media Conference dan Press Conference.

SITUS WEB

Situs web resmi Bank adalah www.arthagraha.com yang dapat diakses oleh pemegang saham, nasabah, maupun publik secara luas. Para pemangku kepentingan dapat menemukan informasi, seperti Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keuangan Tahunan, Visi dan Misi, Sejarah, Struktur Organisasi, Dewan Komisaris, Direksi, CSSR, Tata Kelola Perusahaan, Anggaran Dasar, Produk & Layanan, Berita, Karir dan lainnya.

MEDIA CETAK

Bank juga menggunakan media cetak untuk mempublikasikan seluruh kegiatan perusahaan yang perlu diketahui oleh Pemegang Saham, Pemangku Kepentingan, dan Publik.

Bank Artha Graha Internasional provides easy access to company information and data for both shareholders and the general public.

The information presented covers a wide range, including products, services, latest news, bank performance, and ongoing and completed developments, all transparently shared with the public through various media, such as print, television, and online platforms like the website and social media. This information is available in Indonesian, English, and Mandarin, following the principles of transparency/disclosure from Good Corporate Governance (GCG), and can be accessed through the following channels:

1. Bank Artha Graha Internasional website: www.arthagraha.com;
2. Corporate Secretary;
3. Graha Call: 0800-191-8880;
4. Graha Chat: 0811-191-88880;
5. Annual Reports and Sustainability Reports;
6. *Press releases* published periodically in print and online media;
7. Social Media: Instagram, Facebook, X, TikTok, and YouTube;
8. Media Gatherings, Media Conferences, and Press Conferences.

WEBSITE

The official website of the Bank is www.arthagraha.com, accessible to shareholders, customers, and the general public. Stakeholders can find information such as Annual Reports, Sustainability Reports, Financial Statements, Vision and Mission, History, Organizational Structure, Board of Commissioners, Board of Directors, CSSR, Corporate Governance, Articles of Association, Products & Services, News, Careers, and other relevant details.

PRINT MEDIA

The Bank also utilizes print media to publish important company activities that need to be shared with Shareholders, Stakeholders, and the Public.

SIARAN PERS

Siaran pers yang telah dipublikasikan oleh Bank Artha Graha Internasional sebanyak 12 (dua belas) siaran pers pada tahun 2024 yang antara lain berisi:

PRESS RELEASE

The press releases published by Bank Artha Graha Internasional amounted to 12 (twelve) press releases in 2024, which include the following:

Tanggal Date	Tempat Venue	Siaran Pers Press Release
12 Januari 2024 January 12, 2024	Jakarta	Menabung Berhadiah Logam Mulia dari Bank Artha Graha Internasional Save and Win Precious Metal with Bank Artha Graha Internasional
15 Januari 2024 January 15, 2024	Jakarta	Buka Tabungan di Bank Artha Graha Internasional, Impian Jadi Kenyataan Open a Savings Account at Bank Artha Graha Internasional and Make Your Dreams Come True
16 Februari 2024 February 16, 2024	Jakarta	Berikan Nilai Tambah, Bank Artha Graha dan Tokio Marine Sepakati Kerja Sama Bancassurance Adding Value, Bank Artha Graha and Tokio Marine Sign Bancassurance Partnership
3 Maret 2024 March 3, 2024	Medan	Perbanas Mewariskan Bumi Yang Lebih Hijau Untuk Generasi Mendatang Perbanas Leaves a Greener Earth for Future Generations
7 April 2024 April 7, 2024	Jakarta	Bank Artha Graha Internasional dan BAZNAS DKI Bekerjasama untuk Zakat dan Pemberdayaan Disabilitas Bank Artha Graha Internasional and BAZNAS DKI Collaborate on Zakat and Disability Empowerment
20 April 2024 April 20, 2024	Solo	Tingkatkan Pelayanan Nasabah, Bank Artha Graha Internasional Resmikan Relokasi Kantor Cabang Solo Enhancing Customer Service, Bank Artha Graha Internasional Inaugurates Relocated Solo Branch
4 Juni 2024 June 4, 2024	Jakarta	Bank Artha Graha dan Artha Graha Network Dukung Kemala Run 2024, Berikan Program Menarik Bank Artha Graha and Artha Graha Network Support Kemala Run 2024 with Exciting Programs
17 Juni 2024 June 17, 2024	Jakarta	Berbagi Berkah Kurban Bersama Bank Artha Graha Internasional: Kontribusi untuk Kesejahteraan Sosial Sharing the Blessings of Eid al-Adha with Bank Artha Graha Internasional: A Contribution to Social Welfare
30 Juni 2024 June 30, 2024	Denpasar	Bank Artha Graha Internasional Dukung Kompetisi Basket 3×3 Terbesar di Bali Bank Artha Graha Internasional Supports Bali's Largest 3×3 Basketball Competition
27 Agustus 2024 August 27, 2024	Washington	Bank Artha Graha Internasional Hadiri WOW Indonesia Festival 2024 di Washington D.C Bank Artha Graha Internasional Attends WOW Indonesia Festival 2024 in Washington, D.C.
10 September 2024 September 10, 2024	Jakarta	HUT ke-51, Bank Artha Graha Internasional Selaraskan Inovasi dan Sinergi Menuju Prestasi Terbaik Celebrating 51st Anniversary, Bank Artha Graha Internasional Aligns Innovation and Synergy Toward Excellence
6 Oktober 2024 October 6, 2024	Jakarta	Peoplefest Sebagai Momentum Penerapan Digitalisasi Perbankan Bank Artha Graha Internasional Peoplefest as a Milestone in Digital Banking Implementation by Bank Artha Graha Internasional

PUBLIC EXPOSE

Komitmen keterbukaan informasi juga diwujudkan dengan penyelenggaraan paparan publik (*public expose*) setiap tahun. Pada tahun 2024, Bank menyelenggarakan *Public Expose* pada tanggal 26 Juni 2024 dengan penyajian materi disampaikan oleh Bapak Indrastomo Nugroho selaku Direktur, Ibu Susana selaku *Chief Financial Officer*, dan Bapak Elvin Halim selaku *Corporate Secretary* Perseroan dan dihadiri oleh beragam kalangan diantaranya jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Bank, serta wartawan/media pers.

PUBLIC EXPOSE

The commitment to transparency is also manifested in the annual public expose. In 2024, the Bank held its Public Expose on June 26, 2024, where the material presentation was delivered by Mr. Indrastomo Nugroho as the Director, Mrs. Susana as the Chief Financial Officer, and Mr. Elvin Halim as the Corporate Secretary of the Company. The event was attended by various groups, including members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, shareholders of the Bank, as well as journalists and media representatives.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN PERUSAHAAN

Transparency of Company's Financial and Non-Financial Conditions

Bank menaati ketentuan terkait kewajiban penyajian informasi secara terbuka dalam situs web Bank dan sistem Pelaporan OJK terkait kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

The Bank complies with the provisions related to the obligation to publicly disclose information on the Bank's website and OJK Reporting system regarding financial and non-financial conditions to stakeholders and the Financial Services Authority as follows:

Transparansi Kondisi Keuangan <i>Transparency of Financial Conditions</i>	Transparansi Kondisi Non-Keuangan <i>Transparency of Non-Financial Conditions</i>
Laporan Bulanan mencakup: • Laporan keuangan ringkas secara individu <i>Monthly Reports including:</i> • Individual summarized financial statements	Laporan Bulanan mencakup: • Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK); dan • Laporan Kepemilikan Saham. <i>Monthly Reports including:</i> • Credit Interest Rate Report (SBDK); and • Share Ownership Report.
Laporan Triwulan di antaranya mencakup: • Laporan Keuangan Ringkas Secara Individu dan Konsolidasi; • Kinerja Keuangan; • Laporan <i>Exposure</i> dan Permodalan; dan • Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit. <i>Quarterly Reports including:</i> • Individual and Consolidated Condensed Financial Statements; • Financial Performance; • Exposure and Capital Report; and • Leverage Ratio Report.	Laporan Triwulan di antaranya mencakup: • Informasi Susunan Pengurus dan Pemegang Saham; dan • Informasi Tata Kelola. The Quarterly Report includes, among others: • Information on the Management and Shareholder Composition; and • Information on Governance.
Laporan Tahunan mencakup: • Laporan Keuangan Audited • Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; dan • Laporan Keberlanjutan Emiten atau Perusahaan Publik. <i>The Annual Report includes:</i> • Audited Financial Statements; • Annual Report of the Issuer or Public Company; and • Sustainability Report of the Issuer or Public Company.	Laporan Tahunan mencakup: • Informasi Susunan Pengurus dan Pemegang Saham • Pengungkapan Kuantitatif mengenai Struktur Permodalan dan Kecukupan Permodalan; dan • Pengungkapan Pendekatan Manajemen Risiko Bank. <i>The Annual Report includes:</i> • Information on the Composition of the Board and Shareholders; • Quantitative Disclosure on Capital Structure and Capital Adequacy; and • Disclosure of the Bank's Risk Management Approach.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK

Provision of Funds for Social and/or Political Activities

Bank menjamin dan menghargai hak pengurus dan pegawai Bank untuk menggunakan hak-hak politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Bank melarang keterlibatan Bank termasuk karyawan untuk berkegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Sikap dan perilaku dalam pelayanan keluar dan kedalam sangatlah menentukan dan berdampak luas terhadap citra yang baik dan terhormat. Dalam menyampaikan pendapat terkait isu sosial dan kenegaraan kepada publik, baik secara lisan maupun tertulis, karyawan wajib memastikan bahwa opini tersebut merupakan pandangan pribadi dan tidak menimbulkan persepsi bahwa pernyataan tersebut berasal dari atau mewakili Bank. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan.

The Bank upholds and respects the rights of its management and employees to exercise their political rights in accordance with applicable laws and regulations; however, the Bank prohibits any involvement of the Bank, including its employees, in political activities, including the provision of funds for political purposes. Attitudes and behavior in both external and internal services are crucial and have a broad impact on maintaining a good and respectable image. When expressing opinions on social and national issues to the public, either verbally or in writing, employees must ensure that such opinions represent their personal views and do not create the perception that the statements originate from or represent the Bank. This policy is implemented to preserve the independence and professionalism of both the Bank and its employees.

Bank Artha Graha Internasional aktif berkontribusi untuk kegiatan sosial/*Corporate Social Safety Responsibility* (CSSR), literasi keuangan dan inklusi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kondisi lingkungan hidup serta memberikan citra baik perusahaan di mata masyarakat. Bank juga berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dan komunitas lokal, guna memastikan bahwa program yang dijalankan berdampak nyata dan berkelanjutan. Terkait hal tersebut dapat secara lengkap dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) di dalam buku Laporan Tahunan ini.

Bank Artha Graha Internasional actively contributes to social activities/Corporate Social Safety Responsibility (CSSR), financial literacy, and financial inclusion to enhance community welfare and improve environmental conditions, while also fostering a positive corporate image in the eyes of the public. The Bank also collaborates with various stakeholders, including the government and local communities, to ensure that the programs implemented have a real and sustainable impact. Further details on this matter can be found in the Environmental Social Responsibility (TJSL) chapter of this Annual Report.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT

Sebagai Bank yang menjunjung prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan usaha, Bank Artha Graha Internasional berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 dalam mengambil keputusan terkait pemberian dana kepada pihak terkait dan dana besar.

PROVISION OF FUNDS TO RELATED PARTIES

As a Bank that upholds the prudential principle in business management, Bank Artha Graha Internasional is guided by Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.03/2018 dated December 26, 2018 concerning the Legal Lending Limit (BMPK) and the Provision of Large Exposures for Commercial Banks, as amended by Financial Services Authority Regulation No. 38/POJK.03/2019 dated December 19, 2019, in making decisions related to fund provision to related parties and large exposures.

Penyediaan Dana <i>Provision of Funds</i>	Debitur <i>Debtor</i>	Jumlah <i>Total</i>	
		Penyediaan Dana (Jutaan Rupiah) <i>Provision of Funds (Million Rupiah)</i>	Realisasi (Jutaan Rupiah) <i>Realization (Million Rupiah)</i>
Kepada Debitur Terkait <i>To Related Debtors</i>	7	513.374	330.376
Kepada Debitur Inti <i>To Main Debtor</i>	20	7.814.458	7.060.030
a. Individu <i>a. Individual</i>	16	5.740.693	5.353.972
b. Kelompok <i>b. Group</i>	4	2.073.765	1.706.058
Jumlah <i>Total</i>	27	8.327.832	7.390.406

Kredit (Jutaan Rupiah) <i>Loans (Million Rupiah)</i>	
Kredit Produktif <i>Productive Kredit</i>	8.264.969
Kredit Konsumtif <i>Consumptive Kredit</i>	2.340.510
Jumlah <i>Total</i>	10.605.479

PELANGGARAN (FRAUD) INTERNAL

Bank Artha Graha Internasional berupaya melakukan berbagai pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya internal fraud yang dilakukan oleh seluruh insan perusahaan. Langkah ini ditempuh guna mengurangi penyimpangan internal (*Internal Fraud*) yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honorer*) dan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) yang berpotensi memengaruhi kondisi kinerja perusahaan.

INTERNAL FRAUD

Bank Artha Graha Internasional strives to implement various preventive measures against the potential occurrence of internal fraud committed by all individuals within the company. This initiative is undertaken to minimize internal misconduct (Internal Fraud) involving members of the Board of Commissioners and Board of Directors, permanent employees, non-permanent (contract) employees, and outsourced personnel, which could potentially impact the company's performance.

Tabel berikut menjelaskan penyimpangan/kecurangan terkait proses kerja dan kegiatan operasional Bank pada tahun 2024:

The following table describes irregularities/fraud related to the Bank's work processes and operational activities in 2024:

Uraian Description	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Members of the Board of Commissioners and Directors		Pegawai Tetap Permanent Employees		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya Contract Employees and Outsourced Labor	
	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year
Total Fraud Total Fraud	-	-	1	-	1	-
Telah Diselesaikan Resolved	-	-	1	-	1	-
Dalam Proses Penyelesaian Internal Bank In the Process of Internal Settlement	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian Settlement Not Yet Attempted	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Followed Up Through Legal Process	-	-	1	-	1	-

KODE ETIK

Kode Etik (Code of Conduct) merupakan pedoman perilaku Jajaran Bank Artha Graha Internasional dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan maupun rekan sekerja.

Kode Etik mengatur tentang pedoman perilaku yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan, Kerahasiaan, Penyalahgunaan Jabatan, Perilaku *Insiders Trading*, Integritas dan Akurasi Data Bank serta Integritas Sistem Perbankan, dijelaskan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dan maksud dari penetapan kode etik Bank Artha Graha Internasional yaitu:

1. Memberikan pemahaman akan prinsip-prinsip GCG dalam budaya perusahaan yang dinyatakan dalam etika dan perilaku bisnis yang sesuai visi dan misi Bank;

CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct serves as a behavioral guideline for all levels of Bank Artha Graha Internasional in carrying out their daily duties and responsibilities, as well as in conducting business relationships with customers, partners, and colleagues.

The Code of Conduct outlines behavioral guidelines related to Conflicts of Interest, Confidentiality, Abuse of Position, Insider Trading Behavior, Data Integrity and Accuracy, as well as the Integrity of the Banking System, as described below.

PURPOSE AND OBJECTIVES

The purpose and objective of establishing the Code of Conduct of Bank Artha Graha Internasional are as follows:

1. To provide an understanding of the principles of Good Corporate Governance (GCG) within the corporate culture, as expressed through ethical standards and business conduct that align with the Bank's vision and mission;

2. Mendorong seluruh insan Bank Artha Graha Internasional berperilaku sesuai prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai budaya perusahaan;
3. Mencegah terjadinya penyimpangan atau fraud yang berisiko terhadap reputasi Bank;
4. Menjaga komitmen dalam melaksanakan visi dan misi Bank sesuai dengan nilai-nilai budaya dalam etika dan perilaku bisnis;
5. Menjaga citra Bank di mata masyarakat melalui kinerja Bank yang baik dengan memperhatikan perilaku dan etika berbisnis yang sehat dan berkelanjutan;
6. Memberikan pedoman dalam pengelolaan benturan kepentingan dan pengendalian gratifikasi; dan
7. Menjaga hubungan dengan pihak eksternal yang harmonis dan saling menguntungkan.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Etika Bisnis

1. Tidak membocorkan atau menyampaikan dengan cara apa pun semua informasi yang diketahui oleh karyawan mengenai Bank Artha Graha Internasional maupun nasabahnya kepada pihak ketiga (orang lain, nasabah, kawan, atau keluarga);
2. Pada waktu jam kerja dan terlebih lagi sesudah jam kerja, karyawan wajib menjaga semua data dan informasi yang menjadi wewenang, antara lain buku catatan, buku data, laporan, dan lain-lain, serta tidak membiarkan data dan informasi tersebut di tempat terbuka, sehingga dengan mudah bisa dilihat atau dibaca oleh orang lain;
3. Bila karyawan berhenti bekerja dari Bank Artha Graha Internasional, karyawan wajib menyerahkan semua catatan data, dokumen, buku pedoman, dan surat-surat milik Bank Artha Graha Internasional kepada atasan langsung; dan
4. Meskipun karyawan sudah berhenti dari Bank Artha Graha Internasional, karyawan wajib untuk tetap menjaga rahasia Bank Artha Graha Internasional dan nasabah yang diketahui oleh karyawan tersebut pada pihak lain.

Etika Kerja

1. Karyawan tidak dibenarkan mempunyai ikatan kerja lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan badan usaha atau usaha perorangan;
2. Dalam hubungan dengan nasabah atau relasi, setiap karyawan tidak dibenarkan menerima hadiah, berupa barang dan uang yang dapat mengakibatkan berkurangnya keobjektifan karyawan dalam mempertimbangkan kepentingan yang diharapkan dari pemberian barang tersebut. Dalam hal karyawan terpaksa menerima

2. *To encourage all personnel of Bank Artha Graha Internasional to behave in accordance with the principles of GCG and the Bank's corporate values;*
3. *To prevent irregularities or fraud that could pose a risk to the Bank's reputation;*
4. *To uphold the commitment to implementing the Bank's vision and mission in line with the corporate values embodied in ethical standards and business conduct;*
5. *To maintain the Bank's public image through sound performance, emphasizing ethical and sustainable business practices;*
6. *To provide guidance for managing conflicts of interest and controlling gratuities; and*
7. *To foster harmonious and mutually beneficial relationships with external parties.*

CODE OF CONDUCT PRINCIPLES

Business Ethics

1. *Employees shall not disclose or convey, in any form, any information regarding Bank Artha Graha Internasional or its customers to third parties (other individuals, customers, friends, or family);*
2. *During working hours and especially after working hours, employees are required to safeguard all data and information within their authority, including notebooks, data books, reports, and others. Employees must ensure that such data and information are not left in open spaces where they could be easily viewed or read by others;*
3. *When an employee leaves Bank Artha Graha Internasional, they are required to return all records, data, documents, guidelines, and letters belonging to the Bank to their immediate supervisor; and*
4. *Even after leaving Bank Artha Graha Internasional, employees must continue to maintain the confidentiality of the Bank and customer information they have learned during their tenure, and not disclose it to any third party.*

Work Ethics

1. *Employees are not permitted to have any other employment, either directly or indirectly, with any business entity or individual business;*
2. *In dealings with customers or relations, employees are not allowed to accept gifts, either in the form of goods or money, that could compromise the objectivity of the employee in considering the interests expected from the gift. In cases where an employee feels obligated to accept a gift and it*

pemberian dan sulit sekali menolaknya, maka karyawan yang bersangkutan, melalui atasannya, wajib melaporkan hal tersebut kepada Direksi untuk dicarikan jalan keluar yang sebaik- baiknya;

3. Pada prinsipnya, setiap karyawan menyadari sepenuhnya bahwa Bank tidak membenarkan seorang atau lebih anggota keluarga karyawan bekerja pada satu Bank yang sama;
4. Setiap karyawan harus mempunyai kesadaran untuk tidak melakukan tindakan tercela, seperti memalsukan dokumen dan tanda tangan, memberikan keterangan yang tidak benar kepada atasan atau Bank, serta tindakan ketidakjujuran lainnya yang dapat merugikan dan merusak nama Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
5. Setiap karyawan harus menyadari bahwa setiap pelanggaran atau melakukan hal yang menyangkut ketidakjujuran atas ketentuan tersebut di atas, sudah merupakan alasan yang kuat bagi karyawan untuk menerima tindakan yang akan diambil oleh Bank, antara lain pemutusan hubungan kerja, dan bahkan melanjutkan pemrosesan perkaranya kepada pihak berwenang, walaupun sudah tidak mempunyai hubungan kerja sekalipun.

is difficult to refuse, the employee must report the matter to the Board of Directors through their supervisor to find the best solution;

3. *In principle, every employee fully understands that the Bank does not permit any family member of an employee to work at the same Bank;*
4. *Every employee must be aware of the need to avoid disgraceful acts such as falsifying documents and signatures, providing false information to superiors or the Bank, and other forms of dishonesty that could harm or damage the Bank's reputation, either directly or indirectly; and*
5. *Every employee must recognize that any violation or action involving dishonesty in relation to the above provisions is a strong reason for the Bank to take disciplinary action, including termination of employment and even referring the matter to the relevant authorities, even if the employee no longer has an employment relationship with the Bank.*

PENGUNGKAPAN KEPATUHAN

Kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan tuntutan perilaku bisnis dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pengurus dan pegawai Bank sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebagai perwujudan visi dan misi Bank.

SOSIALISASI DAN PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Bank Artha Graha Internasional melakukan sosialisasi kode etik kepada seluruh insan Bank dan pihak yang terkait tanpa terkecuali, baik di dalam Bank maupun yang berkaitan langsung dengan bisnis perusahaan.

Program sosialisasi tersebut dilakukan dengan:

1. Menyampaikan kepada seluruh karyawan dan Direksi Bank melalui *e-mail* administrator;
2. Menyampaikan pada saat penandatanganan Perjanjian Bank Kerja Bersama yang dilakukan antara calon karyawan dengan manajemen Bank;
3. Melakukan pengawasan di setiap unit kerja; dan
4. Menandatangani surat pernyataan Pakta Integritas untuk menaati etika bisnis.

COMPLIANCE DISCLOSURE

Compliance with laws and regulations is a business conduct requirement and a societal norm that must be adhered to by all the management and employees of the Bank, in alignment with the principles of Good Corporate Governance (GCG), as a manifestation of the Bank's vision and mission.

SOCIALIZATION AND DISSEMINATION OF CODE OF CONDUCT

Bank Artha Graha Internasional conducts the socialization of the code of ethics to all individuals within the Bank and related parties, both within the Bank and those directly associated with the company's business.

The socialization program is carried out by:

1. *Communicating to all employees and the Board of Directors via the email administrator;*
2. *Communicating during the signing of the Collective Labor Agreement between prospective employees and the Bank's management;*
3. *Monitoring each work unit; and*
4. *Signing the Integrity Pact statement to adhere to business ethics.*

JENIS SANKSI DAN PELANGGARAN

Kedisiplinan Pencapaian tujuan Bank Artha Graha Internasional memerlukan partisipasi segenap insan Bank yang disiplin, cekatan dan terampil dalam melaksanakan pekerjaan ditopang oleh manajemen yang mampu mengimplementasikan kedisiplinan untuk pengambilan keputusan, penempatan rencana atau dasar kebijakan khususnya menyangkut perilaku kedisiplinan seperti, kelalaian dalam bekerja, keterlambatan kerja, kehadiran kerja dan tingkat kehadiran karyawan. Hal tersebut bukan hanya sekedar melengkapi, tetapi pimpinan juga harus dapat menegakkan peraturan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dengan kata lain, mengatur, mengoordinasi, serta menerapkan peraturan yang tegas dalam praktik yang sama terhadap bawahan dan memberikan sanksi yang tegas pada karyawan yang telah melanggar peraturan yang dibuat. Pelanggaran peraturan kerja dapat terjadi di mana saja, termasuk di Bank Artha Graha Internasional.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik Tahun 2024

Selama periode tahun 2024 Bank Artha Graha Internasional memberikan sanksi terkait pelanggaran Kode Etik kepada 1 (satu) orang karyawan atas penyalahgunaan wewenang jabatan dalam bekerja dengan menerima fee/uang dari nasabah.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Bank Artha Graha Internasional memiliki mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) yang merupakan salah satu komponen Pilar Deteksi dalam Strategi *Anti Fraud* Bank Artha Graha Internasional. WBS sebagai saluran komunikasi yang memfasilitasi pelapor (*whistleblower*) baik internal maupun eksternal untuk melaporkan indikasi pelanggaran terkait dengan tindakan *fraud*, pelanggaran kebijakan, penyuapan/pinjam meminjam uang dengan *customer*, pencurian/penggelapan, kecurangan laporan keuangan, aktivitas ilegal dan pelanggaran kode etik lainnya yang melibatkan karyawan Bank Artha Graha Internasional dan/atau dengan pihak-pihak terkait yang terjaga kerahasiaan identitas pelapornya.

Dengan fungsi deteksi dini yang efektif, Bank dapat mengetahui indikasi terjadinya *fraud* dengan lebih cepat, sehingga langkah mitigasi agar risiko tidak berlanjut dapat segera dilakukan. Pengaduan yang terindikasi kuat ditindaklanjuti melalui proses investigasi untuk mengetahui penyebab, modus operandi, dan pelaku *fraud* guna menentukan tindak lanjut yang dilakukan baik secara finansial maupun non-finansial bagi Bank Artha Graha Internasional.

TYPES OF SANCTIONS AND VIOLATIONS

Discipline in achieving the goals of Bank Artha Graha Internasional requires the participation of all employees who are disciplined, quick, and skilled in performing their tasks, supported by management capable of implementing discipline in decision-making, setting plans, or policies, especially concerning disciplinary behavior such as negligence at work, tardiness, work attendance, and employee attendance rates. This is not just about fulfilling requirements, but leadership must also enforce rules to achieve organizational goals.

In other words, it involves regulating, coordinating, and implementing strict rules in the same practice towards subordinates and imposing strict sanctions on employees who violate the established regulations. Violations of work rules can occur anywhere, including at Bank Artha Graha Internasional.

Number of Code of Conduct Violations in 2024

During the 2024 period, Bank Artha Graha Internasional imposed sanctions related to violations of the Code of Ethics on 1 (one) employee for the abuse of authority in their position by accepting a fee/money from a customer.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Bank Artha Graha Internasional has a Whistleblowing System (WBS) mechanism which is one of the components of the Detection Pillar in the Bank Artha Graha International Anti-Fraud Strategy. The WBS is a communication channel that facilitates whistleblowers, both internal and external, to report indications of violations related to fraud, policy violations, bribery/money lending with customers, theft/embezzlement, financial statement fraud, illegal activities and other violations of the code of ethics involving Bank Artha Graha Internasional employees and/or with related parties with the confidentiality of the reporter's identity.

Through an effective early detection function, the Bank can recognize indications of fraud more quickly, so that mitigation steps to prevent the risk from continuing can be taken immediately. Complaints that have strong indications are followed up with an investigation process to determine the cause, modus operandi, and perpetrators of fraud in order to determine what follow-up actions can be taken both financially and non-financially for Bank Artha Graha Internasional.

KEBIJAKAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Bank Artha Graha Internasional mengatur kebijakan *Whistleblowing System* sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Kebijakan Perusahaan tentang Strategi Anti *Fraud*, Penyampaian Laporan Pelanggaran dan *Fraud*.

TUJUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Mendeteksi dini dan mencegah terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran di lingkungan Bank Artha Graha Internasional; dan
2. Menciptakan iklim kerja yang sehat, terbuka, tulus, jujur, dan bertanggung jawab di lingkungan Bank.

JENIS PELANGGARAN

Bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan dan akan ditindaklanjuti oleh Sub Direktorat Anti *Fraud* Bank Artha Graha Internasional yaitu:

1. Korupsi;
2. Penyalahgunaan Aset;
3. Kecurangan Laporan Keuangan;
4. Penipuan;
5. Pembocoran Informasi Rahasia; dan
6. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MEDIA PELAPORAN

Sub Direktorat Anti *Fraud* - Direktorat Internal Audit menerima laporan pelanggaran dan *fraud* mengacu kepada Pedoman Kebijakan Perusahaan tentang Strategi Anti *Fraud*. Pelaporan ini dapat disampaikan melalui:

Surat:

Sub Direktorat Anti *Fraud*, Gedung Bank Artha Graha Lt. 3
Jl. Kopi No. 2, Jakarta Barat, 11230

E-mail:

antifraud@ag.co.id

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

Bank Artha Graha Internasional regulates the whistleblowing system policy as stipulated in the Corporate Policy Guidelines on Anti-Fraud Strategy, Submission of Violation and Fraud Reports.

PURPOSE OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. To detect early and prevent deviations or violations within the environment of Bank Artha Graha Internasional; and
2. To create a healthy, open, sincere, honest, and responsible working climate within the Bank.

TYPE OF VIOLATION

Forms of violations that can be reported and will be followed up by the Anti-Fraud Sub Directorate of Bank Artha Graha Internasional include:

1. Cheating;
2. Fraud;
3. Asset Embezzlement;
4. Information Leakage;
5. Banking Crimes; and
6. Other actions that can be equated with fraud.

REPORTING MEDIA

The Anti-Fraud Sub-Directorate - Internal Audit Directorate receives reports of violations and fraud in accordance with the Company's Policy Guidelines on Anti-Fraud Strategy. This report can be submitted through:

Letter:

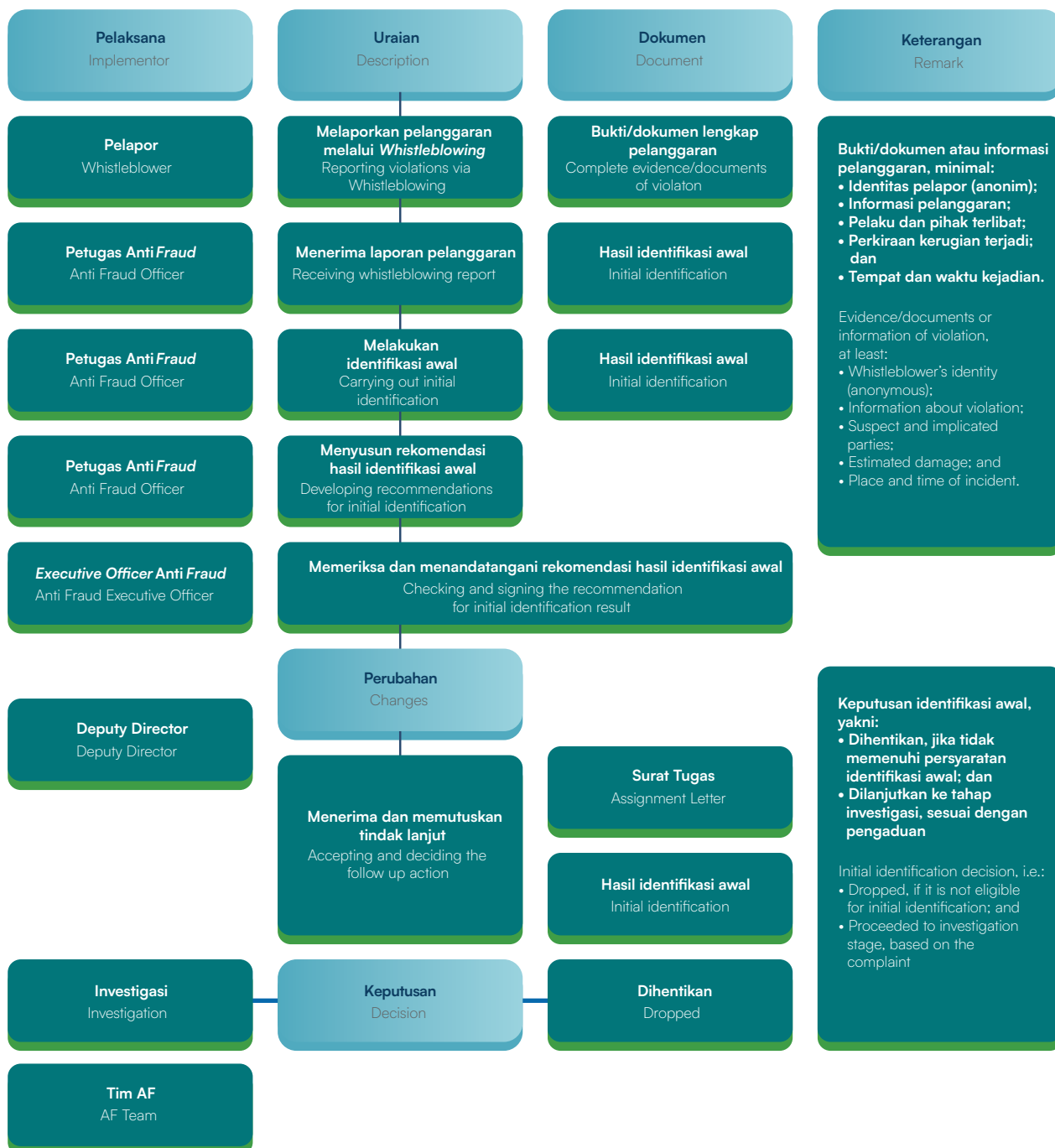
Anti-Fraud Sub Directorate, Bank Artha Graha Building
3rd floor, Jl. Kopi No. 2, West Jakarta, 11230

E-mail:

antifraud@ag.co.id

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

Mechanism for Submitting Violation Reports



PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Sub Direktorat Anti *Fraud* adalah pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola *Whistleblowing System* Bank Artha Graha Internasional.

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Bank Artha Graha Internasional akan memberikan perlindungan terhadap pelapor atas laporan yang terbukti kebenarannya yang meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan;
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor; dan
3. Jaminan perlindungan dari kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor.

PENANGANAN PENGADUAN

Bank Artha Graha Internasional menetapkan tahapan penanganan pengaduan yang diterima yang terdiri dari:

1. Menindaklanjuti informasi atas dugaan tindakan *fraud*;
2. Mengumpulkan semua bukti-bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga kemudian dilakukan verifikasi;
3. Melakukan identifikasi awal, serta menyusun rekomendasi atas hasil identifikasi tersebut;
4. Memberikan keputusan tindak lanjut, jika terindikasi *fraud*, maka dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh;
5. Mengidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *fraud*, serta menentukan langkah selanjutnya, salah satu diantaranya adalah memperkuat sistem pengendalian internal Bank; dan
6. Membuat laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sosialisasi *anti fraud* dilakukan oleh Sub Direktorat Anti *Fraud* ke seluruh kantor cabang/kantor cabang pembantu Bank Artha Graha Internasional, termasuk pada karyawan *outsourcing* (*driver*, *office boy*, dan *security*) dalam rangka mengefektifkan penerapan *Whistleblowing System* Bank Artha Graha Internasional.

PARTIES MANAGING COMPLAINTS

The Anti-Fraud Sub Directorate is the party responsible for managing the *Whistleblowing System* of Bank Artha Graha Internasional.

WHISTLEBLOWER PROTECTION

Bank Artha Graha Internasional will provide protection to whistleblowers for substantiated reports which include:

1. Guaranteeing the confidentiality of the reporter's identity and the contents of the report submitted;
2. Guaranteeing protection against adverse treatment of whistleblowers; and
3. Guaranteeing protection from possible threats, intimidation, punishment or other unpleasant actions from the reported party.

COMPLAINT HANDLING

Bank Artha Graha Internasional has established the following stages for handling complaints received:

1. Following up on information regarding suspected fraudulent acts;
2. Gathering all relevant evidence related to the alleged incident and conducting verification;
3. Conducting an initial identification and preparing recommendations based on the findings;
4. Determining follow-up actions-if *fraud* is indicated, a comprehensive investigation will be conducted;
5. Identifying weaknesses and the root causes of the *fraud*, and determining further actions, including strengthening the Bank's internal control system; and
6. Preparing a report addressed to the President Director with a copy to the Board of Commissioners.

SOCIALIZATION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

Anti-fraud socialization is carried out by the Anti-Fraud Sub-Directorate to all branches and sub-branches of Bank Artha Graha Internasional, including outsourcing employees (*drivers*, *office boys*, and *security personnel*), to effectively implement the Bank's *Whistleblowing System*.

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat pelaporan dugaan fraud yang disampaikan melalui mekanisme *Whistleblowing System* Bank Artha Graha Internasional.

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DIPROSES PADA TAHUN BUKU

Selama tahun 2024, Bank Artha Graha Internasional tidak menerima pengaduan pelanggaran. Namun apabila terdapat pengaduan pelanggaran yang masuk dan setelah diinvestigasi terbukti sebagai pelanggaran maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Bank Artha Graha Internasional belum mempunyai Entitas Anak atau keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan perusahaan lain di bidang jasa keuangan sampai tahun 2024 dan jika merujuk pada POJK 30 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan disebutkan kriteria konglomerasi keuangan memiliki total aset LJK Konglomerasi Keuangan paling sedikit Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah); dan paling sedikit berjumlah 2 (dua) LJK pada 2 (dua) sektor yang berbeda di Konglomerasi Keuangan atau total aset LJK Konglomerasi Keuangan paling sedikit Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) dan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) LJK pada 3 (tiga) sektor yang berbeda di Konglomerasi Keuangan. Dengan kriteria tersebut, Bank belum memiliki kewajiban dalam menerapkan tata kelola terintegrasi.

PEMENUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEBERLANJUTAN 2024

Bank Artha Graha Internasional telah menyampaikan Laporan Keberlanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Untuk tahun buku 2024, Bank menyampaikan Laporan Keberlanjutan dalam buku yang terpisah dari Laporan Tahunan namun tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

NUMBER OF COMPLAINTS RECEIVED AND PROCESSED IN THE LAST FINANCIAL YEAR

In 2024, there were no reports of suspected fraud submitted through the Bank Artha Graha Internasional whistleblowing system mechanism.

SANCTIONS/FOLLOW-UP ON COMPLAINTS THAT HAVE BEEN PROCESSED IN THE FINANCIAL YEAR

In 2024, Bank Artha Graha Internasional did not receive any complaints of violations. However, if there is an incoming violation complaint and after investigation it is proven to be a violation, sanctions will be imposed in accordance with applicable regulations.

INTEGRATED GOVERNANCE IMPLEMENTATION REPORT

As of 2024, Bank Artha Graha Internasional does not have any subsidiaries or ownership and/or control relationships with other companies in the financial services sector. Referring to POJK 30 of 2024, dated December 19, 2024, regarding Financial Conglomerates and Parent Companies of Financial Conglomerates, the criteria for a financial conglomerate includes having total assets of at least IDR100,000,000,000,000 (one hundred trillion rupiah) for the financial services entity or at least two financial services entities in two different sectors within the Financial Conglomerate. Alternatively, a conglomerate with total assets of at least IDR20,000,000,000,000 (twenty trillion rupiah) but less than IDR100,000,000,000,000 (one hundred trillion rupiah) must have at least 3 (three) financial services entities across three different sectors. Based on these criteria, the Bank is not obligated to implement integrated governance.

FULFILLMENT OF 2024 SUSTAINABILITY REPORT SUBMISSION

Bank Artha Graha Internasional has submitted a Sustainability Report as stipulated in POJK No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies. For the fiscal year 2024, the Bank submits the Sustainability Report in a separate book from the Annual Report but remains an integral part of this Annual Report.

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Pengungkapan Kepemilikan Saham

Perseroan dalam menjalankan tata kelola perusahaan berkomitmen memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku termasuk terkait kebijakan pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka. Dalam hal ini Perseroan berkomitmen memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM

Komitmen pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan diwujudkan dengan menyampaikan perubahan atas kepemilikan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia yang mencantumkan informasi di antaranya:

1. Identitas anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
2. Nama saham Perusahaan Terbuka;
3. Jumlah saham dan persentase sebelum transaksi;
4. Jumlah saham dan persentase setelah transaksi;
5. Jenis transaksi yang dilakukan;
6. Jumlah saham dibeli, dijual, dan dialihkan;
7. Keterangan mengenai klasifikasi saham;
8. Harga pembelian atau penjualan per saham, jika perubahan kepemilikan merupakan akibat dari adanya transaksi pembayaran;
9. Tanggal transaksi;
10. Tujuan dari transaksi;
11. Status kepemilikan Saham;
12. Informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka untuk kepentingan pemilik manfaat, jika terdapat kepemilikan saham secara tidak langsung;
13. Nama pemegang saham yang memberikan kuasa untuk melaporkan dan keterangan bahwa pelaporan tersebut merupakan kuasa yang diberikan untuk dirinya, jika laporan kepemilikan saham dikuasakan; dan

DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS

Share Ownership Disclosure Policy

The Company is committed to complying with applicable regulations in its corporate governance practices, including the policy on the disclosure of share ownership by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. This disclosure must be made no later than 5 (five) business days after the acquisition or any change in ownership of the shares of the Public Company. In this regard, the Company is committed to adhering to the Financial Services Authority Regulation No. 4 of 2024 concerning the Report on Ownership or Any Change in Ownership of Shares of a Public Company and the Report on the Activity of Pledging Shares of a Public Company.

IMPLEMENTATION OF SHARE OWNERSHIP DISCLOSURE POLICY

The commitment to disclose the ownership of shares by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners no later than 5 (five) business days after the acquisition or any change in ownership is realized by submitting the changes in ownership to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX), which must include the following information:

1. Identity of the member of the Board of Directors or Board of Commissioners;
2. Name of the public company's shares;
3. Number of shares and percentage before the transaction;
4. Number of shares and percentage after the transaction;
5. Type of transaction conducted;
6. Number of shares bought, sold, or transferred;
7. Classification of shares;
8. Purchase or sale price per share, if the change in ownership results from a transaction involving payment;
9. Transaction date;
10. Purpose of the transaction;
11. Status of share ownership;
12. Information on the shareholder recorded in the shareholder register of the public company for the benefit of the beneficial owner, if there is indirect shareholding;
13. Name of the shareholder who authorized the report and a statement that the reporting is based on the power of attorney given to the reporting individual, if the share ownership report is authorized; and

14. Informasi mengenai rincian anggota kelompok yang terorganisasi, jika merupakan laporan kepemilikan saham oleh kelompok yang terorganisir.

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA KEPADA MANAJEMEN DAN/ATAU KARYAWAN

Sampai dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Bank belum pernah melaksanakan kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*Management Stock Ownership Program/MSOP*) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Ownership Program/ESOP*). Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki kebijakan terkait program kepemilikan saham oleh manajemen dan/atau karyawan.

KEBIJAKAN ANTI FRAUD

Bank telah memiliki dan memberlakukan kebijakan *anti fraud* sebagaimana dimuat dalam Pedoman *Anti Fraud* No. 00001.03.0 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* yang disosialisasikan secara berkala kepada seluruh karyawan agar dapat dilaksanakan secara konsisten.

Kebijakan *anti fraud* bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha perusahaan terbuka dilakukan secara legal, *prudent*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Kebijakan tersebut antara lain dapat meliputi program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam perusahaan terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut menggambarkan pencegahan perusahaan terbuka terhadap segala praktik korupsi, baik memberi maupun menerima dari pihak lain.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bank melakukan seleksi pemasok atau vendor untuk memastikan agar perusahaan terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan, peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan Bank akan memengaruhi kualitas *output* Bank.

14. Information on the details of the members of an organized group, if the report concerns share ownership by an organized group.

PROVISION OF LONG-TERM PERFORMANCE-BASED COMPENSATION TO MANAGEMENT AND/OR EMPLOYEES

As of the period ending on December 31, 2024, the Bank has not implemented any long-term performance-based compensation policies for management and/or employees of the issuer or public company (if any), such as a Management Stock Ownership Program (MSOP) and/or an Employee Stock Ownership Program (ESOP). Therefore, the company does not have a policy related to stock ownership programs for management and/or employees.

ANTI-FRAUD POLICY

The Bank has an anti-fraud policy as contained in the Anti-Fraud Guidelines No. 00001.03.0 dated October 30, 2024 concerning Guidelines for Implementing Anti-Fraud Strategies which are familiarized regularly to all branch offices so that they can be implemented consistently.

Anti-fraud policies are useful to ensure that the business activities of public companies are carried out legally, prudently, and in accordance with the principles of good governance. The policy can be part of the code of ethics, or in a separate form. The policy may include programs and procedures to address corruption, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities within the public company. The scope of the policy illustrates the prevention of public companies against all corrupt practices, both giving and receiving from other parties.

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT POLICY

The Bank selects suppliers or vendors to ensure that the company obtains the necessary goods or services at competitive prices and good quality. Meanwhile, enhancing the capabilities of suppliers or vendors is beneficial to ensure that the supply chain runs efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply/fulfill the goods or services required by the Bank will affect the quality of the Bank's output.

Pelaksanaannya dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan perusahaan terbuka. Cakupan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor, serta penggunaan rekening Bank Artha Graha Internasional untuk pembayaran vendor sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Operasi No. 194.02.0.

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN/ATAU OBLIGASI BANK

Sepanjang tahun 2024, Bank Artha Graha Internasional tidak menyelenggarakan pembelian kembali saham dan/atau obligasi Bank.

TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pengungkapan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan adalah upaya pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di atas.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dan pemilik Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Pengungkapan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan. Selama tahun 2024, Bank tidak memiliki transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

This implementation can ensure continuity of supply, both in terms of quantity and quality needed by the company. This coverage includes criteria in the selection of suppliers or vendors, transparent procurement mechanisms, efforts to improve the capabilities of suppliers or vendors, and fulfillment of rights relating to suppliers or vendors, as well as the use of Bank Artha Graha Internasional accounts for vendor payments as stipulated in Operations Circular No. 194.02.0.

REPURCHASE OF BANK SHARES AND/OR BONDS

Throughout 2024, Bank Artha Graha Internasional did not repurchase any shares and/or bonds of the Bank.

RELATED PARTY TRANSACTIONS AND CONFLICTS OF INTEREST

Disclosure of affiliated transactions and conflicts of interest is an effort to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.

Throughout 2024, there were no affiliated transactions that were carried out by the Bank in accordance with the above Financial Services Authority Regulation.

In the event of a conflict of interest between the Bank and its owners, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Executive Officers and/or other parties related to the Bank, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and Executive Officers are prohibited from taking actions that may harm or reduce the Bank's profits.

Disclosure of transactions containing conflicts of interest, at least includes the name and position of the party with a conflict of interest, the name and position of the decision maker of the transaction containing the conflict of interest, the type of transaction, the transaction value, and a description. In 2024, the Bank did not have any transactions containing Conflict of Interest.

RENCANA KORPORASI BANK

Rencana Korporasi Bank disusun sebagai upaya untuk menjawab tantangan bisnis dalam 7 tahun mendatang (2023-2029). Rencana Korporasi selaras dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2024 - 2026. Rencana Korporasi dilakukan dengan menganalisis kembali kondisi perekonomian dan perkembangan perbankan ditengah-tengah ketidakpastian politik dan ketidakstabilan iklim perekonomian dunia. Peluang bagi industri perbankan untuk mendorong pertumbuhan bisnis Bank masih terbuka dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam strategi *aggressiveness* ekspansi funding dan lending yang disesuaikan dengan kekuatan Bank Artha Graha Internasional. Terlebih lagi, Era digital menuntut Bank Artha Graha Internasional untuk dapat menyesuaikan diri lebih cepat, mempersiapkan infrastruktur (baik infrastruktur IT sistem maupun *Human Capital*) serta strategi bisnis untuk dapat mempertahankan kesinambungan bisnis di tengah perubahan yang begitu cepat.

Bank Artha Graha Internasional akan bergerak menjadi *Hybrid Bank* yang memadukan antara bisnis model Brick and Mortar dengan *digital banking*. Bank Artha Graha Internasional akan menyediakan *One Stop Solution Banking Services* untuk nasabah. Strategi ini mendukung pergerakan era digital serta peluang bonus demografi negara Indonesia yang akan mulai tampak pada tahun 2025. Tentu serangkaian *milestone* telah dirumuskan Bank Artha Graha Internasional untuk menjalankan strategi besar tersebut.

Fokus utama Bank Artha Graha Internasional adalah penguatan internal serta pembangunan infrastruktur IT dan *Human Capital*, dimana diharapkan peningkatan infrastruktur IT yang akan dikelola dengan baik oleh *corporate talent* yang memiliki kompetensi handal di Era Digital. *Milestone* tersebut telah digambarkan dalam peta strategi level korporasi Bank Artha Graha Internasional sebagai bentuk penerjemahan strategi yang dapat dilaksanakan. Bank Artha Graha Internasional memandang lingkungan bisnis dan era digital yang bergerak begitu cepat bukanlah menjadi hambatan namun justru waktu yang tepat untuk dimanfaatkan dalam melakukan transformasi digital yang unggul dipersaingan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) I bahkan mampu bertumbuh menjadi KBMI II tahun 2029.

BANK CORPORATE PLAN

The Bank's Corporate Plan was prepared to address business challenges in the next 7 years (2023-2029). The Corporate Plan is in line with the Bank's Business Plan (RBB) for 2024-2026. The Corporate Plan was carried out by re-analyzing economic conditions and banking developments amidst political uncertainty and instability in the world economic climate. Opportunities for the banking industry to drive the Bank's business growth are still open by applying the precautionary principle in the funding and lending expansion aggressiveness strategy tailored to the strengths of Bank Artha Graha Internasional. Moreover, the digital era requires Bank Artha Graha Internasional to be able to adjust faster, prepare infrastructure (both IT systems and Human Capital infrastructure) and business strategies to be able to maintain business continuity in the midst of rapid changes.

Bank Artha Graha Internasional will move to become a Hybrid Bank that combines the Brick and Mortar business model with digital banking. Bank Artha Graha Internasional will provide One Stop Solution Banking Services for customers. This strategy supports the movement of the digital era as well as the opportunity of Indonesia's demographic bonus which will begin to emerge in 2025. A series of milestones have been formulated by Bank Artha Graha Internasional to execute this grand strategy.

The main focus of Bank Artha Graha Internasional is the internal strengthening and development of IT infrastructure and Human Capital, which is expected to improve IT infrastructure that will be well managed by corporate talents who have reliable competencies in the Digital Age. These milestones have been depicted in Bank Artha Graha Internasional's corporate level strategy map as a form of strategy translation that can be implemented. Bank Artha Graha Internasional views the business environment and the fast-moving digital era as not an obstacle but rather the right time to be utilized in carrying out a digital transformation that excels in the Bank Group based on Tier I Capital (KBMI) competition and is even able to grow into KBMI II in 2029.

INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Bank melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan melalui laporan yang disusun sesuai dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

Berikut publikasi kondisi keuangan dan non keuangan Bank selama periode Tahun 2024 yang disampaikan ke publik baik melalui media cetak atau situs perusahaan <https://www.arthagraha.com/>

1. Laporan Keuangan Bulanan
Bank telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator serta telah dipublikasikan pada *website* Bank.
2. Laporan Keuangan Triwulanan
Bank telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator sesuai dengan ketentuan serta telah dipublikasikan melalui *website*.
3. Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan
Bank telah menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan kepada regulator serta telah dipublikasikan melalui *website* resmi Bank.
4. Laporan dan Informasi Lainnya
Bank juga telah menyusun laporan-laporan publikasi lainnya yang diwajibkan oleh regulator, meliputi Laporan Tata Kelola, Laporan Eksposur Risiko dan Permodalan, informasi produk dan penggunaan data nasabah, informasi jaringan kantor, informasi penyampaian dan penanganan pengaduan, informasi atau fakta material serta informasi-informasi lainnya yang diwajibkan.

Selain itu, Bank juga telah menyusun dan menyampaikan laporan-laporan yang diwajibkan oleh regulator (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, PPATK dan regulator lainnya) sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan eksternal masing-masing regulator. Bank telah memastikan bahwa seluruh penyusunan laporan-laporan kepada regulator telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.

INTEGRITY OF REPORTING AND INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS

The Bank implements transparency of financial and nonfinancial conditions to Stakeholders through reports prepared in accordance with the procedures, types, and scope in accordance with the Financial Services Authority Regulation regarding transparency and publication of bank reports.

The following is the publication of the Bank's financial and non-financial conditions during the 2024 period submitted to the public either through print media or the company's website <https://www.arthagraha.com/>

1. *Monthly Financial Report*
The Bank has prepared and submitted Monthly Financial Reports to the regulator and has been published on the Bank's website.
2. *Quarterly Financial Report*
The Bank has prepared and submitted Quarterly Financial Reports to the regulator in accordance with the provisions and has been published through the website.
3. *Annual Report and Sustainability Report*
The Bank has prepared and submitted the Annual Report to the regulator and has been published through the Bank's official website.
4. *Reports and Other Information*
The Bank has also prepared other publication reports required by the regulator, including the Governance Report, Sustainability Report, Risk Exposure and Capital Report, product information and use of customer data, office network information, information on the submission and handling of complaints, information or material facts and other required information.

In addition, the Bank has also compiled and submitted reports required by regulators (Financial Services Authority, Bank Indonesia, PPATK and other regulators) in accordance with the provisions and deadlines set forth in the external provisions of each regulator. The Bank has ensured that all reports to regulators are supported by an adequate management information system to improve the quality of the decision-making process by the Board of Directors and the quality of the supervisory process by the Board of Commissioners.

STRATEGI ANTI FRAUD, ANTI PENYUAPAN, DAN GRATIFIKASI

Bank memiliki kebijakan *anti fraud* yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal Bank dalam membangun budaya kepatuhan dan menciptakan kesadaran risiko (*risk awareness*) atas potensi risiko *fraud* dan konsekuensi yang dapat timbul, hal tersebut sesuai dengan POJK No. 12 Tahun 2024, perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan, dimana Bank telah melaksanakan fungsi penerapan strategi *anti fraud* secara *bank-wide*.

Seluruh insan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan tanpa terkecuali, diwajibkan untuk bertindak secara jujur, profesional, menjunjung tinggi integritas dan secara proaktif melindungi serta menjaga aset Bank, nasabah dan stakeholder lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal. Sebagai bentuk pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pengendalian *fraud*, Bank Artha Graha Internasional melaksanakan kode etik oleh seluruh jajaran organisasi Bank.

Kode Etik (*Code of Conduct*) disusun sebagai pedoman berperilaku berdasarkan nilai dan pertimbangan integritas, kesadaran diri dan profesionalisme, reputasi Bank, keluarga dan pribadi. Kode Etik merupakan pedoman perilaku Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari serta melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan maupun rekan sekerja.

PENERAPAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Roadmap GCG yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2014 memiliki dampak yang besar bagi perkembangan GCG di lingkungan dunia usaha. Penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan penyampaian informasi yang wajar menjadi bahasan yang dapat menjadi pegangan bagi entitas usaha, khususnya bagi perusahaan terbuka. Demikian pula dengan hak pemegang saham tanpa terkecuali, khususnya pemegang saham minoritas yang harus menjadi perhatian dari emiten atau perusahaan terbuka.

Secara umum, Bank sebagai perusahaan terbuka telah melaksanakan seluruh peraturan yang dikeluarkan OJK, dan akan terus berupaya melakukan perbaikan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Khususnya terkait pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur berdasarkan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang

ANTI-FRAUD, ANTI-BRIBERY, AND GRATIFICATION STRATEGY

The Bank has an anti-fraud policy, which is part of the Bank's internal control system, aimed at fostering a culture of compliance and raising risk awareness regarding the potential risk of fraud and its possible consequences. This policy is in line with OJK Regulation No. 12 of 2024 regarding the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions, wherein the Bank has implemented the anti-fraud strategy function on a bank-wide basis.

All Bank personnel, starting from the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees without exception, are required to act honestly, professionally, uphold integrity and proactively protect and safeguard the Bank's assets, customers and other stakeholders in accordance with applicable internal and external regulations. As a form of active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners on fraud control, Bank Artha Graha Internasional implements a code of conduct by all levels of the Bank's organization.

The Code of Conduct is a guideline for the behavior of the Bank's ranks in carrying out daily duties and official duties as well as in conducting business relationships with customers, partners and colleagues. The Code of Conduct is prepared as a guideline for behavior based on values and considerations of integrity, self-awareness and professionalism, the Bank's reputation, family and personal.

IMPLEMENTATION OF PUBLIC COMPANY GOVERNANCE GUIDELINES

The GCG Roadmap issued by the Financial Services Authority (OJK) in 2014 had a major impact on the development of GCG in the business world. The emphasis on transparency, accountability, and fair information disclosure is a discussion that can be a guide for business entities, especially for public companies. Similarly, the rights of shareholders without exception, especially minority shareholders, must be a concern of issuers or public companies.

In general, the Bank as a public company has implemented all regulations issued by OJK, and will continue to strive to make improvements to create added value for shareholders and stakeholders. In particular, the guidelines for Public Company Governance are regulated under OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 on the Implementation of Public Company Governance Guidelines, which is

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang dijabarkan dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pedoman tersebut yang memuat aspek, prinsip dan rekomendasi tata kelola perusahaan yang baik berguna untuk mendorong penerapan praktik GCG sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani perusahaan terbuka. Bank wajib menerapkan pedoman tersebut, dan jika belum menerapkannya, Bank wajib menjelaskan alasan tidak diterapkannya pedoman tersebut. Pengungkapan penerapan atas rekomendasi dalam pedoman tersebut disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan terbuka.

Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 sebagai standar penerapan GCG yang mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip GCG. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip GCG dalam Pedoman Tata Kelola adalah standar penerapan aspek dan prinsip GCG yang harus diterapkan Bank. Ikhtisar kepatuhan Bank terhadap Peraturan dan Surat Edaran OJK tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup Bank dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

elaborated in OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 on Public Company Governance Guidelines. The guidelines, which contain aspects, principles and recommendations of good corporate governance, are useful to encourage the implementation of GCG practices in accordance with exemplary international practices for public companies. The Bank is required to implement the guideline, and if it has not implemented it, the Bank is required to explain the reasons for not implementing the guideline. Disclosure of the implementation of the recommendations in the guidelines is submitted in the annual report of the public company.

Based on OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015, the standard of GCG implementation includes 5 (five) aspects, 8 (eight) principles and 25 recommendations for implementing GCG aspects and principles. Recommendations for the implementation of GCG aspects and principles in the Corporate Governance Guidelines are standards for the implementation of GCG aspects and principles that must be implemented by the Bank. An overview of the Bank's compliance with the OJK Regulations and Circular Letters on Public Company Governance Guidelines is presented in the table below.

Compliance of GCG Implementation within the Bank with OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di BAGI Implementation at BAGI	Keterangan Description
I	Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin hak-hak Pemegang Saham. <i>Aspect 1: Public Company's relationship with Shareholders in guaranteeing the rights of Shareholders.</i>			
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS <i>Principle 1 Improving the Implementation Value of GMS</i>	- Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan kepentingan pemegang saham. - The Public Company has a technical voting procedure either open or closed that promotes independence and the interest of shareholders.	Bank telah memiliki prosedur penyelenggaraan RUPS yang telah memuat prosedur teknis pengumpulan suara (voting), baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan Pemegang Saham. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. <i>The Bank has a procedure for organizing the GMS that includes technical procedures for voting, both open and closed, which prioritizes the independence and interests of Shareholders. Decisions are made based on deliberation for consensus. In the event that deliberation to reach a consensus cannot be achieved, the resolutions shall be adopted by voting based on the affirmative votes of more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with voting rights present in the GMS.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
		- Seluruh anggota Direksi dan sebagian anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. - All members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are present at the Annual GMS.	RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024 dihadiri oleh 5 (lima) anggota Direksi dan 3 (tiga) Anggota Dewan Komisaris Independen dengan jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris sebesar 60 persen dan anggota Direksi sebesar 100 persen. <i>The Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) held on June 26, 2024, was attended by 5 (five) members of the Board of Directors and 3 (three) Independent Commissioners, with the attendance rate of the Board of Commissioners at 60 percent and the attendance rate of the Board of Directors at 100 percent.</i>	Dipenuhi sebagian <i>Partially fulfilled</i>
		- Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. - Summary of GMS minutes is available on the Public Company's website at least for 1 (one) year.	Bank telah membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang telah diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan melalui website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan website Bank dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, pada menu Hubungan Investor bagian RUPS http://www.arthagraha.com/hubungan_investor/RUPS/risalah-rapat-umum_pemegang-saham-rups <i>The Bank has prepared a summary of the GMS minutes in Indonesian and English which has been announced 2 (two) working days after the GMS is held through the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), and the Bank's website in Indonesian and English, on the Investor Relations menu of the GMS section http://www.arthagraha.com/hubungan_investor/GMS/risalah-rapat-umumpemegang-saham-rups</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di BAGI Implementation at BAGI	Keterangan Description
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2 <i>Improving the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.</i>	4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. 4. The Public Company has a communication policy with the shareholders or investors	Bank memiliki Pedoman Kebijakan Perusahaan No. 0021.01.0 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Media Komunikasi. Berdasarkan pedoman tersebut, Bank menyediakan sarana media eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin hubungan dengan Pemangku Kepentingan meliputi: a. Website; b. Paparan Publik; c. Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan; d. Company Profile; e. Press Release; f. Sponsorship; dan g. Edukasi Perbankan. <i>The Bank has Corporate Policy Guideline No. 0021.01.0 dated August 8, 2014 on Openness of Communication. Based on these guidelines, the Bank provides external media facilities that can be utilized to establish relationships with Stakeholders including:</i> a. Website; b. Public Expose; c. Annual Report & Sustainability Report; d. Company Profile; e. Press Release; f. Sponsorship; and g. Banking Education.	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
		5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. 5. The Public Company discloses its communication policy with the shareholders or investors on the website.	Bank mengungkapkan kebijakan komunikasi secara jelas pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah dimuat dalam website Bank. Bank telah melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Bank mengungkapkan informasi kegiatan usaha Bank dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris antara lain informasi terkait: a. Informasi umum Bank; b. Informasi bagi Pemegang Saham atau investor; c. Informasi tata kelola perusahaan; dan d. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan. <i>The Bank clearly discloses the communication policy in the Annual Report and Sustainability Report which has been published on the Bank's website. The Bank has implemented the information disclosure policy based on the Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015 regarding the Website of Issuers or Public Companies. The Bank discloses information on the Bank's business activities in Indonesian and English, including information related to:</i> a. General information of the Bank; b. Information for shareholders or investors; c. Information on corporate governance; and d. Information on corporate social responsibility.	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di BAGI Implementation at BAGI	Keterangan Description
II	Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris <i>Aspect 2: Function and Role of the Board of Commissioners</i>			
	Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Principle 3 <i>Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners</i>	6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. 6. Determination of the number of members of the Board of Commissioners shall consider the condition of the Public Company.	Bank telah menentukan jumlah anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha Bank saat ini dan rencana pengembangan ke depan. Bank memiliki 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris yang profesional dan kompeten di bidang perbankan. Dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris tersebut, 3 (tiga) orang di antaranya adalah Komisaris Independen, jumlah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik <i>The Bank has determined the number of Board of Commissioners members by considering the current complexity of its business and future development plans. The Bank has 5 (five) members on the Board of Commissioners, all of whom are professional and competent in the banking sector. Of these, 3 (three) are Independent Commissioners, a composition that complies with the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
		7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan 7. Determination on the composition of members of the Board of Commissioners considers the diversity, expertise, knowledge, and experience required.	Penetapan komposisi anggota Dewan Komisaris telah dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang relevan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing, khususnya di bidang perbankan atau bidang keuangan, serta mempertimbangkan kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat dengan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. <i>The determination of the composition of the Board of Commissioners has been carried out by considering the knowledge, expertise, and relevant experience in carrying out duties in accordance with their respective fields, especially in the banking or financial fields, as well as considering the ability to carry out strategic management in the context of developing a healthy Bank by always referring to the prevailing laws and regulations.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4 <i>Improving the Quality of the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.</i>	8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self-Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. 8. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate its performance.	Self-assessment Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan peraturan turunannya. Self-assessment dilakukan melalui penilaian 3 (tiga) aspek governance yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome. <i>Self-assessment of the Board of Commissioners has been carried out in accordance with the provisions stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 4/POJK.03/2016 concerning The Assessment of the Soundness Level of Commercial Banks and its derivative regulations. Self-assessment is conducted through an assessment of 3 (three) aspects of governance, namely governance structure, governance process, and governance outcome.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di BAGI Implementation at BAGI	Keterangan Description
		9. Kebijakan penilaian sendiri (Self-Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. 9. The self-assessment policy on the Board of Commissioners performance is disclosed in the Annual Report of the Public Company	Hasil (<i>self-assessment</i>) Dewan Komisaris telah diungkapkan pada Laporan Tahunan ini dalam uraian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dalam bab Tata Kelola Perusahaan. <i>The results of the Board of Commissioners' self-assessment have been disclosed in this Annual Report in the description of the Board of Commissioners' Performance Assessment in the Corporate Governance chapter.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
		10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. 10. The Board of Commissioners has a policy related to resignation of the Board of Commissioners' members if such member is involved in financial crimes.	Kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PKP No. 0006.05.0 tanggal 28 Desember 2023 Berdasarkan pedoman tersebut, jika ada anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam tindak kejahatan keuangan, maka akan diberhentikan atau masa jabatannya akan berakhir dengan sendirinya, dan Bank akan menyelenggarakan RUPS atas hal tersebut. <i>The resignation policy of the Board of Commissioners has been regulated in the CPC Board of Commissioners Charter No. 0006.05.0 dated December 28, 2023 Based on the charter, if any member of the Board of Commissioners is involved in a financial crime, he/she will be dismissed or his/her term of office will expire automatically, and the Bank will hold a GMS on the matter.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di BAGI Implementation at BAGI	Keterangan Description
		11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. 11. The Board of Commissioners or the Committee in charge of the Remuneration and Nomination function prepares the succession policy in the nomination process of members of the Board of Directors.	Bank memiliki kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Remunerasi dan Nominasi, PKP No. 0005.02.1 tanggal 14 November 2019. Berdasarkan pedoman tersebut, Komite tersebut memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan dan kemampuan Direksi, serta memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. <i>The Bank has a succession policy in the nomination process for Board of Directors members, as outlined in the Remuneration and Nomination Guidelines and Work Procedures, PKP No. 0005.02.1 dated November 14, 2019. Based on these guidelines, the Committee provides recommendations to the Board of Commissioners regarding the development program and capabilities of the Board of Directors, and submits proposals for qualified candidates to the Board of Commissioners for presentation at the Annual General Meeting of Shareholders (RUPS).</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
III	Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi <i>Aspect 3: Function and Role of the Board of Directors</i>			
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5 <i>Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors.</i>	12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. 12. Determination of the number of members of the Board of Directors shall consider the condition of the Public Company and effectiveness of decision making.	Bank telah menentukan jumlah anggota Direksi dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha Bank saat ini dan rencana pengembangan ke depan, serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Bank memiliki 5 (lima) orang anggota Direksi yang profesional dan kompeten dibidang perbankan. Bank memiliki Direktur Kepatuhan/Direktur Independen yang bertanggungjawab terhadap penerapan GCG di Bank. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. <i>The Bank has determined the number of members of the Board of Directors by considering the complexity of the Bank's current business and future development plans, as well as effectiveness in decision making. The Bank has 5 (five) members of the Board of Directors who are professional and competent in the banking sector. The Bank has a Director Compliance/Independent Director who is responsible for the implementation of GCG in the Bank. The appointment of members of the Board of Directors is carried out in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di BAGI Implementation at BAGI	Keterangan Description
		13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. 13. Determination on the composition of the members of the Board of Directors considers the diversity, expertise, knowledge, and experience required	Penetapan komposisi anggota Direksi telah dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang relevan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing, khususnya di bidang perbankan atau bidang keuangan, serta mempertimbangkan kemampuan dalam melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat dengan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. <i>The determination of the composition of the members of the Board of Directors has been made by considering relevant knowledge, expertise and experience in carrying out duties in accordance with their respective fields, especially in the banking or financial fields, as well as considering the ability to carry out strategic management in the context of healthy development of the Bank by always guiding applicable laws and regulations.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
		14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 14. Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have accounting expertise and/or knowledge.	Direktur yang membawahi <i>Financial</i> dan <i>Accounting</i> mempunyai kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi antara lain dapat dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman serta riwayat jabatan yang pernah diemban. <i>Directors in charge of Financial and Accounting have qualifications of expertise and/or knowledge in the field of accounting, among others, can be seen based on educational background, experience and history of positions held.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6 <i>Improving the Quality of the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors.</i>	15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. 15. The Board of Directors has a selfassessment policy to evaluate its own performance.	<i>Self-assessment</i> Direksi telah dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Turunannya. <i>Self-assessment</i> terhadap Penerapan Tata Kelola Bank umum yang dilakukan melalui penilaian 3 (tiga) aspek <i>governance</i>, yaitu <i>governance structure</i>, <i>governance process</i>, dan <i>governance outcome</i>. <i>Self-assessment of the Board of Directors has been conducted in accordance with the provisions stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 4/POJK.03/2016 concerning The Assessment of the Soundness Level of Commercial Banks and its Derivative Regulations. Self-assessment of the Implementation of Governance of Commercial Banks is carried out through an assessment of 3 (three) aspects of governance, namely governance structure, governance process, and governance outcome.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di BAGI Implementation at BAGI	Keterangan Description
		16. Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. 16. The self-assessment policy on the Board of Directors performance is disclosed in the Annual Report of the Public Company	Hasil <i>self-assessment</i> Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini pada uraian Penilaian Kinerja Direksi di bab Tata Kelola Perusahaan. <i>The results of the Directors' self-assessment have been disclosed in this Annual Report in the description of the Directors' Performance Assessment in the Corporate Governance chapter.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
		17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. 17. The Board of Directors has a policy related to resignation of the members of the Board of Directors if such member is involved in financial crimes.	Kebijakan pengunduran diri Direksi telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PKP No. 0027.04.0 tanggal 28 Desember 2023, berdasarkan pedoman tersebut, jika ada anggota Direksi yang merugikan Bank atau negara atau apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum, maka akan diberhentikan atau masa jabatannya akan berakhir dengan sendirinya dan Bank akan menyelenggarakan RUPS atas hal tersebut. <i>The resignation policy of the Board of Directors has been regulated in the Board of Directors Charter PKP No. 0027.04.0 dated December 28, 2023, based on the guideline, if any member of the Board of Directors is detrimental to the Bank or the country or if the person concerned is found guilty by a court decision that has legal force, he/she will be dismissed or his/her term of office will expire automatically and the Bank will hold a GMS on the matter.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
IV	Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan <i>Aspect 4: Stakeholder Participation</i>			
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7 <i>Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation</i>	18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> 18. The Public company has a policy to prevent insider trading.	Bank menjaga kerahasiaan sesuai kaidah yang berlaku dengan tetap memperhatikan seluruh kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan. <i>The Bank maintains confidentiality in accordance with applicable rules while taking into account the interests of all Shareholders and Stakeholders.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
		19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i>. 19. The Public Company has an anticorruption and Anti-fraud policy.	Bank memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> sebagaimana dimuat dalam pedoman <i>Anti Fraud</i> No. 00001.03.0 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Pedoman Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i>, yang disosialisasikan secara berkala kepada seluruh kantor cabang agar dapat dilaksanakan secara konsisten. <i>The Bank has an anti-corruption and anti-fraud policy, as outlined in the Anti-Fraud Guidelines No. 00001.03.0 dated October 30, 2024, regarding the Implementation of Anti-Fraud Strategy. These guidelines are regularly socialized to all branch offices to ensure consistent implementation.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di BAGI Implementation at BAGI	Keterangan Description
		20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. 20. A Public Company has a policy regarding the selection and capacity building of suppliers or vendors.	Bank memiliki kebijakan seleksi dan peningkatan kemampuan vendor sebagaimana diatur dalam: a. KTI 0025.01.1 tanggal 24 Januari 2024 tentang Kebijakan Teknologi Informasi - Penggunaan Penyedia Jasa TI b. SESDM 013.02.0 tanggal 22 Januari 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Alih Daya/Outsourcing. c. SEO 116.04.0 tanggal 25 Januari 2023 tentang Pengadaan Jasa Profesional. <i>The Bank has a vendor selection and upgrade policy as stipulated in: a. KTI 0025.01.1 dated January 24, 2024, regarding the Information Technology Policy - Use of IT Service Providers. b. SESDM 013.02.0 dated January 22, 2020 concerning Provisions on the Use of Outsourcing. c. SEO 116.04.0 dated January 25, 2023 concerning Procurement of Professional Services.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
		21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. 21. The Public Company has a policy on the fulfillment of creditor's rights.	Bank melaksanakan ketentuan dan persyaratan yang dimuat dalam perjanjian antara Bank dengan kreditur secara konsisten. Bank menggunakan dan mengelola dana kredit secara tepat sesuai kebutuhannya. <i>The Bank consistently implements the terms and conditions contained in the agreement between the Bank and creditors. The Bank uses and manages credit funds appropriately according to their needs.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>
		22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing. 22. The Public Company has a policy on the whistleblowing system.	Bank memiliki kebijakan pelaksanaan whistleblowing system sebagaimana diatur dalam Pedoman Anti Fraud No. 00001.03.0 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud. Kebijakan tersebut telah mencakup cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola pengaduan, serta hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. Pengungkapan atas pelaksanaan kebijakan tersebut diuraikan pada bagian Whistleblowing System dalam bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. <i>The Bank has a whistleblowing system policy as outlined in the Anti-Fraud Guidelines No. 00001.03.0 dated October 30, 2024, regarding the Implementation of the Anti-Fraud Strategy. This policy includes procedures for reporting complaints, protection and confidentiality guarantees for whistleblowers, handling of complaints, the parties responsible for managing complaints, as well as the results and follow-up actions. The disclosure of the implementation of this policy is detailed in the Whistleblowing System section within the Corporate Governance chapter of this Annual Report.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>

No	Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Penerapan di BAGI Implementation at BAGI	Keterangan Description
		23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. 23. The Public Company has a long-term incentive policy for the Board of Directors and employees.	Masih dalam pengkajian dan pembahasan internal oleh Dewan Komisaris dan Direksi terkait kebijakan insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. <i>Still under internal review and discussion by the Board of Commissioners and Directors regarding long-term incentive policies for Directors and employees.</i>	Belum Terpenuhi <i>Not yet fulfilled</i>
V	Aspek 5: Keterbukaan Informasi <i>Aspect 5: Information Disclosure</i>			
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8 <i>Improving the Implementation of Information Disclosure.</i>	24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. 24. The Public Company benefits from the utilization of broader technology other than Website as information disclosure channel.	Bank mengungkapkan kebijakan komunikasi secara jelas pada Laporan Tahunan yang telah dimuat dalam <i>website</i> Bank. Bank telah melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Bank mengungkapkan informasi kegiatan usaha Bank dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris antara lain informasi terkait: a. <i>Website</i> Bank; b. Paparan Publik; c. Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan; d. <i>Company Profile</i>; e. <i>Press Release</i>; f. <i>Sponsorship</i>; dan g. Edukasi Perbankan. <i>The Bank clearly discloses the communication policy in the Annual Report which has been published on the Bank's website. The Bank has implemented the information disclosure policy based on the Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015 regarding the Website of Issuers or Public Companies. The Bank discloses information on the Bank's business activities in Indonesian and English, including information related to:</i> a. <i>Bank's website</i>; b. <i>Public Expose</i>; c. <i>Annual Report & Sustainability Report</i>; d. <i>Company Profile</i>; e. <i>Press Release</i>; f. <i>Sponsorship</i>; and g. <i>Banking Education</i>.	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>

No	Prinsip <i>Principle</i>	Rekomendasi <i>Recommendation</i>	Penjelasan Penerapan di BAGI <i>Implementation at BAGI</i>	Keterangan <i>Description</i>
		25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. 25. The Annual Report of the Public Company discloses share ownership of at least 5% (five percent), other than disclosure of ultimate shareholders of the Public Company through major and controlling shareholders.	Bank telah mengungkapkan informasi mengenai Pemegang Saham yang memiliki saham 5% (lima persen) atau lebih pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. <i>The Bank has disclosed information regarding Shareholders who own 5% (five percent) or more shares in the Company Profile chapter in this Annual Report.</i>	Terpenuhi <i>Fulfilled</i>

TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE

Transparency of Bad Governance Practices

LAPORAN ATAS KEGIATAN PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Bank berkomitmen untuk senantiasa mendukung program *Save Earth (Go Green)*, taksonomi hijau telah diterapkan dalam internal Bank meskipun sedikit sekali bersinggungan dengan kegiatan pencemaran lingkungan karena kegiatan usaha di industri perbankan.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Bank Artha Graha Internasional membayar pajak sebesar Rp190.9 miliar pada tahun 2024 sebagai wujud kontribusi kepada negara.

KESESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Dalam penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Bank Artha Graha Internasional, informasi yang tersaji telah disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku antara lain mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan penyusunan Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2024 telah diperiksa kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan disahkan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank dalam RUPS.

KASUS TERKAIT BURUH DAN KARYAWAN

Pada tahun 2024 tidak ada kasus/tindakan fraud yang terjadi di Bank Artha Graha Internasional

PENGUNGKAPAN SEGMENT OPERASI

Bab Analisis Pembahasan Manajemen telah mengungkapkan berbagai segmen operasi yang dilakukan oleh Bank disertai dengan informasi pendapatan dan laba/rugi.

KESESUAIAN BERKAS LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEBERLANJUTAN

Bank Artha Graha Internasional senantiasa melakukan pengecekan sebelum mengunggah Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan untuk memastikan kesesuaian data antara *hardcopy* dengan *softcopy*.

REPORT ON COMPANY ACTIVITIES THAT POLLUTE THE ENVIRONMENT

The Bank is committed to continuously supporting the *Save Earth (Go Green)* program, green taxonomy has been implemented within the Bank although it has very little contact with environmental pollution activities due to business activities in the banking industry.

FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS

Bank Artha Graha Internasional paid IDR190.9 billion in taxes in 2024 as a form of contribution to the country.

CONFORMITY OF PRESENTATION OF ANNUAL REPORTS AND FINANCIAL STATEMENTS WITH APPLICABLE REGULATIONS AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

In the preparation of the Annual Report and Financial Statements of Bank Artha Graha Internasional, the information presented has been adjusted to the applicable regulations and laws, including referring to the Financial Services Authority Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 Regarding Form and Content of Issuer's Annual Report or Public Companies and the preparation of the Financial Statements ending December 31, 2024 has been checked for compliance with applicable Financial Accounting Standards and authorized by the Public Accounting Firm appointed by the Bank in the GMS.

LABOR AND EMPLOYEE RELATED CASES

In 2024, there were no cases or instances of fraud at Bank Artha Graha Internasional.

DISCLOSURE OF OPERATING SEGMENTS

Management Discussion and Analysis chapter discloses the various operating segments of the Bank along with revenue and profit/loss information.

CONFORMITY OF ANNUAL REPORT FILE AND SUSTAINABILITY REPORT

Bank Artha Graha Internasional always checks before uploading the Annual Report to ensure data conformity between *hardcopy* and *softcopy*.

PERMODALAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Capital and Risk Management

Bank Artha Graha Internasional menyadari pentingnya penerapan praktik terbaik manajemen risiko seiring dengan bertambahnya kompleksitas usaha yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan agar Bank mampu beradaptasi serta mengatasi beragam tantangan yang timbul dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis perbankan. Lingkungan eksternal dan internal perbankan berubah dengan sangat dinamis seiring dengan berubahnya tuntutan dari berbagai Pemangku Kepentingan, peningkatan kompleksitas risiko kegiatan usaha dan tingkat persaingan di industri yang semakin kompetitif.

Bank telah menyusun kebijakan, proses, kompetensi, akuntabilitas, pelaporan, dan sistem informasi pendukung, serta mengimplementasikan pendekatan komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, memprioritaskan, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang berdampak terhadap bisnis, operasional, dan organisasi, dengan tujuan agar implementasi manajemen risiko berjalan efektif dan efisien. Hal ini dilakukan sejalan dengan komitmen pengelolaan yang dilakukan secara proaktif oleh Bank Artha Graha Internasional dalam rangka mendukung Bank dalam mencapai pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan serta memelihara tingkat *risk adjusted return* yang optimal dan *shareholder value*.

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dasar penerapan pengelolaan permodalan dan manajemen risiko Bank Artha Graha Internasional mengacu pada beberapa peraturan berikut:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK):

1. Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
3. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
4. POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
5. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
6. POJK No. 13/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum; dan
7. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Bank Artha Graha Internasional recognizes the importance of implementing best practices in risk management as the complexity of business continues to increase over time. This is done to enable the Bank to adapt and overcome the various challenges arising from changes in the banking business environment. Both external and internal banking environments are changing dynamically, driven by evolving demands from various stakeholders, increased business activity risks, and the growing level of competition in the industry.

The Bank has developed policies, processes, competencies, accountability, reporting, and supporting information systems, and has implemented a comprehensive approach to identify, measure, prioritize, monitor, and control risks that impact its business, operations, and organization. The goal is to ensure the effective and efficient implementation of risk management. This aligns with the proactive management commitment of Bank Artha Graha Internasional to support the Bank in achieving healthy and sustainable growth while maintaining an optimal risk-adjusted return and shareholder value.

BASIS FOR RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

The basis of Bank Artha Graha Internasional's capital and risk management implementation refers to the following regulations:

Financial Services Authority Regulations (POJK):

1. Law (UU) Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector;
2. POJK No. 4/POJK.03/2016 concerning the Assessment of the Soundness Level of Commercial Banks;
3. POJK No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks;
4. POJK No. 38/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks;
5. POJK No. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks;
6. POJK No. 13/POJK.03/2020 concerning the Amendment to the Financial Services Authority Regulation No. 38/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks; and
7. POJK No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK):

1. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
2. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
3. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum; dan
4. SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK):

1. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks;
2. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks;
3. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 concerning The Assessment of the Soundness Level of Commercial Banks; and
4. SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks.

PENGUNGKAPAN PERMODALAN

Bank Artha Graha Internasional memiliki profil kecukupan modal dan struktur permodalan yang kuat sebagai penopang pengembangan ekspansi usaha Bank saat sekarang dan di masa mendatang. Pemenuhan Bank terhadap berbagai ketentuan Regulator terkait permodalan dilakukan untuk memastikan agar struktur permodalan Bank telah *comply* dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tanggal 26 Desember 2022 No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, modal Bank Artha Graha Internasional terdiri dari:

1. Modal Inti
Modal inti terdiri dari modal inti utama (*Common Equity Tier 1/CET 1*) dan modal inti tambahan (*Additional Tier 1*). Modal inti utama terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclose reserve*). Cadangan tambahan modal ini mencakup faktor penambah (Pendapatan Komprehensif lainnya berupa selisih lebih penjabaran laporan keuangan, potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan kategori tersedia untuk dijual, dan saldo surplus revaluasi aset tetap ditambah Cadangan Tambahan Modal Lainnya berupa agio, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu, laba tahun berjalan, dana setoran modal dan lainnya berdasarkan persetujuan OJK) dan faktor pengurang (Pendapatan Komprehensif lainnya berupa selisih kurang penjabaran laporan keuangan, potensi kerugian yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan kategori tersedia untuk dijual ditambah cadangan tambahan modal lainnya berupa disagio, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih kurang penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif dengan cadangan kerugian penurunan

CAPITAL DISCLOSURE

Bank Artha Graha Internasional has a strong capital adequacy profile and capital structure to support the Bank's current and future business expansion. The Bank's compliance with various regulatory requirements related to capital is carried out to ensure that the Bank's capital structure is compliant and efficient. In accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) dated December 26, 2022 No. 27 of 2022 concerning the Second Amendment to POJK No. 11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Adequacy of Commercial Banks, Bank Artha Graha Internasional's capital consists of:

1. Tier 1 Capital
Core capital consists of main core capital (*Common Equity Tier 1/CET 1*) and additional core capital (*Additional Tier 1*). The main core capital consists of paid-up capital and disclosed reserve. The disclosed reserve includes enhancing factors (*Other Comprehensive Income in the form of excess translation of financial statements, potential gain from increase in fair value of available-for-sale financial assets, and surplus balance on revaluation of fixed assets plus Other Additional Capital Reserve in the form of agio, general reserve, prior years' profit, current year profit, capital deposit fund and others based on OJK approval*) and reducing factors (*Other Comprehensive Income in the form of excess translation of financial statements, potential losses from increase in fair value of available-for-sale financial assets plus other additional capital reserves in the form of disagio, prior year losses, current year losses, difference between allowance for possible losses on earning assets and allowance for impairment losses, difference*

nilai, selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi dari instrumen keuangan dalam *trading book* dan jumlah penyesuaian berdasarkan standar akuntansi keuangan, PPA non-produktif serta lainnya berdasarkan persetujuan OJK).

2. Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)
Modal pelengkap meliputi instrument modal dalam bentuk saham atau bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan, agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal yang tergolong sebagai modal pelengkap, dan cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah maksimum 1,25% dari ATMR risiko kredit.

between the amount of adjustments to valuation results of financial instruments in the trading book and the amount of adjustments based on financial accounting standards, non-productive PPA and others based on OJK approval).

2. Supplementary Capital (maximum 100% of core capital)
Supplementary capital includes capital instruments in the form of shares or other forms that meet the requirements, agio or disagio derived from the issuance of capital instruments classified as supplementary capital, and PPA general reserves on productive assets that must be calculated with a maximum amount of 1.25% of RWA credit risk.

Profil permodalan Bank Artha Graha Internasional dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The capital profile of Bank Artha Graha Internasional in the last 2 (two) years is as follows:

Jenis Modal Types of Capital	dalam jutaan rupiah in million rupiah	
	2024	2023
Modal Inti Core Capital	3.591.911	3.584.721
Modal Pelengkap Supplementary Capital	373.786	363.711
Jumlah Modal Total Capital	3.965.697	3.948.432

PENILAIAN KECUKUPAN PERMODALAN

Bank Artha Graha Internasional senantiasa memenuhi seluruh peraturan yang ada terkait dengan ketentuan kecukupan modal. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

CAPITAL ADEQUACY ASSESSMENT

Bank Artha Graha Internasional always complies with all existing regulations related to capital adequacy requirements. The calculation of the minimum capital adequacy requirement (CAR) and risk-weighted assets (RWA) is performed using the following methods:

Jenis Risiko Risk Type	Metode Penilaian Risiko Kecukupan Modal Capital Adequacy Risk Assessment Method
Risiko Kredit Credit Risk	Pendekatan Standar Standardized Approach
Risiko Pasar Market Risk	Pendekatan Standar Standardized Approach
Risiko Operasional Operational Risk	Pendekatan Standar Standardized Approach

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum menjadi panduan bagi Bank terkait penerapan manajemen risiko di Bank Artha Graha Internasional. Adapun kerangka proses manajemen risiko dalam pengelolaan bisnis dan operasional Bank terdiri dari:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Bank berpartisipasi aktif dalam penerapan manajemen risiko Bank. Dalam hal ini, pengawasan dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawab yang dimiliki serta dilakukan secara berkala dan konsisten, sekurang-kurangnya setiap bulan.

Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi terkait penerapan manajemen risiko di Bank Artha Graha Internasional antara lain:

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi Bank serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud;
2. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;
3. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks serves as a guide for the Bank regarding the implementation of risk management at Bank Artha Graha Internasional. The risk management process framework in managing the Bank's business and operations consists of:

1. *Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners;*
2. *Adequacy of risk management policies and procedures, and establishment of risk limits;*
3. *Adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes and risk management information systems; and*
4. *Comprehensive internal control system.*

ACTIVE SUPERVISION OF BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS

The Bank's Board of Directors and Board of Commissioners actively participate in the implementation of the Bank's risk management. In this case, supervision is carried out in accordance with their duties and responsibilities and is carried out regularly and consistently, at least every month.

Board of Directors

The duties and responsibilities of the Board of Directors regarding the implementation of risk management in Bank Artha Graha Internasional include:

1. *Developing written and comprehensive risk management policies, strategies, and frameworks including overall risk limits and per type of risk, taking into account the level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance in accordance with the Bank's conditions and taking into account the impact of risk on capital adequacy. After obtaining approval from the Board of Commissioners, the Board of Directors establishes the risk management policy, strategy and framework;*
2. *Evaluating and/or updating risk management policies, strategies, and frameworks at least 1 (one) time in 1 (one) year or at a more frequent frequency in the event of significant changes in factors affecting the Bank's business activities, risk exposure, and/or risk profile;*
3. *Establishing an organizational structure including clear authorities and responsibilities at each level of positions related to the implementation of risk management;*

- Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
- Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh Internal Audit;
- Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko; dan
- Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Risk Management yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, Komite ALCO, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Human Capital, Komite Kebijakan Perkreditan, dan Komite Produk. Selain itu, Direksi juga dibantu oleh Internal Audit, Direktorat Risk Management, dan Direktorat Compliance.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko di Bank Artha Graha Internasional memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;
- Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif; dan
- Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilakukan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan.

- Ensuring that all material risks and impacts caused by such risks have been followed up and submit accountability reports to the Board of Commissioners on a regular basis. The report includes, among others, progress reports and problems related to material risks along with corrective measures that have been, are being, and will be carried out;
- Ensuring the implementation of corrective measures for problems or irregularities in the Bank's business activities found by Internal Audit;
- Ensuring adequate financial support and infrastructure to manage and control risk; and
- Ensuring that the risk management function has been implemented independently, which is reflected in, among others, the separation of functions between Risk Management, which identifies, measures, monitors and controls risks, and the work unit that conducts and completes transactions.

In carrying out these duties and responsibilities, the Board of Directors is assisted by the Risk Management Committee, Credit Committee, Asset and Liability Committee, Information Technology Steering Committee, and Human Capital Committee. In addition, the Board of Directors is also assisted by the Internal Audit, Risk Management Directorate, and Compliance Directorate.

Board of Commissioners

In implementing risk management in Bank Artha Graha Internasional, the Board of Commissioners has the following duties and responsibilities:

- Approving risk management policies including risk management strategies and frameworks established in accordance with the Bank's risk appetite and risk tolerance;
- Evaluating risk management policies and risk management strategies at least 1 (one) time in 1 (one) year or at a more frequent frequency in the event of changes in factors that significantly affect the Bank's business activities;
- Evaluating the accountability of the Board of Directors and provide direction for improvement on the implementation of risk management policies on a regular basis. The evaluation is conducted in order to ensure that the Board of Directors effectively manages the Bank's activities and risks; and
- Ensuring risk management policies and processes are carried out effectively and integrated in the overall risk management process.

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut.

KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO, SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO

Bank Artha Graha Internasional memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang sesuai dengan penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang efektif, efisien, dan profesional terhadap 8 (delapan) jenis risiko utama untuk mendukung pertumbuhan Bank secara *prudent*, konsisten dan berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah Bank di mata seluruh Pemangku Kepentingan.

Kedelapan risiko utama tersebut terdiri dari:

1. Risiko Kredit;
2. Risiko Pasar;
3. Risiko Likuiditas;
4. Risiko Operasional;
5. Risiko Hukum;
6. Risiko Reputasi;
7. Risiko Strategik; dan
8. Risiko Kepatuhan.

Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko tersebut didokumentasikan dan selanjutnya ditinjau secara berkala berdasarkan perkembangan internal maupun eksternal.

KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Bank Artha Graha Internasional memiliki infrastruktur untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko didukung dengan ketersediaan sistem informasi manajemen yang memadai dan mampu mendukung fungsi manajemen risiko secara menyeluruh.

Penerapan ICAAP bertujuan untuk memastikan kecukupan modal sesuai profil risiko Bank di luar profil risiko yang sudah tercakup di pilar 1 (satu) yang sejalan dengan penerapan pilar 2 (dua) Basel II. Ketersediaan modal yang cukup senantiasa dipastikan agar mampu menyerap potensi kerugian material yang mungkin terjadi dalam skenario kondisi stress dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan (*sustainable business growth*).

The Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee in carrying out these duties and responsibilities.

ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT POLICIES AND PROCEDURES, AND ESTABLISHMENT OF RISK LIMITS

Bank Artha Graha Internasional has policies, procedures and limit setting in accordance with the implementation of an effective, efficient and professional risk management framework for 8 (eight) main types of risk to support the Bank's prudent, consistent and sustainable growth and increase the Bank's added value in the eyes of all Stakeholders.

The eight key risks consist of:

1. Credit Risk;
2. Market Risk;
3. Liquidity Risk;
4. Operational Risk;
5. Legal Risks;
6. Reputational Risk;
7. Strategic Risk; and
8. Compliance Risk.

The policies, procedures and risk limits are documented and reviewed periodically based on internal and external developments.

ADEQUACY OF RISK IDENTIFICATION, MEASUREMENT, MONITORING, AND CONTROL PROCESSES, AND RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

Bank Artha Graha Internasional has an infrastructure for risk identification, measurement, monitoring and control supported by the availability of an adequate management information system capable of supporting the risk management function as a whole.

The implementation of ICAAP aims to ensure capital adequacy in accordance with the Bank's risk profile beyond the risk profile already covered in pillar 1 (one) in line with the implementation of pillar 2 (two) of Basel II. The availability of sufficient capital is always ensured to be able to absorb potential material losses that may occur in stress scenarios and support sustainable business growth.

Sub Direktorat Credit Risk & ESG melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan risiko dan bekerja sama dengan seluruh unit bisnis dan unit pendukung melakukan proses pengendalian dan mitigasi risiko serta membangun sistem informasi manajemen risiko yang menyeluruh.

Bank menerapkan manajemen risiko yang meliputi 3 (tiga) bagian utama yaitu:

1. Proses Identifikasi;
2. Proses Pengukuran; dan
3. Proses Pemantauan dan Pengendalian Risiko.

3 (tiga) unit kerja yang terlibat dalam proses tersebut adalah *front office* (unit bisnis), *middle office* (unit manajemen risiko dan sistem prosedur), dan *back office* (unit operasional) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. *Front Office*

Jabatan kerja operasional yang dimiliki oleh Bank yang melaksanakan transaksi secara langsung berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, serta mengelola portofolio Bank, dengan tetap memperhatikan konsep yang telah ditetapkan oleh manajemen risiko.

- a. Kantor Cabang, yaitu Account Officer dan Branch Director;
- b. Direktorat Treasury, yaitu Dealer dan Treasury Sales;
- c. Unit kerja operasional lainnya, yaitu Customer Service dan Teller;
- d. Direktorat Business Banking; dan
- e. Regional Head.

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan penerapan sistem peringatan dini (*early warning system*), Sub Direktorat Non Credit Risk dilibatkan dalam setiap proses aktivitas *front office*, dengan cara:

- a. Mengidentifikasi dan menilai risiko setiap permohonan penyimpangan dari ketentuan operasi yang diajukan oleh unit kerja operasional sesuai batasan/limit dan ketentuan Direksi;
- b. Melakukan *review* serta memberikan rekomendasi berupa saran dan masukan terhadap *draft* kebijakan dan prosedur yang akan diterbitkan oleh Bank (Baru atau Revisi); dan
- c. Mengkaji risiko setiap rencana penerbitan produk atau aktivitas baru dan menganalisis risiko atas proses *User Acceptance Test* (UAT) untuk pengembangan produk atau aktivitas yang baru atau yang sudah ada.

Sub-Directorate of Credit Risk & ESG identifies, measures, and monitors risks and works closely with all business units and support units to control and mitigate risks and build a comprehensive risk management information system.

The Bank implements risk management which includes 3 (three) main parts, namely:

1. *Identification Process;*
2. *Measurement Process; and*
3. *Risk Monitoring and Control Process.*

The 3 (three) work units involved in the process are front office (business unit), middle office (risk management and procedure system unit), and back office (operational unit) which are explained as follows:

1. *Front Office*

Operational work positions of the Bank that carry out transactions directly based on their duties and responsibilities, and manage the Bank's portfolio, while still paying attention to the concepts set by risk management.

- a. *Branch Offices, namely Account Officers and Branch Director;*
- b. *Treasury Directorate, namely Dealer and Treasury Sales;*
- c. *Other operational work units are Customer Service and Teller;*
- d. *Directorate of Business Banking; and*
- e. *Regional Head.*

In order to implement prudential principles and early warning system, Sub-Directorate of Non Credit Risk is involved in every process of front office activities, by:

- a. *Identifying and assessing the risk of each request for deviation from the operating conditions submitted by the operational work unit in accordance with the limits/limits and provisions of the Board of Directors;*
- b. *Reviewing and providing recommendations in the form of advice and input on draft policies and procedures to be issued by the Bank (New or Revised); and*
- c. *Assessing the risk of any planned new product or activity and analyzing the risk of the User Acceptance Test (UAT) process for new or existing product or activity development.*

2. *Middle Office*

Bagian pendukung operasional Bank yang melakukan pengelolaan, penyusunan pedoman/prosedur operasional, dan pengawasan operasional, serta melakukan manajemen risiko portofolio secara *bankwide*, yaitu:

- a. Sub Direktorat Credit Risk & ESG dan Sub Direktorat Non Credit Risk
 - i. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
 - ii. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan (portofolio), maupun per jenis risiko, termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit-limit risiko yang ditetapkan oleh Direksi; dan
 - iii. Melakukan *stress testing* untuk mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
- b. Sub Direktorat System Procedure

3. *Back Office*

Bagian akhir dari proses operasional Bank yang menyelesaikan transaksi:

- a. Direktorat Asset Recovery; dan
- b. Direktorat Operation melakukan pengelolaan risiko *settlement*.

ORGANISASI DAN TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Bank telah memiliki beberapa unit kerja pada struktur organisasi Direktorat Risk Management yang dibentuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum untuk pengelolaan berbagai jenis risiko yang melekat pada Bank sesuai dengan kompleksitas kegiatan usahanya.

2. *Middle Office*

The Bank's operational support department that manages, prepares operational guidelines/procedures, and supervises operations, as well as performs bankwide portfolio risk management, namely:

- a. Sub-Directorate of Credit Risk & ESG and Sub-Directorate of Non Credit Risk
 - i. Developing procedures and tools for risk identification, measurement, monitoring and control;
 - ii. Monitoring overall risk position/exposure (portfolio), as well as per risk type, including monitoring compliance with risk tolerance and risk limits set by the Board of Directors; and
 - iii. Conducting stress testing to determine the impact of the implementation of risk management policies and strategies on the Bank's portfolio or overall performance.
- b. System Procedure Sub Directorate

3. *Back Office*

The final part of the Bank's operational process that completes a transaction:

- a. Directorate of Asset Recovery; and
- b. The Operations Directorate manages settlement risk.

RISK MANAGEMENT ORGANIZATION AND GOVERNANCE

The Bank has several working units in the organizational structure of the Risk Management Directorate established based on the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks to manage various types of risks inherent in the Bank in accordance with the complexity of its business activities.

Struktur Organisasi Direktorat Risk Management**Organizational Structure of the Risk Management Directorate**

Sebagai *second line of defense*, selain bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi tata kelola manajemen risiko secara independen, Direktorat *Risk Management* juga bekerja sama dan bermitra dengan seluruh unit bisnis dan unit pendukung, mulai dari level strategis sampai dengan level transaksi dalam rangka membangun proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan sistem informasi serta sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direktorat Risk Management memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang tertuang Pedoman Manajemen Risiko No. 00001.03.3 tentang Manajemen Risiko Umum.

As the *second line of defense*, in addition to being responsible for carrying out the risk management governance function independently, the Risk Management Directorate also cooperates and partners with all business units and support units, starting from the strategic level to the transaction level in order to build a comprehensive process of identification, measurement, monitoring, risk control and information systems and internal control systems.

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Management Directorate has a Guideline and Code of Conduct as stipulated in Risk Management Manual No. 00001.03.3 on General Risk Management.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko Bank Artha Graha Internasional memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi:

1. Menetapkan risiko terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
2. Menetapkan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko;
3. Menentukan limit dan penetapan toleransi risiko;
4. Menetapkan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko;
5. Menetapkan penilaian peringkat risiko;
6. Memberikan rekomendasi dalam penyusunan rencana darurat (*contingency plan*); dan
7. Melakukan kajian dan rekomendasi terhadap setiap pengembangan produk/aktivitas yang ada maupun yang baru.

Komposisi personel Direktorat Risk Management Bank Artha Graha Internasional pada akhir tahun 2024 terdiri dari 12 (dua belas) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Deputy Director, 2 (dua) orang Executive Officer dan 8 (delapan) orang staf. Seluruh personel Direktorat Risk Management diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi Bank.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Bank juga mengikutsertakan jajaran manajemen untuk berpartisipasi dalam Program Sertifikasi dan Resertifikasi Manajemen Risiko, Program Penyelarasan serta Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko. Informasi terkait sertifikasi manajemen risiko di tahun 2024 sebagai berikut:

Jabatan Position	Level Sertifikasi Certification Level	Jumlah Peserta Number of Participants
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jenjang 6 dan Jenjang 7 Level 6 and Level 7	3 orang 3 people
	Program Penyelarasan Alignment Program	1 orang 1 person
Direksi Board of Directors	Jenjang 7 Level 7	5 orang 5 people
	Program Penyelarasan Alignment Program	4 orang 4 people

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF RISK MANAGEMENT

Bank Artha Graha Internasional's risk management has duties and responsibilities that include:

1. Determining the risks associated with banking products and transactions;
2. Establishing the use of risk management measurement methods and information systems;
3. Determining limits and establishing risk tolerance;
4. Establishing an internal control system in the implementation of risk management;
5. Establishing a risk rating assessment;
6. Providing recommendations in the preparation of contingency plans; and
7. Conducting reviews and recommendations on any existing or new product/activity development.

The personnel composition of Bank Artha Graha Internasional's Risk Management Directorate at the end of 2024 consists of 12 (twelve) people, consisting of 1 (one) Deputy Director, 2 (two) Executive Officer and 8 (eight) staff. All Risk Management Directorate personnel are appointed and dismissed based on the decision of the Bank's Board of Directors.

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

The Bank also encourages its management to participate in the risk management certification program (BSMR) and refreshment program. Information related to risk management certification in 2024 is as follows:

Jabatan Position	Level Sertifikasi Certification Level	Jumlah Peserta Number of Participants
Deputy Director Deputy Director	Jenjang 4-5 Levels 4-5	14 orang 14 people
	Jenjang 6-7 Levels 6-7	12 orang 12 people
	Program Pemeliharaan Maintenance Program	7 orang 7 people

PELAKSANAAN KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko telah melaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di sepanjang tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penilaian Profil Risiko dan evaluasi perkembangannya;
2. Pengukuran KPMM sesuai Profil Risiko;
3. Pengukuran Risiko IT;
4. Pengukuran risiko portofolio kredit Bank;
5. Pengukuran *stress testing* risiko kredit, risiko pasar (risiko nilai tukar dan risiko suku bunga) dan risiko likuiditas dengan skenario sesuai peraturan OJK dan/atau best practice, termasuk penyampaian mitigasinya;
6. Pemantauan perkembangan NPL, CKPN, Write Off dan AYDA;
7. Penurunan eksposur rasio Kredit Kualitas Rendah (KKR)/Loan at Risk (LaR);
8. Tinjauan risiko dan Rekomendasi sektor ekonomi prioritas tahun 2025;
9. Pemantauan pelaksanaan Mark to Market (MtM) atas Surat Berharga yang dimiliki Bank termasuk Transaksi Money Market, Transaksi Forex, Posisi Devisa Netto (PDN) dan eksposur Surat Berharga;
10. Pemantauan pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Net Stable Funding Ratio (NSFR), Liquidity Coverage Ratio (LCR), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) termasuk perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Aset Likuid Bank;
11. Validasi insentif Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dari Bank Indonesia (PLM);
12. Review dan analisa risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru;
13. Review dan analisa permohonan deviasi Kantor Cabang/Unit Kerja terkait terhadap ketentuan internal yang berlaku;

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT ACTIVITIES

Risk Management carried out a number of activities under its duties and responsibilities throughout 2024, as follows:

1. Assessment of the Risk Profile and evaluation of its development;
2. Measurement of the Capital Adequacy Ratio (CAR) in accordance with the Risk Profile;
3. Measurement of IT Risk;
4. Measurement of the Bank's credit portfolio risk;
5. Stress testing for credit risk, market risk (exchange rate risk and interest rate risk), and liquidity risk using scenarios based on OJK regulations and/or best practices, including submission of mitigation plans;
6. Monitoring of developments in NPL, ECL, Write-Offs, and Foreclosed Assets (AYDA);
7. Reduction of exposure to Low-Quality Credit (LQC)/Loan at Risk (LaR) ratios;
8. Risk review and recommendations for priority economic sectors in 2025;
9. Monitoring of Mark-to-Market (MtM) implementation for securities held by the Bank, including Money Market Transactions, Forex Transactions, Net Open Position (NOP), and securities exposures;
10. Monitoring compliance with the Minimum Reserve Requirement (GWM), Macroprudential Liquidity Buffer (PLM), Net Stable Funding Ratio (NSFR), Liquidity Coverage Ratio (LCR), Macroprudential Intermediation Ratio (RIM), including developments in Third-Party Funds (TPF) and the Bank's Liquid Assets;
11. Validation of Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) incentives from Bank Indonesia;
12. Review and analysis of risks inherent in new products or activities;
13. Review and analysis of deviation requests submitted by Branch Offices/Work Units related to applicable internal regulations;

14. Penyampaian mitigasi risiko dari seluruh pemantauan dan review yang telah dilakukan;
15. Pemenuhan tindak lanjut komitmen kepada OJK;
16. Sosialisasi dan edukasi Budaya Risiko (*Risk Culture*) kepada seluruh *Risk Officer* cabang dan KPNO; dan
17. Pembuatan Aplikasi *Operational Risk Management (ORM)*.

14. *Submission of risk mitigation actions from all monitoring and reviews conducted;*
15. *Fulfillment of follow-up commitments to OJK;*
16. *Socialization and education of Risk Culture to all branch Risk Officers and Head Office; and*
17. *Development of an Operational Risk Management (ORM) Application.*

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mendukung kinerja dan menambah wawasan pengelola manajemen risiko, Bank Artha Graha Internasional mengikutsertakan personel dalam berbagai pelatihan, workshop dan seminar. Pengembangan kompetensi yang telah diikuti selama tahun 2024, yaitu:

RISK MANAGEMENT COMPETENCY DEVELOPMENT

In order to support the performance and broaden the knowledge of risk management managers, Bank Artha Graha Internasional participates personnel in various trainings, workshops and seminars. Competency development programs that were participated in 2024 include:

Materi Pengembangan Kompetensi/Latihan <i>Competency Development Materials/Training</i>	Waktu dan Tempat Pelaksanaan <i>Time and Venue</i>
Pembekalan & Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 <i>Risk Management Certification Training & Exam Level 4</i>	Jakarta, 28-29 dan 31 Mei 2024 <i>Jakarta, May 28-29 and 31, 2024</i>
Workshop Laporan Resolusi (LPS) & Recovery (OJK) <i>Resolution (LPS) & Recovery (OJK) Report Workshop</i>	Jakarta, 21-22 September 2024 <i>Jakarta, September 21-22, 2024</i>
Financial Risk Manager (FRM) - Preparation Program <i>Financial Risk Manager (FRM) - Preparation Program</i>	Jakarta, 6 Februari-18 April 2024 <i>Jakarta, February 6-April 18, 2024</i>
Seminar Penyelarasan Manajemen Risiko - Jenjang 7 <i>Risk Management Alignment Seminar - Level 7</i>	Jakarta, 7-8 Maret 2024 <i>Jakarta, March 7-8, 2024</i>
Seminar ESG Revolution <i>ESG Revolution Seminar</i>	Jakarta, 28 Agustus 2024 <i>Jakarta, August 28, 2024</i>
The 19 th Indonesia HR EXPO <i>The 19th Indonesia HR EXPO</i>	Jakarta, 11-12 Desember 2024 <i>Jakarta, December 11-12, 2024</i>

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Disclosure of Risk Exposure and Implementation of Risk Management

RISIKO KREDIT

Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, seperti risiko akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Pengungkapan Umum

1. Kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit
Rencana Bisnis Bank menjelaskan kebijakan terkait pengelolaan risiko kredit Bank termasuk kebijakan pembatasan eksposur yang ditetapkan setiap tahun per sektor ekonomi, jenis penggunaan, wilayah kerja, serta sektor yang menjadi perhatian dan perlu dihindari. Terkait hal tersebut, Direktorat Risk Management melakukan perhitungan serta analisis risiko portofolio kredit berdasarkan BMPK, sektor ekonomi, letak usaha dan eksposur kredit *Non-Performance Loan* (NPL), serta melaporkannya kepada manajemen secara periodik.
2. Mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko kredit
Direktorat Risk Management melakukan pengukuran risiko kredit melalui analisis profil risiko kredit yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Direksi dan Komite Manajemen Risiko secara periodik. Bank menggunakan pendekatan standar (*standardized approach*), sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia untuk mengukur kecukupan modal risiko kredit. Sistem pemeringkatan (*rating system*) yang digunakan berupa *Credit Risk Rating* (CRR) dan *Credit Risk Scoring* yang menjadi salah satu alat bantu memutuskan kredit produktif dan konsumtif.
3. Definisi tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impairment*)
Tagihan yang jatuh tempo akan mengalami penurunan nilai/*impairment*. Jika bukti objektif dan *management's expert judgement* mengindikasikan bahwa Bank Tagihan yang jatuh tempo akan mengalami penurunan nilai/*impairment*. Jika bukti objektif dan *management's expert judgement* mengindikasikan bahwa Bank tidak akan memperoleh kembali aset keuangan yang diberikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak perjanjian.

Upaya Mitigasi

Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Kredit Bank mengatur upaya mitigasi yang dilakukan untuk risiko kredit yang harus dijalankan oleh seluruh unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan risiko kredit. Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan dengan:

1. Menetapkan kembali *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* di bidang perkreditan Bank;

CREDIT RISK

Credit risk refers to the risk arising from the failure of other parties to fulfill their obligations to the Bank, including risks stemming from borrower defaults, credit concentration, counterparty credit risk, and settlement risk.

General Disclosure

1. *Credit concentration risk management policy*
The Bank's Business Plan outlines the Bank's credit risk management policy, including exposure limit policies established annually by economic sector, purpose of use, operational area, and sectors of concern or to be avoided. In this regard, the Risk Management Directorate conducts credit portfolio risk calculations and analysis based on Legal Lending Limit (LLL), economic sector, business location, and Non-Performing Loan (NPL) exposures, and reports the results to management on a regular basis.
2. *Credit risk measurement and control mechanisms*
Credit risk measurement and control mechanism The Risk Management Directorate measures credit risk through credit risk profile analysis which is reported to the Financial Services Authority, Board of Directors and Risk Management Committee periodically. The Bank uses a standardized approach, in accordance with Bank Indonesia regulations, to measure credit risk capital adequacy. The rating system used is in the form of Credit Risk Rating (CRR) and Credit Risk Scoring which is one of the tools to help decide productive and consumptive loans.
3. *Definition of overdue receivables and receivables with impairment*
Overdue receivables will undergo impairment. If objective evidence and management's expert judgment indicate that the Bank's overdue receivables will experience impairment, or if objective evidence and management's expert judgment suggest that the Bank will not recover the financial assets provided according to the timeline specified in the contractual agreement.

Mitigation Efforts

The Bank's Credit Policy Guidelines and Credit Risk Management Policy Guidelines regulate the mitigation efforts for credit risk, which must be implemented by all work units involved in credit risk management. These policies are implemented through:

1. *Reestablishing the Bank's credit risk appetite, risk tolerance, and risk limits;*

2. Melakukan kajian risiko atas sektor ekonomi/industri yang akan dibiayai oleh Bank secara periodik; dan
3. Melakukan *monitoring* terhadap perkembangan risiko konsentrasi kredit berdasarkan BMPK, Sektor Ekonomi dan Sektor Geografi secara periodik.

RISIKO PASAR

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul akibat posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, mengalami perubahan akibat dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko ini dikelola oleh Sub Direktorat Credit Risk & ESG yang bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi, kajian, analisis, penilaian, peninjauan, pemantauan dan pengendalian risiko pasar yang dihadapi Bank.

Selama tahun 2024, Bank telah melakukan kegiatan pengelolaan atas risiko suku bunga dan risiko nilai tukar, yang merupakan bagian dari risiko pasar. Pengelolaan risiko nilai tukar dilakukan dengan berpedoman pada batas Posisi Devisa Neto sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, di mana Bank wajib mengelola dan memelihara PDN paling tinggi sebesar 20% dari modal Bank secara harian. Terkait hal ini, Sub Direktorat Credit Risk & ESG melakukan pemantauan terhadap posisi PDN secara periodik dan melaporkannya kepada Manajemen secara periodik sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil pemantauan risiko secara periodik maupun perhitungan kecukupan modal, baik pada *banking book* maupun *trading book*;
2. Hasil pengukuran profil risiko pasar setiap bulan untuk melihat posisi dan kecenderungan risiko pasar, terutama jika terjadi peningkatan risiko dan parameter-parameter yang memengaruhi. Pemantauan risiko pasar dilakukan pula terhadap transaksi oleh Direktorat Treasury secara harian dan dilaporkan secara periodik kepada manajemen;
3. Hasil pemantauan limit transaksi *trading treasury* dan *counterpart*;
4. Langkah-langkah dan rencana dalam mengantisipasi risiko pasar atas transaksi mata uang asing dilakukan baik karena perubahan kurs maupun fluktuasi suku bunga, termasuk penjelasan mengenai semua penyediaan dana dan ikatan tanpa proteksi atau lindung nilai, serta utang yang suku bunganya berfluktuasi atau yang tidak ditentukan terlebih dahulu; dan
5. Pengungkapan informasi mengenai *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB), termasuk asumsi yang digunakan dalam pemantauan IRRBB seperti perilaku *non-maturity* deposit dan informasi *prepayment* serta frekuensi pengukuran IRRBB sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum.

2. Conducting periodic risk assessments on the economic sectors/industries financed by the Bank;
3. Monitoring credit concentration risk developments based on LLL, economic sectors, and geographical sectors on a regular basis.

MARKET RISK

Market risk refers to the risk of loss due to changes in market conditions affecting balance sheet positions and off-balance sheet items, including derivative transactions and option price movements. This risk is managed by the Sub-Directorate of Credit Risk & ESG, which is responsible for identifying, reviewing, analyzing, assessing, monitoring, and controlling the Bank's market risk exposure.

In 2024, the Bank managed interest rate and exchange rate risks as part of its overall market risk management. Exchange rate risk management complies with the Net Open Position (NOP) limit regulations set by the Financial Services Authority, under which the Bank must maintain a daily NOP not exceeding 20% of its capital. The Sub-Directorate of Credit Risk & ESG conducts periodic NOP monitoring and reports to management accordingly, including:

1. Periodic risk monitoring results and capital adequacy calculations for both banking book and trading book;
2. Monthly market risk profile measurements to assess risk levels and trends, especially in the event of increased risk or changes in influencing parameters. Daily market risk monitoring is also conducted on treasury transactions by the Treasury Directorate and reported periodically to management;
3. Monitoring of trading and counterparty transaction limits;
4. Plans and measures to anticipate market risk related to foreign exchange transactions, including fluctuations in exchange rates or interest rates, and disclosures of all unhedged exposures and floating rate or non-predefined liabilities; and
5. Disclosures related to Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB), including assumptions used in IRRBB monitoring such as non-maturity deposit behavior, prepayment information, and frequency of IRRBB assessments, in line with risk management implementation regulations for commercial banks.

Upaya Mitigasi

Pengelolaan risiko suku bunga Bank dilakukan terhadap *trading book* dan *banking book*. Pengelolaan risiko suku bunga *trading book* dilakukan melalui analisis dan pengendalian risiko serta penetapan limit dan pemantauan limit secara harian untuk aktivitas *trading*, yang meliputi transaksi *money market*, *foreign exchange*, dan surat-surat berharga. Di sisi lain, Bank melakukan analisis *repricing gap* antara *risk sensitive asset* dan *risk sensitive liabilities* untuk pengelolaan risiko suku bunga *banking book*.

RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas timbul akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Sub Direktorat Credit Risk & ESG melakukan pengelolaan atas risiko likuiditas melalui proses identifikasi, pengukuran, kajian, analisis, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas yang dihadapi Bank.

Upaya Mitigasi

Bank melakukan upaya mitigasi risiko dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran profil risiko likuiditas setiap bulan yang menggambarkan posisi dan kecenderungan risiko likuiditas Bank secara berkesinambungan, sehingga menjadi indikator peringatan dini, jika Bank mulai mengalami permasalahan likuiditas;
2. Melakukan pemantauan terhadap hasil pengukuran dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan likuiditas harian Bank, baik *primary reserve* maupun *secondary reserve*. *Secondary reserve* dilakukan dengan lebih hati-hati sejalan dengan kondisi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan *behavior* penarikan dana oleh Nasabah, sehingga kondisi likuiditas secara keseluruhan dapat tetap terjaga; dan
3. Melakukan pemantauan kecukupan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) periodik triwulan dan kecukupan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dari rata-rata rasio LCR selama satu bulan periode berjalan.

Mekanisme pengukuran risiko likuiditas dilakukan menggunakan alat ukur, seperti proyeksi arus kas, profil maturitas, dan *stress testing*, termasuk pelaksanaan simulasi rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*) sesuai dengan ketentuan Regulator dan/atau praktisi terbaik yang ada, klasifikasi aset bank yang masuk ke dalam *High Quality Liquid Asset* (HQLA).

Mitigation Efforts

The Bank's interest rate risk management is carried out on the *trading book* and *banking book*. *Trading book* interest rate risk management is conducted through risk analysis and control as well as setting limits and monitoring limits on a daily basis for trading activities, which include *money market* transactions, *foreign exchange*, and securities. On the other hand, the Bank analyzes the *repricing gap* between *risk sensitive assets* and *risk sensitive liabilities* for *banking book* interest rate risk management.

LIQUIDITY RISK

Liquidity risk arises from the Bank's inability to meet maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high quality liquid assets that can be collateralized, without disrupting the Bank's activities and financial condition. The Sub-Directorate of Credit Risk & ESG manages liquidity risk through a process of identification, measurement, assessment, analysis, monitoring and control of liquidity risk faced by the Bank.

Mitigation Measures

The Bank implements the following measures to mitigate liquidity risk:

1. Conducting monthly liquidity risk profile assessments to provide a continuous view of the Bank's liquidity risk position and trends, serving as an early warning indicator in case of emerging liquidity issues;
2. Monitoring the results of assessments and the fulfillment of the Bank's daily liquidity requirements, both for the primary reserve and the secondary reserve. Secondary reserve management is carried out more prudently in line with the condition of the Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) and customer fund withdrawal behavior, ensuring overall liquidity remains well-maintained; and
3. Monitoring the adequacy of the Net Stable Funding Ratio (NSFR) on a quarterly basis and the Liquidity Coverage Ratio (LCR) based on the average LCR for the current month.

Liquidity risk is measured using tools such as cash flow projections, maturity profiles, and stress testing, including simulations of the contingency funding plan, in accordance with regulatory requirements and/or prevailing best practices. This also includes the classification of the Bank's assets that qualify as High-Quality Liquid Assets (HQLA).

Strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas, risiko likuiditas harian, pengelolaan aset likuid berkualitas tinggi dan *marketable*, serta simulasi rencana pendanaan darurat dilakukan untuk mengendalikan risiko likuiditas. Pengelolaan risiko likuiditas diselenggarakan melalui rapat ALCO yang dilakukan setiap bulan dan berkelanjutan.

RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional timbul akibat tidak cukupnya dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Bank. Pengelolaan risiko operasional juga mencakup 4 risiko lainnya, yaitu risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan yang dikelola oleh Sub Direktorat Non Credit Risk.

Upaya Mitigasi

Upaya mitigasi yang dilakukan Bank adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pencatatan potensi kerugian oleh Sub Direktorat Non Credit Risk pada satuan kerja operasional secara periodik melalui aplikasi *Tools Loss Event* dan *Potential Loss Event* yang telah diimplementasikan secara *online* di seluruh cabang. Pengelolaan database kerugian menjadi salah satu data *input* dalam penilaian parameter profil risiko operasional;
2. Development aplikasi *Operational Risk Management (ORM)* yang didalamnya mencakup modul *Risk and Control Self Assesment (RCSA)*, *Loss Event Database (LED)* dan *Key Risk Indicator (KRI)* untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan sisi operasional Bank; dan
3. Melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan profil risiko operasional melalui identifikasi faktor-faktor penyebab kerugian operasional yang terjadi dan memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional terkait dalam melakukan mitigasi kejadian risiko di masa mendatang.

Sub Direktorat Non Credit Risk juga melakukan analisis, penilaian, tinjauan, dan pemantauan terhadap hal-hal berikut:

1. Pemantauan dan analisis terhadap kejadian-kejadian *fraud* yang terjadi di bank lain melalui berbagai media untuk dianalisis, dikaji, serta dibuatkan *summary* dan mitigasi risikonya ke seluruh cabang melalui Direktorat terkait, sehingga kejadian *fraud* di bank lain tersebut agar tidak terjadi pada Bank;
2. Analisis dan penilaian terhadap permohonan penyimpangan ketentuan operasi yang diajukan oleh Cabang/Direktorat terkait sesuai batasan yang ditetapkan oleh Direksi;

Funding strategies, liquidity position management, daily liquidity risk monitoring, management of high-quality and marketable liquid assets, as well as contingency funding plan simulations, are carried out to control liquidity risk. Liquidity risk management is conducted through monthly and ongoing Asset and Liability Committee (ALCO) meetings.

OPERATIONAL RISK

Operational risk arises from the inadequacy and/or failure of internal processes, human error, system failure, and/or external events that affect the Bank's operations. Operational risk management also covers four other risk types—legal risk, reputational risk, strategic risk, and compliance risk—which are managed by the Sub-Directorate of Non Credit Risk.

Mitigation Measures

The Bank's mitigation efforts are as follows:

1. *Sub-Directorate of Non Credit Risk potential losses within operational work units on a periodic basis through the Loss Event and Potential Loss Event tools, which have been implemented online across all branches. The loss database serves as one of the data inputs for assessing the Bank's operational risk profile parameters;*
2. *Development of the Operational Risk Management (ORM) application, which includes modules for Risk and Control Self-Assessment (RCSA), Loss Event Database (LED), and Key Risk Indicators (KRI), to identify weaknesses in the Bank's operational activities;*
3. *Monitoring the development of the Bank's operational risk profile through identification of factors causing operational losses and providing recommendations to relevant operational units for mitigating future risk events.*

Sub-Directorate of Non Credit Risk also analyzes, assesses, reviews, and monitors the following:

1. *Monitoring and analysis of fraud incidents that occur in other banks through various media to be analyzed, reviewed, and made a summary and risk mitigation to all branches through the relevant Directorate so that fraud incidents in other banks do not occur in the Bank;*
2. *Analysis and assessment of requests for deviations from operating regulations submitted by the relevant Branches/ Directorates within the limits set by the Board of Directors;*

3. Pemantauan terhadap risiko TI yang melekat pada aktivitas yang dilakukan oleh Direktorat IT dan Direktorat Digital Product secara periodik;
4. Tinjauan risiko terhadap rencana produk/aktivitas baru terkait dengan penggunaan TI;
5. Analisis dan penilaian atas proses UAT untuk pengembangan produk atau aktivitas yang telah ada maupun rencana penerbitan produk atau aktivitas baru; dan
6. Penilaian terhadap IT Risk Register yang merupakan bagian dari Laporan Penerapan Manajemen Risiko TI yang disampaikan oleh Direktorat IT ke Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun.

RISIKO HUKUM

Risiko hukum merupakan risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek ini disebabkan adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan dokumen yang tidak sempurna.

Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

Bank memantau perkembangan kasus-kasus hukum yang terjadi dan mengambil *lesson learn* dari kasus tersebut untuk pengelolaan risiko hukum. Bank senantiasa melakukan perhitungan potensi kerugiannya, baik penyelesaian kasus secara musyawarah mufakat/damai ataupun melalui jalur pengadilan untuk penanganan kasus hukum. Bank juga memberikan perhatian khusus atas kasus hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian secara signifikan. Penilaian profil risiko hukum dilakukan berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, bersamaan dengan profil risiko lainnya.

Upaya Mitigasi

Legal Bureau Bank Artha Graha Internasional melakukan pengelolaan risiko hukum dengan mitigasi sebagai berikut:

1. Melakukan analisis hukum atas produk dan/atau aktivitas baru, serta membuat standar dokumen hukum yang terkait dengan produk dan/atau aktivitas tersebut;
2. Memeriksa segala perjanjian yang akan dibuat antara Bank dengan pihak ketiga;
3. Melakukan pemeriksaan berkala atas perjanjian yang telah dibuat; dan
4. Memantau risiko hukum yang ada di seluruh cabang dan unit kerja Bank.

3. Monitoring of IT risks inherent in activities carried out by the SKTI Directorate and Channel & Payment System Sub-Directorate on a periodic basis;
4. Risk review of new product/activity plans related to the use of IT;
5. Analysis and assessment of the UAT process for the development of existing products or activities as well as plans for the issuance of new products or activities; and
6. Assessment of the IT Risk Register which is part of the IT Risk Management Implementation Report submitted by the SKTI Directorate to the Financial Services Authority every year.

LEGAL RISK

Legal risk refers to the risk arising from legal claims and/or weaknesses in legal aspects. These weaknesses may be due to the absence of supporting laws and regulations or deficiencies in contractual arrangements, such as the failure to meet the legal requirements for valid contracts or the improper execution of legal documents.

Legal Risk Control Mechanism

The Bank monitors the development of ongoing legal cases and derives lessons learned to enhance legal risk management. The Bank consistently assesses the potential financial impact, whether cases are settled amicably or pursued through legal proceedings. Special attention is given to legal cases with the potential to result in significant financial losses. Legal risk profile assessments are conducted in accordance with applicable Financial Services Authority (OJK) regulations and are submitted to the OJK in a timely manner, alongside other risk profiles.

Mitigation Measures

The Legal Bureau of Bank Artha Graha Internasional manages legal risk through the following mitigation measures:

1. Conducting legal analysis for new products and/or activities, and preparing standard legal documentation related to such products and/or activities;
2. Reviewing all agreements to be entered into between the Bank and third parties;
3. Performing regular reviews of existing agreements; and
4. Monitoring legal risks across all Bank branches and work units.

Direktorat Asset Recovery dan Sub Direktorat Litigasi Bank berfungsi menangani setiap permasalahan hukum yang terkait dengan litigasi agar risiko hukum yang mungkin timbul dapat diminimalkan.

RISIKO STRATEJIK

Risiko Strategik merupakan risiko yang timbul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Ketidaktepatan Bank dalam melakukan penyusunan strategi yang tepat dapat menimbulkan kegagalan bisnis Bank dimasa yang akan datang.

Kebijakan untuk Dapat Mengidentifikasi dan Merespons Perubahan Lingkungan Bisnis Ekstern dan Intern

Bank menetapkan sasaran dan strategi dengan melakukan analisis terhadap berbagai faktor internal dan eksternal. Analisis faktor-faktor Internal menggunakan SWOT dengan memetakan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*). Sedangkan, analisis faktor eksternal dengan mempertimbangkan kondisi domestik dan global yang sedang berkembang dan kecenderungannya, baik dari faktor makro ekonomi, politik, dan faktor lainnya serta asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh Bank. Oleh karena itu, Bank harus senantiasa mengikuti perkembangan yang ada dan melakukan penyesuaian yang diperlukan jika terjadi perubahan lingkungan bisnis secara eksternal dan internal.

Mekanisme untuk Mengukur Kemajuan yang Dicapai dari Rencana Bisnis yang Ditetapkan

Pemantauan dan penilaian atas progres pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dilakukan setiap bulan dan menyampaikan penetapan pengukuran *Key Performance Indicator* (KPI) terkait pencapaian tersebut kepada seluruh unit kerja. Untuk target RBB yang belum tercapai, Bank melakukan analisis penyebab atau hambatannya dan penetapan tindakan perbaikan yang diperlukan, sehingga diharapkan dapat dipenuhi pada periode berikutnya.

Upaya Mitigasi

Sub Direktorat Non Credit Risk melakukan pengelolaan risiko stratejik dengan mitigasi sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan kuantifikasi risiko strategis sejak awal penyusunan Rencana Bisnis Bank dengan berpedoman pada visi, misi, strategi serta kemampuan perusahaan;

The Bank's Asset Recovery Directorate and Litigation Sub-Directorate are responsible for handling all legal matters related to litigation in order to minimize potential legal risks.

STRATEGIC RISK

Strategic risk arises from inaccurate strategic decision-making and/or execution, as well as the failure to anticipate changes in the business environment. Inadequate strategic planning by the Bank may lead to future business failure.

Policies to Identify and Respond to Changes in External and Internal Business Environment

The Bank sets its goals and strategies by analyzing various internal and external factors. Internal factors are assessed using a SWOT analysis, mapping out strengths, weaknesses, opportunities, and threats. External factors are analyzed by taking into account evolving domestic and global conditions and trends, including macroeconomic, political, and other relevant factors, as well as assumptions established by the Bank. Therefore, the Bank must continuously monitor ongoing developments and make necessary adjustments in response to changes in both the external and internal business environment.

Mechanism to Measure Progress of the Established Business Plan

Monitoring and evaluation of the Bank's Business Plan (RBB) progress are carried out monthly, including the establishment and communication of Key Performance Indicators (KPIs) related to such progress to all work units. For RBB targets that have not been achieved, the Bank conducts root cause analysis and determines the necessary corrective actions to ensure target fulfillment in the subsequent period.

Mitigation Efforts

Sub-Directorate of Non Credit Risk manages strategic risk through the following mitigation efforts:

1. *Identifying and quantifying strategic risks from the early stages of the Bank's Business Plan preparation, guided by the company's vision, mission, strategy, and capabilities;*

2. Mengelola risiko stratejik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif di lingkungan Komite Manajemen Risiko, untuk selanjutnya disampaikan ke Direksi; dan
3. Melakukan pemantauan terkait perkembangan eksposur risiko stratejik dilakukan setiap bulan dan disampaikan kepada Direksi dan Komite Pemantau Risiko melalui Laporan Profil Risiko Bank.

2. *Managing strategic risk through collective and comprehensive deliberation and decision-making within the Risk Management Committee, to be further submitted to the Board of Directors; and*
3. *Monitoring developments in strategic risk exposure on a monthly basis, with results reported to the Board of Directors and the Risk Monitoring Committee through the Bank's Risk Profile Report.*

RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak dapat mematuhi dan/atau tidak dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur kewajiban Bank sebagai sebuah lembaga perbankan meliputi:

1. Self Assesment Tingkat Kesehatan Bank (TKB);
2. Pemenuhan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
3. Kualitas Aset;
4. Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN);
5. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
6. Penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG);
7. Posisi Devisa Neto (PDN);
8. Giro Wajib Minimum (GWM);
9. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM); dan
10. Risiko lain yang terkait dengan Ketentuan Tertentu.

Strategi Manajemen Risiko dan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan

Bank memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan, antara lain yang berkaitan dengan:

1. Kebijakan
 - a. Ketepatan penetapan limit risiko yang telah ditetapkan;
 - b. Kebijakan manajemen risiko dengan arah dan strategi usaha Bank;
 - c. Penerapan kepatuhan, pengaturan tanggung jawab dan akuntabilitas;
 - d. Kebijakan mengecualikan suatu pengambilan keputusan yang menyimpang (*irregularities*); dan
 - e. Penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala.
2. Prosedur
 - a. Ketepatan waktu mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh Karyawan pada setiap jenjang organisasi;
 - b. Kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk baru;

COMPLIANCE RISK

Compliance risk refers to the risk arising from the Bank's inability to comply with and/or implement prevailing laws, regulations, and applicable provisions. The laws and regulations governing the Bank's obligations as a banking institution include:

1. Bank Soundness Level Self-Assessment (TKB);
2. Fulfillment of Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR/ KPMM);
3. Asset Quality;
4. Establishment of Allowance for Impairment Losses (CKPN);
5. Legal Lending Limit (BMPK);
6. Implementation of Good Corporate Governance (GCG);
7. Net Open Position (NOP/PDN);
8. Statutory Reserve Requirements (GWM);
9. Macroprudential Intermediation Ratio (RIM); and
10. Other risks related to specific regulatory provisions.

Risk Management Strategy and Effectiveness of Risk Management Implementation for Compliance Risk

The Bank ensures the effectiveness of compliance risk management implementation, among others relating to:

1. Policy
 - a. Accuracy in setting risk limits;
 - b. Alignment of risk management policies with the Bank's business direction and strategy;
 - c. Implementation of compliance, including clear accountability and responsibility arrangements;
 - d. Policies to address irregularities in decision-making; and
 - e. Regular implementation of compliance checks through established procedures.
2. Procedures
 - a. Timely communication of policies to all employees across all organizational levels;
 - b. Adequate controls over new product development;

- c. Kecukupan laporan dan sistem data;
 - d. Kecukupan pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi Bank;
 - e. Kecukupan pengendalian intern Bank, termasuk aspek pemisahan fungsi dan pengendalian berlapis (*dual control*);
 - f. Sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan tepat guna;
 - g. Efektivitas dari pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas data;
 - h. Kecukupan proses menginterpretasikan (penafsiran) perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
 - i. Komitmen Bank untuk memastikan bahwa sumber daya Bank telah tepat dialokasikan untuk kepentingan pelatihan Karyawan dan peningkatan budaya kepatuhan;
 - j. Identifikasi dan tindakan korektif yang tepat waktu terhadap pengaruh pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - k. Kecukupan mengintegrasikan aspek kepatuhan pada setiap tahap perencanaan Bank (*corporate planning*).
3. *Human Capital*
- a. Ketepatan program kompensasi dan pengelolaan kinerja Karyawan dan pejabat Bank;
 - b. Tingkat *turnover* Karyawan dan pejabat Bank yang menduduki posisi yang strategis pada Bank (*high risk taking unit*);
 - c. Kecukupan program pelatihan;
 - d. Kecukupan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi Bank; dan
 - e. Tingkat pemahaman dan kesesuaian arah strategi usaha dengan *risk tolerance*.
4. *Control System*
- a. Efektivitas dan independensi fungsi audit dan Sub Direktorat Non Credit Risk;
 - b. Akurasi, kelengkapan, dan integritas laporan serta sistem informasi manajemen;
 - c. Keberadaan sistem pemantauan terhadap *irregularities* yang mampu mengidentifikasi dan mengukur peningkatan frekuensi dan jumlah eksposur risiko;
 - d. Tingkat responsif Bank terhadap penyimpangan kebijakan dan prosedur intern Bank; dan
 - e. Tingkat responsif Bank terhadap penyimpangan dalam sistem pengendalian internal Bank.

- c. *Adequate reporting systems and data infrastructure;*
 - d. *Sufficient oversight by the Board of Commissioners and Board of Directors;*
 - e. *Adequate internal control systems, including segregation of duties and dual control mechanisms;*
 - f. *Timely and effective management information systems;*
 - g. *Effective controls to ensure the accuracy, completeness, and integrity of data;*
 - h. *Adequate processes for interpreting applicable laws and regulations;*
 - i. *The Bank's commitment to ensuring the appropriate allocation of resources for employee training and the promotion of a compliance culture;*
 - j. *Timely identification and corrective action in response to regulatory violations or instances of non-compliance; and*
 - k. *Adequate integration of compliance considerations into all stages of the Bank's corporate planning.*
3. *Human Capital*
- a. *Appropriateness of compensation programs and performance management of Bank employees and officers;*
 - b. *Turnover rate of employees and Bank officials who occupy strategic positions in the Bank (high risk taking unit);*
 - c. *Adequacy of training programs;*
 - d. *Adequacy of the competence of the Bank's Board of Commissioners and Directors; and*
 - e. *Level of understanding and suitability of business strategy direction with risk tolerance.*
4. *Control System*
- a. *Effectiveness and independence of the audit function and Sub-Directorate of Non Credit Risk;*
 - b. *Accuracy, completeness, and integrity of reporting and management information systems;*
 - c. *Existence of monitoring systems for irregularities, capable of identifying and measuring increases in frequency and exposure to risk;*
 - d. *The Bank's responsiveness to deviations from internal policies and procedures; and*
 - e. *The Bank's responsiveness to weaknesses in the internal control system.*

Mekanisme untuk Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan

1. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga eksposur kepatuhan sesuai limit toleransinya dan/atau apabila terjadi peningkatan eksposur risiko kepatuhan, antara lain:
 - a. Menerbitkan prosedur perihal kriteria dan batasan tertentu yang ditetapkan oleh Direksi untuk menilai unsur kepatuhannya terhadap perundang-undangan dan peraturan Regulator yang berlaku berikut *checklist*-nya atas setiap permohonan kredit;
 - b. Melakukan *monitoring* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan Bank ke Regulator;
 - c. Pelatihan internal secara intensif terhadap kepatuhan Karyawan dan memastikan efektivitas pelatihan tersebut dengan melakukan pengujian pelatihan dan pemantauan kinerjanya dalam pelaksanaan tugas reguler;
 - d. Pelaksanaan tinjauan dan kajian terhadap kebijakan, pedoman dan prosedur kerja untuk meyakinkan telah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan Regulator yang berlaku; dan
 - e. Melakukan sosialisasi pemahaman risiko kepatuhan kepada seluruh jenjang organisasi Bank secara berkesinambungan.
2. Bank melakukan sosialisasi budaya kepatuhan secara terus-menerus dan berkesinambungan ke seluruh Karyawan dan jenjang organisasi dengan berpedoman kepada visi, misi, nilai-nilai perusahaan, program kerja, budaya kerja, dan Kode Etik perusahaan.

Upaya Mitigasi

Pengelolaan risiko kepatuhan dengan mitigasi sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan memberikan masukan kepada unit bisnis serta unit operasional dalam hal pengembangan produk dan/atau aktivitas baru;
2. Melakukan penilaian terhadap kebijakan pedoman dan prosedur internal yang dimiliki dalam rangka memastikan bahwa seluruh peraturan eksternal telah disediakan akomodasi sedemikian rupa dan dipatuhi dalam pelaksanaannya;
3. Melakukan pengawasan setiap bulan mengenai perkembangan eksposur risiko kepatuhan Bank dan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris serta Direksi melalui Laporan Profil Risiko Bank; dan
4. Melakukan sosialisasi terkait peraturan yang berlaku kepada seluruh jajaran perusahaan melalui media *online*, sehingga setiap unit kerja dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perusahaan.

Mechanism for Monitoring and Controlling Compliance Risk

1. *Taking necessary steps to maintain compliance risk exposure within tolerance limits and/or addressing increases in compliance risk exposure, including:*
 - a. *Issuing procedures regarding specific criteria and limits set by the Board of Directors to assess compliance with applicable laws and regulations, along with a checklist for each credit application;*
 - b. *Monitoring the timely submission of reports from the Bank to regulators;*
 - c. *Conducting intensive internal training on employee compliance and ensuring the effectiveness of the training by testing and monitoring performance during regular tasks;*
 - d. *Reviewing and evaluating policies, guidelines, and work procedures to ensure they align with applicable laws and regulations; and*
 - e. *Continuously socializing compliance risk awareness across all levels of the Bank's organization.*
2. *The Bank continuously socializes a culture of compliance to all employees and organizational levels, guided by the company's vision, mission, values, work programs, work culture, and Code of Conduct.*

Mitigation Measures

Compliance risk management is mitigated through the following measures:

1. *Identifying and managing compliance risks from the outset by providing input to business units and operational units in the development of new products and/or activities;*
2. *Assessing internal policy guidelines and procedures to ensure that all external regulations are adequately accommodated and complied with in their implementation;*
3. *Monitoring the developments of the Bank's compliance risk exposure monthly, with results reported to the Board of Commissioners and the Board of Directors through the Bank's Risk Profile Report; and*
4. *Conducting socialization on applicable regulations to all levels of the company through online media, ensuring that each work unit can carry out its duties and responsibilities in accordance with company regulations.*

RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi timbul akibat adanya penurunan tingkat kepercayaan Pemangku Kepentingan akibat dari persepsi negatif terhadap Bank. Kegagalan Bank dalam menjaga reputasi baiknya di mata masyarakat menjadi penyebab timbulnya persepsi negatif tersebut. Penurunan atau hilangnya kepercayaan Nasabah terhadap Bank yang pada akhirnya berdampak langsung pada kinerja, khususnya pada pendapatan usaha dan volume aktivitas Bank terjadi apabila risiko ini terus berlanjut.

Kebijakan dan Mekanisme Risiko Reputasi

Penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi Bank mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko reputasi;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko reputasi serta sistem informasi manajemen risiko reputasi; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Kebijakan Bank dalam Melaksanakan Manajemen Risiko Reputasi

1. Bank mempunyai kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip-prinsip transparansi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Nasabah dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk mengendalikan risiko reputasi, di mana kebijakan tersebut telah sejalan dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan Nasabah;
2. Bank memiliki dan melaksanakan kebijakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita atau publikasi yang bersifat negatif atau mencegah informasi yang cenderung kontra produktif, antara lain dengan cara menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk menghadapi berita negatif; dan
3. Bank mempunyai protokol khusus untuk pengelolaan reputasi pada saat krisis, sehingga dapat dengan cepat mengantisipasi peningkatan risiko reputasi pada saat krisis.

Mekanisme Manajemen Risiko Reputasi Bank

1. Identifikasi risiko reputasi;
2. Penilaian/pengukuran risiko reputasi;
3. Pemantauan risiko reputasi; dan
4. Pengendalian risiko reputasi, antisipasi dan mitigasi risiko reputasi.

REPUTATION RISK

Reputational risk arises from a decline in stakeholder trust due to negative perceptions of the Bank. The failure of the Bank to maintain its good reputation in the eyes of the public leads to the emergence of these negative perceptions. A decrease or loss of customer trust in the Bank, which ultimately directly impacts performance, particularly in terms of business revenue and banking activity volume, occurs if this risk persists.

Reputation Risk Policy and Mechanism

The implementation of risk management for the Bank's reputational risk includes:

1. *Active supervision by the Board of Directors and the Board of Commissioners;*
2. *Adequacy of risk management policies and procedures, as well as the establishment of reputational risk limits;*
3. *Adequacy of processes for identifying, measuring, monitoring, and controlling reputational risks, along with a reputational risk management information system; and*
4. *A comprehensive internal control system.*

Bank's Policy on Reputation Risk Management

1. *The Bank has written policies and procedures that adhere to the principles of transparency in order to improve service quality to customers and other stakeholders, aiming to control reputational risks. These policies align with the relevant laws and regulations governing customer protection;*
2. *The Bank has and implements an appropriate communication policy to address negative news or publications or prevent counterproductive information, including by applying effective media strategies to handle negative news; and*
3. *The Bank has specific protocols for reputational management during a crisis, enabling it to quickly anticipate and mitigate reputational risks during crises.*

Bank's Reputation Risk Management Mechanism

1. *Identification of reputational risks;*
2. *Assessment/measurement of reputational risks;*
3. *Monitoring of reputational risks; and*
4. *Control of reputational risks, anticipation, and mitigation of reputational risks.*

Penerapan manajemen risiko reputasi dituangkan dalam ketentuan internal Bank dalam Pedoman Manajemen Risiko tentang Manajemen Risiko Umum dan Manajemen Risiko Reputasi.

Upaya Mitigasi

Corporate Secretary melakukan pengelolaan risiko reputasi dengan mitigasi sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media untuk memantau publikasi negatif atau keluhan Nasabah yang muncul di media;
2. Membuat klarifikasi dan tanggapan sesuai dengan langkah terbaik yang ditempuh perusahaan apabila terdapat pemberitaan negatif dan keluhan Nasabah yang muncul di media;
3. Melakukan analisis risiko reputasi yang mungkin timbul, serta strategi untuk mengantisipasi risiko saat meluncurkan produk/layanan/program baru Bank; dan
4. Menyiapkan panduan untuk *frontliner* dan *spokesperson* agar dapat menjelaskan informasi secara benar dan proporsional kepada Nasabah terkait informasi material atau yang penting untuk diketahui oleh Nasabah.

Kecukupan modal yang dimiliki Bank mampu mendukung jalannya bisnis dan telah sesuai dengan Rencana Bisnis Bank pada tahun 2024. Kecukupan modal Bank juga senantiasa melampaui ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan, di mana Bank termasuk dalam klasifikasi Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti kategori 1 (KBMI 1) sampai dengan akhir tahun 2024.

Bank harus juga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, dengan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Pengamanan Perusahaan atau *Corporate Social Safety Responsibility* (CSSR). Sebagai wujud komitmen, Bank menjalankan program CSSR yang berfokus pada bidang pelestarian lingkungan, penanggulangan bencana, sosial kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. Program CSSR yang dijalankan Bank terutama ditujukan untuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasi Bank.

The implementation of reputational risk management is outlined in the Bank's internal regulations under the Risk Management Guidelines for General Risk Management and Reputational Risk Management.

Mitigation Efforts

The Corporate Secretary manages reputational risk with the following mitigation steps:

1. *Monitoring media coverage to track negative publicity or customer complaints that appear in the media;*
2. *Providing clarification and responses based on the best course of action the company takes if negative coverage or Customer complaints arise in the media;*
3. *Conducting reputational risk analysis that may emerge, along with strategies to anticipate risks when launching new products/services/programs of the Bank; and*
4. *Preparing guidelines for frontliners and spokespersons to ensure they provide accurate and proportional information to Customers regarding material or important information that Customers should be aware of.*

The capital adequacy held by the Bank is sufficient to support its business operations and is in line with the Bank's Business Plan for 2024. The Bank's capital adequacy consistently exceeds the minimum requirements set by the Financial Services Authority, and the Bank is classified under the Core Capital Group 1 (KBMI 1) category until the end of 2024.

The Bank must also generate value for all stakeholders by implementing the Corporate Social Safety Responsibility (CSSR) program. As a form of its commitment, the Bank carries out CSSR programs that focus on environmental preservation, disaster relief, community welfare, and community empowerment. These CSSR programs are primarily directed at communities located in the Bank's operational areas.

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan, Bank telah berkomitmen dalam menerapkan program keuangan berkelanjutan yang merupakan dukungan sektor keuangan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Bank sangat menyadari bahwa sistem keuangan dapat mengambil peran penting dalam mencegah terjadinya praktik pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan, yang akhirnya berdampak pada kesenjangan sosial dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Bank Artha Graha Internasional secara berkala menyajikan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk Laporan Keberlanjutan pada buku terpisah dalam rangka mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial lingkungan, serta tata kelola Bank yang baik. Laporan tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu mengacu Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik serta GRI (*Global Reporting Initiative*) Standard.

As a financial institution, the Bank is committed to implementing sustainable finance programs as a means of supporting the financial sector's contribution to sustainable development. The Bank is fully aware that the financial system can play a vital role in preventing the funding or investment in business activities that excessively exploit natural resources, which in turn can lead to social inequality and environmental degradation.

Bank Artha Graha Internasional periodically discloses its social and environmental responsibility performance through a separate Sustainability Report, as part of its commitment to economic, social, and environmental sustainability, as well as good corporate governance. This report refers to Circular Letter of the Financial Services Authority (OJK) No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies, which is based on OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies, and follows the Global Reporting Initiative (GRI) Standards.

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Overview of the Bank's Risk Management System Effectiveness

Tabel 1.a. Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Umum

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in million of Rupiah, unless otherwise stated

Komponen Modal Capital Component		31 Desember 2024 December 31, 2024		31 Desember 2023 December 31, 2023	
		Bank	Konsolidasi Consolidation	Bank	Konsolidasi Consolidation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Komponen Modal Capital Component				
A	Modal Inti Core Capital	3.591.911	3.591.911	3.584.721	3.584.721
1	Modal Disetor Paid-in Capital	2.242.372	2.242.372	2.242.372	2.242.372
2	Cadangan Tambahan Modal Disclosed Reserve	1.604.707	1.604.707	1.644.982	1.644.982
3	Modal Inovatif Innovative Capital	-	-	-	-
4	Faktor Pengurang Modal Inti Core Capital Deduction	255.168	255.168	302.633	302.633
5	Kepentingan Nonpengendali Non Controlling Interest	-	-	-	-
B	Modal Pelengkap *) Supplementary Capital *)	373.786	373.786	363.711	363.711
1	Level Atas Upper Tier 2	-	-	-	-
2	Level Bawah Maksimum 50% Modal Inti Lower Tier 2 Maximum 50% of the Core Capital	-	-	-	-
3	Faktor Pengurang Modal Pelengkap Supplementary Capital Deduction	-	-	-	-
C	Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap Core Capital and Supplementary Capital Deduction Factors	-	-	-	-
	Eksposur Sekuritisasi Securitization Exposure	-	-	-	-
D	Modal Pelengkap Tambahan yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3) **) Additional Supplementary Capital that Satisfies Requirements (Tier 3) **)	-	-	-	-

Tabel 1.a. Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Umum

Tabel 1.a. Quantitative Disclosure of Commercial Bank Capital Structure

dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
in million of Rupiah, unless otherwise stated

Komponen Modal Capital Component		31 Desember 2024 December 31, 2024		31 Desember 2023 December 31, 2023	
		Bank	Konsolidasi Consolidation	Bank	Konsolidasi Consolidation
E	Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar <i>Additional Supplementary Capital Allocated to Anticipate Market Risk</i>	-	-	-	-
II	Total Modal Inti dan Modal Pelengkap (A + B - C) <i>Total Core Capital and Supplementary Capital (A + B - C)</i>	3.965.697	3.965.697	3.948.432	3.948.432
III	Total Modal Inti, Modal Pelengkap, dan Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar (A + B - C + E) <i>Total Core Capital, Supplementary Capital And Additional Supplementary Capital Allocated To Anticipate Market Risk (A + B - C + E)</i>	3.965.697	3.965.697	3.948.432	3.948.432
IV	Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit <i>Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk</i>	13.902.911	13.902.911	14.519.135	14.519.135
V	Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional <i>Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk</i>	1.036.269	1.036.269	977.823	977.823
VI	Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar <i>Risk Weighted Assets (RWA) for Market Risk</i>	105.898	105.898	321.312	321.312
A	Metode Standar <i>Standardized Approach</i>	105.898	105.898	321.312	321.312
B	Metode Internal <i>Internal Model</i>	-	-	-	-
VII	Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar [VII:(IV + V + VI)] <i>Capital Adequacy Ratio for Credit Risk, Operational Risks and Market Risks [VII:(IV + V + VI)]</i>	26,35%	26,35%	24,96%	24,96%

*) Modal Pelengkap mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

**) Modal Pelengkap Tambahan yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3) mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

*) Supplementary Capital refers to Bank Indonesia Regulation No. 15/12/PBI/2013 dated December 12, 2013, concerning Capital Adequacy Ratio for Commercial Banks.

**) Eligible Additional Supplementary Capital (Tier 3) refers to Bank Indonesia Regulation No. 15/12/PBI/2013 dated December 12, 2013 concerning Capital Adequacy Ratio for Commercial Banks.

Tabel 2.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Cabang - Bank secara Individual

Table 2.1.a. Disclosure of Net Receivables by Branch - Bank Individually

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 December 31, 2024							
		Tagihan Bersih Berdasarkan Cabang Net Receivables by Branch							
		AMBON DIPONEGORO	ARTHA GADING	BALIKPAPAN	BANDUNG ASIA AFRIKA	BANJARMASIN	BATAM	BITUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	334	174.692	62.913	39.377	69.540	52.506	18.799	
6	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	4.179	49.898	-	15.878	-	84	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retirement Loans	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables	10.519	12.973	3.950	5.765	48	2.720	460	
9	Tagihan kepada Korporasi Corporate Receivables	3.215	17.693	-	-	67	12.010	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	49	98	17	26	-	45	11	
11	Aset Lainnya Other Assets	49.584	222.349	1.891	10.986	7.987	12.377	3.620	
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) Exposure in the Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Total	67.880	477.704	68.771	72.033	77.642	79.742	22.890	

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

	31 Desember 2024 December 31, 2024									
	Tagihan Bersih Berdasarkan Cabang Net Receivables by Branch									
	BOGOR	CIKARANG	DENPASAR BALI	JAMBI	KARET SURABAYA	KARTINI CIREBON	KENDARI	KUPANG	LAMPUNG	MAKASSAR A. YANI
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-
	159.824	158.506	21.441	58.452	26.914	2.018	21.959	6.249	25.270	117.579
	783	-	-	-	625	-	1.750	1.398	653	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.314	8.539	5.077	107	29.169	2.217	829	3.882	1.482	2.243
	-	1.256	-	-	52.489	-	-	-	-	-
	327	284	178	149	24.221	166	80	91	32	315
	16.205	7.472	18.566	10.550	15.475	8.238	11.936	15.480	7.326	13.483
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	182.452	176.057	45.262	69.257	148.892	12.639	36.554	27.351	34.763	133.620

Tabel 2.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Cabang - Bank secara Individual

Table 2.1.a. Disclosure of Net Receivables by Branch - Bank Individually

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 December 31, 2024							
		Tagihan Bersih Berdasarkan Cabang Net Receivables by Branch							
		MATRAMAN	MEDAN PEMUDA	MELAWAI	P. JAYAKARTA	PALEMBANG	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
1	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	109.571	32.065	102.811	46.322	101.248	29.359	121.271	
6	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	9.243	-	3.980	755	3.561	-	548	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retirement Loans	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables	7.797	6.831	20.137	12.746	813	434	8.072	
9	Tagihan kepada Korporasi Corporate Receivables	12.458	175.149	49.571	13.036	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	1.628	2	493	87	2	12	110	
11	Aset Lainnya Other Assets	8.860	20.088	30.632	16.670	10.801	1.726	6.363	
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) Exposure in The Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Total	149.556	234.134	207.624	89.617	116.424	31.531	136.363	

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

	31 Desember 2024 December 31, 2024								
	Tagihan Bersih Berdasarkan Cabang Net Receivables by Branch								
	PONTIANAK	SAMARINDA	SAMRAT MANADO	SEMARANG PANDANARAN	SOLO	SUDIRMAN JKT	SURYOPRANOTO	TERNATE	Total
	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)
	-	-	-	-	-	9.107.406	-	-	9.107.406
	-	-	-	-	-	145.661	-	-	145.661
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	849.626	-	-	849.876
	89.761	612	151.463	24.256	32.187	182.042	108.101	440	2.147.884
	-	-	735	-	-	7.206	11.099	-	112.374
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.789	240	3.821	1.892	4.714	337.094	16.762	990	520.426
	-	40.335	-	-	220.173	10.171.003	141.176	-	10.909.631
	1.618	-	228	72	6	186.116	278	22	216.761
	11.342	3.296	37.844	3.580	4.611	3.821.174	16.617	8.325	4.435.454
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	105.510	44.483	194.091	29.800	261.691	24.807.327	294.034	9.777	28.445.473

Tabel 2.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Cabang - Bank secara Individual

Table 2.1.a. Disclosure of Net Receivables by Branch - Bank Individually

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2023 December 31, 2023							
		Tagihan Bersih Berdasarkan Cabang Net Receivables by Branch							
		AMBON DIPONEGORO	ARTHA GADING	BALIKPAPAN	BANDUNG ASIA AFRIKA	BANJARMASIN	BATAM	BITUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	446	174.199	69.003	43.438	73.387	58.529	20.188	
6	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	4.327	46.396	-	593	-	138	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retirement Loans	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables	5.379	15.787	2.953	3.716	1.283	1.545	27	
9	Tagihan kepada Korporasi Corporate Receivables	9	1.207.870	-	-	999	14.235	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	59	233	32	97	-	81	13	
11	Aset Lainnya Other Assets	52.045	47.634	3.007	8.255	7.996	9.141	3.744	
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) Exposure in The Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Total	62.264	1.492.119	74.995	56.099	83.665	83.668	23.972	

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

	31 Desember 2023 December 31, 2023									
	Tagihan Bersih Berdasarkan Cabang Net Receivables by Branch									
	BOGOR	CIKARANG	DENPASAR BALI	JAMBI	KARET SURABAYA	KARTINI CIREBON	KENDARI	KUPANG	LAMPUNG	MAKASSAR A. YANI
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-
	164.400	177.924	21.527	69.689	29.428	2.714	24.577	6.024	27.536	132.078
	1.092	-	-	-	709	-	1.994	2.417	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.218	8.598	2.953	662	11.720	3.607	456	6.696	2.076	637
	-	1.974	-	-	76.130	-	-	-	-	-
	626	599	144	28	196	185	130	233	43	411
	14.659	4.932	25.735	9.323	25.982	6.002	12.595	17.278	5.995	8.943
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	184.995	194.027	50.359	79.701	144.165	12.509	39.751	32.898	35.651	142.069

Tabel 2.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Cabang - Bank secara Individual

Table 2.1.a. Disclosure of Net Receivables by Branch - Bank Individually

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2023 December 31, 2023							
		Tagihan Bersih Berdasarkan Cabang Net Receivables by Branch							
		MATRAMAN	MEDAN PEMUDA	MELAWAI	P. JAYAKARTA	PALEMBANG	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	
(1)	(2)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
1	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	135.528	36.766	123.822	49.259	113.620	35.242	138.765	
6	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	-	120	4.426	956	3.934	-	584	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retirement Loans	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables	6.353	3.701	14.741	5.270	577	-	2.823	
9	Tagihan kepada Korporasi Corporate Receivables	13.629	200.603	382	13.678	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	345	2	1.104	243	4	36	-	
11	Aset Lainnya Other Assets	9.565	14.055	29.580	15.626	10.222	2.176	3.274	
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) Exposure in The Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Total	165.421	255.247	174.055	85.033	128.356	37.454	145.446	

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

	31 Desember 2023 December 31, 2023								
	Tagihan Bersih Berdasarkan Cabang Net Receivables by Branch								
	PONTIANAK	SAMARINDA	SAMRAT MANADO	SEMARANG PANDANARAN	SOLO	SUDIRMAN JKT	SURYOPRANOTO	TERNATE	Total
	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)
	-	-	-	-	-	5.138.954	-	-	5.138.954
	-	-	-	-	-	145.713	-	-	145.713
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	496.589	-	-	496.839
	100.029	660	164.189	23.818	33.246	209.488	112.354	464	2.372.337
	-	-	833	-	758	8.023	3.297	-	80.596
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.230	639	3.359	2.368	4.972	458.694	11.711	1.238	591.989
	-	29.964	-	-	-	10.001.805	71.040	-	11.632.317
	-	9	424	181	14	13.114	544	44	19.174
	10.255	2.404	28.220	4.499	4.798	3.858.657	17.133	6.719	4.280.449
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	113.514	33.676	197.025	30.866	43.789	20.331.037	216.080	8.465	24.758.367

Tabel 2.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

Table 2.2.a. Disclosure of Net Receivables by Remaining Term of Contract - Bank Individually

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 December 31, 2024						
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Receivables by Remaining Term of Contract						
		≤ 1 tahun ≤ 1 year	> 1 tahun s.d. ≤ 3 tahun > 1 year up to ≤ 3 years	> 3 tahun s.d. ≤ 5 tahun > 3 years up to ≤ 5 years	> 5 tahun > 5 years	Nonkontraktual Noncontractual	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	7.903.656	513.066	315.376	375.309	-	9.107.406	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	-	-	-	145.661	-	145.661	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	849.876	-	-	-	-	849.876	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	6.118	106.525	137.587	1.897.653	-	2.147.884	
6	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	105	7.155	20.293	84.821	-	112.374	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retirement Loans	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables	77.355	163.104	46.585	233.381	-	520.426	
9	Tagihan kepada Korporasi Corporate Receivables	5.581.058	3.155.410	1.377.241	795.921	-	10.909.631	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	216.761	-	-	-	-	216.761	
11	Aset Lainnya Other Assets	-	-	-	-	4.435.454	4.435.454	
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) Exposure in The Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Total	14.634.929	3.945.261	1.897.082	3.532.747	4.435.454	28.445.473	

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

31 Desember 2023 December 31, 2023					
Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Receivables by Remaining Term of Contract					
≤ 1 tahun ≤ 1 year	> 1 tahun s.d. ≤ 3 tahun > 1 year up to ≤ 3 years	> 3 tahun s.d. ≤ 5 tahun > 3 years up to ≤ 5 years	> 5 tahun > 5 years	Nonkontraktual Noncontractual	Jumlah Total
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.953.006	528.089	324.113	333.746	-	5.138.954
-	-	-	145.713	-	145.713
-	-	-	-	-	-
411.116	85.723	-	-	-	496.839
18.856	89.606	170.691	2.093.184	-	2.372.337
252	8.850	10.981	60.513	-	80.596
-	-	-	-	-	-
61.211	191.467	74.454	264.858	-	591.989
6.689.309	2.531.406	1.295.740	1.115.861	-	11.632.317
19.174	-	-	-	-	19.174
-	-	-	-	4.280.449	4.280.449
-	-	-	-	-	-
11.152.924	3.435.141	1.875.978	4.013.875	4.280.449	24.758.367

Tabel 2.3.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

Table 2.3.a. Disclosure of Net Receivables Based on Economic Sector - Bank Individually

No	Sektor Ekonomi Economic Sectors	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	31 Desember 2024 December 31, 2024					
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan Agriculture, Hunting and Forestry	-	-	-	-	-
2	Perikanan Fishery	-	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian Mining and Excavation	-	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan Processing Industry	-	-	-	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air Electricity, Gas and Water	-	-	-	-	-
6	Konstruksi Construction	-	145.661	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran Wholesale and Retail Trade	-	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Accommodation and Food and Beverage	-	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Transportation, Warehousing and Communication	110.153	-	-	-	-
10	Perantara Keuangan Financial Intermediary	-	-	-	-	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Real Estate, Leasing Company, and Company Services	-	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Government, Defense, and Mandatory Social Security Administration	-	-	-	-	-

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans Secured by Commercial Real Estate</i>	Kredit Pegawai/ Pensiunan <i>Employee/ Retirement Loans</i>	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables</i>	Tagihan kepada Korporasi <i>Corporate Receivables</i>	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past Due Receivables</i>	Aset Lainnya <i>Other Assets</i>	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) <i>Exposure in the Sharia Business Unit (if any)</i>
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-	-	4.775	143.253	-	-	-
	-	-	2.282	7.868	1	-	-
	-	-	339	407.163	211.169	-	-
	-	-	21.160	1.874.208	-	-	-
	-	-	1.828	-	-	-	-
	-	-	15.773	29.900	166	-	-
	-	-	91.306	492.671	1.458	-	-
	-	-	11.684	789.642	19	-	-
	-	-	4.486	612.871	-	-	-
	-	-	4.237	322.689	-	-	-
	-	-	340.284	2.555.158	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.3.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

Table 2.3.a. Disclosure of Net Receivables Based on Economic Sector - Bank Individually

No	Sektor Ekonomi Economic Sectors	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	31 Desember 2024 December 31, 2024						
13	Jasa Pendidikan Education	-	-	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Health Services and Social Activities	-	-	-	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya Community, Socio-Cultural, Entertainment, and Other Individual Services	-	-	-	-	-	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Personal Service for Household	-	-	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya International Agencies and Other Extra-International Agencies	-	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya Activities with Unclear Bound Areas	-	-	-	-	-	
19	Rumah Tangga Household	-	-	-	-	2.147.884	
20	Bukan Lapangan Usaha Non-Business Activities	-	-	-	-	-	
21	Lainnya Others	8.997.253	-	-	849.876	-	
	Jumlah Total	9.107.406	145.661	-	849.876	2.147.884	

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans Secured by Commercial Real Estate</i>	Kredit Pegawai/ Pensiunan <i>Employee/ Retirement Loans</i>	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables</i>	Tagihan kepada Korporasi <i>Corporate Receivables</i>	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past Due Receivables</i>	Aset Lainnya <i>Other Assets</i>	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) <i>Exposure in The Sharia Business Unit (if any)</i>
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-	-	675	-	-	-	-
	-	-	1.410	-	-	-	-
	-	-	8.057	58.580	-	-	-
	-	-	1.279	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	112.374	-	10.851	-	3.948	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	3.615.628	-	4.435.454	-
	112.374	-	520.426	10.909.631	216.761	4.435.454	-

Tabel 2.3.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

Table 2.3.a. Disclosure of Net Receivables Based on Economic Sector - Bank Individually

No	Sektor Ekonomi Economic Sectors	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	31 Desember 2023 December 31, 2023					
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan Agriculture, Hunting and Forestry	-	-	-	-	-
2	Perikanan Fishery	-	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian Mining and Excavation	-	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan Processing Industry	-	-	-	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air Electricity, Gas and Water	-	-	-	-	-
6	Konstruksi Construction	-	145.713	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran Wholesale and Retail Trade	-	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Accommodation and Food and Beverage	-	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Transportation, Warehousing and Communication	159.040	-	-	-	-
10	Perantara Keuangan Financial Intermediary	-	-	-	-	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Real Estate, Leasing Company, and Company Services	-	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Government, Defense, and Mandatory Social Security Administration	-	-	-	-	-

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans Secured by Commercial Real Estate</i>	Kredit Pegawai/ Pensiunan <i>Employee/ Retirement Loans</i>	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables</i>	Tagihan kepada Korporasi <i>Corporate Receivables</i>	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past Due Receivables</i>	Aset Lainnya <i>Other Assets</i>	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) <i>Exposure in The Sharia Business Unit (if any)</i>
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-	-	737	159.168	67	-	-
	-	-	1.085	8.948	1	-	-
	-	-	3.923	1.157.246	-	-	-
	-	-	20.369	1.297.456	-	-	-
	-	-	1.673	-	-	-	-
	-	-	15.231	14.691	-	-	-
	-	-	54.085	305.748	55	-	-
	-	-	8.357	794.890	19	-	-
	-	-	7.485	651.395	-	-	-
	-	-	4.742	26.950	-	-	-
	-	-	453.474	4.061.958	1.188	-	-
	-	-	100	-	-	-	-

Tabel 2.3.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

Table 2.3.a. Disclosure of Net Receivables Based on Economic Sector - Bank Individually

No	Sektor Ekonomi Economic Sectors	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	31 Desember 2023 December 31, 2023						
13	Jasa Pendidikan Education	-	-	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Health Services and Social Activities	-	-	-	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya Community, Socio-Cultural, Entertainment, and Other Individual Services	-	-	-	-	-	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Personal Service for Household	-	-	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya International Agencies and Other Extra-International Agencies	-	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya Activities with Unclear Bound Areas	-	-	-	-	-	
19	Rumah Tangga Household	-	-	-	-	2.372.337	
20	Bukan Lapangan Usaha Non-Business Activities	-	-	-	-	-	
21	Lainnya Others	4.979.914	-	-	496.839	-	
	Jumlah Total	5.138.954	145.713	-	496.839	2.372.337	

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans Secured by Commercial Real Estate</i>	Kredit Pegawai/ Pensiunan <i>Employee/ Retirement Loans</i>	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables</i>	Tagihan kepada Korporasi <i>Corporate Receivables</i>	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past Due Receivables</i>	Aset Lainnya <i>Other Assets</i>	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) <i>Exposure in The Sharia Business Unit (if any)</i>
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-	-	1.298	-	-	-	-
	-	-	2.029	-	-	-	-
	-	-	3.848	329.110	11.596	-	-
	-	-	1.540	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	80.596	-	12.014	-	6.247	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	2.824.756	-	4.280.449	-
	80.596	-	591.989	11.632.317	19.174	4.280.449	-

Tabel 2.4.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Cabang - Bank secara Individual

Table 2.4.a. Disclosure of Receivables and Allowances Based on Branch - Bank Individually

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 December 31, 2024							
		Tagihan Bersih Berdasarkan Cabang Net Receivables by Branch							
		AMBON DIPONEGORO	ARTHA GADING	BALIKPAPAN	BANDUNG ASIA AFRIKA	BANJARMASIN	BATAM	BITUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Tagihan Receivables	33.107	270.007	67.588	62.141	70.553	102.280	24.108	
2	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
	a. Belum Jatuh Tempo Outstanding	-	-	-	505	1.026	2.293	410	
	b. Sudah Jatuh Tempo Mature	3.500	-	-	-	-	-	4.362	
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual Allowance for Impairment Losses (CKPN) - Individual	3.500	-	-	505	1.026	2.293	4.768	
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif *) Allowance for Impairment Losses (CKPN) - Collective *)	754	986	196	625	157	366	201	
5	Tagihan yang Dihapus Buku Write off Receivable	-	-	-	-	-	-	-	

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	MATRAMAN	MEDAN PEMUDA	MELAWAI	P. JAYAKARTA	PALEMBANG	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Tagihan Receivables	147.455	228.585	211.143	80.451	115.950	30.010	137.483	
2	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
	a. Belum Jatuh Tempo Outstanding	986	1.877	656	-	8.083	218	6.955	
	b. Sudah Jatuh Tempo Mature	162	871	694	-	-	-	140	
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual Allowance for Impairment Losses (CKPN) - Individual	1.148	2.747	1.349	-	8.083	218	7.094	
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif *) Allowance for Impairment Losses (CKPN) - Collective *)	1.456	7.528	3.953	470	316	117	562	
5	Tagihan yang Dihapus Buku Write off Receivable	-	-	-	-	-	-	-	

*) CKPN adalah sesuai dengan definisi CKPN pada Surat Edaran No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 mengenai perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit (tanpa kolektibilitas 1)

**) Nilai tagihan hapus buku hanya untuk bank secara individual

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

	31 Desember 2024 December 31, 2024									
	Tagihan Bersih Berdasarkan Cabang Net Receivables by Branch									
	BOGOR	CIKARANG	DENPASAR BALI	JAMBI	KARET SURABAYA	KARTINI CIREBON	KENDARI	KUPANG	LAMPUNG	MAKASSAR A. YANI
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	174.583	187.503	33.328	67.063	161.392	5.150	26.204	21.226	27.575	134.914
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.980	8.424	4.326	8.237	1.945	368	622	-	153	2.215
	3.702	-	2.412	175	31.502	-	-	-	-	11.430
	16.826	8.183	6.734	8.412	9.335	368	622	-	153	13.646
	2.391	1.572	513	306	1.006	332	414	842	133	1.370
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PONTIANAK	SAMARINDA	SAMRAT MANADO	SEMARANG PANDANARAN	SOLO	SUDIRMAN JKT	SURYOPRANOTO	TERNATE	Total	
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	98.584	45.577	167.183	26.709	265.233	8.216.130	338.627	1.541	11.579.383	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.398	-	7.861	-	-	2.808.689	713	-	2.900.939	
	-	-	395	-	-	260.822	394	14	320.575	
	3.398	-	8.080	-	-	341.191	1.108	14	450.800	
	1.505	1.437	1.363	439	1.296	45.353	3.061	85	81.107	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) CKPN is in accordance with the definition of CKPN in Circular Letter No. 13/6/DPNP dated February 18, 2011 regarding the calculation of Credit Risk Weighted Assets (without collectibility 1)

**) The value of write-off claims is only for individual banks

Tabel 2.4.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Cabang - Bank secara Individual

Table 2.4.a. Disclosure of Receivables and Allowances Based on Branch - Bank Individually

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2023 December 31, 2023							
		Tagihan Bersih Berdasarkan Cabang Net Receivables by Branch							
		AMBON DIPONEGORO	ARTHA GADING	BALIKPAPAN	BANDUNG ASIA AFRIKA	BANJARMASIN	BATAM	BITUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Tagihan Receivables	14.385	1.441.339	72.066	49.004	78.139	78.461	25.384	
2	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
	a. Belum Jatuh Tempo Outstanding	-	89	5.552	2.646	13.977	9.674	4.343	
	b. Sudah Jatuh Tempo Mature	3.500	-	-	-	-	-	4.246	
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual Allowance for Impairment Losses (CKPN) - Individual	3.500	2	341	560	3.004	4.786	5.166	
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif *) Allowance for Impairment Losses (CKPN) - Collective *)	849	1.863	265	1.177	99	450	211	
5	Tagihan yang Dihapus Buku Write off Receivable	-	-	-	-	-	-	-	

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	MATRAMAN	MEDAN PEMUDA	MELAWAI	P. JAYAKARTA	PALEMBANG	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Tagihan Receivables	157.075	242.926	148.033	69.432	125.235	35.404	147.714	
2	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Receivables	-	-	-	-	-	-	-	
	a. Belum Jatuh Tempo Outstanding	8.213	6.480	7.553	1.510	23.151	2.164	25.196	
	b. Sudah Jatuh Tempo Mature	162	871	694	-	-	-	140	
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual Allowance for Impairment Losses (CKPN) - Individual	1.485	2.653	2.013	12	9.719	199	6.331	
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif *) Allowance for Impairment Losses (CKPN) - Collective *)	1.088	1.944	3.126	648	327	106	434	
5	Tagihan yang Dihapus Buku Write off Receivable	-	-	-	-	-	-	-	

*) CKPN adalah sesuai dengan definisi CKPN pada Surat Edaran No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 mengenai perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit (tanpa kolektibilitas 1)

**) Nilai tagihan hapus buku hanya untuk bank secara individual

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

	31 Desember 2023 December 31, 2023									
	Tagihan Bersih Berdasarkan Cabang Net Receivables by Branch									
	BOGOR	CIKARANG	DENPASAR BALI	JAMBI	KARET SURABAYA	KARTINI CIREBON	KENDARI	KUPANG	LAMPUNG	MAKASSAR A YANI
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	187.924	198.945	31.090	77.072	134.680	7.383	28.013	15.969	29.917	147.818
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43.443	29.990	5.625	18.050	2.739	502	2.628	673	4.041	17.453
	3.702	-	2.412	175	39.787	70	-	-	-	11.430
	18.119	11.055	6.578	7.715	16.308	440	609	109	444	14.607
	2.300	1.686	714	257	1.205	613	467	735	250	1.280
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PONTIANAK	SAMARINDA	SAMRAT MANADO	SEMARANG PANDANARAN	SOLO	SUDIRMAN JKT	SURYOPRANOTO	TERNATE	Total	
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	105.766	31.241	182.364	26.555	38.932	8.012.095	205.181	1.829	12.147.369	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6.011	-	48.797	663	215	3.528.696	840	-	3.820.916	
	-	-	395	-	-	44.531	3.194	14	115.322	
	3.070	-	16.037	9	3	296.730	3.210	14	434.830	
	373	197	1.426	473	157	46.332	4.633	118	75.806	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*) CKPN is in accordance with the definition of CKPN in Circular Letter No. 13/6/DPNP dated February 18, 2011 regarding the calculation of Credit Risk Weighted Assets (without collectibility 1)

**) The value of write-off claims is only for individual banks

Tabel 2.5.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi – Bank secara Individual

Table 2.5.a. Disclosure of Receivables and Allowances Based on Economic Sector - Bank Individually

No	Sektor Ekonomi *) Economic Sectors *)	Tagihan **) Receivables **)	
(1)	(2)	(3)	
	31 Desember 2024 December 31, 2024		
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan Agriculture, Hunting, and Forestry	149.331	
2	Perikanan Fishery	18.039	
3	Pertambangan dan Penggalian Mining and Excavation	689.223	
4	Industri Pengolahan Industry Processing	2.024.017	
5	Listrik, Gas, dan Air Electricity, Gas, and Water	1.780	
6	Konstruksi Construction	284.081	
7	Perdagangan Besar dan Eceran Wholesale and Retail Trade	855.264	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman Accommodation and Food and Beverages	662.436	
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Transportation, Warehousing, and Communication	890.531	
10	Perantara Keuangan Intermediary Finance	624.285	
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Real Estate, Leasing Company and Company Services	2.965.439	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Government, Defense, and Mandatory Social Security Administration	4.500	
13	Jasa Pendidikan Education	865	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Health Services and Social Activities	1.408	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya Society, Socio-Cultural, Entertainment, Other Individual Services	66.590	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Personal Service for Household	1.084	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya International Agencies and Other Extra-International Agencies	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya Activities with Unclear Bound Areas	-	
19	Rumah Tangga Household	2.340.510	
20	Bukan Lapangan Usaha Non-Business Activities	-	
	Jumlah Total	11.579.383	

*) Sektor-sektor yang diungkapkan adalah sektor yang memiliki nilai nominal/saldo yang material. Untuk sektor-sektor yang tidak material, digabungkan menjadi satu dengan nama sektor lain-lain dan dijelaskan kepada stakeholder.

**) Tagihan secara gross (sebelum dikurangi CKPN).

***) CKPN adalah sesuai dengan definisi CKPN pada Surat Edaran No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 mengenai perhitungan ATMR Kredit (tanpa kolektibilitas 1).

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai <i>Impaired Receivables</i>		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)- Individual ***) <i>Allowance for Impairment Losses (CKPN) - Individual ***)</i>	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Kolektif ***) <i>Allowance for Impairment Losses (CKPN) - Collectives ***)</i>	Tagihan yang Dihapus Buku <i>Write off Receivable</i>
	Belum Jatuh Tempo <i>Undue</i>	Telah Jatuh Tempo <i>Overdue</i>			
	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	-	694	694	7.221	-
	11.159	-	3.290	5	-
	34.595	246.602	71.508	2.165	-
	468.726	191	8.249	12.294	-
	-	-	-	4	-
	10.991	14.930	25.920	2.457	-
	1.902	8.701	10.597	6.274	-
	573.070	479	123.378	1.684	-
	12.594	44.066	56.660	6.394	-
	-	-	-	2.292	-
	1.683.479	3.646	81.591	15.384	-
	-	-	-	-	-
	192	-	192	1	-
	-	-	-	2	-
	20.022	168	1.684	1.837	-
	-	-	-	2	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	84.210	1.098	67.037	23.092	-
	-	-	-	-	-
	2.900.939	320.575	450.800	81.107	-

*) The disclosed sectors are those with material nominal values/balances. For sectors that are not material, they are combined into one with the name of other sectors and explained to stakeholders.

**) Gross receivables (before deduction of CKPN).

***) Allowance for impairment losses (CKPN) is in accordance with the definition of CKPN in Circular Letter No. 13/6/DPNP dated February 18, 2011 regarding the calculation of RWA of Credit (without collectability 1).

Tabel 2.5.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

Table 2.5.a. Disclosure of Receivables and Allowances Based on Economic Sctor - Bank Individually

No	Sektor Ekonomi *) Economic Sectors *)	Tagihan **) Receivables **)
(1)	(2)	(3)
31 Desember 2023 December 31, 2023		
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan Agriculture, Hunting, and Forestry	159.965
2	Perikanan Fishery	13.363
3	Pertambangan dan Penggalian Mining and Excavation	1.164.700
4	Industri Pengolahan Industry Processing	1.322.435
5	Listrik, Gas, dan Air Electricity, Gas, and Water	1.669
6	Konstruksi Construction	212.069
7	Perdagangan Besar dan Eceran Wholesale and Retail Trade	372.514
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Accommodation and Food and Beverages	656.239
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi Transportation, Warehousing, and Communication	871.687
10	Perantara Keuangan Intermediary Finance	31.649
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Real Estate, Leasing Company and Company Services	4.481.293
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Government, Defense, and Mandatory Social Security Administration	99
13	Jasa Pendidikan Education	1.483
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Health Services and Social Activities	2.060
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya Society, Socio-Cultural, Entertainment, Other Individual Services	306.155
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Personal Service for Household	1.342
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya International Agencies and Other Extra-International Agencies	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya Activities with Unclear Bound Areas	-
19	Rumah Tangga Household	2.548.648
20	Bukan Lapangan Usaha Non-Business Activities	-
Jumlah Total		12.147.369

*) Sektor-sektor yang diungkapkan adalah sektor yang memiliki nilai nominal/saldo yang material. Untuk sektor-sektor yang tidak material, digabungkan menjadi satu dengan nama sektor lain-lain dan dijelaskan kepada stakeholder.

**) Tagihan secara gross (sebelum dikurangi CKPN).

***) CKPN adalah sesuai dengan definisi CKPN pada Surat Edaran No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 mengenai perhitungan ATMR Kredit (tanpa kolektibilitas 1).

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai <i>Impaired Receivables</i>		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)- Individual ***) <i>Allowance for Impairment Losses (CKPN) - Individual ***)</i>	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)-Kolektif ***) <i>Allowance for Impairment Losses (CKPN) - Collectives ***)</i>	Tagihan yang Dihapus Buku <i>Write off Receivable</i>
	Belum Jatuh Tempo <i>Undue</i>	Telah Jatuh Tempo <i>Overdue</i>			
	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	-	694	694	1.176	-
	11.159	-	3.290	101	-
	-	32.768	7.158	7.989	-
	430.441	191	8.249	12.813	-
	-	-	-	51	-
	20.990	24.515	36.220	2.598	-
	1.902	8.765	10.667	8.288	-
	582.220	479	118.416	1.039	-
	12.594	44.066	56.660	2.562	-
	-	-	-	312	-
	2.246.121	3.646	85.724	6.271	-
	-	-	-	11	-
	192	-	192	83	-
	-	-	-	99	-
	230.157	168	21.686	10.298	-
	-	-	-	13	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	285.140	30	85.873	22.101	-
	-	-	-	-	-
	3.820.916	115.322	434.830	75.806	-

*) The disclosed sectors are those with material nominal values/balances. For sectors that are not material, they are combined into one with the name of other sectors and explained to stakeholders.

**) Gross receivables (before deduction of CKPN).

***) Allowance for impairment losses (CKPN) is in accordance with the definition of CKPN in Circular Letter No. 13/6/DPNP dated February 18, 2011 regarding the calculation of RWA of Credit (without collectability 1).

Tabel 2.6.a. Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Individualdalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

Tabel 2.6.a. Disclosure of Movement Details of Allowance for Impairment Losses - Bank Individually

No	Keterangan Description	31 Desember 2024 December 31, 2024		31 Desember 2023 December 31, 2023	
		CKPN Individual Individual CKPN	CKPN Kolektif Collective CKPN	CKPN Individual Individual CKPN	CKPN Kolektif Collective CKPN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Saldo Awal CKPN CKPN Beginning Balance	434.830	75.806	384.173	140.414
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada Periode Berjalan (Net) Establishment (Recovery) of CKPN in Current Period (Net)	15.969	5.302	50.658	(64.609)
	2.a Pembentukan CKPN pada Periode Berjalan 2.a Establishment of CKPN in the Current Period	44.396	39.720	125.136	55.033
	2.b Pemulihan CKPN pada Periode Berjalan 2.b Recovery of CKPN in the Current Period	(924)	34.209	37.424	106.240
3	CKPN yang Digunakan untuk Melakukan Hapus Buku Atas Tagihan pada Periode Berjalan Impairment Provision for Write Off Current Year	29.350	209	37.054	13.402
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan *) Other formation (recovery) in current period *)	-	-	-	-
Saldo Akhir CKPN **) CKPN Ending Balance **)		450.800	81.107	434.830	75.806

*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing dan pengakuan pendapatan bunga atas bagian yang tidak mengalami penurunan nilai dari kredit yang mengalami penurunan nilai

**) Tidak termasuk CKPN dari transaksi Rekening Administratif

*) Includes exchange differences due to foreign currency translation and recognition of interest income on the non-impaired portion of impaired loans

**) Excludes CKPN from Administrative Account transactions

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.

Tabel 3.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual
Table 3.1.a. Disclosure of Net Receivables Based on Portfolio Category and Rating Scale - Bank Individually

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	Tagihan Bersih Net Receivables					
		Lembaga Pemeringkat Rating Company	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	[idr]AAA	[idr]AA+ s.d [idr]AA-	[idr]A+ s.d [idr]A-	[idr]BBB+ s.d [idr]BBB-	[idr]BB+ s.d [idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	31 Desember 2024 December 31, 2023						
1	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	-	766.870	-	40.973	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retirement Loans	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi Corporate Receivables	-	2.867.672	-	364.358	51.548	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	-	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya Other Assets	-	-	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) Exposure in The Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total	-	3.634.542	-	405.331	51.548	-

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

Tagihan Bersih Net Receivables								
	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating		Peringkat Jangka Pendek Short-Term Rating				Tanpa Peringkat Unrated	Jumlah Total
	B+ s.d B-	Less Than B-	A-1	A-2	A-3	Less Than A-3		
	B+ s.d B-	Less Than B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Less Than F3		
	B1 s.d B3	Less Than B3	P-1	P-2	P-3	Less Than P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	Less Than B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Less Than F3(idn)		
	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Less Than [Idr]B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr]A3	Less Than [Idr]A3		
	id B+ s.d id B-	Less Than idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Less Than idA4		
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	9.107.406	9.107.406
	-	-	-	-	-	-	145.661	145.661
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	42.033	849.876
	-	-	-	-	-	-	2.147.884	2.147.884
	-	-	-	-	-	-	112.374	112.374
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	520.426	520.426
	-	-	-	-	-	-	7.626.052	10.909.631
	-	-	-	-	-	-	216.761	216.761
	-	-	-	-	-	-	4.435.454	4.435.454
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	24.354.051	28.445.473

Tabel 3.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

Table 3.1.a. Disclosure of Net Receivables Based on Portfolio Category and Rating Scale - Bank Individually

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	Tagihan Bersih Net Receivables					
		Lembaga Pemeringkat Rating Company	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	31 Desember 2023 December 31, 2023						
1	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	-	475.987	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retirement Loans	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Micro Business, Small business, and Retail Portfolio Receivables	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi Corporate Receivables		2.019.675	-	542.511	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	-	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya Other Assets	-	-	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) Exposure in The Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total	-	2.495.662	-	542.511	-	-

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

Tagihan Bersih Net Receivables								
	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating		Peringkat Jangka Pendek Short-Term Rating				Tanpa Peringkat Unrated	Jumlah Total
	B+ s.d B-	Less Than B-	A-1	A-2	A-3	Less Than A-3		
	B+ s.d B-	Less Than B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Less Than F3		
	B1 s.d B3	Less Than B3	P-1	P-2	P-3	Less Than P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	Less Than B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Less Than F3(idn)		
	[Idr]B+ s.d [Idr] B-	Less Than [Idr] B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Less Than [Idr] A3		
	id B+ s.d id B-	Less Than idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Less Than idA4		
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	5.138.954	5.138.954
	-	-	-	-	-	-	145.713	145.713
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	20.851	496.839
	-	-	-	-	-	-	2.372.337	2.372.337
	-	-	-	-	-	-	80.596	80.596
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	591.989	591.989
	-	-	-	-	-	-	9.070.130	11.632.316
	-	-	-	-	-	-	19.174	19.174
	-	-	-	-	-	-	4.280.449	4.280.449
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	21.720.193	24.758.367

Tabel 3.2.b.1. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo - Bank secara Individualdalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

Table 3.2.b.1. Disclosure of Counterparty Credit Risk: Repo Transactions — Bank Individually

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 December 31, 2024			
		Nilai Wajar SSB Repo Fair Value of Government Securities (SSB) Repo	Kewajiban Repo Repo Liabilities	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	519.304	499.281	20.023	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi Corporate Receivables	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) Exposure in The Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-
Total Total		519.304	499.281	20.023	-

Tabel 3.2.b.1. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Repo - Bank secara Individualdalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

No	Kategori Portofolio <i>Portfolio Category</i>	31 Desember 2023 <i>December 31, 2023</i>			
		Nilai Wajar SSB Repo <i>Fair Value of Government Securities (SSB) Repo</i>	Kewajiban Repo <i>Repo Liabilities</i>	Tagihan Bersih <i>Net Receivables</i>	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada Pemerintah <i>Government Receivables</i>	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik <i>Public Sector Entities Receivables</i>	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables</i>	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank <i>Bank Receivables</i>	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables</i>	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi <i>Corporate Receivables</i>	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) <i>Exposure in the Sharia Business Unit (if any)</i>	-	-	-	-
	Total <i>Total</i>	-	-	-	-

**Tabel 3.2.c.1. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan:
Transaksi Reverse Repo - Bank secara Individual**dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

Table 3.2.c.1. Disclosure of Counterparty Credit Risk: Reverse Repo Transactions - Bank Individually

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 December 31, 2024			
		Tagihan Bersih Net Claims	Nilai MRK MRK Score	Tagihan Bersih Setelah MRK Net Claims After MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MKR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi Corporate Receivables	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) Exposure in The Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-
Total Total		-	-	-	-

**Tabel 3.2.c.1. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan:
Transaksi Reverse Repo - Bank secara Individual**dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

Table 3.2.c.1. Disclosure of Counterparty Credit Risk: Reverse Repo Transactions - Bank Individually

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2023 December 31, 2023			
		Tagihan Bersih Net Claims	Nilai MRK MRK Score	Tagihan Bersih Setelah MRK Net Claims After MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MKR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi Corporate Receivables	125.469	125.469	469	469
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) Exposure in the Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-
Total Total		125.469	125.469	469	469

Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

Table 4.1.a. Disclosure of Net Receivables Based on Risk Weighted After Calculating the Impact of Credit

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation								
		0%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	31 Desember 2024 December 31, 2024									
A	Eksposur Neraca Balance Sheet Exposures									
1	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	9.107.406	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	-	-	-	-	-	-	-	145.661	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	-	849.876	-	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	-	128.621	67.969	342.877	-	500.333	-	588.561	
6	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retirement Loans	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi Corporate Receivables	-	2.867.672	-	-	-	-	-	364.358	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	-	-	-	-	-	-	-	2.731	
11	Aset Lainnya Other Assets	769.354	-	-	-	-	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) Exposure in The Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca Total Exposure Balance	9.876.760	3.846.169	67.969	342.877	-	500.333	-	1.101.312	

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation							ATMR RWA	Beban Modal*) (ATMR x 9,37%) Capital Charges* (RWA x 9,37%)	Beban Modal (ATMR x 0%) Capital Charges (RWA x 0%)
70%	75%	90%	100%	110%	150%	Lainnya			
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	72.830	6.824	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	169.975	15.927	-
444.492	-	-	-	-	-	-	951.137	89.122	-
29.764	-	63.996	-	18.614	-	-	98.907	9.268	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	505.980	-	-	-	-	-	379.485	35.558	-
-	51.548	-	6.997.747	-	-	-	7.792.122	730.122	-
-	-	-	92.246	-	112.779	-	262.780	24.622	-
-	-	-	2.857.217	-	808.883	-	4.070.543	381.410	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474.256	557.528	63.996	9.947.210	18.614	921.662	-	13.797.779	1.292.852	-

Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

Table 4.1.a. Disclosure of Net Receivables Based on Risk Weighted After Calculating the Impact of Credit

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation								
		0%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif <i>Commitment/Contingent Liability Exposure to Administrative transaction account</i>									
1	Tagihan kepada Pemerintah <i>Government Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik <i>Public Sector Entities Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank <i>Bank Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal <i>Loans Secured by Residential Property</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans Secured by Commercial Real Estate</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan <i>Employee/Retirement Loans</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi <i>Corporate Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past Due Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) <i>Exposure in The Sharia Business Unit (if any)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif <i>Total Exposures for Administrative Transaction Account</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit <i>Net Receivables After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation</i>							ATMR <i>RWA</i>	Beban Modal*) (ATMR x 9,37%) <i>Capital Charges* (RWA x 9,37%)</i>	Beban Modal (ATMR x 0%) <i>Capital Charges (RWA x 0%)</i>
70%	75%	90%	100%	110%	150%	Lainnya			
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8.322	-	-	-	-	-	6.241	585	-
-	-	-	98.891	-	-	-	98.891	9.266	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8.322	-	98.891	-	-	-	105.132	9.872	-

Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

Table 4.1.a. Disclosure of Net Receivables Based on Risk Weighted After Calculating the Impact of Credit

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation								
		0%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
C	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) <i>Exposure of Counterparty Credit Risk</i>									
1	Tagihan kepada Pemerintah <i>Government Receivables</i>	20.022	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik <i>Public Sector Entities Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank <i>Bank Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi <i>Corporate Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) <i>Exposure in The Sharia Business Unit (if any)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Kegagalan Pihak Lawan <i>Counterparty Credit Risk Exposure</i>	20.022	-	-	-	-	-	-	-	

*) Beban Modal dihitung berdasarkan KPMM sesuai Profil Risiko periode Juni 2015 (Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013)

**) Beban Modal dihitung berdasarkan KPMM sesuai Profil Risiko periode Juni 2014 (Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013)

[illegible]

**) Capital charge is calculated based on CAR in accordance with the Risk Profile as of June 2014 (Bank Indonesia Regulation No. 15/12/PBI/2013)

Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

Table 4.1.a. Disclosure of Net Receivables Based on Risk Weighted After Calculating the Impact of Credit

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation							
		0%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
31 Desember 2023 December 31, 2023									
A	Eksposur Neraca Balance Sheet Exposures								
1	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	5.138.954	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	-	-	-	-	-	-	-	145.713
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	-	496.839	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	-	162.683	63.310	392.204	-	535.523	-	798.132
6	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retirement Loans	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi Corporate Receivables	-	2.019.675	-	-	-	-	-	542.511
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	-	-	-	-	-	-	-	5.673
11	Aset Lainnya Other Assets	369.134	-	-	-	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) Exposure in The Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Neraca Total Exposure Balance		5.508.088	2.679.196	63.310	392.204	-	535.523	-	1.492.029

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation							ATMR RWA	Beban Modal (ATMR x 9,39%) Capital Charges* (RWA x 9.39%)	Beban Modal (ATMR x 0%) Capital Charges (RWA x 0%)
70%	75%	90%	100%	110%	150%	Lainnya			
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	72.856	6.841	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	99.368	9.331	-
420.023	-	-	-	-	-	-	1.073.316	100.784	-
28.682	-	37.378	-	14.536	-	-	69.707	6.546	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	578.145	-	-	-	-	-	433.609	40.716	-
-	-	-	7.658.237	-	-	-	8.333.427	782.509	-
-	-	-	13.500	-	-	-	16.337	1.534	-
-	-	-	2.975.204	-	936.110	-	4.379.369	411.223	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448.705	578.145	37.378	10.646.941	14.536	936.110	-	14.477.990	1.359.483	-

Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

Table 4.1.a. Disclosure of Net Receivables Based on Risk Weighted After Calculating the Impact of Credit

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation								
		0%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif <i>Commitment/Contingent Liability Exposure to Administrative transaction account</i>									
1	Tagihan kepada Pemerintah <i>Government Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik <i>Public Sector Entities Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank <i>Bank Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal <i>Loans Secured by Residential Property</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans Secured by Commercial Real Estate</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan <i>Employee/Retirement Loans</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi <i>Corporate Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past Due Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) <i>Exposure in The Sharia Business Unit (if any)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif <i>Total Exposures for Administrative Transaction Account</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation							ATMR RWA	Beban Modal *) (ATMR x 9,39%) Capital Charges* (RWA x 9.39%)	Beban Modal (ATMR x 0%) Capital Charges (RWA x 0%)
70%	75%	90%	100%	110%	150%	Lainnya			
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5.166	-	-	-	-	-	3.875	364	-
-	-	-	36.791	-	-	-	36.791	3.455	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5.166	-	36.791	-	-	-	40.666	3.819	-

Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

Table 4.1.a. Disclosure of Net Receivables Based on Risk Weighted After Calculating the Impact of Credit

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation								
		0%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
C	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) <i>Exposure of Counterparty Credit Risk</i>									
1	Tagihan kepada Pemerintah <i>Government Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik <i>Public Sector Entities Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank <i>Bank Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi <i>Corporate Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) <i>Exposure in The Sharia Business Unit (if any)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Kegagalan Pihak Lawan <i>Counterparty Credit Risk Exposure</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Beban Modal dihitung berdasarkan KPMM sesuai Profil Risiko periode Juni 2015 (Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013)

**) Beban Modal dihitung berdasarkan KPMM sesuai Profil Risiko periode Juni 2014 (Peraturan Bank Indonesia No.15/12/PBI/2013)

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit <i>Net Receivables After Calculating the Impact of Credit Risk Mitigation</i>							ATMR RWA	Beban Modal *) (ATMR x 9,39%) Capital Charges* (RWA x 9.39%)	Beban Modal (ATMR x 0%) Capital Charges (RWA x 0%)
70%	75%	90%	100%	110%	150%	Lainnya			
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	469	-	-	-	469	44	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	469	-	-	-	469	44	-

*) Capital charge is calculated based on CAR in accordance with the Risk Profile as of June 2015 (Bank Indonesia Regulation No. 15/12/PBI/2013)

**) Capital charge is calculated based on CAR in accordance with the Risk Profile as of June 2014 (Bank Indonesia Regulation No. 15/12/PBI/2013)

Tabel 4.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

Tabel 4.2.a. Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation Technique - Bank Individually

No.	Kategori Portofolio <i>Portfolio Category</i>	31 Desember 2024 <i>December 31, 2024</i>						
		Tagihan Bersih <i>Net Receivable</i>	Bagian yang Dijamin dengan <i>Guaranteed Part</i>				Bagian yang Tidak Dijamin <i>Not Guaranteed Part</i>	
			Agunan <i>Collateral</i>	Garansi <i>Warranty</i>	Asuransi Kredit <i>Credit Insurance</i>	Lainnya <i>Others</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]	
A	Eksposur Neraca <i>Balance Sheet Exposures</i>							
1	Tagihan kepada Pemerintah <i>Government Receivables</i>	9.107.406	-	-	-	-	9.107.406	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik <i>Public Sector Entities Receivables</i>	145.661	-	-	-	-	145.661	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables</i>	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank <i>Bank Receivables</i>	849.876	-	-	-	-	849.876	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal <i>Loans Secured by Residential Property</i>	2.147.884	463	-	-	-	2.147.421	
6	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans Secured by Commercial Real Estate</i>	112.374	-	-	-	-	112.374	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan <i>Employee/Retirement Loans</i>	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables</i>	520.426	13.844	-	-	-	506.582	
9	Tagihan kepada Korporasi <i>Corporate Receivables</i>	10.909.631	1.411.894	-	-	-	9.497.737	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past Due Receivables</i>	216.761	-	-	-	-	216.761	
11	Aset Lainnya <i>Other Assets</i>	4.435.454	-	-	-	-	4.435.454	
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) <i>Exposure in The Sharia Business Unit (if any)</i>	-	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca <i>Total Exposure Balance</i>	28.445.473	1.426.201	-	-	-	27.019.273	

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

31 Desember 2023 December 31, 2023					
Tagihan Bersih Net Receivable	Bagian yang Dijamin dengan Guaranteed Part				Bagian yang Tidak Dijamin Not Guaranteed Part
	Agunan Collateral	Garansi Warranty	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)- [(10)+(11)+(12)+(13)]
5.138.954	-	-	-	-	5.138.954
145.713	-	-	-	-	145.713
-	-	-	-	-	-
496.839	-	-	-	-	496.839
2.372.337	463	-	-	-	2.371.874
80.596	-	-	-	-	80.596
-	-	-	-	-	-
591.989	13.844	-	-	-	578.145
11.632.316	1.411.894	-	-	-	10.220.422
19.174	-	-	-	-	19.174
4.280.449	-	-	-	-	4.280.449
-	-	-	-	-	-
24.758.367	1.426.201	-	-	-	23.332.166

Tabel 4.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

Tabel 4.2.a. Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation Technique - Bank Individually

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 December 31, 2024					
		Tagihan Bersih Net Receivable	Bagian yang Dijamin dengan Guaranteed Part				Bagian yang Tidak Dijamin Not Guaranteed Part
			Agunan Collateral	Garansi Warranty	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif Commitment/Contingent Liability Exposure to Administrative Transaction Account						
1	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retirement Loans	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables	13.005	-	-	-	-	13.005
9	Tagihan kepada Korporasi Corporate Receivables	101.537	-	-	-	-	101.537
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	-	-	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) Exposure in The Sharia Business Unit (if any)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif Total Exposures for Administrative Transaction Account	114.541	-	-	-	-	114.541

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

31 Desember 2023 December 31, 2023					
Tagihan Bersih Net Receivable	Bagian yang Dijamin dengan Guaranteed Part				Bagian yang Tidak Dijamin Not Guaranteed Part
	Agunan Collateral	Garansi Warranty	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6.997	-	-	-	-	6.997
52.053	-	-	-	-	52.053
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
59.050	-	-	-	-	59.050

Tabel 4.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

Tabel 4.2.a. Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation Technique - Bank Individually

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 December 31, 2024					
		Tagihan Bersih Net Receivable	Bagian yang Dijamin dengan Guaranteed Part				Bagian yang Tidak Dijamin Not Guaranteed Part
			Agunan Collateral	Garansi Warranty	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) <i>Exposure of Counterparty Credit Risk</i>						
1	Tagihan kepada Pemerintah <i>Government Receivables</i>	20.022	-	-	-	-	20.022
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik <i>Public Sector Entities Receivables</i>	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables</i>	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank <i>Bank Receivables</i>	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables</i>	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi <i>Corporate Receivables</i>	-	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (jika ada) <i>Exposure in The Sharia Business Unit (if any)</i>	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Kegagalan Pihak Lawan <i>Counterparty Credit Risk Exposure</i>	20.022	-	-	-	-	20.022
	Total (A+B+C)	28.580.037	1.426.201	-	-	-	27.153.836

Catatan: Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/6/DPNP perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, yang termasuk dalam mitigasi risiko kredit adalah agunan (*eligible financial collateral*), garansi, penjaminan atau asuransi kredit. Diluar agunan (*eligible financial collateral*) tersebut, Bank Artha Graha Internasional memiliki agunan berupa *fixed asset*, piutang dagang, persediaan, dan agunan lainnya.

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

31 Desember 2023 December 31, 2023					
Tagihan Bersih Net Receivable	Bagian yang Dijamin dengan Guaranteed Part				Bagian yang Tidak Dijamin Not Guaranteed Part
	Agunan Collateral	Garansi Warranty	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
125.469	-	-	-	-	125.469
-	-	-	-	-	-
125.469	-	-	-	-	125.469
24.942.885	1.426.201	-	-	-	23.516.684

Note: In accordance with Bank Indonesia Circular Letter No. 13/6/DPNP regarding Guidelines of Risk-Weighted Assets Calculation for Credit Risk Using a Standard Approach, included in the credit risk mitigation is eligible financial collateral, guarantees, credit insurance. Apart from the eligible financial collateral, Bank Artha Graha Internasional has collateral in the form of fixed assets, trade receivables, inventories and other collateral.

Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar - Bank secara Individual
Tabel 6.1.1. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca, kecuali Eksposur Sekuritisasi

Calculation of RWA for Credit Risk Standard Approach - Bank Individually

Table 6.1.1. Disclosure of Asset Exposures on the Balance Sheet, excluding Securitization Exposure

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 December 31, 2024	
		Tagihan Bersih Net Claims	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	9.107.406	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	145.661	72.830
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	-	-
4	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	849.876	169.975
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	2.147.884	969.895
6	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	112.374	98.907
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retirement Loans	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables	520.426	390.319
9	Tagihan kepada Korporasi Corporate Receivables	10.909.631	8.420.427
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	216.761	276.287
11	Aset Lainnya Other Assets	4.435.454	-
Total Total		28.445.473	10.398.641

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

	31 Desember 2023 December 31, 2023			
ATMR Setelah MRK RWA After MRK	Tagihan Bersih Net Claims	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	
(5)	(6)	(7)	(8)	
-	5.138.954	-	-	
72.830	145.713	72.856	72.856	
-	-	-	-	
169.975	496.839	99.368	99.368	
951.137	2.372.337	1.073.409	1.073.316	
98.907	80.596	69.707	69.707	
-	-	-	-	
379.485	591.989	443.992	433.609	
7.792.122	11.632.316	9.745.321	8.333.427	
262.780	19.174	16.337	16.337	
4.070.543	4.280.449	-	4.379.369	
13.797.779	24.758.367	11.520.990	14.477.990	

**Tabel 6.1.2. Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/
Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi**

Table 6.1.2. Exposure to Commitment/Contingent Liability on Administrative Account Transactions, excluding Securitization Exposure

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 December 31, 2024	
		Tagihan Bersih Net Claims	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	-	-
4	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans Secured by Residential Property	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial Loans Secured by Commercial Real Estate	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/Retirement Loans	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables	13.005	9.754
9	Tagihan kepada Korporasi Corporate Receivables	101.537	101.537
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past Due Receivables	-	-
11	Aset Lainnya Other Asset	-	-
Total Total		114.541	111.290

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

	31 Desember 2023 December 31, 2023			
ATMR Setelah MRK RWA After MRK	Tagihan Bersih Net Claims	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	
(5)	(6)	(7)	(8)	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.241	6.997	5.247	3.875	
98.891	52.053	52.053	36.791	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
105.132	59.050	57.300	40.666	

**Tabel 6.1.3. Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan
(Counterparty Credit Risk)**

Table 6.1.3. Disclosure of Exposures Causing Credit Risk Due to Counterparty Credit Risk

No	Kategori Portofolio Portfolio Category	31 Desember 2024 December 31, 2024		
		Tagihan Bersih Net Claims	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Tagihan kepada Pemerintah Government Receivables	20.022	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik Public Sector Entities Receivables	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Multilateral Development Banks and International Institutions Receivables	-	-	
4	Tagihan kepada Bank Bank Receivables	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio Receivables	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi Corporate Receivables	-	-	
Total Total		20.022	-	

Tabel 6.1.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit

Table 6.1.7. Disclosure of Total Credit Risk Measurements

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

No	Jenis Transaksi Transaction Type	31 Desember 2024 December 31, 2024	31 Desember 2023 December 31, 2023
1	Total ATMR Risiko Kredit Total Credit Risk RWA	13.902.911	14.519.135
2	Total Faktor Pengurang Modal Total Capital Reduction Factor	-	-

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

	31 Desember 2023 December 31, 2023		
	ATMR Setelah MRK RWA After MRK	Tagihan Bersih Net Claims	ATMR Sebelum MRK RWA Before MRK
(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	125.469	125.469	469
-	125.469	125.469	469

Tabel 7.1. Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar

Table 7.1. Disclosure of Market Risk Using Standard Methods

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

No	Jenis Risiko Risk Type	31 Desember 2024 December 31, 2024			
		Bank		Konsolidasi Consolidation	
		Beban Modal Capital Expense	ATMR RWA	Beban Modal Capital Expense	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Beban modal berdasarkan <i>sensitivity based method</i> <i>Capital charge based on the sensitivity-based method</i>	1.760,23	-	-	-
	a. Kelas risiko GIRR <i>a. GIRR risk class</i>	1,69	-	-	-
	b. Kelas risiko CSR (non-sekuritisasi) <i>b. CSR risk class (non-securitization)</i>	0,71	-	-	-
	c. Kelas risiko CSR (sekuritisasi: non-CTP) <i>c. CSR risk class (securitization: non-CTP)</i>	-	-	-	-
	d. CSR risk class (securitization: CTP) <i>d. CSR risk class (non-securitization)</i>	-	-	-	-
	e. Kelas risiko Ekuitas <i>e. Equity risk class</i>	-	-	-	-
	f. Kelas risiko komoditas <i>f. Commodity risk class</i>	-	-	-	-
	g. Kelas risiko nilai tukar <i>g. Exchange rate risk class</i>	1.653,55	-	-	-
2	Beban modal <i>default risk capital</i> <i>DRC</i>	6.661,65	-	-	-
3	Residual <i>risk add-on</i> (RRAO) <i>RRAO</i>	-	-	-	-
	Beban Modal Risiko Pasar <i>Market Risk Capital Charge</i>	8.421,88	105.273,50	-	-
	Credit Valuation Adjustment (CVA)	624,88	624,88	-	-
	Jumlah <i>Total</i>	9.046,76	105.898,38	-	-

Tabel 7.1. Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar

Table 7.1. Disclosure of Market Risk Using Standard Methods

dalam jutaan Rupiah
in million of Rupiah

No	Jenis Risiko Risk Type	31 Desember 2023 December 31, 2023			
		Bank		Konsolidasi Consolidation	
		Beban Modal Capital Expense	ATMR RWA	Beban Modal Capital Expense	ATMR RWA
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga Interest Rate Risk				
	a. Risiko Spesifik a. Specific Risk	9.891,06	123.638,25	-	-
	b. Risiko Umum b. General Risk	13.181,62	164.770,25	-	-
2	Risiko Nilai Tukar Exchange Rate Risk	2.632,28	32.903,48	-	-
3	Risiko Ekuitas *) Equity Risk	-	-	-	-
4	Risiko Komoditas *) Commodity Risk	-	-	-	-
5	Risiko Option Option Risk	-	-	-	-
Jumlah Total		25.704,96	321.311,98	-	-

Tabel 8.1.a. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank secara Individual

Table 8.1.a. Quantitative Disclosure of Operational Risk - Bank Individually

Kode Komponen Component Code	Rincian Details	Validasi Kolom T Validation T Column
31 Desember 2024*) December 31, 2024*)		
0301000000	Komponen Indikator Bisnis (KIB) Components of Business Indicators (KIB)	82.901,49
0302000000	Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI) Internal Loss Multiplier Factor (FPKI)	1
0303000000	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) Minimum Operational Risk Capital (MMRO)	82.901,49
0304000000	ATMR untuk Risiko Operasional RWA for Operational Risk	1.036.268,63
31 Desember 2023*) December 31, 2023*)		
0301000000	Komponen Indikator Bisnis (KIB) Components of Business Indicators (KIB)	78.225,83
0302000000	Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI) Internal Loss Multiplier Factor (FPKI)	1
0303000000	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) Minimum Operational Risk Capital (MMRO)	78.225,83
0304000000	ATMR untuk Risiko Operasional RWA for Operational Risk	977.822,88

*) Untuk Bank yang menggunakan Pendekatan Indikator Dasar dalam menghitung Risiko Operasional

*) For Banks that use the Basic Indicator Approach in calculating Operational Risk

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.

Tanggung Jawab Sosial Pengamanan Perusahaan

Corporate Social Safety Responsibility

Bank Artha Graha Internasional berkomitmen untuk menjalankan pengembangan usaha yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tapi Bank juga sangat memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sesuai visi dan misi Bank, sebagai wujud tanggung jawab Bank dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Bank Artha Graha Internasional is committed to carrying out business development that is not only oriented towards economic aspects, but also paying close attention to social and environmental aspects in accordance with the Bank's vision and mission, as a form of the Bank's responsibility in supporting sustainable development.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PENGAMANAN PERUSAHAAN

Corporate Social Safety Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Pengamanan Perusahaan

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. berkomitmen untuk menjalankan pengembangan usaha yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, namun juga sangat memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Menyesuaikan dengan visi Bank yaitu menjadi institusi keuangan terkemuka dengan kinerja prima yang berkelanjutan dan berkontribusi dalam pembangunan Indonesia, serta misi Bank untuk memberikan solusi keuangan berkelanjutan yang komprehensif dan inovatif, meningkatkan jangkauan serta kualitas pelayanan melalui digitalisasi dan inklusi keuangan, mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdedikasi, serta menjalankan tata kelola perusahaan yang baik serta peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini dilakukan sebagai wujud tanggung jawab Bank dalam mendukung pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Bank maupun masyarakat pada umumnya.

Bank Artha Graha Internasional berkomitmen untuk menjalankan pengembangan usaha yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tapi Bank juga sangat memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sesuai visi dan misi Bank, sebagai wujud tanggung jawab Bank dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Corporate Social Safety Responsibility

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. is committed to pursuing business development that focuses not only on economic aspects but also places great importance on social and environmental aspects. In alignment with the Bank's vision to become a leading financial institution with sustainable performance and contribute to the development of Indonesia, as well as the Bank's mission to provide comprehensive and innovative sustainable financial solutions, enhance service reach and quality through digitalization and financial inclusion, develop reliable and dedicated human resources, and uphold good corporate governance while demonstrating care for the community and the environment., the Bank takes these actions as part of its responsibility to support sustainable development. This effort aims to improve the quality of life and the environment, benefiting both the Bank and society at large.

Bank Artha Graha Internasional is committed to business development that is not solely focused on economic aspects but also highly attentive to social and environmental factors, in line with the Bank's vision and mission. This reflects the Bank's responsibility to support sustainable development.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Social and Environmental Responsibility

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. senantiasa berupaya bahwa setiap keputusan dan aktivitas bisnis yang dilakukan mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingannya. Bank memandang bahwa tanggung jawab sosial merupakan sebuah kebutuhan yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini penting untuk menjaga citra perusahaan di mata masyarakat, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, serta menciptakan keunggulan kompetitif berdasarkan nilai serta norma yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, arah pelaksanaan

In conducting its business activities, PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. consistently strives to ensure that every decision and business activity carried out benefits its stakeholders. The Bank views social responsibility as a necessity that ultimately brings positive impact to the company's value. This is crucial in maintaining the company's image in the eyes of the public, strengthening relationships with stakeholders, and creating a competitive advantage based on prevailing values and norms. In line with this, the direction of its social responsibility efforts is focused on enhancing the Bank's role

tanggung jawab sosial adalah dalam upaya meningkatkan peran Bank dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bank harus juga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, dengan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Pengamanan Perusahaan atau *Corporate Social Safety Responsibility* (CSSR). Sebagai wujud komitmen, Bank menjalankan program CSSR yang berfokus pada bidang pelestarian lingkungan, penanggulangan bencana, sosial kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. Program CSSR yang dijalankan Bank terutama ditujukan untuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasi Bank.

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan, Bank telah berkomitmen dalam menerapkan program keuangan berkelanjutan yang merupakan dukungan sektor keuangan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Bank sangat menyadari bahwa sistem keuangan dapat mengambil peran penting dalam mencegah terjadinya praktik pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan, yang akhirnya berdampak pada kesenjangan sosial dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Bank Artha Graha Internasional secara berkala menyajikan informasi pelaksanaan program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk Laporan Keberlanjutan pada buku terpisah. Program-program tersebut dijalankan dalam rangka mendukung pencapaian berbagai tujuan keberlanjutan, baik pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta pada aspek tata kelola keberlanjutan yang baik. Penyampaian Laporan terpisah tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu mengacu Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Selain mengacu pada ketentuan POJK tersebut, Laporan Keberlanjutan Bank Artha Graha Internasional juga disusun dengan mengacu pada rujukan penyusunan laporan keberlanjutan menurut *Global Reporting Initiative* (GRI) Standard yang dikeluarkan pada tahun 2021.

in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) to support inclusive and sustainable economic growth.

The Bank must also be able to provide benefits to all stakeholders by implementing the Corporate Social Safety Responsibility (CSSR) program. As a demonstration of its commitment, the Bank runs a CSSR program that focuses on environmental conservation, disaster management, community social welfare, and community empowerment. The CSSR programs implemented by the Bank are primarily aimed at communities located around the Bank's operational areas.

As a company operating in the banking sector, the Bank is committed to implementing sustainable finance programs as part of the financial sector's support for achieving sustainable development. The Bank is fully aware that the financial system plays a crucial role in preventing funding or investment practices that support businesses using resources excessively, which ultimately leads to social inequality and environmental damage.

Bank Artha Graha Internasional regularly provides information on the implementation of its social and environmental responsibility programs through a Sustainability Report, published in a separate document. These programs are carried out to support the achievement of various sustainability goals across economic, social, environmental aspects, and good sustainability governance practices. The separate report is submitted in accordance with Financial Services Authority (OJK) Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 regarding the Form and Content of the Annual Report for Issuers or Public Companies, which refers to OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies. In addition to complying with the provisions of the OJK Regulation, Bank Artha Graha Internasional's Sustainability Report is also prepared based on the guidelines for sustainability reporting according to the Global Reporting Initiative (GRI) Standards, issued in 2021.

INDEKS PEMENUHAN SE-OJK 16-21 - AR BAGI 2024

Compliance Index of OJK Circular Letter 16-21 - Annual Report for 2024

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
UMUM General		
Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris <i>The annual report is presented in proper and correct Indonesian and is also recommended to be provided in English.</i>	√	
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca <i>The annual report is printed with good quality and uses a font type and size that are easy to read.</i>	√	
Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf. <i>The Annual Report presented in the form of an electronic document copy is the Annual Report converted into PDF format.</i>	√	
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas <i>The annual report clearly states the company's identity.</i>	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: <i>The company name and annual report year are displayed in:</i>	√
	Sampul muka <i>Front cover</i>	√
	Samping <i>Spine</i>	√
	Sampul belakang <i>Back cover</i>	√
Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan, mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir. <i>The annual report is displayed on the company's website, including the most recent annual report and at least the past four years.</i>	Setiap halaman. <i>Each page</i>	√
		√

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING <i>Summary Of Key Financial Data</i>		
Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: <i>The Summary of Key Financial Data contains financial information presented in a comparative format over 3 (three) fiscal years or since the commencement of its business operations if the Issuer or Public Company has been operating for less than 3 (three) years, and must include at least the following:</i>	Informasi paling sedikit memuat antara lain: <i>This information includes at least:</i>	16 - 22
	1) Pendapatan/penjualan; <i>Revenue/sales;</i>	19
	2) Laba bruto; <i>Gross profit;</i>	19
	3) Laba (rugi); <i>Profit (loss);</i>	
	4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; <i>Total profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;</i>	19
	5) total laba (rugi) komprehensif; <i>Total comprehensive profit (loss);</i>	19
	6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; <i>Total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;</i>	19
	7) laba (rugi) per saham; <i>Earnings (loss) per share;</i>	19
	8) jumlah aset; <i>Total assets;</i>	16

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
	9) jumlah liabilitas; <i>Total Liabilities;</i>	17
	10) jumlah ekuitas; <i>Total Equity;</i>	18
	11) Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; <i>Profit (loss) to total assets ratio;</i>	21
	12) Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; <i>Profit (loss) to equity ratio;</i>	21
	13) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; <i>Profit (loss) to revenue/sales ratio;</i>	21
	14) Rasio lancar; <i>Current ratio;</i>	21
	15) Rasio liabilitas terhadap ekuitas; <i>Liabilities to equity ratio;</i>	21
	16) Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan <i>Liabilities to total assets ratio; and</i>	21
	17) Rasio KPMM <i>Capital Adequacy Ratio (CAR);</i>	20
	18) Rasio Return on Asset (ROA); <i>Return on Assets (ROA) ratio;</i>	21
	19) Rasio Return on Equity (ROE); <i>Return on Equity (ROE) ratio;</i>	21
	20) Aset produktif <i>Productive assets;</i>	
	21) Rasio Non-performing Loans (NPL); <i>Non-Performing Loan (NPL) ratio;</i>	
	22) Rasio Beban OpeRasional terhadap Pendapatan OpeRasional (BOPO); <i>Operating Expenses to Operating Income ratio (BOPO);</i>	
	23) Cost to Income Ratio (CIR); <i>Cost to Income Ratio (CIR);</i>	
	24) Rasio Net Interest Margin (NIM); <i>Net Interest Margin (NIM) ratio;</i>	
	25) Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); <i>Percentage of violations and excesses of the Legal Lending Limit (LLL);</i>	21 - 22
	26) Rasio Giro Wajib Minimum (GWM); <i>Statutory Reserve Requirement (GWM) ratio;</i>	
	27) Rasio Posisi Devisa Neto (PDN); dan <i>Net Open Position (NOP) ratio; and</i>	
	28) Informasi dan Rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya; <i>Other financial information and ratios relevant to the Issuer or Public Company and its industry type.</i>	
INFORMASI SAHAM Share Information		
	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: <i>Share information for a Public Company should at least contain:</i>	
	Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: <i>Shares issued for each quarterly period were presented in the form of a comparison for the last 2 (two) financial years, at least containing:</i>	26
	Jumlah saham yang beredar; <i>Number of outstanding shares;</i>	26
	Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; <i>Market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares were listed;</i>	26
	Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan <i>The highest, lowest and closing share prices were based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and</i>	26
	Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. <i>Trading volume on the stock exchange where the shares are listed.</i>	26
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; <i>Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on the stock exchange;</i>	

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
	Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan <i>In the event of a corporate action causing changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock, dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) should be added with at least an explanation regarding:</i>	28
	Tanggal pelaksanaan aksi korporasi; <i>The date of implementation of the corporate action;</i>	28
	Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; <i>The ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares;</i>	28
	Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; <i>Number of outstanding shares before and after the corporate action;</i>	28
	Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan <i>Number of conversion effects executed (if any); and</i>	28
	Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; <i>Share prices before and after corporate actions;</i>	28
	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan <i>In the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the financial year, the should be explained; and</i>	27 - 28
	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/ atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/ atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. <i>In the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process was still ongoing until the end of the Annual Report period, it explained the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/ or cancellation of the share listing (delisting).</i>	27 - 28
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir <i>Information on bonds, sukuk or convertible bonds that were still outstanding in the last 2 (two) financial years.</i>	Informasi memuat: <i>Information contained:</i>	
	Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); <i>Number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds;</i>	29
	Tingkat bunga/imbalan; <i>Interest rate/yield;</i>	29
	Tanggal jatuh tempo; dan <i>Due date; and</i>	29
	Peringkat obligasi/sukuk tahun 2020 dan 2021. <i>Bond/sukuk ratings for 2020 and 2021.</i>	29
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/ obligasi konversi, agar diungkapkan. <i>Note: if the company did not have bonds/sukuk/convertible bonds, it had to be disclosed.</i>	29

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI <i>Report Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors</i>		
Laporan Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners' Report</i>	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: <i>The report of the Board of Commissioners should at least contain a brief description about:</i>	
	Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; <i>Assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;</i>	44
	Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan <i>Views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and</i>	42 - 44, 47 - 48
	Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik <i>Views on the implementation of the governance of the Issuer or Public Company.</i>	49
	Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya <i>Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reasons for the changes.</i>	51
Laporan Direksi <i>Board of Directors' Report</i>	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: <i>The Board of Directors' report should at least contain a brief description of:</i>	59 - 60
	Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: <i>Performance of Issuers or Public Companies, at least containing:</i>	60 - 61
	Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; <i>Issuer's or Public Company's strategy and strategic policies;</i>	61
	Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; <i>The role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;</i>	61 - 62
	Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; <i>The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;</i>	61
	Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan <i>Comparison between the results achieved with those targeted by the Issuer or Public Company; and</i>	61 - 62
	Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; <i>Constraints faced by Issuers or Public Companies;</i>	62 - 66
	Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan <i>Description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and</i>	55 - 59
	Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. <i>Implementation of the governance of Issuers or Public Companies.</i>	66 - 67
	Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. <i>Changes in the composition of the members of the Board of Directors (if any) and the reasons for the changes.</i>	68

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
Tanda tangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris <i>Signatures of members of the Board of Directors and Board of Commissioners</i>	Memuat hal-hal sebagai berikut: <i>Contains the following:</i>	
	Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; <i>Signatures are written on a separate sheet;</i>	
	Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; <i>Statement that the Board of Commissioners and Board of Directors are fully accountable for the validity of the contents of the annual report;</i>	
	Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan <i>Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors by mentioning their names and positions; and</i>	
	Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. <i>A written explanation in a separate letter from the concerned person in the event that there are members of the Board of Commissioners or Board of Directors who do not sign the annual report, or a written explanation in a separate letter from other members in the event that there is no written explanation from the concerned person.</i>	
PROFIL PERUSAHAAN <i>Company Profile</i>		
Nama dan alamat lengkap perusahaan <i>Company name and full address</i>	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: <i>Access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that allowed the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:</i>	72
	Alamat; <i>Address;</i>	73
	Nomor telepon; <i>Telephone number;</i>	73
	Alamat surat elektronik; dan <i>Electronic mail address; and</i>	73
	Alamat situs web; <i>Website address;</i>	73
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; <i>Brief history of the Issuer or Public Company</i>	Mencakup antara lain: tanggal/ tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan <i>It included: date/year of establishment, name, change of company name (if any), and effective date of change of company name.</i>	77 - 82
	Catatan <i>Note:</i> apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan <i>if the company had never changed its name, it should be disclosed.</i>	77
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan <i>Vision, Mission and Corporate Culture</i>	Mencakup: <i>It included:</i>	
	Visi perusahaan; <i>Company vision;</i>	74
	Misi perusahaan; <i>Company mission;</i>	74
	Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan <i>Information that the vision and mission had been reviewed and approved by the Board of Directors/Board of Commissioners for the financial year; and</i>	75
	Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki Perusahaan. <i>A statement regarding the corporate culture of the Company.</i>	75

KRITERIA <i>Criteria</i>	PENJELASAN <i>Description</i>	Halaman <i>Page</i>
	Uraian mengenai antara lain: <i>It described:</i>	
Bidang usaha <i>Business fields</i>	Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; <i>The company's business activities according to the latest articles of association;</i>	83
	Kegiatan usaha yang dijalankan; dan <i>Business activities carried out; and</i>	83 - 84
	Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. <i>Products and/or services produced.</i>	85 - 91
Wilayah OpeRasional <i>Operational Area</i>	Wilayah opeRasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah opeRasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan opeRasional atau jangkauan dari kegiatan opeRasional perusahaan. <i>Operational area of Issuer or Public Company; operational area was the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.</i>	92 - 95
Struktur Organisasi <i>Organizational structure</i>	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan. <i>The organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions.</i>	98 - 99
Keanggotaan Asosiasi <i>Association Member</i>	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. <i>List of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance.</i>	96

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: <i>Profile of the Board of Commissioners, at least contained:</i>	
	Nama dan jabatan; <i>Name and position;</i>	100 - 103
	Foto terbaru; <i>Recent photos;</i>	100 - 103
	Usia; <i>Age;</i>	100 - 103
	Kewarganegaraan; <i>Citizenship;</i>	100 - 103
	Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; <i>Educational history and/or certification;</i>	100 - 103
	Riwayat jabatan, meliputi informasi; <i>Position history, including information on:</i>	100 - 103
	Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; <i>Legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;</i>	100 - 103
	Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; <i>The legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who was an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;</i>	100 - 103
	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; <i>Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners did not have concurrent positions, then this should be disclosed;</i>	100 - 103
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; <i>Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;</i>	100 - 103
	Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; <i>Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers, either directly or indirectly, to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners had no affiliation, the Issuer or Public Company should disclose this matter;</i>	100 - 103
	Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan <i>Statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner had served more than 2 (two) terms; and</i>	100 - 103
	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; <i>Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there was no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter should be disclosed;</i>	100

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
Profil Direksi Board of Directors Profile	Profil Direksi, paling sedikit memuat: <i>Profile of the Board of Directors, at least contained:</i>	
	Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; <i>Name and position in accordance with the duties and responsibilities;</i>	104 - 108
	Foto terbaru; <i>Recent photos;</i>	104 - 108
	Usia; <i>Age;</i>	104 - 108
	Kewarganegaraan; <i>Citizenship;</i>	104 - 108
	Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; <i>Educational history and/or certification;</i>	104 - 108
	Riwayat jabatan, meliputi informasi: <i>Position history, including information on:</i>	104 - 108
	Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; <i>The legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;</i>	104 - 108
	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan <i>Concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this was disclosed; and</i>	104 - 108
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; <i>Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;</i>	104 - 108
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan Number of employees and data on employee competency development.	Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan <i>Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors had no affiliation, the Issuer or Public Company should disclose this matter; and</i>	104 - 108
	Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; <i>Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there was no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter should be disclosed;</i>	104
	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; <i>Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/ contracted) in the financial year;</i>	116 - 119
Komposisi pemegang saham Composition of shareholders	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. <i>Disclosure of information could be presented in tabular form.</i>	
	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: <i>Name of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the financial year consisted of information regarding:</i>	120

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
	Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; <i>Shareholders owning 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company;</i>	120 - 121
	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; <i>Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners owning shares of Issuers or Public Companies. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners did not own shares, then this matter should be disclosed;</i>	121
	Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; <i>Percentage of indirect ownership of shares of Issuers or Public Companies by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;</i>	121
	Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. <i>In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners did not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter should be disclosed.</i>	121
	Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; <i>Community shareholder group, namely the group of shareholders who each owned less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company;</i>	121 - 122
	Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi; <i>Number of shareholders and percentage of ownership at the end of the financial year based on classification:</i>	
	Kepemilikan institusi lokal; <i>Ownership of local institutions;</i>	120
	Kepemilikan institusi asing; <i>Ownership of foreign institutions;</i>	122
	Kepemilikan individu lokal; dan <i>Local individual ownership; and</i>	122
	Kepemilikan individu asing; <i>Foreign individual ownership;</i>	122
	Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel <i>The above information could be presented in tabular form.</i>	
Pemegang saham utama dan pengendali <i>Major and controlling shareholders</i>	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; <i>Information regarding the main and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, to the individual owners presented in the form of a scheme or chart;</i>	122

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi <i>List of subsidiaries and/or associated entities</i>	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. <i>The name of the subsidiary, associated company, joint venture company where the Issuer or Public Company had joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company.</i>	122
	Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. <i>For a subsidiary, information about the address of the subsidiary was added.</i>	122
	Memuat informasi antara lain: <i>It contained information including:</i>	
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) <i>Name and address of the subsidiary and/or branch office or representative office (if any)</i>	Nama dan alamat entitas anak; dan <i>Name and address of the subsidiary; and</i>	122
	Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. <i>Name and address of branch/representative office.</i>	128 - 133
	Catatan: <i>Note:</i> apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan. <i>if the company did not have a subsidiary, branch office, and representative office, it should be disclosed.</i>	
Struktur grup perusahaan <i>Company group structure</i>	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV) <i>Company group structure in the form of a chart depicting parent entities, subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose vehicles (SPV).</i>	122
Kronologi pencatatan saham <i>Share listing chronology</i>	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); <i>Chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the financial year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company were listed, including stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);</i>	123 - 125
Kronologis penerbitan efek (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. <i>Chronology of securities issuance (including private placement) and/or share listing from the initial issuance to the end of the financial year.</i>	Informasi pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); <i>Other securities listing information that had not matured in the financial year at least included the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and rating of securities (if any);</i>	125

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) <i>Information on the use of public accountants (AP) and public accounting firms (KAP)</i>	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliannya meliputi: <i>Information on the use of public accounting services (AP) and public accounting firms (KAP) and their networks/associations/ allies included:</i>	
	Nama dan alamat; <i>Name and address;</i>	126, 350
	Periode penugasan; <i>Assignment period;</i>	351
	Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; <i>Information on audit and/or non-audit services provided;</i>	350 - 351
	Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan <i>Audit and/or non-audit fees for each assignment given during the financial year; and</i>	351
	Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliannya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut. <i>In the event that AP and KAP and their networks/ associations/allies, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed.</i>	351
	Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliannya dapat disajikan dalam bentuk tabel. <i>Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/allies could be presented in tabular form.</i>	350 - 351
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang <i>Name and address of supporting institutions and/or professions</i>	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP. <i>Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.</i>	126 - 127
Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional <i>Awards received in the last financial year and/or certifications that are still valid in the last financial year both on a national and international scale</i>	Informasi memuat antara lain: <i>It contained information in the following:</i>	
	Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; <i>Name of award and/or certification;</i>	8 - 9
	Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; <i>Year of award and/or certification;</i>	8 - 9
	Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan <i>The awarding and/or certification body; and</i>	9
	Masa berlaku (untuk sertifikasi) <i>Validity period (for certification).</i>	9
ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON COMPANY PERFORMANCE		
Tinjauan operasi per segmen usaha <i>Operational review by business segment</i>	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: <i>Operational review per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:</i>	
	Penjelasan masing-masing segmen usaha. <i>Explanation of each business segment.</i>	152
	Kinerja per segmen usaha, antara lain: <i>Performance per business segment, including:</i>	153
	Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; <i>Production, which includes the process, capacity, and development;</i>	152
	Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; <i>Increase/decrease in production capacity;</i>	152
	Penjualan/pendapatan usaha; dan <i>Sales/operating income; and</i>	153
	Profitabilitas <i>Profitability</i>	152 - 155

KRITERIA <i>Criteria</i>	PENJELASAN <i>Description</i>	Halaman <i>Page</i>
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan <i>Description of the company's financial performance</i>	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: <i>Financial performance analysis which included a comparison between the financial performance of the year concerned with the previous year and the causes of an increase/ decrease in an account (in the form of narratives and tables), including regarding:</i>	
	Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; <i>Current assets, non-current assets, and total assets;</i>	156 - 160
	Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; <i>Short-term liabilities, long-term liabilities and total liabilities;</i>	160 - 162
	Ekuitas; <i>Equity;</i>	162
	Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; <i>Sales/operating income, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and comprehensive income for the current period;</i>	163 - 165
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan Rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan <i>Discussion and analysis of abilities To pay debts and the collectibility level of the company's receivables, by presenting the relevant ratio calculations according to the type of company industry</i>	Arus kas; <i>Cash flow;</i>	166
	Penjelasan tentang: <i>Explanation of:</i>	
	Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan <i>Ability to pay debts, both short term and long term and</i>	168
Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy) <i>Discussion on capital structure and management of capital structure policy</i>	Tingkat kolektibilitas piutang. <i>The level of collectibility of receivables</i>	168 - 169
	Penjelasan atas: <i>The explanation consisted of:</i>	
	Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan <i>Details of the capital structure consisting of interest- based debt/ sukuk and equity; and</i>	169 - 171
	Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan <i>Management policies on capital structure (capital structure policies); and</i>	170
	Dasar pemilihan kebijakan manajemen <i>Basis for selecting management policy</i>	170

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir <i>Discussion on material commitments for capital goods investment (not funding commitments) in the last financial year</i>	Penjelasan tentang: <i>It explained:</i>	
	Nama pihak yang melakukan ikatan; <i>The name of the party making the bond;</i>	n.a
	Tujuan dari ikatan tersebut; <i>The purpose of the bond;</i>	n.a
	Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan- ikatan tersebut; <i>The expected source of funds to fulfill these commitments;</i>	n.a
	Mata uang yang menjadi denominasi; dan <i>Currency to be denominated; and</i>	n.a
	Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. <i>Measures planned by the company to protect the risk from the related foreign currency position.</i>	n.a
	Catatan <i>Note:</i> apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan. <i>if the company did not have a commitment related to investment in capital goods in the last financial year, it should be disclosed.</i>	174
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir <i>Discussion on investment in capital goods realized in the last financial year</i>	Penjelasan tentang: <i>It explained:</i>	
	Jenis investasi barang modal; <i>Types of investment in capital goods;</i>	174
	Tujuan investasi barang modal; dan <i>The purpose of investment in capital goods; and</i>	174
	Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. <i>The investment value of capital goods issued in the last financial year.</i>	174
	Catatan <i>Note:</i> apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. <i>if there was no realization of capital goods investment, it should be disclosed.</i>	174
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang. <i>Comparison information between the target at the beginning of the financial year with the results achieved (realization), and the targets or projections to be achieved for the coming year.</i>	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: <i>Comparison between targets/projections at the beginning of the year book with the results achieved (realization), regarding:</i>	
	Pendapatan/penjualan; <i>Revenue/sales;</i>	175
	Laba (rugi); <i>Profit (loss);</i>	175
	Struktur modal (capital structure); <i>Capital structure;</i>	175
	Pemasaran; <i>Marketing;</i>	175
	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik. <i>Other matters deemed important to the Issuer or Public Company.</i>	176

KRITERIA <i>Criteria</i>	PENJELASAN <i>Description</i>	Halaman <i>Page</i>
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: <i>Targets/ projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year,</i>	176
	Pendapatan/penjualan; <i>Revenue/sales;</i>	176
	Laba (rugi); <i>Profit (loss);</i>	176
	Struktur modal (capital structure); <i>Capital structure;</i>	176
	Kebijakan dividen; <i>Dividend Policy;</i>	176
	Pemasaran; <i>Marketing;</i>	176
	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik. <i>Other matters deemed important to the Issuer or Public Company.</i>	176
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan <i>Material information and facts occurring after the date of the accountant's report</i>	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. <i>Description of significant events after the date of the accountant's report including their impact on future business performance and risks.</i>	175
	Catatan <i>Note:</i> apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan agar diungkapkan. <i>if there was no significant event after the date of the accountant's report, it should be disclosed.</i>	n.a
Uraian tentang prospek usaha perusahaan <i>Description of the company's business prospects</i>	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. <i>The business prospects of the Issuer or Public Company are related to industrial conditions, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources.</i>	149 - 152
Uraian tentang aspek pemasaran <i>Description of the marketing aspect</i>	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar. <i>The marketing aspect of the goods and/ or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share.</i>	147 - 149
	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: <i>Description of dividends for 2 (two) financial years last, at least:</i>	
	Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; <i>Dividend policy contained information of the percentage of total dividends distributed to net income;</i>	176
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir. <i>Description of dividends for the last 2 (two) financial years</i>	Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; <i>Date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;</i>	176
	Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); <i>Total dividends per share (cash and/ or non-cash);</i>	176
	Jumlah dividen per tahun yang dibayar. <i>The amount of dividends per year paid</i>	176
	Catatan <i>Note:</i> Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. <i>if there was no dividend payment in last two consecutive years, the reasons should be disclosed.</i>	176

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) <i>Realization of the use of proceeds from the public offering (in the event that the company was still required to submit a report on the realization of the use of funds)</i>	Memuat uraian mengenai: It contained a description of:	
	Total perolehan dana; Total proceeds;	n.a
	Rencana penggunaan dana; Plan for the use of funds;	n.a
	Rincian penggunaan dana; Details of the use of funds;	n.a
	Saldo dana; dan Fund balance; and	n.a
	Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). The date of approval of the GMS/RUPO for changes in the use of funds (if any).	n.a
	Catatan Note: dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan. if the company did not have information on the realization of the use of proceeds from the public offering, it should be disclosed.	n.a 177
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku <i>Material information (if any), including but not limited to investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, debt/equity restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions that occurred during the fiscal year.</i>	Memuat uraian mengenai: It contained a description of:	
	Tanggal, nilai, dan objek transaksi; Transaction date, value, and object;	179 - 181
	Nama pihak yang melakukan transaksi; Name of the party conducting the transaction;	
	Sifat hubungan afiliasi (jika ada); The nature of the affiliation relationship (if any);	178
	Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; Explanation of the fairness of the transaction;	178
	Pemenuhan ketentuan terkait; Fulfillment of related provisions;	181 182
	Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 5), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: In the event that there was an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in number 1) to number 5), the Issuer or Public Company also disclosed information:	179 - 180
	Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan Statement of the Board of Directors that affiliated transactions had gone through adequate procedures to ensure that affiliated transactions were carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle; and	181

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
	Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); <i>The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions were carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, is carried out by complying with the arms-length principle;</i>	181
	Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. <i>For affiliated transactions or material transactions which became business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation was added that the affiliated transactions or material transactions were business activities carried out in order to generate operating income and run regularly, repeatedly, and/or continuously; In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements was added.</i>	182
	Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; <i>For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;</i>	n.a
	Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. <i>In the event that there was no affiliated transaction and/ or conflict of interest transaction, this matter should be disclosed.</i>	177 - 182
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir <i>A description of changes in the laws and regulations of the company in the last financial year</i>	Uraian memuat antara lain: <i>The description included:</i>	
	Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan <i>The name of the legislation undergoing changes; and</i>	184 - 188
	Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. <i>The impact (quantitative and/or qualitative) on the company (if significant) or a statement that the impact is not significant.</i>	184 - 188
	Catatan <i>Note:</i> apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang- undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. <i>if there were no changes to the laws and regulations in the last financial year, the matters should be disclosed.</i>	n.a

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir <i>A description of the changes in accounting policies adopted by the company in the last financial year</i>	Uraian memuat antara lain: <i>The description included:</i>	
	Perubahan kebijakan akuntansi; <i>Changes in accounting policies;</i>	188 - 189
	Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan <i>Reasons for changes in accounting policies; and</i>	188 - 189
	Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. <i>Quantitative impact on financial statement</i>	188 - 189
TATA KELOLA PERUSAHAAN <i>Good Corporate Governance</i>		
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) <i>General Meeting of Shareholders</i>	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: <i>Information regarding the resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year before the financial year included;</i>	224 - 227
	keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan <i>resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year before the financial year are realized in the financial year; and</i>	228 - 233
	keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; <i>resolutions of the GMS for the financial year and 1 (one) year before the financial year that have not been realized and the reasons for not realizing them;</i>	n.a
	dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; <i>in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed</i>	n.a
Direksi <i>Directors</i>	Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; <i>Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors</i>	
	Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. <i>Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.</i>	255 - 256
	Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; <i>A statement that the Board of Directors had guidelines or charter for the Board of Directors;</i>	247
	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS;	
	Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. <i>Information on the level of attendance of members of the Board of Directors at the meeting of the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in tabular form</i>	222 - 223, 242 - 243, 257
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi; <i>Training and/or competency improvement of members of the Board of Directors;</i>	
	Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan <i>Policy on training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and</i>	258

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); <i>Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any);</i>	258 - 260
	Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: <i>The Board of Directors' assessment of the performance of the committees supporting the implementation of the Board of Directors' duties for the financial year shall at least contain:</i>	261
	prosedur penilaian kinerja; dan <i>performance appraisal procedures; and</i>	261
	kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan <i>the criteria used were performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and</i>	261
	dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. <i>in the event that the Issuer or Public Company did not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, then this should be disclosed.</i>	n.a
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; <i>Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;</i>	
	Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris; <i>A statement that the Board of Commissioners had guidelines or charter for the Board of Commissioners;</i>	234 - 235
	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. <i>Policy and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings, including attendance at the GMS.</i>	222 - 223, 242 - 243, 257
	Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. <i>Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.</i>	
	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris; <i>training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners;</i>	243 - 244
	kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan <i>policies on training and/or improving the competence of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and</i>	243 - 244
	pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); <i>training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the financial year (if any);</i>	243 - 244
	Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: <i>Performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:</i>	269 - 270
	prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; <i>performance appraisal implementation procedures;</i>	269 - 270

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
	kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used were performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and	269 - 270
	pihak yang melakukan penilaian; dan the party conducting the assessment; and	269 - 270
	Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: The assessment of the Board of Commissioners on the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the financial year includes:	
	prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	245 - 246
	kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; the criteria used are performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings;	245 - 246
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners	Paling sedikit memuat: At least it contained:	
	Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris; dan The nomination procedure, including a brief description of the nomination policies and processes for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	270 - 275
	Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, including:	275 - 279
	prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	275 - 276
	struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and	278 - 279
	besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners;	278 - 279
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	
Dewan Pengawas Syariah	Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: 1. Nama; 2. Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah 3. Periode penugasan dewan pengawas syariah; 4. Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan 5. frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	n.a
Komite audit Audit committee	Paling sedikit memuat: At least it contained:	
	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Name and position in committee membership;	103, 283
	Usia; Age;	103, 283

KRITERIA <i>Criteria</i>	PENJELASAN <i>Description</i>	Halaman <i>Page</i>
	Kewarganegaraan; <i>Nationality;</i>	103, 283
	Riwayat pendidikan; <i>Educational history;</i>	103, 283
	Riwayat jabatan, meliputi informasi; <i>Position history, including information on:</i>	103, 283
	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; <i>Legal basis for appointment as committee member;</i>	103, 283
	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan <i>Concurrent positions, either as a member of the board of commissioners, member of the board of directors, and/or committee member and other positions (if any); and</i>	103
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; <i>Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;</i>	103, 283
	Periode dan masa jabatan anggota komite audit; <i>Period and term of office of audit committee members;</i>	103, 283
	Pernyataan independensi komite audit; <i>Statement of independence of the audit committee;</i>	284
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); <i>Training and/or competency improvement that have been followed in the financial year (if any);</i>	289
	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan <i>Policy and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members at the meeting; and</i>	285 - 288
	Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; <i>Implementation of the audit committee's activities for the financial year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;</i>	289 - 292
	Komite SDM, Nominasi dan Remunerasi <i>Committee HRD Nomination and Remuneration</i>	
	Paling sedikit memuat; <i>At least it contained</i>	
	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; <i>Name and position in committee membership;</i>	100 - 102, 294
	Usia; <i>Age;</i>	100 - 102, 112
	Kewarganegaraan; <i>Nationality;</i>	100 - 102, 112
	Riwayat pendidikan; <i>Educational history;</i>	100 - 102, 112
	Riwayat jabatan, meliputi informasi; <i>Position history, including information on:</i>	100 - 102, 112
	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; <i>Legal basis for appointment as committee member;</i>	294

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan <i>Concurrent positions, either as a member of the board of commissioners, member of the board of directors, and/or committee member and other positions (if any); and</i>	100 - 102
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; <i>Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;</i>	100 - 102, 112
	Periode dan masa jabatan anggota komite; <i>Period and term of office of audit committee members;</i>	100 - 102, 294
	Pernyataan independensi komite; <i>Statement of independence of the audit committee;</i>	295
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); <i>Training and/or competency improvement that have been followed in the financial year (if any);</i>	298 - 299
	Uraian tugas dan tanggung jawab; <i>Description of duties and responsibilities;</i>	295 - 296
	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); <i>A statement of having a guideline or charter (charter);</i>	293
	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; <i>The policy and implementation of meeting frequency and the attendance rate of members in those meetings;</i>	296 - 297
	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	298 - 299
	dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf 9) sampai dengan huruf 12) dan mengungkapkan:	n.a
	alasan tidak dibentuknya komite; dan	n.a
	pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi	n.a
Komite Tata Kelola dan Manajemen Risiko	Paling sedikit memuat: <i>At least it contained</i>	
	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; <i>Name and position in committee membership;</i>	100, 282
	Usia; <i>Age;</i>	100, 282
	Kewarganegaraan; <i>Nationality;</i>	100, 282
	Riwayat pendidikan; <i>Educational history;</i>	100, 282
	Riwayat jabatan, meliputi informasi: <i>Position history, including information on:</i>	100, 282
	Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; <i>Legal basis for appointment as committee member;</i>	301
	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan <i>Concurrent positions, either as a member of the board of commissioners, member of the board of directors, and/or committee member and other positions (if any); and</i>	100, 282

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; <i>Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;</i>	100, 282
	Periode dan masa jabatan anggota komite; <i>Period and term of office of audit committee members;</i>	301
	Pernyataan independensi komite; <i>Statement of independence of the audit committee;</i>	302
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); <i>Training and/or competency improvement that have been followed in the financial year (if any);</i>	305
	Uraian tugas dan tanggung jawab; <i>Description of duties and responsibilities;</i>	303
	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); <i>A statement of having a guideline or charter (charter);</i>	300
Sekretaris perusahaan Company secretary	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; <i>The policy and implementation of meeting frequency and the attendance rate of members in those meetings;</i>	303 - 305
	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku <i>Brief description of activities carried out during the fiscal year; and</i>	306
	Paling sedikit memuat: <i>At least it contained</i>	
	Nama; <i>Name;</i>	111, 338
	Domisili; <i>Domicile;</i>	111
	Riwayat jabatan, meliputi: <i>Position history, including;</i>	111
	Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan <i>Legal basis for appointment as company secretary; and</i>	338
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; <i>Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;</i>	111
	Riwayat pendidikan; <i>Educational history;</i>	111
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan <i>Training and/or competency improvement that was followed in the financial year; and</i>	342
Unit Audit Internal Internal Audit Unit	Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; <i>A brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the financial year;</i>	341 - 342
	Paling sedikit memuat: <i>At least it contained</i>	
	Nama kepala unit audit internal; <i>Name of the head of the internal audit unit;</i>	111, 345
	Riwayat jabatan, meliputi: <i>Position history, including;</i>	111
	Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan <i>Legal basis for appointment as company secretary; and</i>	343

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; <i>Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;</i>	111
	Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); <i>Qualification or certification as an internal audit profession (if any);</i>	347
	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; <i>Training and/or competency improvement that was followed in the financial year;</i>	349
	Struktur dan kedudukan unit audit internal; <i>The structure and position of the internal audit unit;</i>	346
	Uraian tugas dan tanggung jawab; <i>Description of duties and responsibilities;</i>	348
	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan <i>A statement that the internal audit unit had a guideline or charter; and</i>	343 - 344
	Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau komite audit; <i>A brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the financial year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the board of directors, board of commissioners, and/ or audit committee;</i>	348
Akuntan Publik Public Accountant	Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; <i>Name and year of the public accountant who audited the annual financial statements for the last 5 years</i>	351
	Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; <i>Name and year of the Public Accounting Firm that audited the annual financial statements for the last 5 years;</i>	351
	Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan <i>The amount of the fee for each type of service provided by the Public Accounting Firm in the last financial year; and</i>	351
	Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. <i>Other services provided by Public Accounting Firms and public accountants other than auditing services for annual financial statements in the last financial year.</i>	351
	Catatan <i>Note:</i> apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. <i>if there was no other service, it should be disclosed</i>	351
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal Control) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik, <i>A description of the internal control system implemented by the issuer or public company,</i>	Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; <i>Financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;</i>	358
	Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; an <i>Review of the effectiveness of the internal control system; and</i>	360
	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; <i>Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;</i>	360

KRITERIA <i>Criteria</i>	PENJELASAN <i>Description</i>	Halaman <i>Page</i>
	Paling sedikit menjelaskan: <i>At least explained</i>	
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik <i>The risk management system implemented by the Issuer or Public Company</i>	Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; <i>General description of the risk management system of the Issuer or Public Company;</i>	397 - 399
	Jenis risiko dan cara pengelolaannya; <i>Types of risks and how to manage them;</i>	399 - 417
	Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan <i>Overview of the effectiveness of the risk management system Issuer or Public Company; and</i>	
	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; <i>Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;</i>	399 - 400
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada), <i>Legal cases that have a material impact faced by the issuer or public company, subsidiaries, members of the board of directors and members of the board of commissioners (if any),</i>	Pokok perkara/gugatan; <i>Principal case/lawsuit;</i>	361 - 362
	Status penyelesaian perkara/gugatan; dan <i>Status of settlement of cases/claims; and</i>	361
	Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik; <i>The effect on the condition of the issuer or public company;</i>	361
Informasi tentang sanksi administratif/ sanksi yang dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota dewan komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada) <i>Information on administrative sanctions/ sanctions imposed on issuers or public companies, members of the board of commissioners and members of the board of directors, by the financial services authority and other authorities in the financial year (if any)</i>		361
Akses informasi dan data perusahaan: Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. <i>Information on administrative sanctions/ sanctions imposed on issuers or public companies, members of the board of commissioners and members of the board of directors, by the financial services authority and other authorities in the financial year (if any)</i>		362 - 364

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik Information regarding the code of conduct of the Issuer or Public Company	Paling sedikit menjelaskan: At least explained	
	Pokok-pokok kode etik: The points of the code of ethic	369 - 370
	Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi: Disclosure that the code of ethics applied to all levels of the organization;	370
	Penyebarluasan kode etik: Dissemination of the code of ethics;	370
	Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan Sanctions for each type of violation stipulated in the code of ethics (normative); and	371
	Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. The number of violations of the code of ethics along with the sanctions given in the last financial year.	371
	Catatan Note: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. if there is no violation of the code of ethics in the last financial year, it must be disclosed.	371
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen management stock ownership program/msop) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (employee Stock ownership program/esop);	Paling sedikit menjelaskan: At least explained	
	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (management stock Ownership program/ MSOP) dan/atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock Ownership program/ESOP), maka dijelaskan A brief description of the policy of providing long-term performance- based compensation to management and/ or employees owned by the issuer or public company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or stock ownership program by employees (employee Stock ownership program/ESOP), then explained:	377
	Jumlah saham dan/atau opsi: Number of shares and/or options;	377
	Jangka waktu pelaksanaan: Exercise period;	377
	Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan Eligibility requirements for employees and/or management; and	377
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi Brief description of Information disclosure policy	Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan. Exercise price or the method of determining the exercise price.	n.a
	Paling sedikit menjelaskan: At least explained	
	Kepemilikan saham anggota direksi dan anggota Dewan komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka; dan Share ownership of members of the board of directors and members of the board of commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a public company; and	262
	Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; Implementation of the policy;	262

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik <i>Description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company</i>	Paling sedikit menjelaskan: <i>At least explained</i>	
	Cara penyampaian laporan pelanggaran; <i>How to submit a violation report;</i>	373
	Perlindungan bagi pelapor; <i>Protection for whistleblowers;</i>	374
	Penanganan pengaduan; <i>Handling of complaints;</i>	374
	Pihak yang mengelola pengaduan; dan <i>The party managing the complaint; and</i>	374
	Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: <i>The results of the handling of complaints, at least:</i>	375
	Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku; dan <i>Number of complaints received and processed in the financial year; and</i>	375
	Tindak lanjut pengaduan; <i>Follow-up on complaints;</i>	375
	Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut. <i>In the event that the issuer or public company did not have a whistleblowing system, then this should be disclosed.</i>	n.a
Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik <i>Description of the Issuer's or Public Company's anti-corruption policy</i>	Paling sedikit menjelaskan: <i>At least explained</i>	
	Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), Fraud, suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan <i>Programs and procedures implemented in overcoming the practice of corruption, kickbacks, fraud, bribery and/ or gratuities in Issuers or Public Companies; and</i>	377
	Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; <i>Anti-corruption training/socialization for employees of Issuers or Public Companies;</i>	377
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud. <i>In the event that the Issuer or Public Company did not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy should be explained.</i>	n.a
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik <i>Implementation of Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies</i>	Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau <i>Statement of recommendations that had been implemented; and/or</i>	381 - 392
	Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternative pelaksanaannya (jika ada). <i>Explanation of recommendations that had not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any).</i>	381 - 392
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. <i>Disclosure of information can be presented in tabular form.</i>	
Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2021 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi <i>GCG Implementation Assessment for the financial year 2020 which included at least aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i>	Paling sedikit menjelaskan: <i>At least explained</i>	
	Kriteria yang digunakan dalam penilaian <i>Criteria used in the assessment</i>	214 - 215
	Pihak yang melakukan penilaian <i>The party conducting the assessment</i>	215
	Skor penilaian masing-masing kriteria <i>The assessment score of each criterion</i>	216
	Rekomendasi hasil penilaian <i>Recommended assessment results</i>	216
	Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. <i>Reasons for not yet/not implemented recommendations.</i>	216

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK <i>Social And Environmental Responsibility Of The Issuer Or Public Company</i>		
	- Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: - penjelasan strategi keberlanjutan; - ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); - profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; - penjelasan Direksi; - tata kelola keberlanjutan; - kinerja keberlanjutan; - verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; - lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan - tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; <i>The information disclosed in the social and environmental responsibility section constitutes the Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, and shall at minimum include:</i> <i>an explanation of the sustainability strategy;</i> <i>an overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);</i> <i>a brief profile of the Issuer or Public Company;</i> <i>a statement from the Board of Directors;</i> <i>sustainability governance;</i> <i>sustainability performance;</i> <i>written verification by an independent party, if any;</i> <i>a feedback form for readers, if any; and</i> <i>the Issuer's or Public Company's response to feedback on the previous year's report.</i>	
	Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; <i>The Sustainability Report as referred to in point 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as set out in Appendix II, which forms an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.</i>	
	Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; <i>The Sustainability Report as referred to in point 1) is an integral part of the Annual Report but may be presented separately from the Annual Report.</i>	

KRITERIA <i>Criteria</i>	PENJELASAN <i>Description</i>	Halaman <i>Page</i>
	- Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: - memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan - disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; - dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan - disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. <i>In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:</i> <i>include all information as referred to in point 1); and</i> <i>be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as set out in Appendix II, which forms an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;</i> <i>in the social and environmental responsibility section, include a statement that information on social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report presented separately from the Annual Report; and</i> <i>be submitted at the same time as the submission of the Annual Report.</i>	
Informasi Keuangan <i>Financial Information</i>		
Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan <i>Statement Letter of the Board of Directors and/or Board of Commissioners regarding Responsibility for Financial Statements</i>	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. <i>Compliance with related regulations regarding Responsibility for Financial Statements.</i>	
Opini auditor independen atas laporan keuangan <i>Independent auditor's opinion on financial statements</i>		
Deskripsi Auditor Independen di Opini <i>Description of Independent Auditor in Opinion</i>	Deskripsi memuat tentang: <i>The description contained about:</i>	
	Nama dan tanda tangan; <i>Name and signature;</i>	
	Tanggal Laporan Audit; dan <i>Date of the Audit Report;</i>	
	Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. <i>KAP license number and Public Accountant license number.</i>	

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
Laporan keuangan yang lengkap Complete financial reports	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: <i>It completely contained the elements of the financial statements:</i>	
	Laporan posisi keuangan; <i>Statement of financial position;</i>	
	Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; <i>Statement of profit or loss and other comprehensive income;</i>	
	Laporan perubahan ekuitas; <i>Statement of changes in equity;</i>	
	Laporan arus kas; <i>Cash flow statement;</i>	
	Catatan atas laporan keuangan; <i>Notes to financial statements;</i>	
	Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan <i>Comparative information about the previous period; and</i>	
Perbandingan tingkat profitabilitas Profitability level comparison	Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membupenyajian kembali pos- pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). <i>Statement of financial position at the beginning of the previous period when the entity applies an accounting policy retrospectively or restates financial statement items, or when the entity reclassifies items in its financial statements (if relevant).</i>	
Laporan Arus Kas <i>Cash flow statement</i>	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya <i>Comparison of performance/profit (loss) for the current year with the previous year</i>	
	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>It should meet the following conditions:</i>	
	Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; <i>Grouping into three categories of activities: operating, investing, and financing;</i>	
	Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; <i>Using the direct method to report cash flows from operating activities;</i>	
	Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan <i>Separation of presentation between cash receipts and or cash disbursements during the year in operating, investing and financing activities; and</i>	
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Accounting Policy Overview	Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. <i>Disclosure of non- cash transactions must be included in the notes to the financial statements.</i>	
	Meliputi sekurang-kurangnya: <i>It included at least:</i>	
	Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; <i>Statement of compliance with SAK;</i>	
	Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; <i>Basis of measurement and preparation of financial statements;</i>	
	Pajak penghasilan; <i>Income tax;</i>	
	Imbalan kerja; dan <i>Work benefits; and</i>	
	Instrumen Keuangan. <i>Financial Instruments.</i>	

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
Pengungkapan transaksi pihak berelasi <i>Disclosure of related party transactions</i>	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: <i>The things that were disclosed included:</i>	
	Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; <i>Name of the related party, as well as the nature and relationship with the related party</i>	
	Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan <i>Transaction value and its percentage to the total related revenues and expenses; and</i>	
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan <i>Disclosures related to taxation</i>	Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. <i>Total balance and its percentage to the total related assets or liabilities.</i>	
	Hal-hal yang harus diungkapkan: <i>The things that were disclosed included:</i>	
	Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; <i>Fiscal reconciliation and calculation of current tax burden;</i>	
	Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; <i>Explanation of the relationship between tax expense (income) and accounting profit;</i>	
	Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; <i>A statement that the reconciled Taxable Profit (LKP) was used as the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return;</i>	
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap <i>Disclosures relating to fixed assets</i>	Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan <i>Details of deferred tax assets and liabilities recognized in the statement of financial position for each presentation period, and the amount of deferred tax expense (income) recognized in profit or loss if the amount was not reflected in the amount of deferred tax assets or liabilities recognized in the statement of position, finance; and</i>	
	Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. <i>Disclosure of whether or not there is a tax dispute.</i>	
	Hal-hal yang harus diungkapkan: <i>The things that were disclosed included:</i>	
	Metode penyusutan yang digunakan; <i>The depreciation method used;</i>	
	Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi an model biaya; <i>A description of the accounting policy chosen between the revaluation model and the cost model;</i>	
	Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan <i>The significant methods and assumptions used in estimating the fair value of property, plant and equipment (for the revaluation model) or the disclosure of the fair value of property, plant and equipment (for the cost model); and</i>	
	Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. <i>Reconciliation of gross carrying amount and accumulated depreciation of property, plant and equipment at the beginning and end of the period by showing: addition, subtraction and reclassification.</i>	

KRITERIA Criteria	PENJELASAN Description	Halaman Page
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Disclosures relating to operating segments	Hal-hal yang harus diungkapkan: <i>The things that were disclosed included:</i>	
	Informasi umum meliputi faktor-faktor penetapan segmen usaha <i>General information covering the factors used to identify the reported segments;</i>	
	Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; <i>Information on the reported segment's profit or loss, assets and liabilities;</i>	
	Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan <i>Reconciliation of total segment revenue, reported segment profit or loss, segment assets, segment liabilities, and other material segment elements to the related amounts within the entity; and</i>	
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan Disclosures relating to Financial Instruments	Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. <i>Disclosure at the entity level, which included information about products and/or services, geographic areas and key customers.</i>	
	Hal-hal yang harus diungkapkan: <i>The things that were disclosed included:</i>	
	Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; <i>Details of financial instruments owned based on their classification;</i>	
	Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; <i>Fair values and their hierarchy for each group of financial instruments;</i>	
	Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; <i>Explanation of risks associated with financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk;</i>	
	Kebijakan manajemen risiko; dan <i>Risk management policy; and</i>	
Penerbitan laporan keuangan Issuance of financial statements	Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. <i>Analysis of the risks associated with financial instruments quantitatively</i>	
	Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan <i>The date on which the financial statements were authorized for issue; and</i>	
	Pihak yang memerintahkan penerbitan dan penanda tangan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian	

Halaman ini sengaja di kosongkan.
This page is intentionally left blank.

LAPORAN KEUANGAN

**TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

(MATA UANG INDONESIA)

FINANCIAL STATEMENTS

*AS AT DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT*

(INDONESIAN CURRENCY)

**BURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Andy Kasih
Alamat kantor : Gedung Artha Graha Lantai 5
Kawasan Niaga Terpadu Sudirman
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12180
Alamat domisil : Jalan Melawai X/58
RT 003, RW 004, Melawai,
Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
Nomor telepon
Jabatan : 021 - 5152168
Direktur Utama
2. Nama : Indra S Budianto
Alamat kantor : Gedung Artha Graha Lantai 5
Kawasan Niaga Terpadu Sudirman
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12180
Alamat domisil : Jalan KH. Muhsyir Vitor35
RT 014, RW 005, Glendak Barat,
Kecamatan Glendak,
Jakarta Selatan
Nomor telepon
Jabatan : 021 - 5152168
Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan Bank telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak mengungkapkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT LETTER REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk

We, the undersigned:

1. Name : Andy Kasih
Office address : Gedung Artha Graha 5th Floor
Sudirman Central Business District
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12180
Residential address : Jalan Melawai X/58
RT 003, RW 004, Melawai,
Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
Telephone
Title : 021 - 5152168
President Director
2. Name : Indra S Budianto
Office address : Gedung Artha Graha 5th Floor
Sudirman Central Business District
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12180
Residential address : Jalan KH. Muhsyir Vitor35
RT 014, RW 005, Glendak Barat,
Kecamatan Glendak,
Jakarta Selatan
Telephone
Title : 021 - 5152168
Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk ("Bank");
2. The financial statements of the Bank have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the financial statements of the Bank has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. The financial statements of the Bank do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information of material facts;
4. We are responsible for the Bank's internal control system.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 28 Maret 2025 / March 28th, 2025

For and on behalf of the Board of Directors


Andy Kasih
Direktur Utama
President Director


Indra S Budianto
Direktur
Director

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk

DAFTAR ISI / *TABLE OF CONTENTS*

	<u>Hal / Pages</u>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN / <i>INDEPENDENT AUDITORS' REPORT</i>	i – v
LAPORAN POSISI KEUANGAN / <i>STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION</i>	1 – 2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN/ <i>STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME</i>	3 – 4
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS / <i>STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY</i>	5
LAPORAN ARUS KAS / <i>STATEMENTS OF CASH FLOW</i>	6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN / <i>NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS</i>	7 – 165

Laporan Audit Independen

Independent Auditor's Report

Ref: 00004/1.0009/BAU.L/01/1146/1/1/2020

Kepada Yth,
 Para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
 PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk

To
 The Shareholders, Commissioners and Directors of
 PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk

Opini

Opinion

Kami telah meninjau laporan keuangan PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk ("Bank") termasuk yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year ended, and items in the financial statements, including material accounting policy information.

Menurut opini kami laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk as at December 31, 2020, and their financial performance and cash flows for the year ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini

Basis for Opinion

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut disajikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan tersebut pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan layak untuk mendukung opini kami bagi opini audit kami.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the accompanying Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with those requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Key Audit Matter

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan tidak merupakan opini kami atas laporan keuangan tersebut, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami dibahas di bawah ini.

The key audit matter identified in our audit is outlined below.

Perhitungan cadangan penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 11 tentang pinjaman yang diberikan atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2024, Bank telah melepas pinjaman yang diberikan sebesar Rp30.895.479 juta dan telah menghitung cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan sebesar Rp9.11.807 juta.

Perhitungan cadangan penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan dihitung oleh manajemen menggunakan metode *Expected Credit Loss* berdasarkan sesuai dengan PSAK 109, "Instrumen Keuangan".

Pendekatan yang digunakan dalam menghitung cadangan penurunan nilai

- **Pendekatan Secara Individual**

Bank menghitung kerugian kredit ekspektasi secara individual, dengan membandingkan antara nilai tercatat pinjaman yang diberikan dengan nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan diterima oleh Bank baik yang timbul dari pembayaran pokok dan/atau bunga, maupun nilai kini dari penjualan jaminan, untuk pinjaman yang diberikan yang memiliki nilai cukup signifikan dan terdapat bukti objektif penurunan nilai.

- **Pendekatan Secara Kolektif**

Bank menghitung kerugian kredit ekspektasi secara kolektif menggunakan teknik statistik *loss* yang menggunakan beberapa parameter utama, antara lain, *probability of default, loss given default and exposure at default*, untuk pinjaman yang diberikan yang tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan pinjaman yang diberikan yang terdapat bukti objektif penurunan nilai namun tidak memiliki signifikan.

Perhitungan cadangan penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan merupakan hal sulit karena karena besarnya nilai tercatat atas pinjaman yang diberikan dan penilaiannya memerlukan pertimbangan signifikan manajemen serta pertimbangan menggunakan estimasi dan asumsi yang memiliki ketidakpastian yang tinggi yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan Bank.

Tanggapan audit atas hal sulit diatas

Kami melakukan prosedur audit atas hal ini termasuk:

- Penilaian dan penguji pengendalian yang relevan atas identifikasi atas pinjaman yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau menunjukkan bukti objektif penurunan nilai.
- Melakukan uji peng- atas pinjaman yang diberikan dan mengevaluasi apakah terdapat peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai dan membandingkan hasilnya dengan penilaian manajemen.

Calculation of allowance for impairment on loans

As disclosed in Note 11 regarding loans to the accompanying financial statements, as of December 31, 2024, the Bank has recognized the loans amounting to Rp30,895,479 million and has calculated the allowance for impairment losses on loans amounting to Rp9,11,807 million

Calculation of allowance for impairment of loans is calculated by management using the Expected Credit Loss method in accordance with PSAK 109, "Financial Instruments".

Approach used in calculating allowance for impairment:

- **Individual Approach**

The Bank calculates the expected credit loss individually by comparing the carrying amount of the loans with the present value of the future cash flows expected to be received by the Bank, both originating from principal and/or interest payments, as well as cash flows from the sale of guarantees, for loans, which has a significant value and there is objective evidence of impairment.

- **Collective Approach**

The Bank calculates the expected credit losses collectively using statistical-based techniques that use several main assumptions, among others, probability of default, loss given default and exposure at default, for loans for which there is no objective evidence of impairment and loans that exist, objective evidence of impairment but not significant.

Calculation of allowance for impairment of loans is a major audit matter because the carrying amount of loans and their assessment requires significant management judgment and the calculation uses estimates and assumptions that have high uncertainty which could have a material impact on the Bank's financial statements.

Audit response to key audit matters

We have performed the following procedures in address the key audit matter:

- *Understand and test relevant controls over the identification of loans that have significantly increased credit risk or show objective evidence of impairment.*
- *Conduct a sampling test on loans and evaluate whether there is a significant increase in credit risk or there is objective evidence of impairment and compare the results with management's assessment.*

- Menilai kecukupan penyajian penurunan nilai atas pinjaman yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai dengan memeriksa baik jumlah dan waktu yang telah jatuh tempo yang dicatatkan oleh Bank dalam perhitungan kerugian penurunan nilai.
- Menilai metodologi dan asumsi yang digunakan dalam menghitung kerugian kredit berdasarkan secara statistik termasuk penentuan *probability of default*, *loss given default* dan *exposure at default* dan melakukan perhitungan ulang.

Hal lain

Laporan keuangan PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk tanggal 31 Desember 2023 dibuat oleh auditor independen lain dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporan No. 00041/3-GAGH/KAL/1/27/0144-3/1/2024 tanggal 28 Maret 2024.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan dihangatkan akan tersedia bagi kami setelah receipt laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain. Dan akan karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Selubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk mencari informasi lain yang teridentifikasi di atas. Jika tersedia dan dalam lingkupnya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidaksesuaian material dengan laporan keuangan atau perusahaan yang kami periksa selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Karena kami membuat laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharapkan untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengikuti tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan termasuk sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan tersebut, manajemen bertanggung jawab untuk menilai keberlanjutan. Berarti memastikan keberlanjutan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan keberlanjutan serta dan mengungkapkan hasil analisis

- Assess the adequacy of the allowance for impairment on loans that have a significant increase in credit risk or there is objective evidence of impairment by assessing both the amount and timing of future cash flows paid by the Bank in calculating impairment losses.
- Assessing the methodology and assumptions used in calculating expected credit losses collectively, including determining the probability of default, loss given default and exposure at default and performing recalculation.

Other matter

The financial statements of PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk as of December 31, 2023 audited by other independent auditor with unmodified opinion No. 00041/3-GAGH/KAL/1/27/0144-3/1/2024 dated March 28, 2024.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate action in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the accompanying financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the accompanying financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the

kepercayaan suatu, berarti manajemen memiliki intent untuk kebalikan Bank atau menghafalkan opini, atau tidak memiliki statement yang akurat dalam melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas data tidak bertanggung jawab untuk menjamin proses pelaksanaan keuangan Bank.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan terlampir bebas dari kesalahan pengajian material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, dan untuk memfiksasi laporan auditor yang memuat opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan pengajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan pengajian dapat disebabkan oleh kesalahan laporan kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat mempengaruhi secara wajar dan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan terlampir tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menggunakan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Yang juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan pengajian material atas laporan keuangan terlampir, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, berdasarkan dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut. Serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan hasil dari opini kami. Risiko tipe kecurangan kesalahan pengajian material yang disebabkan oleh kecurangan audit tinggi; hal yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, penundaan, penghilangan secara sengaja, penyajian salah, atau pengakuan pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengetahuan internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi integritas kelengkapan akuntansi yang digunakan serta kelengkapan internal akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Mengevaluasi ketepatan penggunaan basis akuntansi kelengkapan suatu oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diambil, apakah terdapat suatu keterlaksanaan material yang terkait dengan penilaian nilai riilnya yang dapat menyebabkan kerugian signifikan atau merugikan Bank untuk mempertahankan kelengkapan maknanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu keterlaksanaan material, kami dihindari untuk menarik perhatian klien laporan

Bank is to cause skepticism, or has an audited alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the accompanying financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these accompanying financial statements.

As part of an audit based on the Auditing Standards, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risk of material misstatement of the accompanying financial statements, whether caused by fraud or error, design and implement audit procedures that are responsive to those risks, and obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an opinion. The risk of not detecting a material misstatement due to fraud is higher than that caused by error, because fraud may involve collusion, forgery, concealment, misrepresentation, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of the accounting policies used and the accompanying estimation obligations and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the accompanying financial statements or, if such disclosures are*

audit kami ke pengungkapan terkait dengan laporan keuangan terlampir atas jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan audit kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan terlampir secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan terlampir mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan cara lain yang memadai presentasi saja.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan hasil yang diinformasikan atas audit, serta tindakan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengonfirmasi bahwa hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, langkah-langkah terkait.

Dari hal-hal yang diomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan bahwa semua yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan terlampir periode ini dan oleh karena itu menjadi hal audit utama. Kami mengizinkan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam situasi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh diomunikasikan dalam laporan kami karena kondisinya mungkin dari mengomunikasikan hal tersebut akan mengakibatkan secara wajar melalui manfaat kepentingan publik atau sebaliknya merugikan.

Inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue in a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the accompanying financial statements, including the disclosures, and whether the accompanying financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

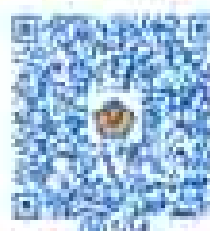
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that are of most significance in the audit of the accompanying financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO



Ahmad Nuzli Thuyyibin, S.E., Ak., S.H., P.Ak., CA, CPA, ASEAN CPA
Nomor LRA Murnas Publik No. AP. 1196
License AP Publik Accountant No. AP. 1196

Jakarta, 26 Maret 2025 / March 26, 2025
Ref: 00104/7.0409/M2.1.07/2024-1/1000/2025



PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ASET				ASSETS
Kas	4, 45	769.354	369.134	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5, 45	3.024.920	2.658.276	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain – bersih	6, 45	349.430	338.297	Current accounts with other banks – net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7, 45	2.177.464	711.075	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	8, 45	8.501.562	5.787.414	Marketable securities
Wesel ekspor	45	166.681	131.863	Export bills
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	9, 45	976.063	125.469	Securities purchased under agreement to resell
Tagihan derivatif	10, 45	48	35	Derivative receivables
Kredit yang diberikan – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp531.907 dan Rp510.636	13, 45	10.073.572	11.636.733	Loans – net allowance for impairment losses as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp531,907 and Rp510,636, respectively
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	11, 45	253.265	326.422	Accrued interest receivables
Biaya dibayar dimuka	12	122.810	144.641	Prepaid expenses
Tagihan akseptasi	14, 45	166.025	131.362	Acceptance receivables
Penyertaan saham	15, 45	6	6	Investment in shares of stock
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp254.892 dan Rp229.180	16	2.123.376	2.127.797	Fixed assets - net of accumulated depreciation as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp254,892 and Rp 229,180, respectively
Aset takberwujud – bersih	17	25.487	31.873	Intangible assets – net
Agunan yang diambil alih – bersih	18	808.883	936.110	Foreclosed asset – net
Aset pajak tangguhan	23b	229.681	270.760	Deferred tax assets
Aset lain-lain	18, 45	357.766	376.344	Other assets
JUMLAH ASET		30.126.393	26.103.611	TOTAL ASSETS

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements form an integral part of the Financial Statements taken as a whole

	Catatan/ Notes	2024	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	19, 45	115.621	95.711	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	20, 36, 45	23.890.773	20.631.701	Deposit from customers
Simpanan dari bank lain	21, 45	452.454	336.958	Deposits from other banks
Liabilitas efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	22	499.281	-	Securities sold under agreement to repurchase liabilities
Liabilitas derivatif	10, 45	-	1.057	Derivative liabilities
Liabilitas akseptasi	14, 45	166.682	131.863	Acceptance liabilities
Utang pajak	23a	15.189	11.713	Taxes payable
Bunga masih harus dibayar	24, 45	35.100	26.693	Accrued interest payable
Liabilitas imbalan pasca kerja	26b	99.151	118.875	Post employments benefit liabilities
Pinjaman subordinasi	27, 45	200.000	200.000	Subordinated loan
Liabilitas lain-lain	25, 45	312.446	378.007	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS		25.786.697	21.932.578	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp110,88 (nilai penuh) per saham				Share capital - Rp110.88 (full amount) par value per share
- Modal dasar – 52.310.000.000 saham				- Authorized 52,310,000,000 shares
- Modal ditempatkan dan disetor penuh – 20.223.412.907 saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023	28	2.242.372	2.242.372	- Issued and fully paid 20,223,412,907 shares as December 31, 2024 and 2023
Tambahan modal disetor	29	415.285	415.285	Additional paid-in capital
Revaluasi aset tetap	16	1.379.822	1.379.822	Revaluation surplus of fixed assets
Pengukuran kembali program imbalan pasti setelah dikurangi pajak		78.699	61.575	Remeasurement of defined benefits program after tax
Keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dikurangi pajak	8f	1.407	2.342	Gain on changes in value of financial assets at fair value through other comprehensive income after tax
Saldo laba		222.111	69.637	Retained earnings
JUMLAH EKUITAS		4.339.696	4.171.033	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		30.126.393	26.103.611	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL				OPERATING INCOME (EXPENSES)
Pendapatan bunga	30, 38	1.646.064	1.484.753	Interest income
Beban bunga	31, 38	(735.995)	(502.774)	Interest expense
Pendapatan bunga – bersih		910.069	981.979	Interest income – net
Pendapatan operasional lainnya				Other operating income
Pendapatan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan		258.500	244.222	Administration income and penalties on deposits and loans
Keuntungan dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi – bersih	8	53.289	28.839	Gain from changes in fair value of financial assets at fair value through profit and loss – net
Provisi dan komisi lainnya		35.168	32.589	Other fees and commissions
Keuntungan dari transaksi mata uang asing – bersih		10.628	6.968	Gain from foreign exchange transactions – net
Jumlah pendapatan operasional lainnya		357.585	312.618	Total other operating income
Beban operasional lainnya				Other operating expenses
Beban tenaga kerja	32, 38	(287.069)	(279.962)	Employee expenses
Beban operasi	33, 38	(547.742)	(589.632)	Operational expenses
Beban umum dan administrasi	34	(160.550)	(134.270)	General and administrative expenses
Kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non keuangan – bersih	35	(75.026)	(103.657)	Impairment loss on financial and non-financial assets – net
Jumlah beban operasional lainnya		(1.070.387)	(1.107.521)	Total other operating expenses
LABA OPERASIONAL		197.267	187.076	PROFIT FROM OPERATIONS
BEBAN NON OPERASIONAL	36	(7.512)	(3.719)	NON-OPERATING EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		189.755	183.357	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX EXPENSES
Pajak tangguhan	23b	(37.281)	(36.604)	Deferred tax
LABA TAHUN BERJALAN		152.474	146.753	PROFIT FOR THE CURRENT YEAR

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements form an integral part of the Financial Statements taken as a whole

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Surplus revaluasi aset tetap	16	-	30.541	Revaluation surplus of fixed assets
Pengukuran kembali program imbalan pasti	26	21.141	1.495	Remeasurement of defined benefits program
Pajak penghasilan terkait	23b	(4.017)	(284)	Related income tax
Sub jumlah		17.124	31.752	Sub total
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :				Items that will be reclassified to profit or loss:
Perubahan nilai wajar efek-efek melalui komprehensif lain	8f	(1.154)	(14.620)	Changes in fair value of securities through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait	23b	219	2.778	Related income tax
Sub jumlah		(935)	(11.842)	Sub total
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		16.189	19.910	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		168.663	166.663	TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	37	7,54	7,26	BASIC EARNINGS PER SHARE (full Rupiah amount)

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements form an integral part of the Financial Statements taken as a whole

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

				Kerugian dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Pengukuran kembali program imbalan pasti setelah dikurangi pajak/ <i>Remeasurement of defined benefits program after tax</i>	Saldo laba (rug)/ Retained earnings (losses)	Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>	
	Modal saham -ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Share capital Authorized issued and fully paid</i>	Tambahan modal disetor/ <i>Additional paid in capital</i>	Surplus revaluasi aset/ <i>Revaluation surplus of fixed assets</i>	<i>changes in value of financial assets fair value through at other comprehensive income after tax</i>				
Catatan/ Notes								
Saldo per 01 Januari 2023	2.242.372	415.285	1.349.281	14.184	60.364	(77.116)	4.004.370	Balance as of January 01, 2023
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	146.753	146.753	Profit for the current year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	30.541	(11.842)	1.211	-	19.910	Other comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2023	2.242.372	415.285	1.379.822	2.342	61.575	69.637	4.171.033	Balance as of December 31, 2023
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	152.474	152.474	Profit for the current year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	(935)	17.124	-	16.189	Other comprehensive income
Saldo per 31 Desember 2024	2.242.372	415.285	1.379.822	1.407	78.699	222.111	4.339.696	Balance as of December 31, 2024

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOW
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga		1.754.389	1.556.866	Receipts of interest
Pembayaran bunga		(727.588)	(494.520)	Payment of interest
Pembayaran beban tenaga kerja		(285.651)	(283.598)	Payment of personal expenses
Penerimaan (pembayaran) beban umum dan administrasi		(160.437)	39.726	Receipts (payment) of general and administrative expenses
Pembayaran beban operasional		(238.254)	(285.098)	Payment of operating expenses
Pembayaran beban non-operasional lainnya – bersih		(7.505)	(941)	Payment of non-operating expenses – net
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		334.954	532.435	Cash flow before changes in operating assets and liabilities
Penurunan (penambahan) aset operasi:				Decrease (increase) in operating assets:
Kredit yang diberikan		1.547.833	(1.925.154)	Loans
Aset lain-lain		151.325	247.638	Other assets
Wesel ekspor		(34.818)	54.028	Export Bills
Penambahan (penurunan) liabilitas operasi:				Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	19	19.910	8.617	Liabilities due immediately
Simpanan nasabah	20	3.259.072	306.623	Deposit from customer
Simpanan dari bank lain	21	115.496	318.317	Deposit from other banks
Liabilitas efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	22	499.281	-	Liabilities of securities sold under repurchased agreement
Beban akrual dan liabilitas lain-lain		(62.030)	(6.606)	Accrued expenses and other liabilities
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		5.831.023	(464.102)	Net cash provided from (used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tetap	16	5.929	2.960	Proceeds from sale of fixed assets
Perolehan aset takberwujud	17	(13.889)	(13.936)	Acquisition of intangible assets
Pembelian efek-efek - bersih		(2.729.681)	(1.948.751)	Purchase of marketable securities – net
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	9	(850.594)	1.553.326	Securities purchased under agreement to resell
Perolehan aset tetap	16	(25.707)	(32.029)	Acquisition of fixed assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(3.613.942)	(438.430)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
		-	-	
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		2.217.081	(902.532)	INCREASE (DECREASE) CASH AND CASH EQUIVALENTS
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing		27.391	(2.778)	Effect of foreign currency exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		4.076.785	4.982.095	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		6.321.257	4.076.785	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents at the end of year consist of:
Kas	4	769.354	369.134	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5	3.024.920	2.658.276	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	6	349.519	338.300	Current account with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal akuisisi	7	2.177.464	711.075	Placements with Bank Indonesia and other banks that will mature within 3 months from the date acquisition
Jumlah		6.321.257	4.076.785	Total

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

The accompanying Notes to Financial Statements form an integral part of the Financial Statements taken as a whole

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk ("Bank") semula didirikan dengan nama PT Inter-Pacific Financial Corporation berdasarkan Akta No. 12 tanggal 7 September 1973 dan Akta Perubahan No. 26 tanggal 13 Desember 1974 yang dibuat di hadapan Bagijo, S.H, pengganti dari Eliza Pondaag, S.H, Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Bank tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/2/12 tanggal 3 Januari 1975 dan telah didaftarkan dalam Buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No.119 dan No.120, keduanya tanggal 11 Januari 1975, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.6 Tambahan No.47 tanggal 21 Januari 1975.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.16 tertanggal 13 November 2020, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0076681.AH.01.02 tanggal 17 November 2020 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana termuat dalam Surat tertanggal 17 November 2020 No.AHU-AH.01.03-0408169, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0191841.AH.01.1 1 tanggal 17 November 2020.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Bank memulai operasi komersial sebagai lembaga keuangan bukan bank pada bulan Januari 1975, selanjutnya melakukan operasi komersial sebagai bank umum pada tanggal 24 Februari 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.176/KMK.017/1993, perizinan tersebut diubah dengan terlaksananya penggabungan usaha (*merger*) PT Bank Artha Graha ke dalam PT Bank Inter-Pacific Tbk yang mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) berdasarkan Surat Ketua Bapepam dan LK No.S-769/PM/2005 tanggal 13 April 2005, serta memperoleh persetujuan Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.7/32/KEP.GBI/2005 tanggal 15 Juni 2005 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (*merger*) PT Bank Artha Graha ke dalam PT Bank Inter-Pacific Tbk. Izin usaha PT Bank Inter-Pacific Tbk diubah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.7/49/KEP.GBI/2005 tanggal 16 Agustus 2005 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Inter-Pacific Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk ("the Bank") initially was established under the name of PT Inter-Pacific Financial Corporation based on Deed No. 12 dated September 7, 1973 and Amendment Deed No. 26 dated December 13, 1974 which made in front of Bagijo, S.H, substitute notary of Eliza Pondaag, S.H, Notary in Jakarta. The Bank's Articles of Association was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No.Y.A.5/2/12 dated January 3, 1975 and has been registered in the Register Book of Jakarta District Court Office under No.119 and No.120, both dated January 11, 1975, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.6 Supplement No.47 dated January 21, 1975.

The Bank's Articles of Association have undergone several changes, most recently with the Deed No.16 dated November 13, 2020, made before Mochamad Nova Faisal S.H, M.Kn, Notary in Jakarta, which deed has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No.AHU-0076681.AH.01.02 dated November 17, 2020 and the notice of amendment to the articles of association has been received and recorded in the database of the Administrative System of legal entities of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as contained in the Letter dated November 17, 2020 No.AHU-AH.01.03-0408169, has been registered in the Company's Register No.AHU-0191841.AH.01.1 1 dated November 17, 2020.

According to Article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's scope of activities is to engage in general banking services in accordance with prevailing Laws and regulations.

The Bank started its commercial activities as a non-bank financial institution in January 1975, and then engaged in general banking services dated February 24, 1993 based on Decision Letter of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No.176/KMK.017/1993, the license changed due to merger of PT Bank Artha Graha into PT Bank Inter-Pacific Tbk which obtained an effective statement from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam and LK) in Letter of Bapepam and LK Chairman No.S-769/PM/2005 dated April 13, 2005, and obtained approval from Bank Indonesia in Decision Letter of Bank Indonesia Governor No.7/32/KEP.GBI/2005 dated June 15, 2005 about Granting Merger Approval of PT Bank Artha Graha into PT Bank Inter-Pacific Tbk. The license of PT Bank Inter-Pacific Tbk was changed based on Decision Letter of Bank Indonesia Governor No.7/49/KEP.GBI/2005 dated August 16, 2005 regarding The Change of Business License on behalf of PT Bank Inter-Pacific Tbk become PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Kantor Pusat Bank terletak di Gedung Artha Graha, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan. Bank memiliki kantor pusat operasional, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, *payment poin*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai berikut (tidak diaudit):

	2024
Kantor pusat operasional	1
Kantor cabang	31
Kantor cabang pembantu	33
Mobile terminal	1
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	157

Kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, *payment point* dan ATM berlokasi di berbagai pusat bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain, di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Babel, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kupang, Maluku Utara Ternate, Maluku-Ambon.

b. Penawaran Umum Saham Bank

Pada tanggal 10 Juli 1990, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) berdasarkan Surat No. SI-124/SHM/MK.10/1990 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat sejumlah 5.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (Rupiah penuh) per saham yang merupakan 20% dari modal yang ditempatkan. Pada tanggal 23 Agustus 1990, saham tersebut masing-masing dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 19 April 1999, Bursa Efek Surabaya menyetujui permohonan Bank untuk membatalkan pencatatan saham Bank di Bursa Efek Surabaya.

Pada tanggal 24 September 1999, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam berdasarkan Surat No. S-1761/PM/1999 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah 9.625.000.000 saham seri B dengan nilai nominal Rp15 (Rupiah penuh) per saham dan harga penawaran Rp100 (Rupiah penuh) per saham. Pada tanggal 27 September 1999, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The Bank's Head Office is located at Artha Graha Building, Sudirman Commercial Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta. The Bank has operational head office, branches, sub branches, cash offices, payment points, Automatic Teller Machines (ATM) as follows (unaudited):

	2023	
	1	Operational head office
	31	Branches
	34	Sub branches
	1	Mobile terminal
	153	Automatic Teller Machines (ATM)

The branches, sub branches, cash offices, payment points and ATM are located in various major business centers throughout Indonesia, among others, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Babel, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kupang, Maluku Utara Ternate, Maluku-Ambon.

b. Public Offering of the Bank's Shares

On July 10, 1990, the Bank obtained an effective statement from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) in its Letter No. SI-124/SHM/MK.10/1990 to conduct Initial Public Offering of 5,000,000 shares with par value of Rp1,000 (full Rupiah amount) per share that was 20% of paid-up capital. On August 23, 1990, the shares were listed on the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange, respectively. On April 19, 1999, the Surabaya Stock Exchange approved the Bank's application to delist its shares in the Surabaya Stock Exchange.

On September 24, 1999, the Bank obtained an effective statement from the Chairman of Bapepam in its Letter No. S-1761/PM/1999 to conduct Limited Public Offering (LPO) I to its shareholders with Pre-emptive Rights of 9,625,000,000 Seriess B shares with par value of Rp15 (full Rupiah amount) per share and offering price of Rp100 (full Rupiah amount) per share. On September 27, 1999, these shares were listed in the Jakarta Stock Exchange.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Bank (lanjutan)

Pada tanggal 17 April 2007, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) berdasarkan Surat No. S-1746/BL/2007 untuk melakukan PUT II kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan HMETD sejumlah 840.007.286 saham dengan nilai nominal Rp110,88 (Rupiah penuh) per saham dan harga penawaran Rp115 (Rupiah penuh) per saham. Pada tanggal 2 Mei 2007, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 1 Desember 2008, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dan LK berdasarkan Surat No. S-8684/BL/2008 untuk melakukan PUT III kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan HMETD sejumlah 2.695.025.224 saham dengan nilai nominal Rp110,88 (Rupiah penuh) per saham dan harga penawaran Rp111,00 (Rupiah penuh) per saham. Pada tanggal 7 Januari 2009, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 5 Desember 2012, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dan LK berdasarkan Surat No. S-13878/BL/2012 untuk melakukan PUT IV kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan HMETD sejumlah 4.513.198.014 saham dengan nilai nominal sebesar Rp110,88 (Rupiah penuh) per saham dan harga penawaran sebesar Rp111,00 (Rupiah penuh) per saham. Pada tanggal 21 Desember 2012, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 23 November 2016, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No. S-682/D.04/2016 untuk melakukan PUT V kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan HMETD sejumlah 2.707.918.808 saham dengan nilai nominal sebesar Rp110,88 (Rupiah penuh) per saham dan harga pelaksanaan sebesar Rp111,00 (Rupiah penuh) per saham.

Bank secara bersamaan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 4.513.198.013 saham dimana 6 (enam) saham hasil pelaksanaan HMETD melekat 10 (sepuluh) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan membayar harga yang sama dengan harga pelaksanaan HMETD yakni Rp111,00 (seratus sebelas rupiah) per saham dalam periode pelaksanaan yakni 19 Juni 2017 sampai dengan 7 Desember 2021.

Pelaksanaan Waran Seri I sampai dengan 7 Desember 2021 sebanyak 4.427.219.858 saham, sehingga Waran Seri I yang tidak dilaksanakan sebanyak 85.978.155 saham.

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Bank's Shares (continued)

On April 17, 2007, the Bank obtained an effective statement from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam and LK) in its Letter No. S-1746/BL/2007 to conduct LPO II to its shareholders with Pre-emptive Rights of 840,007,286 shares with par value of Rp110.88 (full Rupiah amount) per share and offering price of Rp115 (full Rupiah amount) per share. On May 2, 2007, these shares were listed in the Indonesia Stock Exchange.

On December 1, 2008, the Bank obtained an effective statement from the Chairman of Bapepam and LK in its Letter No. S-8684/BL/2008 to conduct LPO III to its shareholders with Pre-emptive Rights of 2,695,025,224 shares with par value of Rp110.88 (full Rupiah amount) per share and offering price of Rp111.00 (full Rupiah amount) per share. On January 7, 2009, these shares were listed in the Indonesia Stock Exchange.

On December 5, 2012, the Bank obtained an effective statement from the Chairman of Bapepam and LK in its Letter No. S-13878/BL/2012 to conduct LPO IV to its shareholders with Pre-emptive Rights of 4,513,198,014 shares with par value of Rp110.88 (full Rupiah amount) per share and offering price of Rp111.00 (full Rupiah amount) per share. On December 21, 2012, these shares were listed in the Indonesia Stock Exchange.

On November 23, 2016, the Bank obtained an effective statement from the Chief Executive of the Capital Market Supervisory Financial Services Authority based on the Letter of No. S-682/D.04/2016 to conduct a PUT V to shareholders for the issuance of Pre-emptive Rights of 2,707,918,808 shares with a par value of Rp110.88 (full Rupiah) per share and an exercise price of Rp111.00 (full Rupiah) per share.

The Bank simultaneously issued Series I Warrants totaling 4,513,198,013 shares of which 6 (six) shares resulting from the exercise of the Preemptive Rights were attached to 10 (ten) Series I Warrants which were given free of charge as an incentive for the Rights holders who exercised their rights. Each 1 (one) Series I Warrant may be used by the holder to purchase 1 (one) new share of the Company by paying the same price as the exercise price of the Preemptive Rights, which is Rp.111.00 (one hundred and eleven rupiah) per share in the exercise period, which is June 19, 2017 to December 7, 2021.

The exercise of Series I Warrants until December 7, 2021 is 4,427,219,858 shares, so that the Series I Warrants that are not exercised are 85,978,155 shares.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Bank (lanjutan)

Berikut adalah kronologis jumlah saham Bank yang ditempatkan dan disetor penuh serta saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sejak Penawaran Umum Saham Perdana sampai dengan tanggal 31 Desember 2024:

Keterangan	Jumlah Saham/ Number of shares	Description
Saham yang berasal dari pencatatan saham perdana pada tahun 1990	5.000.000	Shares from initial public offering in 1990
Saham pendiri pada tahun 1990	1.500.000	Founders shares in 1990
Saham pendiri pada tahun 1993	3.042.800	Founders shares in 1993
Saham bonus pada tahun 1993	9.542.800	Bonus shares in 1993
Saham pendiri pada tahun 1997	15.914.400	Founders shares in 1997
Saham bonus pada tahun 1998	8.750.000	Bonus shares in 1998
Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) pada tahun 1999	6.737.500.000	Limited Public Offering I (LPO I) in 1999
Bagian yang tidak dapat dicatat (<i>partial delisting</i>) atas PUT I pada tahun 2000	(96.875.000)	Partial delisting from LPO I in 2000
Saham pendiri pada tahun 2001	2.906.250.000	Founders shares in 2001
Saham yang diterbitkan dalam rangka penggabungan usaha dengan PT Bank Artha Graha pada tahun 2005	20.347.234.677	Issuance of shares in connection with the merger with PT Bank Artha Graha in 2005
Pencatatan saham tambahan pada tahun 2007	2	Listing additional shares in 2007
Peningkatan nilai nominal saham dari Rp18,48 per saham menjadi Rp110,88 per saham melalui pengurangan jumlah saham pada tahun 2007	(24.948.216.399)	Increase in par value from Rp18.48 per share to Rp110.88 per share through reduction of total shares in 2007
Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) pada tahun 2007	840.007.286	Limited Public Offering II (LPO II) in 2007
Bagian saham yang tidak dapat dicatat (<i>partial delisting</i>) atas PUT II	(8.400.073)	Partial delisting from LPO II
Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) pada tahun 2008	2.695.025.224	Limited Public Offering III (LPO III) in 2008
Bagian saham yang tidak dapat dicatat (<i>partial delisting</i>) atas PUT III	(26.950.252)	Partial delisting from LPO III
Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) pada tahun 2012	4.513.198.014	Limited Public Offering IV (LPO IV) in 2012
Bagian saham yang tidak dapat dicatat (<i>partial delisting</i>) atas PUT IV	(45.131.980)	Partial delisting from LPO IV
Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) pada tahun 2016	2.707.918.808	Limited Public Offering V (LPO V) in 2016
Bagian saham yang tidak dapat dicatat (<i>partial delisting</i>) atas PUT V	(27.079.189)	Partial delisting from LPO V
Pelaksanaan Waran Seri I	4.427.219.858	Execution of Series I Warrants
Bagian saham yang tidak dapat dicatat (<i>partial delisting</i>) atas Waran Seri I	(44.272.199)	Shares that cannot be recorded (<i>partial delisting</i>) of Series I Warrants
Jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024	20.021.178.777	Total Bank's listed shares in the Indonesia Stock Exchange as of December 31, 2024

PT Cerana Arthaputra setuju untuk tidak dicatatkan sahamnya di Bursa Efek sejumlah 1% dari jumlah saham yang dilakukan oleh PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, dari jumlah saham setelah dilakukannya pelaksanaan Waran Seri I, yakni sebanyak-banyaknya 202.234.130 saham.

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Bank's Shares (continued)

The chronological overview of the Bank's issued and fully paid shares and also listed shares in the Indonesia Stock Exchange since the Initial Public Offering until December 31, 2024 is as follows:

PT Cerana Arthaputra agreed not to list its shares on the Stock Exchange amounting to 1% of the number of shares made by PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, from the number of shares after the implementation of Series I Warrants, which is as many as 202,234,130 shares.

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan pengurus Bank dan karyawan

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.05 tanggal 17 Juli 2024, mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/
 Komisaris Independen
 Wakil Komisaris Utama
 Wakil Komisaris Utama
 Komisaris Independen
 Komisaris Independen

Kiki Syahnakri

 Tomy Winata
 Sugianto Kusuma
 Elizawatie Simon
 Pesta Uli Sitanggang

Direksi:

Direktur Utama
 Wakil Direktur Utama
 Direktur Kepatuhan /Direktur Independen
 Direktur
 Direktur

Andy Kasih
 Christina Harapan
 Indrastomo Nugroho
 Indra Sintung Budianto
 Handoyo Soedirdja

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.16 tanggal 17 Juli 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/
 Komisaris Independen
 Wakil Komisaris Utama
 Wakil Komisaris Utama
 Komisaris Independen
 Komisaris Independen

Kiki Syahnakri

 Tomy Winata
 Sugianto Kusuma
 Elizawatie Simon
 Pesta Uli Sitanggang

Direksi:

Direktur Utama
 Wakil Direktur Utama
 Direktur Kepatuhan /Direktur Independen
 Direktur
 Direktur

Andy Kasih
 Christina Harapan
 Indrastomo Nugroho
 Indra Sintung Budianto
 Handoyo Soedirdja

1. GENERAL (continued)

c. Composition of the Bank's management and employees

Board of Commissioners and Directors

Based on the Deed of Shareholder Resolution No.05 dated July 17, 2024, the composition of the Bank's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2024 is as follows:

Board of Commissioners:

*President Commissioner/
 Independent Commissioner
 Vice President Commissioner
 Vice President Commissioner
 Independent Commissioner
 Independent Commissioner*

Board of Directors:

*President Director
 Vice President Director
 Compliance Director/ Independent Director
 Director
 Director*

Based on the Deed of Shareholder Resolution No.16 dated July 17, 2023, the composition of the Bank's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2023 is as follows:

Board of Commissioners:

*President Commissioner/
 Independent Commissioner
 Vice President Commissioner
 Vice President Commissioner
 Independent Commissioner
 Independent Commissioner*

Board of Directors:

*President Director
 Vice President Director
 Compliance Director/ Independent Director
 Director
 Director*

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan pengurus Bank dan karyawan (lanjutan)

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite audit

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.002/BAGI-KOM/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023, susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024 dan/ and 2023
Ketua	Pesta Uli Sitanggang
Anggota	Suryani Purwita
Anggota	Anas Latief

Komite pemantau risiko

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.002/BAGI-KOM/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023, susunan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024 dan/ and 2023
Ketua	Elizawatie Simon
Anggota	Suryani Purwita
Anggota	Anas Latief

Komite remunerasi dan nominasi

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.002/BAGI-KOM/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023, susunan Komite remunerasi dan nominasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024 dan/ and 2023
Ketua	Kiki Syahnakri
Anggota	Tomy Winata
Anggota	Marlene Gunawan

Sekretaris Perusahaan dan satuan kerja audit internal

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan No. SK-MT/HC/0133/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 efektif 26 Juni 2024 dan Surat Keputusan No. SK-MT/HC/0304/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023 efektif 10 Juli 2023, Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rumi Kreshna Wibowo dan Elvin Halim.

1. GENERAL (continued)

c. Composition of the Bank's management and employees (continued)

Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee

Audit committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners No.002/BAGI-KOM/XII/2023 dated December 6, 2023, the composition of the Audit Committee as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	2024 dan/ and 2023
Chairman	Pesta Uli Sitanggang
Member	Suryani Purwita
Member	Anas Latief

Risk monitoring committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners No.002/BAGI-KOM/XII/2023 dated December 6, 2023, the composition of the Risk Monitoring Committee as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	2024 dan/ and 2023
Chairman	Elizawatie Simon
Member	Suryani Purwita
Member	Anas Latief

Remuneration and nomination committee

Based on Board of Commissioners Decree No.002/BAGI-KOM/XII/2023 dated December 6, 2023, the composition of the remuneration and nomination Committee on December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024 dan/ and 2023
Chairman	Kiki Syahnakri
Member	Tomy Winata
Member	Marlene Gunawan

Corporate secretary and internal audit working unit

Corporate Secretary

Based on Decree No. SK-MT/HC/0133/VI/2024 dated June 26, 2024 effective June 26, 2024 and Decree No. SK-MT/HC/0304/VII/2023 dated July 7, 2023 effective July 10, 2023, the Corporate Secretaries as of December 31, 2024 and 2023 are Rumi Kreshna Wibowo and Elvin Halim.

1. UMUM (lanjutan)

c. Susunan pengurus Bank dan karyawan (lanjutan)

Sekretaris Perusahaan dan satuan kerja audit internal (lanjutan)

Satuan kerja audit internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-MT/SDM/0704/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Adhyaksa Sitepu.

Manajemen kunci Bank meliputi Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit. Jumlah imbalan kerja jangka pendek (gaji dan remunerasi) yang dibayarkan kepada personil manajemen kunci Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Dewan Komisaris	19.667	18.536
Direksi	17.369	18.590
Jumlah	37.036	37.126

Tidak ada kompensasi dalam bentuk imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham kepada personil manajemen kunci Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank memiliki karyawan masing-masing sejumlah 1.279 dan 1.463 (tidak diaudit).

d. Penyelesaian laporan keuangan

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2025.

1. GENERAL (continued)

c. Composition of the Bank's management and employees (continued)

Corporate secretary and internal audit working unit (continued)

Internal audit working unit

Based on Board of Directors' Decision Letter No. SK-MT/SDM/0704/X/2020 dated October 14, 2020, the Chief of Internal Audit Working Unit (IAWU) as of December 31, 2024 and 2023 is Adhyaksa Sitepu.

The Bank's key management consist of the Board of Commissioners, Board of Directors and Audit Committee. Total short-term employee benefits (salaries and remuneration) paid to the key management personnel of the Bank for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
	19.667	18.536	Board of Commissioners
	17.369	18.590	Board of Directors
Total	37.036	37.126	Total

There are no compensation of post-employment benefits, other long-term employee benefits, termination benefits and share-based payments to the key management personnel of the Bank.

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank had 1,279 and 1,463 respectively (unaudited).

d. Completion of the financial statements

The management of the Bank is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements that were completed and authorized to be issued on March 26, 2025.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan

i. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK") yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI) dan peraturan Bapepam dan LK, yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2018, No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

ii. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun berdasarkan biaya historis kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- Penerapan kebijakan akuntansi,
- Jumlah aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the material accounting policies adopted in preparing the financial statements, which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards. These policies have been consistently applied to all year presented, unless otherwise stated.

a. Statement of compliance and basis of financial statements preparation

i. Statement of compliance

The financial statements were prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("IFAS") which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants ("IASB - IAI"), and Bapepam and LK, which function has been transferred to Financial Services Authority ("OJK") starting January 1, 2018, rule No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosures for Issuers or Public Companies" as included in the Appendix of the Decision Decree of the Chairman of Bapepam and LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012.

ii. Basis of financial statements preparation

The financial statements have been prepared under the historical cost except for certain accounts which have been valued on another measurement basis as explained in the accounting policy for such account. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows was prepared based on the direct method with cash flows classified into cash flows from operating, investing and financing activities. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Certificates Deposits of Bank Indonesia with original maturities of 3 (three) months or less from the acquisition date, which are not pledged as collateral nor restricted in use.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires use of judgments, estimates and assumptions that affect:

- *The application of accounting policies,*
- *The reported amounts of assets and liabilities, and the disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements, the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

ii. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi, asumsi dan pertimbangan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank diungkapkan pada Catatan 3.

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan dan dinyatakan dalam jutaan Rupiah yang terdekat, kecuali dinyatakan lain.

b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

i. Amendemen/ penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024:

Amendemen PSAK No. 116, "Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik" Amendemen ini diadopsi dari amendemen IFRS No. 16, "Lease: lease Liability in a Sale and Leaseback". Amendemen ini mengatur pengukuran selanjutnya untuk aset hak guna dan liabilitas sewa dari transaksi jual dan sewa balik.

Amendemen PSAK No. 201: "Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Konvenan". Amendemen ini diadopsi dari amendemen IAS No. 1, "Presentation of Financial Statements: Non-Current Liabilities with Convanants". Amendemen ini mengatur bahwa hanya konvenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang akan mempengaruhi klasifikasi dan liabilitas jangka pendek atau jangka panjang serta pengungkapannya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Statement of compliance and basis of financial statements preparation (continued)

ii. Basis of financial statements preparation (continued)

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Significant accounting estimates, assumptions and judgment applied in the preparation of the Bank's financial statements are disclosed in Note 3.

Financial statements are presented in Rupiah which is the functional currency of the Bank.

The amounts in the financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

b. Adoption of new and Revised Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS")

i. Amendments/ improvements and interpretations to standards effective in the current year

The followings are financial accounting standard, amendments and interpretation of financial accounting standard which become effective starting January 1, 2024:

Amendment of SFAS No. 116: "Lease regarding Lease Liability in a Sale and Leaseback". This amendment adopted from IFRS No. 16 amendment, "Lease: lease Liability in a Sale and Leaseback". This amendment regulates the next measurement for right-of-use assets and lease liability from sale and leaseback transactions.

Amendment of SFAS No. 201: "Presentation of Financial Statements Regarding Long-term Liabilities with Convenants". This amendment was adopted from IAS No. 1 amendment, "Presentation of Financial Statements: Non-Current Liabilities with Convanants". This amendment regulates that only the convenants must complied with entity on or before reporting date will affect its classification and short term or long-term and its disclosure.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) (lanjutan)

i. Amendemen/ penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan (lanjutan)

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024: (lanjutan)

Amendemen PSAK No. 207, “Laporan Arus Kas” dan Amendemen PSAK No. 107, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok”. Amendemen ini diadopsi dari amendemen IAS No. 7 “Statement of Cash Flows” dan IFRS No. 7, Financial Instruments: Disclosures – Supplier Finance Arrangements”. Amendemen ini menjelaskan pengungkapan terkait pengaturan pembiayaan pemasok.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

ii. Standar dan amandemen standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Berikut ini ringkasan revisi dan amandemen PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - IAI yang relevan untuk Bank, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2024:

PSAK No. 117 “Kontrak Asuransi”

Amendemen PSAK No. 117 “Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 117 dan PSAK No. 109 – Informasi Komparatif; dan;

PSAK No. 221 “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”. Amandemen ini memperjelas pengaturan terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak bertukar serta pengungkapannya.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dan penerapan dini diperbolehkan.

Saat ini, Bank sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari PSAK yang dikeluarkan dan direvisi tersebut terhadap laporan keuangannya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Adoption of new and Revised Statements of Financial Accounting Standards (“SFAS”) and Interpretations of Financial Accounting Standards (“IFAS”) (continued)

i. Amendments/ improvements and interpretations to standards effective in the current year (continued)

The followings are financial accounting standard, amendments and interpretation of financial accounting standard which become effective starting January 1, 2024: (continued)

Amendment of SFAS No. 207: “Statement of Cash Flows” and Amendment of SFAS No. 107, “Statements of Financial Reports: Disclosure regarding Supplier Finance Arrangements”. This amendment adopted from IAS No. 7 Amendment “Statement of Cash Flows” dan IFRS No. 7, Financial Instruments: Disclosures – Supplier Finance Arrangements”. This amendment disclose about supplier finance arrangements.

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Bank’s accounting policies and had no material impact to the financial statements for current or prior financial years.

ii. Standards and amendments to standards issued not yet adopted

The following summarizes the revised and amended SFAS and the IFAS which were issued by the Financial Accounting Standards Board (FASB) are relevant to the Bank, but not yet effective to the Bank on financial statements as of December 31, 2024:

SFAS No. 117 “Insurance Contract”

Amendment of SFAS No. 117: “Insurance Contract on Initial Application of SFAS No. 117 and SFAS No. 109 – Comparative Information”; and;

SFAS No. 221 “The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates”. This amendment clarifies the regulations regarding the condition when a currency is not convertible and its disclosure.

The above standards will be effective on January 1, 2025 and early adoption is permitted.

The Bank is presently evaluating and has not yet determined the effects of these issued and revised SFAS on its financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Kebijakan akuntansi atas transaksi dan saldo dalam mata uang asing didasarkan pada peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 dan Buku Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Umum Konvensional ("BPAK"). Bank mengacu pada Buku Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Umum Konvensional ("BPAK") dimana transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan *Reuters* pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat yang berlaku pada tanggal tersebut.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Aset dan liabilitas non-moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk menjabarkan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Rupiah penuh):

	2024	2023
Poundsterling Inggris	20.218,54	19.626,56
Euro Eropa	16.758,12	17.038,32
Dolar Amerika Serikat	16.095,00	15.397,00
Dolar Australia	10.013,51	10.520,77
Dolar Singapura	11.844,58	11.676,34
Yuan China	2.198,50	2.169,50
Dolar Hong Kong	2.073,11	1.970,73
Yen Jepang	103,03	108,88

d. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Transactions and balances in foreign currency

Accounting policy for transactions and balances in foreign currency is based on Bapepam and LK rule No. VIII.G.7 and Banking Accounting Handbook for Conventional Commercial Banks ("BPAK"). The Bank refers to the Banking Accounting Handbook for Conventional Commercial Banks ("BPAK") where transactions denominated in a foreign currency are converted into Rupiah using the reporting (closing) rate set by Bank Indonesia that is middle rate which is the average of bid rate and ask rate based on *Reuters* at 16.00 Western Indonesian Time prevailing at such time.

Exchange gains and losses arising on transactions in foreign currency and on the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are recognized in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Non-monetary assets and liabilities in foreign currency are translated using the exchange rate at the date of transaction occur.

Below are the major exchange rates used for translation as of December 31, 2024 and 2023 (Rupiah full amount):

	2024	2023	
Poundsterling Inggris	20.218,54	19.626,56	Great Britain Poundsterling
Euro Eropa	16.758,12	17.038,32	European Euro
Dolar Amerika Serikat	16.095,00	15.397,00	United States Dollar
Dolar Australia	10.013,51	10.520,77	Australian Dollar
Dolar Singapura	11.844,58	11.676,34	Singapore Dollar
Yuan China	2.198,50	2.169,50	China Yuan
Dolar Hong Kong	2.073,11	1.970,73	Hong Kong Dollar
Yen Jepang	103,03	108,88	Japanese Yen

d. Financial assets and liabilities

Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity financial assets and available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

Financial liabilities are classified as financial liabilities designated at fair value through profit or loss and financial liabilities measured at amortized cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran

Klasifikasi instrumen keuangan pada pengakuan awal tergantung pada tujuan dan intensi manajemen serta karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Semua instrumen keuangan pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

i. Aset keuangan

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori:

- a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi,
- b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya,
- c) dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Bank menggunakan 2 (dua) dasar untuk mengklasifikasikan aset keuangan yaitu model bisnis Bank dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

- a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi,
Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali tes model bisnis dan tes arus kas kontraktual menunjukkan bahwa aset keuangan masuk ke dalam klasifikasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini ditujukan untuk instrumen keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

- b) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Recognition and Measurement

The classification of financial instruments at initial recognition depends on the purpose and management's intention for which the financial instruments were acquired and their characteristics. All financial instruments are measured initially at their fair values. In the case that financial assets or financial liabilities are not designated at fair value through profit or loss, the fair value should be added with attributable transaction costs directly from acquisition or issuance of financial assets or financial liabilities.

The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification.

i. Financial assets

The Bank classifies its financial assets into categories:

- a) financial assets measured at fair value through profit or loss,
- b) financial assets measured at fair value through other comprehensive income,
- c) and financial assets measured at amortized cost.

The Bank uses 2 (two) bases for classifying financial assets, namely the Bank's business model for managing financial assets and the characteristics of the contractual cash flows of financial assets.

- a) Financial assets measured at fair value through profit or loss,
Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless tests of business model and contractual cash flow tests show that financial assets are classified at amortized cost or fair value through other comprehensive income.

This classification is intended for financial instruments held for trading or at initial recognition determined by the Bank to be measured at fair value through profit or loss.

- b) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Financial assets are managed by a business model whose goals will be met by getting a cash flow of the cash and selling the financial assets and the contractually requirements of financial assets that on a certain date increase cash flow simply from principal payments and interest (*solely payments of principal and interest*) from the principal amount.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

- b) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

Pada saat pengakuan awalnya, instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar, keuntungan atau kerugian atas selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Dividen dari instrumen ekuitas diakui di dalam pos laba rugi.

Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan). Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

- c) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai".

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Recognition and Measurement (continued)

i. Financial assets (continued)

- b) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income (continued)

Upon initial recognition, debt instruments measured at fair value through other comprehensive income are recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at fair value where the gain or loss on changes in fair value, gain or loss on foreign exchange, and impairment losses, recognized as other comprehensive income. Dividends from equity instruments are recognized in the profit or loss account.

Expected credit losses are recognized as an addition to other comprehensive income in the statement of financial position (not reducing the carrying amount of financial assets in the financial statements). Interest income is calculated using the effective interest method.

- c) Financial assets carried at amortized cost

Financial assets measured at amortized cost if the financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows and the contractual terms of the financial assets that at a certain date increase cash flows (*solely payments of principal and interest*) of the principal amount owed.

At initial recognition, financial assets carried at amortized cost are recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate.

Interest income on financial assets measured at amortized cost is recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income and recognized as "Interest income". When an impairment loss occurs, the impairment loss is recognized as a deduction from the carrying amount of the financial asset and recognized in the financial statements as "Allowance for impairment losses".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Bank mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori:

- a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
 Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai pendapatan dari kelompok diperdagangkan - bersih. Beban bunga dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat di akun pendapatan kelompok diperdagangkan - bersih.

Jika Bank pada pengakuan awal telah menetapkan instrumen utang tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar), maka selanjutnya, penetapan ini tidak dapat diubah.

Perubahan nilai wajar terkait dengan liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui didalam pendapatan kelompok diperdagangkan - bersih. Beban Bunga dari liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di akun pendapatan kelompok diperdagangkan - bersih.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari dua sub-kategori, yaitu liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Recognition and Measurement (continued)

ii. Financial liabilities

The Bank classifies financial liabilities into categories:

- a) Financial liabilities designated at fair value through profit or loss
 This category consists of two sub-categories: financial liabilities classified as trading and financial liabilities which on initial recognition have been designated by the Bank to be measured at fair value through profit or loss.

A financial liability is classified as trading if it is acquired primarily for the purpose of selling or repurchasing in the near term or if it is part of a certain jointly managed portfolio of financial instruments and there is evidence of a recent short-term profit taking pattern. Derivatives are classified as liabilities for trading unless they are designated and effective as hedging instruments.

Gains and losses arising from changes in fair value of financial liabilities those classified as trading are recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income as income from trading - net. Interest expense on financial liabilities classified as trading is recorded in account of trading - net income.

If the Bank at initial recognition has designated a certain debt instrument as fair value through profit or loss (fair value option), then this determination cannot be changed.

Changes in fair value relating to financial liabilities designated at fair value through profit or loss are recognized in trading - net income. Interest expense on financial liabilities designated at fair value through profit or loss is recorded in the account of trading - net income.

Financial liabilities designated at fair value through profit or loss consist of two sub-categories, financial liabilities classified as held for trading and financial liabilities designated by the Bank as at fair value through profit or loss upon initial recognition.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

- a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)
 Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*). Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diukur sebesar nilai wajar.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- b) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
 Bank mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:
1. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
 2. Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan;
 3. Kontrak jaminan keuangan;
 4. Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar;
 5. Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif diakui sebagai "Beban bunga".

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Recognition and Measurement (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

- a) *Financial liabilities designated at fair value through profit or loss (continued)*
A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of portfolio of identified financial instrument that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking. Derivatives are also categorized as held for trading unless they are designated and effectively as hedging instruments.

After initial recognition, the financial liabilities designated at fair value through profit or loss, are measure at fair value.

Gains and losses arising from changing in fair value of financial liabilities classified held for trading and designated at fair value through profit or loss are recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

- b) *Financial liabilities measured at amortized cost*
The Bank classifies all financial liabilities after initial recognition at amortized cost, except:
1. *Financial liabilities at fair value through profit or loss;*
 2. *Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied;*
 3. *Financial guarantee contracts;*
 4. *Commitment to provide loans at below market interest rates;*
 5. *Contingent consideration recognized by the acquirer in the business combination.*

At initial recognition, financial liabilities measured at amortized cost are measured at fair value less transaction costs. After initial recognition, the Bank measures all financial liabilities at amortized cost using the effective interest method. The effective interest rate amortization is recognized as "Interest expense".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran tanpa memperhatikan apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengukur nilai wajar atas suatu aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran, Bank memperhitungkan karakteristik suatu aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Bank menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Bank menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulangi perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Bank mengukur aset dan posisi *long* berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi *short* berdasarkan harga permintaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Determination for fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or price to be paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability on measurement date, the Bank takes into account the characteristics the asset or a liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date.

When available, the Bank measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Bank uses valuation techniques that maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Bank determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Bank measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask price.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Bank mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*); dan (a) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas dihentikan atau dibatalkan atau berakhir.

Hapus buku

Dalam hal penghapusbukuan aset keuangan merupakan kelanjutan dari tindakan penyelesaian aset keuangan dengan cara pengambilalihan agunan, maka jumlah yang dihapus buku adalah sebesar selisih kurang antara nilai wajar agunan yang diambil alih setelah memperhitungkan taksiran biaya penjualan dengan nilai tercatat aset keuangan setelah memperhitungkan taksiran biaya penjualan dengan nilai tercatat aset keuangan.

Aset keuangan dapat dihapus buku apabila cadangan kerugian penurunan nilai telah dibentuk 100%.

Penghapusbukuan dilakukan secara keseluruhan terhadap nilai tercatat aset keuangan dengan mendeбет cadangan kerugian penurunan nilai.

Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan di laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus jumlah keduanya dan terdapat intensi untuk diselesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Pendapatan dan beban disajikan secara bersih jika diperbolehkan oleh standar akuntansi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Derecognition

The Bank derecognizes a financial asset if, and only if, the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or the Bank has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a pass through arrangement; and either (a) the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires.

Write-off

In the case of write-off of financial assets is a continuation of the settlement of financial assets by take over the collateral, the amount that written-off is approximately equal to the difference between the fair value of foreclosed assets after considering the cost of sales and the carrying amount of financial assets.

Financial assets can be written-off if the allowance for impairment losses have been provided 100%.

Write-off performed in its entirety to the carrying amount of financial assets by debiting the allowance for impairment losses.

Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount are reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal rights to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously. Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi Instrumen Keuangan

Bank mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

Pengungkapan

Bank mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan dalam melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik;
- Tingkat 2: Teknik penilaian yang menggunakan input selain harga kuotasian yang termasuk di dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga); dan
- Tingkat 3: Teknik penilaian yang menggunakan input untuk aset dan liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Reclassification of Financial Instruments

The Bank reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to fair value through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to the amortized cost is recorded at fair value at the date of reclassification. Unrealized gains or losses is removed from equity and is adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.

Disclosure

The Bank classifies fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the measurements. The fair value hierarchy shall have the following levels:

- Level 1: Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2: Valuation technique which use inputs other than quotes prices included within level 1 that are observable for the asset or liability either directly (example, price) or indirectly (example derived from prices); and
- Level 3: Valuation technique which use inputs for the asset and liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengungkapan (lanjutan)

Risiko pasar - analisis sensitivitas Bank mengungkapkan:

- a) Analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar dimana entitas terekspos pada akhir tahun pelaporan yang menunjukkan bagaimana laba rugi dan ekuitas mungkin terpengaruh oleh perubahan pada variabel risiko yang relevan yang mungkin dapat terjadi pada tanggal tersebut;
- b) Metode dan asumsi yang digunakan dalam menyusun analisis sensitivitas; dan
- c) Perubahan metode dan asumsi yang digunakan tahun sebelumnya dan alasan perubahannya.

Untuk pengukuran nilai wajar yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk setiap kelompok instrumen keuangan, Bank mengungkapkan:

- a) Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan, memisahkan pengukuran nilai wajar sesuai tingkat yang ditentukan di atas.
- b) Setiap pemindahan signifikan antara tingkat 1 dan tingkat 2 pada hirarki nilai wajar dan alasannya. Pemindahan ke dalam setiap tingkat diungkapkan dan dijelaskan secara terpisah dari pemindahan keluar dari setiap tingkat.

Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi instrumen keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Disclosure (continued)

Market risk - sensitivity analysis The Bank discloses:

- a) A sensitivity analysis for each type of market risk to which the entity is exposed at the end of reporting year, showing how profit or loss and equity would have been affected by changes in the relevant risk variable that were reasonably possible at that date;
- b) The methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis; and
- c) Changes from the previous year in the methods and assumptions used and the reasons for such changes.

For fair value measurements recognized in the statement of financial position for each class of financial instruments, the Bank discloses:

- a) The level in the fair value hierarchy into which the fair value measurements are categorized in their entirety, segregating fair value measurements in accordance with the levels defined above.
- b) Any significant transfers between level 1 and level 2 of the fair value hierarchy and the reasons for those transfers. Transfer into each levels is disclosed and discussed separately from transfers out of each level.

Bank classifies the financial instruments into classes that reflect the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification of financial instruments can be seen in the table below:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/Category as defined by SFAS 109		Golongan (ditentukan oleh Bank)/ Class (as determined by the Bank)		Sub-golongan/Subclasses		
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Efek-efek/Marketable securities Obligasi Pemerintah/Government Bonds				
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ Financial assets at amortized cost	Kas/Cash		Kas pada vendor/Cash in vendor		
		Giro pada Bank Indonesia/Current accounts with Bank Indonesia				
		Giro pada bank lain/Current accounts with other banks				
		Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia/Placements with other bank and Bank Indonesia				
		Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/Securities purchased under agreements to resell				
		Tagihan lainnya/Other receivables				
		Kredit yang diberikan/Loans				
		Piutang pembiayaan konsumen/Consumer financing receivables				
		Pendapatan bunga yang masih akan diterima/Accrued interest receivable				
		Aset lain-lain/Other assets	Piutang transaksi nasabah/Receivables from customer transactions		Penjualan efek-efek yang masih harus diterima/Receivables from sale of securities	
			Piutang terkait transaksi ATM/Receivables related to ATM transactions			
			Penyertaan saham/Investment in share of stock			
	Tagihan akseptasi/Acceptance receivables					
	Wesel ekspor dan tagihan/Bills and other receivables					
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/Financial assets at fair value through other comprehensive income	Efek-efek/Marketable securities Obligasi Pemerintah/Government Bonds				
	Derivatif lindung nilai/Hedging derivatives	Tagihan derivatif – terkait lindung nilai atas arus kas/Derivative receivables-non hedging related				
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial liabilities at fair value through profit or loss	Liabilitas derivatif – tidak terkait lindung nilai/Derivative payables-non hedging related				
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/Financial liabilities at amortized cost	Liabilitas segera/Obligation due immediately				
		Simpanan nasabah/Deposits from customers				
		Simpanan dari bank lain/Deposits from other banks				
		Efek-efek yang dijual dengan janji di beli kembali/Securities sold under agreements to repurchase				
		Liabilitas akseptasi/Acceptance payables				
		Beban yang masih harus dibayar/Accrued expenses				
		Liabilitas lain-lain/Other liabilities	Setoran jaminan/Security deposit		Utang nasabah/Payable to customers	
			Utang bunga/Interest payable		Lain-lain/Others	
			Efek-efek yang diterbitkan/Marketable securities issued			
		Transaksi komitmen dan kontinjensi/Commitments and contingencies transactions				
	Pinjaman subordinasi/Subordinated loan					
	Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan/Loan commitment and financial guarantee contract	- Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan/Committed unused loan facilities granted				
- Garansi yang diberikan/Bank guarantees issued						
- Letter of credit yang tidak dapat dibatalkan/Irrevocable letter of credit						

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Assets and Liabilities (continued)

Classification of Financial Instrument

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Kas dan setara kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam baik Rupiah dan mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas yang telah ditentukan penggunaannya atau kas yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas. Pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam perjalanan dan mata uang yang ditarik dari peredaran dan yang masih dalam tenggang untuk penukaran ke Bank Indonesia.

Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri atas kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang tidak dijaminkan atau dibatasi penggunaannya.

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 21).

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Kebijakan akuntansi untuk pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan pada (Catatan 2d).

• Giro wajib minimum

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bank diwajibkan untuk menempatkan sejumlah persentase tertentu atas simpanan nasabah pada Bank Indonesia.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), *call money* dan deposito berjangka.

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Cash and cash equivalents

Cash represents currency bills and coins, both in Rupiah and foreign currencies, which are valid as legal instruments of payment. Appropriated cash or restricted cash that cannot be used freely cannot be classified as cash definition. Cash also includes cash in vault, petty cash, cash in transit and currency withdrawn from circulation and still within the grace period for exchange to Bank Indonesia.

For statement of cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents consists of cash, current account with Bank Indonesia, current accounts with other Banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Deposits Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 (three) months or less from the date of acquisition which were not pledged or restricted in use.

f. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are measured at their amortized cost using effective interest rate method less the allowance for impairment losses. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 21).

Current accounts in Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment loss and classified as loan and receivables. The specific accounting policy for loan and receivables is disclosed in (Note 2d).

• Statutory reserves requirement

In accordance with prevailing Bank Indonesia regulation concerning Statutory Reserve in Rupiah and Foreign Currency for Commercial Banks, Bank is required to place certain percentage of deposits from customers with Bank Indonesia.

g. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with other banks and Bank Indonesia consist of Bank Indonesia Deposit Facility (BIDF), call money and time deposits.

Placements with other banks and Bank Indonesia are classified as amortized cost. Placements with other bank are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (lanjutan)

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penempatan dana pada Bank Indonesia dalam bentuk *deposit facility* dan *term deposits* serta penempatan dana pada bank lain dalam bentuk deposito berjangka.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2l).

h. Efek-efek

Efek-efek terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah, Surat Utang Non Bank, Obligasi Bank, Surat Berharga Syariah Negara, *Negotiable Certificates of Deposits*, Obligasi Korporasi.

Efek-efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (sub-kategori aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan), diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang diklasifikasikan ke dalam kelompok untuk diperdagangkan ("*trading*") disajikan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Pendapatan bunga dari efek utang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak. Atas penjualan portofolio efek yang diperdagangkan, selisih antara harga jual dengan harga perolehan diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada periode dimana efek tersebut dijual.

Efek-efek yang diklasifikasikan ke dalam kelompok nilai wajar yang diukur melalui komprehensif lain disajikan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dari kenaikan atau penurunan nilai wajar, setelah pajak, diakui dan disajikan sebagai komponen penghasilan komprehensif lain. Ketika efek-efek tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laporan laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Placements with Bank Indonesia and other banks (continued)

Rafer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Placements with Bank Indonesia and other banks represent placement of fund in Bank Indonesia in the form of deposit facility and term deposits and placement with other banks in the form of time deposits.

Placements with Bank Indonesia and other banks are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2l).

h. Marketable securities

Marketable securities consist of Certificates of Bank Indonesia, Deposits Certificates of Bank Indonesia, Government Bonds, Non Bank Bonds, Bank Bonds, State Sharia Securities.

Marketable securities are classified as financial assets measured at fair value to profit or loss (sub-category of financial assets classified as trading), fair value through other comprehensive income and amortized cost.

Securities are classified as trading are stated at fair value. The unrealized gains or losses resulting from the increase or decrease in fair value are recognized in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income. Interest income from debt securities are recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income in accordance with the terms of the contract. On the sale of portfolio trading securities, the difference between the sales price and the acquisition cost is recognized as a gain or loss on sale in the period in which the securities are sold.

Marketable securities that are classified as fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Gains or losses that are not realized from increases or decreases in fair value, net of tax, are recognized and presented as a component of other comprehensive income. When the securities are sold or impaired, gains and losses which was previously recognized in other comprehensive income is reclassified to the statement of profit or loss as reclassification adjustment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Efek-efek (lanjutan)

Efek-efek yang diklasifikasikan ke dalam kelompok biaya perolehan yang diamortisasi disajikan sebesar biaya perolehan yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi atau diskonto diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Cadangan kerugian penurunan nilai dan kenaikan/penurunan nilai wajar disajikan sebagai penambahan/pengurangan terhadap saldo efek-efek. Penyisihan kerugian penurunan nilai diukur bila terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 21.

i. Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse*) diklasifikasikan dalam kategori aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*repo*) disajikan sebagai aset sebesar harga penjualan kembali yang disepakati dikurangi selisih antara harga beli dan harga penjualan kembali yang disepakati. Selisih antara harga beli dan harga penjualan kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai pendapatan bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dibeli hingga saat dijual kembali.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan efek yang dijual dengan janji dibeli kembali mengacu pada Catatan 2d dan 3 terkait aset dan liabilitas keuangan.

j. Wesel ekspor

Wesel ekspor terdiri atas tagihan dari *Letters of Credit*. Wesel ekspor diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

k. Instrumen keuangan derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, Bank melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur pada risiko pasar seperti risiko mata uang. Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang tidak ditujukan untuk lindung nilai (atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat diklasifikasikan sebagai lindung nilai) diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Marketable securities (continued)

Marketable securities classified as amortized cost are stated at cost adjusted for unamortized premium and/or discount. Premium or discount is amortized using the effective interest rate method.

The allowance for impairment losses and changes in fair value are presented as addition/deduction to the outstanding balance of marketable securities. Allowance for impairment losses is assessed if there is an indication of impairment using the impairment methodology as disclosed in Note 21.

i. Securities purchased with agreements to resale

Securities purchased with agreements to resale (reverse) are classified as financial assets at fair value through profit and loss.

Securities purchases with agreements to resale (repo) are presented as asset and stated at the agreed resale price less the difference between the buying price and agreed resale price. The difference between the buying price and agreed resale price is amortized using effective interest method as interest income over the year commencing from the buying date to the resale date.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value measurement and derecognition of securities sold with agreements to repurchase refer to Notes 2d and 3 related to financial assets and liabilities.

j. Export bills

Export bills consist of receivables from Letters of Credit. Export bills are classified as amortized cost.

k. Derivative financial instruments

In conducting its businesses, the Bank conducts transactions of derivative financial instruments to manage exposure on market risks such as currency risk. All derivative contracts are recorded as assets when fair value is positive and as liabilities when fair value is negative.

Gain or loss on a derivative contract not designated as a hedging instrument (or derivative contract that does not qualify as a hedging instrument) is recognized in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Instrumen keuangan derivatif (lanjutan)

Instrumen derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama non-derivatif dan diperlakukan sebagai instrumen derivatif jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:

- Karakteristik ekonomi dan risiko dari derivatif melekat tidak secara erat berhubungan dengan karakteristik ekonomi dan risiko kontrak utama,
- Instrumen terpisah dengan kondisi yang sama dengan instrumen derivatif melekat memenuhi definisi dari derivatif, dan
- Instrumen hibrid (kombinasi) tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (dalam hal ini derivatif melekat di dalam aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak dipisahkan).

Instrumen derivatif (termasuk transaksi valuta asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) dicatat dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs Reuters pada tanggal laporan posisi keuangan, diskonto arus kas, model penentu harga opsi atau harga yang diberikan oleh *broker* (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 21).

l. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dengan pihak penerima kredit dan mewajibkan pihak penerima kredit untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Jenis-jenis kredit yang diberikan kepada debitur adalah sebagai berikut:

- Kredit produktif antara lain terdiri dari:
 - Fixed Loan* merupakan pinjaman yang diberikan kepada debitur untuk membiayai investasi (pembelian aset tetap) debitur atau modal kerja yang penggunaannya bersifat *seasonal*/hanya sekali penggunaan saja. Penarikan dana dilakukan sekaligus (sejumlah plafon yang telah disepakati antara Bank dan debitur) dengan menggunakan promes/surat sanggup dan pembayaran kembali dapat dilakukan secara berkala sampai dengan masa kredit. Porsi pinjaman yang telah dilunasi tidak dapat ditarik kembali;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Derivative financial instruments (continued)

Embedded derivatives are separated from their host non-derivative contract and accounted for as a derivative instrument if all of the following criteria are met:

- The economic characteristics and risks of the embedded derivative are not closely related to those of the host contract,*
- A separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative, and*
- The hybrid (combined) instrument is not measured at fair value through profit or loss (i.e. a derivative that is embedded in a financial asset or financial liability at fair value through profit or loss is not separated).*

Derivatives instruments (including foreign exchange transactions for financing and trading) is recognized in statement of financial position at fair value less allowance for impairment losses. The fair value is based on the market rate, Reuters exchange rate at statement of financial position date, discounted cash flows, option pricing models or broker quoted price on other instruments with similar characteristics.

Allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 21).

l. Loans

Loans is the provision of money or bills that can be equated with it, based on agreement with the recipient of credit and requires the recipient to repay the loan after a certain period of time with interest return.

The types of loans granted to the debtor are as follows:

- Productive loans among others consist of:*
 - Fixed Loan is a loan granted to the debtor to finance investments (purchase of fixed assets) of the debtor or the use of working capital which is seasonal/one use only. Withdrawal of funds is done at once (at the plafond amount agreed between the Bank and debtor) with the use of promissory notes and repayment can be made on a regular basis until the end of credit period. The portion of loan that has been repaid can not be withdrawn;*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

1. Kredit yang diberikan (lanjutan)

a. Kredit produktif antara lain terdiri dari: (lanjutan)

- *Revolving Loan* merupakan pinjaman yang diberikan kepada debitur untuk membiayai modal kerja yang bersifat permanen, yang jumlahnya tercermin dalam arus kas debitur. Penarikan dana sesuai dengan kebutuhan debitur dengan menggunakan promes/surat sanggup, dengan syarat tidak melebihi jumlah plafon yang telah disepakati antara Bank dan debitur. Porsi pinjaman yang telah dilunasi dapat ditarik kembali selama plafonnya masih mencukupi dan jangka waktu kredit masih berlaku (maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali);
- Pinjaman Rekening Koran merupakan pinjaman yang diberikan kepada debitur untuk membiayai modal kerja debitur sehari-hari. Debitur dapat melakukan penarikan atau pengembalian pinjaman dengan menggunakan cek, bilyet giro atau surat pemindahbukuan lainnya selama masa berlakunya perjanjian kredit dan penarikannya tidak melewati plafon pinjaman.

b. Kredit konsumtif antara lain terdiri dari:

- Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Apartemen merupakan pinjaman jangka panjang yang langsung diberikan kepada konsumen/calon pemilik untuk pembelian rumah, apartemen, ruko, kios dan memugar atau memperbaiki rumah atau ruko yang telah dimiliki konsumen, dimana jaminannya adalah obyek yang dibiayai oleh kredit tersebut;
- Kredit Pemilikan Mobil merupakan pinjaman jangka panjang yang langsung diberikan kepada konsumen/calon pemilik untuk pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas, dimana jaminannya adalah obyek yang dibiayai oleh kredit tersebut.
- Kredit Tanpa Agunan merupakan pinjaman tanpa agunan yang dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan customer, dimana pembayarannya dapat diangsur perbulan.

Pembayaran Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Pemilikan Apartemen dan Kredit Kepemilikan Mobil dilakukan secara bertahap/diangsur oleh debitur sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Bank.

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada saat akuisisi dan biaya transaksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penyisihan kerugian penurunan nilai diukur bila terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 21.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

1. Loans (continued)

a. Productive loans among others consist of: (continued)

- *Revolving Loan* is a loan granted to the debtor to finance permanent working capital, which amount is reflected in the cash flow of the debtor. Withdrawal of funds according to the needs of debtor by using promissory notes, which does not exceed the plafond amount that have been agreed between the Bank and debtor. The portion of loan that has been repaid can be withdrawn as long as the plafond is still sufficient and the credit period is still valid (maximum 1 year and can be extended);
- *Overdraft* are loans given to debtor to finance the working capital of the debtor's daily. The debtor can make withdrawals or loan repayment by check, bank draft or other transfer letters during the term of the credit agreement and the withdrawal does not exceed its plafond amount.

b. Consumer loans among others consist of:

- *Housing Loan and Apartment Ownership Loan* is a long-term loan granted directly to consumer/prospective owner for the purchase of house, apartment, shop house, kiosk and restoring or repairing a house or shop house that has been owned by the consumer, where the collateral is an object which is financed by the loan;
- *Car Loan* is a long-term loan granted directly to consumer/prospective owner for the purchase of motor vehicles, both new and second-hand, where the collateral is an object which is financed by the loan.
- *Unsecured Credit Loan (KTA)* is a loan facility for customers that does not require collateral where payments can be paid installments every month.

Payment of Housing Loan, Apartment Ownership Loan and Car Loan are made through installment/repaid by the debtor in accordance with the schedule determined by the Bank.

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment losses. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and transaction costs that are an integral part of effective interest rate. The amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Allowance for impairment losses is assessed if there is an indication of impairment using the impairment methodology as disclosed in Note 21.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

1. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Kredit sindikasi dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sesuai dengan porsi kredit yang risikonya ditanggung oleh Bank.

Restrukturisasi kredit dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui modifikasi persyaratan kredit seperti penjadwalan kembali angsuran dan bunga yang tertunggak serta perpanjangan jangka waktu kredit dan ketentuan kredit yang baru. Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit diakui bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai pinjaman yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dinyatakan tidak tertagih pada saat tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang. Ketika kredit yang diberikan tidak tertagih dan semua jaminan telah direalisasi atau sudah diambil alih, kredit yang diberikan tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas pokok kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan bunga atas kredit yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya. Penerimaan denda atas kredit yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pendapatan non-operasional.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

1. Loans (continued)

Syndicated loans are recorded at amortized cost using the effective interest rate method according to the portion of loans in which the risks borne by the Bank.

Loan restructuring is performed for debtors who are facing financial difficulties in fulfilling their obligations, through a modification of the terms of the loan such as rescheduling of installments and unpaid interest and the extension of credit terms and definitions of the new loan. Losses on loan restructuring in respect of modification of the terms of the loans are recognized only if the present value of total future cash receipts specified by the new terms of the loans, including both receipts designated as interest and those designated as loan principal, are less than the carrying amount of loans before restructuring.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value on the date of restructuring or value of the future cash receipts after restructuring. Losses resulting from the difference between the carrying value on the date of restructuring with value of the future cash receipts after restructuring are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. After the restructuring, all future cash receipts specified by the new terms are recorded as a return of principal loans and interest income, in accordance with the restructuring.

Loans are deemed uncollected when there are no realistic prospects of future recovery. When loans are deemed uncollected and all collateral have been realized or have been foreclosed, they are written-off against the related allowance for impairment losses. Those uncollected loan can be written off after all the necessary procedures have been performed and the amount of the loss has been determined.

Subsequent recoveries of written-off loans are credited by adjusting the allowance for impairment losses account. Interest received on loans previously written-off are recorded as other operating income. Penalties received on loans previously written-off are recorded as non-operating income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset keuangan dan aset non-keuangan

i. Pengakuan penurunan nilai aset keuangan

Bank mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan yang menerapkan persyaratan penurunan nilai.

Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Pada setiap tanggal pelaporan entitas menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, entitas mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, entitas membandingkan risiko gagal bayar instrumen keuangan yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Pada tanggal pelaporan entitas hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.

Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengakui dalam laba rugi jumlah perubahan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Entitas mengakui perubahan membaik atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan penurunan nilai, meskipun kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya lebih kecil dari jumlah kerugian kredit ekspektasian yang termasuk dalam estimasi arus kas pada saat pengakuan awal.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Impairment of financial and non-financial assets

i. Recognition of impairment in financial assets

The Bank recognizes an allowance for possible losses on expected credit losses on financial assets measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income, lease receivables, contract assets or loan commitments and financial guarantee contracts that impose impairment requirements.

As of reporting date, an entity shall measure the allowance for possible losses on financial instruments at the amount of expected credit losses over their lifetime, if the credit risk on those financial instruments has increased significantly since initial recognition.

As of reporting date the entity assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making that assessment, an entity considers changes in default risk that occur over the life of the financial instrument, not changes in the amount of expected credit losses. In making that assessment, the entity compares the risk of default on a financial instrument that occurs at the reporting date with the risk of default on initial recognition and considers reasonable and supportable information available without undue cost or effort, which is an indication of a significant increase in credit risk since recognition early.

As of reporting date, the entity recognizes only the cumulative changes in expected credit losses over its lifetime since the initial recognition of the financial asset as an allowance for losses on financial assets purchased or resulting from deteriorating financial assets.

As of reporting date, an entity recognizes in profit or loss the amount of changes in lifetime expected credit losses as an impairment gain or loss. An entity shall recognize the amendment of the expected lifetime credit loss as an impairment gain, even though the lifetime expected credit loss is less than the amount of the expected credit loss that was included in the cash flow estimate at initial recognition.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset keuangan dan aset non-keuangan (lanjutan)

i. Pengakuan penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Jika dalam periode pelaporan sebelumnya bank telah mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, tetapi pada tanggal pelaporan periode kini ditentukan bahwa risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut tidak lagi terpenuhi (tidak meningkat secara signifikan), maka bank mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan pada tanggal pelaporan periode kini.

Bank mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Jumlah yang dimaksud merupakan penyesuaian terhadap penyisihan kerugian pada tanggal pelaporan yang disyaratkan pengakuannya.

Untuk menentukan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit, bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Bank mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi, Estimasi Kerugian Kredit Ekspektasian mencerminkan jumlah probabilitas tertimbang dan tidak bias yang ditentukan dengan mengevaluasi rentang keluaran yang mungkin;
- Nilai waktu atas uang-*discount rate*; dan
- Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan (*forward looking*).

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, bank tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, bank mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

i. Recognition of impairment in financial assets (continued)

If in the previous reporting period the bank has measured allowance for losses for financial instruments for an amount of expected credit losses over its lifetime, but at the reporting date of the current period it is determined that the credit risk on the financial instrument is no longer fulfilled (does not increase significantly), then the bank measures the allowance for losses in the amount of 12 months expected credit loss at the reporting date of the current period.

The Bank recognizes the amount of the expected credit loss (or credit loss recovered) in profit or loss, as an impairment gain or loss. The amount referred to is an adjustment to the allowance for possible losses on the reporting date where recognition is required.

To determine whether there has been an increase in credit risk, banks consider reasonable and supported information, including forward-looking information.

The Bank measures the expected credit loss on financial instruments in a way that reflects:

- *Unusual and probability-weighted amounts determined by evaluating a Series of probable outcomes, Estimated Expected Credit Loss reflects a weighted and unbiased probability amount determined by evaluating the possible range of outputs;*
- *The time value of the money-discount rate; and*
- *Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date regarding past events, current conditions and forecasts of future economic conditions (forward looking).*

When measuring expected credit losses, the bank does not have to identify all possible scenarios. However, banks consider the risk or probability of credit loss by reflecting the probability of occurrence and non-occurrence of credit losses, even though the possibility of credit losses is very low.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset keuangan dan aset non-keuangan (lanjutan)

i. Pengakuan penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Periode maksimum yang dipertimbangkan dalam mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode kontraktual musiman (termasuk opsi perpanjangan) selama bank terekspos terhadap risiko kredit. Periode tersebut dimaksud tidak mencakup periode yang lebih panjang meskipun periode yang lebih panjang tersebut konsisten dengan praktis bisnis yang ada.

ii. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Suatu aset mengalami penurunan nilai jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai yang dapat dipulihkan. Nilai tercatat dari aset non-keuangan, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap periode, untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Bank akan melakukan estimasi jumlah nilai yang dapat dipulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset yang tidak dapat diuji secara individual akan digabungkan dengan kelompok yang lebih kecil yang memberikan arus kas masuk dari penggunaan berkelanjutan yang sebagian besar independen terhadap arus kas masuk atas aset lainnya atau UPK.

Penyisihan penurunan nilai diakui jika nilai tercatat dari suatu aset atau UPK melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Penyisihan penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

i. Recognition of impairment in financial assets (continued)

The maximum period considered in measuring expected credit losses is the seasonal contractual period (including extension options) during which the bank is exposed to credit risk. This period does not cover a longer period even though the longer period is consistent with existing business practices.

ii Impairment of non-financial assets

The Bank assesses at the end of each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. Assets are considered as impaired when the carrying value of assets is exceed the recoverable amount. The carrying amount of non-financial assets, except for deferred tax assets are reviewed each period to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists the Bank will estimate the asset's recoverable amount.

The recoverable amount of an individual assets is the higher of an asset or Cash Generating Unit (CGU) less cost to sell and its value in use, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or Banks of assets. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessment of the time value of money and the risk specific to the assets.

For the purpose of impairment testing, assets that cannot be tested individually are Banked together into the smallest Bank that generates cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows of other assets or CGU.

An impairment loss is recognized if the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount. Impairment losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset keuangan dan aset non-keuangan (lanjutan)

ii. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai atas aset non keuangan yang diakui pada periode sebelumnya dinilai pada setiap akhir periode pelaporan untuk menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya telah menurun atau tidak ada lagi. Kerugian penurunan nilai dibalik jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat bersih setelah penyusutan atau amortisasi, seandainya tidak ada kerugian penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut diakui sebagai laba rugi, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

iii. Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai aset keuangan ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai aset keuangan termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

ii Impairment of non-financial assets (continued)

Impairment losses of non-financial assets recognized in prior period are assessed at each reporting date for any indications that the losses that recognized in prior period has decreased or no longer exists. An impairment losses is reversed if there has been changes in the estimates used to determine the recoverable amount. The reversal of an impairment losses limited so that the carrying amount of the asset does not exceed the recoverable amount and the carrying amount net of depreciation and amortization, if there is no impairment losses that has been recognized in prior period for the asset. Reversal of impairment loss is recognized in profit or loss. After such a reversal recognized in profit or loss, depreciation for the asset is adjusted in future period to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systemic basis over the remaining useful life.

iii. Credit - impaired financial asset

Financial asset is impaired in the value of a financial asset when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is impaired by a financial asset includes observable data about the following events:

- *Significant financial difficulties experienced by the issuer or borrower;*
- *Breaches of contract, such as events of default or arrears;*
- *The lender, for economic or contractual reasons in connection with the borrower's financial difficulties, has made concessions to the borrower that would not have been possible if the borrower had not experienced such difficulties;*
- *There is a possibility that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- *The disappearance of an active market for financial assets due to financial difficulties; or*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset keuangan dan aset non-keuangan (lanjutan)

iii. Aset keuangan memburuk (lanjutan)

Aset keuangan mengalami penurunan nilai aset keuangan ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai aset keuangan termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini: (lanjutan)

- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian aset keuangan yang terjadi. Sulit untuk mengidentifikasi peristiwa diskrit tunggal, namun demikian, dampak kombinasi dari beberapa peristiwa dapat menyebabkan aset keuangan mengalami penurunan nilai aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, tetapi bukan aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, entitas mengukur kerugian aset keuangan ekspektasian sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto aset dan nilai kini dari arus kas masa depan yang diestimasi didiskonto dengan suku bunga efektif awal aset keuangan. Penyesuaian diakui di laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

iv. Pengelompokan kualitas/ stage aset keuangan

- a. *Stage 1*
Mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan resiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal atau memiliki resiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset-aset ini, akan berlaku perhitungan ECL 12 bulan.
- b. *Stage 2*
Mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan resiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali Bank merasa resiko kredit tergolong rendah pada tanggal pelaporan) namun belum terbukti adanya bukti penurunan nilai secara objektif. Untuk aset-aset ini, akan berlaku perhitungan ECL seumur hidup. ECL seumur hidup adalah ekspektasi kerugian kredit yang diharapkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

iii. Credit - impaired financial asset (continued)

Financial asset is impaired in the value of a financial asset when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is impaired by a financial asset includes observable data about the following events: (continued)

- *Purchase or issue of financial assets at a deep discount that reflects the loss of financial assets incurred. It is difficult to identify a single discrete event, however, the combined effect of several events can cause a financial asset to be impaired.*

For financial assets that have deteriorated at the reporting date, but not financial assets that were purchased or originated from deteriorating financial assets, an entity shall measure the expected financial asset loss as the difference between the asset's gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at interest rates effective initial financial assets. The adjustments are recognized in profit or loss as an impairment gain or loss.

iv. Financial asset quality/ stage classification

- a. *Stage 1*
Includes financial instruments that do not have a significant increase in credit risk since initial recognition or have a low credit risk at the reporting date. For these assets, a 12 month ECL calculation will apply.
- b. *Stage 2*
Includes financial instruments that experience an increase in credit risk since initial recognition (unless the Bank feels the credit risk is low at the reporting date) but has not been proven to have an objective evidence of impairment. For these assets, lifetime ECL calculations will apply. ECL lifetime is the expected credit loss expected from all default events that may occur during the estimated life of the financial instrument.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset keuangan dan aset non-keuangan (lanjutan)

iv. Pengelompokan kualitas/ stage aset keuangan (lanjutan)

c. Stage 3

Mencakup instrumen keuangan yang telah terbukti mengalami penurunan nilai secara objektif pada tanggal pelaporan. Tahap ini biasanya diisi oleh debitur yang mengalami gagal bayar.

v. Cross Staging

Cross Staging antar debitur yang sama akan diterapkan, jika satu debitur (CIF) memiliki multi rekening (fasilitas) dan *stage* yang berbeda akan dilakukan *worst stage* artinya satu debitur akan memiliki *stage* yang terburuk.

Faktor utama dalam menentukan apakah instrumen keuangan memerlukan perhitungan ECL 12 bulan (*stage 1*) atau ECL seumur hidup (*stage 2*) disebut dengan kriteria *Significant Increase in Credit Risk* (SICR). Penentuan kriteria SICR ini memerlukan pengkajian dan diskusi apakah telah terjadi peningkatan resiko kredit secara signifikan pada tanggal pelaporan.

Dalam PSAK 109 terdapat sebuah *rebuttable presumption* bahwa resiko kredit terhadap aset keuangan akan dianggap meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika pembayaran kontraktual sudah lebih dari 30 hari telah menunggak. Asumsi ini akan berlaku kecuali jika Bank dapat membuktikan, melalui argumen yang masuk akal dan berdasarkan fakta, bahwa resiko tidak meningkat secara signifikan pada 30 hari telah menunggak. Selain itu, definisi gagal bayar (*default*) pada PSAK 109 juga menyebutkan praduga (*rebuttable presumption*) bahwa aset keuangan yang sudah menunggak 90 hari telah gagal bayar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

iv. Financial asset quality/ stage classification (continued)

c. Stage 3

Includes financial instruments that have been objectively proven to be impaired at the reporting date. This stage is usually filled by debtors who experience defaults.

iv. Cross Staging

Cross staging between debtors the same will be applied, if one debtor (CIF) has multiple accounts (facilities) and different stages will be the worst stage, meaning that one debtor will have the worst stage.

The main factor in determining whether a financial instrument requires a 12 month ECL (*stage 1*) or lifetime (*stage 2*) ECL calculation is called the *Significant Increase in Credit Risk* (SICR) criterion. Determining the SICR criteria requires reviewing and discussing whether there has been a significant increase in credit risk at the reporting date.

In SFAS 109 there is a *rebuttable presumption* that credit risk to financial assets will be considered to have increased significantly since initial recognition if the contractual payment is more than 30 days pay due (DPD). This assumption will apply unless the Bank can prove, through reasonable arguments and based on facts, that the risk does not increase significantly at 30 days pay due (DPD). In addition, the definition of default in SFAS 109 also mentions the *rebuttable presumption* that financial assets that are 90 days in arrears have defaulted.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset keuangan dan aset non-keuangan (lanjutan)

vi. Metode kerugian kredit ekspektasian

- a. Kredit Ekspektasian 12 bulan
Jika tidak terjadi peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal. Kerugian dimaksud merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya
Jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal-baik dinilai secara individu atau kolektif dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

vii. Kriteria *stage* aset keuangan

- a. *Stage 1*
 - Umur tunggakan (DPD) = 0 - 30 hari.
 - Tidak ada *Flagging* Restrukturisasi.
 - Perhitungan Kerugian kredit espektasian dengan menggunakan *probability of default* 12 bulan.
 - Pendapatan Bunga diakui selama periode kredit yaitu suku bunga efektif diperhitungkan dengan jumlah nilai bruto (*Effective Interest Rate to Gross Carrying Amount*).
- b. *Stage 2*
 - Umur tunggakan (DPD) = 31 - 90 hari.
 - Ada *Flagging* Restrukturisasi
 - Perhitungan kerugian kredit espektasian dengan menggunakan *probability of default* seumur pinjaman.
 - Pendapatan bunga diakui selama periode kredit yaitu suku bunga efektif diperhitungkan dengan jumlah nilai bruto (*Effective Interest Rate to Gross Carrying Amount*).
- c. *Stage 3*
 - Umur tunggakan (DPD) > 90 hari.
 - Perhitungan kerugian kredit espektasian dengan menggunakan *probability of default* seumur pinjaman.
 - Pendapatan bunga diakui selama periode kredit yaitu suku bunga efektif diperhitungkan dengan jumlah nilai neto atau biaya diamortisasi (*Effective Interest Rate to Net Carrying Amount*).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

vi. Expected credit losses method

- a. Expected Credit 12 months
If there has been no significant increase since initial recognition. The loss represents the expected credit loss arising from a financial instrument default that may occur within 12 months after the reporting date.
- b. Expected credit throughout its life
If the credit risk on the financial instrument has increased significantly since initial recognition - whether assessed individually or collectively - by considering all reasonable and supportable information, including information that is forward-looking.

vii. Financial asset stage criteria

- a. *Stage 1*
 - Days pay due (DPD) = 0 – 30 days.
 - No Restructuring Flagging.
 - Calculation of expected credit losses using a 12 month probability of default.
 - Interest income is recognized during the credit period, namely the effective interest rate is calculated by the total gross value (*Effective Interest Rate to Gross Carrying Amount*).
- b. *Stage 2*
 - Days pay due (DPD) = 31 – 90 days.
 - On Restructuring Flagging.
 - Calculation of expected credit losses using a probability of default for the duration of the loan.
 - Interest income is recognized during the credit period, namely the effective interest rate is calculated by the total gross value (*Effective Interest Rate to Gross Carrying Amount*).
- c. *Stage 3*
 - Days pay due > 90 days.
 - Calculation of expected credit losses using a probability of default for the duration of the loan.
 - Interest income is recognized during the credit period, namely the effective interest rate is calculated by the net value or amortized cost (*Effective Interest Rate to Net Carrying Amount*).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset keuangan dan aset non-keuangan (lanjutan)

viii. Indikator kualitatif kriteria stage 2 aset keuangan

- a. Perubahan persyaratan kredit (keringanan), dalam hal perjanjian kredit masih berjalan dalam waktu yang singkat;
- b. Tidak ada pembayaran angsuran;
- c. Peningkatan signifikan pada risiko kredit pada instrumen lain dari peminjam yang sama;
- d. Kebijakan peningkatan monitoring debitur karena peningkatan risiko kredit;
- e. Meningkatnya premi risiko debitur yang disebabkan peningkatan risiko kredit pada debitur;
- f. Perubahan faktor eksternal yang merugikan bisnis dan keuangan debitur;
- g. Penurunan *rating* internal dan eksternal.

ix. Indikator kualitatif kriteria stage 3 aset keuangan

- a. Pelanggaran perjanjian kredit.
 - Tidak dipenuhinya satu atau lebih syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian kredit seperti syarat penandatanganan, syarat pencairan/penarikan, pelanggaran terhadap *covenant* kredit;
 - Penyalahgunaan penggunaan kredit;
 - Adanya masalah hukum dan ekonomi yang signifikan dari debitur;
 - Terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) permasalahan hukum yang dialami debitur baik yang terkait dengan usaha maupun masalah hukum diluar usaha;
 - Terdapat permasalahan internal keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau penyalahgunaan dana oleh anggota keluarga debitur.
- b. Terdapat kemungkinan bahwa debitur dinyatakan pailit.
 - Terdapat hutang macet kepada pihak ketiga;
 - Terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) tuntutan hukum pailit oleh pihak ketiga.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

viii. Qualitative indicators of Stage 2 financial assets criteria

- a. Changes in credit terms (relief), if the credit agreement is still running for a short time;
- b. No installment payments;
- c. Significant increase in credit risk on other instruments from the same borrower;
- d. Policy to increase debtor monitoring due to increased credit risk;
- e. Increased debtor risk premium due to increased credit risk on debtors;
- f. Changes in external factors that are detrimental to the debtor's business and finances;
- g. Internal and external downgrades.

ix. Qualitative indicators of stage 3 financial assets criteria

- a. Credit agreement violation
 - Failure of one or more of the terms stipulated in the credit agreement, such as signing conditions, disbursement/withdrawal conditions, violation of credit covenants;
 - Abuse of use of credit;
 - There are significant legal and economic problems from the debtors;
 - There is at least 1 (one) legal problem experienced by the debtor, whether related to business or legal problems outside the business;
 - There are internal family problems, for example divorce, death, prolonged illness, or misuse of funds by members of the debtor's family.
- b. There is a possibility that the debtor will be declared bankrupt.
 - There is bad debt to third parties;
 - There is at least 1 (one) bankruptcy lawsuit by a third party.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset keuangan dan aset non-keuangan (lanjutan)

x. Pengelompokan kredit berdasarkan umur tunggakan (*delinquency bucket*)

Aset keuangan dikelompokkan lagi kedalam kelompok tunggakan (*delinquency buckets*) yang merepresentasikan kualitas kredit yang terdiri dari :

- a. *Rating 1*, yakni untuk kredit yang tidak memiliki tunggakan;
- b. *Rating 2*, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
- c. *Rating 3*, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari;
- d. *Rating 4*, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;
- e. *Rating 5*, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

xi. Teknik evaluasi kerugian kredit ekspektasian

Teknik dalam mengevaluasi Kerugian Kredit Ekspektasian menggunakan metode *Migration Analysis*, dengan menggunakan pendekatan statistik dari data historis kredit berdasarkan segmentasi :

- a. *Bank wide*;
- b. Sektor Ekonomi;
- c. *Rating (stage)*;
- d. Produk kredit.

Perhitungan Kerugian Kredit Ekspektasian atau *Expected Credit Loss (ECL)* dalam menentukan besarnya Kerugian Kredit Ekspektasian, maka pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai mencakup:

- a. *Probability of default*;
- b. *Exposure at default*;
- c. *Lost given default*;
- d. *Discount factor*;
- e. *Forward looking adjustment*.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

x. Credit Banking based on the age of arrears (*delinquency bucket*)

Financial assets are further classified into delinquency buckets, which represent credit quality, consisting of:

- a. *Rating 1*, which is for credits that are not in arrears;
- b. *Rating 2*, namely for loans with arrears of principal and/or interest of up to 30 (thirty) days.
- c. *Rating 3*, namely for loans with arrears of principal and/or interest of more than 30 (thirty) days up to 60 (sixty) days;
- d. *Rating 4*, namely for loans with arrears of principal and/or interest of more than 60 (sixty) days up to 90 (ninety) days;
- e. *Rating 5*, namely for loans with arrears of principal and/or interest of more than 90 (ninety) days.

xi. Technique for evaluating expected credit losses

Techniques in evaluating Expected Credit Losses use the *Migration Analysis* method, using a statistical approach from credit historical data based on segmentation:

- a. *Bank wide*;
- b. *Economic Sector*;
- c. *Stage*;
- d. *Credit products*.

Calculation of Expected Credit Loss (*ECL*) In determining the amount of Expected Credit Loss, the formation of Allowance for Impairment Losses includes:

- a. *Probability of default*;
- b. *Exposure at default*;
- c. *Lost given default*;
- d. *Discount factor*;
- e. *Forward looking adjustment*.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset keuangan dan aset non-keuangan (lanjutan)

xi. Teknik evaluasi kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)

Bank menggunakan 3 (tiga) skenario kondisi ekonomi yang berbeda atas perhitungan ECL yang dilakukan secara kolektif. Tiga skenario kondisi ekonomi yang ditetapkan Bank terdiri dari kondisi umum (*Business As Usual*), kondisi baik (*Upturn* Atau *Good Scenario*), dan kondisi buruk (*Downturn* Atau *Bad Scenario*). Dalam prakteknya, diasumsikan setiap kondisi umum, kondisi baik, dan kondisi buruk terjadi dengan probabilitas (bobot) tertentu. Penentuan probabilitas ini dilakukan dengan pertimbangan tertentu, Bank menetapkan probabilitas masing-masing skenario antara lain kondisi umum 70%, kondisi baik 15%, dan kondisi buruk 15%.

Kriteria Pencadangan Penurunan Nilai Secara Individual yang dihitung secara individual oleh Bank adalah debitur dengan nilai *outstanding* lebih dari Rp20.000.000.000 dan telah menunggak selama lebih dari 90 hari. Metode pencadangan penurunan nilai secara individual untuk debitur yang memenuhi kriteria tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara sebagai berikut:

- *Discounted Cash Flow (DCF)*
Metode DCF digunakan apabila usaha atau proyek debitur masih beroperasi dan/atau debitur masih memiliki arus kas yang dapat digunakan sebagai sumber pembayaran pinjaman. Perhitungan menggunakan DCF dilakukan berdasarkan selisih antara nilai tercatat kredit dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskonto (*discounted cash flow*) menggunakan suku bunga efektif.
- *Fair Value of Collateral (FVC)*
Metode FVC digunakan apabila debitur tidak memiliki sumber pembayaran pinjaman lain selain dari penjualan aset jaminan. Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan atas aset/ pinjaman keuangan yang dijaminakan merefleksikan arus kas yang mungkin dihasilkan dari penjualan aset yang dijaminakan dikurangi biaya untuk memperoleh dan menjual aset jaminan tersebut. Perhitungan nilai kini atas pencairan jaminan dilakukan dengan menggunakan *original effective interest rate* (OEIR) atau nilai *effective interest rate* (EIR) terakhir apabila EIR yang ditetapkan adalah *floating*, yang kemudian didiskontokan ke tanggal perhitungan atau pelaporan. Pencadangan penurunan nilai menggunakan metode FVC dihitung berdasarkan selisih antara nilai kini bersih (NPV) dari penjualan aset yang dijaminakan dan nilai aset (kredit yang diberikan).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

xi. Technique for evaluating expected credit losses (continued)

The Bank uses 3 (three) different economic condition scenarios for the ECL calculation which is carried out collectively. Three scenarios of economic conditions determined by the Bank consist of general conditions (*Business As Usual*), good conditions (*Upturn* or *Good Scenarios*), and bad conditions (*Downturn* or *Bad Scenarios*). In practice, it is assumed that every general condition, good condition, and bad condition occurs with a certain probability (weight). Determination of this probability is carried out with certain considerations, the Bank determines the probability of each scenario, including 70% general conditions, 15% good conditions, and 15% bad conditions.

The criteria for Individual Allowance for Impairment that is calculated individually by the Bank are debtors with an outstanding value of more than Rp20,000,000,000 and have been in arrears for more than 90 days. The method of allowance for impairment individually for debtors who meet these criteria can be done in 2 (two) ways as follows:

- *Discounted Cash Flow (DCF)*
- The DCF method is used when the debtor's business or project is still operating and/or the debtor still has cash flow that can be used as a source of loan payments. Calculations using DCF are made based on the difference between the carrying amount of the credit and the present value of the estimated discounted cash flow using the effective interest rate.
- *Fair Value of Collateral (FVC)*
- The FVC method is used when the debtor has no other source of loan payments other than the sale of the collateral asset. The calculation of the present value of estimated future cash flows on pledged financial assets/loans reflects the cash flows that may result from selling the pledged asset less costs to acquire and sell the collateralized asset. The calculation of the present value of collateral disbursement is carried out using the original effective interest rate (OEIR) or the last effective interest rate (EIR) if the specified EIR is floating, which is then discounted to the calculation or reporting date. Allowance for impairment using the FVC method is calculated based on the difference between the net present value (NPV) of the sale of the pledged asset and the value of the asset (credit granted).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Pernyataan saham

Penyertaan saham merupakan investasi jangka panjang pada perusahaan non-publik.

Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk penyertaan jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dan kenaikan/penurunan nilai wajar disajikan sebagai penambahan/pengurangan terhadap saldo penyertaan saham.

o. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Dalam kegiatan bisnis biasa, Bank memberikan jaminan keuangan, seperti *letters of credit*, bank garansi dan akseptasi.

Tagihan akseptasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi oleh penyisihan kerugian penurunan nilai. Liabilitas akseptasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dilakukan bila terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 21.

p. Aset tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali hak atas tanah, dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Aset tetap dinyatakan sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi (model revaluasi-kuasi reorganisasi sejak tanggal 30 Juni 2012) dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Investments in shares of stock

Investments in shares of stock are long-term investments in non-public companies.

Investments in shares with ownership interest of less than 20% that do not have readily determinable fair values and are intended for long-term investments are stated at cost (cost method). The carrying amount of the investments is written down to recognize a permanent decline in value of the individual investments and such loss is charged directly to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Allowance for impairment losses and increases/decreases in fair value are presented as additions/deductions from the outstanding balance of investment in share of stock.

o. Acceptance receivables and payables

In the ordinary course of business, the Bank provides financial guarantees, consisting of letters of credit, bank guarantees and acceptances.

Acceptance receivables are measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment losses. Acceptance payables are measured at amortized cost by using the effective interest rate method.

Allowance for impairment losses is calculated if there is an objective evidence of impairment by using the impairment methodology as disclosed in Note 21.

p. Fixed assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its price and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent to initial recognition, fixed assets, except for land rights, are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.

Fixed assets are stated at fair value at the revaluation date which is represent fair value at the date of revaluation(revaluation model-quasi reorganization as of June 30, 2012) less accumulated depreciation and impairment losses, if any.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Aset tetap (lanjutan)

Sejak tanggal 1 Januari 2016, hak atas tanah dan bangunan dinyatakan sebesar nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Penilaian terhadap hak atas tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang memiliki kualifikasi profesional. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa nilai tercatat aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan. Akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto dari aset yang direvaluasi pada tanggal revaluasi.

Penyusutan atas nilai revaluasi aset tetap dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Bila kemudian aset tetap yang telah direvaluasi dijual atau dihentikan penggunaannya, saldo surplus revaluasi tersisa dipindahkan langsung ke saldo laba.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tetap tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya. Aset tetap, kecuali hak atas tanah yang tidak disusutkan, disusutkan dengan menggunakan saldo menurun ganda (*double-declining balance method*), sedangkan bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*). Tarif penyusutan dan estimasi umur manfaat ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tarif/Rate
Bangunan	5% - 10%
Inventaris kantor	10% - 50%
Instalasi	10% - 50%

Hak atas tanah dicatat sebesar nilai revaluasi yang mencerminkan nilai wajar pada tanggal revaluasi dan tidak disusutkan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya akuisisi hak atas tanah pada akun "Aset Tetap" dan biaya-biaya tersebut tidak disusutkan. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah bersih hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Fixed assets (continued)

Since January 1, 2016, land rights and buildings are stated at revalued amount which is the fair value at the date of revaluation less accumulated depreciation for buildings and impairment losses, if any. The valuation of land rights and buildings are performed by external independent valuers who have professional qualifications. Revaluation is performed with sufficient regularity to ensure that the carrying amount of the revaluation does not differ materially from its fair value at the reporting date. Any accumulated depreciation are eliminated against the gross carrying amount of assets revalued at the date of revaluation.

Depreciation on revaluation value of fixed assets are charged to profit or loss and other comprehensive income. If then the revalued fixed asset is sold or retired, the revaluation surplus is transferred directly to retained earnings.

Depreciation starts when fixed asset is ready for use as intended use. The fixed assets, except land rights which are not depreciated, are depreciated using the double-declining balance method, while buildings are depreciated using the straight-line method. Depreciation rates and estimated useful life of the assets are as follows:

Umur manfaat (tahun)/ Useful life (year)	
10 - 20	Buildings
4 - 8	Office equipment
4 - 8	Installations

Land rights is stated at revalued amount which represents fair value at the revaluation date and is not depreciated. Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognized as part of the acquisition cost of the land rights in "Fixed Assets" account and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognized as intangible assets and amortized during the period of the land rights or economic life, whichever is shorter.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the period the asset is derecognized.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Aset tetap (lanjutan)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Bank manfaat ekonomis masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat ekonomis aset tetap terkait

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar daripada nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset tetap tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai.

Nilai residu dari aset tetap adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Bank saat ini dari pelepasan aset tetap, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset tetap telah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaat ekonomisnya.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, manfaat ekonomis dan metode penyusutan dievaluasi, dan disesuaikan secara prospektif, jika memenuhi kondisi tersebut.

q. Aset takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi secara garis lurus selama umur manfaat ekonomisnya dan dievaluasi apabila terdapat indikasi adanya penurunan nilai.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat:

- a) dijual; atau
- b) ketika tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan dari penggunaan atau penjualan aset tersebut.

Aset takberwujud yang dimiliki oleh Bank berupa perangkat lunak. Aset takberwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Bank akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Fixed assets (continued)

Repairs and maintenance are taken to profit or loss when incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related fixed assets when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard performance of the existing asset will flow to the Bank and is depreciated over the remaining useful lives of the related fixed assets.

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

When the carrying amount of fixed assets is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount which is determined at the higher of net selling price or value in use.

The residual value of a fixed asset is the estimated amount that can be acquired by the Company at this time of disposal of fixed assets, net of estimated costs of disposal, if the fixed asset has reached the age and condition expected at the end of its useful life.

The assets residual values, useful lives and methods of depreciation are evaluated, and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of each reporting period.

q. Intangible assets

Intangible asset which acquired separately is measured at cost on initial recognition. After initial recognition, intangible asset is recorded at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Intangible asset with finite useful life is amortized on a straight-line basis over its economic useful life and evaluated for impairment whenever there is an indication that it may be impaired.

An intangible asset shall be derecognized when:

- a) on disposal; or*
- b) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.*

Intangible asset held by the Bank is software. Intangible asset is recognized if, and only if, the acquisition cost can be measured reliably and is probable that expected future benefits that are attributable to it will flow to the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Aset takberwujud (lanjutan)

Perangkat lunak yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset takberwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Biaya perolehan perangkat lunak terdiri dari seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam persiapan perangkat lunak tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Pengeluaran setelah perolehan perangkat lunak dapat ditambahkan pada biaya perolehan perangkat lunak atau dikapitalisasi sebagai perangkat lunak hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak yang bersangkutan sehingga menjadi lebih besar dari standar kinerja yang diperkirakan semula. Pengeluaran yang tidak menambah manfaat ekonomis masa depan dari perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Perangkat lunak dengan umur terbatas diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi umur manfaat ekonomis yaitu 10 (sepuluh) tahun dan tarif amortisasi sebesar 10%.

Amortisasi perangkat lunak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sejak tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk digunakan sampai berakhirnya umur manfaat ekonomis dari perangkat lunak tersebut.

Pada setiap periode pelaporan, umur manfaat ekonomis dan metode amortisasi dievaluasi, dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

r. Biaya dibayar dimuka dan aset lain-lain

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Aset lain-lain disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

Aset dalam pengembangan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan aset dalam pengembangan dipindahkan ke aset tetap dan aset takberwujud pada saat aset tersebut telah selesai dikembangkan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Aset dalam pengembangan tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Intangible assets (continued)

Software which is not an integral part of a related hardware is recorded as intangible asset and stated at carrying amount, which is cost less accumulated amortization.

The cost of software consists of all expenses directly attributable to the preparation of such software, until it is ready to be used for its intended purpose.

Subsequent expenditure on software acquisition is capitalized to the value of software only when it increases the future economic benefits of the software, so that it becomes larger than originally expected performance standards. Expenditure with no addition of future economic benefits from the software is directly recognized as expenses when incurred.

Software with a finite useful life is amortized using the straight-line method over the estimated useful life of 10 (ten) years and amortization rate of 10%.

Amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income from the date that is available for use until the economic benefits of software is ended.

The assets residual values, useful lives and methods of amortization are evaluated, and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of each reporting period.

r. Prepaid expenses and other assets

Prepaid expenses are amortized over their beneficial period using the straight-line method.

Other assets are stated at carrying amount, which is cost less accumulated amortization and impairment losses, if any.

and presented as part of fixed assets. The accumulated costs are reclassified to the appropriate fixed assets and intangible assets account at the time the assets have been fully developed and ready for their intended use. Assets under development are not depreciated as these are not yet available for use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Agunan yang diambil alih

Pada saat pengakuan awal, agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit dicatat sebesar nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya tetapi tidak melebihi nilai tercatat kredit yang diberikan. Bank tidak mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan agunan. Selisih lebih antara saldo kredit yang tidak dapat ditagih dengan nilai bersih agunan yang diambil alih yang dapat direalisasikan dibebankan pada penyisihan kerugian. Setelah pengakuan awal, agunan yang diambil alih dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya. Selisih lebih antara nilai tercatat dengan nilai wajar agunan yang diambil alih setelah dikurangi biaya untuk menjualnya diakui sebagai kerugian penurunan nilai dalam laba rugi tahun berjalan.

Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Agunan yang diambil alih tidak disusutkan dan beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

t. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank yang harus segera dibayarkan kepada pihak lain berdasarkan kontrak atau perintah dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Liabilitas segera diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

u. Simpanan nasabah

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek atau pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban pada pemilik tabungan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Foreclosed assets

Foreclosed assets acquired in conjunction with settlement of loans are initially recorded at their fair value less costs to sell but not to exceed the carrying value of loans. The Bank does not recognize any gains when the Bank foreclosed an asset. The excess between the uncollectible credit balance and the net realizable value of the collateral is charged to allowance for losses. Subsequent to initial recognition, foreclosed assets are recorded at carrying amount or at fair value less costs to sell, whichever is lower. The excess between the carrying value and fair value less costs to sell is recognized as impairment losses in the current year profit or loss.

The difference between the carrying value of the foreclosed assets and the proceed from the sale of foreclosed assets is recognized as gain or loss at the time of sale.

Foreclosed assets do not depreciated and expenses for maintaining foreclosed assets are charged in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

Management evaluates the value of foreclosed assets periodically. An allowance for impairment losses of foreclosed assets is provided based on the decline in value of foreclosed assets.

t. Obligations due immediately

Obligations due immediately represent obligations to third parties based on contract or order by those having authority that have to be settled immediately. Obligations due immediately are measured at amortized cost using effective interest rate method.

u. Deposits from customers

Demand deposits represent customer funds which can be used as payment instruments, and can be withdrawn at any time through cheque, or transferred through current account drafts and other transfer instruction media. Demand deposits are stated at the amounts entrusted to the Bank by the depositors.

Savings deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only under certain conditions. Savings deposits are stated at the agreed amounts due to the depositors.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Simpanan nasabah (lanjutan)

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Bank, sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pada saat pengakuan awal diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

v. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank dalam negeri, dalam bentuk *interbank call money* yang jatuh tempo menurut perjanjian tidak melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari, giro, deposito berjangka dan deposito *on call*.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

w. Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) disajikan sebagai liabilitas sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati. Selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga saat dibeli kembali.

x. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi diakui sebesar nilai wajarnya pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman subordinasi dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Deposits from customers (continued)

Time deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only on specific maturity dates based on the agreements between the depositors and the Bank. Time deposits are stated at the nominal amounts stated in the certificates issued by the Bank in accordance with the agreements between the depositors and the Bank.

Deposits from customers are classified as liabilities measured at amortized cost are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

v. Deposits from others bank

Deposits from other banks represent liabilities to domestic banks, in the form of interbank call money with original maturities less than 90 (ninety) days, demand deposits, time deposits and on call deposits.

Deposits from other banks are classified as liabilities measured at amortized cost, which are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

w. Securities sold under repurchase agreements

Securities sold under repurchase agreements (repo) are classified as financial liabilities at amortized costs.

Securities sold under repurchase agreements (repo) are presented as liabilities and stated at the agreed repurchase price less the difference between the selling price and agreed repurchase price. The difference between the selling price and agreed repurchase price is amortized using effective interest method as interest expense over the year commencing from the selling date to the repurchase date.

x. Subordinated loan

Subordinated loan is initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on subordinated loan and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang dikenakan suku bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan dan beban bunga yang disajikan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain meliputi:

- Bunga atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- Bunga atas nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

z. Pendapatan dan beban provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

Beban provisi dan komisi lainnya terutama terkait dengan provisi atas transaksi dan jasa, diakui sebagai beban pada saat jasa tersebut diterima.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Interest income and expenses

Interest income and expense for all interest-bearing financial instruments are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to obtain the carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs and all other premiums or discounts.

Interest income and expenses presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income include:

- *Interest on financial assets and liabilities at amortized cost calculated on an effective interest basis.*
- *Interest on fair value through other comprehensive income calculated on an effective interest basis.*

z. Fees and commissions income and expense

Fees and commissions income which directly related to lending activities, or fees and commissions related to a specific period, are amortized over the term of the contract using the effective interest rate and classified as part of interest income on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Fees and commissions income which are not related to lending activities or a specific period are recognized as revenues on the transaction date as other operating income.

Other fees and commission expense relate mainly to transaction and service fees, which are expensed as the services are received.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aa. Pendapatan dan beban operasional lainnya

Seluruh pendapatan dan beban operasional lainnya dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

ab. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas atau penghasilan komprehensif lain. Dalam hal ini, pajak tersebut diakui langsung pada ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan dan penyesuaian terkait dengan utang atau restitusi pajak tahun-tahun sebelumnya.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau yang dibayarkan kepada otoritas pajak.

Manajemen secara periodik melakukan evaluasi atas posisi yang diambil dalam pelaporan pajak sehubungan dengan situasi dimana peraturan pajak terkait menjadi subjek interpretasi dan menetapkan provisi bila diperlukan.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat diterimanya surat ketetapan pajak atau, jika Bank mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut ditetapkan.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif (atau peraturan) pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan untuk diterapkan jika aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Other operating income and expenses

All other operating income and expenses are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

ab. Taxation

The income tax expense is comprised of current and deferred income tax. Tax is recognized in the statement of profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized directly in equity or other comprehensive income. In this case, the tax is also recognized directly in equity or other comprehensive income.

Current tax

Current tax is determined based on the taxable income for the current year and computed based on the tax rates and tax laws that are enacted or substantively enacted as at the reporting dates and adjustment related to payable or tax refund of previous years.

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authority.

Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions when appropriate.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed by the Bank, when the result of the appeal is determined.

Deferred tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date. However, deferred tax liabilities are not recognized if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates (or laws) that have been enacted or substantially enacted as at the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilized.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ab. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada periode saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Pada setiap tanggal pelaporan, Bank meninjau kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui dan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disalinghapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, atau Bank bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar bersih.

ac. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun berjalan. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah 20.223.412.907 saham.

Bank tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

ad. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan pasca kerja

Bank memberikan imbalan pasca kerja kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003, dimana telah diperbaharui menggunakan UU Cipta Kerja No 11/2020. UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, sehingga pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ab. Taxation (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the assets are realized or the liabilities are settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax assets to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity, or the Bank intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

ac. Earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing profit for the year with the weighted-average number of shares outstanding during the year. The weighted-average number of shares outstanding during December 31, 2024 and 2023 is 20,223,412,907 shares.

The Bank has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2024 and 2023, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

ad. Employee benefits

Short-term employee benefit

Short-term employee benefits are recognized when they accrue to the employees.

Post-employment benefits

The Bank provides post-employment rewards to its employees in accordance with the provisions of the Labor Law No.13/2003 dated March 25, 2003, which has been updated using The Job Creation Law No. 11/2020. The Labor Law determines a certain formula for calculating the minimum amount of pension benefits, so basically, a pension plan under the Labor Law is a defined rewards program.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, biasanya berdasarkan beberapa faktor seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Liabilitas imbalan pasca kerja merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan. Liabilitas imbalan pasca kerja dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo pensiun yang bersangkutan.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Keuntungan atau kerugian aktuarial yang terjadi dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas di penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya sebagai pengukuran kembali program imbalan pasti. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

Pengukuran kembali atas program imbalan pasti yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- Menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau
- Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Penyelesaian program terjadi ketika entitas melakukan transaksi yang menghapuskan semua liabilitas hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Employee benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

A defined benefit plan is a pension plan program where the pension amount to be received by employees at the time of retirement will depend on some factors such as age, years of service or compensation.

Post-employment benefits liability is the present value of defined benefits obligation at the statement of financial position date. Post-employment benefits liability is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have the terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Past service costs is recognized immediately in profit or loss.

Past service costs arising from amendment or curtailment programs are recognized as expenses in profit or loss when incurred.

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise as remeasurement of defined benefits plans. Accumulated remeasurement are recognized in retained earnings.

Remeasurement on defined benefits plans which recognized as other comprehensive income will not reclassify to profit or loss in the next period.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs.

A curtailment occurs when an entity either:

- Demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan; or
- Amends the terms of a defined benefit plan so that a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.

A settlement occurs when an entity enters into a transaction that eliminates all further legal or constructive obligation for part or all of the benefits provided under a defined benefit plan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

af. Segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional yaitu Direksi.

Segmen geografis adalah komponen Bank yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

Bank melaporkan segmen geografis berdasarkan daerah Jakarta, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan lainnya.

ag. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi

Bank menerapkan PSAK No. 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor, yang terdiri dari:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

af. Operating segment

An operating segment is a component of an entity which:

- a) engages in business activities from which it may earn income and expenses (including income and expenses relating to the transactions with other components with the same entity);*
- b) operating results are reviewed regularly by the chief operating decision maker to make decisions regarding the resources allocated to the segment and assess its performance; and*
- c) separate financial information is available.*

The Bank presents operating segments based on internal reports that are presented to the operating decision maker which is the Board of Directors.

A geographical segment is a distinguishable component of the Bank that is engaged in providing services within a particular economic environment and that is subject to risks and returns that are different from those operating in other economic environments.

The Bank reports geographical segments based on the area of Jakarta, Java, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan and others.

ag. Transactions and balances with related parties

The Bank applied SFAS No. 224, "Related Party Disclosures", which requires disclosure of related party relationships, transactions and outstanding balances, including commitments, in the financial statements.

A related party is a person or entity that is related to the reporting entity, which consists of:

- a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ag. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor, yang terdiri dari: (lanjutan)

- b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi, maupun tidak, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

ah. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa. Perjanjian tersebut ditelaah apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset atau aset-aset tertentu atau perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian. Suatu sewa dikelompokkan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa dikelompokkan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ag. Transactions and balances with related parties (continued)

A related party is a person or entity that is related to the reporting entity, which consists of: (continued)

- b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:*
- The entity and the reporting entity are members of the same Bank (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Bank of which the other entity is a member);*
 - Both entities are joint ventures of the same third party;*
 - One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
 - The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
 - The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*
 - A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*

All significant transactions and balances with related parties, whether or not conducted under terms and conditions similar to those granted to third parties, are disclosed in the notes to the financial statements.

ah. Leases

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Leases that transfer substantially to the lessee all the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as finance leases. Moreover, leases that do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ah. Sewa (lanjutan)

Sewa operasi - Bank sebagai lessee

Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama masa sewa.

Aset hak guna dan liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Bank dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Bank harus menilai apakah:

- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
 2. Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Aset hak-guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ah. Leases (continued)

Operating lease - Bank as a lessee

Payments made under operating leases are recognized as general and administrative expenses in the statement profit or loss and other comprehensive income over the period of lease.

Right-of-use assets and lease liabilities

At the inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Bank can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;
- Leases of low value assets.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Bank shall assess whether:

- The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and
- The Bank has the right to direct the use of the asset. The Bank has described when it has a decision-making right that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
 1. The Bank has the right to operate the asset; and
 2. The Bank has designed the asset in a way that predetermine how and for what purposes it will be used

The Bank recognises a right-of-use asset and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. The right-of-use asset is amortized over the straight-line method throughout the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Bank uses its incremental borrowing rate as a discount rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ah. Sewa (lanjutan)

Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

ai. Biaya emisi penerbitan saham

Biaya-biaya emisi efek yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahan Modal Disetor - Bersih", sebagai bagian dari Ekuitas pada laporan posisi keuangan.

aj. Provisi

Bank menerapkan PSAK 237, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". PSAK 237 menetapkan kriteria pengakuan dan dasar pengukuran untuk provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi, dan untuk memastikan bahwa informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan pengguna memahami sifat, waktu dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.

Provisi diakui jika Bank memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) jika, sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah liabilitas tersebut dapat diestimasi secara andal.

Provisi diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Peningkatan provisi ini sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban bunga.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ah. Leases (continued)

Right-of-use assets and lease liabilities (continued)

Each leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.

ai. Shares issuance costs

Costs related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction from the "Additional Paid-in Capital - Net" account, as part of Equity section in the statement of financial position.

aj. Provision

The Bank applied SFAS 237, "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets". SFAS 237 provides that appropriate recognition criteria and measurement bases are applied to provisions, contingent liabilities and contingent assets, and to ensure that sufficient information is disclosed in the notes to the financial statements to enable users to understand the nature, timing and amount related to the information.

Provisions are recognized when the Bank has present obligations (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provision is measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. The increase in the provision due to the passage of time is recognized as interest expense.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aj. Provisi (lanjutan)

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan liabilitas kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

ak. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil (*remote*) maka liabilitas kontinjensi diungkapkan. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

al. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tahun pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN

Pengungkapan ini melengkapi pengungkapan pada manajemen risiko (Catatan 44).

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

aj. Provision (continued)

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

ak. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the financial statements but disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

al. Events after the reporting period

Post year end events that provide additional information about the financial position of the Bank as of the statement of financial position date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. USE OF SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS BY MANAGEMENT

These disclosures supplement the commentary on risk management (Note 44).

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Bank adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan substansi ekonomi dari kondisi mendasari yang relevan, mata uang fungsional dan penyajian Bank adalah Rupiah.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 109 yang efektif 1 Januari 2024 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti yang diungkapkan pada Catatan 2d.

Nilai wajar atas instrumen keuangan dan non-keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada tingkat hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2: Teknik penilaian yang menggunakan input selain harga kuotasi yang termasuk di dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik langsung (misalnya, harga) maupun tidak langsung (misalnya, turunan dari harga); dan
- Tingkat 3: Teknik penilaian yang menggunakan input untuk aset dan liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

3. USE OF SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS BY MANAGEMENT (continued)

Judgments (continued)

Going concern

The Bank's management has made an assessment of the Bank's ability to continue as a going concern and is believed that the Bank has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis

Determination of functional currency

The functional currency of the Bank is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the economic substance of the relevant underlying circumstances, the functional and presentation currency of the Bank is the Indonesian Rupiah.

Classification of the financial assets and liabilities

The Bank determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering if the definition set forth in SFAS 109, which was effective January 1, 2024, is fulfilled. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the accounting policies disclosed in Note 2d.

Fair value of financial and non-financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be categorized in the fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant on fair value measurement as a whole as follows:

- Level 1: Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2: Valuation techniques using inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
- Level 3: Valuation techniques using inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penurunan nilai kredit yang diberikan

Bank menelaah kredit yang diberikan yang signifikan secara individual pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Secara khusus, pertimbangan manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan kerugian penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas tersebut, Bank melakukan penilaian atas kondisi keuangan peminjam dan nilai realisasi bersih agunan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan kerugian penurunan nilai.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode pelaporan keuangan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dievaluasi penurunan nilainya sesuai dengan Catatan 21.

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima disetujui secara independen oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.

3. USE OF SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS BY MANAGEMENT (continued)

Judgments (continued)

Impairment losses on loans

The Bank reviews its individual significant loans at each statement of financial position date to assess whether an impairment loss should be recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income. In particular, judgment by the management is required to estimate the amount and timing of future cash flows when determining impairment losses. In estimating these cash flows, the Bank makes judgments about the borrower's financial condition and the net realizable value of collateral. These estimates are based on assumptions from a number of factors and the actual results may differ, which may result the future changes in the impairment losses allowance amount.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting period date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgments are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumption are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Allowances for impairment losses on financial assets

Financial assets accounted for at amortized cost are evaluated for impairment on a basis as described in Note 21.

The specific counterparty component of the total allowances for impairment applies to financial assets evaluated individually for impairment and is based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgments about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable are independently approved by the Risk management Working Unit.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Penurunan nilai timbul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari transaksi penjualan yang mengikat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, model penilaian yang sesuai digunakan untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dipadukan dengan penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas kemungkinan penurunan potensial atas nilai aset non-keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Imbalan pasca kerja

Penentuan liabilitas dan beban imbalan pasca kerja Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Seluruh asumsi ditelaah setiap akhir periode pelaporan. Seperti dijelaskan pada Catatan 2ad, hasil aktual yang berbeda dari asumsi Bank diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Dikarenakan kompleksitas dari penilaian, asumsi dan periode jangka panjang, kewajiban imbalan pasti sangat sensitif terhadap perubahan asumsi.

3. USE OF SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS BY MANAGEMENT (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

Impairment of non-financial assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the specific risks to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators. The value in use calculation is based on a discounted cash flow model.

Management believes that there is no indication of potential impairment in values of non-financial assets as of December 31, 2024 and 2023.

Post-employment benefits

The determination of the Bank's post-employment benefits liability and expense is depend on its selection of certain assumptions used by the independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include discount rates, annual salary increase rate, annual resignation rate, disability rate, retirement age and mortality rate. All assumptions are reviewed at the end of reporting period. As disclosed in Note 2ad, actual results that differ from the Bank's assumptions are recognized as other comprehensive income. Due to the complexity of the valuation, the underlying assumptions and their long-term nature, a defined benefit obligation is highly sensitive to changes in assumptions.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah memadai dan tepat, perbedaan signifikan pada pengalaman aktual Bank atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan pasca kerja.

Estimasi umur manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud

Bank mengestimasi umur manfaat ekonomis dari aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi dari umur manfaat ekonomis aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Bank secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi umur manfaat ekonomis ditelaah paling sedikit setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas. Jumlah dan waktu dari beban yang dicatat untuk setiap periode akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Pengurangan dalam estimasi umur manfaat ekonomis dari aset tetap dan aset takberwujud Bank akan meningkatkan beban operasional lainnya dan menurunkan aset yang dicatat.

Pajak penghasilan

Estimasi signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode dimana hasil tersebut dikeluarkan.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Sebagai akibatnya, terkait dengan sifat bawaannya, terdapat kemungkinan bahwa perhitungan pajak tangguhan berhubungan dengan pola yang kompleks dimana penilaian memerlukan pertimbangan dan tidak diharapkan menghasilkan perhitungan yang akurat.

3. USE OF SIGNIFICANT JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS BY MANAGEMENT (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Post-employment benefits (continued)

The Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Bank's actual experiences or significant changes in its assumptions may materially affect its post-employment benefits liability and expense.

Estimated useful life of fixed assets and intangible asset

The Bank estimates the useful lives of its fixed assets and intangible asset based on expected assets utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behavior. The estimation of the useful lives is based on the Bank's collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

The estimated useful lives are reviewed at least each of end financial reporting and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations can be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any year are affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of the Bank's fixed assets and intangible asset will increase the recorded other operating expenses and decrease respective assets.

Income tax

Significant estimate is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Bank recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Where the final tax outcome of those matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will be recorded at the statement of profit or loss and other comprehensive income in the period in which such determination is made.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences. Significant estimates by management are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profits together with future tax planning strategies. As a result, related to the nature of the default, there is a possibility that the calculation of deferred taxes related to a complex pattern where assessment requires judgment and is not expected to produce an accurate calculation.

4. KAS

Rincian kas adalah sebagai berikut:

	2024	
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ <i>Notional amount of foreign currency (full amount)</i>	Ekuivalen rupiah/ <i>Equivalent rupiah</i>
Rupiah		373.016
Mata Uang Asing		
Dolar Amerika Serikat	23.630.189	380.328
Dolar Singapura	971.242	11.504
Dolar Australia	176.900	1.771
Euro Eropa	95.200	1.595
Riyal Saudi	90.840	389
Poundsterling Inggris	11.355	230
Yuan China	80.658	177
Dolar Hong Kong	61.660	128
Yen Jepang	1.159.000	119
Ringgit Malaysia	26.853	97
Sub jumlah		396.338
Jumlah		769.354

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) masing-masing sebesar Rp26.221 dan Rp25.392.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kas (*cash in safe*) diasuransikan kepada PT Arthagraha General Insurance (pihak ketiga) terhadap risiko pencurian dan lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp6.300 dan Rp6.400. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

Rincian giro pada Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	2024	
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ <i>Notional amount of foreign currency (full amount)</i>	Ekuivalen rupiah/ <i>Equivalent rupiah</i>
Rupiah		2.948.485
Dolar Amerika Serikat	4.749.017	76.435
Jumlah		3.024.920

Saldo giro pada Bank Indonesia (BI) disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

4. CASH

The details of cash are as follows:

	2023		
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ <i>Notional amount of foreign currency (full amount)</i>	Ekuivalen rupiah/ <i>Equivalent rupiah</i>	
Rupiah		329.779	Rupiah
Foreign Currencies			
United States Dollar	1.653.971	25.466	
Singapore Dollar	763.193	8.911	
Australian Dollar	182.495	1.920	
European Euro	88.685	1.511	
Saudi Riyal	-	-	
Great Britain Poundsterling	32.425	636	
China Yuan	160.846	350	
Hongkong Dollar	112.870	222	
Japanese Yen	3.111.000	339	
Malaysian Ringgit	-	-	
Sub total		39.355	Sub total
Total		369.134	Total

As of December 31, 2024 and 2023, the balance in Rupiah includes cash in Automatic Teller Machine (ATM) amounting to Rp26,221 and Rp25,392 respectively.

As of December 31, 2024 and 2023, cash (*cash in safe*) insured with PT Arthagraha General Insurance (third party) against theft and other risks with coverage amounting to Rp6,300 and Rp6,400 respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from such risks.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

The details of current accounts with Bank Indonesia are as follows:

	2023		
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ <i>Notional amount of foreign currency (full amount)</i>	Ekuivalen rupiah/ <i>Equivalent rupiah</i>	
Rupiah		2.585.155	Rupiah
United States Dollar	4.749.017	73.121	United States Dollar
Total		2.658.276	Total

Current accounts with Bank Indonesia (BI) are maintained to comply with Bank Indonesia minimum statutory reserve requirement (GWM).

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Pada tanggal 24 Desember 2013, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/PBI/2013 tentang "Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional". Berdasarkan peraturan tersebut, GWM dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer, GWM Sekunder dan GWM *Loan to Deposit Ratio* (LDR). GWM Primer dalam Rupiah ditetapkan sebesar 8% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah dan GWM Sekunder dalam Rupiah ditetapkan sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah. GWM LDR dalam Rupiah sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank dengan KPM Insentif. GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing. PBI tersebut mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.

Pada tanggal 25 Juni 2015, Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 17/11/PBI/2015 tentang "Perubahan atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional". Berdasarkan peraturan tersebut, GWM dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer, GWM Sekunder dan GWM *Loan to Funding Ratio* (LFR). GWM Primer dalam Rupiah ditetapkan sebesar 8% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah dan GWM Sekunder dalam Rupiah ditetapkan sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah. GWM LFR dalam Rupiah sebesar hasil perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LFR Bank dan LFR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank dan KPM Insentif. GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing. PBI tersebut mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2015. Semua penyebutan LDR dalam PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang "Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional" serta peraturan pelaksanaannya dibaca sebagai LFR sejak tanggal 3 Agustus 2015. Perhitungan GWM LFR mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2015.

Pada tanggal 26 November 2015, Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 17/21/PBI/2015 tentang "Perubahan Kedua atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional". Berdasarkan peraturan tersebut, GWM Primer dalam Rupiah berubah dari sebesar 8% menjadi sebesar 7,5% dari DPK dalam Rupiah. PBI tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2015.

Pada tanggal 10 Maret 2016, Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 18/3/PBI/2016 tentang "Perubahan Ketiga atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional". Berdasarkan peraturan tersebut, GWM Primer dalam Rupiah berubah dari sebesar 7,5% menjadi sebesar 6,5% dari DPK dalam Rupiah. PBI tersebut mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2016.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

On December 24, 2013, Bank Indonesia issued a regulation (PBI) No. 15/15/PBI/2013 regarding "The Minimum Statutory Reserves at Bank Indonesia for Commercial Banks in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks". In accordance with such regulation, the minimum ratio of Statutory Reserves consist of Primary Minimum Statutory Reserves, Secondary Minimum Statutory Reserves and Loan to Deposit Ratio (LDR) Minimum Statutory Reserves. Primary Minimum Statutory Reserves in Rupiah is 8% of Third Party Funds (TPF) in Rupiah and Secondary Minimum Statutory Reserves in Rupiah is 4% of TPF in Rupiah. LDR Minimum Statutory Reserves in Rupiah is determined in computation between parameters under and over disincentive for the difference between the Bank's LDR and LDR target by taking into account the difference between the Capital Adequacy Ratio (CAR) and CAR Incentive. The Minimum Statutory Reserves in foreign currencies is 8% from TPF in foreign currencies. The PBI was effective from December 31, 2013.

On June 25, 2015, Bank Indonesia issued PBI No. 17/11/PBI/2015 on "The Amendment of PBI No. 15/15/PBI/2013 on Commercial Banks Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks". Based on the regulation, the Minimum Statutory Reserves consist of Primary Minimum Statutory Reserves, Secondary Minimum Statutory Reserves and Loan to Funding Ratio (LFR) Minimum Statutory Reserves. Primary Minimum Statutory Reserves in Rupiah is 8% of Third Party Funds (TPF) in Rupiah and Secondary Minimum Statutory Reserves in Rupiah is 4% of TPF in Rupiah. LFR Minimum Statutory Reserves in Rupiah is determined in computation between parameters under and over disincentive for the difference between the Bank's LFR and LFR target by taking into account the difference between the Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) and Incentive CAR. The Minimum Statutory Reserves in foreign currencies is 8% from TPF in foreign currencies. The PBI was effective since June 25, 2015. All LDR terms in PBI No. 15/15/PBI/2013 on "Commercial Bank's Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Bank" and its implementation guidance is read as LFR since August 3, 2015. The GWM LFR calculation was effective since August 3, 2015.

On November 26, 2015, Bank Indonesia issued PBI No. 17/21/PBI/2015 on "The Second Amendment of PBI No. 15/15/PBI/2013 on Commercial Bank's Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks". Based on the regulation, the Primary Minimum Statutory Reserves in Rupiah was changed from 8% to become 7.5% of TPF in Rupiah. The PBI was effective since December 1, 2015.

On March 10, 2016, Bank Indonesia issued PBI No. 18/3/PBI/2016 regarding "The Third Amendment of PBI No. 15/15/PBI/2013 on Commercial Bank's Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks". Based on the regulation, the Primary Minimum Statutory Reserves in Rupiah changed from 7.5% to 6.5% of TPF in Rupiah. The PBI was effective since March 16, 2016.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Pada tanggal 18 Agustus 2016, Bank Indonesia menerbitkan PBI No.18/14/PBI/2016 tentang “Perubahan Keempat atas PBI No.15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional”. Berdasarkan peraturan tersebut, batas bawah GWM LFR target berubah dari 78% menjadi 80%.

PBI No. 20/3/PBI/2018 tanggal 05 April 2018 dan PADG No. 20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum bagi Bank Umum konvensional dalam Rupiah dan Valuta Asing, setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas. Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer ditetapkan sebesar rata-rata 6,5% dan secara harian sebesar 3,5% dan GWM Sekunder ditetapkan sebesar 4% serta GWM *Loan to Funding Ratio* (LFR) sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LFR bank dan LFR target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) bank dan KPM Insentif. GWM dalam Dolar Amerika Serikat ditetapkan sebesar 8%.

PADG No. 22/10/PADG/2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Dewan Gubernur No. 20/10/PAGD/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah mengatur GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar rata-rata 3,5% DPK BUK dalam rupiah selama periode pelaporan tertentu, yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5% dan rata-rata sebesar 3%.

PADG No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah mengatur GWM dalam rupiah ditetapkan 9% DPK BUK dalam rupiah selama periode pelaporan tertentu, dan Pemberian remunerasi sebesar 1,5% terhadap pemenuhan kewajiban GWM setelah memperhitungkan insentif bagi bank-bank dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

PADG GWM ini juga mengonsolidasikan seluruh perubahan pada PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, tanpa mengubah substansi pengaturan selain perubahan besaran GWM dan bagian yang diperhitungkan untuk mendapat remunerasi. Selanjutnya, pada saat PADG GWM Nomor 24/8/PADG/2022 mulai berlaku tanggal 1 Juli 2022, PADG Nomor 20/10/PADG/2018 beserta perubahan-perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

On August 18, 2016, Bank Indonesia issued PBI No.18/14/PBI/2016 regarding “The Fourth Amendment of PBI No.15/15/PBI/2013 on Commercial Bank’s Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks”. Based on the regulation, the parameters under of target GWM LFR changed from 78% to 80%.

PBI No. 20/3/PBI/2018 dated April 05, 2018 and PADG No. 20/30/PADG/2018 tanggal November 30, 2018 regarding Minimum Statutory Reserves (GWM) with Commercial Banks in Rupiah and foreign currencies, each bank in Indonesia is required to have a minimum demand deposit balance in Bank Indonesia as liquidity reserve. The GWM in Rupiah consists of Primary GWM which is set at an average of 6.5% and 3.5% on a daily basis and the Secondary GWM which is set at 4% and GWM *Loan to Funding Ratio* (LFR GWM) which is determined based on parameters under disincentive and over disincentive for the difference between the bank’s LFR and target LFR by taking into account the difference between the bank’s Capital Adequacy Ratio (CAR) and CAR incentive. GWM in United States Dollar is set at 8%.

PADG No.22/10/PADG/2020 concerning the Fifth Amendment to the Regulation of the Board of Governors No.20/10/PAGD/2018 concerning Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Exchange for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units regulates the Statutory Reserves in rupiah set at an average of 3.5% BUK TPF in rupiahs during a certain reporting period , which must be met daily by 0.5% and an average of 3%.

PADG No. 24/8/PADG/2022 dated June 30, 2022 concerning Regulations for the Implementation of Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units stipulate that GWM in rupiah is set at 9% DPK BUK in rupiah during the reporting period certain conditions, and Providing remuneration of 1.5% for fulfilling GWM obligations after taking into account incentives for banks in channeling credit/financing to priority sectors and MSMEs and/or meeting the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (MIFR) target.

PADG GWM also consolidates all changes to PADG No. 20/10/PADG/2018 concerning Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, without changing the substance of the regulation other than changes in the GWM amount and the portion calculated for remuneration. Furthermore, when PADG GWM Number 24/8/PADG/2022 comes into force on July 1, 2022, PADG Number 20/10/PADG/2018 and its amendments are revoked and declared not valid.

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of and For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Rupiah		
GWM Primer	13,03%	12,73%
GWM Sekunder/PLM	22,35%	11,56%
Dolar Amerika Serikat	4,36%	4,96%

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai GWM.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Rupiah	0,57%	0,52%
Dolar Amerika Serikat	0,00%	0,00%

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, *Loan to Funding Ratio* (LFR) Bank lebih kecil dari batas atas LFR target dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih besar dari KPMM Insentif Bank Indonesia.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The Bank's Minimum Statutory Reserves (GWM) ratio as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Rupiah
Primary GWM
Secondary GWM
United States Dollar

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank has complied with Bank Indonesia regulation on the GWM.

The average interest rates per annum are as follows:

Rupiah
United States Dollar

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank's Loan to Funding Ratio (LFR) was lower than the upper limit of the target LFR and the Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) was greater than Bank Indonesia's CAR Incentives.

6. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang dan bank

	2024		2023	
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ <i>Notional amount of foreign currency (full amount)</i>	Ekuivalen rupiah/ <i>Equivalent rupiah</i>	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ <i>Notional amount of foreign currency (full amount)</i>	Ekuivalen rupiah/ <i>Equivalent rupiah</i>
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Central Asia Tbk		80.920		93.615
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		22.099		21.554
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		17.543		4.588
PT Bank CIMB Niaga Tbk		5.828		5.908
PT Bank Permata Tbk		3.999		177
Bank Pembangunan Daerah NTT		250		250
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		3		3
Sub jumlah		130.642		126.095

Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Permata Tbk
Bank Pembangunan Daerah NTT
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Sub total

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of and For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang dan bank (lanjutan)

	2024		2023	
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ Notional amount of foreign currency (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Equivalent rupiah	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ Notional amount of foreign currency (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Equivalent rupiah
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.985.384	48.050	3.275.617	50.434
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.598.640	41.825	2.101.443	32.356
PT Bank ICBC Indonesia	1.264.684	20.355	1.264.363	19.467
PT Bank Central Asia Tbk	1.254.129	20.185	1.666.908	25.665
Kookmin Bank, Seoul	819.764	13.194	2.472.407	38.068
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	753.343	12.125	1.000.000	15.397
Sub jumlah	9.675.944	155.734	11.780.738	181.387
<u>Dolar Singapura</u>				
United Overseas Bank Ltd, Singapura	2.031.682	24.064	1.186.204	13.851
PT Bank UOB Indonesia	112.648	1.335	612.658	7.154
Sub jumlah	2.144.330	25.399	1.798.862	21.005
<u>Yen Jepang</u>				
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo	10.548.222	1.087	12.053.422	1.312
<u>Euro Eropa</u>				
PT Bank ICBC Indonesia	31.131	522	57.571	981
PT Bank CIMB Niaga Tbk	133.508	2.237	-	-
Sub jumlah	164.639	2.759	57.571	981
<u>Poundsterling Inggris</u>				
PT Bank ICBC Indonesia	368.807	7.457	222.279	4.363
<u>Yuan China</u>				
PT Bank ICBC Indonesia	7.795.610	17.139	185.868	403
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	357.906	787	-	-
Bank of China, Jakarta	1.913.338	4.206	8.638	19
Sub jumlah	10.066.854	22.132	194.506	422
<u>Dolar Australia</u>				
PT Bank Central Asia Tbk	298.635	2.990	180.025	1.894

**6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
(continued)**

a. By currency and bank (continued)

<u>United States Dollar</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk
Kookmin Bank, Seoul
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Sub total
<u>Singapore Dollar</u>
United Overseas Bank Ltd, Singapura
PT Bank UOB Indonesia
Sub total
<u>Japanese Yen</u>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo
<u>European Euro</u>
PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Sub total
<u>Great Britain Poundsterling</u>
PT Bank ICBC Indonesia
<u>China Yuan</u>
PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Bank of China, Jakarta
Sub total
<u>Australian Dollar</u>
PT Bank Central Asia Tbk

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang dan bank (lanjutan)

	2024	
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ Notional amount of foreign currency (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Equivalent rupiah
Dolar Hong Kong		
PT Bank China		
Construction Bank		
Indonesia Tbk	86.433	179
PT Bank Negara Indonesia		
(Persero) Tbk	549.667	1.140
Sub jumlah	636.100	1.319
Jumlah		349.519
Cadangan kerugian		
penurunan nilai		(89)
Jumlah - bersih		349.430

b. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2024
Pihak ketiga	
Mata Uang Asing	
Saldo awal tahun	3
Penyisihan	269
Pemulihan	(179)
Selisih kurs karna penjabaran mata	
uang asing	(4)
Penghapusan	-
Saldo akhir tahun	89

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai giro pada bank lain secara kolektif dengan menggunakan bukti objektif penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo giro pada bank lain diklasifikasikan "Lancar". Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya giro pada bank lain.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat giro pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan dan yang dibatasi penggunaannya.

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

	2024
Rupiah	0,54%
Mata Uang Asing	0,00%

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

a. By currency and bank (continued)

	2023	
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ Notional amount of foreign currency (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Equivalent rupiah
Hong Kong Dollar		
PT Bank China		
Construction Bank		
Indonesia Tbk	-	-
PT Bank Negara		
Indonesia (Persero) Tbk	426.801	841
Sub total	426.801	841
Total		338.300
Allowance for impairment		
losses		(3)
Total - net		338.297

b. Changes in allowance for impairment losses are as follows:

	2023	
Third party		
Foreign Currency		
Balance at beginning of year	343	
Elimination		
Recovery	-	
Exchange rate differences due to the		
translation of foreign currencies	(58)	
Write off	(282)	
Balance at end of year	3	

The Bank assesses the impairment of current accounts with other banks collective by using objective evidences of impairment.

As of December 31, 2024 and 2023, the balance of current accounts with other banks were classified as "Current". Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible current accounts with other banks.

As of December 31, 2024 and 2023, there are no balance of current accounts with other banks used as collateral and restricted.

c. The average interest rates per annum are as follows:

	2023	
Rupiah	0,34%	Rupiah
Foreign Currencies	0,02%	Foreign Currencies

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan bank

	2024	
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ Notional amount of foreign currency (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Equivalent rupiah
<u>Rupiah</u>		
Deposit facility		
Bank Indonesia		1.346.804
Penempatan pada Bank – Call Money		280.000
Penempatan pada Bank – Deposito		100.000
Sub jumlah		1.726.804
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Term deposits		
Bank Indonesia	28.000.000	450.660
Jumlah		2.177.464

b. Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

	2024
<u>Rupiah</u>	
Kurang dari 1 bulan	1.726.804
<u>Dolar Amerika Serikat</u>	
Kurang dari 1 bulan	450.660
Jumlah - bersih	2.177.464

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

	2024
Rupiah	5,15%
Dolar Amerika Serikat	5,00%

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dikategorikan “Lancar”.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sehingga tidak diperlukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang digunakan sebagai jaminan.

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. By type, currency and bank

	2023	
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ Notional amount of foreign currency (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Equivalent rupiah
<u>Rupiah</u>		
Deposit facility		
Bank Indonesia		279.959
Placements with Banks – Call Money		-
Placements with Banks – Deposits		-
Sub total		279.959
<u>United States Dollar</u>		
Term deposits		
Bank Indonesia	28.000.000	431.116
Total		711.075

b. By remaining maturity period

	2023
<u>Rupiah</u>	
Less than 1 month	279.959
<u>United States Dollar</u>	
Less than 1 month	431.116
Total – net	711.075

c. The average interest rates per annum are as follows:

	2023
Rupiah	5,15%
United States Dollar	5,00%

As of December 31, 2024 and 2023, all placements with Bank Indonesia and other banks are classified as “Current”.

As of December 31, 2024 and 2023, management believes that there is no impairment on placements with Bank Indonesia others banks, therefore no allowance for impairment losses is provided.

As of December 31, 2024 and 2023, there are no balance of placements with Bank Indonesia and other banks used as collateral.

8. EFEK-EFEK

a. Berdasarkan tujuan, jenis dan mata uang

	2024	2023
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>		
Rupiah		
SRBI	45.507	-
Surat Utang Non-Bank	719.796	69.798
Obligasi Pemerintah	9.774	237.366
	775.077	307.164
Dollar Amerika Serikat		
Obligasi Pemerintah	206.358	-
Sub jumlah	981.435	307.164
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>		
Rupiah		
Obligasi Pemerintah	242.974	198.560
SBI	222.807	-
Obligasi Korporasi	188.936	462.584
Obligasi Ritel	79.861	78.449
Obligasi Bank	-	206.008
SRBI	-	143.124
	734.578	1.088.725
Dollar Amerika Serikat		
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	145.467	153.153
Sub jumlah	880.045	1.241.878
<u>Biaya perolehan yang diamortisasi</u>		
Rupiah		
Obligasi Korporasi	3.018.826	2.342.527
SRBI	1.786.406	-
Obligasi Pemerintah	1.570.085	1.262.344
Obligasi Ritel	119.025	199.269
Obligasi Bank	14.963	157.000
Medium Term Notes (MTN)	-	200.000
	6.509.305	4.161.140
Dollar Amerika Serikat		
Obligasi Pemerintah	80.511	77.914
Obligasi Non-Bank	51.480	-
	131.991	77.914
Sub jumlah	6.641.296	4.239.054
Jumlah	8.502.776	5.788.096
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.214)	(682)
Jumlah – bersih	8.501.562	5.787.414

8. MARKETABLE SECURITIES

a. By purpose, type and currency

<u>Fair value through profit or loss</u>
Rupiah
SRBI
Non-Bank Bonds
Government Bonds
United States Dollar
Government Bonds
Sub total
<u>Fair value through other comprehensive income</u>
Rupiah
Government Bonds
SBI
Corporate Bonds
Retail Bonds
Bank Bonds
SRBI
United States Dollar
State Sharia Securities (SBSN))
Sub total
<u>Amortized cost</u>
Rupiah
Corporate Bond
SRBI
Government Bonds
Retail Bond
Bank Bond
Medium Term Notes (MTN)
United States Dollar
Government Bonds
Non-Bank Bonds
Sub total
Total
Allowance for impairment losses
Total – net

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

- b. Berikut ini adalah ikhtisar peringkat dari pemeringkat efek-efek Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan Fitch Rating Indonesia untuk tujuan investasi yang dimiliki Bank untuk periode berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023:

Nama penerbit/ <i>Publisher name</i>	2024	2023
	Peringkat/ <i>Rating</i>	Peringkat/ <i>Rating</i>
PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	AAA	AAA
PT Astra Sedaya Finance	AAA	AAA
PT Bank Negara Indonesia Tbk	AAA	AAA
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	AAA	AAA
PT Bank Sinar Harapan Bali	-	AA
PT Bank Tabungan Negara Tbk	-	AA+
PT Barito Pacific Tbk	A+	A+
PT BFI Finance Indonesia Tbk	AA-	AA-
PT BRI Multifinance	AA	AA
PT Federal International Finance	AAA	AAA
PT Indonesia Infrastructure Finance	AAA	AAA
PT Kereta Api Indonesia	AAA	AAA
PT Merdeka Copper Gold Tbk	A+	A+
PT Pegadaian	AAA	AAA
PT Permodalan Nasional Madani	AA+	AA
PT Perusahaan Listrik Negara	BBB	-
PT Perusahaan Pengelola Aset	AA	AA
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	AAA	-
PT Protelindo Tbk	-	AAA
PT Sampoerna Agro Tbk	A	A
PT Sarana Multi Infrastruktur	AAA	AAA
PT Sarana Multigriya Finansial	AAA	AAA
PT Semen Indonesia Tbk	-	AA+
PT Sinar Mas Agro Resources Tech Tbk	AA-	AAA
PT Surya Artha Nusantara Finance	AA	AA
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	AA+	AA+
PT Toyota Astra Financial Services	AAA	AA+
MTN PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	-	AAA
Sukuk PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	AAA	AAA
Sukuk PT Pegadaian	AAA	-
Sukuk PT Permodalan Nasional Madani	AA+	AA+
Sukuk PT Kereta Api Indonesia	AAA	-

- c. Suku bunga per tahun efek-efek adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Rupiah		
Obligasi Pemerintah	6,13% - 11,00%	3,90% - 11,00%
Obligasi Korporasi	5,50% - 10,55%	5,30% - 7,00%
Obligasi Ritel	4,90%	4,90% - 5,57%
Obligasi Bank	5,75% - 6,90%	6,50%
Obligasi Non-Bank	10,50%	-
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	6,80% - 7,50%	6,32% - 6,90%
Medium Term Notes (MTN)	-	6,20%
Tagihan Wesel Ekspor	9,00%	9,00%
Mata uang asing		
Obligasi Pemerintah	2,30% - 4,13%	3,90% - 4,35%
Obligasi Korporasi	1,50% - 5,45%	-

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

- b. The following is the overview of ratings from ratings institution Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) and Fitch Rating Indonesia of securities for investment purposes by the Bank for period ended December, 31 2024 and December 31, 2023:

- c. Interest Rate per annum of securities are as follows:

Rupiah	
Government Bonds	
Corporate Bonds	
Retail Bonds	
Bank Bonds	
Non-Bank Bonds	
Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI)	
Medium Term Notes (MTN)	
Export Bills Receivable	
Foreign Currency	
Government Bonds	
Corporate Bonds	

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

d. Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo:

	2024	2023
Rupiah		
Nilai wajar melalui laba rugi		
1 sampai dengan 3 bulan	-	-
3 sampai dengan 12 bulan	719.796	216.915
1 sampai dengan 2 tahun	45.507	40.054
Lebih dari 2 tahun	9.774	50.195
Sub jumlah	775.077	307.164
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
1 sampai dengan 3 bulan	159.856	104.397
3 sampai dengan 12 bulan	349.627	579.205
1 sampai dengan 2 tahun	92.506	298.376
Lebih dari 2 tahun	132.589	106.747
Sub jumlah	734.578	1.088.725
Biaya perolehan yang diamortisasi		
1 sampai dengan 3 bulan	1.037.926	649.320
3 sampai dengan 12 bulan	2.912.215	1.350.106
1 sampai dengan 2 tahun	1.182.428	1.301.935
Lebih dari 2 tahun	1.376.736	859.779
Sub jumlah	6.509.305	4.161.140
Dolar Amerika Serikat		
Nilai wajar melalui laba rugi		
Sampai dengan 1 tahun	206.358	-
Sub jumlah	206.358	-
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Sampai dengan 1 tahun	145.467	153.153
Sub jumlah	145.467	153.153
Biaya perolehan yang diamortisasi		
Sampai dengan 1 tahun	80.511	-
Lebih dari 1 tahun	51.480	77.914
Sub jumlah	131.991	77.914
Jumlah	8.502.776	5.788.096
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.214)	(682)
Jumlah – bersih	8.501.562	5.787.414

e. Berdasarkan efek-efek pemerintah dan bukan pemerintah

	2024	2023
Rupiah		
Efek-efek Pemerintah	1.822.833	1.698.270
Efek-efek bukan Pemerintah	6.196.127	3.858.759
	8.018.960	5.557.029
Dolar Amerika Serikat		
Efek-efek Pemerintah	286.869	77.914
Efek-efek bukan Pemerintah	196.947	153.153
	483.816	231.067
Jumlah	8.502.776	5.788.096
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.214)	(682)
Jumlah efek-efek – bersih	8.501.562	5.787.414

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

d. By remaining period to maturity

Rupiah	
Fair value through profit or loss	
1 up to 3 months	
3 up to 12 months	
1 up to 2 years	
More than 2 years	
Sub total	
Fair value through other comprehensive income	
1 up to 3 months	
3 up to 12 months	
1 up to 2 years	
More than 2 years	
Sub total	
At amortized cost	
1 up to 3 months	
3 up to 12 months	
1 up to 2 years	
More than 2 years	
Sub total	
United States Dollar	
Fair value through profit or loss	
Up to 1 year	
Sub total	
Fair value through other comprehensive income	
Up to 1 year	
Sub total	
At amortized cost	
Up to 1 year	
More than 1 year	
Sub total	
Total	
Allowance for impairment losses	
Total marketable securities – net	

e. By government and non-government securities

Rupiah	
Government securities	
Non-Government securities	
United States Dollar	
Government securities	
Non-Government securities	
Total	
Allowance for impairment losses	
Total marketable securities – net	

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

- f. Perubahan keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek yang nilai wajar melalui komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal tahun – sebelum pajak penghasilan tangguhan	2.886	17.506
Kerugian yang belum direalisasi selama tahun berjalan	(1.154)	(14.620)
Saldo akhir tahun – sebelum pajak penghasilan tangguhan	1.732	2.886
Pajak penghasilan tangguhan (Catatan 23b)	(325)	(544)
Saldo akhir tahun – setelah pajak penghasilan tangguhan	1.407	2.342

- g. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal tahun	683	548
Penyisihan (pemulihan) kerugian penurunan nilai	533	138
Selisih kurs karna penjabaran mata uang asing	(2)	(3)
Saldo akhir tahun	1.214	683

Keuntungan penjualan efek-efek untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp53.289 dan Rp28.839.

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai efek-efek secara kolektif dengan menggunakan Vasicek.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya efek-efek.

Bank memiliki efek yang dijamin dengan total nilai wajar sebesar Rp516.412. Efek ini dijamin berdasarkan perjanjian repurchase agreement (repo) dengan pihak perbankan/lembaga keuangan tertentu sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, seluruh efek-efek diklasifikasikan “Lancar”.

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

- f. Changes in unrealized gain from changes in fair value of through other comprehensive income are as follows:

Balance at beginning of year- before deferred income tax
Unrealized loss during the year

Balance at end of year - before deferred income tax
Deferred income tax (Note 23b)
Balance at end of year – after deferred income tax

- g. Changes in the allowance for impairment losses are as follows:

Balance at beginning of year
Allowance (recovery) of impairment losses
Exchange rate differences due to the translation of foreign currencies
Balance at end of year

Gains on securities sale for the period ended December, 31 2024 and December 31, 2023 amounted to Rp53,289 and Rp28,839 respectively.

The Bank assesses the impairment of marketable securities collective using Vasicek

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible marketable securities.

The Bank has securities pledged as collateral with a total fair value of Rp516,412. These securities are pledged based on a repurchase agreement (repo) with certain banks/financial institutions as collateral for loans received.

As of December, 31 2024 and December 31, 2023, all marketable securities are classified as “Current”.

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of and For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

9. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL

2024							
	Tingkat suku bunga (%) Interest rate (%)	Tanggal pembelian/ Purchase date	Tanggal penjualan kembali/ Range of resale date	Harga penjualan kembali/ Resale price	Pendapatan bunga yang belum diakui/ Unearned interest	Nilai tercatat/ Carrying amount	
Transaksi dengan Bank Indonesia							Transactions with Bank Indonesia
Surat Utang Negara							Government Bonds
VR0034 - 020368	6,00	27 Des/ Dec 2024	3 Jan/ Jan 2025	98.923	33	98.890	VR0034 - 020368
VR0034 - 020376	6,00	31 Des/ Dec 2024	7 Jan/ Jan 2025	495.016	494	494.522	VR0034 - 020376
VR0042 - 020370	6,00	30 Des/ Dec 2024	6 Jan/ Jan 2025	98.153	82	98.071	VR0042 - 020370
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia							Bank Indonesia
001063-800005-061	6,72	25 Nov/ Nov 2024	30 Jan/ Jan 2025	193.351	1.034	192.317	Rupiah Securities
FR0090 - 020377	6,00	31 Des/ Dec 2024	31 Jan/ Jan 2025	92.772	507	92.265	001063-800005-061
Jumlah				978.215	2.150	976.065	FR0090 - 020377
Cadangan kerugian penurunan nilai				-	-	(2)	Total
Jumlah - bersih				978.215	2.150	976.063	Allowance for impairment losses
							Total - net
2023							
	Tingkat suku bunga (%) Interest rate (%)	Tanggal pembelian/ Purchase date	Tanggal penjualan kembali/ Range of resale date	Harga penjualan kembali/ Resale price	Pendapatan bunga yang belum diakui/ Unearned interest	Nilai tercatat/ Carrying amount	
Obligasi non bank							Obligasi non bank
PT.Inigo Global							PT.Inigo Global
Capital - 019628	13,50	22 Des/Dec 2023	22 Apr/Apr 2024	130.719	5.250	125.469	Capital - 019628
Jumlah				130.719	5.250	125.469	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai				-	-	-	Allowance for impairment losses
Jumlah bersih				130.719	5.250	125.469	Total - net

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	-	1	Balance at beginning of year
Penyisihan kerugian penurunan nilai	2	-	Allowance for impairment losses
Penghapusan kerugian penurunan nilai	-	(1)	Write-off of impairment losses
Saldo akhir tahun	2	-	Balance at end of year

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali secara kolektif dengan menggunakan Vasicek.

The Bank assesses the impairment of securities purchased under agreement to resell collective by using Vasicek.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible securities purchased under agreement to resell.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, seluruh efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali diklasifikasikan "Lancar".

As of December, 31 2024 and December 31, 2023, all securities purchased under agreement to resell are classified as "Current".

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Bank melakukan transaksi derivatif dalam bentuk pembelian dan penjualan *spot* dan *forward* valuta asing.

Risiko pasar dari transaksi derivatif timbul dari potensi perubahan nilai akibat fluktuasi kurs mata uang asing, sedangkan risiko kredit timbul dalam hal pihak lain tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.

Jangka waktu dari pembelian dan penjualan berjangka valuta asing berkisar antara dan 3 sampai dengan 6 hari pada tanggal 31 Desember 2024.

Rincian tagihan dan liabilitas derivatif adalah sebagai berikut:

2024			
	Nilai nosional (angka penuh)/ <i>Notional value</i> (full amount)	Tagihan derivatif/ <i>Derivative</i> <i>receivables</i>	Liabilitas derivatif/ <i>Derivative</i> <i>payables</i>
Pihak ketiga			
<u>Penjualan <i>forward</i> valuta asing</u>			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	SGD 2.000.000	48	-
Jumlah		48	-
2023			
	Nilai nosional (angka penuh)/ <i>Notional value</i> (full amount)	Tagihan derivatif/ <i>Derivative</i> <i>receivables</i>	Liabilitas derivatif/ <i>Derivative</i> <i>payables</i>
Pihak ketiga			
<u>Penjualan <i>forward</i> valuta asing</u>			
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1960 Tbk	USD 1.000.000	23	-
PT Bank Negara Indonesia Tbk	USD 5.000.000	-	717
PT Bank Mega Tbk	USD 2.500.000	-	231
Sub Jumlah		23	948
<u>Pembelian <i>spot</i></u>			
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	USD 1.000.000	12	-
PT Bank BNI (Persero) Tbk	USD 1.000.000	-	53
PT Bank BNI (Persero) Tbk	USD 1.000.000	-	25
PT Bank Sinarmas Tbk	USD 1.000.000	-	8
PT Bank Sinarmas Tbk	USD 1.000.000	-	23
Sub Jumlah		12	109
Jumlah		35	1.057

Pada tanggal 31 Desember 2024, seluruh tagihan derivatif diklasifikasikan “Lancar”.

Pada tanggal 31 Desember 2024, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas tagihan derivatif, sehingga tidak diperlukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

10. DERIVATIVE RECEIVABLES AND PAYABLES

The Bank's derivative instruments principally consist of foreign currencies *spot* and *forward* sales and purchases.

The market risk of derivative transactions arise from potential changes in value due to fluctuations in foreign exchange rates, while credit risks is the possibility that a loss may occur due to the failure of counterparty to fulfill its obligation according to the term of contract.

Term of the Bank's forward and spot foreign exchange contracts ranging from and 3 to 6 days as of December 31, 2024.

The details of derivative receivables and payables are as follows:

Third parties
Foreign currencies forward sales
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total

Third parties
Foreign currencies forward sales
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1960 Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Mega Tbk
Sub total

Foreign currencies spot purchase
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
PT Bank BNI (Persero) Tbk
PT Bank BNI (Persero) Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk
Sub total

As of December 31, 2024, all derivative receivables are classified as “Current”.

As of December 31, 2024, management believes that there is no impairment on derivative receivables, therefore no allowance for impairment losses was provided.

11. PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

Rincian pendapatan bunga yang masih akan diterima adalah sebagai berikut:

	2024	
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ <i>Notional amount of foreign currency (full amount)</i>	Ekuivalen rupiah/ <i>Equivalent rupiah</i>
<u>Rupiah</u>		
Kredit yang diberikan		193.721
Efek-efek		56.372
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		438
Sub jumlah		250.531
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Kredit yang diberikan	28.271	455
Efek-efek	121.900	1.962
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	17.345	279
Sub jumlah		2.696
<u>Dolar Singapura</u>		
Kredit yang diberikan	3.220	38
Sub jumlah		38
Jumlah		253.265

12. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Rincian biaya dibayar di muka adalah sebagai berikut:

	2024
Sewa dan operasional	106.154
Pemasaran	9.312
Renovasi dan pemeliharaan gedung	6.274
Karyawan	1.070
Asuransi	-
Jumlah	122.810

11. ACCRUED INTEREST RECEIVABLES

The details of accrued interest receivables are as follows:

	2023	
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ <i>Notional amount of foreign currency (full amount)</i>	Ekuivalen rupiah/ <i>Equivalent rupiah</i>
<u>Rupiah</u>		
Kredit yang diberikan		273.272
Efek-efek		47.944
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		-
Sub total		321.216
<u>United States Dollar</u>		
Kredit yang diberikan	87.293	1.344
Efek-efek	235.463	3.625
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.460	191
Sub total		5.160
<u>Singapore Dollar</u>		
Kredit yang diberikan	3.912	46
Sub total		46
Total		326.422

12. PREPAID EXPENSES

The details of prepaid expenses are as follows:

	2023
Rent and operational	137.041
Marketing	6.265
Renovation and maintenance building	1.028
Employee	302
Insurance	5
Total	144.641

13. KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan pihak

Rincian kredit yang diberikan berdasarkan jenis dan pihak adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pihak berelasi (Catatan 38)		
<u>Rupiah</u>		
<i>Fixed loans</i>	143.696	99.940
Kredit pemilikan rumah	104.631	116.482
<i>Revolving loans</i>	73.359	94.698
Pinjaman rekening koran	5.128	-
	326.814	311.120
Pihak ketiga		
<u>Rupiah</u>		
<i>Revolving loans</i>	4.031.828	4.570.194
<i>Fixed loans</i>	3.300.576	3.608.171
Kredit pemilikan rumah dan apartemen	2.050.615	2.283.825
Kredit sindikasi	255.432	534.357
Pinjaman rekening koran	200.083	175.278
Pinjaman karyawan	120.782	41.940
Kredit usaha rakyat	42.331	241
Kredit tanpa agunan	21.984	24.040
Kredit pemilikan mobil	165	213
Kredit pemilikan kios	-	82.148
	10.023.796	11.320.407
<u>Mata Uang Asing</u>		
<i>Revolving loans</i>	134.498	302.087
<i>Fixed loans</i>	120.371	213.755
	254.869	515.842
Sub jumlah	10.278.665	11.836.249
Jumlah kredit	10.605.479	12.147.369
Cadangan kerugian penurunan nilai	(531.907)	(510.636)
Jumlah kredit – bersih	10.073.572	11.636.733

Rincian kredit yang diberikan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ Notional amount of foreign currency (full amount)	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ Notional amount of foreign currency (full amount)	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Pihak berelasi (Catatan 38)	326.814	311.120	Related parties (Note 38)
Pihak ketiga	10.023.796	11.320.407	Third parties
Sub jumlah	10.350.610	11.631.527	Sub total

13. LOANS

a. By type, currency and party

The details of loans based on type and party are as follows:

	Related parties (Note 38)
	<u>Rupiah</u>
	<i>Fixed loans</i>
	Housing ownership loans
	<i>Revolving loans</i>
	Overdraft
	Third parties
	<u>Rupiah</u>
	<i>Revolving loans</i>
	<i>Fixed loans</i>
	Housing and apartment ownership loans
	Syndicated loans
	Overdraft
	Employee loans
	Micro community commercial loans
	Unsecured loans
	Car loans
	Kiosk loans
	<u>Foreign Currencies</u>
	<i>Revolving loans</i>
	<i>Fixed loans</i>
	Sub total
	Total loans
	Allowance for impairment losses
	Total loans – net

The details of loans based on currencies are as follows:

13. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

- a. Berdasarkan jenis, mata uang dan pihak (lanjutan)
Rincian kredit yang diberikan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut (lanjutan):

	2024	
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ Notional amount of foreign currency (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Equivalent rupiah
<u>Mata Uang Asing</u>		
Pihak ketiga		
Dolar Amerika		
Serikat	15.032.009	241.941
Dolar Singapura	1.091.425	12.928
Sub jumlah		254.869
Jumlah		10.605.479
Cadangan kerugian penurunan nilai		(531.907)
Jumlah kredit - bersih		10.073.572

- b. Berdasarkan sektor ekonomi

	2024
Pihak berelasi (Catatan 38)	
<u>Rupiah</u>	
Restoran dan hotel	67.012
Lain-lain	259.802
Sub jumlah	326.814
Pihak ketiga	
<u>Rupiah</u>	
Industri	1.772.453
Pertanian dan pertambangan	728.176
Restoran dan hotel	595.349
Perdagangan	585.946
Transportasi dan komunikasi	501.596
Konstruksi	327.040
Jasa	5.317
Lain-lain	5.507.919
	10.023.796

<u>Mata Uang Asing</u>	
Pertanian dan pertambangan	122.504
Industri	121.281
Perdagangan	10.739
Lain-lain	345
	254.869
Sub jumlah	10.278.665
Jumlah kredit	10.605.479
Cadangan kerugian penurunan nilai	(531.907)
Jumlah kredit – bersih	10.073.572

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, persentase kredit yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah masing-masing sebesar 3,39% dan 2,70%.

13. LOANS (continued)

- a. By type, currency and party (continued)
The details of loans based on currencies are as follows (continued):

	2023	
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ Notional amount of foreign currency (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Equivalent rupiah
<u>Foreign Currencies</u>		
Third parties		
United States Dollar	32.484.064	500.158
Singapore Dollar	1.343.243	15.684
Sub total		515.842
Total		12.147.369
Allowance for impairment losses		(510.636)
Total loans – net		11.636.733

- b. By economic sector

	2023
Related parties (Note 38)	
<u>Rupiah</u>	
Restaurant and hotel	49.364
Others	261.756
Sub total	311.120
Third parties	
<u>Rupiah</u>	
Industry	1.188.512
Agribusiness and mining	967.667
Restaurant and hotel	606.876
Trading	361.735
Transportation and communication	619.310
Construction	370.815
Services	1.828
Others	7.203.664
	11.320.407

<u>Foreign Currencies</u>	
Agribusiness and mining	370.361
Industry	133.923
Trading	10.768
Others	790
	515.842
Sub total	11.836.249
Total loans	12.147.369
Allowance for impairment losses	(510.636)
Total loans – net	11.636.733

As of December 31, 2024 and 2023, percentage of loans were granted to micro, small and medium business was, 3.39% and 2.70%, respectively.

13. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

13. LOANS (continued)

c. Berdasarkan jangka waktu periode perjanjian kredit

c. By term of the loan agreement

	2024	2023	
Pihak berelasi (Catatan 38)			Related parties (Note 38)
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Kurang dari 1 tahun	326.814	311.120	Less than 1 year
Sub jumlah	326.814	311.120	Sub total
Pihak ketiga			Third parties
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Kurang dari 1 tahun	3.031.555	1.758.786	Less than 1 year
1 sampai dengan 2 tahun	616.741	2.501.235	1 to 2 years
2 sampai dengan 5 tahun	1.178.512	1.537.340	2 to 5 years
Lebih dari 5 tahun	5.196.988	5.523.046	More than 5 years
	10.023.796	11.320.407	
<u>Mata Uang Asing</u>			<u>Foreign Currencies</u>
Kurang dari 1 tahun	11.993	-	Less than 1 year
1 sampai dengan 2 tahun	122.504	302.086	1 to 2 years
2 sampai dengan 5 tahun	-	80.523	2 to 5 years
Lebih dari 5 tahun	120.372	133.233	More than 5 years
	254.869	515.842	
Sub jumlah	10.278.665	11.836.249	Sub total
Jumlah kredit	10.605.479	12.147.369	Total loans
Cadangan kerugian penurunan nilai	(531.907)	(510.636)	Allowance for impairment losses
Jumlah kredit - bersih	10.073.572	11.636.733	Total loans - net

d. Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

d. By maturity term

	2024	2023	
Pihak berelasi (Catatan 38)			Related parties (Note 38)
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Kurang dari 1 tahun	326.814	311.120	Less than 1 year
Sub jumlah	326.814	311.120	Sub total
Pihak ketiga			Third parties
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Kurang dari 1 tahun	3.806.476	4.500.395	Less than 1 year
1 sampai dengan 2 tahun	819.610	340.274	1 to 2 years
2 sampai dengan 5 tahun	2.214.455	2.848.918	2 to 5 years
Lebih dari 5 tahun	3.183.255	3.630.820	More than 5 years
	10.023.796	11.320.407	
<u>Mata Uang Asing</u>			<u>Foreign Currencies</u>
Kurang dari 1 tahun	134.841	382.609	Less than 1 year
1 sampai dengan 2 tahun	119.397	789	1 to 2 years
2 sampai dengan 5 tahun	631	131.741	2 to 5 years
Lebih dari 5 tahun	-	703	More than 5 years
	254.869	515.842	
Sub jumlah	10.278.665	11.836.249	Sub total
Jumlah kredit	10.605.479	12.147.369	Total loans
Cadangan kerugian penurunan nilai	(531.907)	(510.636)	Allowance for impairment losses
Jumlah kredit - bersih	10.073.572	11.636.733	Total loans - net

13. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

13. LOANS (continued)

e. Berdasarkan klasifikasi individual dan kolektif

e. By individual and collective classification

	2024		2023		
	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Rupiah
Rupiah					Collective
Kolektif	7.271.507	80.374	7.695.290	69.494	Individual
Individual	3.079.103	450.067	3.936.237	434.831	Sub total
Sub jumlah	10.350.610	530.441	11.631.527	504.325	
Mata Uang Asing					Foreign Currencies
Kolektif	132.363	733	515.842	6.311	Collective
Individual	122.506	733	-	-	Individual
Sub jumlah	254.869	1.466	515.842	6.311	Sub total
Jumlah	10.605.479	531.907	12.147.369	510.636	Total

f. Berdasarkan klasifikasi kolektibilitas

f. By collectibility classification

	2024			
	Rupiah/ Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Jumlah/ Total	
Lancar	9.824.592	254.869	10.079.461	Current
Dalam perhatian khusus	271.916	-	271.916	Special mention
Kurang lancar	17.103	-	17.103	Substandard
Diragukan	20.894	-	20.894	Doubtful
Macet	216.105	-	216.105	Loss
Jumlah kredit	10.350.610	254.869	10.605.479	Total loans
Cadangan kerugian penurunan nilai	(528.966)	(2.941)	(531.907)	Allowance for impairment losses
Jumlah kredit – bersih	9.821.644	251.928	10.073.572	Total loans – net
	2023			
	Rupiah/ Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Jumlah/ Total	
Lancar	10.840.067	515.352	11.355.419	Current
Dalam perhatian khusus	580.183	490	580.673	Special mention
Kurang lancar	20.539	-	20.539	Substandard
Diragukan	12.772	-	12.772	Doubtful
Macet	177.966	-	177.966	Loss
Jumlah kredit	11.631.527	515.842	12.147.369	Total loans
Cadangan kerugian penurunan nilai	(504.325)	(6.311)	(510.636)	Allowance for impairment losses
Jumlah kredit – bersih	11.127.202	509.531	11.636.733	Total loans – net

13. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

g. Kredit yang direstrukturisasi

Rincian kredit yang direstrukturisasi berdasarkan mata uang, jenis dan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

13. LOANS (continued)

g. Restructured loans

The details of restructured loan based on currencies, type and collectability are as follows:

2024						
Jenis/ Type	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total
Pihak berelasi/ Related parties						
Fixed loans	-	-	-	-	-	-
Kredit pemilikan rumah/ Housing ownership loans	-	-	-	-	-	-
Jumlah/ Total	-	-	-	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	-	-	-	-	-	-
Jumlah/ Total	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga/ Third parties						
Fixed loans	976.728	5.222	-	-	88.239	1.070.189
Revolving loans	148.854	-	-	-	35.004	183.858
Kredit pemilikan rumah dan apartemen/ Housing and apartment ownership loans	73.254	27.189	3.692	9.521	10.540	124.196
Lain-lain/ Others	145.651	-	-	-	70	145.721
Jumlah/ Total	1.344.487	32.411	3.692	9.521	133.853	1.523.964
Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	(195.660)	(1.263)	(2.716)	(4.407)	(81.536)	(285.582)
Jumlah/ Total	1.148.827	31.148	976	5.114	52.317	1.238.382
Jumlah kredit - bersih/ Total loans - net	1.148.827	31.148	976	5.114	52.317	1.238.382
2023						
Jenis/ Type	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Sub- standard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total
Pihak berelasi/ Related parties						
Fixed loans	48.272	-	-	-	-	48.272
Kredit pemilikan rumah/ Housing ownership loans	82.718	-	-	-	-	82.718
Jumlah/ Total	130.990	-	-	-	-	130.990
Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	(2.927)	-	-	-	-	(2.927)
Jumlah/ Total	128.063	-	-	-	-	128.063
Pihak ketiga/ Third parties						
Fixed loans	1.527.299	14.240	-	52	51.375	1.592.966
Revolving loans	153.979	-	-	-	17.899	171.878
Kredit pemilikan rumah dan apartemen/ Housing and apartment ownership loans	104.555	76.556	10.225	3.769	11.977	207.082
Lain-lain/ Others	147.924	230.069	-	-	1.771	379.764
Jumlah/ Total	1.933.757	320.865	10.225	3.821	83.022	2.351.690
Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	(211.727)	(37.811)	(4.586)	(2.689)	(79.207)	(336.020)
Jumlah/ Total	1.722.030	283.054	5.639	1.132	3.815	2.015.670
Jumlah kredit - bersih/ Total loans - net	1.850.093	283.054	5.639	1.132	3.815	2.143.733

13. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

- g. Kredit yang direstrukturisasi (lanjutan)
- Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat keuntungan atau kerugian dari kredit yang direstrukturisasi.
- h. Cadangan kerugian penurunan nilai
- Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang diberikan untuk kelompok individual dan kolektif adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective
Rupiah				
Saldo awal tahun	406.169	99.385	394.379	97.798
Penyisihan (pemulihan) kerugian penurunan nilai	57.683	(18.686)	41.729	1.762
Penghapusbukuan kredit	(13.785)	(325)	(29.939)	(175)
Saldo akhir tahun	450.067	80.374	406.169	99.385
Mata Uang Asing				
Saldo awal tahun	-	5.082	23.214	9.196
Penyisihan (pemulihan) kerugian penurunan nilai	733	(4.292)	(23.267)	(4.114)
Penyesuaian selisih kurs	-	(57)	53	-
Saldo akhir tahun	733	733	-	5.082
Jumlah	450.800	81.107	406.169	104.467

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

- i. Kredit bermasalah
- Rincian kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan dan macet) yang dinilai secara individual dan kolektif berdasarkan sektor ekonomi, serta cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses
Rupiah/ Rupiah				
Konstruksi/ Construction	26.147	25.980	45.505	36.220
Perdagangan/ Trading	21.078	13.374	14.898	13.476
Industri/ Industry	-	-	3.915	3.883
Restoran dan hotel/ Restaurant and hotel	5.303	4.244	2.118	1.937
Pertanian dan pertambangan/ Agriculture and mining	33.978	8.387	827	758
Transportasi dan komunikasi/ Transportation and communication	2.115	1.884	-	-
Lain-lain/ Others	165.481	118.911	144.014	116.692
Jumlah/ Total	254.102	172.780	211.277	172.966

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, rasio kredit bermasalah terhadap jumlah aset keuangan Bank masing-masing sebesar 0,78% dan 0,31%.

13. LOANS (continued)

- g. Restructured loans (continued)
- As of December 31, 2024 and 2023, there were no gains or losses arising from restructured loans.
- h. Allowance for impairment losses
- The changes of allowance for impairment losses of loans to individual and collective Banks are as follows:

	2024		2023	
	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective	Individual/ Individual	Kolektif/ Collective
Rupiah				
Balance at beginning of year	394.379	97.798	394.379	97.798
Provision for (reversal of) impairment losses	41.729	1.762	41.729	1.762
Written-off loans	(29.939)	(175)	(29.939)	(175)
Balance at end of year	406.169	99.385	406.169	99.385
Foreign Currencies				
Balance at beginning of year	23.214	9.196	23.214	9.196
Provision for (reversal of) impairment losses	(23.267)	(4.114)	(23.267)	(4.114)
Exchange rate adjustment	53	-	53	-
Balance at end of year	-	5.082	-	5.082
Total	406.169	104.467	406.169	104.467

As of December 31, 2024 and 2023, management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible loans.

- i. Non-performing loans
- The details of non-performing loans (substandard, doubtful and loss) that assessed individually and collectively based on economic sectors, and allowance for impairment losses are as follows:

	2024		2023	
	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses
Rupiah/ Rupiah				
Konstruksi/ Construction	26.147	25.980	45.505	36.220
Perdagangan/ Trading	21.078	13.374	14.898	13.476
Industri/ Industry	-	-	3.915	3.883
Restoran dan hotel/ Restaurant and hotel	5.303	4.244	2.118	1.937
Pertanian dan pertambangan/ Agriculture and mining	33.978	8.387	827	758
Transportasi dan komunikasi/ Transportation and communication	2.115	1.884	-	-
Lain-lain/ Others	165.481	118.911	144.014	116.692
Jumlah/ Total	254.102	172.780	211.277	172.966

As of December 31, 2024 and 2023, non-performing loans ratio to Bank's total financial assets of 0.78% and 0.31% respectively.

13. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

i. Kredit bermasalah (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia untuk perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) masing-masing sebesar Rp267.156 dan Rp270.119. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, rasio pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang diberikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia masing-masing sebesar 88,31% dan 103,99%.

j. Kredit yang dihapusbukukan

Perubahan kredit yang dihapusbukukan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal tahun	1.954.939	1.924.825
Penghapusbukuan kredit	24.417	30.114
Saldo akhir tahun	1.979.356	1.954.939

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat hapus buku atas kredit yang diberikan kepada pihak berelasi.

k. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

	2024	2023
<u>Rupiah</u>		
Kredit tanpa agunan	28,37%	27,55%
Kredit pemilikan mobil	24,68%	19,73%
<i>Revolving loans</i>	11,78%	12,92%
Kredit pemilikan kios	8,36%	9,21%
Pinjaman rekening koran	11,14%	12,01%
<i>Fixed loans</i>	8,92%	9,03%
Kredit usaha rakyat	30,00%	8,83%
Pinjaman karyawan	6,05%	6,75%
Kredit sindikasi	7,88%	7,63%
Kredit pemilikan rumah dan apartemen	5,29%	5,33%
<u>Mata Uang Asing</u>		
<i>Revolving loans</i>	5,44%	5,94%
<i>Fixed loans</i>	5,94%	6,46%

l. Informasi penting lainnya

- Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas kredit yang diberikan masing-masing sebesar Rp167.865 dan Rp1.343.865 (Catatan 20c).
- Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian bersama (sindikasi) dengan bank-bank lain. Jumlah kredit sindikasi yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp255.432 and Rp534.357.

Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 7,88% dan 7,63% dari jumlah kredit sindikasi.

13. LOANS (continued)

i. Non-performing loans (continued)

As of December 31, 2024 and 2023, the minimum allowance for impairment losses which is required by Bank Indonesia for calculation of Capital Adequacy Ratio (CAR) amounted to Rp267,156 and Rp270,119, respectively. As of December 31, 2024 and 2023, the adequacy ratio for allowance for impairment losses of loans which is required by Bank Indonesia is 88.31% and 103.99%, respectively.

j. Written-off loans

The changes in write-off loans are as follows:

	Balance at beginning of year
	Written-off loans
	Balance at end of year

For the years ended December 31, 2024 and 2023, there are no written-off loans to related parties.

k. The average interest rates per annum are as follows:

	<u>Rupiah</u>
	Unsecured loans
	Car loans
	Revolving loans
	Kiosk loans
	Overdraft
	Fixed loans
	Micro community commercial loans
	Employee loans
	Syndicated loans
	Housing and apartment ownership loans
	<u>Foreign Currencies</u>
	Revolving loans
	Fixed loans

l. Other important informations

- As of December 31, 2024 and 2023, total time deposits pledged as loans cash collateral amounted to Rp167,865 and Rp1,343,865 respectively (Note 20c).
- Syndicated loans represent loans provided to debtors under syndication agreements with other banks. Total syndicated loans of the Bank as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp255,432 and Rp534,357, respectively.

The participation of the Bank as a participant of the syndicated loans as of December 31, 2024 and 2023 was 7.88% and 7.63% respectively, of total syndicated loans.

13. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

1. Informasi penting lainnya (lanjutan)
3. Kredit yang diberikan kepada karyawan merupakan kredit untuk membeli rumah, kendaraan dan keperluan lainnya dengan jangka waktu 1 sampai dengan 15 tahun yang dikenakan tingkat suku bunga rata-rata masing-masing sebesar 6,54% dan 6,75% pada tahun 2024 dan 2023. Pembayaran kembali kredit dilakukan dengan pemotongan gaji setiap bulan.
4. Rasio kredit bermasalah-bersih pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 0,78% dan 0,31%. Rasio kredit bermasalah kotor pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 2,40% dan 1,74%.

14. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

- a. Berdasarkan jenis dan mata uang

	2024	
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ <i>Notional amount of foreign currency (full amount)</i>	Ekuivalen rupiah/ <i>Equivalent rupiah</i>
Tagihan akseptasi		
Pihak ketiga		
<u>Rupiah</u>		
Surat Kredit		
Berdokumen Dalam		
Negeri (SKBDN)		166.682
Sub jumlah		166.682
Cadangan kerugian		
penurunan nilai	(657)	
Jumlah – bersih		166.025
Liabilitas akseptasi		
Pihak ketiga		
<u>Rupiah</u>		
Surat Kredit		
Berdokumen Dalam		
Negeri (SKBDN)		166.682
Jumlah		166.682

- b. Berdasarkan *counterparty*

	2024	
Bukan bank - pihak ketiga		
Rupiah	166.682	
Jumlah	166.682	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(657)	
Jumlah – bersih	166.025	

13. LOANS (continued)

1. Other important informations (continued)
3. Loans granted to the Bank's employee are loans for acquisition of houses, vehicles and other purposes with term of 1 to 15 years which bear average interest rate of 6.54% and 6.75% per annum in 2024 and 2023, respectively. The repayment of loans are collected through monthly salary deduction.
4. The ratio of non-performing loans - net as of December 31, 2024 and 2023 was 0.78% and 0.31%, respectively. The ratio of non-performing loans - gross as of December 31, 2024 and 2023 was 2.40% and 1.74%, respectively.

14. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES

- a. By type and currency

	2023	
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ <i>Notional amount of foreign currency (full amount)</i>	Ekuivalen rupiah/ <i>Equivalent rupiah</i>
Acceptance receivables		
Third parties		
<u>Rupiah</u>		
Domestic		
Documentary		
Letter of Credit	131.863	
Sub total	131.863	
Allowance for		
impairment losses	(501)	
Total – net		131.362
Acceptance payables		
Third parties		
<u>Rupiah</u>		
Domestic		
Documentary		
Letter of Credit	131.863	
Total		131.863

- b. By *counterparty*

	2023	
Non banks - third parties		
Rupiah	131.863	
Total	131.863	
Allowance for impairment losses	(501)	
Total - net	131.362	

14. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

c. Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

	2024	2023
Pihak ketiga		
<u>Rupiah</u>		
3 sampai dengan 6 bulan	166.682	131.863
Sub jumlah	166.682	131.863
Cadangan kerugian penurunan nilai	(657)	(501)
Jumlah – bersih	166.025	131.362

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai tagihan akseptasi secara kolektif dengan menggunakan bukti objektif penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tagihan akseptasi diklasifikasikan “Lancar”.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya tagihan akseptasi.

14. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES (continued)

c. Based on remaining period until maturity

Third parties	
<u>Rupiah</u>	
3 to 6 months	
Sub total	
Allowance for impairment losses	
Total - net	

The Bank assesses the impairment of acceptance receivables collective by using objective evidences of impairment.

As of December 31, 2024 and 2023, acceptance receivables are classified as “Current”.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible acceptance receivables.

15. PENYERTAAN SAHAM

Bank memiliki penyertaan saham yang menggunakan metode biaya perolehan pada perusahaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan/ Company name	Jenis usaha/ Type of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership 2024 dan/ and 2023	2024 dan/ and 2023
PT Aplikasi Lintasarta	Jasa komunikasi data dan internet/ Internet and data communication services	0,27%	6
Jumlah/ Total			6

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai penyertaan saham secara individual dengan menggunakan bukti objektif penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, penyertaan saham diklasifikasikan “Lancar”.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penyertaan saham sehingga tidak diperlukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

15. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK

The Bank has investment in shares of stock in the following companies that are accounted for under cost method:

The Bank assesses the impairment of investment in shares of stock individually by using objective evidences of impairment.

As of December 31, 2024 and 2023, investment in shares of stock are classified as “Current”.

As of December 31, 2024 and 2023, management believes that there is no impairment on investment in shares of stock, therefore no allowance for impairment losses is provided.

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of and For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

16. ASET TETAP

Aset tetap terdiri dari:

	2024	2023	
Kepemilikan langsung	2.080.159	2.084.527	
Aset hak-guna	43.217	43.270	
Jumlah	2.123.376	2.127.797	

	1 Januari/ January 1, 2024	Penambahan /Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2024
<u>Biaya Perolehan</u>				
Kepemilikan langsung:				
Hak atas tanah	1.948.753	-	-	1.948.753
Inventaris kantor	75.528	17.349	(45.434)	47.443
Bangunan	105.310	4.491	-	109.801
Instalasi	6.137	3.117	(208)	9.046
	2.135.728	24.957	(45.642)	2.115.043
Aset dalam penyelesaian	4.733	750	(4.733)	750
Aset hak-guna:				
Bangunan	216.516	45.959	-	262.475
Jumlah	2.356.977	71.666	(50.375)	2.378.268
<u>Akumulasi Penyusutan</u>				
Kepemilikan langsung:				
Inventaris kantor	53.824	14.101	(44.516)	23.409
Bangunan	-	9.715	-	9.715
Instalasi	2.110	541	(141)	2.510
Aset hak-guna				
Bangunan	173.246	46.012	-	219.258
Jumlah	229.180	70.369	(44.657)	254.892
Nilai buku	2.127.797			2.123.376

	1 Januari/ January 1, 2023	Penambahan /Additions	Pengurangan/ Deductions	Revaluasi/ Revaluation	31 Desember/ December 31, 2023	
<u>Biaya Perolehan</u>						<u>Acquisition Cost</u>
Kepemilikan langsung:						Direct ownership:
Hak atas tanah	1.931.564	-	-	17.189	1.948.753	Land rights
Inventaris kantor	73.720	15.043	(13.235)	-	75.528	Office equipment
Bangunan	102.517	9.963	-	(7.170)	105.310	Buildings
Instalasi	4.489	2.330	(682)	-	6.137	Installation
	2.112.290	27.336	(13.917)	10.019	2.135.728	
Aset dalam penyelesaian	2.653	4.693	(2.613)	-	4.733	Assets in progress
Aset hak-guna:						Right-of-use assets:
Bangunan	161.821	54.695	-	-	216.516	Buildings
Jumlah	2.276.764	86.724	(16.530)	10.019	2.356.977	Total
<u>Akumulasi Penyusutan</u>						<u>Accumulated Depreciation</u>
Kepemilikan langsung:						Direct ownership:
Inventaris kantor	53.504	13.214	(12.894)	-	53.824	Office equipment
Bangunan	10.459	10.288	(225)	(20.522)	-	Buildings
Instalasi	2.138	654	(682)	-	2.110	Installation
Aset hak-guna						Right-of-use assets:
Bangunan	132.348	40.898	-	-	173.246	Buildings
Jumlah	198.449	65.054	(13.801)	(20.522)	229.180	Total
Nilai buku	2.078.315				2.127.797	Book value

16. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, hak atas tanah dan bangunan dicatat berdasarkan nilai revaluasi yang telah direviu oleh manajemen dan didukung oleh laporan penilai independen eksternal, KJPP Sugianto Prasodjo & Rekan, berdasarkan laporan No.00094/2.0131-00/PI/07/0375/1/I/2024 tanggal 30 Januari 2024. Pendekatan penilaian yang digunakan adalah pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya. Penilaian ini berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasar Modal No. 28/POJK.04/2021 Tanggal 28 Desember 2021, SOJK No. 33/SEOJK.04/2021 Tanggal 31 Desember 2021 dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) & Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII – 2018.

Selisih antara nilai buku sebelum revaluasi aset tetap dengan nilai wajar aset tetap setelah revaluasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

2023			
<u>Aset tetap</u>	<u>Nilai buku sebelum revaluasi/Book value before revaluation</u>	<u>Nilai wajar/Fair value</u>	<u>Surplus revaluasi/Surplus revaluation</u>
Hak atas tanah	1.931.564	1.948.753	17.189
Bangunan	91.955	105.307	13.352
Jumlah	2.023.519	2.054.060	30.541
			Fixed assets
			Land rights
			Buildings
			Total

Nilai wajar hak atas tanah dan bangunan berdasarkan hirarki nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

2023				
	<u>Tingkat 1/Level 1</u>	<u>Tingkat 2/Level 2</u>	<u>Tingkat 3/Level 3</u>	<u>Jumlah/Total</u>
<u>Pengukuran nilai wajar reguler</u>				<u>Regular fair value measurement</u>
Hak atas tanah	-	1.948.753	-	1.948.753
Bangunan	-	105.307	-	105.307
Jumlah	-	2.054.060	-	2.054.060
				Total

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai “Surplus Revaluasi Aset Tetap”, dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp30.541.

Penyusutan yang dibebankan pada beban umum dan administrasi adalah sebesar Rp70.369 dan Rp65.054 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 34).

Rincian laba penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Hasil penjualan aset tetap	5.929	2.960	Proceed from sale of fixed assets
Nilai buku	(5.718)	(2.729)	Book value
Laba penjualan aset tetap (Catatan 36)	211	231	Gain on sale of fixed assets (Note 36)

On December 31, 2023, land and building rights are recorded based on the revaluation value which has been reviewed by management and supported by the report of an external independent appraiser, KJPP Sugianto Prasodjo & Partners, based on report No.00094/2.0131-00/PI/07/0375/1/I/2024 dated January 30, 2024. The valuation approach used is the market, income and cost approach. This assessment is guided by the Financial Services Authority (OJK) Capital Markets Regulation No. 28/POJK.04/2021 December 28, 2021, SOJK No. 33/SEOJK.04/2021 Dated December 31, 2021 and the Indonesian Appraiser Code of Ethics (KEPI) & Indonesian Appraisal Standards (SPI) Edition VII – 2018.

The difference between the book value before revaluation of fixed assets and the fair value of fixed assets after revaluation on December 31, 2023 is as follows:

The fair values of land rights and buildings based on fair value hierarchy are as of December 31, 2023 follows:

The increase in the carrying amount arising from the revaluation are recorded as “Surplus Revaluation of Fixed Assets”, and is presented in other comprehensive income as of December 31, 2023 amounted to Rp30,541.

Depreciation charged to general and administrative expenses amounted Rp70,369 and Rp65,054 for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively (Note 34).

The details of gain on sale of fixed assets are as follows:

16. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 1 Desember 1993, Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pendirian Gedung dengan PT Buanagraha Arthaprima, pihak berelasi, No.098/XII/BOT/93 yang telah diubah dengan Addendum I tanggal 18 Januari 1994, untuk mengadakan kerjasama pembangunan gedung di atas tanah milik Bank di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan. Metode perjanjian tersebut adalah BOT (*Build, Operate and Transfer*/ Bangun, Kelola dan Serah) selama 40 tahun. Setelah masa tersebut berlalu maka gedung dan pengelolaannya akan dikembalikan kepada Bank (Catatan 38).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset tetap, kecuali hak atas tanah, diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya kepada PT Artha Graha General Insurance (pihak ketiga) dengan nilai pertanggungan seluruhnya masing-masing sebesar Rp268.932. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Jumlah biaya perolehan atas aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp166.033 dan Rp121.526.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada aset tetap yang dipakai sementara atau dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui komprehensif lain.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank melakukan peninjauan kembali atas umur manfaat, metode penyusutan dan nilai residu aset tetap dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan atas metode dan asumsi tersebut.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

16. FIXED ASSETS (continued)

On December 1, 1993, the Bank entered into a Cooperation Agreement of Office Tower Establishment with PT Buanagraha Arthaprima, affiliate, No.098/XII/BOT/93, which is amended by Addendum I dated January 18, 1994, to jointly build the office tower in the Bank's land rights at Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta. The method of this agreement is BOT (Build, Operate and Transfer) for 40 years. At the end of the contract, the building and operation will be returned to the Bank (Note 38).

As of December 31, 2024 and 2023, fixed assets, except land rights, have already insured to cover any possible losses caused by fire, theft and other risks to PT Artha Graha General Insurance (third party) with a total sum insured amounting to Rp268,932, respectively. Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses on such risks.

Total acquisition cost of fixed assets that have been fully depreciated but are still in use as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp166,033 and Rp121,526, respectively.

As of December 31, 2024 and 2023, there are no fixed assets used temporarily or retired from active use and not classified as fair value through other comprehensive income.

As of December 31, 2024 and 2023, there are no contractual commitment in acquisition of fixed assets.

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank undertakes a review of its useful life, depreciation method and residual values of fixed assets and concluded that there was no change in the methods and assumptions.

Based on management's assessment, there are no events or changes in circumstances indicate an impairment of fixed assets as of December 31, 2024 and 2023.

17. ASET TAKBERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

	1 Januari/ January 1, 2024	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2024	
<u>Biaya Perolehan:</u>					<u>Acquisition Cost:</u>
Perangkat lunak	92.838	9.007	-	101.845	Software
Aset dalam penyelesaian	4.357	4.882	(4.356)	4.883	Assets in progress
Jumlah	97.195	13.889	(4.356)	106.728	Total
<u>Amortisasi:</u>					<u>Amortization:</u>
Perangkat lunak	65.322	15.919	-	81.241	Software
Jumlah	65.322	15.919	-	81.241	Total
Nilai buku	31.873			25.487	Book value

	1 Januari/ January 1, 2023	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2023	
<u>Biaya Perolehan:</u>					<u>Acquisition Cost:</u>
Perangkat lunak	79.735	13.103	-	92.838	Software
Aset dalam penyelesaian	5.442	833	(1.918)	4.357	Assets in progress
Jumlah	85.177	13.936	(1.918)	97.195	Total
<u>Amortisasi:</u>					<u>Amortization:</u>
Perangkat lunak	54.013	11.309	-	65.322	Software
Jumlah	54.013	11.309	65.322	65.322	Total
Nilai buku	31.164			31.873	Book value

Amortisasi yang dibebankan pada beban umum dan administrasi adalah sebesar Rp15.919 dan Rp11.309 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 34).

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

17. INTANGIBLE ASSETS

The details of intangible asset is as follows:

Amortization charged to general and administrative expenses amounted to Rp15,919 and Rp11,309 for the year ended December 31, 2024 dan 2023 (Note 34).

Based on management's assessment, there are no events or changes in circumstances indicate an impairment of intangible asset as of December 31, 2024 and 2023.

18. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH DAN ASET LAIN-LAIN

Agunan yang diambil alih

Rincian agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal tahun	1.263.459	1.465.134
Pengurangan	(88.417)	(201.675)
Saldo akhir tahun	1.175.042	1.263.459
Cadangan kerugian penurunan nilai	(366.159)	(327.349)
Jumlah – bersih	808.883	936.110

18. FORECLOSED ASSETS AND OTHER ASSETS

Foreclosed assets

The details of foreclosed assets are as follows:

Balance at beginning of year
Less
Balance at end of year
Allowance for impairment losses
Total – net

18. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH DAN ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal tahun	327.349	241.838
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 35)	38.810	87.684
Hapus buku	-	(2.173)
Saldo akhir tahun	366.159	327.349

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai agunan yang diambil alih secara individual dengan menggunakan bukti objektif penurunan nilai.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk agunan yang diambil alih pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi.

Rincian penjualan agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Hasil penyelesaian agunan yang diambil alih	88.417	201.675
Nilai buku	(88.417)	(201.675)
Laba (rugi) penjualan agunan yang diambil alih	-	-

Aset lain-lain

	2024	2023
Persediaan barang cetakan dan alat tulis kantor	11.037	10.320
Setoran jaminan	10.248	9.268
Tagihan administrasi kredit	7.493	20.452
Tagihan terkait dengan transaksi ATM	4.117	8.613
Uang muka sewa gedung kantor	-	195
Uang muka renovasi dan perbaikan	-	50
Lain-lain	324.871	327.446
Jumlah	357.766	376.344

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai aset lain-lain secara individual dengan menggunakan bukti objektif penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset lain-lain sehingga tidak diperlukan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

18. FORECLOSED ASSETS AND OTHER ASSETS (continued)

The changes of impairment losses on foreclosed assets are as follows:

Balance at beginning of year
Provision during the year (Note 35)
Written-off
Balance at end of year

The Bank assesses the impairment of foreclosed assets individually by using objective evidences of impairment.

Management believes that allowance for impairment losses of foreclosed assets as of December 31, 2024 and 2023 is adequate to cover possible losses.

The details on sale on foreclosed assets are as follows:

The result of the completion of foreclosed assets
Book value
Profit (loss) on sale of foreclosed assets

Other assets

Printing items and stationery
Guarantee deposits
Loan administration charges
Charges related to ATM transactions
Advances for office rent
Advances for renovations and repairs
Others
Total

The Bank assesses the impairment of other assets individually by using objective evidences of impairment.

As of December 31, 2024 and 2023, management believes that there is no impairment on other assets, therefore no allowance for impairment losses is provided.

19. LIABILITAS SEGERA

Rincian liabilitas segera adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pihak ketiga		
<u>Rupiah</u>		
Liabilitas sehubungan dengan ATM	61.195	37.799
Klaim yang belum diselesaikan	2.607	5.989
Liabilitas kepada notaris dan penilai independen	2.084	1.497
Titipan pengiriman uang dan setoran kliring	1.444	8.598
Liabilitas kepada Perusahaan asuransi	1.334	1.015
Titipan setoran	373	833
Lain-lain	45.590	38.600
Sub jumlah	114.627	94.331
 <u>Mata Uang Asing</u>		
Lain-lain	994	1.380
Sub jumlah	994	1.380
Jumlah	115.621	95.711

Liabilitas sehubungan dengan ATM merupakan liabilitas sehubungan dengan pemakaian ATM jaringan ALTO dan Prima.

Titipan setoran merupakan titipan setoran nasabah yang belum diselesaikan.

20. SIMPANAN NASABAH

Rincian simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pihak berelasi (Catatan 38)		
Giro	420.054	337.908
Tabungan	38.911	40.220
Deposito berjangka	720.899	841.451
Jumlah pihak berelasi	1.179.864	1.219.579
 Pihak ketiga		
Giro	6.097.587	6.293.507
Tabungan	1.795.594	1.477.370
Deposito berjangka	14.817.728	11.641.245
Jumlah pihak ketiga	22.710.909	19.412.122
Jumlah	23.890.773	20.631.701

19. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

The details of obligation due immediately are as follows:

Third parties
<u>Rupiah</u>
Liability related to ATM
Unfinished claim
Liability to the notary and independent valuers
Safe keeping remittance and deposits clearing
Liability to insurance Companies
Repayment deposits
Others
Sub total
 <u>Foreign Currency</u>
Others
Sub total
Total

Liability related to ATM represents liability related to the use of ALTO and Prima ATM networks.

Repayment deposits represent deposits of customers that have not been resolved.

20. DEPOSITS FROM CUSTOMER

The details of customer deposits are as follows:

Related parties (Note 38)
Demand deposits
Savings deposits
Time deposits
Total related parties
 Third parties
Demand deposits
Savings deposits
Time deposits
Total third parties
Total

20. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

a. Giro

	2024		2023		
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ Notional amount of foreign currency (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Equivalent rupiah	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ Notional amount of foreign currency (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Equivalent rupiah	
Pihak berelasi (Catatan 38)					Related parties (Note 38)
Rupiah		390.598		309.452	Rupiah
Mata uang asing					Foreign currency
Dolar Amerika					United States
Serikat	1.507.959	24.271	1.326.049	20.417	Dollar
Dolar Australia	200	2	200	2	Australian Dollar
Dolar Singapura	437.584	5.183	688.349	8.037	Singapore Dollar
Sub jumlah		420.054		337.908	Sub total
Pihak ketiga					Third parties
Rupiah		5.727.974		5.691.092	Rupiah
Mata uang asing					Foreign currency
Dolar Amerika					United States
Serikat	21.303.364	342.878	38.695.716	595.798	Dollar
Yuan China	8.175.538	17.974	4.655	10	Chinese Yuan
Dolar Singapura	732.974	8.682	502.283	5.865	Singapore Dollar
Euro Eropa	4.450	75	1.818	31	European Euro
Yen Jepang	42.030	4	6.526.862	711	Japanese Yen
Sub jumlah		6.097.587		6.293.507	Sub total
Jumlah		6.517.641		6.631.415	Total

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat giro yang dijadikan jaminan tunai atas kredit yang diberikan.

As of December 31, 2024 and 2023, there are no demand deposits used as cash collateral for loans granted.

b. Tabungan

b. Savings Deposits

i. Berdasarkan mata uang dan pihak

i. By currency and party

	2024		2023		
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ Notional amount of foreign currency (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Equivalent rupiah	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ Notional amount of foreign currency (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Equivalent rupiah	
Pihak berelasi (Catatan 38)					Related parties (Note 38)
Rupiah		38.911		40.220	Rupiah
Pihak ketiga					Third parties
Rupiah		1.795.594		1.477.370	Rupiah
Jumlah		1.834.505		1.517.590	Total

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of and For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

20. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

- b. Tabungan (lanjutan)
- ii. Berdasarkan jenis

	2024	2023
Tabungan Artha	1.036.242	929.461
Tabungan Wira	306.070	300.020
Tabungan Artha Payroll	211.738	187.631
Tabungan Artha Hold Dana	180.169	2.100
Tabungan Artha Setoran Bulanan	35.312	31.102
Tabungan Artha Karyawan	23.706	22.017
Tabungan Prega Prestasi	10.330	12.676
Tabunganku	9.500	11.856
Tabungan Pintar	6.465	8.112
Tabungan Prega QQ	4.868	6.286
Tabungan Artha Mitra	4.521	-
Tabungan Prega Gemilang	2.414	3.473
Tabungan Icon	1.621	927
Tabungan Prega Edusave	800	1.221
Tabungan Simpanan Pelajar	483	386
Tabungan Artha KUR	139	190
Tabungan Prestasi gemilang	106	111
Tabungan Basic Saving Account	21	21
Jumlah	1.834.505	1.517.590

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat tabungan yang dijadikan jaminan tunai atas kredit yang diberikan.

- c. Deposito Berjangka
- i. Berdasarkan mata uang dan pihak

	2024	
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ Notional amount of foreign currency (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Equivalent rupiah
Pihak berelasi (Catatan 38)		
Rupiah		630.149
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	5.636.805	90.724
Dolar Singapura	2.185	26
Sub jumlah		720.899
Pihak ketiga		
Rupiah		13.478.277
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	82.448.582	1.327.010
Dolar Singapura	1.050.329	12.441
Sub jumlah		14.817.728
Jumlah		15.538.627

20. DEPOSITS FROM CUSTOMER (continued)

- b. Savings Deposits (continued)
- ii. By type

Artha savings
Wira savings
Artha Payroll savings
Artha Hold Dana savings
Artha Setoran Bulanan savings
Artha Karyawan savings
Prega Prestasi savings
Tabunganku
Pintar savings
Prega QQ savings
Artha Mitra Savings
Prega Gemilang savings
Icon savings
Prega Edusave savings
Student savings
Artha KUR savings
Prestasi gemilang savings
Basic Savings Account savings
Total

As of December 31, 2024 and 2023, there are no savings deposits used as cash collateral for loans granted.

- c. Time Deposits
- i. By currency and party

	2023	
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ Notional amount of foreign currency (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Equivalent rupiah
Related parties (Note 38)		
Rupiah	-	764.560
Foreign currency		
United States Dollar	4.992.283	76.866
Singapore Dollar	2.173	25
Sub total		841.451
Third parties		
Rupiah	-	10.697.693
Foreign currencies		
United States Dollar	59.906.439	922.380
Singapore Dollar	1.813.236	21.172
Sub total		11.641.245
Total		12.482.696

20. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

- c. Deposito Berjangka (lanjutan)
ii. Berdasarkan periode deposito berjangka

	2024	2023
<u>Rupiah</u>		
1 bulan	9.338.056	6.510.315
3 bulan	2.971.299	3.314.324
6 bulan	1.079.477	1.355.916
12 bulan	719.594	281.698
Sub jumlah	14.108.426	11.462.253
<u>Mata Uang Asing</u>		
1 bulan	865.570	592.705
3 bulan	499.896	230.372
6 bulan	55.585	178.857
12 bulan	9.150	18.509
Sub jumlah	1.430.201	1.020.443
Jumlah	15.538.627	12.482.696

- iii. Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

	2024	2023
<u>Rupiah</u>		
Kurang dari 1 bulan	10.612.163	9.432.290
1 sampai dengan 3 bulan	2.525.912	1.561.429
3 sampai dengan 6 bulan	265.171	242.574
6 sampai dengan 12 bulan	705.180	225.960
Jumlah Rupiah	14.108.426	11.462.253
<u>Mata Uang Asing</u>		
Kurang dari 1 bulan	1.273.856	780.936
1 sampai dengan 3 bulan	117.361	212.410
3 sampai dengan 6 bulan	33.474	16.706
6 sampai dengan 12 bulan	5.510	10.391
Jumlah Mata Uang Asing	1.430.201	1.020.443
Jumlah	15.538.627	12.482.696

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan tunai atas kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pihak ketiga	167.865	1.343.865
Jumlah (Catatan 13f)	167.865	1.343.865

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

	2024	2023
<u>Rupiah</u>		
Giro	0,96%	0,82%
Tabungan	0,72%	0,75%
Deposito berjangka	3,34%	3,73%
<u>Mata Uang Asing</u>		
Giro	0,02%	0,01%
Deposito berjangka	3,49%	1,52%

20. DEPOSITS FROM CUSTOMER (continued)

- c. Time Deposits (continued)
ii. By time deposits period

<u>Rupiah</u>	
1 month	
3 months	
6 months	
12 months	
Sub total	
<u>Foreign Currencies</u>	
1 month	
3 months	
6 months	
12 months	
Sub total	
Total	

- iii. By currency and party

<u>Rupiah</u>	
Less than 1 month	
1 up to 3 months	
3 up to 6 months	
6 up to 12 months	
Total Rupiah	
<u>Foreign Currencies</u>	
Less than 1 month	
1 up to 3 months	
3 up to 6 months	
6 up to 12 months	
Total Foreign Currency	
Total	

As of December 31, 2024 and 2023, time deposits used as cash collateral for loan granted are as follows:

	Third parties
Total (Note 13f)	

The average interest rates per annum are as follows:

<u>Rupiah</u>	
Demand deposits	
Savings deposits	
Time deposits	
<u>Foreign Currencies</u>	
Demand deposits	
Time deposits	

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Rincian simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

	2024	2023
<u>Rupiah</u>		
Interbank <i>Call Money</i>	200.000	-
Giro	97.304	33.436
Deposito berjangka	95.150	3.522
Deposito <i>on call</i>	60.000	300.000
Jumlah	452.454	336.958

a. Interbank *Call Money*

i. Berdasarkan mata uang dan pihak

	2024	2023
<u>Rupiah</u>		
Pihak ketiga	200.000	-

ii. Berdasarkan jangka waktu

	2024	2023
<u>Rupiah</u>		
1 bulan	200.000	-

iii. Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

	2024	2023
<u>Rupiah</u>		
Kurang dari 1 bulan	200.000	-

b. Giro

i. Berdasarkan mata uang dan pihak

	2024	2023
<u>Rupiah</u>		
Pihak ketiga	97.304	33.436

c. Deposito berjangka

i. Berdasarkan mata uang dan pihak

	2024	2023
<u>Rupiah</u>		
Pihak ketiga	95.150	3.522

ii. Berdasarkan jangka waktu

	2024	2023
<u>Rupiah</u>		
1 bulan	95.150	3.522

iii. Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

	2024	2023
<u>Rupiah</u>		
Kurang dari 1 bulan	95.150	3.522

21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

The details of deposits from other banks are as follows:

	<u>Rupiah</u>
Interbank <i>Call Money</i>	
Demand deposits	
Time deposits	
Deposito <i>on call</i>	
Total	

a. Interbank *Call Money*

i. By currency and party

	<u>Rupiah</u>
Third parties	

ii. By maturity

	<u>Rupiah</u>
1 month	

iii. Based on remaining period until maturity

	<u>Rupiah</u>
Less than 1 month	

b. Demand Deposits

i. By currency and party

	<u>Rupiah</u>
Third parties	

c. Time deposits

i. By currency and party

	<u>Rupiah</u>
Third parties	

ii. By maturity

	<u>Rupiah</u>
1 month	

iii. Based on remaining period until maturity

	<u>Rupiah</u>
Less than 1 month	

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of and For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

Rincian simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:
(lanjutan)

d. Deposito *on call*

i. Berdasarkan mata uang dan pihak

	2024	2023
<u>Rupiah</u>		
Pihak ketiga	60.000	300.000

ii. Berdasarkan jangka waktu

	2024	2023
<u>Rupiah</u>		
1 bulan	60.000	300.000

iii. Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

	2024	2023
<u>Rupiah</u>		
Kurang dari 1 bulan	60.000	300.000

e. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

	2024	2023
<u>Rupiah</u>		
Giro	1,78%	1,78%
Deposito berjangka	6,15%	6,15%
Deposito <i>on call</i>	6,68%	6,35%

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat simpanan dari bank lain yang dijadikan jaminan.

21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

The details of deposits from other banks are as follows:
(continued)

d. Deposito *on call*

i. By currency and party

Rupiah
Third parties

ii. By maturity

Rupiah
1 month

iii. Based on remaining period until maturity

Rupiah
Less than 1 month

e. The average interest rates per annum are as follows:

Rupiah
Demand deposits
Time deposits
Deposito *on call*

As of December 31, 2024 and 2023, there are no deposits from other banks used as collateral.

22. LIABILITAS EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJIAN DIBELI KEMBALI

22. SECURITIES SOLD UNDER AGREEMENT TO REPURCHASE LIABILITIES

2024

	Tanggal dimulai/ <i>Start date</i>	Tanggal jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Nilai pembelian kembali/ <i>Repurchase amount</i>	Beban bunga yang belum diamortisasi/ <i>Unamortised interest expense</i>	Nilai bersih/ <i>Net value</i>
Transaksi dengan Bank Indonesia IDSR070525364S – 020373	30 Des/ Dec 2024	30 Jan/ Jan 2025	97.939	514	97.425
Surat Utang Negara					
FR101-020342	13 Des/ Dec 2024	13 Jan/ Jan 2025	38.677	85	38.592
FR064-020345	13 Des/ Dec 2024	13 Jan/ Jan 2025	9.387	21	9.366
FR100-020344	13 Des/ Dec 2024	13 Jan/ Jan 2025	46.393	102	46.291
FR0081-020267	15 Nov/ Nov 2024	16 Jan/ Jan 2025	317.292	9.685	307.607
Sub jumlah			411.750	9.893	401.856
Jumlah - bersih			509.689	10.407	499.281

Transactions with Bank Indonesia IDSR070525364S – 020373
Government Bonds
FR101-020342
FR064-020345
FR100-020344
FR0081-020267
Sub total

Total - net

23. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

	2024	2023
Pajak penghasilan		
Pasal 4 (2)	13.302	8.816
Pasal 21	1.171	2.499
Pasal 23	590	213
Pasal 26	25	23
Sub jumlah	15.088	11.551
Pajak pertambahan nilai	101	162
Jumlah	15.189	11.713

b. Pajak penghasilan

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada tanggal 20 Desember 2022, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang mencabut PP No. 30 Tahun 2020. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya sebesar 20% menjadi tidak berlaku setelah Undang-Undang ini disahkan.

23. TAXATION

a. Taxes payable

	2024	2023	
			Income tax
			Article 4 (2)
			Article 21
			Article 23
			Article 26
			Sub total
			Value added tax
			Total

b. Income tax

On March 31, 2020, the Government issue Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) of the Republic of Indonesia No. 1 year 2020 which has become Law (UU) No. 2 year 2020, as well as stipulated Government Regulation (PP) No. 30 year 2020 concerning Tariff Reduction for Domestic Public Companies Taxpayers and effective since June 19, 2020. The regulation has stipulated the reduction in the income tax rates for domestic corporate taxpayers and business establishments from 25% to 22% for fiscal year 2020 and 2021 and 20% for the fiscal year 2022 onwards.

On October 29, 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. On December 20, 2022, the Government then issued PP No. 55 Year 2022 regarding Adjustments to the Tax Regulations of Income Tax which revokes PP No. 30 Year 2020. The regulation stipulates the income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments at 22% which will take effect from the 2022 fiscal year onwards. Therefore, the previous tax rate determination of 20% becomes invalid after this Law is enacted.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Pasal 65 dari Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan ("PPh") bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka, Wajib Pajak dapat memperoleh penurunan tarif PPh sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan tersebut diatas apabila memenuhi tambahan kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak;
2. Masing-masing pihak yang dimaksud di atas hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh;
3. Pihak-pihak yang memenuhi persyaratan 300 (tiga ratus) pihak dan 5% (lima persen) sebagaimana di atas, tidak termasuk: Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya; dan/atau yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka (tercermin dari kepemilikan saham oleh pengendali dan/atau pemegang saham utama).

Pajak penghasilan badan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak 19%.

Manfaat (beban) pajak penghasilan terdiri dari:

	2024	2023
Pajak kini tahun berjalan	-	-
Pajak tangguhan tahun berjalan	(37.281)	(36.604)
Beban (manfaat) pajak penghasilan – bersih	(37.281)	(36.604)

23. TAXATION (continued)

b. Income tax (continued)

Based on Article 65 of Government Regulation No. 55 Year 2022 regarding the Decrease in Income Tax Rates ("PPh") for Domestic Corporate Tax Payers in the Form of Public Companies, tax payers can obtain a reduction in the PPh of 3% (three percent) lower than the rate of domestic corporate tax payers as Regulated in the Taxation Law, if it meets the following additional criteria:

1. The public owned 40% (forty percent) or more of the total paid up shares and those shares are owned by at least 300 (three hundred) parties;
2. Each party referred to above may only own shares of less than 5% (five percent) of the total issued and paid-up shares;
3. Parties that meet the requirements of 300 (three hundred) parties and 5% (five percent) as stated above, do not include: Public Company Tax Payers who buy back their shares; and/or Those who have a special relationship as stipulated in the Income Tax Law with Public Company Tax Payers (reflected in: share ownership by the controlling party and/or major shareholder).

Corporate income tax of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk for the year ended December 31, 2024 and 2023 are calculated using the tax rate of 19%.

Income tax benefit (expense) consists of:

Current tax current year
Deferred tax current year
Income tax expense (benefit)– net

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba sebelum manfaat pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	189.755	183.357
Beda temporer:		
Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan	1.418	(3.636)
Pemulihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan	(190.238)	8.669
Beda tetap:		
Sumbangan	6.461	9.295
Taksiran laba (rugi) kena pajak	7.396	197.685
Kompensasi rugi fiskal tahun:		
- 2020	(329.273)	(336.669)
- 2022	(80.670)	(80.670)
Akumulasi rugi fiskal	(409.943)	(417.339)

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 akan digunakan sebagai dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan Bank.

Perhitungan laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah sesuai dengan SPT yang akan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak sebesar 19% untuk tahun 2024 dan 2023 atas laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba sebelum manfaat pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	189.755	183.357
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	36.053	34.838
Pengaruh pajak atas beda tetap pada tarif pajak yang berlaku	1.228	1.766
Beban pajak penghasilan – bersih	37.281	36.604

23. TAXATION (continued)

b. Income tax (continued)

Current tax

The reconciliation between income before income tax benefit (expense) as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income with the Bank's taxable income for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

<i>Income before income tax benefit per statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
<i>Temporary differences:</i>
<i>Provision for post-employment benefits</i>
<i>Reversal of impairment losses on financial and non-financial assets</i>
<i>Permanent differences:</i>
<i>Donation</i>
<i>Estimated taxable income (loss)</i>
<i>Fiscal loss compensation for year:</i>
<i>- 2020</i>
<i>- 2022</i>
<i>Accumulated fiscal losses</i>

Taxable income which is resulted from reconciliation for the year ended December 31, 2024 will be used as basis in submission of the Bank's Annual Corporate Income Tax Return (SPT).

The calculation of taxable income which is resulted from reconciliation for the year ended December 31, 2024 is in accordance with SPT will be reported to the Tax Office.

The reconciliation between income tax expense computed using the prevailing tax rate of 19% for 2024 and 2023 on income before income tax benefit (expense) and income tax expense as presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

<i>Income before income tax benefit per statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
<i>Income tax expense based on the applicable tax rates</i>
<i>Tax effects on permanent differences at the applicable tax rate</i>
<i>Income tax expense – net</i>

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar korfis pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Rincian aset pajak tangguhan Bank pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

23. TAXATION (continued)

b. Income tax (continued)

Current tax (continued)

Under the Taxation Laws in Indonesia, the Bank submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax (DGT) may assess or amend taxes payable within 5 (five) years since the tax becomes due.

Deferred tax

Deferred income tax is calculated based on the temporary differences between the tax base of assets and liabilities and its carrying value for financial reporting purposes.

The details of the Bank's deferred tax assets as of December 31, 2024 is as follows:

	2024				
	1 Jan/ Jan 1, 2024	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to statement of profit or loss	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	31 Des/ Dec 31, 2024	
Rugi fiskal	102.703	(1.405)	-	101.298	Fiscal loss
Liabilitas imbalan pasca kerja	22.585	269	(4.017)	18.837	Post employment benefits liability
Cadangan kerugian penurunan nilai	152.804	(36.145)	-	116.659	Allowance for impairment losses
Penyusutan aset tetap	411	-	-	411	Depreciation of fixed assets
Amortisasi aset takberwujud	(7.199)	-	-	(7.199)	Amortization of intangible asset
(Kerugian)/ keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dikurangi pajak	(544)	-	219	(325)	(Loss)/gain on changes in value of financial assets at fair value through other comprehensive income after tax
Jumlah	270.760	(37.281)	(3.798)	229.681	Total

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Rincian aset pajak tangguhan Bank pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	2023				
	1 Jan/ Jan 1, 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to statement of profit or loss	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	31 Des/ Dec 31, 2023	
Rugi fiskal	140.263	(37.560)	-	102.703	Fiscal loss
Liabilitas imbalan pasca kerja	23.560	(691)	(284)	22.585	Post employment benefits liability
Cadangan kerugian penurunan nilai	151.157	1.647	-	152.804	Allowance for impairment losses
Penyusutan aset tetap	411	-	-	411	Depreciation of fixed assets
Amortisasi aset takberwujud	(7.199)	-	-	(7.199)	Amortization of intangible asset
(Kerugian)/ keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dikurangi pajak	(3.322)	-	2.778	(544)	(Loss)/gain on changes in value of financial assets at fair value through other comprehensive income after tax
Jumlah	304.870	(36.604)	2.494	270.760	Total

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan di masa mendatang.

Sesuai dengan ketentuan peralihan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2024, Bank telah melaksanakan perhitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih untuk awal tahun fiskal 2024 dan selisih lebih sebesar Rp214.339 akan diakui sebagai biaya yang dibebankan seluruhnya untuk tahun fiskal 2024. Terkait dengan hal tersebut, aset pajak tangguhan yang akan dimanfaatkan Bank pada tahun fiskal 2024 adalah sebesar Rp40.724.

23. TAXATION (continued)

b. Income tax (continued)

Deferred tax (continued)

The details of the Bank's deferred tax assets as of December 31, 2023 is as follows:

Deferred tax assets are recognized to the extent that the amount of taxable income in the future will be available against which the deductible temporary differences. Management believes that the deferred tax assets can be utilized in the future.

In accordance with the provisions of preservation in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 74 of 2024, the Bank has calculated the carrying value of the allowance for doubtful loans for the beginning of the 2024 fiscal year and the excess of Rp214,339 will be recognized as an expense charged in full for the 2024 fiscal year. In relation to this, the deferred tax assets that will be utilized by the Bank in the 2024 fiscal year are Rp40,724.

24. BUNGA MASIH HARUS DIBAYAR

Rincian bunga masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ Notional amount of foreign currency (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Equivalent rupiah	Jumlah nosional mata uang asing (angka penuh)/ Notional amount of foreign currency (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Equivalent rupiah
Rupiah				
Simpanan nasabah				
Bunga deposito berjangka		31.420		23.280
Bunga giro		-		1.039
Bunga tabungan		-		2
Simpanan dari bank lain				
Bunga deposito berjangka		511		199
LTN Subordinasi I tahap I		52		104
Sub jumlah		31.983		24.624
Mata Uang Asing				
Simpanan nasabah				
Bunga deposito berjangka	USD 197.874	3.184	USD 138.707	2.136
	SGD (5.663)	(67)	SGD (5.753)	(67)
Sub jumlah		3.117		2.069
Jumlah		35.100		26.693

24. ACCRUED INTEREST PAYABLES

The details of accrued interest payables are as follows:

Rupiah	
Deposits from customers	
Interest on time deposits	
Current account interest	
Saving deposits	
Deposits from other banks	
Interest on time deposits	
Subordinated LTN I stage I	
Sub total	
Foreign Currencies	
Deposits from customers	
Interest on time deposits	
Sub total	
Total	

25. LIABILITAS LAIN-LAIN

Rincian liabilitas lain-lain adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pihak ketiga		
<u>Rupiah</u>		
Utang lain-lain	223.775	250.033
Operasional	64.179	102.515
Pendapatan diterima di muka	12.735	9.579
Gaji dan tunjangan	3.462	3.675
Setoran jaminan	2.786	2.209
Lain-lain	4.615	9.140
Sub jumlah	311.552	377.151
Mata Uang Asing		
Operasional	894	856
Sub jumlah	894	856
Jumlah	312.446	378.007

25. OTHER LIABILITIES

The details of other liabilities are as follows:

Third parties	
<u>Rupiah</u>	
Other payables	
Operational	
Unearned revenues	
Salaries and allowances	
Guarantee deposits	
Others	
Sub total	
Foreign Currencies	
Operational	
Sub total	
Total	

Setoran jaminan terutama merupakan setoran jaminan dari debitur untuk penyelesaian kredit.

Beban akrual operasional terutama terdiri dari beban akrual listrik, telepon, air, sewa, pemeliharaan, keamanan dan operasional lainnya.

Utang lain-lain merupakan fasilitas pinjaman yang diterima dari PT Sarana Multigriya Financial dalam rangka penyaluran KPR Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan surat perjanjian No:121/PP/SMF-BANKARTHAGRAHA/VIII/2018 dengan jangka waktu paling lama 15 tahun.

Guarantee deposits mainly represent deposit from debtor to settle the loan.

Operational accrued expenses represent accrued expenses of electricity, telephone, water, rent, maintenance, security and other operational.

Others payable represent loans received from PT Sarana Multigriya Financial in the framework distribution of KPR Sejahtera for low income society based on agreement letter No:121/PP/SMF-BANKARTHAGRAHA/VIII/2018 with the longest period of time 15 years.

26. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Bank memberikan imbalan pasca kerja kepada karyawan tetap yang telah mencapai usia pensiun normal pada umur 55 tahun berdasarkan Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 35 Tahun 2021 dan mengakui liabilitas imbalan pasca kerja sesuai dengan PSAK 219. Jumlah karyawan Bank yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sejumlah 934 karyawan dan 1.114 karyawan.

Tabel di bawah ini merupakan ringkasan komponen beban imbalan pasca kerja yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan liabilitas imbalan pasca kerja yang dicatat pada laporan posisi keuangan, yang dihitung dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, sesuai dengan laporannya tertanggal 5 Februari 2025 dan tanggal 13 Februari 2024 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

a. Beban imbalan pasca kerja

	2024	2023
Biaya bunga	9.123	10.428
Biaya jasa kini	7.965	8.928
Jumlah	17.088	19.356

b. Liabilitas imbalan pasca kerja

	2024	2023
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	99.151	118.875

Perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal tahun	118.875	124.006
Biaya jasa kini	7.965	8.928
Biaya bunga	9.123	10.428
Keuntungan aktuarial	(21.141)	(1.495)
Pembayaran manfaat	(15.671)	(22.992)
Saldo akhir tahun	99.151	118.875

Perubahan liabilitas imbalan pasca kerja pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal tahun	118.875	124.006
Beban imbalan pasca kerja (Catatan 32)	17.088	19.356
Pembayaran manfaat	(15.671)	(22.992)
Keuntungan aktuarial	(21.141)	(1.495)
Saldo akhir tahun	99.151	118.875

Perubahan pengukuran kembali kerugian aktuarial pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal tahun	76.090	74.595
Keuntungan aktuarial	21.141	1.495
Saldo akhir tahun	97.231	76.090

26. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY

The Bank provides post-employment benefits to permanent employees who have reached normal retirement age of 55 years in accordance with the Omnibus Law No. 11 in 2020 and Government regulation No. 35 in 2021 and recognizes post-employment benefit obligations in accordance with SFAS 219. The number of Bank employees who are entitled to post-employment benefits as of December 31, 2024 and 2023 is 934 employees and 1,114 employees, respectively.

The following tables summarize the components of post-employment benefits expense recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income and post-employment benefits liability recognized in the statement of financial position as determined using the "Projected Unit Credit" method by an independent actuary, Actuarial Consulting Office of Agus Susanto, based on its reports dated February 5, 2025 and dated February 13, 2024 for the year ended December 31, 2024 and 2023.

a. Post-employment benefits expense

	2024	2023	
Interest cost	9.123	10.428	
Current service cost	7.965	8.928	
Total	17.088	19.356	

b. Post-employment benefits liability

	2024	2023	
Present value of defined benefits obligation	99.151	118.875	

The changes in the present value of defined benefits obligation in the current year are as follows:

	2024	2023	
Balance at beginning of year	118.875	124.006	
Current service cost	7.965	8.928	
Interest cost	9.123	10.428	
Actuarial gains	(21.141)	(1.495)	
Benefits payment	(15.671)	(22.992)	
Balance at end of year	99.151	118.875	

The changes in post-employment benefits liability in the current year are as follows:

	2024	2023	
Balance at beginning of year	118.875	124.006	
Post-employment benefits expenses (Note 32)	17.088	19.356	
Benefits payment	(15.671)	(22.992)	
Actuarial gains	(21.141)	(1.495)	
Balance at end of year	99.151	118.875	

The changes in remeasurement on actuarial losses in the current year are as follows:

	2024	2023	
Balance at beginning of year	76.090	74.595	
Actuarial gains	21.141	1.495	
Balance at end of year	97.231	76.090	

26. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

26. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (continued)

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam menghitung liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used to determine post-employment benefits liability as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Usia pensiun normal	55 tahun/ years	55 tahun/ years	Normal retirement age
Tingkat mortalita	TMI-IV (2019)	TMI-IV (2019)	Mortality rate
Tingkat kenaikan gaji	7% per tahun/ per annum	7% per tahun/ per annum	Salary increase rate
Tingkat bunga	7,1% per tahun/ per annum	6,7% per tahun/ per annum	Interest rate

Rincian nilai kini kewajiban imbalan pasti, defisit program dan penyesuaian pengalaman yang timbul pada liabilitas program untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan empat periode tahunan sebelumnya adalah sebagai berikut:

The details of the present value of defined benefits obligation, deficit program and experience adjustments arising on the plan liabilities for the year ended December 31, 2024 and the previous four years are as follows:

	2024	2023	2022	2021	2020	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	99.151	118.875	124.006	153.778	242.279	Present value of defined benefits obligation
Defisit program	99.151	118.875	124.006	153.778	242.279	Deficit program
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	19.053	4.474	652	37.124	23.868	Experience adjustments on plan liabilities

Tabel berikut menunjukkan analisis sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The following table demonstrates the sensitivity analysis to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the present value of defined benefit obligation and current service cost as of December 31, 2024 and 2023:

	2024	2023	
Kenaikan suku bunga 1%			Increase in interest rate of 1%
Nilai kini kewajiban imbalan pasti		94.310	Present value of defined benefit obligation
Biaya jasa kini		9.677	Current service cost
Penurunan suku bunga 1%			Decrease in interest rate of 1%
Nilai kini kewajiban imbalan pasti		104.550	Present value of defined benefit obligation
Biaya jasa kini		9.889	Current service cost

Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti adalah 11 (sebelas) tahun.

The average duration of the defined benefit obligation is 11 (eleven) years.

Perkiraan analisis jatuh tempo atas nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of present value of defined benefits obligation as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	2024	2023	
Kurang dari 1 tahun	23.155	30.400	Less than 1 year
1 sampai dengan 5 tahun	31.769	32.630	1 up to 5 years
5 sampai dengan 10 tahun	21.907	29.870	5 up to 10 years
Lebih dari 10 tahun	22.320	25.975	More than 10 years
Jumlah	99.151	118.875	Total

Manajemen telah mereviu asumsi yang digunakan dan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa saldo liabilitas imbalan pasca kerja tersebut telah memadai untuk menutupi kewajiban Bank kepada karyawannya sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 35 Tahun 2021 untuk yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The management has reviewed the assumptions used and believed that these assumptions are adequate. Management believes that the balance of post-employment benefits liability is adequate to cover the Bank's liability for its employees in accordance with the Omnibus Law No. 11 in 2020 and Government regulation No. 35 in 2021 for date ended December 31, 2024 and 2023.

27. PINJAMAN SUBORDINASI

Informasi Sumber Pendanaan lainnya

Dalam rangka memperkuat permodalan dan mendukung ekspansi usaha Perseroan menerbitkan *Long Term Notes* (LTN) Subordinasi I sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 39/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran umum. Perseroan menerbitkan *Long Term Notes* (LTN) Subordinasi I sebesar Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah) dan terbagi 2 tahap yakni tahap I di tahun 2020 sebesar Rp200.000.000.000 (Dua Ratus Miliar Rupiah) dan tahap II di tahun 2021 sebesar Rp300.000.000.000 (Tiga Ratus Miliar Rupiah).

LTN Subordinasi I diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo LTN Subordinasi I tahap I yang diterbitkan oleh perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang LTN Subordinasi I tahap I. Tingkat bunga LTN Subordinasi I tahap I adalah sebesar 9,50% (Sembilan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu LTN Subordinasi I tahap I adalah 7 (tujuh) tahun, dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan dari OJK. Pembayaran LTN Subordinasi I tahap I pada saat tanggal jatuh tempo yaitu 30 Desember 2027. LTN Subordinasi I tahap II tidak diterbitkan karena manajemen berkeyakinan permodalan saat ini sudah dapat mendukung ekspansi usaha untuk masa mendatang. Informasi mengenai tabel kronologi penerbitan LTN Subordinasi I tahap I tahun 2020 PT Bank Artha Graha Internasional Tbk dapat dilihat di bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan.

Pinjaman subordinasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp200.000.000.000.

28. MODAL SAHAM

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

27. SUBORDINATED LOAN

Other Funding Source Information

In order to strengthen capital and support business expansion, the Company issued Subordinated Long Term Notes (LTN) I as stipulated in the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 39/POJK.04/2019 concerning Issuance of Debt Securities and / or Sukuk which are conducted without going through a public offering. The Company issues Subordinated Long Term Notes (LTN) I of Rp500,000,000,000 (Five Hundred Billion Rupiah) namely Phase I in 2020 amounting to Rp200,000,000,000 (Two Hundred Billion Rupiah) and Phase II in 2021 amounting to Rp300,000,000,000 (Three Hundred Billion Rupiah).

Subordinated LTN I is issued without scrips, except for the Jumbo Certificate Subordinated LTN I phase I issued by the company on behalf of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as evidence of debt for the interest of the holder of Subordinated LTN I phase I. The interest rate for Subordinated LTN I phase I is equal to 9.50% (Nine point five zero percent) per annum with a term of LTN Subordinated I phase I of 7 (seven) years, and can only be paid off after obtaining approval from OJK. Payment of Subordinated LTN I phase I is due on the due date, which is December 30, 2027. LTN Subordinated I phase II was not issued because management believed that the current capital was able to support business expansion in the future. Information regarding the chronology table for the issuance of Subordinated LTN I phase I 2020 of PT Bank Artha Graha Internasional Tbk can be seen in the Company Profile chapter in the Annual Report.

Subordinated loans as of December 31, 2024 and 2023 is Rp200,000,000,000.

28. SHARE CAPITAL

The details of the Bank's authorized capital, issued and fully paid as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

2024 dan/ and 2023					
Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Nominal per saham (rupiah penuh)/ Par value per share (full rupiah amount)	Jumlah modal disetor (rupiah penuh)/ Total paid-up capital (full rupiah amount)	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Shareholders
Modal dasar					Authorized capital
Saham biasa	52.310.000.000	110,88	5.800.132.800.000	-	Common stock
Modal ditempatkan dan disetor penuh					Issued and fully paid capital
PT Cakra Inti Utama	2.908.909.842	110,88	322.539.923.281	14,38%	PT Cakra Inti Utama
PT Pirus Platinum Murni	1.361.238.977	110,88	150.934.177.770	6,73%	PT Pirus Platinum Murni
PT Cerana Artha Putra	1.322.157.253	110,88	146.600.796.213	6,54%	PT Cerana Artha Putra
PT Puspita Bisnispuri	1.087.913.290	110,88	120.627.825.595	5,38%	PT Puspita Bisnispuri
PT Arthamulia Sentosajaya	839.439.091	110,88	93.077.006.410	4,15%	PT Arthamulia Sentosajaya
PT Karya Nusantara Permai	712.647.774	110,88	79.018.385.181	3,52%	PT Karya Nusantara Permai
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	11.991.106.680	110,88	1.329.573.908.678	59,30%	Public (each below 5%)
Jumlah	20.223.412.907		2.242.372.023.128	100%	Total

28. MODAL SAHAM (lanjutan)

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Bank tersebut di atas telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Laporan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0110476 tanggal 21 Desember 2016.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Juni 2016, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si., tanggal 20 Desember 2016, para pemegang saham Bank memutuskan untuk menyetujui penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp110,88 (Rupiah penuh) per saham disertai dengan Waran yang jumlahnya tidak melebihi dari 35% dari jumlah saham yang ditempatkan Bank pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bank melakukan Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) kepada para pemegang saham Bank dengan memberikan HMETD untuk menerbitkan sebanyak 2.707.918.808 saham dengan nilai nominal Rp110,88 (Rupiah penuh) per saham dan harga penawaran Rp111,00 (Rupiah penuh) per saham, serta 4.513.198.013 Waran Seri I yang mewakili 34,48% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum PUT V ini dilaksanakan. Setiap 6 (enam) saham hasil pelaksanaan HMETD berhak memperoleh 10 (sepuluh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga penawaran Rp111,00 (Rupiah penuh). Masa berlaku pelaksanaan Waran adalah sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 7 Desember 2021.

Jumlah dana yang diperoleh dari penambahan modal saham dengan HMETD adalah sebesar Rp300.579.

Berdasarkan Akta No 05 tanggal 10 Maret 2021 dari Mochamad Nova Faisal S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, modal ditempatkan dan disetor Bank sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 meningkat menjadi 15.934.675.830 saham sehubungan dengan Konversi Waran Seri I sebanyak 138.480.733 saham. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0158789 tanggal 12 Maret 2021.

Berdasarkan Akta No 117 tanggal 16 Agustus 2021 dari Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta, modal ditempatkan dan disetor Bank sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 meningkat menjadi 15.982.844.471 saham sehubungan dengan Konversi Waran Seri I sebanyak 48.168.641 saham. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0438182 tanggal 18 Agustus 2021.

28. SHARE CAPITAL (continued)

The increase in the Bank's issued and fully paid capital aforementioned has been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights Department of the Republic of Indonesia under Admission Notification Amendment No. AHU-AH.01.03-0110476 dated December 21, 2016.

Based on the Resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 30, 2016, as covered by Notarial Deed of Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si., dated December 20, 2016, the Bank's shareholders resolved to agree with the issuance of new shares through Rights Issue With Pre-Emptive Rights (PMHMETD) of 5,000,000,000 shares with par value of Rp110.88 (full Rupiah amount) per share attached with Warrants not exceeding 35% of the Bank's total issued shares at the time of submission of the Registration Statement to OJK.

In connection with the above matter, the Bank conducted Limited Public Offering V (LPO V) to the Bank's shareholders through Rights Issue With Pre-Emptive Rights (HMETD) by issuing of 2,707,918,808 shares with par value of Rp110.88 (full Rupiah amount) per share and offering price of Rp111.00 (full Rupiah amount) per share, and 4,513,198,013 Series I Warrant which represent 34.48% of total issued and fully paid shares before LPO V conducted. Every 6 (six) shares from HMETD entitles to obtain 10 (ten) Series I Warrant where by 1 (one) Series I Warrant can be used for buy 1 (one) new share with offering price of Rp111.00 (full Rupiah amount). The term of Warrant execution starting from June 19, 2017 up to December 7, 2021.

The total funds received from Rights Issue With Pre-Emptive Rights (HMETD) amounted to Rp300,579.

Based on Deed No. 05 dated March 10, 2021 from Mochamad Nova Faisal S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Bank's issued and paid-up capital up to March 10, 2021 increased to 15,934,675,830 shares in connection with the Convertible Warrant Series I of 138,480,733 share. This amendment deed has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-AH.01.03-0158789 March 12, 2021.

Based on Deed No. 117 dated August 16, 2021 from Christina Dwi Utami S.H., M. Hum., M.Kn. Notary in Jakarta, the Bank's issued and paid-up capital up to July 29, 2021 increased to 15,982,844,471 shares in connection with the Series I Conversion of Warrants of 48,168,641 shares. This amendment deed has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-AH.01.03-0438182 dated August 18, 2021.

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of and For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

28. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta No 145 tanggal 10 Desember 2021 dari Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta, modal ditempatkan dan disetor Bank sampai dengan tanggal 08 Desember 2021 meningkat menjadi 20.223.412.907 saham sehubungan dengan Konversi Waran Seri I sebanyak 4.240.568.436 saham. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0485846 tanggal 15 Desember 2021.

29. TAMBAHAN MODAL DISETOR – BERSIH

Rincian tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024 dan/ and 2023
Penawaran umum perdana tahun 1990	43.750
Saham bonus pada tahun 1993	(25.000)
Bagian yang tidak dapat dicatat (<i>partial delisting</i>) pada tahun 1997	(12.500)
Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) pada tahun 1999	818.125
Penyesuaian nilai aset bersih Bank hasil <i>merger</i> dalam rangka penggabungan usaha dengan PT Bank Artha Graha	(408.457)
Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) pada tahun 2007	3.461
Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) pada tahun 2008	323
Biaya emisi saham	(915)
Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) pada tahun 2012	542
Biaya emisi saham	(2.407)
Penawaran Umum Terbatas IV (PUT V) pada tahun 2016	325
Biaya emisi saham	(3.080)
Pengampunan Pajak	586
Pelaksanaan Waran Seri I	532
Tambahan modal disetor – bersih	415.285

30. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga diperoleh dari:

	2024	2023
Kredit yang diberikan		
<i>Revolving loans</i>	442.234	333.705
<i>Fixed loans</i>	412.869	534.312
Konsumtif	156.570	169.791
Pinjaman rekening koran	19.408	15.395
Efek-efek		
Obligasi Pemerintah	409.855	261.539
Obligasi Korporasi	66.923	69.730
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	-	706
Wesel ekspor	8.229	4.887
Penempatan pada Bank Indonesia		
Jasa giro Bank Indonesia	54.642	34.037
Sertifikat deposito Bank Indonesia	39.889	38.668
<i>Call money</i>	20.166	16.783
Penempatan pada bank lain dan lain-lain	15.279	5.200
Jumlah	1.646.064	1.484.753

Jumlah pendapatan bunga dari pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp18.119 dan Rp15.342 (Catatan 38).

28. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Deed No. 145 dated December 10, 2021 from Christina Dwi Utami S.H., M. Hum., M.Kn. Notary in Jakarta, the Bank's issued and paid-up capital up to December 08, 2021 increased to 20,223,412,907 shares in connection with the Conversion of Warrant Series I totaling 4,240,568,436 shares. This amendment deed has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-AH.01.03-0485846 December 15, 2021.

29. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL – NET

The details of additional paid-in capital as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024 dan/ and 2023	
	43.750	Initial public offering in 1990
	(25.000)	Bonus shares in 1993
	(12.500)	Partial delisting in 1997
	818.125	Limited Public Offering I (LPO I) in 1999
	(408.457)	Bank's net asset value adjustment resulting from the merger in the context of its merger with PT Bank Artha Graha
	3.461	Limited Public Offering II (LPO II) in 2007
	323	Limited Public Offering III (LPO III) in 2008
	(915)	Shares issuance costs
	542	Limited Public Offering IV (LPO IV) in 2012
	(2.407)	Shares issuance costs
	325	Limited Public Offering IV (LPOV) in 2016
	(3.080)	Shares issuance costs
	586	Tax Amnesty
	532	Execution of Series I Warrants
Tambahan modal disetor – bersih	415.285	Additional paid-in capital – net

30. INTEREST INCOME

This account represents interest income from:

	2024	2023	
			Loans
	442.234	333.705	Revolving loans
	412.869	534.312	Fixed loans
	156.570	169.791	Consumptive
	19.408	15.395	Overdraft
			Marketable securities
	409.855	261.539	Government Bonds
	66.923	69.730	Corporate Bonds
	-	706	Rupiah securities of Bank Indonesia
	8.229	4.887	Export bill
			Placements with Bank Indonesia
	54.642	34.037	Interest from Bank Indonesia
	39.889	38.668	Certificates deposits of Bank Indonesia
	20.166	16.783	Call money
	15.279	5.200	Placements with other banks and others
Jumlah	1.646.064	1.484.753	Total

Total interest income from related parties for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp18,119 and Rp15,342, respectively (Note 38).

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of and For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31. BEBAN BUNGA

Akun ini merupakan beban bunga atas:

	2024	2023
<u>Rupiah</u>		
Simpanan nasabah	640.501	448.718
Simpanan dari bank lain	21.331	6.260
LTN Subordinasi I tahap I	19.000	19.000
Dana kelolaan tidak kena pajak	16.940	18.674
Sub jumlah	697.772	492.652
<u>Mata Uang Asing</u>		
Simpanan nasabah	37.208	10.122
Simpanan dari bank lain	1.015	-
Sub jumlah	38.223	10.122
Jumlah	735.995	502.774

Jumlah beban bunga dari pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar dan Rp30.723 dan Rp15.422 (Catatan 38).

31. INTEREST EXPENSES

This account represents interest expenses on:

<u>Rupiah</u>	
Deposits from customer	
Deposits from other banks	
Subordinated LTN I stage I	
Non-taxable management funds	
Sub total	
<u>Foreign Currencies</u>	
Deposits from customers	
Deposits from other banks	
Sub total	
Total	

Total interest expenses from related parties for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp30,723 and Rp15,422, respectively (Note 38).

32. BEBAN TENAGA KERJA

Rincian beban tenaga kerja adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Gaji	194.772	192.200
Tunjangan	58.126	52.193
Imbalan pasca kerja (Catatan 26)	17.088	19.356
Asuransi	16.244	15.467
Lain-lain	839	746
Jumlah	287.069	279.962

32. EMPLOYEE EXPENSES

The details of employee expenses are as follows:

Salaries	
Allowances	
Post-employment benefits (Note 26)	
Insurance	
Others	
Total	

33. BEBAN OPERASIONAL

Rincian beban operasional adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Operasional	122.712	272.650
Teknologi dan informasi	85.217	66.459
Keamanan dan kebersihan	48.671	45.493
Premi penjaminan LPS (Catatan 43)	43.722	36.596
Jasa profesional	30.368	27.737
Jasa <i>outsourcing</i>	25.747	23.189
Komunikasi	15.165	14.316
Utilitas	14.443	13.623
Iuran	14.162	12.291
Transportasi	13.258	11.753
Sewa peralatan	11.060	9.335
Pengembangan karyawan	10.531	10.703
Pemeliharaan	10.395	13.238
Asuransi	10.265	10.572
Barang cetakan	8.007	4.693
<i>Fee</i>	7.474	3.301
ATM	4.920	5.207
Pajak	2.111	1.402
Administrasi bank	881	927
Legal	81	296
Lainnya	68.552	5.851
Jumlah	547.742	589.632

33. OPERATIONAL EXPENSES

The details of operational expenses are as follows:

Operational	
Technology and information	
Security and cleaning	
Premium paid to LPS (Note 43)	
Professional fees	
Outsourcing service	
Communication	
Utilities	
Dues	
Transportation	
Rent equipment	
Training	
Maintenance	
Insurance	
Printing	
Fee	
ATM	
Tax	
Bank administration	
Office supplies	
Others	
Total	

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (continued)
As of and For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

34. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Penyusutan (Catatan 16)	70.369	65.054
Pemasaran dan promosi	51.440	42.365
Perbaikan dan pemeliharaan	22.822	15.542
Amortisasi (Catatan 17)	15.919	11.309
Jumlah	160.550	134.270

35. KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN – BERSIH

Rincian kerugian (pemulihan) penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Rupiah		
Agunan yang diambil alih (Catatan 18)	38.810	87.684
Kredit yang diberikan (Catatan 13h)	38.997	43.491
Efek-efek (Catatan 8 dan 9)	360	138
Tagihan lain-lain	153	(208)
Giro pada bank lain	70	-
Sub jumlah	78.390	131.105
Mata Uang Asing		
Giro pada bank lain	20	(67)
Kredit yang diberikan (Catatan 13h)	(3.559)	(27.381)
Efek-efek (Catatan 8 dan 9)	175	-
Sub jumlah	(3.364)	(27.448)
Jumlah	75.026	103.657

36. PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL – NETO

Rincian pendapatan (beban) non-operasional adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba penjualan aset tetap (Catatan 16)	211	231
Tanggung jawab sosial Korporasi	(7.904)	(10.995)
Lain-lain	181	7.045
Jumlah	(7.512)	(3.719)

34. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

The details of general and administrative expense are as follows:

Depreciation (Note 16)
Marketing and promotion
Repairs and maintenance
Amortization (Note 17)
Total

35. IMPAIRMENT LOSS ON FINANCIAL AND NON-FINANCIAL ASSETS – NET

Details of loss (recovery) for impairment of financial and non-financial assets are as follows:

Rupiah
Foreclosed assets (Note 18)
Loans (Note 13h)
Marketable securities (Note 8 and 9)
Other receivables
Current accounts in other banks
Sub total
Foreign Currencies
Current accounts in other banks
Loans (Note 13h)
Marketable securities (Note 8 and 9)
Sub total
Total

36. NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET

The details of non-operating income (expenses) are as follows:

Gain on sale of fixed assets (Note 16)
Corporate social responsibility
Others
Total

37. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun berjalan. Rincian perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	2024
Laba tahun berjalan untuk perhitungan laba per saham dasar	152.474
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham dasar	20.223
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba bersih per saham dilusian	20.223
Laba per saham dasar (rupiah penuh)	7,54
Laba per saham dilusian (nilai penuh)	7,54

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih yang tersedia bagi pemegang saham dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba (rugi) per saham dilusian dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih yang tersedia bagi pemegang saham dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak ada sekuritas konversi yang berpotensi mendilusi laba (rugi) per saham dasar di masa depan.

38. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga.

Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Rincian saldo dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2024	2023
<u>Laporan posisi keuangan</u>		
Kredit yang diberikan – bersih (Catatan 13)		
PT Danayasa Arthatama Tbk	123.850	142.969
Panji Yudha Winata	75.031	82.718
Kharisma Arya Paksi	67.012	49.364
PT Andara Duta Mandiri	29.860	-
Samir	21.394	22.943
Andi Bharata Winata	8.205	10.821
Emelia Susanto	1.462	2.305
Jumlah – bersih	326.814	311.120
Persentase dari jumlah kredit yang diberikan	3,08%	2,56%
Persentase dari jumlah aset	1,08%	1,19%

37. BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earning per share is compute by dividing profit for the year with the weighted-average number of shares outstanding during the year. The details of calculation of basic earning per share is as follows:

	2023
Profit for the year to be accounted for basic earnings per share	146.753
The weighted-average of common stock for computation of basic earnings per share	20.223
Weighted average number of ordinary shares for computation of diluted earnings per share	20.223
Basic earnings per share (full rupiah amount)	7,26
Earnings per diluted (full amount)	7,26

Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing the net earnings (loss) attributable to shareholders by the weighted average number of ordinary shares on issue during the year.

Diluted earnings (loss) per share is calculated by dividing the net profit (loss) available to shareholders by the weighted average ordinary shares adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

As of December 31, 2024 and 2023, there are no convertible securities that have the potential to dilute the basic earnings (loss) per share in the future.

38. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Bank entered into transaction with related parties. Transactions with related parties were conducted under terms and conditions similar to those granted to third parties.

Balance and transactions with related parties

The details of balance with related parties are as follows:

<u>Statement of financial position</u>
Loans - net (Note 13)
PT Danayasa Arthatama Tbk
Panji Yudha Winata
Kharisma Arya Paksi
PT Andara Duta Mandiri
Samir
Andi Bharata Winata
Emelia Susanto
Total – net
Percentage from total loans
Percentage from total assets

38. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

38. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Balance and transactions with related parties (continued)

	2024	2023
<u>Laporan posisi keuangan (lanjutan)</u>		
Simpanan nasabah (Catatan 20)		
Giro	420.054	337.908
Tabungan	38.911	40.220
Deposito berjangka	720.899	841.451
Jumlah	1.179.864	1.219.579
Persentase dari jumlah simpanan nasabah	4,94%	5,91%
Persentase dari jumlah liabilitas	4,58%	5,56%

<u>Statement of financial position (continued)</u>
Deposits from customers (Note 20)
Demand deposits
Savings deposits
Time deposits
Total

Rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of transactions with related parties are as follows:

	2024	2023
<u>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain</u>		
Pendapatan bunga (Catatan 30)	18.119	15.342
Persentase dari jumlah pendapatan bunga	2,46%	1,03%
Beban bunga (Catatan 31)	30.723	15.422
Persentase dari jumlah beban bunga	4,17%	3,07%
Manajemen kunci (Catatan 1c)	37.036	37.126
Persentase dari jumlah beban tenaga kerja	12,90%	13,26%
Beban sewa gedung	22.059	24.187
Persentase dari jumlah beban operasi	4,03%	4,10%

<u>Statement of profit or loss and other comprehensive Income</u>
Interest income (Note 30)
Percentage from total interest income
Interest expenses (Note 31)
Percentage from total interest expenses
Key management (Note 1c)
Percentage from total personnel expenses
Rent building expenses
Percentage from total operational expenses

- Transaksi *Build, Operate, and Transfer* (BOT) atas Gedung Artha Graha dengan PT Buanagraha Arthaprima selama jangka waktu 40 tahun (Catatan 16).
- Bank melakukan transaksi sewa gedung dengan PT Buanagraha Arthaprima dan diakui sebagai aset hak guna.
- Komitmen dan kontinjensi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp74.172 dan Rp40.000. (Catatan 39).

- The transaction of *Build, Operate, and Transfer* (BOT) of Artha Graha Building with PT Buanagraha Arthaprima has a term of 40 years (Note 16).
- The Bank has entered into a building rental with PT Buanagraha Arthaprima and recognized as right of use assets.
- Commitments and contingencies with related parties as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp74,172 and Rp40,000 respectively (Note 39).

Sifat relasi

Nature of relationship

Pihak-pihak berelasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Bank.

Related parties are companies and individuals who directly or indirectly have relationships with the Bank through ownership or management.

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat dari Hubungan/ Nature of Relationship	Sifat dari Transaksi/ Nature of Transaction
PT Buanagraha Arthaprima	Memiliki kesamaan pemegang saham/ Has same shareholders	BOT, giro dan deposito berjangka/ BOT, demand deposits and time deposits
PT Cerana Arthaputra	Pemegang saham Bank/ Bank's shareholder	Jaminan Perusahaan dan giro/ Corporate guarantee and demand deposits
PT Karya Nusantara Permai	Pemegang saham Bank/ Bank's shareholder	Jaminan Perusahaan dan giro/Corporate guarantee and demand deposits
PT Pirus Platinum Murni	Pemegang saham Bank/ Bank's shareholder	Jaminan Perusahaan dan giro/ Corporate guarantee and demand deposits
PT Cakra Inti Utama	Pemegang saham Bank/ Bank's shareholder	Giro dan deposito berjangka/ Demand deposits and time deposits
PT Puspita Bisnisuri	Pemegang saham Bank/ Bank's shareholder	Jaminan Perusahaan dan giro/ Corporate guarantee and demand deposits

38. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

38. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat relasi (lanjutan)

Nature of relationship (continued)

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat dari Hubungan/ Nature of Relationship	Sifat dari Transaksi/ Nature of Transaction
PT Arthamulia Sentosajaya	Pemegang saham Bank/ Bank's shareholder	Jaminan Perusahaan dan giro/ Corporate guarantee and demand deposits
PT Andana Utamagraha	Afiliasi/ Affiliate	Giro / Demand deposits
PT Electronic City Indonesia Tbk	Afiliasi/ Affiliate	Giro dan deposito berjangka/ Demand deposits and time deposits
PT Erajaya Swasembada Tbk	Afiliasi/ Affiliate	Giro/ Demand deposits
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk	Afiliasi/ Affiliate	Giro/ Demand deposits
PT Karya Megah Permai	Afiliasi/ Affiliate	Giro/ Demand deposits
PT Makmur Jaya Serasi	Afiliasi/ Affiliate	Giro dan deposito berjangka/ Demand deposits and time deposits
PT Tunas Satya Prakarsa	Afiliasi/ Affiliate	Giro dan deposito berjangka/ Demand deposits and time deposits
PT Grahaputra Sentosa	Afiliasi/ Affiliate	Giro/ Demand Deposits
PT Artha Telekomindo	Afiliasi/ Affiliate	Giro dan deposito berjangka/ Demand deposits and time deposits
PT Danayasa Arthatama	Afiliasi/ Affiliate	Giro/ Demand Deposits
PT Agung Sedayu	Afiliasi/ Affiliate	Giro dan deposito berjangka/ Demand deposits and time deposits
PT Agung Sedayu Permai	Afiliasi/ Affiliate	Giro dan deposito berjangka/ Demand deposits and time deposits
PT Multi Artha Pratama	Afiliasi/ Affiliate	Giro dan deposito berjangka/ Demand deposits and time deposits
PT Global Persada Inti	Afiliasi/ Affiliate	Giro dan deposito berjangka/ Demand deposits and time deposits
PT Artha Propertindo Indonesia	Afiliasi/ Affiliate	Giro/ Demand Deposits
PT Adinusa Puripratama	Afiliasi/ Affiliate	Giro/ Demand Deposits
PT Harapan Sinar Sejahtera	Afiliasi/ Affiliate	Giro/ Demand Deposits
PT Catur Kusuma Abadi Sejahtera	Afiliasi/ Affiliate	Giro dan deposito berjangka/ Demand deposits and time deposits
PT Gemilang Inti Persada	Afiliasi/ Affiliate	Giro/ Demand Deposits
PT Artha Graha Network	Afiliasi/ Affiliate	Giro/ Demand Deposits
PT Detik Amita Sakti	Afiliasi/ Affiliate	Giro/ Demand Deposits
PT Lava Pratama Indonesia	Afiliasi/ Affiliate	Giro/ Demand Deposits
PT Lentera Duasatu Propertindo	Afiliasi/ Affiliate	Giro/ Demand Deposits
PT Kharisma Arya Paksi	Afiliasi/ Affiliate	Giro dan deposito berjangka/ Demand deposits and time deposits
PT Kresna Aji Sembada	Afiliasi/ Affiliate	Giro/ Demand Deposits
PT Artha Graha General Insurance	Afiliasi/ Affiliate	Giro dan deposito berjangka/ Demand deposits and time deposits
PT Bangun Kosambi Sukses	Afiliasi/ Affiliate	Giro/ Demand Deposits
PT Pantai Indah Kapuk Dua	Afiliasi/ Affiliate	Giro/ Demand Deposits
Yayasan Buddha Tzu Chi	Afiliasi/ Affiliate	Giro dan deposito berjangka/ Demand deposits and time deposits
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif/ Board of Commissioners, Directors and Executive Officers	Manajemen dan Karyawan Kunci/ Management and employees	Giro, tabungan dan deposito berjangka/ Demand, saving and time deposits

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

All balances and significant transactions with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

39. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Ikhtisar komitmen dan kontinjensi Bank yang dinyatakan dalam nilai kontrak adalah sebagai berikut:

	2024	2023
<u>Komitmen:</u>		
Tagihan komitmen:		
Pembelian spot dan forward valuta asing	222.895	421.161
Liabilitas komitmen:		
Fasilitas kredit yang belum digunakan	(973.904)	(466.698)
Penjualan spot dan forward valuta asing	(23.689)	(208.905)
L/C yang masih beredar	(37.688)	-
Lainnya	(6.592)	-
Liabilitas komitmen – bersih	(818.978)	(254.442)
<u>Kontinjensi:</u>		
Tagihan kontinjensi:		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	6.178	6.178
Liabilitas kontinjensi:		
Garansi yang diterbitkan	(19.227)	(24.759)
Setoran titipan	(113.497)	(104.691)
Lain-lain	(164.873)	(156.692)
Liabilitas kontinjensi – bersih	(291.419)	(279.964)
Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi – bersih	(1.110.397)	(534.406)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank memiliki saldo transaksi komitmen dan kontinjensi dengan pihak-pihak berelasi masing-masing sebesar Rp74.172 dan Rp40.000 (Catatan 38).

Perkara hukum

Sehubungan dengan Putusan Perkara Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dimana Bank adalah Kreditur atas sebagian harta benda yang menjadi sitaan dalam putusan di atas.

Aset sitaan tersebut merupakan aset milik Bank yang dijaminkan menurut hukum sejak Tahun 2016 oleh salah satu debitur Bank, jauh sebelum penyitaan.

Adapun alasan Bank melakukan upaya hukum Keberatan atas Penyitaan tersebut adalah karena Bank merupakan Kreditur Beritikad Baik yang dilindungi oleh hukum yang sedang mengupayakan dan mempertahankan hak Bank sebagaimana mestinya.

39. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The summary of the Bank's commitments and contingencies at contractual amounts is as follows:

<u>Commitments:</u>	
Commitments receivables:	
Purchases of spot and forward foreign currency purchased	
Commitments liabilities:	
Unused loan facilities	
Sale of spot and forward foreign currency	
Outstanding irrevocable L/C	
Others	
Commitments liabilities – net	
<u>Contingencies:</u>	
Contingent receivables:	
Past due interest revenues	
Contingent liabilities:	
Guarantee issued	
Deposits	
Others	
Contingent liabilities – net	
Total commitments and contingencies liabilities – net	

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank has commitments and contingencies transactions balances with related parties amounted to Rp74,172 and Rp40,000, respectively (Note 38).

Legal matters

In connection with Case Decision Number 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst jo. DKI Jakarta High Court Decision Number 4/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI conducted by the Public Prosecutor at the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia where the Bank is a Creditor of some of the property confiscated in the above decision.

The confiscated assets are assets owned by the Bank that have been legally pledged since 2016 by one of the Bank's debtors, long before the foreclosure.

The reason why the Bank objected to the confiscation is because the Bank is a Good Faith Creditor protected by law who is seeking and defending the Bank's rights as it should.

40. KREDIT PENERUSAN DARI BANK INDONESIA

Pada tanggal 12 Mei 1999, Bank dengan Bank Indonesia (BI) menandatangani Perjanjian Kredit Penerusan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro (KPKM), dimana BI menunjuk Bank sebagai penyalur Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk KPKM dan menyalurkan kepada debitur. Fasilitas yang diberikan kepada Bank adalah sebesar Rp31.472. Jangka waktu pinjaman kepada debitur adalah 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dan fasilitas kepada Bank akan berakhir pada saat seluruh pinjaman pokok dan bunga yang tercantum dalam perjanjian telah dilunasi. Fasilitas kepada Bank dikenakan bunga sebesar 13% per tahun dan suku bunga KPKM kepada debitur sebesar 16% per tahun.

Bank tidak menanggung risiko kredit atas penyaluran KPKM tersebut.

41. POSISI DEvisa BERSIH

Menurut ketentuan Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 perubahan keempat atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Bersih Bank Umum tanggal 17 Juli 2003, PDN ditetapkan maksimum sebesar 20% modal.

PDN adalah penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap mata uang asing dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, PDN Bank adalah sebagai berikut:

40. CHANNELING LOANS FROM BANK INDONESIA

On May 12, 1999, Bank and Bank Indonesia (BI) entered into channeling loans agreement to provide loans to Small and Micro Enterprises (KPKM), where by BI has appointed Bank to channel the Bank Indonesia Liquidity Loan (KLBI) for KPKM and provide the loan to its debtors. This facility amounting to Rp31,472. The loan period to the Bank's debtors for 2 (two) to 6 (six) years and this facility will be expired after all principal and interest as stated in the loan agreement are being settled by the debtors. The facility to the Bank bears interest rate per annum of 13% and interest rate to its debtors for KPKM of 16% per annum.

The Bank is not responsible for credit risk of channeling loans to KPKM.

41. NET OPEN POSITION

According to Bank Indonesia Regulation (PBI) No.17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015 the fourth amendment to PBI No.5/13/PBI/2003 concerning the Net Open Position (NOP) for Commercial Bank dated July 17, 2003, NOP is required to maximum of 20% of capital.

NOP is the sum of the absolute values of the net difference between assets and liabilities in the statement of financial position for each foreign currency and the net difference between the receivables and payables both commitments and contingencies in the administrative account for each foreign currency, which are all stated in Rupiah.

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank's NOP is as follows:

2024				
Mata Uang	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi devisa bersih (nilai absolut)/Net open position (absolute amount)	Currency
Keseluruhan (laporan posisi keuangan dan rekening administratif)				Aggregate (statement of financial position and administrative accounts)
Dolar Amerika Serikat	1.790.578	1.789.956	622	United States Dollar
Dolar Singapura	49.849	50.186	337	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris	7.687	12	7.675	Great Britain Poundsterling
Dolar Australia	4.761	2	4.759	Australian Dollar
Yen Jepang	1.206	4	1.202	Japanese Yen
Dolar Hong Kong	1.447	-	1.447	Hong Kong Dollar
Yuan China	22.309	17.974	4.335	China Yuan
Euro Eropa	4.354	75	4.279	European Euro
Ringgit Malaysia	97	-	97	Malaysian Ringgit
Riyal Saudi	389	-	389	Saudi Riyal
Jumlah	1.882.677	1.858.209	25.142	Total
Modal			3.965.697	Capital
Rasio posisi devisa bersih			0,63%	Net open position ratio

41. POSISI DEVISA BERSIH (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, PDN Bank adalah sebagai berikut: (lanjutan)

2023				
Mata Uang	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi devisa bersih (nilai absolut)/Net open position (absolute amount)	Currency
Keseluruhan (laporan posisi keuangan dan rekening administratif)				Aggregate (statement of financial position and administrative accounts)
Dolar Amerika Serikat	1.634.743	1.642.864	8.121	United States Dollar
Dolar Singapura	45.488	35.260	10.228	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris	4.999	12	4.987	Great Britain Poundsterling
Dolar Australia	3.814	2	3.812	Australian Dollar
Yen Jepang	1.651	711	940	Japanese Yen
Dolar Hong Kong	1.063	-	1.063	Hong Kong Dollar
Yuan China	771	10	761	China Yuan
Euro Eropa	2.210	31	2.179	European Euro
Jumlah	1.694.739	1.678.890	32.091	Total
Modal			3.948.432	Capital
Rasio posisi devisa bersih			0,81%	Net open position ratio

42. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen operasi

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal yang disiapkan untuk pengambil keputusan operasional yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen tertentu dan melakukan penilaian atas performanya. Seluruh segmen operasi yang digunakan oleh Bank telah memenuhi kriteria pelaporan berdasarkan PSAK 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi".

Tidak terdapat pendapatan dari satu konsumen eksternal atau pihak lain yang mencapai 10% atau lebih dari jumlah pendapatan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Bank memiliki empat pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Bank:

- Produktif - termasuk pinjaman yang diberikan kepada sektor produktif diantaranya, kredit modal kerja dan investasi.
- Konsumtif - termasuk pinjaman yang diberikan untuk keperluan konsumtif.
- Treasuri - segmen ini terkait dengan kegiatan treasuri Bank termasuk transaksi *money market* dan investasi dalam bentuk penempatan dan efek.
- Lain-lain - termasuk aktivitas *back office* dan divisi yang tidak menghasilkan laba.

41. NET OPEN POSITION (continued)

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank's NOP is as follows: (continued)

42. OPERATING SEGMENT INFORMATION

Operating segment

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker, which is responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance. All operating segments used by the Bank meet the definition of a reportable segment under SFAS 5 (Revised 2009), "Operating Segments".

There was no revenue from the external customers or other parties that reached 10% or more of the Bank's income for the years ended December 31, 2024 and 2023.

The Bank has four reportable segments. The following describes the operations in each of the Bank's reportable segments:

- Productive - includes loans disbursed to productive sectors, among others working capital and investment loans.
- Consumer - includes loans disbursed for consumptive purposes.
- Treasury - undertake the Bank's treasury activities which include money market and investment in placements and securities.
- Others - includes all back office processes and non-profit generating divisions in the Bank.

42. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

42. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)

Segmen operasi (lanjutan)

Operating segment (continued)

2024						
	Produktif/ Productive	Konsumtif/ Consumer	Treasuri/ Treasury	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Pendapatan bunga	874.512	156.570	614.982	-	1.646.064	Interest income
Jumlah aset	8.264.968	2.340.510	15.362.193	4.158.722	30.126.393	Total assets
Cadangan kerugian penurunan nilai	(82.507)	(449.398)	(1.965)	(366.158)	(900.028)	Allowance for impairment losses
	Deposito/ Deposits	Giro/ Demand deposits	Tabungan/ Saving deposits	Non DPK/ Non DPK	Jumlah/ Total	
Beban bunga	(607.282)	(59.782)	(10.644)	(58.287)	(735.995)	Interest expenses
Jumlah liabilitas	15.538.627	6.517.641	1.834.505	1.895.924	25.786.697	Total liabilities
2023						
	Produktif/ Productive	Konsumtif/ Consumer	Treasuri/ Treasury	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Pendapatan bunga	883.412	169.791	431.550	-	1.484.753	Interest income
Jumlah aset	9.598.720	2.548.648	9.883.790	4.072.453	26.103.611	Total assets
Cadangan kerugian penurunan nilai	(403.043)	(107.593)	(1.186)	(327.349)	(839.171)	Allowance for impairment losses
	Deposito/ Deposits	Giro/ Demand deposits	Tabungan/ Saving deposits	Non DPK/ Non DPK	Jumlah/ Total	
Beban bunga	(397.543)	(50.781)	(10.515)	(43.935)	(502.774)	Interest expenses
Jumlah liabilitas	12.482.696	6.631.415	1.517.590	1.300.877	21.932.578	Total liabilities

Segmen geografis

Geographical segment

Bank beroperasi di dua wilayah geografis utama yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) dan di luar DKI Jakarta.

The Bank is operating in two main geographic areas which consists of Special District of Jakarta (DKI Jakarta) and outside DKI Jakarta.

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen geografis:

The following is segment information based on geographic segments:

2024								
	Jakarta/ Jakarta	Jawa/ Java	Sumatera/ Sumatera	Sulawesi/ Sulawesi	Kalimantan/ Kalimantan	Lainnya/ Other	Jumlah/ Total	Description
Keterangan								
Pendapatan:								Income:
Pendapatan bunga dan operasional lainnya	1.801.811	45.257	74.138	45.900	28.641	7.902	2.003.649	Interest income and other operating income
Beban:								Expenses:
Beban bunga dan operasional lainnya	(1.459.488)	(89.120)	(150.102)	(54.160)	(22.492)	(31.020)	(1.806.382)	Interest and other operating expenses
Laba (rugi) operasional	342.323	(43.863)	(75.964)	(8.260)	6.149	(23.118)	197.267	Profit (loss) from operations
Laba (rugi) tahun berjalan	117.427	9.468	21.050	9.000	2.934	(7.405)	152.474	Profit (loss) for the current year
Jumlah aset	24.505.022	1.870.280	2.460.188	648.357	110.484	532.062	30.126.393	Total assets

42. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

Segmen Geografis (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen geografis: (lanjutan)

Keterangan	2023							Description
	Jakarta/ Jakarta	Jawa/ Java	Sumatera/ Sumatera	Sulawesi/ Sulawesi	Kalimantan/ Kalimantan	Lainnya/ Other	Jumlah/ Total	
Pendapatan:								Income:
Pendapatan bunga dan operasional lainnya	1.640.952	53.581	44.162	28.987	21.563	8.126	1.797.371	Interest income and other operating income
Beban:								Expenses:
Beban bunga dan operasional lainnya	(1.321.104)	(82.690)	(102.894)	(45.651)	(16.531)	(41.425)	(1.610.295)	Interest and other operating expenses
Laba (rugi) operasional	319.848	(29.109)	(58.732)	(16.664)	5.032	(33.299)	187.076	Profit (loss) from operations
Laba (rugi) tahun berjalan	146.859	17.050	20.772	(9.325)	3.583	(32.186)	146.753	Profit (loss) for the current year
Jumlah aset	21.588.599	1.447.675	2.018.834	566.357	107.300	374.846	26.103.611	Total assets

43. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 yang dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 Januari 1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (SKB BI dan BPPN) No. 30/270/KEP/DIR dan No.1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, Pemerintah telah menjamin kewajiban tertentu dari seluruh bank umum yang berbadan hukum Indonesia.

Berdasarkan perubahan terakhir yang terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000, jaminan tersebut berlaku sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan 31 Januari 2001 dan dapat diperpanjang dengan sendirinya setiap 6 (enam) bulan berikutnya secara terus-menerus, kecuali apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Program Penjaminan atau jangka waktu perpanjangannya, Menteri Keuangan mengumumkan pengakhiran dan atau perubahan Program Penjaminan tersebut untuk diketahui oleh umum. Atas penjaminan ini, Pemerintah membebaskan premi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.05/2005 tanggal 3 Maret 2005, terhitung sejak tanggal 18 April 2005 jenis kewajiban bank umum yang dijamin berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan pinjaman yang diterima dari bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar bank.

42. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)

Geographical Segment (continued)

The following is segment information based on geographic segments: (continued)

43. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS PAYMENT OF COMMERCIAL BANKS

Based on Decree of President of Republic Indonesia No. 26 of 1998 as implemented through the Decree of Minister of Finance dated January 28, 1998 and the Joint Decree between Bank Indonesia Board of Directors and Chairman of the Indonesian Bank Restructuring Agency (SKB BI and IBRA) No. 30/270/KEP/DIR and No. 1/IBRA/1998 dated March 6, 1998, the Government has guaranteed certain obligations of all commercial banks incorporated in Indonesia.

Based on the latest amendment that are stated in the Decree of the Minister of Finance No. 179/KMK.017/2000 dated May 26, 2000, this guarantee is valid from the date of January 26, 1998 until January 31, 2001 and may be extended automatically every 6 (six) months continuously, unless within six (6) months before the expiration of a period Guarantee Program or its extension, the Minister of Finance announced the termination or alteration of the Guarantee Program to be known by the public. For this guarantee, the Government charges premium is calculated based on a certain percentage according to applicable regulations.

According to the Minister of Finance Regulation No.17/PMK.05/2005 dated March 3, 2005, starting from April 18, 2005, commercial bank obligations guaranteed by Government Guarantee Program included demand deposits, savings deposits, time deposits and borrowings from other banks in the form of inter-bank money market transactions.

43. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Program Penjaminan Pemerintah melalui Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang "Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" untuk periode 1 Juli sampai dengan 21 September 2005. Sebagai pengganti UP3, Pemerintah telah membentuk lembaga independen yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang "Lembaga Penjamin Simpanan", dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan salinan Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang "Program Penjaminan Simpanan" diatur besarnya saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi sebesar Rp100 juta.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" maka nilai simpanan setiap nasabah pada satu bank yang dijamin oleh Pemerintah naik menjadi sebesar Rp2 miliar (Rupiah penuh) dari semula Rp100 juta (Rupiah penuh), efektif sejak tanggal tersebut di atas.

Tingkat suku bunga penjaminan LPS untuk simpanan dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat masing-masing sebesar 4,25% dan 2,25% pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Beban premi penjaminan yang dibayar kepada LPS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp43.722 dan Rp36.596 (Catatan 33).

44. MANAJEMEN RISIKO

I. Kerangka manajemen risiko

Dalam menerapkan manajemen risiko, Bank Artha Graha Internasional selalu berupaya untuk melaksanakan strategi operasional yang selaras dengan:

- Pertumbuhan bisnis dan peningkatan pangsa pasar kredit, serta portofolio pendanaan;
- Peningkatkan efisiensi operasional Bank;
- Menjaga tingkat kebutuhan likuiditas dan modal minimum sesuai ketentuan regulator; dan

Implementasi manajemen risiko yang berorientasi bisnis.

Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan kerangka dasar manajemen risiko yang kuat, yaitu suatu kesatuan dari proses manajemen risiko dalam pengelolaan bisnis serta kegiatan operasional Bank.

43. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS PAYMENT OF COMMERCIAL BANKS (continued)

The Government Guarantee Program through Government Guarantee Implementer Unit (UP3) expired on September 22, 2005, as stated in the Minister of Finance Regulation No. 68/PMK.05/2005 dated August 10, 2005 concerning "Premium Calculation and Payment of Government Guarantee Program on Commercial Bank Payment Obligations" for the period of July 1 up to September 21, 2005. As a successor of Government Guarantee Program, the Government has established an independent institution that is Deposit Insurance Corporation (DIC) according to Law No. 24 Year 2004 dated September 22, 2004 about "Deposit Insurance Corporation", which DIC guarantees public funds including funds from other banks in form of demand deposits, time deposits, certificates of deposits, saving deposits, and/ or other similar forms with it.

According the copied of DIC Regulation No. 1/PLPS/2006 dated March 9, 2006 concerning "Deposits Guarantee Program", set the amount of the balance guaranteed for each customer on a bank is a maximum of Rp100 million.

According to Government Regulation No.66 Year 2008 dated October 13, 2008 concerning "The amount of the Deposits that Guaranteed by Deposits Insurance Corporation" the value of each customer deposits in one bank that guaranteed by the Government raise to Rp2 billion (full Rupiah amount) from Rp100 million (full Rupiah amount), which effective since the date stated above.

The LPS guarantee interest rate for deposits in Rupiah and US Dollars is 4.25% and 2.25% as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

Insurance premium expense paid to DIC for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp43,722 and Rp36,596 respectively (Note 33).

44. RISK MANAGEMENT

I. Risk management framework

In implementing risk management, Bank Artha Graha Internasional always strives to implement operational strategies that are aligned with:

- *Business growth and an increase in credit market share, and funding portfolios;*
- *Improve the efficiency of the Bank's operations;*
- *Maintain the minimum level of liquidity and capital requirements in accordance with regulatory requirements; and*
- *Implementation of business-oriented risk management.*

To achieve this, a strong basic risk management framework is needed, which is a unity of the risk management process in business management and Bank operations.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

I. Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Bank Artha Graha Internasional telah memiliki kerangka dasar manajemen risiko yang mencakup keseluruhan lingkup aktivitas usaha, transaksi dan produk Bank, termasuk produk dan aktivitas baru.

Hal tersebut berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan risiko yang berlaku dengan menjaga keseimbangan antara fungsi pengendalian usaha yang efektif, kebijakan yang jelas dalam pengelolaan risiko, dan target bisnis yang ditetapkan sebelumnya.

Kerangka dasar manajemen risiko tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang terdiri dari:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dan Direksi

- Penerapan manajemen risiko melibatkan pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris Bank. Pengawasan dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diemban dan dilakukan secara berkala dan konsisten, sekurang-kurangnya setiap bulan. Dalam hal ini, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, termasuk memberikan persetujuan atas kebijakan, memberikan batasan risiko sebagai acuan pengambilan risiko oleh Bank, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Sedangkan, Direksi bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan risiko, memastikan efektivitas manajemen risiko, memastikan kepatuhan terhadap *risk appetite*, mengembangkan budaya manajemen risiko, serta memberikan perhatian khusus pada area risiko tertentu. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, Direksi telah membentuk komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, yang terdiri dari Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, *Asset and Liability Committee* (ALCO), serta Komite Pemantau Teknologi Informasi. Selain itu, Direksi juga telah membentuk satuan dan Direktorat lain, yaitu Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), dan Direktorat Risk Management.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

I. Risk management framework (continued)

Bank Artha Graha Internasional has a basic risk management framework that covers the entire scope of business activities, transactions and products of the Bank, including new products and activities.

This is based on the basic principles of risk management that apply by maintaining a balance between the effective business control function, clear policies on risk management, and business targets that are set in advance.

The basic framework for risk management is carried out in accordance with Financial Services Authority Regulation No.18/POJK.03/2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks, which consists of:

1. Active supervision by the Directors and the Board of Commissioners and Directors

- The implementation of risk management involves active supervision by the Directors and Board of Commissioners of the Bank. Supervision is carried out according to the duties and responsibilities assumed and carried out regularly and consistently, at least every month. In this case, the Board of Commissioners is responsible for supervising the implementation of risk management as a whole, including giving approval to policies, providing risk limits as a reference for taking risk by the Bank, and conducting oversight of its implementation. In carrying out these responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee.
- Meanwhile, the Board of Directors is responsible for managing risk, ensuring the effectiveness of risk management, ensuring compliance with risk appetite, developing a risk management culture, and paying special attention to certain risk areas. In carrying out these responsibilities, the Board of Directors has formed a committee that helps carry out its duties and responsibilities, which consists of the Risk management Committee, the Credit Committee, the Asset and Liability Committee (ALCO), and the Information Technology Monitoring Committee. In addition, the Board of Directors has also formed other units and Directorates, namely the Internal Audit Work Unit (SKAI), and the Directorate of Risk Management

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

I. Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Kerangka dasar manajemen risiko tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang terdiri dari: (lanjutan)

2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko

- Kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank Artha Graha Internasional telah disusun berdasarkan seluruh aktivitas Bank serta produk dan jasa layanan yang diberikan. Hal tersebut ditetapkan secara jelas dengan cakupan yang selaras dengan Visi, Misi serta strategi bisnis Bank. Adapun kebijakan pedoman dan prosedur manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Bank merupakan bagian dari sistem dan prosedur yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran Bank.
- Dalam menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, Bank menetapkan limit risiko yang telah diusulkan oleh unit-unit kerja operasional dan disampaikan kepada Direktorat Risk Management untuk dianalisis. Kajian manajemen risiko akan direkomendasikan kepada Komite Manajemen Risiko untuk diusulkan kepada Direksi guna pengambilan keputusan. Hasil penetapan limit risiko tersebut dituangkan dalam kebijakan, pedoman dan prosedur manajemen risiko agar dapat dikelola secara tepat.
- Guna memastikan kecukupannya, kebijakan, prosedur dan limit risiko senantiasa diawasi dan di-review secara periodik oleh unit-unit kerja operasional dan pelaksana fungsi manajemen risiko. Proses review yang dilakukan memperhatikan perubahan seluruh aspek internal dan eksternal Bank, termasuk perubahan ketentuan perbankan oleh regulator sehingga sejalan dengan perkembangan bisnis Bank dan ketentuan regulator yang berlaku. Selain itu, proses review penetapan limit yang terkait dengan setiap jenis risiko dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis, kompleksitas aktivitas, karakteristik produk atau jasa, data historis, maupun kecukupan modal yang tersedia.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

I. Risk management framework (continued)

The basic framework for risk management is carried out in accordance with Financial Services Authority Regulation No.18/POJK.03/2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks, which consists of: (continued)

2. Adequacy of risk management policies and procedures and determination of risk limits

- *Bank Artha Graha Internasional's risk management policies and procedures have been prepared based on all Bank activities and products and services provided. This is clearly defined with coverage that is in line with the Bank's Vision, Mission and business strategy. The risk management guidelines and procedures issued by the Bank are part of the system and procedures that must be complied with by all levels of the Bank.*
- *In setting risk management policies and procedures, the Bank sets risk limits that have been proposed by operational work units and submitted to the Directorate of Risk Management for analysis. The risk management review will be recommended to the Risk management Committee to be proposed to the Directors for decision making. The results of the determination of risk limits are outlined in risk management policies, guidelines and procedures so that they can be managed appropriately.*
- *To ensure its adequacy, policies, procedures and risk limits are constantly monitored and periodically reviewed by operational work units and implementing risk management functions. The review process carried out considers changes in all internal and external aspects of the Bank, including changes in banking regulations by regulators so that it is in line with the development of the Bank's business and applicable regulatory provisions. In addition, the process of reviewing limit setting related to each type of risk is carried out by considering business development, complexity of activities, characteristics of products or services, historical data, and available capital adequacy.*

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

I. Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Kerangka dasar manajemen risiko tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang terdiri dari: (lanjutan)

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko

Proses manajemen risiko, yakni identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, mulai dilakukan pada masing-masing unit kerja, di mana risiko tersebut melekat, sesuai dengan kebijakan terkait. Sedangkan, Direktorat Risk Management berperan dalam menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko disertai dengan cara dan metodologinya, serta melakukan serangkaian proses untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menguji pengukuran serta melaporkan risiko yang disampaikan para pemilik risiko tersebut. Laporan hasil Direktorat Risk Management, yang dimuat dalam Laporan Profil Risiko, disampaikan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko secara bulanan, serta kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan dengan tepat waktu. Penyampaian laporan tersebut disertai dengan penyampaian beberapa jenis laporan lainnya kepada manajemen terkait.

Adapun penerapan proses manajemen risiko tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Front office, merupakan jabatan kerja operasional yang dimiliki oleh Bank dalam melaksanakan transaksi secara langsung, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, serta mengelola portofolio Bank, dengan tetap memperhatikan konsep yang ditetapkan oleh manajemen risiko, yaitu:

- a. *Account Officer*, Pimpinan Cabang, Direktorat *Business Banking*: melakukan analisis kredit, *rating* kredit, pengawasan kredit (*account supervisory*), pengelolaan kredit (*account maintenance*), dan monitoring kredit;
- b. Direktorat *Treasury*, yaitu *Dealer* dan *Treasury Sales*: melakukan pengelolaan dan pengawasan risiko pasar dan risiko likuiditas; dan
- c. Unit kerja operasional lainnya, yaitu *Customer Service*, *Teller* dan Kepala Kantor Layanan: melakukan pengelolaan dan pengawasan risiko operasional di Kantor Layanan.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

I. Risk management framework (continued)

The basic framework for risk management is carried out in accordance with Financial Services Authority Regulation No.18/POJK.03/2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks, which consists of: (continued)

3. Adequacy of the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risk, as well as the risk management information system

The risk management process, i.e. identification, measurement, monitoring and risk control, starts to be carried out in each work unit, where the risk is inherent, in accordance with the relevant policies. Meanwhile, the Directorate of Risk Management plays a role in establishing policies and procedures for risk management accompanied by the method and methodology, as well as carrying out a Series of processes to collect, analyze, and test measurements and report risks presented by the risk owners. Reports on the results of the Directorate of Risk Management, which are published in the Risk Profile Report, are submitted to the Directors and Risk Management Committee on a monthly basis, as well as to the Financial Services Authority on a quarterly basis in a timely manner. Submission of the report is accompanied by the submission of several other types of reports to related management.

The application of the risk management process is explained as follows:

Front office, is an operational work position owned by the Bank in carrying out transactions directly, in accordance with their respective duties and responsibilities, as well as managing the Bank's portfolio, with due regard to the concepts set by risk management, namely:

- a. *Account Officers*, *Branch Managers* *Directorate Business Banking*: conducting credit analysis, credit rating, credit supervision (*account supervisory*), credit management (*account maintenance*), and credit monitoring;
- b. *Treasury Directorate*, namely *Dealer* and *Treasury Marketing Unit*: carry out management and supervision of market risk and liquidity risk; and
- c. *Other operational work units*, namely *Customer Service*, *Tellers* and *Heads of Service Offices*: carry out operational risk management and supervision at the Service Office.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

I. Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Kerangka dasar manajemen risiko tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang terdiri dari: (lanjutan)

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko (lanjutan)

Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan penerapan sistem peringatan dini (*early warning system*), Direktorat *Risk Management* dilibatkan dalam siklus proses aktivitas *front office*, dengan cara:

- a. Melakukan *review* independen kredit terhadap calon debitur sesuai batasan/limit dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi;
- b. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko atas setiap permohonan penyimpangan dari ketentuan operasi yang diajukan oleh unit kerja operasional sesuai batasan/limit dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi; dan
- c. Melakukan kajian risiko atas setiap rencana penerbitan produk atau aktivitas baru dan menganalisa risiko atas proses *User Acceptance Test* (UAT) untuk pengembangan produk atau aktivitas yang telah ada maupun rencana penerbitan produk atau aktivitas baru, serta memberikan rekomendasi berupa saran dan masukan terhadap setiap *draft* kebijakan dan prosedur yang akan diterbitkan oleh Bank.

Middle office (unit manajemen risiko) merupakan bagian pendukung operasional yang diantaranya melakukan pengaturan dan penyusunan pedoman/prosedur operasional serta pengawasan operasional, serta melakukan manajemen portofolio secara *bank wide*, yaitu:

- Direktorat *Risk Management*
 - a) Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
 - b) Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko;
 - c) Memantau atas implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi bersama Komisaris;
 - d) Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan (portofolio), maupun per jenis risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit risiko yang ditetapkan oleh Direksi;

44. RISK MANAGEMENT (continued)

I. Risk management framework (continued)

The basic framework for risk management is carried out in accordance with Financial Services Authority Regulation No.18/POJK.03/2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks, which consists of: (continued)

3. Adequacy of the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risk, as well as the risk management information system (continued)

In order to apply the prudential principles and the application of an early warning system, the Directorate of Risk Management is involved in the process cycle of front office activities, by:

- a. Conducting an independent credit review of prospective debtors in accordance with the limits and limits set by the Directors;
- b. Identifying and assessing risk for each request for deviation from the operational provisions submitted by the operational work unit in accordance with the limits/limits and conditions set by the Directors; and
- c. Conduct a risk assessment of each new product or activity issuance plan and analyze the risk of the User Acceptance Test (UAT) process for the development of existing products or activities or plans for the issuance of new products or activities, and provide recommendations in the form of suggestions and input on each draft policy and procedures to be issued by the Bank.

Middle office (risk management unit) is a part of operational support which includes conducting and preparing operational guidelines/procedures and operational supervision, as well as carrying out portfolio management on a bank wide basis, namely:

- Directorate of Risk Management
 - a) Develop procedures and tools for identification, measurement, monitoring and risk control;
 - b) Design and implement the tools needed in the application of risk management;
 - c) Monitor the implementation of policies, strategies and risk management framework recommended by the Risk management Committee and which has been approved by the Board of Directors together with the Board of Commissioners;
 - d) Monitor overall risk position/exposure (portfolio), as well as by type of risk including monitoring compliance with risk tolerance and risk limits set by the Directors;

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

I. Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Kerangka dasar manajemen risiko tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang terdiri dari: (lanjutan)

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko (lanjutan)

Middle office (unit manajemen risiko) merupakan bagian pendukung operasional yang diantaranya melakukan pengaturan dan penyusunan pedoman/prosedur operasional serta pengawasan operasional, serta melakukan manajemen portofolio secara *bank wide*, yaitu: (lanjutan)

- Direktorat *Risk Management* (lanjutan)
 - e) Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan;
 - f) Memberikan rekomendasi kepada unit kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang dapat dipelihara Bank;
- Sub Direktorat Sistem dan Prosedur, berperan dalam mempersiapkan pedoman dan prosedur operasional Bank.

Back office merupakan bagian akhir dari proses operasional yang diantaranya melakukan penyelesaian transaksi dan pengambilan keputusan diantaranya:

- Direktorat *Risk Management*
 - a) Memberikan masukan kepada Komite Manajemen Risiko dalam penyusunan kebijakan, pedoman, strategi, dan kerangka manajemen risiko;
 - b) Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko secara bulanan dan kepada regulator secara triwulanan. Frekuensi laporan akan ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat;
 - c) Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank, untuk memastikan:
 - Kecukupan kerangka manajemen risiko;
 - Keakuratan metodologi penilaian risiko; dan
 - Kecukupan sistem informasi manajemen risiko.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

I. Risk management framework (continued)

The basic framework for risk management is carried out in accordance with Financial Services Authority Regulation No.18/POJK.03/2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks, which consists of: (continued)

3. Adequacy of the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risk, as well as the risk management information system (continued)

Middle office (risk management unit) is a part of operational support which includes conducting and preparing operational guidelines/procedures and operational supervision, as well as carrying out portfolio management on a bank wide basis, namely: (continued)

- Directorate of Risk Management (continued)
 - e) Conduct stress testing to determine the impact of the implementation of risk management policies and strategies on the portfolio or the Bank's overall performance;
 - f) Providing recommendations to business units and/or to the Risk management Committee related to the implementation of risk management, including the amount or maximum risk exposure that can be maintained by the Bank;

Sub Directorate of Systems and Procedures, plays a role in preparing the guidelines and operational procedures of the Bank;

The back office is the final part of the operational process which includes completing transactions and making decisions including:

- Directorate of Risk Management
 - a) Provide input to the Risk management Committee in the preparation of policies, guidelines, strategies, and risk management frameworks;
 - b) Prepare and submit risk profile reports to the Board of Directors, the Risk management Committee and the Risk Monitoring Committee on a monthly basis and to regulators on a quarterly basis. Report frequency will be increased if market conditions change quickly;
 - c) Carry out periodic reviews with a frequency that is tailored to the needs of the Bank, to ensure:
 - Adequacy of the risk management framework;
 - The accuracy of the risk assessment methodology; and
 - Adequacy of risk management information systems.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

I. Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Kerangka dasar manajemen risiko tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang terdiri dari: (lanjutan)

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko (lanjutan)

Back office merupakan bagian akhir dari proses operasional yang diantaranya melakukan penyelesaian transaksi dan pengambilan keputusan diantaranya: (lanjutan)

- Direktorat *Business Banking* dan Komite Kredit: melakukan pengelolaan batas limit risiko kredit dan penagihan kredit bermasalah oleh Remedial;
- Direktorat *Operation*, yaitu Sub Direktorat E-Channel Support & Operation: melakukan pengelolaan risiko *settlement*.

Sistem informasi manajemen risiko

- Sistem informasi manajemen risiko harus mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan.
- Direktorat *Risk Management* menyusun laporan profil risiko secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, Direksi, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. Selain itu melaporkan pemantauan dan hasil perhitungan *stress testing* kepada Direksi, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko secara berkala dalam rangka mitigasi risiko dan menetapkan tindakan yang diperlukan.
- Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko harus *direview* secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Bank.

4 Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh unit kerja operasional dan unit kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

44. RISK MANAGEMENT (continued)

I. Risk management framework (continued)

The basic framework for risk management is carried out in accordance with Financial Services Authority Regulation No.18/POJK.03/2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks, which consists of: (continued)

3. Adequacy of the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risk, as well as the risk management information system (continued)

The back office is the final part of the operational process which includes completing transactions and making decisions including: (continued)

- *Business Banking Directorate and Credit Committee: manage Remedial credit risk limits and collection of problem loans;*
- *Operation Directorate, namely the E-Channel Support & Operation Sub Directorate: carries out settlement risk management.*

Risk management information system

- *The risk management information system must support the implementation of reporting to Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority and management as a basis for decision making.*
- *The Risk Management Directorate prepares regular risk profile reports to the Financial Services Authority, Directors, Risk management Committee and Risk Monitoring Committee. Besides reporting the monitoring and the results of stress testing calculations to the Directors, Risk management Committee and Risk Monitoring Committee on a regular basis in order to mitigate risk and determine the actions needed.*
- *The adequacy of the scope of information generated from the risk management information system must be reviewed periodically to ensure that the coverage is adequate in accordance with the development of the level of complexity of the Bank's business activities.*

4 A comprehensive internal control system

A reliable and effective Bank internal control system is the responsibility of all operational work units and supporting work units as well as the Internal Audit Work Unit (SKAI).

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

I. Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Kerangka dasar manajemen risiko tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang terdiri dari: (lanjutan)

4 Sistem pengendalian internal yang menyeluruh (lanjutan)

Fungsi yang menjalankan pengawasan dalam pengendalian intern diantaranya:

- a. Pengawasan melekat oleh Unit Kontrol untuk pengawasan kepatuhan Bank terhadap ketentuan internal Bank.
- b. Pengawasan melekat oleh Direktorat *Risk Management* untuk pengawasan kepatuhan Bank terhadap ketentuan eksternal Bank.
- c. Direktorat SKMR & Kepatuhan melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan:
 - Kecukupan kerangka manajemen risiko;
 - Keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - Kecukupan sistem informasi manajemen risiko.
- d. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan:
 - Kaji ulang penerapan manajemen risiko secara berkala.
 - Pemeriksaan sampling secara periodik dan berdasarkan basis risiko.

Kerangka dasar manajemen risiko tersebut direviu secara periodik dan jika diperlukan dapat direvisi sesuai dengan perkembangan kompleksitas usaha dan risiko Bank, ketentuan Bank Indonesia dan/atau berdasarkan "*best practices*" perbankan terkini.

II. Struktur organisasi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengelolaan manajemen risiko di tingkat Direksi secara khusus menjadi tanggung jawab Direktorat *Risk Management* yang berada di bawah Direktur *Risk Management & Compliance*. Direktorat *Risk Management* memiliki 2 Sub Direktorat, yaitu Sub Direktorat *Credit Risk & ESG* yang beranggotakan 5 orang dan Sub Direktorat *Non Credit Risk* yang beranggotakan 5 orang.

Penetapan struktur organisasi manajemen risiko tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan kedalaman, sensitivitas, dan kualitas penerapan proses manajemen risiko dari segi identifikasi, kajian, analisa, *review*, penilaian, pengukuran, penelitian, pemantauan dan pengendalian risiko yang dikelola oleh Bank.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

I. Risk management framework (continued)

The basic framework for risk management is carried out in accordance with Financial Services Authority Regulation No.18/POJK.03/2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks, which consists of: (continued)

4 A comprehensive internal control system (continued)

Functions that carry out supervision in internal control include:

- a. Supervision is attached by the Control Unit to supervise the Bank's compliance with the Bank's internal regulations.
- b. Inherent supervision by the Directorate of Risk Management for monitoring the Bank's compliance with the Bank's external regulation.
- c. The SKMR & Compliance Directorate carries out regular reviews with a frequency adjusted to the Bank's needs, to ensure:
 - Adequacy of the risk management framework;
 - The accuracy of the risk assessment methodology;
 - Adequacy of risk management information systems.
- d. The Internal Audit Work Unit (SKAI) carries out:
 - Periodically review the application of risk management
 - Periodic sampling checks and based on risk basis.

The basic framework for risk management is reviewed periodically and if necessary it can be revised in accordance with the development of Bank business complexity and risk, Bank Indonesia regulations and/or based on the latest banking "*best practices*".

II. Organizational structure

As explained previously, managing risk management at the Board of Directors level is specifically the responsibility of the Risk Management Directorate which is under the Director of Risk Management & Compliance. The Risk Management Directorate has 2 Sub Directorates, namely the Credit Risk & ESG Sub Directorate which has 5 members and the Non Credit Risk Sub Directorate which has 5 members

The determination of the risk management organizational structure is expected to further enhance the depth, sensitivity, and quality of the application of the risk management process in terms of identification, study, analysis, review, assessment, measurement, research, monitoring and risk control managed by the Bank.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk menyadari bahwa semua kegiatan bisnis atau transaksi Bank, baik yang berasal dari aset maupun pasiva, dapat berpotensi menimbulkan berbagai jenis risiko. Oleh karenanya, Bank telah mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

Dalam mengelola risiko-risiko tersebut, Bank Artha Graha Internasional secara bertahap dan berkelanjutan melakukan berbagai pengembangan dan penyempurnaan aspek dan komponen penerapan manajemen risiko, sesuai dengan mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Nasional. Pengembangan dan penyempurnaan tersebut antara lain terkait dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, kajian/analisa risiko, pengukuran/penilaian risiko, pengelolaan database risiko dan budaya risiko (*risk culture*).

Sebagai bagian dari implementasi regulasi Basel terkini, Bank telah mempersiapkan untuk penggunaan metode internal dalam pengukuran risiko sebagai berikut:

- Untuk mendukung proses perhitungan alokasi modal risiko kredit, Bank telah mempersiapkan infrastruktur dan metodologi *Internal Rating Based Approach* (IRBA) melalui implementasi aplikasi *Credit Risk Rating* (CRR). Bank juga telah mengumpulkan database risiko kredit dan menyempurnakan proses serta prosedur internal sehingga Bank diharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan terpercaya untuk menunjang perhitungan sesuai dengan metodologi IRBA yang akan digunakan.
- Bank telah melakukan pengembangan dan simulasi metodologi perhitungan kebutuhan modal internal untuk menutupi risiko pasar dengan menggunakan metode internal VaR (*Value at Risk*) yaitu model *Variance co Variance* dan *Historical Simulation* melalui aplikasi *Market Risk Measurement* (MRM).
- Bank telah melakukan pengelolaan pencatatan data kerugian dan potensi kerugian yang terjadi pada Satuan Kerja Operasional (*Risk taking unit*) secara periodik melalui aplikasi *Operational Risk Management* (ORM) yang mencakup fungsi *Loss Event Data Base* (LED), *Risk Control Self Assesment* (RCSA), dan *Key Risk Indicator* (KRI) yang telah diimplementasikan secara *online* di seluruh cabang. Pengelolaan data kerugian tersebut sebagai salah satu data input dalam penilaian parameter Profil Risiko Operasional yang ditetapkan sesuai frekuensi kejadian dan dampaknya. *Loss Event Data Base* (LED) akan menjadi perhitungan modal dengan menggunakan pendekatan standar.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk realizes that all business activities or Bank transactions, both from assets and liabilities, can potentially lead to various types of risks. Therefore, the Bank has identified the risks faced, which include credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, strategic risk, compliance risk, and reputation risk.

In managing these risks, Bank Artha Graha Internasional has gradually and continuously carried out various development and improvement of aspects and components in implementing risk management, in accordance with the Implementation of Risk management in National Banking. These developments and improvements are related to risk management policies and procedures, risk assessment/analysis, risk measurement/assessment, risk database management and risk culture.

As part of the implementation of the latest Basel regulations, the Bank has prepared for the use of internal methods in measuring risk as follows:

- To support the credit risk capital allocation process, the Bank has prepared the Internal Rating Based Approach (IRBA) infrastructure and methodology through the implementation of the Credit Risk Rating (CRR) application. The Bank has also collected a credit risk database and refined internal processes and procedures so that the Bank is expected to obtain accurate and reliable data to support calculations in accordance with the IRBA methodology to be used.
- The Bank has developed and simulated the methodology for calculating internal capital requirements to cover market risk by using Value at Risk internal methods, namely the Variance co Variance and Historical Simulation models through the application of Market Risk Measurement (MRM).
- The Bank has managed to record data on loss and potential losses that occur at the Risk taking unit periodically through the Operational Risk Management (ORM) which includes the functions of Loss Event Data Base (LED), Risk Control Self Assessment (RCSA), and Key Risk Indicator (KRI) that have been implemented online in all branches. The management of loss data is one of the input data in the assessment of Operational Risk Profile parameters mapped according to the frequency of events and their impact. Loss Event Data Base (LED) will be developed by the Bank into a capital calculation using a standardized approach.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

1. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit dikelola baik pada tingkat transaksi (individual) maupun portofolio serta pelaksanaan *stress testing*. Pengelolaan risiko kredit dirancang untuk menjaga independensi dan integritas proses penilaian risiko serta diversifikasi risiko kredit.

a. Risiko kredit maksimum

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat. Untuk bank garansi dan *irrevocable L/C*, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Bank jika liabilitas atas bank garansi dan *irrevocable L/C* terjadi.

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Bank terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya.

	2024	2023
<u>Laporan posisi keuangan</u>		
Giro pada Bank Indonesia	3.024.920	2.658.276
Giro pada Bank lain	349.519	338.300
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.177.464	711.075
Efek-efek	8.502.776	5.788.096
Wesel ekspor	166.681	131.863
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	976.065	125.469
Tagihan derivatif	48	35
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	253.265	326.422
Kredit yang diberikan	10.605.479	12.147.369
Tagihan akseptasi	166.682	131.863
Penyertaan saham	6	6
Aset lain-lain:		
Setoran jaminan dan tagihan	21.858	38.332
Jumlah	26.244.763	22.397.106

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Bank terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya.

	2024	2023
<u>Rekening administrative</u>		
Fasilitas kredit yang belum digunakan	(973.904)	(466.698)
Garansi yang diterbitkan	(19.227)	(24.759)
L/C yang masih beredar	(37.688)	-
Jumlah	(1.030.819)	(491.457)

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

1. Credit risk

Credit risk is a risk due to the failure of the debtor and/or other parties to fulfill obligations to the Bank. Credit risk is managed at both the transaction (individual) and portfolio levels as well as implementing stress testing. Credit risk management is designed to maintain the independence and integrity of the risk assessment process and diversification of credit risk.

a. Maximum credit risk

For financial assets recognized in the statement of financial position, the maximum exposure to credit risk is equal to the carrying amount. For bank guarantees and *irrevocable L/C*, the maximum exposure to credit risk is the maximum value that must be paid by the Bank if liabilities on bank guarantees and *irrevocable L/C* occur.

The following table presents the Bank's maximum exposure to credit risk for financial instruments in the statement of financial position and administrative accounts, without taking into account the collateral held or other credit protection.

	2024	2023
<u>Statement of financial position</u>		
Current accounts with Bank Indonesia	3.024.920	2.658.276
Current accounts with other Banks	349.519	338.300
Placements with Bank Indonesia and other banks	2.177.464	711.075
Marketable securities	8.502.776	5.788.096
Export bills	166.681	131.863
Securities purchased under agreement to resell	976.065	125.469
Derivative receivables	48	35
Accrued interest receivables	253.265	326.422
Loans	10.605.479	12.147.369
Acceptance receivables	166.682	131.863
Investment in shares of stock	6	6
Other assets:		
Guarantee deposits and receivables	21.858	38.332
Total	26.244.763	22.397.106

The following table presents the Bank's maximum exposure to credit risk of on statement of financial position and off statement of financial position items, without taking into account any collateral held or other credit enhancement.

	2024	2023
<u>Administrative accounts</u>		
Unused loan commitments	(973.904)	(466.698)
Guarantee issued	(19.227)	(24.759)
Outstanding irrevocable L/C	(37.688)	-
Total	(1.030.819)	(491.457)

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

1. Risiko kredit (lanjutan)

b. Risiko kredit konsentrasi

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum berdasarkan sektor industri adalah sebagai berikut:

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

1. Credit risk (continued)

b. Concentration credit risk

The disclosure on the maximum credit risk concentration by industry sectors as follows:

2024								
	Pemerintah/ Government	Bank/ Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non bank financial institution	Industri pengolahan/ Manufacturing	Jasa-jasa dunia usaha/ Trade services	Perusahaan lainnya dan perseorangan/ Other companies and individual	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	3.024.920	-	-	-	-	-	3.024.920	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	349.519	-	-	-	-	349.519	Current account with other bank
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.177.464	-	-	-	-	-	2.177.464	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	4.765.800	119.025	-	-	-	3.617.951	8.502.776	Marketable securities
Wesel ekspor	-	-	-	-	-	166.681	166.681	Export bills
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	976.065	-	-	-	-	976.065	Securities purchased under agreement to resell
Tagihan derivatif	-	48	-	-	-	-	48	Derivative receivables
Pendapatan bunga yang masih harus diterima	-	-	2.655	5.878	547	244.185	253.265	Accrued interest receivables
Kredit yang diberikan	-	-	324.272	1.893.734	69.892	8.317.581	10.605.479	Loans
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	166.682	166.682	Acceptance Receivables
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	6	6	Investment in shares of stock
Aset lain-lain:								Other assets:
Setoran jaminan dan tagihan	-	-	-	-	-	21.858	21.858	Guarantee deposits and receivables
Jumlah	9.968.184	1.444.657	326.927	1.899.612	70.439	12.534.944	26.244.763	Total
2023								
	Pemerintah/ Government	Bank/ Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non bank financial institution	Industri pengolahan/ Manufacturing	Jasa-jasa dunia usaha/ Trade services	Perusahaan lainnya dan perseorangan/ Other companies and individual	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	2.658.276	-	-	-	-	-	2.658.276	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	338.300	-	-	-	-	338.300	Current account with other bank
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	711.075	-	-	-	-	-	711.075	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	2.350.179	363.008	-	-	-	3.074.909	5.788.096	Marketable securities
Wesel ekspor	-	-	-	-	-	131.863	131.863	Export bills
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	125.469	-	-	-	-	125.469	Securities purchased under agreement to resell
Tagihan derivatif	-	35	-	-	-	-	35	Derivative receivables
Pendapatan bunga yang masih harus diterima	-	-	60	5.497	48.778	272.087	326.422	Accrued interest receivables
Kredit yang diberikan	-	-	31.649	1.322.435	310.965	10.482.320	12.147.369	Loans
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	131.863	131.863	Acceptance Receivables
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	6	6	Investment in shares of stock
Aset lain-lain:								Other assets:
Setoran jaminan dan tagihan	-	-	-	-	-	38.332	38.332	Guarantee deposits and receivables
Jumlah	5.719.530	826.812	31.709	1.327.932	359.743	14.131.380	22.397.106	Total

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

1. Risiko kredit (lanjutan)
b. Risiko kredit konsentrasi (lanjutan)
Eksposur risiko kredit atas komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

2024							
	Pemerintah/ Government	Bank/ Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non bank financial institution	Industri pengolahan/ Manufacturing	Jasa-jasa dunia usaha/ Trade services	Perusahaan lainnya dan perseorangan/ Other companies and individual	Jumlah/ Total
Fasilitas kredit yang belum digunakan	-	-	300.013	130.283	-	543.608	973.904
Garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	-	19.227	19.227
L/C yang masih beredar	-	-	-	-	-	37.688	37.688
Jumlah	-	-	300.013	130.283	-	600.523	1.030.819
2023							
	Pemerintah/ Government	Bank/ Bank	Lembaga keuangan bukan bank/ Non bank financial institution	Industri pengolahan/ Manufacturing	Jasa-jasa dunia usaha/ Trade services	Perusahaan lainnya dan perseorangan/ Other companies and individual	Jumlah/ Total
Fasilitas kredit yang belum digunakan	-	-	51.000	150.775	-	264.923	466.698
Garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	-	24.759	24.759
L/C yang masih beredar	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	51.000	150.775	-	289.682	491.457

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum berdasarkan letak geografis adalah sebagai berikut:

The disclosure on the maximum credit risk concentration by geography is as follows:

2024				
	DKI Jakarta/ District of Jakarta	Luar DKI Jakarta/ Outside DKI Jakarta	Jumlah/ Total	
ASET				ASSETS
Giro pada Bank Indonesia	3.024.920	-	3.024.920	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	349.269	250	349.519	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.177.464	-	2.177.464	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	8.502.776	-	8.502.776	Marketable securities
Wesel ekspor	166.681	-	166.681	Export bills
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	976.065	-	976.065	Securities purchased under agreement to resell
Tagihan derivatif	48	-	48	Derivative receivables
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	246.982	6.283	253.265	Accrued interest receivables
Kredit yang diberikan	8.755.550	1.849.929	10.605.479	Loans
Tagihan akseptasi	166.682	-	166.682	Acceptance receivables
Penyertaan saham	6	-	6	Investment in shares of stock
Aset lain-lain:				Other assets:
Setoran jaminan dan tagihan	21.858	-	21.858	Guarantee deposits and receivables
Jumlah Aset	24.388.301	1.856.462	26.244.763	Total Assets

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

1. Risiko kredit (lanjutan)

- b. Risiko kredit konsentrasi (lanjutan)
Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum berdasarkan letak geografis adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2023		
	DKI Jakarta/ <i>Special District of Jakarta</i>	Luar DKI Jakarta/ <i>Outside DKI Jakarta</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
ASET			
Giro pada Bank Indonesia	2.658.276	-	2.658.276
Giro pada bank lain	338.050	250	338.300
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	711.075	-	711.075
Efek-efek	5.788.096	-	5.788.096
Wesel ekspor	131.863	-	131.863
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	125.469	-	125.469
Tagihan derivatif	35	-	35
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	320.301	6.121	326.422
Kredit yang diberikan	10.420.023	1.727.346	12.147.369
Tagihan akseptasi	131.863	-	131.863
Penyertaan saham	6	-	6
Aset lain-lain:			
Setoran jaminan dan tagihan	38.332	-	38.332
Jumlah Aset	20.663.389	1.733.717	22.397.106

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif adalah sebagai berikut:

	2024		
	DKI Jakarta/ <i>Special District of Jakarta</i>	Luar DKI Jakarta/ <i>Outside DKI Jakarta</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Fasilitas kredit yang belum digunakan	627.057	346.847	973.904
Garansi yang diterbitkan	6.118	13.109	19.227
L/C yang masih beredar	37.689	-	37.689
Jumlah	670.864	359.956	1.030.820

	2023		
	DKI Jakarta/ <i>Special District of Jakarta</i>	Luar DKI Jakarta/ <i>Outside DKI Jakarta</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Fasilitas kredit yang belum digunakan	139.767	326.931	466.698
Garansi yang diterbitkan	13.508	11.251	24.759
Jumlah	153.275	338.182	491.457

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

1. Credit risk (continued)

- b. Concentration credit risk (continued)
The disclosure on the maximum credit risk concentration by geography is as follows: (continued)

ASSETS
Current accounts with Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Placements with Bank Indonesia and other banks
Marketable securities
Export bills
Securities purchased under Agreement to resell
Derivative receivables
Accrued interest receivables
Loans
Acceptance receivables
Investment in shares of stock
Other assets:
Guarantee deposits and receivables
Total Assets

Credit risk exposure in the administrative accounts are as follows:

Unused loan commitments
Guarantee issued
Outstanding irrevocable L/C
Total

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

1. Risiko kredit (lanjutan)

- b. Risiko kredit konsentrasi (lanjutan)
Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

Sektor ekonomi	2024		2023		Economic Sector
	Rp	%	Rp	%	
Industri	596.685	5,63%	370.815	3,05%	Industry
Restoran dan hotel	5.317	0,05%	1.322.435	10,89%	Restaurant and hotel
Konstruksi	501.596	4,73%	656.240	5,40%	Constructions
Transportasi dan komunikasi	327.041	3,08%	619.310	5,10%	Transportation and Communication
Pertanian dan pertambangan	850.680	8,02%	1.338.029	11,01%	Agribusiness and Mining
Perdagangan	662.361	6,25%	372.503	3,07%	Trading
Jasa	1.893.734	17,86%	1.828	0,02%	Services
Lainnya	5.768.065	54,38%	7.466.209	61,46%	Others
Jumlah	10.605.479	100,00%	12.147.369	100,00%	Total

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum berdasarkan kelompok debitur adalah sebagai berikut:

Sektor ekonomi	2024		2023		Economic Sector
	Rp	%	Rp	%	
Komersial	8.264.968	77,93%	9.598.721	79,02%	Commercial
Konsumen	2.340.510	22,07%	2.548.648	20,98%	Consumer
Jumlah	10.605.478	100,00%	12.147.369	100,00%	Total

Pengungkapan risiko kredit maksimum adalah sebelum efek mitigasi melalui *master netting* dan/atau perjanjian jaminan. Apabila instrumen keuangan yang dicatat berdasarkan nilai wajar, angka yang ditunjukkan mencerminkan pengungkapan risiko kredit saat ini tetapi bukan pengungkapan risiko maksimal yang dapat timbul di masa yang akan datang sebagai akibat perubahan nilai.

Bank telah mengimplementasikan *credit risk management* yang mencakup penetapan prosedur dan kebijakan kredit, pengaturan limit dan mengevaluasinya secara berkala, penggunaan *Credit Risk Rating* (CRR) untuk kredit produktif dengan segmen Korporasi, Non Korporasi (*Retail/ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM*), serta kredit konsumtif (karyawan dan non karyawan), mengevaluasi kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa seluruh risiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit telah tercakup, menerapkan prinsip "*Four Eyes Principles*" secara konsisten, serta pelaksanaan *review* independen terhadap permohonan kredit dalam batasan tertentu dan debitur *existing* secara sampling serta portofolio kredit berdasarkan BMPK, sektor ekonomi dan sektor geografis secara periodik.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

1. Credit risk (continued)

- b. Concentration credit risk (continued)
The disclosure on the maximum credit risk concentration by debtor classification is as follows:

The disclosure on the maximum credit risk concentration by debtor classification is as follows:

The disclosures of maximum credit risks are before the effect of mitigation through *master netting* and/or collateral agreements. If financial instruments are recorded at fair value, the balance representing the current credit risk exposure but not the maximum risk exposure that could arise in the future as a result of changes in value.

The Bank has implemented credit risk management which covers setting up procedures and credit policies, set-up a limit and conduct regular evaluation, implement Credit Risk Rating for productive loan of Corporate, Non Corporate (*Retail/Micro, Small, and Medium Enterprise/MSMEs*), and consumer credit (employees and nonemployees), evaluates credit policies and procedures to ensure that all potential risks have been covered, and applies the "*Four Eyes Principles*" consistently, and the implementation of an independent review of loan application within certain limits and existing borrowers based on sampling method and credit portfolio based on Legal Lending Limits, economic sector and geographic sector periodically.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

1. Risiko kredit (lanjutan)

- b. Risiko kredit konsentrasi (lanjutan)
 Bank telah melaksanakan pengelolaan portofolio profil risiko kredit secara konsisten dan berkelanjutan serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala (bulanan).

Dalam rangka memitigasi risiko kredit, berikut ini adalah upaya yang dilakukan Bank secara berkala:

- 1) Menentukan batas eksposur pada industri/sector ekonomi pasar sasaran;
- 2) Melakukan tinjauan risiko kredit berdasarkan jenis industri/sector ekonomi tertentu, khususnya yang akan dibiayai oleh Bank;
- 3) Melakukan *stress test* dengan menerapkan skenario peningkatan rasio *Non-Performing Loan (NPL)* dan pelaksanaan *write-off* secara *bank wide*.

Metode pemberian kredit Bank meliputi:

- 1) Penetapan pagu kredit secara keseluruhan pada tingkat debitur/*counterparties* dan kelompok debitur/*counterparties* baik terkait maupun tidak terkait dengan Bank untuk eksposur yang tercatat dalam laporan posisi keuangan dan rekening administratif;
- 2) Penilaian terhadap prospek usaha dan kinerja keuangan debitur/*counterparties*;
- 3) Kemampuan untuk membayar kembali dan integritas debitur/*counterparties*;
- 4) Penggunaan agunan; dan
- 5) Penilaian kondisi makro ekonomi dan industri.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

1. Credit risk (continued)

- b. Concentration credit risk (continued)
 The Bank has managed its loan portfolio risk profile continuously in a consistent manner and reports to Boards of Commissioners and Director regularly (monthly).

In order to mitigate credit risk, the Bank has performed regular activity as follows:

- 1) Determining exposure limits on target market industries/economic sector;
- 2) Reviewing credit risk based on certain industry type/economic sector, especially for those which is financed by the Bank;
- 3) Performing a stress test scenario with their crease of ratio of Non-Performing Loan(NPL) and them plementation of write-off in bank wide.

The Bank's loan granting process includes:

- 1) Set-up overall credit limits at borrowers and counterparty level, and a Bank of related borrowers and counterparties for both on statement of financial position and administrative accounts exposures;
- 2) Evaluation of business prospects and financial performance of the debtors/ counterparties;
- 3) Repayment capacity and integrity of the debtors/counterparties;
- 4) Use of collateral; and
- 5) Assessment of macro economic and industry conditions.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

1. Risiko kredit (lanjutan)

- b. Risiko kredit konsentrasi (lanjutan)
- Bank juga mengembangkan serta menerapkan *Risk Governance* sebagai bagian dalam pengendalian internal perkreditan sebagai berikut:
- 1) Lini pertama (pilar bisnis dan pendukung) terutama bertanggungjawab mengelola risiko kredit yang merupakan bagian dari aktivitasnya sehari-hari;
 - 2) Lini kedua menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan kerangka kerja risiko kredit, kebijakan, metodologi dan perangkat risiko kredit dalam pengelolaan risiko kredit yang bersifat material secara keseluruhan;
 - 3) Lini ketiga melibatkan audit internal dan pengendalian internal, yang secara independen bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan, kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko kredit.

Untuk mempercepat proses pemberian kredit, Bank mengimplementasikan *Credit Risk Rating* (CRR) sebagai suatu perangkat untuk melakukan penilaian awal terhadap kemungkinan kemampuan bayar/kegagalan bayar debitur atas permohonan kreditnya di masa mendatang yang dideskripsikan melalui perolehan *rating* debitur.

Untuk memfasilitasi penilaian risiko dari debitur Korporasi, Non Korporasi (*Retail/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM*), serta debitur konsumtif (karyawan dan non karyawan) Bank melakukan pemantauan terhadap seluruh aspek penilaian dari debitur dan sektor industrinya termasuk migrasi *rating* debitur secara berkala (triwulan). Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melakukan pemantauan terhadap kualitas kinerja dari debitur secara sampling khususnya debitur inti Bank dengan melakukan *review* independen secara periodik (semester) dan pemantauan portofolio yang dimiliki Bank secara berkesinambungan. Informasi yang relevan disampaikan kepada unit bisnis untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko kredit Bank yang efektif.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

1. Credit risk (continued)

- b. Concentration credit risk (continued)
- The Bank also develops and implements Risk Governance principle as part of credit internal control as follows:
- 1) The first line (Business and Support Pillars) is primarily responsible for managing credit risk which is its daily activities;
 - 2) The second line provides needed resources for developing credit risk frameworks, policies, methodologies and tools for the management of material risks taken by the Bank as a whole;
 - 3) The third line includes internal audit and internal control, which is independently conducting an examination on compliance, adequacy and effectiveness of risk management processes.

To accelerate the process of credit granting, the Bank implements Credit Risk Rating (CRR) as a tool for preliminary assessment of the feasibility/default by the debtor to repay its credit proposal in the future which is described through the rating of debtors.

To facilitate the risk assessment of the debtors of Corporate, Non Corporate (*Retail/Micro, Small, and Medium Enterprise/MSMes*), and consumer debtors (*employees and non employees*), the Bank monitors all valuation aspects of the debtors and its industrial sector including debtor rating migration periodically (quarterly). Risk management Unit (SKMR) monitors the performance quality of the debtor by sampling basis, especially to the Bank's main debtors by conducting independent review periodically (semi annually) and monitoring the Bank's portfolios continuously. The relevant information is submitted to the business unit to support the implementation of the effective Bank's credit risk assessment.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

1. Risiko kredit (lanjutan)

- b. Risiko kredit konsentrasi (lanjutan)
Bank mengukur, menilai dan memantau risiko kredit untuk setiap debitur baik secara individual maupun obligor, sektor ekonomi, sektor geografi, maupun seluruh portofolio kredit. Bank telah menetapkan standar dan prosedur untuk mendukung terciptanya suatu proses pemberian kredit yang sehat dan hati-hati dengan mempertimbangkan risiko dan perolehan hasil.

Jaminan dan perlindungan kredit lainnya

Nilai dan jenis jaminan yang dibutuhkan tergantung pada penilaian risiko kredit dari debitur/counterparty. Kebijakan dan pedoman tentang jenis jaminan dan parameter penilaian jaminan telah diimplementasikan oleh Bank.

Umumnya agunan diperlukan dalam setiap pemberian kredit sebagai sumber terakhir pelunasan kredit dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit jika debitur/counterparty gagal bayar (macet). Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur. Agunan yang dapat diterima oleh Bank dibagi atas 2 (dua) kelompok besar yaitu:

- 1) Agunan tunai, yaitu deposito/tabungan/ rekening giro/ setoran margin/ dana tunai yang diblokir atau dibukukan pada rekening penampungan yang disimpan serta dicatat pada Bank dan Stand-By L/C yang diterbitkan oleh bank berperingkat (*prime bank*);
- 2) Agunan non tunai yaitu agunan yang tidak termasuk dalam jenis jaminan seperti pada agunan tunai di atas.

Kualitas kredit per golongan aset keuangan

Kualitas kredit aset keuangan dikelola oleh Bank dengan menggunakan pedoman dari Bank Indonesia. Kualitas kredit berdasarkan golongan aset yang memiliki risiko kredit mengacu pada hasil penilaian dari lembaga pemeringkat eksternal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank memiliki kebijakan untuk mengelola kinerja kualitas kredit debitur. Hal ini akan memudahkan fokus manajemen risiko dalam mengendalikan eksposur risiko kredit yang dimiliki oleh Bank.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

1. Credit risk (continued)

- b. Concentration credit risk (continued)
The Bank measures, assesses and monitors credit risk for each debtor, on individual and obligor basis, by economic sector, geographic sector and all credit portfolios. The Bank has set up standards and procedures to support a process of granting credit and by considering risk and yield carefully.

Collateral and protection of loans

The amount and type of collateral required depends on an assessment of the credit risk of the counterparty. Policy and guidelines are implemented regarding types of collateral and valuation parameters by the Bank.

Generally collateral is required for all loans as a secondary source of credit repayment and also as a credit risk mitigation if a debtor has a default. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations of the debtors. Collaterals acceptable by the Bank are divided into 2 (two) categories as follows:

- 1) Cash collateral, such as time deposit/saving account/demand deposit/margin deposit/cash blocked or booked as an escrow account which are kept and recorded by the Bank and Stand-By Letter of Credit (SBLC) issued by (*prime bank*);
- 2) Non cash collaterals are collateral not included in collateral as mentioned on cash collateral above.

Loans quality based on category of financial assets

The loans quality of financial assets is managed by the Bank using guidance from Bank Indonesia. Loans quality based on category of assets that have a credit risk refers to the assessment of external agencies as stipulated by Bank Indonesia.

The Bank has a policy to manage the performance of loans quality of debtors. This policy assists management to monitor credit risk exposure of the Bank.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

1. Risiko kredit (lanjutan)

b. Risiko kredit konsentrasi (lanjutan)

Agunan yang diambil alih

Terdapat penurunan AYDA sebesar Rp88.417 (7,00%) dari Rp1.263.459 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp1.175.042 pada tanggal 31 Desember 2024.

Penilaian penurunan nilai

Pertimbangan utama untuk penilaian penurunan nilai kredit yang diberikan termasuk pembayaran-pembayaran pokok atau bunga yang menunggak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari atau ada kesulitan atau pelanggaran yang diketahui dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak. Bank melakukan penilaian penurunan nilai dalam 2 (dua) area yaitu:

- 1) Evaluasi penurunan nilai secara individual;
- 2) Evaluasi penurunan nilai secara kolektif.

Penilaian penyisihan penurunan nilai individual

Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual untuk masing-masing kredit yang diberikan yang signifikan. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai antara lain mencakup:

- 1) Kemungkinan rencana bisnis debitur;
- 2) Kemampuan untuk memperbaiki kinerja setelah adanya kesulitan keuangan;
- 3) Proyeksi penerimaan dan pembayaran apabila terjadi kebangkrutan;
- 4) Kemungkinan adanya sumber pembayaran lainnya;
- 5) Jumlah yang dapat direalisasikan atas jaminan dan ekspektasi waktu arus kas.

Penyisihan penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan, kecuali bila terdapat beberapa kondisi yang mengharuskan adanya pemantauan yang lebih berhati-hati.

Penilaian penyisihan kerugian secara kolektif dilakukan atas aset keuangan yang tidak signifikan secara individu.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

1. Credit risk (continued)

b. Concentration credit risk (continued)

Foreclosed assets

There was a decrease in AYDA of Rp88,417 (7.00%) from Rp1,263,459 as of December 31, 2023 to Rp1,175,042 as of December 31, 2024.

Impairment assessment

The main considerations for the loan impairment assessment include whether any payments of principal or interest are overdue of more than 90 (ninety) days or there are any financial difficulties, or breach of the loans agreement. The Bank assesses impairment value in 2 (two) areas follows:

- 1) Individually assessed allowances;
- 2) Collectively assessed allowances.

Individually assessed allowances

The Bank determines the allowances for impairment losses for each individually significant loans on an individual basis. Items considered when determining allowance for impairment losses include:

- 1) The sustainability of the debtors' business plan;
- 2) The ability to improve its performance during a financial difficulty;
- 3) Cash receipt and payment projection if debtor filed bankrupt;
- 4) The availability of other financial support;
- 5) The amount can be realized from its collateral and timing of expected cash flows.

Impairment allowances are evaluated at each reporting date, unless certain condition applied which needs more attention.

Allowances are assessed collectively for losses on financial assets that are not individually significant.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

1. Risiko kredit (lanjutan)

b. Risiko kredit konsentrasi (lanjutan)

Evaluasi penurunan nilai

Berikut ini adalah risiko kredit berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

Giro pada Bank Indonesia

2024		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>
Rupiah	2.948.485	-
Mata uang asing	76.435	-
Jumlah	3.024.920	-
2023		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>
Rupiah	2.585.155	-
Mata uang asing	73.121	-
Jumlah	2.658.276	-

Giro pada bank lain

2024		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>
Rupiah	130.642	-
Mata uang asing	218.877	-
Jumlah	349.519	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(89)
Jumlah - bersih	349.519	(89)
2023		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>
Rupiah	126.095	-
Mata uang asing	212.205	-
Jumlah	338.300	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(3)
Jumlah - bersih	338.300	(3)

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

1. Credit risk (continued)

b. Concentration credit risk (continued)

Impairment assessment

Below are credit risk based on allowance for impairment losses assessment classification as of December 31, 2024 and 2023:

Current Accounts with Bank Indonesia

2024		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>
Rupiah	2.948.485	-
Foreign currency	76.435	-
Total	3.024.920	-
2023		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>
Rupiah	2.585.155	-
Foreign currency	73.121	-
Total	2.658.276	-

Current accounts with other banks

2024		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>
Rupiah	130.642	-
Foreign currency	218.877	-
Total	349.519	-
Allowance for impairment losses	-	(89)
Total - net	349.519	(89)
2023		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>
Rupiah	126.095	-
Foreign currency	212.205	-
Total	338.300	-
Allowance for impairment losses	-	(3)
Total - net	338.300	(3)

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

1. Risiko kredit (lanjutan)

b. Risiko kredit konsentrasi (lanjutan)

Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

	2024		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Rupiah			
Deposit Facility			
Bank Indonesia	1.346.804	-	1.346.804
Penempatan pada Bank – Call money	280.000	-	280.000
Penempatan pada Bank – Deposito	100.000	-	100.000
Mata uang asing			
Term Deposits Bank Indonesia	450.660	-	450.660
Jumlah - bersih	2.177.464	-	2.177.464

	2023		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Rupiah	-	-	-
Deposit Facility			
Bank Indonesia	279.959	-	279.959
Mata uang asing			
Term Deposits Bank Indonesia	431.116	-	431.116
Jumlah - bersih	711.075	-	711.075

Efek-efek

	2024		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Nilai wajar melalui laba rugi	981.435	-	981.435
Nilai wajar melalui komprehensif lain	880.045	-	880.045
Biaya perolehan diamortisasi	6.641.296	-	6.641.296
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(1.214)	(1.214)
Jumlah - bersih	8.502.776	(1.214)	8.501.562

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

1. Credit risk (continued)

b. Concentration credit risk (continued)

Impairment assessment (continued)

Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Rupiah
Deposit Facility of
Bank Indonesia

Placements with –
Banks Call Money
Placements with –
Banks Deposits

Foreign currency
Term Deposits of
Bank Indonesia

Total - net

Rupiah
Deposit Facility of
Bank Indonesia
Foreign currency
Term Deposits of
Bank Indonesia

Total - net

Marketable Securities

Fair value through
profit or loss
Fair value through
other comprehensive
income

Amortized cost
Allowance for
impairment losses

Total - net

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

1. Risiko kredit (lanjutan)

b. Risiko kredit konsentrasi (lanjutan)

Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Efek-efek (lanjutan)

	2023		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Nilai wajar melalui laba rugi	307.164	-	307.164
Nilai wajar melalui komprehensif lain	1.241.878	-	1.241.878
Biaya perolehan diamortisasi	4.239.054	-	4.239.054
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(682)	(682)
Jumlah - bersih	5.788.096	(682)	5.787.414

Fair value through profit or loss
Fair value through other comprehensive income
Amortized cost
Allowance for impairment losses
Total - net

Wesel ekspor

Export bills

	2024		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Rupiah	166.681	-	166.681

Rupiah

	2023		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Rupiah	131.863	-	131.863

Rupiah

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Securities purchased under agreement to resell

	2024		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Rupiah	976.065	-	976.065
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(2)	(2)
Jumlah - bersih	976.065	(2)	976.063

Rupiah
Allowance for impairment losses
Total - net

	2023		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Rupiah	125.469	-	125.469
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-
Jumlah - bersih	125.469	-	125.469

Rupiah
Allowance for impairment losses
Total - net

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

1. Risiko kredit (lanjutan)

b. Risiko kredit konsentrasi (lanjutan)

Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Tagihan Derivatif

2024			
Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Rupiah	48	-	48

2023			
Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Rupiah	35	-	35

Kredit yang diberikan

2024			
Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<i>Revolving loans</i>	3.495.435	744.249	4.239.684
<i>Fixed loans</i>	1.309.916	2.254.726	3.564.642
Kredit kepemilikan rumah dan apartemen	2.070.895	84.351	2.155.246
Kredit sindikasi	255.433	-	255.433
Pinjaman rekening koran	202.563	2.648	205.211
Pinjaman karyawan	42.331	-	42.331
Kredit usaha rakyat	-	-	-
Kredit tanpa agunan	21.984	-	21.984
Kredit pemilikan kios	119.825	957	120.782
Kredit pemilikan mobil	166	-	166
Jumlah	7.518.548	3.086.931	10.605.479
Cadangan kerugian penurunan nilai	(81.107)	(450.800)	(531.907)
Jumlah – bersih	7.437.441	2.636.131	10.073.572

Rupiah

Rupiah

Loans

Revolving loans
Fixed loans

Housing and apartment ownership loans
Syndicated loans

Overdraft
Employee loans
Micro community commercial loans
Unsecured loans

Kiosk loans

Car loans

Total
Allowance for impairment losses

Total - net

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

1. Risiko kredit (lanjutan)

b. Risiko kredit konsentrasi (lanjutan)

Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Kredit yang diberikan (lanjutan)

	2023		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
<i>Revolving loans</i>	4.485.748	481.231	4.966.979
<i>Fixed loans</i>	984.711	2.937.155	3.921.866
Kredit kepemilikan rumah dan apartemen	2.116.094	284.213	2.400.307
Kredit sindikasi	304.316	230.041	534.357
Pinjaman rekening Koran	172.636	2.642	175.278
Pinjaman karyawan	41.940	-	41.940
	241	-	241
Kredit usaha rakyat			
Kredit tanpa agunan	24.040	-	24.040
Kredit pemilikan kios	81.191	957	82.148
Kredit pemilikan mobil	213	-	213
Jumlah	8.211.130	3.936.239	12.147.369
Cadangan kerugian penurunan nilai	(75.806)	(434.830)	(510.636)
Jumlah – bersih	8.135.324	3.501.409	11.636.733

Tagihan akseptasi

	2024		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Rupiah	166.682	-	166.682
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(657)	(657)
Jumlah - bersih	166.682	(657)	166.025

	2023		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Non impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Rupiah	131.863	-	131.863
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(501)	(501)
Jumlah - bersih	131.863	(501)	131.362

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

1. Credit risk (continued)

b. Concentration credit risk (continued)

Impairment assessment (continued)

Loans (continued)

Revolving loans
Fixed loans

*Housing and apartment
ownership loans*
Syndicated loans

Overdraft
Employee loans
*Micro community
commercial loans*
Unsecured loans

Kiosk loans

Car loans
Total

*Allowance for
impairment losses*

Total - net

Acceptance receivables

Rupiah
*Allowance for
impairment losses*

Total - net

Rupiah
*Allowance for
impairment losses*

Total - net

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Profil risiko (lanjutan)

III. Risk profile (continued)

1. Risiko kredit (lanjutan)

1. Credit risk (continued)

Tabel di bawah ini menunjukkan kualitas kredit per jenis instrumen keuangan:

The table below shows credit quality based on category of financial instruments:

2024								
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>				Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>	Tingkat rendah/ <i>Low grade</i>	Tanpa peringkat/ <i>Unrated</i>				
Aset Keuangan								Financial Assets
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	3.024.920	-	-	3.024.920	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	349.519	-	-	-	-	-	349.519	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.177.464	-	-	-	-	-	2.177.464	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	8.502.776	-	-	-	-	-	8.502.776	Marketable securities
Wesel ekspor	166.681	-	-	-	-	-	166.681	Export bills
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	976.065	-	-	-	-	-	976.065	Securities purchased under agreement to resell
Tagihan derivatif	-	-	-	48	-	-	48	Derivative receivables
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	-	253.265	-	-	253.265	Accrued interest receivables
Kredit yang diberikan	-	-	-	10.220.246	19.747	365.486	10.605.479	Loans
Tagihan akseptasi	-	-	-	166.682	-	-	166.682	Acceptance receivables
Penyertaan saham	-	-	-	6	-	-	6	Investment in shares of stock
Aset lain-lain: Setoran jaminan dan tagihan	-	-	-	21.858	-	-	21.858	Other assets: Guarantee deposits and receivables
Jumlah	12.172.505	-	-	13.687.025	19.747	365.486	26.244.763	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai							(533.869)	Allowance for impairment losses
Jumlah – bersih							25.710.894	Total – net

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

1. Risiko kredit (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan kualitas kredit per jenis instrumen keuangan: (lanjutan)

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

1. Credit risk (continued)

The table below shows credit quality based on category of financial instruments: (continued)

2023								
Aset Keuangan	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>				Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	<i>Financial Assets</i>
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>	Tingkat rendah/ <i>Low grade</i>	Tanpa peringkat/ <i>Unrated</i>				
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	2.658.276	-	-	2.658.276	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank lain	338.300	-	-	-	-	-	338.300	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	711.075	-	-	-	-	-	711.075	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>
Efek-efek	5.788.096	-	-	-	-	-	5.788.096	<i>Marketable securities</i>
Wesel ekspor	131.863	-	-	-	-	-	131.863	<i>Export bills</i>
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	125.469	-	-	-	-	-	125.469	<i>Securities purchased under agreement to resell</i>
Tagihan derivatif	-	-	-	35	-	-	35	<i>Derivative receivables</i>
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	-	326.422	-	-	326.422	<i>Accrued interest receivables</i>
Kredit yang diberikan	-	-	-	11.993.285	38.762	115.322	12.147.369	<i>Loans</i>
Tagihan akseptasi	-	-	-	131.863	-	-	131.863	<i>Acceptance receivables</i>
Penyertaan saham	-	-	-	6	-	-	6	<i>Investment in shares of stock</i>
Aset lain-lain: Setoran jaminan dan tagihan	-	-	-	38.332	-	-	38.332	<i>Other assets: Guarantee deposits and receivables</i>
Jumlah	7.094.803	-	-	15.148.219	38.762	115.322	22.397.106	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai							(511.822)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Jumlah – bersih							21.885.284	<i>Total – net</i>

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

- Tingkat tinggi: Peringkat dari pihak ketiga dalam kategori ini memiliki kapasitas sangat baik dalam memenuhi komitmen keuangan dengan risiko kredit sangat rendah;
- Tingkat sedang: Peringkat dari pihak ketiga dalam kategori ini memiliki kapasitas yang baik dalam memenuhi komitmen keuangan dengan risiko kredit sangat rendah;
- Tingkat rendah: Peringkat dari pihak ketiga dalam kategori ini memiliki kapasitas yang cukup dalam memenuhi komitmen keuangan dengan risiko kredit sedang;
- Tanpa peringkat: Pihak ketiga dalam kategori yang sekarang ini tidak menyediakan peringkat dikarenakan ketidakterediaan dari model-model peringkat dan pemerintah dan/atau agen-agen yang berhubungan dengan pemerintah.

The credit qualities are defined as follows:

- High grade: Third parties rating in this category have an excellent capacity to meet its' financial commitments with very low credit risk;
- Standard grade: Third parties rating in this category have a good capacity to meet its' financial commitments with very low credit risk;
- Low grade: Third parties rating in this category have fairly acceptable capacity to meet its' financial commitments with standard credit risk;
- Unrated: Third parties in this category are currently not assigned with third parties' ratings due to unavailability of rating models and governments and/or government-related agencies.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

1. Risiko kredit (lanjutan)

Analisis umur kredit yang diberikan yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

2024				
	Jumlah/ Total	Kurang dari 30 hari/ Less than 30 days	31-60 hari/ days	61-90 hari/ days
Korporasi	-	-	-	-
Komersial/Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	-	-
Konsumen	19.746	613	18	19.115
Jumlah	19.746	613	18	19.115
2023				
	Jumlah/ Total	Kurang dari 30 hari/ Less than 30 days	31-60 hari/ days	61-90 hari/ days
Korporasi	-	-	-	-
Komersial/Usaha Kecil Menengah (UKM)	1.102	1.102	-	-
Konsumen	37.660	391	65	37.204
Jumlah	38.762	1.493	65	37.204

Corporate
Commercial/Small and Medium
Enterprises (SME)
Consumer
Total

2. Risiko pasar

Risiko suku bunga

Selama tahun berjalan, Bank telah mengelola risiko tingkat suku bunga yang merupakan bagian dari risiko pasar dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, melalui:
 - a) Responsif terhadap Laporan Profil Risiko Pasar terkait Risiko Tingkat Suku Bunga dan perkembangan kondisi makro yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) secara periodik;
 - b) Kebijakan untuk mengambil posisi konservatif terhadap eksposur yang terkena risiko tingkat suku bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*).
2. Pengendalian atas posisi risiko dengan penetapan *limit* transaksi, *limit* risiko dan *limit* per fungsional.
3. Pembakuan Kebijakan dan Prosedur:
 - a) Memiliki dan melaksanakan Pedoman Manajemen Risiko Pasar dan Kebijakan/Prosedur internal lainnya yang berkaitan dengan risiko tingkat suku bunga.
 - b) Melakukan review dan penyempurnaan terhadap Pedoman/Prosedur Manajemen Risiko Pasar yang telah ditetapkan secara periodik.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

1. Credit risk (continued)

The aging analysis of loans that past due but not impaired as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

2024				
	Jumlah/ Total	Kurang dari 30 hari/ Less than 30 days	31-60 hari/ days	61-90 hari/ days
Korporasi	-	-	-	-
Komersial/Usaha Kecil Menengah (UKM)	-	-	-	-
Konsumen	19.746	613	18	19.115
Jumlah	19.746	613	18	19.115
2023				
	Jumlah/ Total	Kurang dari 30 hari/ Less than 30 days	31-60 hari/ days	61-90 hari/ days
Korporasi	-	-	-	-
Komersial/Usaha Kecil Menengah (UKM)	1.102	1.102	-	-
Konsumen	37.660	391	65	37.204
Jumlah	38.762	1.493	65	37.204

Corporate
Commercial/Small and Medium
Enterprises (SME)
Consumer
Total

2. Market risk

Interest rate risk

During the year, the Bank has managed interest rate risk as a part of market risk by performing the following steps:

1. Active monitoring from Boards of Commissioners and Directors, through:
 - a) Be responsive to the Market Risk Profile Report related to Interest Rate Risk and macro condition developments reported by Risk management Unit (SKMR) periodically;
 - b) Policies for taking conservative positions against interest rate risk exposure in accordance with the applicable regulations with emphasis on the prudential banking principle.
- Control the risk position by setting transaction limit, risk limits and the limit per functional.
3. Standardization of Policies and Procedures:
 - a) Having and implementing Market Risk management Guidelines and other internal Policy/Procedures related to the interest rate risk.
 - b) Conduct a review and improvement of Guidelines/Market Risk management Procedures periodically.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

2. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko suku bunga (lanjutan)

Selama tahun berjalan, Bank telah mengelola risiko tingkat suku bunga yang merupakan bagian dari risiko pasar dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (lanjutan)

4. Melaksanakan proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Suku Bunga dengan mengikuti ketentuan Regulator (BI/OJK) dan praktek perbankan yang berlaku umum terkini, termasuk *stress testing* terhadap kemungkinan kondisi yang terburuk atas eksposur yang memiliki sensitivitas risiko tingkat suku bunga.
5. Melakukan pemantauan terhadap eksposur yang terekspos risiko nilai tukar tertentu secara periodik untuk memitigasi risiko secara dini.

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga kontraktual rata-rata per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang signifikan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024		2023		
	Rupiah/ Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Rupiah/ Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	
<u>Aset</u>					<u>Assets</u>
Giro pada bank lain	0,54%	0,00%	3,58%	0,02%	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5,15%	5,00%	5,15%	5,00%	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	6,31%	3,31%	6,14%	2,91%	Marketable securities
Wesel ekspor	9,00%	0,00%	9,00%	0,00%	Export bills
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	6,82%	0,00%	6,80%	0,00%	Securities purchased under agreement to resell
Kredit yang diberikan	14,29%	5,69%	10,82%	6,20%	Loans
<u>Liabilitas</u>					<u>Liabilities</u>
Simpanan nasabah					Deposits from customers
Giro	0,91%	0,02%	0,82%	0,01%	Demand deposits
Tabungan	0,75%	0,00%	0,75%	0,00%	Savings deposits
Deposito berjangka	4,66%	3,36%	3,73%	1,52%	Time deposits
Simpanan dari bank lain					Deposits from Otherbanks
Deposito berjangka	6,50%	0,00%	6,15%	0,00%	Time deposits
Deposito <i>on call</i>	6,68%	0,00%	0,00%	0,00%	On call deposits
Giro	3,59%	0,00%	1,78%	0,00%	Demand deposits
<i>Call money</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Call money
Pinjaman subordinasi	9,50%	0,00%	9,50%	0,00%	Subordinated loan

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

2. Market risk (continued)

Interest rate risk (continued)

During the year, the Bank has managed interest rate risk as a part of market risk by performing the following steps: (continued)

4. Implementing the process of Identification, Measurement, Monitoring and Controlling of Interest Rate Risk in accordance to Regulator (BI/OJK) and recent best practices, including stress testing to the worst case scenario on exposure which has a sensitivity of interest rate risk.
5. Conduct monitoring on exposures which effected by certain exchange rate risk periodically to mitigate the risks in advance.

The following table presents information on the contractual interest rate on average per year for financial assets and liabilities that are significant for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

2. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko suku bunga (lanjutan)

Tabel berikut merangkum aset Bank dengan pendapatan bunga dan liabilitas Bank dengan beban bunga (tidak dengan tujuan diperdagangkan) pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan tanggal kontraktual perubahan suku bunga atau tanggal jatuh tempo, mana yang lebih dahulu:

2024							Descriptions
Keterangan	Jumlah/ Total	Kurang dari 6 bulan/ Less than 6 months	6 bulan sampai dengan 12 bulan/ 6 months until 12 months	1 tahun sampai dengan 2 tahun/ 1 year until 2 years	2 tahun sampai dengan 5 tahun/ 2 years until 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
Giro pada bank lain	349.519	349.519	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.177.464	2.177.464	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	8.502.776	3.797.471	1.912.762	1.346.060	1.066.004	380.479	Marketable securities
Wesel ekspor	166.681	166.681	-	-	-	-	Export bills
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	976.065	976.065	-	-	-	-	Securities purchased under agreement to resale
Kredit yang diberikan	10.605.479	2.024.359	2.243.773	939.006	2.215.086	3.183.255	Loans
Jumlah aset keuangan	22.777.984	9.491.559	4.156.535	2.285.066	3.281.090	3.563.734	Total financial assets
Simpanan nasabah	23.890.773	23.180.083	710.690	-	-	-	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	452.454	92.500	359.954	-	-	-	Deposits from other banks
Pinjaman subordinasi	200.000	-	-	-	-	200.000	Subordinated loan
Jumlah liabilitas keuangan	24.543.227	23.272.583	1.070.644	-	-	200.000	Total financial liabilities
Jumlah selisih penilaian bunga	(1.765.243)	(13.781.024)	3.085.891	2.285.066	3.281.090	3.363.734	Interest repricing gap

2023							Descriptions
Keterangan	Jumlah/ Total	Kurang dari 6 bulan/ Less than 6 months	6 bulan sampai dengan 12 bulan/ 6 months until 12 months	1 tahun sampai dengan 2 tahun/ 1 year until 2 years	2 tahun sampai dengan 5 tahun/ 2 years until 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
Giro pada bank lain	338.300	338.300	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	711.075	711.075	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	5.788.096	1.492.816	1.560.280	1.718.279	671.817	344.904	Marketable securities
Wesel ekspor	131.863	131.863	-	-	-	-	Export bills
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	125.469	-	125.469	-	-	-	Securities purchased under agreement to resale
Kredit yang diberikan	12.147.369	2.617.263	2.576.862	341.063	2.980.659	3.631.522	Loans
Jumlah aset keuangan	19.242.172	5.291.317	4.262.611	2.059.342	3.652.476	3.976.426	Total financial assets
Simpanan nasabah	20.631.701	20.395.350	236.351	-	-	-	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	336.958	336.958	-	-	-	-	Deposits from other banks
Pinjaman subordinasi	200.000	-	-	-	-	200.000	Subordinated loan
Jumlah liabilitas keuangan	21.168.659	20.732.308	236.351	-	-	200.000	Total financial liabilities
Jumlah selisih penilaian bunga	(1.926.487)	(15.440.991)	4.026.260	2.059.342	3.652.476	3.776.426	Interest repricing gap

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

2. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko suku bunga (lanjutan)

Dari *repricing gap profile* ini dapat diukur pengaruh perubahan suku bunga terhadap pendapatan bunga bersih dan/atau modal ekonomis Bank, sehingga jika terjadi perubahan suku bunga yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja Bank, maka Bank akan dapat segera merestruktur aset dan liabilitas yang dimiliki, baik *repricing date*-nya ataupun jenis suku bunganya (*fixed* atau *floating*).

Manajemen risiko tingkat suku bunga berdasarkan perspektif pendapatan bunga, dilakukan dengan mengukur sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Bank terhadap berbagai skenario perubahan suku bunga baik standar dan non standar. Skenario standar yang dilakukan mencakup kenaikan atau penurunan paralel pada semua kurva imbal hasil.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan dalam tingkat suku bunga untuk *banking book*, dengan semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan, terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Bank:

Tahun/ Year	IDR		USD	
	Kenaikan/ (penurunan) dalam basis poin/ Increase (decrease) in basis points	Dampak terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebelum pajak/ The impact on the statement profit or loss and other comprehensive income before tax	Kenaikan/ (penurunan) dalam basis poin/ Increase (decrease) in basis points	Dampak terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebelum pajak/ The impact on the statement profit or loss and other comprehensive income before tax
2024	100	(41.263,03)	100	(4.123,63)
	(100)	41.263,03	(100)	4.123,63
2023	100	(38.563,38)	100	(535,65)
	(100)	38.563,38	(100)	535,65

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

2. Market risk (continued)

Interest rate risk (continued)

By this *repricing gap profile* can be measured the effects of changes in interest rate on net interest income and/or capital economical Bank, hence if there is a change in interest rate that may affect the Bank's performance, the Bank will be able to restructure it's assets and liabilities immediately, including the *repricing date* or the type of interest rate (*fixed* or *floating*).

The management of interest rate risk based on earning perspective is provided by measuring the sensitivity of the Bank's financial assets and liabilities against various standard and non standard interest rate changes scenarios. Standard scenario that is conducted based on increase or decrease of interest rate changes in parallel shift to the return on investment curve.

The following table shows the sensitivity to a possible change in interest rates for the banking book, with all other variables are held constant, to the statement of profit or loss and other comprehensive income of the Bank:

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

2. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar

Selama tahun berjalan, dalam mengelola risiko nilai tukar yang merupakan bagian dari risiko pasar, Bank telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, melalui:
 - a) Responsif terhadap Laporan Profil Risiko Pasar terkait Risiko Nilai Tukar dan perkembangan kondisi makro yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) secara periodik;
 - b) Kebijakan untuk mengambil posisi konservatif terhadap eksposur yang terkena risiko nilai tukar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*).
2. Pengendalian atas posisi risiko dengan penetapan *limit* transaksi, *limit* risiko dan *limit* per fungsional.
3. Pembakuan kebijakan dan prosedur:
 - a) Memiliki dan melaksanakan Pedoman manajemen risiko pasar dan kebijakan/ prosedur internal lainnya yang berkaitan dengan risiko nilai tukar
 - b) Melakukan revidi dan penyempurnaan terhadap pedoman/ prosedur manajemen risiko pasar terkait risiko nilai tukar yang telah ditetapkan secara periodik
4. Melaksanakan proses Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko nilai tukar dengan mengikuti ketentuan regulator (BI/OJK) dan *best practices* terkini, termasuk *stress testing* terhadap kemungkinan kondisi yang terburuk (*worst case scenario*) terhadap eksposur yang terkena risiko nilai tukar.
5. Melakukan pemantauan terhadap transaksi-transaksi pasar tertentu secara periodik untuk memitigasi risiko secara dini.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

2. Market risk (continued)

Foreign exchange risk

During the year, in managing the foreign exchange risk, which is a part of its market risk, the Bank has performed the following steps:

1. Active monitoring from Boards of Commissioners and Directors, through:
 - a) Be a responsive to the Market Risk Profile Report related to Foreign Exchange Risk and macro condition developments which reported by the Risk management Unit (SKMR) periodically;
 - b) Policies for taking conservative position against the exchange rate risk exposure in accordance with the applicable regulations with emphasis on the prudential banking principle.
2. Control the risk position by setting the transaction limit, risk limit and limit perfunctional.
3. Standar dization of policies and procedures:
 - a) Having and implementing market risk management guidelines and other internal policy/ procedures related to the foreign exchange risk.
 - b) Conduct a review and improvement of guidelines/ market risk related to foreign exchange risk management Procedures periodically.
4. Implementing the process of identification, measurement, monitoring and controlling of foreign exchange riskin accordance to regulator (BI/OJK) and recent best practices, including stress testing to the worst case scenario on exposure which has a sensitivity of foreign exchange risk.
5. Conduct monitoring on certain market transactions periodically to mitigate the risks in advance.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

2. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar (lanjutan)

Dalam tahun berjalan, Bank telah melakukan pengembangan dan simulasi metodologi perhitungan kebutuhan modal internal yang diperlukan untuk mengatasi risiko pasar dengan menggunakan metode internal VaR (*Value at Risk*) yaitu metode *Variance co Variance* dan *Historical Simulation* melalui aplikasi *Market Risk Measurement* (MRM). Untuk pengelolaan risiko pasar, Bank difasilitasi melalui *Assets and Liabilities Committee* (ALCO).

Bank telah mengelola posisi mata uang asing untuk aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki oleh Bank dengan memonitor Posisi Devisa Bersih (PDN). Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, PDN Bank telah diungkapkan dalam Catatan 41.

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank atas risiko nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Termasuk didalamnya adalah instrumen keuangan pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan jenis mata uang:

	2024						
	Dolar Amerika Serikat/ <i>United States Dollar</i>	Euro Eropa/ <i>European Euro</i>	Dolar Singapura/ <i>Singapore Dollar</i>	Dolar Australia/ <i>Australian Dollar</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Aset							Assets
Kas	380.328	1.595	11.504	1.771	1.140	396.338	Cash
Giro pada Bank Indonesia	76.435	-	-	-	-	76.435	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	155.734	2.759	25.399	2.990	31.995	218.877	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	450.660	-	-	-	-	450.660	Placements with Bank Indonesia and other bank
Efek-efek	483.816	-	-	-	-	483.816	Marketable securities
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	2.696	-	38	-	-	2.734	Accrued interest receivables
Kredit yang diberikan	241.941	-	12.928	-	-	254.869	Loans
Jumlah	1.791.610	4.354	49.869	4.761	33.135	1.883.729	Total
Liabilitas							Liabilities
Liabilitas segera	994	-	-	-	-	994	Obligation due immediately
Simpanan nasabah	1.779.698	75	31.515	4	17.978	1.829.270	Deposits from customers
Bunga masih harus dibayar	3.184	-	(67)	-	-	3.117	Accrued interest payables
Liabilitas lain-lain	894	-	-	-	-	894	Other liabilities
Jumlah	1.784.770	75	31.448	4	17.978	1.834.275	Total
Laporan posisi keuangan – bersih	6.840	4.279	18.421	4.757	15.157	49.454	Statement of financials position – net

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

2. Market risk (continued)

Foreign exchange risk (continued)

During the year, the Bank has conducted development and simulation on methodology of internal capital requirements calculation to cover market risks using internal VaR (*Value at Risk*) which are the *Variance co Variance* and *Historical Simulation* methods through the application of *Market Risk Measurement* (MRM). In regard to market risk management, the Bank is facilitated through its *Assets and Liabilities Committee* (ALCO).

The Bank manages its foreign currency position for its financial assets and liabilities by monitoring the Bank's Net Open Position (NOP). As of December 31, 2024 and 2023, the Bank's NOP has been disclosed in Note 41.

The table below summarises exposure to foreign currency exchange rate risk as of December 31, 2024 and 2023. Included in the table are financial instruments at carrying amounts, categorized by currencies:

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

2. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar (lanjutan)

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank atas risiko nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Termasuk didalamnya adalah instrumen keuangan pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan jenis mata uang: (lanjutan)

	2023					
	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar	Euro Eropa/ European Euro	Dolar Singapura/ Singapore Dollar	Dolar Australia/ Australian Dollar	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total
Aset						
Kas	25.466	1.511	8.911	1.920	1.547	39.355
Giro pada Bank Indonesia	73.121	-	-	-	-	73.121
Giro pada bank lain	181.387	981	21.005	1.894	6.938	212.205
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	431.116	-	-	-	-	431.116
Efek-efek	231.067	-	-	-	-	231.067
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	5.160	-	46	-	-	5.206
Kredit yang diberikan	500.158	-	15.684	-	-	515.842
Jumlah	1.447.475	2.492	45.646	3.814	8.485	1.507.912
Liabilitas						
Liabilitas segera	1.380	-	-	-	-	1.380
Simpanan nasabah	1.615.461	31	35.099	2	721	1.651.314
Bunga masih harus dibayar	2.136	-	(67)	-	-	2.069
Liabilitas lain-lain	856	-	-	-	-	856
Jumlah	1.619.833	31	35.032	2	721	1.655.619
Laporan posisi keuangan – bersih	(172.358)	2.461	10.614	3.812	7.764	(147.707)

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

2. Market risk (continued)

Foreign exchange risk (continued)

The table below summarises exposure to foreign currency exchange rate risk as of December 31, 2024 and 2023. Included in the table are financial instruments at carrying amounts, categorized by currencies: (continued)

Assets
Cash
Current accounts with Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Placements with Bank Indonesia and other bank
Marketable securities
Accrued interest receivables
Loans
Total
Liabilities
Obligation due immediately
Deposits from customers
Accrued interest payables
Other liabilities
Total
Statement of financials position – net

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

2. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi mata uang asing atas aset dan liabilitas moneter yang tidak diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dimana Bank memiliki risiko terhadap arus kas masa depan. Analisis tersebut menghitung pengaruh dari pergerakan wajar mata uang asing yang memungkinkan terhadap Rupiah, dengan seluruh variabel lain dianggap konstan, terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (akibat adanya perubahan nilai wajar aset dan liabilitas moneter yang tidak diperdagangkan yang sensitif terhadap nilai tukar) dan ekuitas (akibat adanya perubahan nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan yang termasuk kategori nilai wajar melalui komprehensif lain).

2024		Currency
Kenaikan/ (penurunan) dalam basis poin/ Increase/ (decrease) in basis points	Sensitivitas dalam laporan laba rugi/ Sensitivity of profit or loss	
Mata uang		
Dolar Amerika Serikat	10/(10)	
Poundsterling Inggris	10/(10)	United States Dollar
Euro Eropa	10/(10)	Great Britain Poundsterling
		European Euro
2023		Currency
Kenaikan/ (penurunan) dalam basis poin/ Increase/ (decrease) in basis points	Sensitivitas dalam laporan laba rugi/ Sensitivity of profit or loss	
Mata uang		
Dolar Amerika Serikat	10/(10)	
Poundsterling Inggris	10/(10)	United States Dollar
Euro Eropa	10/(10)	Great Britain Poundsterling
		European Euro

3. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

2. Market risk (continued)

Foreign exchange risk (continued)

The table below indicates the foreign currencies position of non-trading monetary assets and liabilities as of December 31, 2024 and 2023 which shows that the Bank has risk exposure in expected cash flows. The analysis calculates the effect of a reasonably possible movement of the currency rate against the Indonesian Rupiah, with all variables held constant, on the statement of profit or loss and other comprehensive income (due to change in the fair value of currency sensitive non-trading monetary assets and liabilities) and equity (due to change in the fair value of fair value through other comprehensive income financial assets and liabilities).

3. Liquidity risk

Liquidity risk is risk due to the inability of the Bank to meet obligations due from cash flow funding sources and/or from high quality liquid assets that can be pledged, without disrupting the activities and financial condition of the Bank.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

3. Risiko likuiditas (lanjutan)

Kunci pengukuran yang digunakan oleh Bank untuk mengelola risiko likuiditas adalah dengan menggunakan analisis *gap* dan rasio-rasio likuiditas seperti rasio aset likuid terhadap dana pihak ketiga, rasio depasan inti, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), serta dengan memantau posisi bersih arus kas dalam jangka waktu 1 hari sampai dengan 3 bulan ke depan dan aktivitas pendanaan antar bank. Bank melakukan pemantauan atas pengelolaan risiko likuiditas melalui perkembangan profil risiko likuiditas setiap bulan yang dilaporkan kepada Direksi dan Komite Pemantau Risiko.

Beberapa langkah telah diambil dalam mengelola risiko likuiditas, seperti dari sisi aset, strategi pembelian instrumen keuangan yang berkualitas tinggi dan berisiko rendah untuk posisi *trading book*, *available for sale* dan *hold to maturity*, memelihara posisi aset likuid, dan menjaga saldo Giro Wajib Minimum (GWM) sesuai ketentuan Bank Indonesia. Sementara di sisi kewajiban, strategi memelihara komposisi *Current Account Savings Account* (CASA) terhadap total deposito dan melakukan analisis terhadap jenis-jenis liabilitas dan jangka waktunya.

Langkah yang diambil oleh Bank sehubungan dengan mismatch antara aset dan liabilitas moneter yang jatuh tempo antara 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan adalah meningkatkan pelayanan kepada nasabah, memantau perpanjangan simpanan, mencari nasabah baru serta menawarkan produk dan bunga yang menarik kepada nasabah, untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas jumlah simpanan.

Di samping itu, Bank juga mengintensifkan usaha penagihan kepada debitur bermasalah, penjualan agunan yang diambil alih (AYDA) dan menempatkan kelebihan dana pada surat-surat berharga yang memiliki pasar yang likuid sehingga dapat dicairkan setiap saat apabila Bank membutuhkan dana.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

3. Liquidity risk (continued)

The key measurement used by the Bank to manage liquidity risk is to use gap analysis and liquidity ratios such as the ratio of liquid assets to third party funds, core depositors' ratio, macroprudential intermediation ratio (RIM), and by monitoring the net position of cash flows within a period 1 day to the next 3 months and interbank funding activities. The Bank monitors liquidity risk management through the development of a liquidity risk profile every month that is reported to the Directors and Risk Monitoring Committee.

Several steps have been taken in managing liquidity risk, such as in terms of assets, purchasing strategies of high quality and low-risk financial instruments for trading book positions, available for sale and hold to maturity, maintaining liquid asset positions, and maintaining the Statutory Reserves (GWM) in accordance with Bank Indonesia regulations. While on the liability side, the strategy maintains the composition of the Current Account Savings Account (CASA) of total deposits and analyzes the types of liabilities and their time periods.

The steps taken by the Bank in connection with the mismatch between monetary assets and liabilities with maturities between 1 (one) to 6 (six) months are to improve service to customers, monitor the extension of deposits, find new customers and offer attractive products and interest to customers, to maintain stability and continuity in the amount of deposits.

In addition, the Bank also intensified collection efforts for troubled debtors, foreclosed collateral sales (AYDA) and placed excess funds in securities that have a liquid market so that they can be disbursed at any time if the Bank needs funds.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Profil risiko (lanjutan)

III. Risk profile (continued)

3. Risiko likuiditas (lanjutan)

3. Liquidity risk (continued)

	2024							
	Jumlah/ Total	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 mon	1 bulan sampai dengan 3 bulan/ 1 month until 3 months	3 bulan sampai dengan 1 tahun/ 3 months until 1 year	1 tahun sampai dengan 2 tahun/ 1 year until 2 years	2 tahun sampai dengan 5 tahun/ 2 years until 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
Aset								Assets
Kas	769.354	769.354	-	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	3.024.920	3.024.920	-	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	349.519	349.519	-	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.177.464	2.177.464	-	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	8.502.776	753.310	623.460	4.333.464	1.346.060	1.066.004	380.478	Marketable securities
Wesel ekspor	166.681	-	-	166.681	-	-	-	Export bills
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	976.065	976.065	-	-	-	-	-	Securities purchased under agreement to resell
Tagihan derivatif	48	48	-	-	-	-	-	Derivative receivables
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	253.265	253.265	-	-	-	-	-	Accrued interest receivables
Kredit yang diberikan	10.605.479	416.020	175.912	3.676.200	939.006	2.215.086	3.183.255	Loans
Tagihan akseptasi	166.682	-	-	166.682	-	-	-	Acceptance receivables
Penyertaan saham	6	-	-	-	-	-	6	Investment in shares of stock
Aset lain-lain: Setoran jaminan dan tagihan	21.858	-	-	-	21.858	-	-	Other assets: Guarantee deposits and receivables
Jumlah	27.014.117	8.719.965	799.372	8.343.027	2.306.924	3.281.090	3.563.739	Total
Liabilitas								Liabilities
Liabilitas segera	115.621	115.621	-	-	-	-	-	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	23.890.773	20.238.163	2.643.275	1.009.335	-	-	-	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	452.454	452.454	-	-	-	-	-	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	166.682	-	-	166.682	-	-	-	Acceptance payables
Bunga masih harus dibayar	35.100	35.100	-	-	-	-	-	Accrued interest payables
Liabilitas lain-lain	312.446	-	-	-	-	-	312.446	Other liabilities
Jumlah	24.973.076	20.841.338	2.643.275	1.176.017	-	-	312.446	Total
Aset (liabilitas) bersih	2.041.041	(12.121.373)	(1.843.903)	7.167.010	2.306.924	3.281.090	3.251.293	Net assets (liabilities)

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Profil risiko (lanjutan)

III. Risk profile (continued)

3. Risiko likuiditas (lanjutan)

3. Liquidity risk (continued)

	2023							
	Jumlah/ Total	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 mon	1 bulan sampai dengan 3 bulan/ 1 month until 3 months	3 bulan sampai dengan 1 tahun/ 3 months until 1 year	1 tahun sampai dengan 2 tahun/ 1 year until 2 years	2 tahun sampai dengan 5 tahun/ 2 years until 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
Aset								Assets
Kas	369.134	369.134	-	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.658.276	2.658.276	-	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	338.300	338.300	-	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	711.075	279.959	431.116	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	5.788.096	-	753.716	2.299.380	1.718.279	671.817	344.904	Marketable securities
Wesel ekspor	131.863	-	-	131.863	-	-	-	Export bills
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	125.469	-	-	125.469	-	-	-	Securities purchased under agreement to resell
Tagihan derivatif	35	35	-	-	-	-	-	Derivative receivables
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	326.422	326.422	-	-	-	-	-	Accrued interest receivables
Kredit yang diberikan	12.147.369	1.385.346	33.573	3.775.206	341.063	2.980.659	3.631.522	Loans
Tagihan akseptasi	131.863	-	-	131.863	-	-	-	Acceptance receivables
Penyertaan saham	6	-	-	-	-	-	6	Investment in shares of stock
Aset lain-lain:								Other assets:
Setoran jaminan dan tagihan	38.332	-	-	-	38.332	-	-	Guarantee deposits and receivables
Jumlah	22.766.240	5.357.472	1.218.405	6.463.781	2.097.674	3.652.476	3.976.432	Total
Liabilitas								Liabilities
Liabilitas segera	95.711	95.711	-	-	-	-	-	Obligations due immediately
Simpanan nasabah	20.631.701	18.362.230	1.773.840	495.631	-	-	-	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	336.958	336.958	-	-	-	-	-	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	1.057	1.057	-	-	-	-	-	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	131.863	-	-	131.863	-	-	-	Acceptance payables
Bunga masih harus dibayar	26.693	26.693	-	-	-	-	-	Accrued interest payables
Liabilitas lain-lain	378.007	-	-	-	-	-	378.007	other liabilities
Jumlah	21.601.990	18.822.649	1.773.840	627.494	-	-	378.007	Total
Aset (liabilitas) bersih	1.164.250	(13.465.177)	(555.435)	5.836.287	2.097.674	3.652.476	3.598.425	Net assets (liabilities)

Selanjutnya, Bank juga telah melakukan *stress testing* dalam beberapa analisis skenario dengan perkiraan kondisi terburuk yang mungkin terjadi dan analisis *Contingency Funding Plan* secara periodik.

Pemantauan harian maupun secara periodik terhadap transaksi-transaksi yang berkaitan dengan risiko likuiditas telah dilakukan Bank secara konsisten untuk terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik.

Furthermore, the Bank has conducted *stress testing* in some scenario analysis by estimating of the worst case scenario and analysis of *Contingency Funding Plan* periodically.

Daily and periodically monitoring of the transactions relating to the Bank's liquidity risk has been performed consistently to establish good corporate governance.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

4. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Bank menerapkan manajemen risiko operasional dengan sasaran memastikan bahwa Bank telah melakukan proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko serta dilakukan pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaannya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan akhir memaksimalkan manfaat dari suatu produk/layanan atau proses transaksi/aktivitas dengan potensi risiko operasional yang telah diperhitungkan.

Pencatatan data kerugian dan potensi kerugian berperan penting dalam pengelolaan dan kalkulasi risiko operasional. Bank telah melakukan pengelolaan pencatatan data kerugian dan potensi kerugian yang terjadi pada Satuan Kerja Operasional (*Risk taking unit*) secara periodik melalui aplikasi *Operational Risk Management* (ORM) yang telah diimplementasikan secara online di seluruh cabang dan unit kerja.

Pengelolaan data kerugian tersebut sebagai salah satu data input dalam penilaian parameter Profil Risiko Operasional yang dipetakan sesuai frekuensi kejadian dan dampaknya.

Pemantauan terhadap perkembangan Profil Risiko Operasional dilakukan melalui identifikasi faktor-faktor penyebab kerugian operasional yang terjadi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Operasional terkait dalam memitigasi kejadian risiko tersebut di masa mendatang.

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank atas Profil Risiko Operasional dan pelaksanaan manajemen risiko dilakukan melalui rapat Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko yang dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan Bank.

Bank telah melakukan pengukuran risiko operasional selama tahun berjalan dengan menggunakan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) dengan berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Standar bagi Bank Umum.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

4. Operational risk

Operational risk is the risk due to inadequate and/or failed internal processes, human error, system failure, and/or the existence of external events affecting the Bank's operations.

The Bank implements operational risk management with the objective to ensure that Bank has performed a risk management process that includes risk identification, risk assessment, risk evaluation, risk mitigation, and monitoring and reporting on the implementation. It is performed with the ultimate goal to maximize the benefits of a product/service or transaction/activity process with the potential operational risks that have been calculated.

Recording of data loss and potential loss plays an important role in the operational risk management and calculation. The Bank has conducted data loss records management and the potential loss that occurred in the Operations Unit (Risk taking unit) periodically through Operational Risk Management (ORM) applications, which have been implemented online in all branches and unit.

Management of data loss is one of the input data in the assessment of Operational Risk Profile parameters which is mapped in accordance to its frequency of occurrence and impact.

Monitoring the development of Operational Risk Profile through the identification of the causal factors operating losses incurred and provide recommendations to the Risk taking units relating to mitigate risk events in the future.

Monitoring by the Bank's Boards of Commissioners and Directors on the Operational Risk Profile and risk management is conducted through Risk management Committee and Risk Monitoring Committee meetings that are conducted periodically based on the Bank's needs.

The Bank has measured operational risk during the current year using the Basic Indicator Approach (BIA) method with reference to the Financial Services Authority Regulation Number 11/PJOK.03/2016 concerning Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks and Bank Indonesia Circular Letter No. 6/SEOJK.03/2020 concerning Calculation of Risk-Weighted Assets (RWA) for Operational Risk using Standards for Commercial Banks.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

4. Risiko operasional (lanjutan)

Selain kebijakan dan metode tersebut di atas, Bank juga telah menerapkan upaya yang terus menerus dikembangkan untuk membangun lingkungan budaya risiko yang mendukung pelaksanaan manajemen risiko operasional. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan pada tiga lini pertahanan (*three lines of defense*) yaitu pemberdayaan unit bisnis sebagai lini pertahanan pertama, pembentukan fungsi manajemen risiko operasional sebagai lini pertahanan kedua dan koordinasi kerja dengan Internal Audit sebagai lini pertahanan ketiga.

5. Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Kegagalan Bank dalam menjaga reputasinya di mata masyarakat dapat menimbulkan pandangan maupun persepsi negatif masyarakat terhadap Bank. Apabila risiko ini dihadapi oleh Bank, maka dalam waktu singkat dapat terjadi penurunan atau hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Bank yang pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan usaha dan volume aktivitas Bank.

Corporate Secretary Bank setiap hari melakukan monitoring terhadap pemberitaan media untuk memantau publikasi negatif atau keluhan nasabah yang muncul di media. Sedangkan monitoring secara *Bank wide* atas keluhan nasabah yang disampaikan langsung ke Bank dilakukan oleh *SubDit Service Quality* untuk kemudian ditindaklanjuti penyelesaiannya melalui cabang terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang muncul di media selanjutnya dibuatkan klarifikasi dan tanggapan sesuai dengan langkah terbaik yang ditempuh Bank.

Upaya mitigasi risiko reputasi juga dilakukan saat Bank meluncurkan produk/layanan/program baru dengan menganalisis risiko reputasi yang mungkin timbul dan strategi mengantisipasi risiko tersebut. Demikian pula, untuk informasi yang material atau yang penting untuk diketahui oleh nasabah, *Corporate Secretary* juga menyiapkan panduan untuk para *frontliner* dan *spokespersons* agar mereka bisa menjelaskan informasi tersebut secara benar dan proporsional kepada nasabah Bank.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

4. Operational risk (continued)

In addition to policies and methods above, the Bank has also implemented an ongoing effort to build a cultural environment that support the implementation of operational risk management. This is done through the strengthening of the three lines of defense such as empower the business unit as a first line of defense, the establishment of operational risk management function as a second line of defense and coordination with Internal Audit as a third line of defense.

5. Reputation risk

Reputation risk is the risk related to the decreasing level of stakeholders' confidence arising from the negative perception on the Bank.

The Bank's failure in protecting its reputation in the public's perception may result in negative view as well as perception by the public towards the Bank. If the Bank faces this risk then in the short run, the Bank may lose the customer's trust that will ultimately result in a negative impact to the Bank's income and volume of activities.

The Bank's *Corporate Secretary* monitors the news media on a daily basis for any negative publicity or customer complaints that appeared in the media. While monitoring the Bank's wide customer complaints submitted directly to the Bank is conducted by *SubDit Service Quality* to be followed-up through the related branch in accordance with the relevant regulations. For negative reporting and customer complaints that appear in the media would be clarified and responded in accordance with the best effort taken by the Bank.

Efforts to mitigate reputational risk is also done when the Bank launched new products/ services/ program by analyzing reputational risks that may arise and how to anticipate risk. Similarly for the material or important information to be known by the customer, *Corporate Secretary* also prepared a guide to the *frontliner* and *spokespersons* for them to explain the information correctly and proportional to its customers.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

6. Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis tersebut antara lain disebabkan adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan dokumen yang tidak sempurna.

Sebagai sebuah perusahaan yang berdiri dalam yuridiksi hukum Indonesia, Bank harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator industri perbankan di Indonesia dan instansi berwenang lainnya terkait dengan Bank. Selain itu, Bank juga harus mengikuti segala bentuk peraturan perundangan yang berlaku di masyarakat baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Bank. Kegagalan Bank dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku dapat mengakibatkan pada timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Bank.

Apabila tuntutan-tuntutan hukum yang diajukan kepada Bank memiliki nilai yang material, maka hal tersebut dapat memberikan dampak secara langsung terhadap kinerja keuangan Bank.

Untuk memitigasi risiko hukum yang mungkin timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, Bank memiliki Biro Hukum. Biro tersebut memiliki peranan antara lain:

- 1) Melakukan analisa hukum atas produk dan/atau aktivitas baru serta membuat standar dokumen hukum yang terkait dengan produk dan/atau aktivitas tersebut;
- 2) Memberikan analisis/advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi;
- 3) Memberikan advis atas eksposur hukum akibat perubahan ketentuan atau peraturan;
- 4) Memeriksa segala perjanjian yang akan dibuat antara Bank dengan pihak ketiga;
- 5) Melakukan pemeriksaan berkala atas perjanjian yang telah dibuat; dan
- 6) Memantau risiko hukum yang ada di seluruh cabang dan unit kerja Bank.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

6. Legal risk

Legal risk is the risk related to legal claims and/or weakness in the legal aspect. Such weakness in legal aspect is caused, among others, by the lack of the supporting legislation or weakness of the contracts such as incomplete requirements for a valid contract and imperfect document contract.

As a company that established under the jurisdiction of the laws of Indonesia, the Bank shall always be subject to all regulations issued by Bank Indonesia and Financial Services Authority as the regulator of the banking industry in Indonesia and others authorities related to the Bank. In addition, the Bank also must apply any rules and laws applicable in society that relevant either directly or indirectly to the business activities of the Bank. Incompliance to the law and regulation may result in lawsuits that will be addressed to the Bank.

When lawsuits that are filed to the Bank have material impact, then they can provide a significant affect on the financial performance of the Bank.

To mitigate the legal risks that may arise from lawsuits or juridical weakness, the Bank has the General Legal Division. This Division has roles among others:

- 1) Performing legal analysis on the new products and/or activities as well as create a standard legal documents related to the products and activities;*
- 2) Providing analysis/legal advice to all employees at every level of the organization;*
- 3) Providing advice on the legal exposure due to changes in rule or regulation;*
- 4) Checking any agreements that will be made between the Bank and third parties;*
- 5) Performing periodic inspections on the agreement that has been made; and*
- 6) Monitoring the legal risks in the overall Bank's branches.*

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

6. Risiko hukum (lanjutan)

Dengan adanya biro tersebut, maka Bank memiliki kebijakan hukum dan standar dokumen hukum baku yang terkait dengan produk atau fasilitas perbankan yang ditawarkan oleh Bank kepada masyarakat, dimana kebijakan hukum dan standar dokumen hukum dimaksud dibuat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan kepentingan aspek yuridis dari Bank. Selain itu, Biro Hukum Bank juga memiliki fungsi litigasi yang salah satu tugasnya adalah menangani setiap permasalahan hukum yang terkait dengan litigasi agar risiko hukum yang mungkin timbul dapat diminimalisasi.

Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan memantau perkembangan kasus-kasus hukum yang terjadi dan mengambil *lesson learnt* dari kasus-kasus tersebut. Penanganan kasus hukum yang dilakukan pada Bank senantiasa memperhitungkan potensi kerugian baik atas penyelesaian kasus secara musyawarah mufakat/damai ataupun melalui jalur pengadilan. Bank juga memberikan perhatian khusus atas kasus hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian secara signifikan.

7. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri perbankan, Bank diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun Pemerintah. Selain itu, Bank juga wajib tunduk kepada beberapa ketentuan lainnya seperti: peraturan yang mengatur Penjaminan Simpanan, Perseroan Terbatas, Perpajakan dan peraturan di bidang pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek).

Pada umumnya, risiko kepatuhan melekat pada sebuah perseroan terbatas yang terkait erat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, yang mengatur kewajiban Bank sebagai sebuah lembaga perbankan, seperti: risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM); Kualitas Aktiva Produktif; Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN); Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); penerapan tata kelola yang baik (GCG); dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank dapat berdampak buruk terhadap kelangsungan usaha Bank.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

6. Legal risk (continued)

Through this division, the Bank has legal policies and standard legal documents related to the product or banking facilities offered by the Bank to public, where such legal policy and standard documents are created with reference to the provisions of applicable Laws and considering the aspects jurisdiction interest of the Bank. In addition, the Bank's Legal Division has the litigation function by handling all legal issues related to litigation in order to minimize legal risks that may arise.

The legal risk is also conducted by monitoring the development of legal cases and take 'lessons learnt' principle from those cases. The management of legal cases conducted by the Bank at all time calculating potential loss, either through settlement or court. The Bank also pays special attention to legal cases which potentially may create significant loss to the Bank.

7. Compliance risk

Compliance risk is the risk resulting from the failure of the Bank in fulfilling and/or implementing the prevailing laws and regulations.

In engaging in the banking industry services, the Bank is required to always comply with the banking regulations issued by Bank Indonesia, Financial Service Authority and the Government. In addition, the Bank is also required to comply with several other rules such as; regulation on Deposit Guarantee Program, Limited Liability Company, Taxation and Capital Market regulations (Financial Services Authority and Stock Exchange).

In general, the compliance risk is embedded in the limited liability company which is related to the prevailing laws and regulations and other regulations, which regulate the Bank's responsibility as a banking institution, such as: credit risk related to Capital Adequacy Ratio (CAR) regulations; Earning Assets Quality; Allowance for Impairment Losses (CKPN); Legal Lending Limit (LLL); Good Corporate Governance (GCG); and other risks related to certain regulations. The inability of the Bank to follow and comply with all laws and regulations related to the Bank's business activities may affect the continuity of the Bank.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

III. Profil risiko (lanjutan)

7. Risiko kepatuhan (lanjutan)

Bank melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan memberikan advis kepada unit bisnis dan unit operasional dalam hal pengembangan produk dan/atau aktivitas baru dan secara aktif melakukan penilaian terhadap kebijakan Pedoman dan Prosedur Internal yang dimiliki oleh Bank untuk memastikan bahwa seluruh peraturan eksternal telah diakomodasi sedemikian rupa dan selanjutnya untuk dipatuhi dalam pelaksanaannya.

Bank memantau perkembangan eksposur risiko kepatuhan setiap bulan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Direksi melalui Laporan Profil Risiko Bank. Bank juga menetapkan strategi mitigasi risiko atas setiap kejadian risiko kepatuhan yang perlu mendapat perhatian khusus.

Selanjutnya, Bank memiliki perangkat media online untuk menyampaikan sosialisasi semua peraturan yang berlaku kepada seluruh jajaran Bank, sehingga setiap unit kerja terkait dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan Bank.

8. Risiko stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Ketidakmampuan Bank dalam melakukan penyusunan strategi yang tepat dapat menimbulkan kegagalan bisnis Bank di masa yang akan datang.

Bank melakukan identifikasi dan kuantifikasi risiko stratejik sejak awal penyusunan rencana bisnis Bank dengan berpedoman pada visi, misi, strategi dan kemampuan Bank.

Bank mengelola risiko stratejik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif di lingkungan Komite Manajemen untuk disampaikan ke Direksi, yang turut mempengaruhi dan berdampak pada langkah-langkah bisnis yang akan diambil dalam kerangka kebijakan dan arah yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Bank memantau perkembangan eksposur risiko stratejik setiap bulan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi melalui Laporan Profil Risiko Bank. Terhadap kejadian risiko stratejik yang perlu mendapat perhatian khusus, telah ditetapkan strategi mitigasi risikonya oleh Bank.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

III. Risk profile (continued)

7. Compliance risk (continued)

The Bank identifies and manages compliance risk early by providing assistance to the business units and operational units in developing new products and/or activities and actively performs an assessment of Internal Guidelines and Procedures owned by the Bank to ensure that all external regulations have been applied properly in such manner and subsequently adhered to in practice.

The Bank monitors compliance risk exposure progress monthly and submits it to the Boards of Commissioners and Directors through the Bank's Risk Profile Report. The Bank also sets a risk mitigation strategy for each event of compliance risks that need special attention.

Furthermore, the Bank has the tools of online media to socialize all the rules applied to all levels in the Bank, hence each related unit can carry out its duties and responsibilities in accordance to the Bank's regulations.

8. Strategic risk

Strategic risk is the risk due to inappropriateness in the decision and/or execution of a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment.

Inability of the Bank to undertake the preparation of a proper strategy may result in the failure of the Bank's business in the future.

The Bank identifies and quantifies strategic risk from the beginning of business plan preparation based on its vision, mission, strategy and capability.

The Bank manages strategic risk through the process of considerations and collective decision-making and comprehensive in the Management Committee to be submitted to the Directors, that influence and impact the business steps to be taken in the policy framework and direction that has been set.

Furthermore, the Bank monitors the development of strategic risk exposure monthly and submits it to the Boards of Commissioners and Directors through the Bank's Risk Profile Report. On the event of strategic risk that need special attention, the Bank has set up the related risk mitigation strategy.

45. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan disajikan per kategori dari instrumen keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

	2024	
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value
<u>Aset keuangan:</u>		
Kas	769.354	769.354
Giro pada Bank Indonesia	3.024.920	3.024.920
Giro pada bank lain – bersih	349.430	349.430
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	2.177.464	2.177.464
Efek-efek – bersih	8.501.562	8.501.562
Wesel ekspor	166.681	166.681
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	976.063	976.063
Tagihan derivatif	48	48
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	253.265	253.265
Kredit yang diberikan – bersih	10.073.572	10.073.572
Tagihan akseptasi	166.025	166.025
Penyertaan saham	6	6
Aset lain-lain:		
Setoran jaminan dan tagihan	21.858	21.858
Jumlah aset keuangan	26.480.248	26.480.248
<u>Liabilitas keuangan:</u>		
Liabilitas segera	115.621	115.621
Simpanan nasabah	23.890.773	23.890.773
Simpanan dari bank lain	452.454	452.454
Liabilitas efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	499.281	499.281
Liabilitas derivatif	-	-
Liabilitas akseptasi	166.682	166.682
Bunga masih harus dibayar	35.100	35.100
Liabilitas lain-lain	312.446	312.446
Pinjaman subordinasi	200.000	200.000
Jumlah liabilitas keuangan	25.672.357	25.672.357

45. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The tables below summarize the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities presented per category of financial instruments. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2024 and 2023, and not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after this date.

<u>Financial assets:</u>
Cash
Current accounts with Bank Indonesia
Current accounts with other banks – net
Placements with Bank Indonesia and other banks – net
Marketable securities – net
Export bills
Securities purchased under agreement to resell
Derivative receivables
Accrued interest receivables
Loans – net
Acceptance receivables
Investment in shares of stock
Other assets:
Guarantee deposits and receivables
Total financial assets
<u>Financial liabilities:</u>
Obligations due immediately
Deposits from customers
Deposits from other banks
Securities sold under agreement to repurchase liabilities
Derivative payables
Acceptance payables
Accrued interest payables
Other liabilities
Subordinated loan
Total financial liabilities

	2023	
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value
<u>Aset keuangan:</u>		
Kas	369.134	369.134
Giro pada Bank Indonesia	2.658.276	2.658.276
Giro pada bank lain – bersih	338.297	338.297
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bersih	711.075	711.075
Efek-efek – neto	5.787.414	5.787.414
Wesel ekspor	131.863	131.863
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	125.469	125.469
Tagihan derivatif	35	35
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	326.422	326.422
Kredit yang diberikan – bersih	11.636.733	11.636.733
Tagihan akseptasi	131.362	131.362
Penyertaan saham	6	6
Aset lain-lain:		
Setoran jaminan dan tagihan	38.332	38.332
Jumlah aset keuangan	22.254.418	22.254.418

45. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan disajikan per kategori dari instrumen keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini. (lanjutan)

	2023	
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value
Liabilitas keuangan:		
Liabilitas segera	95.711	95.711
Simpanan nasabah	20.631.701	20.631.701
Simpanan dari bank lain	336.958	336.958
Liabilitas efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-
Liabilitas derivatif	1.057	1.057
Liabilitas akseptasi	131.863	131.863
Bunga masih harus dibayar	26.693	26.693
Liabilitas lain-lain	378.007	378.007
Pinjaman subordinasi	200.000	200.000
Jumlah liabilitas keuangan	21.801.990	21.801.990

- a. Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan pendapatan bunga yang masih akan diterima dan aset lain-lain.

Nilai tercatat dari giro pada Bank Indonesia dan bank lain dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap pendapatan bunga yang masih akan diterima ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah 1 (satu) tahun sehingga nilai tercatat dari pendapatan bunga yang masih akan diterima adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Nilai wajar setoran jaminan diasumsikan sama dengan nilai terutangnya karena tidak mempunyai persyaratan pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk dikembalikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.

- b. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Nilai tercatat dari penempatan dan simpanan *overnight* dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah 1 (satu) tahun, sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

45. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The tables below summarize the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities presented per category of financial instruments. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2024 and 2023, and not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after this date. (continued)

	Financial liabilities:
	Obligations due immediately
	Deposits from customers
	Deposits from other banks
	Securities sold under agreement to repurchase liabilities
	Derivative payables
	Acceptance payables
	Accrued interest payables
	Other liabilities
	Subordinated loan
	Total financial liabilities

- a. Current accounts with Bank Indonesia and other banks, accrued interest receivables and other assets.

The carrying amount of floating rate current accounts with other banks and Bank Indonesia is a reasonable approximation of fair value.

The estimated fair value of accrued interest income is based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is less than 1 (one) year, the carrying amount of accrued interest income is a reasonable approximation of fair value.

The fair value of security deposits are assumed to be the same as their original principal amounts because they have no fixed repayment terms although they are not expected to be settled within 12 (twelve) months after the reporting period.

- b. Placements with Bank Indonesia and other banks

The carrying amount of floating rate placements and overnight deposits is a reasonable approximation of fair value.

The estimated fair value of fixed interest bearing deposits is based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is below 1 (one) year, the carrying amount of fixed interest bearing deposits is a reasonable approximation of fair value.

45. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

c. Efek-efek

Nilai wajar untuk efek ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/ pedagang efek (*dealer*).

d. Wesel ekspor

Estimasi nilai wajar terhadap wesel ekspor ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari wesel ekspor adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

e. Kredit yang diberikan

Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan kredit yang diberikan dengan jangka pendek dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan suku bunga pasar saat ini.

Nilai tercatat dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan nilai tercatat atas kredit jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

f. Instrumen derivatif

Nilai wajar atas instrumen derivatif yang dinilai menggunakan teknik penilaian dengan menggunakan komponen yang dapat diamati di pasar terutama adalah *swap* suku bunga, *swap* mata uang dan kontrak pertukaran mata uang. Teknik penilaian yang paling banyak digunakan meliputi model penilaian *forward* dan *swap* yang menggunakan perhitungan nilai kini. Model tersebut menggabungkan berbagai komponen yang meliputi kualitas kredit dari *counterparty*, nilai *spot* dan kontrak berjangka serta kurva tingkat suku bunga.

g. Liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, bunga masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

Estimasi nilai wajar simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga, adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap, bunga masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah 1 (satu) tahun sehingga nilai tercatat dari simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, bunga masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

45. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

c. Marketable securities

The fair value for marketable securities is based on market prices or broker/dealer price quotations.

d. Export bills

The estimated fair value of export bills is determined based on discounted cash flows using money market interest rates that apply to debt with similar credit risk and remaining maturity. Because the remaining maturity is less than one year, the carrying amount of the export bills is a reasonable estimate of fair value.

e. Loans

Generally, the Bank's loan portfolio consists of loans with variable interest rate and short-term loans with fixed interest rate. Loans are stated at amortized cost. The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates.

The carrying amounts of variable rate loans and short-term fixed rate loans are the reasonable approximation of their fair values.

f. Derivative instruments

The fair values of derivative instruments valued by valuation techniques using components which can be observed in the market, primarily are interest rate swaps, currency swaps and currency exchange contracts. Most widely used valuation techniques include forward and swap valuation models which use the present value calculation. The models incorporate various components which include the credit quality of the counterparty, spot value and future contracts and interest rate curve.

g. Obligations due immediately, deposits from customers, deposits from other banks, accrued interest expenses and other liabilities.

The estimated fair value of deposits with no stated maturity, which includes non-interest bearing deposits, is the amount repayable on demand.

The estimated fair value of fixed interest-bearing deposits, accrued interest expenses and other liabilities not quoted in an active market is based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity. Since the maturity is below 1 (one) year, the carrying amount of deposits from customers, deposits from other banks and other liabilities is a reasonable approximation of fair value.

45. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

- h. Liabilitas efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan kurva yield terkini yang tepat untuk sisa periode jatuh temponya.

- i. Pinjaman subordinasi

Nilai wajar dari pinjaman subordinasi dihitung menggunakan arus kas yang didiskonto berdasarkan suku bunga pasar.

Tabel di bawah ini menunjukkan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar yang dikelompokkan berdasarkan hirarki nilai wajar:

45. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

- h. Securities sold under agreement to repurchase liabilities

Their aggregate fair values are based on discounted cash flow model using current yield curve appropriate for the remaining term to maturity.

- i. Subordinated loan

The fair value of subordinated loan is calculated using discounted cash flows using market rate.

The tables below show the financial instruments measured at fair value Banked according to the fair value hierarchy:

2024					
Nilai wajar/ Fair value					
Nilai Tercatat/ Carrying Value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3		
Aset keuangan					Financial assets
Efek-efek :					Marketable securities
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
- Biaya perolehan diamortisasi	6.509.305	6.509.305	-	-	Amortized cost -
- Nilai wajar melalui komprehensif lain	734.578	734.578	-	-	Fair value through other -
- Nilai wajar melalui laba rugi	775.077	775.077	-	-	comprehensive income
Kredit yang diberikan	10.350.610	-	-	10.350.610	Fair value through profit or loss -
					Loans
<u>Mata Uang Asing</u>					<u>Foreign Currency</u>
- Biaya perolehan diamortisasi	131.991	131.991	-	-	Amortized cost -
- Nilai wajar melalui komprehensif lain	145.467	145.467	-	-	Fair value through other -
- Nilai wajar melalui laba rugi	206.358	206.358	-	-	comprehensive income
Kredit yang diberikan	254.869	-	-	254.869	Fair value through profit or loss
					Loans
Jumlah	19.108.255	8.502.776	-	10.605.479	Total
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Nilai wajar melalui laba rugi:					Fair value through profit or loss:
- Liabilitas derivatif	-	-	-	-	Derivatives payable -
- Pinjaman subordinasi	200.000	-	-	200.000	Subordinated loan -
Jumlah	200.000	-	-	200.000	Total

45. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar yang dikelompokkan berdasarkan hirarki nilai wajar: (lanjutan)

2023			
Nilai wajar/ Fair value			
Nilai Tercatat/ Carrying Value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3
Aset keuangan			
Efek-efek :			
<u>Rupiah</u>			
- Biaya perolehan diamortisasi	4.161.140	4.161.140	-
- Nilai wajar melalui komprehensif lain	1.088.725	1.088.725	-
- Nilai wajar melalui laba rugi	307.164	307.164	-
Kredit yang diberikan	11.631.527	-	11.631.527
<u>Mata Uang Asing</u>			
- Biaya perolehan diamortisasi	77.914	77.914	-
- Nilai wajar melalui komprehensif lain	153.153	153.153	-
Kredit yang diberikan	515.842	-	515.842
Jumlah	17.935.465	5.788.096	12.147.369
Liabilitas keuangan			
Nilai wajar melalui laba rugi:			
- Liabilitas derivatif	1.057	-	1.057
- Pinjaman subordinasi	200.000	-	200.000
Jumlah	201.057	-	201.057

Financial assets
Marketable securities
Rupiah
Amortized cost –
Fair value through other –
comprehensive income
Fair value through profit or loss –
Fair value through profit or loss

Foreign Currency
Amortized cost –
Fair value through other –
comprehensive income
Loans
Total

Financial liabilities
Fair value through profit or loss:
Derivatives payable –
Subordinated loan –
Total

46. MANAJEMEN MODAL

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, dan kepercayaan pasar, memastikan struktur permodalan yang efisiensi dan memenuhi ketentuan permodalan yang ditetapkan oleh regulator. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham dan keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Bank menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini dan hasil dari metode *stress test*. Bank senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko melalui proses perencanaan modal dan *stress test*, begitu pula dengan usaha yang didasarkan pada permodalan dan persyaratan likuiditas Bank.

Kebutuhan permodalan Bank juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data analisis.

Rencana Permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dan Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang optimal.

45. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The tables below show the financial instruments measured at fair value Banked according to the fair value hierarchy: (continued)

46. CAPITAL MANAGEMENT

The Bank's capital management objectives is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investors, depositors, and market confidence, to ensure the efficiency of the capital structure and meet the capital requirements set by regulators. In managing its capital, the Bank considers factors such as providing optimal capital rate of return to shareholders and safety provided by a sound capital position.

The Bank undertakes Capital Planning based on assessment and review of the capital situation in terms of the legal capital adequacy requirement, combined with assessment of economic outlooks and stress test result. The Bank will continue to link financial and capital adequacy goals to risk appetite through the capital planning process and stress testing method as well as assess the businesses based on the Bank's capital and liquidity requirements.

The capital adequacy of the Bank are also discussed and managed on a routine basis supported by data analysis.

Capital requirement is prepared by Board of Directors as part of Bank's business plan and is approved by the Board of Commissioners. This requirement to ensure minimum capital and an optimum of capital structure.

46. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dimana modal untuk risiko kredit terdiri dari modal inti (Modal Inti Utama/ *Common Equity* Tier 1 - CET 1 dan Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 - AT 1) dan modal pelengkap.

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dihitung berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan yang mencerminkan berbagai tingkatan risiko yang terkait dengan aset dan eksposur yang tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan peraturan OJK, Bank diharuskan untuk mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam mengukur ATMR.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan oleh regulator untuk memantau permodalan Bank. Pendekatan OJK untuk pengukuran ini terutama didasarkan pada pemantauan hubungan antara profil risiko Bank dengan ketersediaan modal. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- 8% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1
- 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2
- 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3
- 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5

Bank telah mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan KPMM dan ATMR.

46. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

The Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) on December 31, 2024 and 2023 is calculated based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 34/POJK.03/2016 dated September 26, 2016 concerning Minimum Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks, where capital for credit risk consist of core capital (Main Core Capital/Common Equity Tier -CET 1 and Additional Core Capital/Additional Tier 1 – AT 1) and supplementary capital.

Risk-Weighted Assets (RWA) is calculated based on the requirements determined which reflect varying degrees of risk associated with the assets and exposures that are not reflected in the statement of financial position. Based on OJK regulations, the Bank is required to consider the credit risk, market risk and operational risk in measuring RWA.

Management uses capital ratio required by the regulator to monitor the Bank's capital. OJK approach to measurement is based primarily on monitoring the relationship between the risk profile of the Bank by the adequacy of capital. Banks are required to provide the appropriate minimum capital risk profile.

The capital adequacy minimum referred defined as follows:

- 8% of RSA for banks with a risk profile rating of 1*
- 9% to less than 10% of RSA for banks with a risk profile rating of 2*
- 10% to less than 11% of RSA for banks with a risk profile rating of 3*
- 11% to less than 14% of RSA for banks with a risk profile rating of 4 or 5*

Bank has complied with all capital requirements set by the regulator during the reporting period, specially with regard to the calculation of CAR and RWA.

46. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Kewajiban penyediaan modal Bank dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Komponen modal		
Modal inti		
Modal inti utama (CET 1)	3.591.911	3.584.721
Modal inti tambahan (AT 1)	-	-
Jumlah modal inti	3.591.911	3.584.721
Modal pelengkap	373.786	363.711
Jumlah modal (Catatan 41)	3.965.697	3.948.432
Aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit	13.902.911	14.519.135
Aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional	1.036.269	977.823
Aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar	105.898	321.312
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional	26,55%	25,48%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar	26,35%	24,96%
Rasio KPMM		
Rasio CET 1	23,87%	22,66%
Rasio AT 1	23,87%	22,66%
Rasio AT 2	2,48%	2,30%
Rasio total	26,35%	24,96%
Rasio minimum tier 1	6,00%	6,00%
Rasio minimum CET 1	4,50%	4,50%
KPMM minimum berdasarkan profil risiko	9,37%	9,39%

Capital component
Core capital
Common equity tier (CET 1)
Additional tier (AT 1)
Total core capital

Supplementary capital

Total capital (Note 41)

Risk weighted assets for credit risk

Risk weighted assets for operational risk

Risk weighted assets for market risk

Capital adequacy ratio (CAR) with credit and operational risk

Capital adequacy ratio (CAR) with credit, operational and market risk

CAR ratio

CET 1 ratio

AT 1 ratio

AT 2 ratio

Total ratio

Tier 1 minimum ratio

CET 1 minimum ratio

Minimum CAR based risk profile

47. RASIO ASET PRODUKTIF TERHADAP JUMLAH ASET

Tabel berikut menyajikan rasio aset produktif sebelum dikurangi penyisihan kerugian terhadap jumlah aset:

	2024	2023
Giro pada Bank Indonesia dan bank lain	11,20%	11,48%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7,23%	2,72%
Efek-efek	28,22%	22,68%
Kredit yang diberikan	35,20%	46,54%
Penyertaan saham	0,00%	0,00%
Jumlah rasio aset produktif	81,85%	83,42%

Current accounts with Bank Indonesia and other banks
Placements with Bank Indonesia and other banks
Marketable securities
Loans
Investment in shares of stock
Total earning assets ratio

48. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun di laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024:

48. ACCOUNT RECLASSIFICATION

A few accounts in the statement of financial position for the year ended December 31, 2023, have been reclassified to conform with the presentation of the statement of financial position for the year ended December 31, 2024

	31 Desember 2023			
	Sebelum reklasifikasi	Reklasifikasi	Setelah Reklasifikasi	
ASET				ASSETS
Efek-efek	5.919.277	(131.863)	5.787.414	Marketable securities
Wesel ekspor	-	131.863	131.863	Export bills

49. INFORMASI PENTING LAINNYA

49. OTHER IMPORTANT INFORMATION

	2024	2023	
Rasio aset tetap terhadap modal	53,54%	54,70%	Fixed assets to capital ratio
Rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga (LDR)	44,39%	58,88%	Loan to deposit ratio (LDR)
Rasio kredit yang tergolong <i>non-performing loans</i> (NPL) terhadap total kredit	0,77%	0,31%	Non-performing loans (NPL) to total loans ratio
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	90,32%	90,11%	Operating expenses to operating income ratio
Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,98%	1,09%	Non-performing earning assets to earning assets ratio
Rasio laba setelah pajak terhadap rata-rata aset (ROA)	0,55%	0,60%	Return on assets (ROA) ratio
Rasio laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas (ROE)	4,23%	4,24%	Return on equity (ROE) ratio
Net Interest Margin (NIM)	4,07%	5,58%	Net interest margin (NIM)

20 Laporan Tahunan
24 Annual Report

AGI BANK
ARTHA GRAHA
INTERNASIONAL



Bank Artha Graha Internasional Tbk

Gedung Artha Graha

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

T. +62 21 515 2168 | F. +62 21 515 3892 | Graha Call 0800-191-8880

www.arthagraha.com

